KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

BUKU II

LAPORAN UTAMA

CIMAHI

SALUYU NGAWANGUN JATI MANDIRI

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

WALI KOTA CIMAHI

SURAT PERNYATAAN

NOMOR: 660/2158/DLH.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

Jabatan : WALI KOTA CIMAHI

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 telah disasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan Organisasi Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lapisan masyarakat lainnya sebagai pemangku kepentingan di wilayah Kota Cimahi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Cimahi, 29 Juli 2020

WALI KOTA CIMAHI

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telp. (022) 6654274, 6641963 Fax. (022) 6654274 Website: www.cimahikota.go.id Cimahi
40513 Jawa Barat

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2020 yang merupakan laporan tentang gambaran kinerja daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen IKPLHD disusun dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020 menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response*) yang mengacu pada Pedoman Penyusunan DIKPLHD Tahun 2018. Dokumen ini terwujud dengan melibatkan pemangku kepentingan di Kota Cimahi.

Demikian dokumen ini disampaikan, saran dan masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi DIKPLHD dalam mempertimbangkan perumusan dan penerapan kebijakan dan/atau program kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang secara tidak langsung merupakan upaya penerapan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Cimahi, 29 Juli 2020

WALI KOTA CIMAHI

Ir. H. AJAY MUHAMMAD PRIATNA, M.M.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LAMPIRAN xxi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Profil Daerah I-2
1.2.1 Letak Geografis I-2
1.2.2 Penggunaan Lahan I-5
1.2.3 Hidrologi I-7
1.2.4 Topografi I-11
1.2.5 Geologi I-14
1.2.6 Klimatologi I-15
1.3 Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas I-16
1.4 Maksud dan Tujuan I-19
1.4.1 Maksud I-19
1.4.2 Tujuan I-19
1.4.3 Sasaran I-20
1.5 Ruang Lingkup I-20
BAB II ANALISIS DPSIR II-1
2.1 Tata Guna Lahan II-2
2.1.1 Driving Force II-3
2.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-3
2.1.1.2 Perda Kawasan Bandung Utara (KBU) II-4
2.1.1.3 Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung II-6
2.1.1.4 RTRW Kota Cimahi II-7

2.1.1.5 RPJMD Kota Cimahi II-9
2.1.2 Pressure II-9
2.1.2.1 Pertumbuhan Perumahan Penduduk II-9
2.1.2.2 Tumpang Tindih Penggunaan Lahan II-12
2.1.2.3 Aktivitas Industri dan Perdagangan II-13
2.1.2.4 Izin Lingkungan II-16
2.1.2.5 Peningkatan Timbulan Limbah II-16
2.1.3 State II-17
2.1.3.1 Penggunaan Lahan II-17
2.1.3.2 Tutupan Lahan Vegetasi dan Keadaan Flora Fauna II-19
2.1.3.3 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) II-21
2.1.3.4 Penurunan Muka Air Tanah II-23
2.1.3.5 Pengelolaan Limbah II-25
2.1.4 Impact II-26
2.1.4.1 Kejadian dan Bencana II-26
2.1.4.2 Kerusakan Lahan Kering II-28
2.1.4.3 Kualitas Udara dan *Airborne Diseases* II-31
2.1.4.4 Kualitas Air II-34
2.1.4.5 Kekurangan Air Bersih II-36
2.1.5 Response II-40
2.1.5.1 Penambahan RTH dan Penghijauan II-40
2.1.5.2 Pengawasan Pengelolaan Limbah Domestik dan Non Domestik II-42
2.1.5.3 Pengunaan Filter Cerobong Industri II-43
2.1.5.4 Normalisasi Sistem Drainase II-43
2.1.5.5 Pengawasan Penggunaan Air Tanah dan Konservasi Air oleh Industri II-43
2.2 Kualitas dan Kuantitas Air II-44
2.2.1 Driving Force II-45
2.2.1.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Kualitas Sungai (SK MenLHK 300/2017) II-45
2.2.1.2 Program Nasional Citarum Harum II-46

2.2.1.3 Kebijakan Pemerintah Terkait Air Minum (Permenkes 492/2010) II-46
2.2.1.4 RPJMD Kota Cimahi II-46
2.2.1.5 Pertumbuhan Penduduk II-47
2.2.2 Pressure II-47
2.2.2.1 Risiko Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan II-47
2.2.2.2 Beban Pencemar Sungai II-49
2.2.2.3 Aktivitas Industri II-51
2.2.2.4 Aktivitas Domestik II-53
2.2.2.5 Kebutuhan Air Masyarakat dan Industri II-55
2.2.2.6 Perubahan Tataguna Lahan di Hulu II-56
2.2.3 State II-57
2.2.3.1 Kualitas Air Sungai II-57
2.2.3.2 Indeks Kualitas Air II-59
2.2.3.3 Kualitas Air Tanah II-62
2.2.4 Impact II-63
2.2.4.1 Kekurangan Air II-63
2.2.4.2 Risiko Sanitasi Tinggi II-65
2.2.4.3 *Waterborne Disease* II-66
2.2.5 Response II-67
2.2.5.1 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Tanah Berkala II-67
2.2.5.2 Penurunan Beban Pencemar Sungai II-68
2.2.5.3 Penambahan Cadangan Air II-74
2.2.5.4 Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan II-75
2.3 Kualitas Udara II-76
2.3.1 Driving Force II-76
2.3.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-76
2.3.1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor II-77
2.3.1.3 RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 ..... II-77
2.3.2 Pressure II-78
2.3.2.1 Emisi Bahan Bakar II-78
2.3.2.2 Peningkatan Volume Kendaraan Bermotor II-79

2.3.3 State II-82
2.3.3.1 Kualitas Udara Ambien II-82
2.3.3.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) II-83
2.3.3.3 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) II-85
2.3.3.4 Kepadatan Lalu Lintas II-86
2.3.4 Impact II-87
2.3.4.1 Penyakit yang Diderita Masyarakat II-87
2.3.4.2 Efek Rumah Kaca II-87
2.3.5 Response II-89
2.3.5.1 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala II-89
2.3.5.2 Rekayasa Lalu Lintas II-89
2.3.5.3 Penataan Jalan II-90
2.4 Risiko Bencana II-90
2.4.1 Driving Force II-91
2.4.1.1 Pertumbuhan Penduduk dan Lahan Perumahan II-91
2.4.1.2 Daerah Berisiko Bencana Berdasarkan Topografi II-92
2.4.1.3 Cakupan Pelayanan Persampahan Kota Cimahi II-93
2.4.1.4 RPJMD Kota Cimahi II-94
2.4.1.5 Intensitas Curah Hujan II-94
2.4.2 Pressure II-95
2.4.2.1 Perubahan Tata Guna Lahan II-95
2.4.2.2 Penurunan Muka Air Tanah II-97
2.4.2.3 Kondisi Saluran Drainase II-97
2.4.2.4 Pola Konsumsi dan Kesadaran Masyarakat II-101
2.4.2.5 Timbulan Sampah Kota Cimahi II-102
2.4.2.6 Peningkatan *Run Off* II-103
2.4.2.7 Risiko Timbulan Air Limbah II-104
2.4.3 State II-105
2.4.3.1 Banjir II-105
2.4.3.2 Kekeringan II-106
2.4.3.3 Kebakaran II-108
2.4.3.4 Tanah Longsor II-109

2.4.4 Impact II-111
2.4.4.1 Dampak Bencana Banjir II-111
2.4.4.2 Dampak Bencana Kekeringan II-111
2.4.4.3 Dampak Bencana Kebakaran II-111
2.4.4.4 Dampak Bencana Tanah Longsor II-112
2.4.5 Response II-112
2.4.5.1 Response Banjir II-112
2.4.5.2 Response Kekeringan II-116
2.4.5.3 Response Kebakaran II-117
2.4.5.4 Response Tanah Longsor II-118
2.5 Perkotaan (Persampahan) II-118
2.5.1 Driving Force II-119
2.5.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-119
2.5.1.2 Tingkat Kemiskinan Masyarakat II-120
2.5.1.3 Tidak Memiliki TPPAS Mandiri II-121
2.5.1.4 Ketersediaan TPS Terbatas II-121
2.5.1.5 Perwal Jakstrada II-122
2.5.1.6 RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 ..... II-123
2.5.2 Pressure II-124
2.5.2.1 Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat II-124
2.5.2.2 Pola Kumpul-Angkut-Buang II-125
2.5.2.3 Peraturan Daerah II-125
2.5.2.4 Kelembagaan II-127
2.5.2.5 Keuangan II-128
2.5.2.6 Peran Serta Masyarakat II-129
2.5.2.7 Teknis Operasional II-130
2.5.3 State II-133
2.5.3.1 Perkiraan Timbulan Sampah II-133
2.5.3.2 Sarana dan Prasarana Persampahan II-135
2.5.4 Impact II-137
2.5.4.1 Penyakit II-137
2.5.4.2 Banjir II-139

2.5.4.3 Kualitas Air II-139
2.5.5 Response II-139
2.5.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup II-139
2.5.5.2 Strategi Pengurangan Sampah II-141
2.5.5.3 Gerakan Pungut Sampah II-149
2.5.5.4 Program Hari Organik dan Hari Anorganik (HO-HA) II-150
2.5.5.5 Kegiatan Fisik Oleh Instansi II-151
2.6 Tata Kelola II-151
2.6.1 Driving Force II-151
2.6.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-151
2.6.1.2 RTRW (Kawasan Budidaya) II-152
2.6.1.3 RPJMD Kota Cimahi II-152
2.6.2 Pressure II-153
2.6.2.1 Pendapatan Asli Daerah II-153
2.6.2.2 Regulasi Perizinan Lingkungan II-154
2.6.3 State II-154
2.6.3.1 Jumlah dan Kapasitas SDM II-154
2.6.3.2 Anggaran Pengelolaan Lingkungan hidup II-155
2.6.3.3 Implementasi Izin Lingkungan Perusahaan II-156
2.6.4 Impact II-156
2.6.4.1 Program Lingkungan Tidak Berjalan Optimal II-156
2.6.4.2 Pengaduan Masyarakat II-157
2.6.4.3 Pencemaran Lingkungan II-158
2.6.4.4 Kesehatan Masyarakat II-159
2.6.4.5 Sanksi dan Sengketa Lingkungan II-160
2.6.5 Response II-160
2.6.5.1 Kemitraan II-160
2.6.5.2 Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan II-162
2.6.5.3 Pengawasan Izin Lingkungan II-162
2.6.5.4 Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup II-163
2.6.5.5 Produk Hukum II-164

BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH III-1
3.1 Perumusan Isu Prioritas III-1
3.2 Studi Literatur III-2
3.2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi III-2
3.2.2 Rencana Strategis DLH Kota Cimahi 2018-2022 ..... III-6
3.2.3 *Sustainable Development Goals* (SDGs) III-8
3.2.4 DIKPLH Kota Cimahi Tahun 2019 ..... III-9
3.3 Analisis D-P-S-I-R Tahun 2020 ..... III-10
3.4 Penetapan Isu Potensial III-18
3.5 Kriteria Penetapan III-19
3.6 Analisis Isu Prioritas III-26
3.7 Verifikasi dan Klarifikasi III-27
3.8 Penetapan Isu Prioritas III-28
BAB IV INOVASI DAERAH IV-1
4.1 Mall Pelayanan Publik IV-2
4.2 Rekayasa Lalu Lintas IV-3
4.2.1 Jaringan Trayek Perkotaan Baru IV-3
4.2.2 Mudik Gratis IV-5
4.2.3 *Car Free Day* (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) IV-5
4.2.4 Pelaksanaan Sistem Satu Arah IV-7
4.2.5 Kawasan Tertib Lalu Lintas IV-7
4.3 Cimahi Zero Waste City IV-8
4.3.1 Siswa Bertumbler IV-10
4.3.2 HO-HA IV-10
4.3.3 KTT Bank Sampah IV-12
4.3.4 Sosialisasi Pasar Rakyat IV-13
4.4 Pentahelix IV-15
4.4.1 GNPDAS IV-16
4.4.2 Gerakan Pungut Sampah IV-18
4.4.3 Solar STBM IV-19
4.4.3.2 Goyang Gotik IV-21
4.5 Cimahi Walagri IV-22

4.5.1 Mantri Kamalir IV-22
4.5.2 Griya Plus/Rutilahu IV-23
4.6 Pelayanan Digital IV-25
4.6.1 Sitarung IV-25
4.6.2 Pengembangan Modul Sistem Informasi Lingkungan ... IV-26
4.6.3 Tandatangan Digital IV-27
4.6.4 Cimahi Reading Habbit IV-28
4.6.5 Jaringan Internet Gratis IV-29
4.6.6 Open Data Statistik IV-30
4.6.7 Sistem Inovasi Daerah IV-31
4.7 Pengembangan Varietas Lokal IV-32
4.7.1 Konservasi Durian Kamarung IV-32
4.8 Sentra Industri Pengolahan IV-33
4.9 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) IV-35
4.10 Toko Tani Indonesia Center (TTIC) IV-36
4.11 Pembangunan Sekolah Berbasis Zonasi IV-37
BAB V PENUTUP V-1
5.1 Simpulan V-1
5.2 Rencana Tindak Lanjut V-2
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Wilayah dministrasi Kota Cimahi I-4
Gambar 1.2 Luas Lahan Menurut Peruntukkannya I-5
Gambar 1.3 Peta Tata Guna Lahan Kota Cimahi I-6
Gambar 1.4 Peta Aliran Sungai Kota Cimahi I-8
Gambar 1.5 Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi I-9
Gambar 1.6 Ekoregion Kota Cimahi I-13
Gambar 1.7 Alur Perumusan Isu Prioritas I-17
Gambar 2.1 Kerangka D-P-S-I-R II-1
Gambar 2.2 Kependudukan Berdasarkan Kecamatan II-3
Gambar 2.3 *Trend* Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2019 ..... II-4
Gambar 2.4 Kawasan Bandung Utara di Kota Cimahi II-5
Gambar 2.5 Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung II-6
Gambar 2.6 Pola Ruang Kota Cimahi II-8
Gambar 2.7 Tekanan Populasi Kota Cimahi II-11
Gambar 2.8 Sebaran Kawasan Perdagangan dan Jasa II-15
Gambar 2.9 Penggunaan Lahan Utama II-18
Gambar 2.10 Ekoregion Kota Cimahi II-20
Gambar 2.11 Komposisi Luas Tutupan Vegetasi II-21
Gambar 2.12 Peta Penurunan Muka Air Tanah II-24
Gambar 2.13 Titik Lokasi Bencana Banjir Tahun 2019 ..... II-27
Gambar 2.14 Titik Lokasi Bencana Tanah Longsor Tahun 2019 ..... II-27
Gambar 2.15 Lahan Kritis II-31
Gambar 2.16 Skema Keterkaitan Penggunaan Lahan - *Airborne Diseases...* II-33
Gambar 2.17 Penyakit Terbanyak Penduduk Kota Cimahi II-34
Gambar 2.18 *Trend* Konsentrasi TSS Air Sungai Tahun 2018-2019 ..... II-35
Gambar 2.19 *Trend* Konsentrasi COD Air Sungai Tahun 2018-2019 ..... II-36

Gambar 2.20 *Trend* Konsentrasi DO Air Sungai Tahun 2018-2019 .....II-36
Gambar 2.21 Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015 .....II-38
Gambar 2.22 Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015 .....II-39
Gambar 2.23 Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015....
.....II-39
Gambar 2.24 Pemetaan Rencana Strategis dan Sebaran Penduduk Berdasarkan RTRW Kota Cimahi II-40
Gambar 2.25 Sebaran Taman Lingkungan.....II-42
Gambar 2.26 Kota Cimahi dan DAS Sungai Citarum II-45
Gambar 2.27 Area Risiko Pengelolaan Persampahan Kota Cimahi II-48
Gambar 2.28 Area Risiko Pengelolaan Air Limbah Kota Cimahi II-49
Gambar 2.29 Daya Tampung dan Beban Pencemar Eksisting DAS Citarum
.....II-50
Gambar 2.30 Sebaran Industri II-51
Gambar 2.31 Beban Limbah Industri.....II-52
Gambar 2.32 Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air
.....II-53
Gambar 2.33 Persentase Jumlah RT Berdasarkan Tempat Pembuangan Limbah II-54
Gambar 2.34 Potensi Beban Pencemar Sektor Domestik (kg/hari) II-55
Gambar 2.35 Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi II-56
Gambar 2.36 Keterkaitan Nilai Kualitas Air II-61
Gambar 2.37 Perbandingan Metode Indeks Pencemar dan Indeks Kualitas Air II-61
Gambar 2.38 Kondisi Air Tanah Berdasarkan Lokasi *Sampling* II-62
Gambar 2.39 Ketersediaan Air Kota Cimahi II-64
Gambar 2.40 Selisih Ketersediaan Air Kota Cimahi II-64
Gambar 2.41 Pemetaan Area Risiko Sanitasi Kota Cimahi II-65
Gambar 2.42 Pemetaan Area Risiko Air Limbah Kota Cimahi.....II-66
Gambar 2.43 Penyakit Umum yang Diderita II-67
Gambar 2.44 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Domestik II-70

Gambar 2.45 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Peternakan II-71
Gambar 2.46 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Pertanian II-72
Gambar 2.47 Persentase Alokasi Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Industri II-73
Gambar 2.48 Ekoregion Provinsi Jawa Barat II-74
Gambar 2.49 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi II-77
Gambar 2.50 Tambahan Bahan Bakar Sektor Industri di Kota Cimahi .. II-79
Gambar 2.51 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Raya Kerkof Hari Kerja (06.00-21.00) II-80
Gambar 2.52 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Raya Kerkof Hari Libur (06.00-21.00) II-80
Gambar 2.53 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Leuwi Gajah Hari Kerja (06.00-21.00) II-80
Gambar 2.54 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Leuwi Gajah Hari Libur (06.00-21.00) II-81
Gambar 2.55 Komposisi kendaraan dari Internal ke Eksternal II-81
Gambar 2.56 Komposisi Kendaraan dari Eksternal ke Internal II-82
Gambar 2.57 ISPU CO dalam grid 30" x 30" II-85
Gambar 2.58 ISPU SO_2 dalam grid 30" x 30" II-85
Gambar 2.59 ISPU NO_x dalam grid 30" x 30" II-85
Gambar 2.60 ISPU PM_{10} dalam grid 30" x 30" II-85
Gambar 2.61 Kepadatan Lalu Lintas di Jl. Amir Mahmud II-86
Gambar 2.62 Penyakit Terbanyak Penduduk Kota Cimahi II-87
Gambar 2.63 Lokasi Sesar Lembang II-93
Gambar 2.64 Curah Hujan Rata-rata Tahun 2019 ..... II-95
Gambar 2.65 *Trend* Luas Lahan Permukiman Tahun 2012-2019 ..... II-96
Gambar 2.66 Sempitnya Saluran Drainase Akibat Tekanan Penggunaan Lahan (Kelurahan Citeureup) II-99
Gambar 2.67 Kondisi Saluran Drainase di Salah Satu Titik Kelurahan Melong II-99

Gambar 2.68 Kondisi Saluran Drainase di Salah Satu Titik Kelurahan Cigugur Tengah II-99
Gambar 2.69 Pemetaan Area Risiko Drainase Kota Cimahi II-100
Gambar 2.70 Banjir di Kelurahan Melong Tahun 2019 ..... II-100
Gambar 2.71 Pemetaan Area Risiko Persampahan Kota Cimahi II-103
Gambar 2.72 Pemetaan Area Risiko Air Limbah Kota Cimahi II-104
Gambar 2.73 Pemetaan Kejadian Banjir Tahun 2019 ..... II-106
Gambar 2.74 Pemetaan Kejadian Kekeringan Tahun 2019 ..... II-108
Gambar 2.75 Pemetaan Kejadian Kebakaran Tahun 2019 ..... II-109
Gambar 2.76 Pemetaan Kejadian Tanah Longsor Tahun 2019 ..... II-110
Gambar 2.77 TPA yang Digunakan Kota Cimahi II-121
Gambar 2.78 Komposisi Sampah Kota Cimahi II-124
Gambar 2.79 Proporsi Timbulan Sampah yang Terangkut ke TPA Sarimukti II-134
Gambar 2.80 Peta Timbulan Sampah Kota Cimahi II-135
Gambar 2.81 *Composting Plant* di Kota Cimahi II-149
Gambar 2.82 Dokumentasi GPS II-150
Gambar 2.83 Status Pengaduan Masyarakat II-157
Gambar 2.84 Penyakit Utama Penduduk Kota Cimahi II-160
Gambar 2.85 Alur Peningkatan Kapasitas SDM II-162
Gambar 3.1 Alur Perumusan Isu Prioritas III-1
Gambar 3.2 17 Sustainable Development Goals III-8
Gambar 3.3 Isu Lingkungan Prioritas Kota Cimahi III-10
Gambar 3.4 DPSIR Tata Guna Lahan III-11
Gambar 3.5 DPSIR Kualitas dan Kuantitas Air III-12
Gambar 3.6 DPSIR Kualitas Udara III-13
Gambar 3.7 DPSIR Risiko Bencana III-14
Gambar 3.8 DPSIR Persampahan III-15
Gambar 3.9 DPSIR Tata Kelola III-16
Gambar 4.1 Pemetaan Inovasi Berdasarkan Isu Lingkungan Prioritas Kota Cimahi IV-1

Gambar 4.2 Peninjauan Proses Pembangunan MPP oleh Walikota Cimahi dan Design Mal Pelayanan Publik IV-2
Gambar 4.3 Peresmian Jaringan Trayek Perkotaan Baru oleh Walikota Cimahi IV-4
Gambar 4.4 Pelepasan Peserta Mudik Gratis Tahun 2019 ..... IV-5
Gambar 4.5 Kegiatan Car Free Day IV-6
Gambar 4.6 Pelaksanaan Sistem Satu Arah di Kawasan Dustira IV-7
Gambar 4.7 Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas IV-8
Gambar 4.8 Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi Tahun 2018-2019 ..... IV-9
Gambar 4.9 Sarana Prasarana Persampahan Terbangun Tahun 2019 .. IV-9
Gambar 4.10 Sosialisasi dan Pelaksanaan Gerakan Siswa Bertumbler. IV-10
Gambar 4.11 Pelaksanaan Hari Organik Hari Anorganik IV-11
Gambar 4.12 Sampah Terkumpul di Kegiatan KTT IV-12
Gambar 4.13 Jenis Sampah dan Barang di Kegiatan KTT IV-13
Gambar 4.14 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar IV-15
Gambar 4.15 Gerakan Komitmen Bersama Forum Sinergitas Pentahelix Industri Bersih Kota Cimahi IV-16
Gambar 4.16 Pelaksanaan Kegiatan GNPDAS Bersama Wali Kota Cimahi IV-17
Gambar 4.17 Kegiatan Gerakan Pungut Sampah IV-19
Gambar 4.18 Pelaksanaan Kegiatan Solar STBM IV-21
Gambar 4.19 Pelaksanaan Kegiatan Goyang Gotik IV-22
Gambar 4.20 Tampilan Data Saluran Drainas dan *Geographic Information System* (GIS) Kondisi Saluran Kota Cimahi IV-23
Gambar 4.21 Data Rumah Tinggal Layak Huni Terbangun Kota Cimahi Tahun 2016-2019 ..... IV-24
Gambar 4.22 Proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni IV-24
Gambar 4.23 Halaman Depan Sitarung IV-26
Gambar 4.24 Sistem Informasi Lingkungan IV-26

Gambar 4.25 Pelaksanaan *Coaching* Sistem Informasi Lingkungan (SIL) IV-27
Gambar 4.26 Pengaplikasian Tanda Tangan Digital IV-28
Gambar 4.27 Aplikasi E-Library Kota Cimahi IV-29
Gambar 4.28 Jaringan Internet Gratis di Taman Kartini IV-30
Gambar 4.29 Tampilan Website Cimahi Open Data IV-31
Gambar 4.30 Halaman Depan Website Sistem Inovasi Daerah IV-32
Gambar 4.31 Penanaman Durian Kamarung IV-33
Gambar 4.32 Pengolahan Industri IV-35
Gambar 4.33 Proses Penyedotan Lumpur Tinja IV-36
Gambar 4.34 Kegiatan TTIC di Selasar Gedung B Pemerintah Kota Cimahi IV-37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keterangan Debit Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi I-10
Tabel 1.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi…. I-12
Tabel 1.3 Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan I-15
Tabel 2.2 Luas Tumpang Tindih Lahan Berdasarkan Pemanfaatannya . II-13
Tabel 2.3 Jumlah Kelurahan Berdasarkan Tingkat Risiko Pengelolaan Limbah II-25
Tabel 2.4 Evaluasi Lahan Kering II-29
Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kelurahan II-30
Tabel 2.6 Hasil Uji Sampel Udara Ambien..... II-33
Tabel 2.7 Luas Perubahan Lahan Tahun 2018-2019..... II-57
Tabel 2.8 Kriteria Indeks Kualitas Air (SISKANA)..... II-60
Tabel 2.9 Indeks Kualitas Air Sungai Kota cimahi Tahun 2019 ..... II-60
Tabel 2.10 Peningkatan Penduduk Kota Cimahi II-76
Tabel 2.11 Kualitas Udara Ambien II-83
Tabel 2.12 Indeks Kualitas Udara II-84
Tabel 2.13 Emisi Gas Rumah Kaca dari Kegiatan Industri II-88
Tabel 2.14 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng..... II-92
Tabel 2.15 Luas Perubahan Lahan II-96
Tabel 2.16 Kegiatan Fisik Pengendalian Banjir II-115
Tabel 2.17 Realisasi Penghijauan hingga Tahun 2019 ..... II-118
Tabel 2.18 Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi II-119
Tabel 2.19 Timbulan Sampah per Orang Kota Cimahi II-120
Tabel 2.20 Jumlah Rumah Tangga Miskin II-120
Tabel 2.21 Sarana Pengumpulan Sampah II-136
Tabel 2.22 Sarana Pengangkutan Sampah II-136
Tabel 2.23 Sarana Pengolahan Sampah II-137

Tabel 2.24 Jenis Penyakit yang Diderita Masyarakat Kota Cimahi II-138
Tabel 2.25 Kegiatan dengan Sumber APBD tahun 2018 ..... II-140
Tabel 2.26 Pengurangan Sampah di Kelurahan Melong II-141
Tabel 2.27 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cibeureum II-142
Tabel 2.28 Pengurangan Sampah di Kelurahan Utama II-143
Tabel 2.29 Pengurangan Sampah di Kelurahan Leuwigajah II-143
Tabel 2.30 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cibeber II-144
Tabel 2.31 Pengurangan Sampah di Kelurahan Baros II-144
Tabel 2.32 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cigugur Tengah II-145
Tabel 2.33 Pengurangan Sampah di Kelurahan Karangmekar II-145
Tabel 2.34 Pengurangan Sampah di Kelurahan Setiamanah II-146
Tabel 2.35 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cimahi II-146
Tabel 2.36 Pengurangan Sampah di Kelurahan Padasuka II-147
Tabel 2.37 Pengurangan Sampah di Kelurahan Pasirkaliki II-147
Tabel 2.38 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cibabat II-148
Tabel 2.39 Pengurangan Sampah di Kelurahan Citereup II-148
Tabel 2.40 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cipageran II-149
Tabel 2.41 Pendapatan Asli Daerah II-153
Tabel 2.42 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-155
Tabel 2.43 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-155
Tabel 2.44 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cimahi II-161
Tabel 2.45 Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 dan 2019 ... II-163
Tabel 2.46 Produksi Hukum Bidan Pengelolaan Lingkungan Hidup II-164
Tabel 3.1 Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja dalam Resntra dLH Kota Cimahi 2018-2022..... III-7
Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Analisis DPSIR III-16
Tabel 3.3 *Scoring* Isu Prioritas.....III-26
Tabel 3.4 Penetapan Isu Prioritas III-28

Tabel 4.2 Daftar Instansi Pusat dan Provinsi yang akan Bergabung di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi IV-3
Tabel 4.3 Lokasi Penanaman GNPDAS IV-17
Tabel 4.4 Jumlah Unit Jamban dan Tangki Septik IV-20
Tabel 4.5 Luasan Lahan Bibit Varietas Durian Kamarung IV-33
Tabel 4.6 Penggabungan Sekolah IV-38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kelengkapan Administrasi Penyusunan DIKPLHD Tahun 2020

- SK Tim Penyusun
- Biodata Penyusun
- Undangan Rapat Pengumpulan Data
- Notulensi Rapat Pengumpulan Data
- Daftar Hadir Pengumpulan Data
- Undangan FGD
- Berita Acara FGD
- Notulensi FGD
- Daftar Hadir FGD
- Biodata Peserta FGD

Lampiran II Tabel Utama

Lampiran III Tabel Tambahan

Lampiran IV Peta Spasial

BAB I
PENDAHULUAN

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang disusun digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan sehingga misi pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2017-2022, Kota Cimahi memiliki misi yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan misi tersebut maka Kota Cimahi membuat dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD).

Pembuatan DIKPLHD ini juga didasari dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia dan setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada peraturan tersbut juga menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Maka DIKPLHD ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan sehingga dapat memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi dari Kota Cimahi.

1.2 Profil Daerah

1.2.1 Letak Geografis

Kota Cimahi secara geografis terletak diantara $107^{0}30'30''$ – $107^{0}34'30''$ BT dan $6^{0}50'00''$ – $6^{0}56'00''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Cimahi yang sebesar 40,2 km^2 (4.020 Ha) menurut UU No. 9 Tahun 2001 dengan batas-batas wilayahnya:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Kota Cimahi juga dilintasi oleh jalan nasional yang berfungsi menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, jalan tol Cileunyi-Padalarang-Purwakarta, serta jalur kereta api Bandung-Jakarta. Berdasarkan letak geografis tersebut, Kota Cimahi sangat strategis karena terletak di jalur kegiatan ekonomi regional dan sebagai kota inti Bandung Raya yang berdampingan dengan ibu kota Jawa Barat yang sangat dinamis. Kota Cimahi memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa yang berbasis pada sumber daya manusia.

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 15 Kelurahan yaitu, Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan.

Secara geografis wilayah ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian di bagian utara ± 1.040 meter dpl (Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara), yang merupakan lereng Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 meter dpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Peta wilayah administrasi Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.1

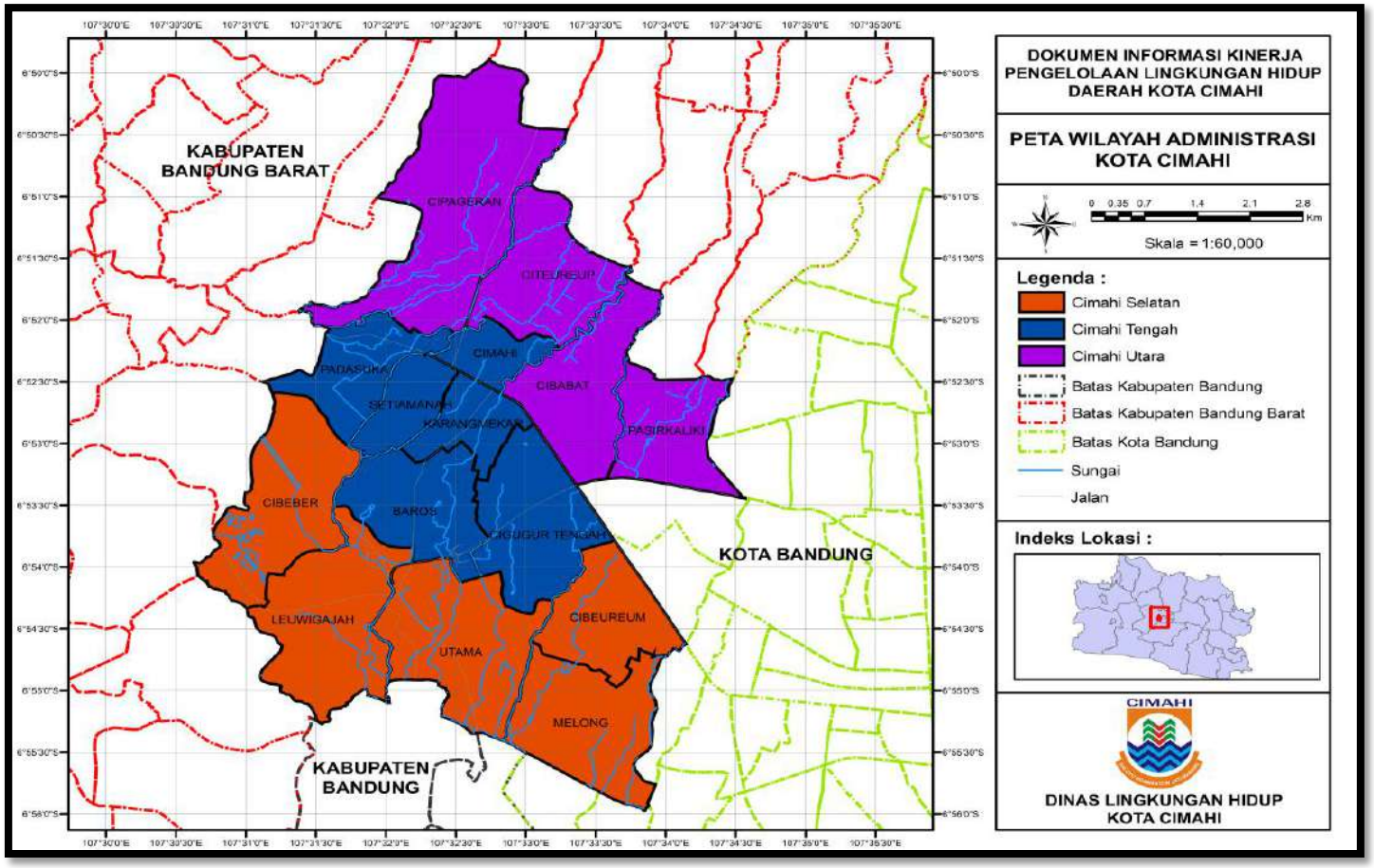

Gambar 1.1 Peta Wilayah dministrasi Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

1.2.2 Penggunaan Lahan

Berdasarkan fungsi kota secara umum, jenis kegiatan Kecamatan Cimahi Utara diarahkan untuk perumahan, pendidikan dan pelayanan umum. Kecamatan Cimahi Tengah, jenis kegiatannya diarahkan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, serta pendidikan. Kecamatan Cimahi Selatan, jenis kegiatannya diarahkan untuk Industri, perumahan, pendidikan dan pelayanan umum.

Secara keseluruhan, penggunaan lahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.2 dan Gambar 1.3 berikut.

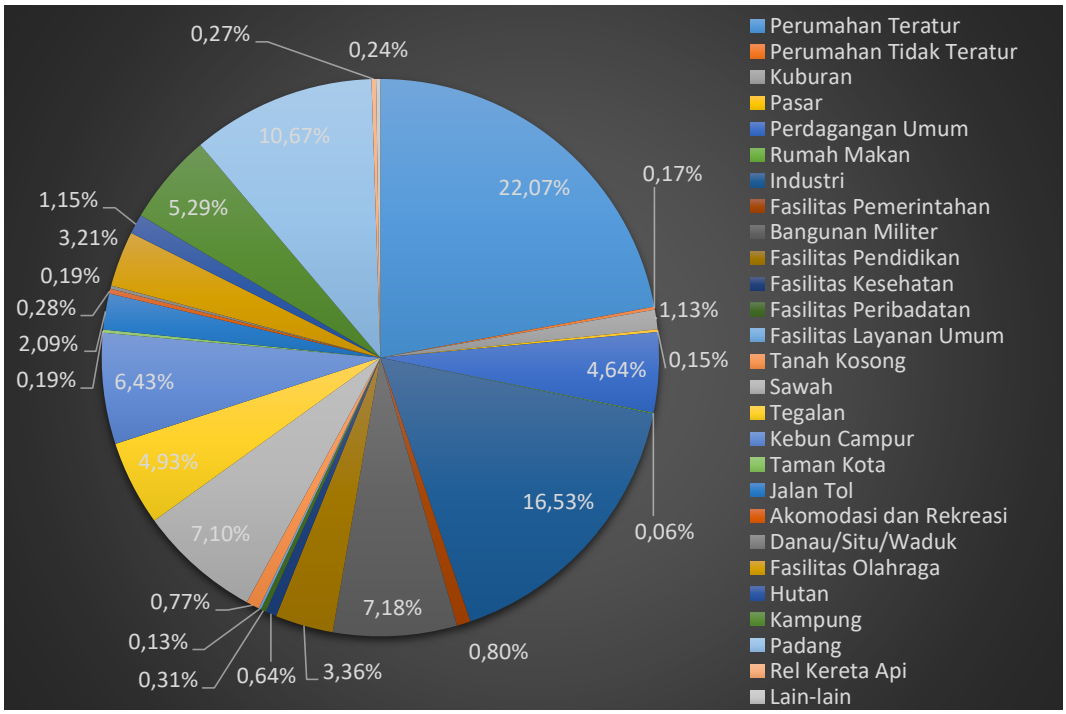

Gambar 1.2 Luas Lahan Menurut Peruntukkannya

(Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka, 2019)

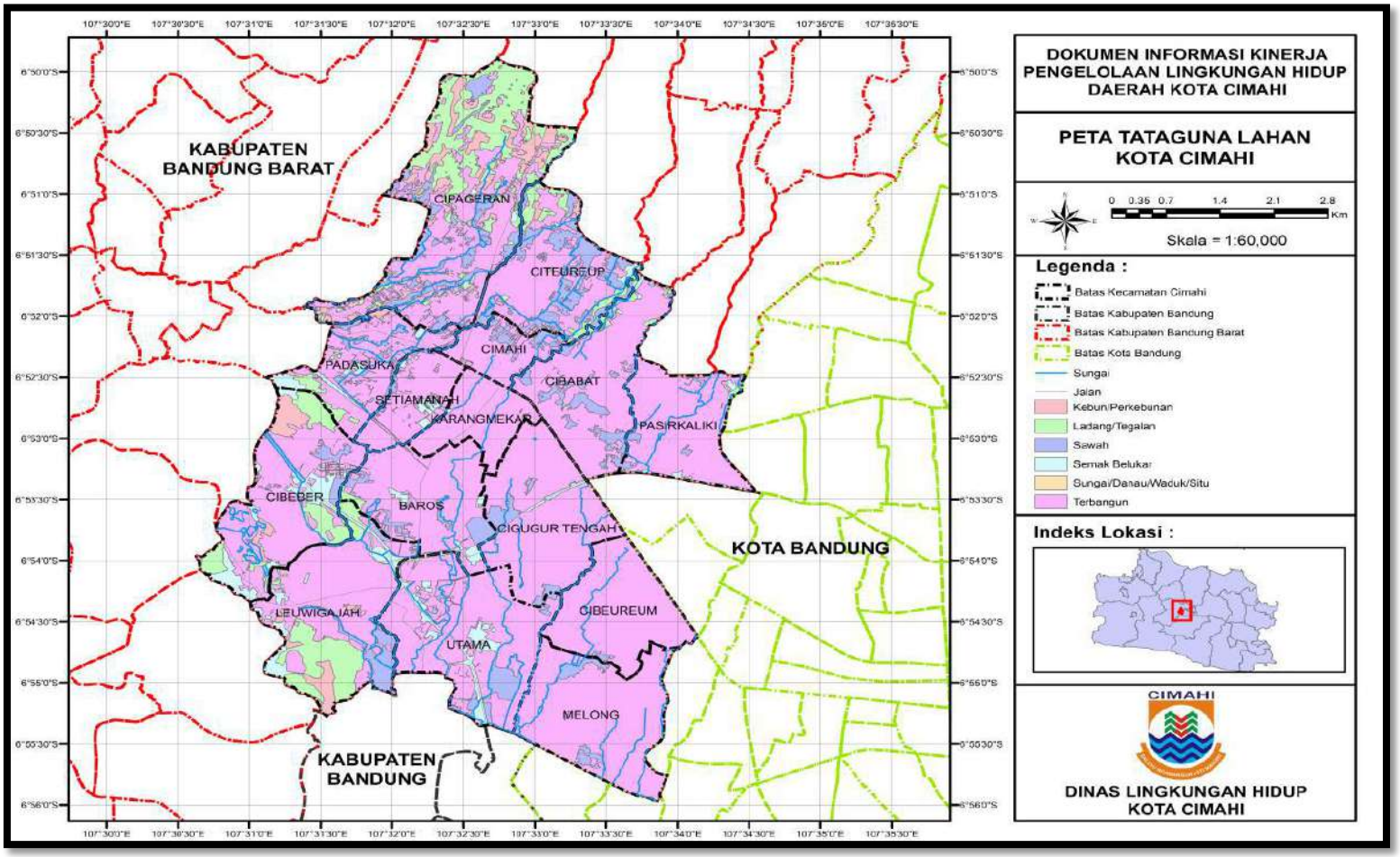

Gambar 1.3 Peta Tata Guna Lahan Kota Cimahi

1.2.3 Hidrologi

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi, dengan anak sungainya ada lima yaitu Kali Cibodas, Ciputri, Cimindi, Cibeureum dan Kali Cisangkan, sementara itu mata air yang terdapat di Kota Cimahi adalah mata air Cikuda dan mata air Cisintok.

Bila ditinjau dari beban pencemar yang diterima badan air, terdapat empat sungai yang menjadi badan air penerima buangan limbah industri, domestik, rumah sakit, dan lain sebagainya, adalah :

1. Sungai Cimahi, panjang 7 km, lebar (5-10) m, melintasi tiga kecamatan, yaitu Cimahi Tengah, Utara dan Selatan.
2. Sungai Cisangkan, panjang 4,5 km, lebar (3-7) m, melintasi Kec. Cimahi Tengah dan Selatan.
3. Sungai Cigugur/Cibaligo, panjang 2 km, lebar (3-5) m, melintasi Kec. Cimahi Selatan.

Kota Cimahi diproyeksikan memililki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m^3 per tahun yang terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m^3 dan air tanah sebesar 13,61 juta m^3. Zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi saat ini didominasi oleh zona pemanfaatan rawan, kritis, dan rusak yang mencakup 50,6% dari total zona pemanfaatan air tanah.

Kota Cimahi terletak pada wilayah hidrogeologis Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang yang juga mencakup beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Potensi air tanah CAT Bandung-Soreang diperkirakan mencapai 795 juta m^3 air bebas (*free* water) dan 117 juta m^3 air tertekan (*confined water*) (Badan Geologi 2005).

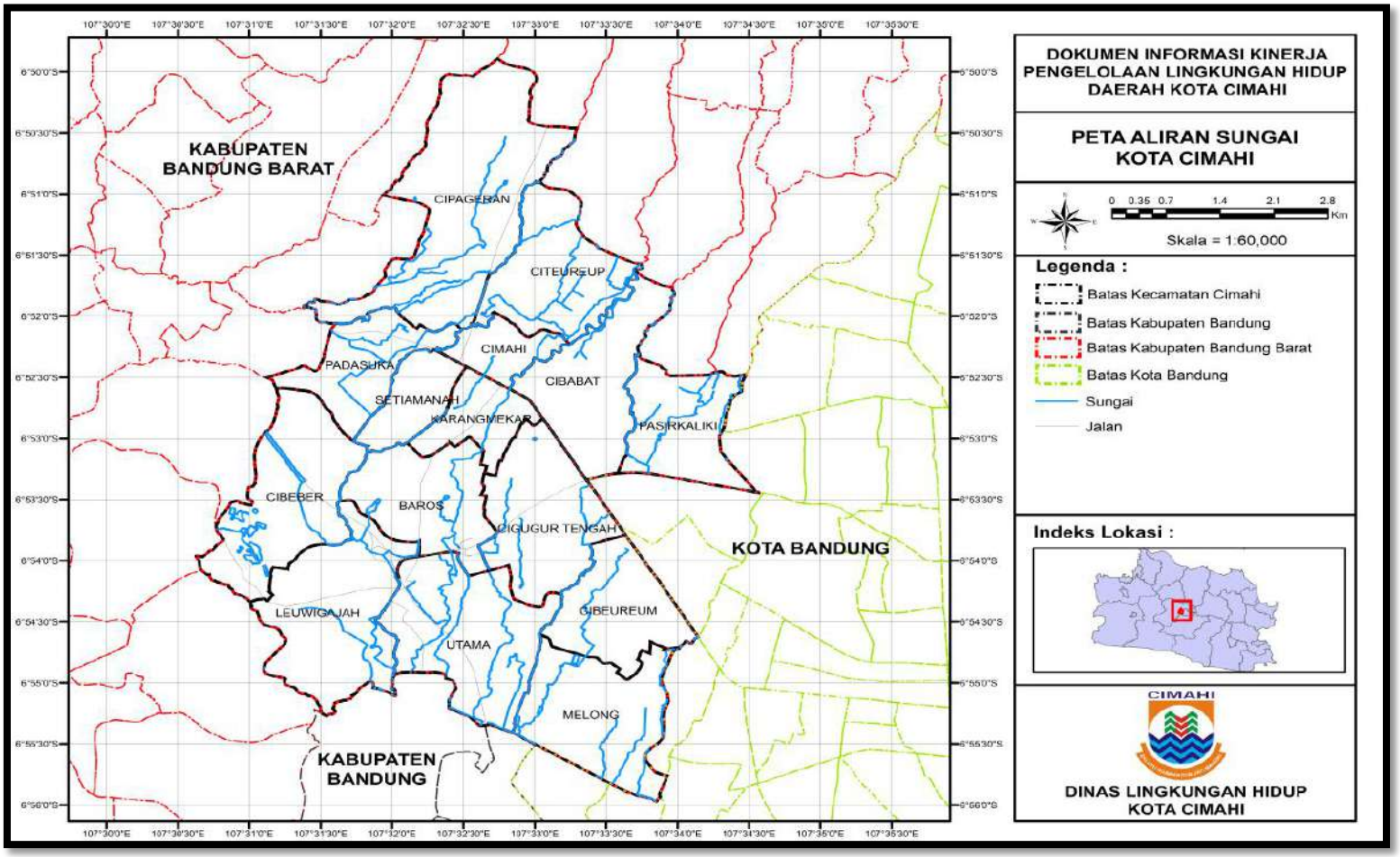

Gambar 1.4 Peta Aliran Sungai Kota Cimahi

Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, ditentukan bahwa diperlukan penetapan zona konservasi air tanah dalam penyusunan rencana pengelolaan air tanah. Zona konservasi air tanah terdiri atas: (1) zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; (2) zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak. Di Kota Cimahi, zona pemanfaatan air tanah terdiri atas 5 zona, yaitu: zona aman, zona aman pada akuifer 50-150 m, zona rawan, zona kritis, dan zona rusak.

Air tanah di Kota Cimahi terdiri dari kondisi aman, aman pada akuifer 50-150 m, rawan, kritis hingga rusak. Untuk lebih jelas, kondisi akuifer di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.5 berikut.

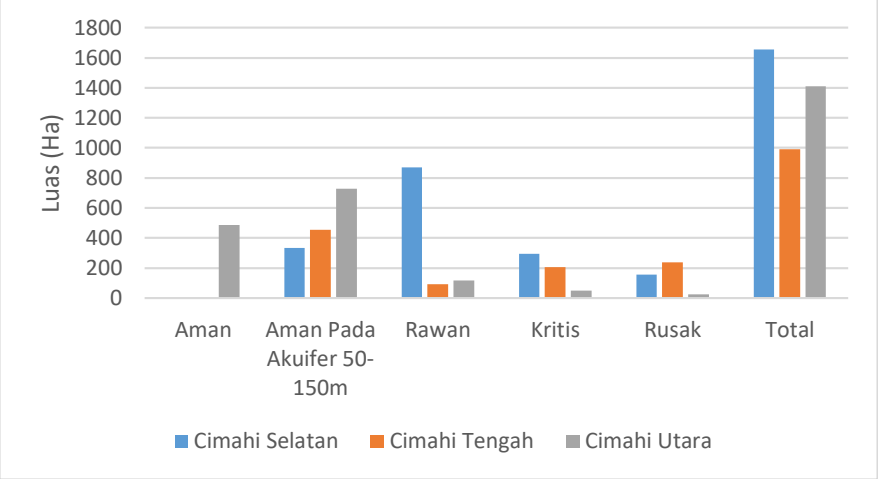

Gambar 1.5 Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi
(Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010)

Berdasarkan diketahui bahwa zona pemanfaatan air tanah aman pada akuifer 50-150 m memiliki cakupan yang besar dengan luas 1.516,37 Ha. Namun, di sisi lain pemanfaatan air tanah terbatas pada zona rawan, kritis, dan rusak juga memiliki cakupan yang luas, yaitu sebesar 2.050,63 ha atau mencakup 50,60% dari total luas zona pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai kendala dalam pengembangan perumahan di Kota Cimahi. Adapun debit maksimal dari air

tanah yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010).

Tabel 1.1 Keterangan Debit Zona Pemanfaatan Air Tanah di Kota Cimahi

No	Kondisi Cekungan Air Tanah	Keterangan
1	Aman	Kedalaman muka air tanah <25m, sebagai zona resapan. Pengembangan air tanah pada semua kedalaman akuifer dengan debit maksimum 100 m^3/bulan/sumur
2	Aman pada akuifer 50-150 m	Kedalaman muka air tanah 25 m. Pengambilan air tanah pada akuifer kedalaman <50 m dengan debit maksimum 100 m^3/bulan/sumur, pada akuifer 50-150 m debit maksimum 260 m^3/hari/sumur, Pengambilan air tanah baru lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 320 m m^3/hari/sumur dengan jumlah sumur terbatas setiap km^2
3	Rawan	Kedalaman muka air tanah 25-35m. pengambilan air tanah baru pada akuifer kedalaman <50m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga, dengan debit maksimum 100 m3/bulan/sumur, pada akuifer 50-150m debit maksimum 90 m^3/hari/sumur, pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 260 m^3/hari/sumur
4	Kritis	Kedalaman muka air tanah 35-55 m. pengambilan air tanah pada akuifer kedalaman <150 m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m^3/bulan/sumur, pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 200 m3/hari/sumur, setelah melakukan eksplorasi
5	Rusak	Kedalaman muka air tanah 550 m. pengambilan air tanah baru pada akuifer kedalaman 50-150 m hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan rumah tangga dengan debit maksimum 100 m^3/bulan /sumur, Pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 90 m^3/hari/sumur, setelah melakukan eksplorasi

(Sumber: Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010)

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa pemanfaatan air tanah pada zona ini dibatasi untuk air minum dan rumah tangga dengan debit yang berbeda untuk kedalaman yang berbeda pada kisaran 90-260 m^3/hari/sumur. Pemanfaatan air tanah pada zona terbatas ini harus diperhatikan untuk cadangan air tanah yang berkelanjutan, karena sumber air tanah merupakan sumber air yang terbatas dengan waktu *recharge* yang lama dan sulit direhabilitasi ketika sudah terjadi kerusakan.

Pada kondisi aman jumlah debit maksimum 100 m^3/bulan/sumur yang diperuntukkan sebagai zona resapan air yang berada di bagian utara Kota Cimahi atau yang sering disebut sebagai Kawasan Bandung Utara dengan kedalaman muka air sebesar <25 m. Untuk kondisi aman pada akuifer 50-150 m yang mendominasi di Kota Cimahi memiliki debit maksimum 100 m^3/bulan/sumur, pada akuifer 50-150 m debit maksimum 260 m^3/hari/sumur dengan kedalaman muka air tanah 25 m (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, 2010).

Adapun pada kondisi air tanah rawan, kritis, dan rusak hanya diperuntukkan bagi keperluan air minum dan rumah tangga di Kota Cimahi dengan masing-masing debit maksimum 90 m^3/hari/sumur pada akuifer 50-150 m dan pengambilan air tanah lebih dalam dari 150 m dengan debit maksimum 260 m^3/hari/sumur untuk kondisi air tanah rawan, debit maksimum 200 m^3/hari/sumur untuk kondisi air tanah kritis (melalui eksplorasi) dan untuk kondisi rusak dengan debit maksimum 90 m^3/hari/sumur (melalui eksplorasi).

1.2.4 Topografi

Topografi wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan y ang relatif melandai ke arah selatan selaras dengan arah aliran air permukaan. Ketinggian di bagian utara mencapai 1.040 m dpl (Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara), yang berupa lereng kaki komplek pegunungan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 m dpl (Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Secara umum, kondisi topografi dan kemiringan lahan Kota Cimahi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:

a. Tingkat kemiringan (0 – 8)%, terletak di kawasan seluruh Kota Cimahi yang berada pada ketinggian antara 700 – 850 m dpl.

b. Tingkat kemiringan (8 – 15)%, berada di kawasan utara Kota Cimahi, yaitu di Kel. Cipageran dengan ketinggian 850 – 1.075 m dpl.

c. Tingkat kemiringan (15 – 40)%, terletak di kawasan Kec. Cimahi Selatan, tepatnya di perbukitan Gunung Bohong, Kel. Cibeber dan Kel. Leuwigajah pada ketinggian 725 – 800 m dpl.

Tabel 1.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)					Total
		0-8	8-15	15-25	25-40	>40	Km^2
1	Cimahi Selatan	14,58	0,63	0,81	0,67	0,20	16,9
2	Cimahi Tengah	9,85	0,06	0,049	0,03	0,002	10,0
3	Cimahi Utara	11,76	0,71	0,47	0,29	0,07	13,3
	Total	36,20	1,40	1,33	0,99	0,28	40,2

(Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka 2019)

Secara umum di Kota Cimahi merupakan daerah dataran, hanya ada 1 kelurahan yang topografinya memiliki daerah perbukitan yaitu kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara. Dengan lahan yang tidak terlalu luas, daya jangkau pusat Pemerintahan Kota Cimahi ke kecamatan-kecamatan relatif singkat, rata-rata berjarak 1-2 km. Kota Cimahi berada pada lokasi strategis, dimana jarak ke Ibukota Provinsi hanya sejauh 10 km. Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik.

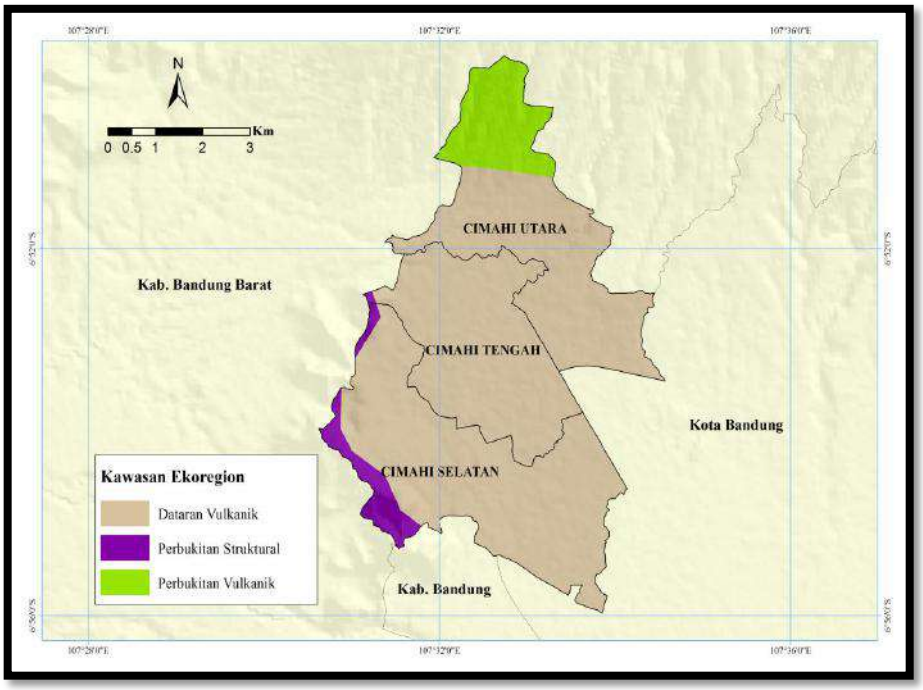

Gambar 1.6 Ekoregion Kota Cimahi

Dataran vulkanik hampir mencakup seluruh kecamatan di Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kondisi iklim di ekoregion dataran vulkanik secara umum relatif basah dengan curah hujan tahunan sedang hingga tinggi (2.000-4.000 mm) dengan suhu berkisar antara 22-26°C. Topografi berupa dataran dengan morfologi datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Material penyusun ekoregion ini umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerakal) dengan sortasi yang baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, semakin ke atas semakin halus). Proses penyebaran dan pengendapan material dibantu oleh aktivitas aliran sungai (fluvial) dan angin serta gravitasi berupa material jatuhan (*airborne deposite*).

Perbukitan struktural Cimahi terletak di sebagian wilayah administratif Kota Cimahi yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan

Kecamatan Cimahi Selatan. Perbukitan struktural merupakan perbukitan yang tersusun oleh batuan intrusif dan batuan sedimen (batu gamping dan batu pasir) yang mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membentuk struktur lipatan atau patahan. Morfologi yang terbentuk berupa perbukitan pada elevasi sedang (< 300 m) dengan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Kondisi iklim pada umumnya termasuk tropika basah, namun semakin ke arah timur cenderung semakin kering. Suhu udara relatif sejuk (20-22°C).

Perbukitan Vulkanik memliki topografi berbukit dengan morfologi, amplitudo relief 0 – 30 m, dan kemiringan lereng yang curam (25 – 45%). Ekoregion ini sebagian besar dapat ditemukan di bagian lereng tengah gunung berapi yang ada. Tanah yang dijumpai pada ekoregion ini didominasi oleh Podsolik dan Latosol yang memiliki tingkat kesuburan yang bervariasi. Sedangkan pada daerah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang cukup tinggi dapat dijumpai tanah Andosol yang kesuburannya cukup tinggi. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan vulkanik ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan beragam, hutan, semak belukar, lahan pertanian dan permukiman (KLH, 2014).

1.2.5 Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatuapung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batupasir, Konglomerat. Berikut adalah klasifikasi untuk jenis batuan yang ada di Kota Cimahi.

Tabel 1.3 Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Batuan (Ha)						Total
	A	B	Pb	Qyt	Qyd	Qyl	
Cimahi Selatan	16,73	12,77	67,68	1.557,1	-	-	1.654,30
Cimahi Tengah	-	4,64	-	826,86	158,11		989,62
Cimahi Utara	-	-	-	298,62	1.082,71	27,63	1.408,96
Jumlah	**16,73**	**17,42**	**67.68**	**2.682,59**	**1.240,82**	**27,63**	**4.052,88**

(Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan)

Keterangan: A=Andesit, B= Basal, Pb=Breksi Tufaan lava, Batupasir, Konglomerat, Qyt= Tufa Batuapung, Qyd= Tufa Pasir, dan Qyl= Lava

Berdasarkan Tabel 1.5 jenis batuan diatas dapat diketahui bahwa jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan Tufa Berbatu apung dengan luas sebesar 2.682,59 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan Tufa Berbatu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak di banding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batupasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa berbatu apung terdiri dari pasir tufaan, lapilli, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat bersudut yang berasal dari gunung tangkuban perahu (Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan 1973).

1.2.6 Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga

puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun.

Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,70 C – 23,20 C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6 C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700–4.000 mm per tahun dan luar wilayah 4.052,88 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 – 162,12 juta m^3 per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

1.3 Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas

Langkah-langkah penyusunan dan perumusan isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 1.5. Dalam alur tersebut, terlihat bahwa terdapat 5 (lima) langkah dalam penyusunan isu lingkungan prioritas di Kota Cimahi, yakni review literatur, penetapan isu lingkungan potensial, penetapan kriteria, verifikasi dan klarifikasi, serta penetapan isu lingkungan prioritas.

Langkah **studi literatur** meliputi kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Tahap ini sangat penting sebagai dasar berpijak dalam penentuan isu prioritas lingkungan di Kota

Cimahi. Diantara literatur yang diacu adalah Visi Misi Kota Cimahi, DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2019, Renstra DLH Kota Cimahi tahun 2018-2022 dan *Sustainable Development Goals.*

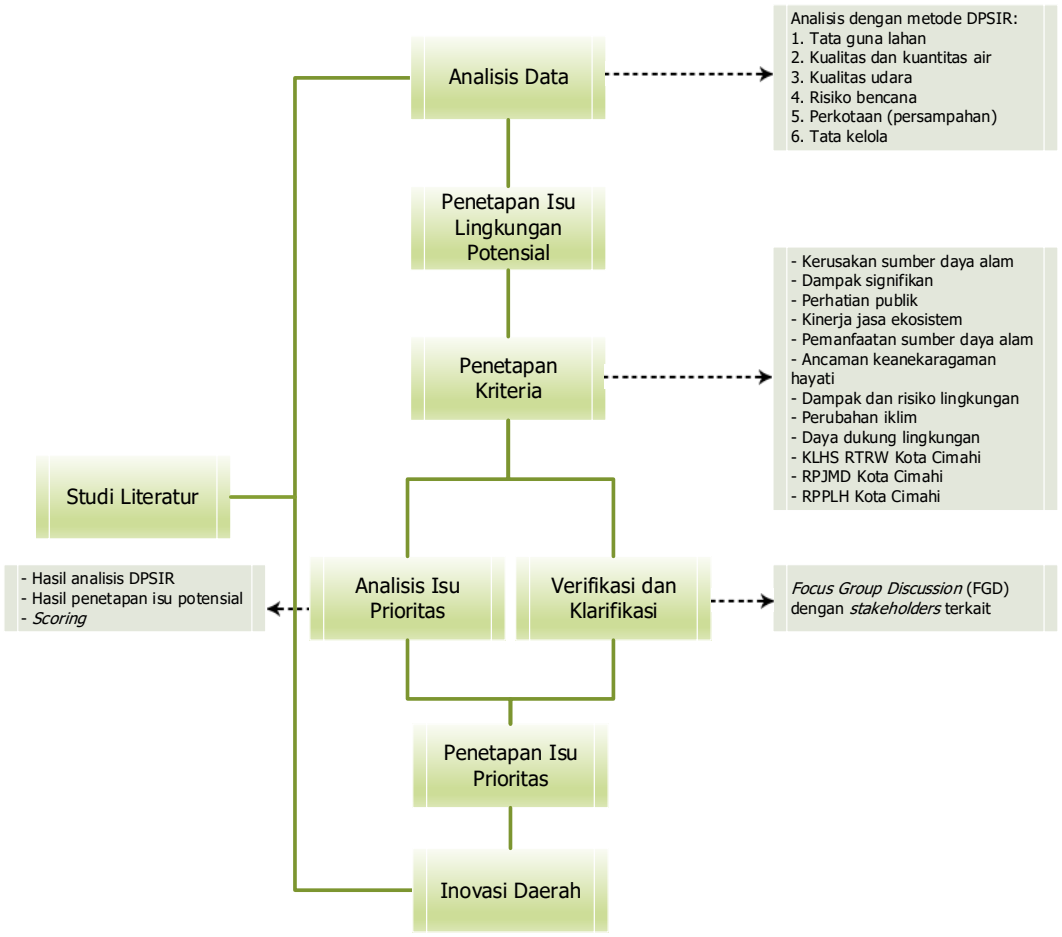

Gambar 1.7 Alur Perumusan Isu Prioritas

Langkah **analisis data** dilakukan dengan metode DPSIR *(Driving Force-Pressure-State-Response)*. Metode ini merupakan rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan *driving force* atau kekuatan pendorong, melalui *pressure* atau tekanan ke *state* atau status, dan memberikan *impact* atau dampak pada manusia dan lingkungan. Pada akhirnya semua hal tersebut mengarah pada *response* atau jawaban untuk mengatasi masalah yang ada.

Langkah **penetapan isu lingkungan potensial** merupakan hasil isu lingkungan dari studi literatur dan analisis DPSIR. Isu lingkungan tersebut merupakan isu yang tertuang di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi diperkuat dengan review literatur sebelumnya.

Langkah **penetapan kriteria** dilakukan untuk memberikan landasan dalam langkah berikutnya, yakni penetapan isu lingkungan prioritas. Mengingat banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi dalam berbagai studi terkait lingkungan di Kota Cimahi, kriteria ini menjadi penting untuk membuat daftar isu lingkungan yang tidak terlalu panjang (*short listing*). Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman penyusunan Dokumen IKPLHD 2019 dari KLHK, UU Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga kriteria yang ditetapkan diantaranya kerusakan sumber daya alam, dampak signifikan, perhatian publik, kinerja jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, ancaman keanekaragaman hayati, dampak dan resiko lingkungan, perubahan iklim, daya dukung lingkungan, RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, dan KLHS RPJMD Kota Cimahi.

Langkah **penetapan isu prioritas** dilakukan dengan menggunakan metode *scoring*. Isu lingkungan potensial yang sudah ditetapkan kemudian dipilih lima isu dengan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan kriteria penetapan. Analisis isu prioritas ini akan dilanjutkan dengan verifikasi dan klarifikasi untuk penetapan akhir isu prioritas lingkungan.

Langkah **verifikasi dan klarifikasi** dilakukan untuk mengerucutkan isu lingkungan potensial yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan potensial terhadap stakeholder lingkungan di Kota Cimahi. Metode yang dilakukan adalah dengan cara *Focus Group Discussion* yang

kemudian dilanjutkan dengan rapat intensif dengan Tim DIKPLHD Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi ini, isu prioritas yang sesungguhnya sudah dapat ditetapkan.

Langkah **inovasi daerah** merupakan jawaban dari permasalahan lingkungan. Dijelaskan mengenai inovasi apa saja yang dilakukan Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi yang dilaksakan setiap tahun memiliki maksud, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi ini adalah untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Kota Cimahi, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2020 yang terdiri atas buku Ringkasan Eksekutif dan buku Laporan Utama adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik dalam bentuk data dasar dan analisis dari data yang disampaikan.

2. Menentukan isu prioritas tahun 2020, status kualitas lingkungan hidup kritis dan perubahannya, faktor pendorong serta sumber tekanan terhadap lingkungan dan dampaknya serta upaya yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2020 *(Driving Force-Pressure-State-Response).*

3. Menyiapkan dokumen yang mendorong inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan

keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetensinya dan atau secara sinergis dengan pelaku lain

1.4.3 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020:

1. Menjadi acuan bagi pengambil kebijakan pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk semua sektor pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
2. Menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan lingkungan selama kurun waktu tahun 2020 sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan program/kegiatan kedepan.
3. Mengembangkan laporan kualitas lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam pemaparan kondisi lingkungan serta dapat mendorong terjadinya partisipasi aktif dari stakeholder dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan.
4. Mengembangkan jaringan informasi pertukaran data dan informasi lingkungan sehingga dapat menuju terciptanya suatu standar pertukaran data lingkungan (*standard format exchange*).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup wilayah Kota Cimahi yang meliputi wilayah darat.
2. Ruang lingkup materi yang tercantum dalam Panduan Penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2020 dianalisis dengan metode D-P-S-I-R *(Driving Force-Pressure-State-Response).*

3. Ruang lingkup kedalaman data mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Panduan Penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2020.

BAB II

ANALISA DRIVER - PRESSURE - STATE – IMPACT - RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Metode DPSIR dilakukan dengan menguraikan *driving force* (faktor penyebab), *pressure* (tekanan/ faktor pendorong/katalis yang mempercepat perubahan kondisi suatu keadaan), *states* (kondisi awal), *impact* (dampak dari perubahan tersebut), serta *responses* (respon dari stakeholder terhadap perubahan).

BAB II

ANALISIS *DPSIR*

Pada tahun 1994, *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD) mempublikasikan bahwa model awal dari indikator kondisi lingkungan adalah dalam susunan *Pressure-State-Response* (PSR), yang didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas manusia yang memberikan *pressure* terhadap lingkungan sehingga menyebabkan perubahan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Selanjutnya, *The European Environment* (EEA) mengembangkan model awal yang sudah ada menjadi DPSIR (*driving forces, pressure, state, impact, response)* model. Permasalahan lingkungan timbul karena keterbatasan sumber daya yang ada di alam terhadap lingkungan.

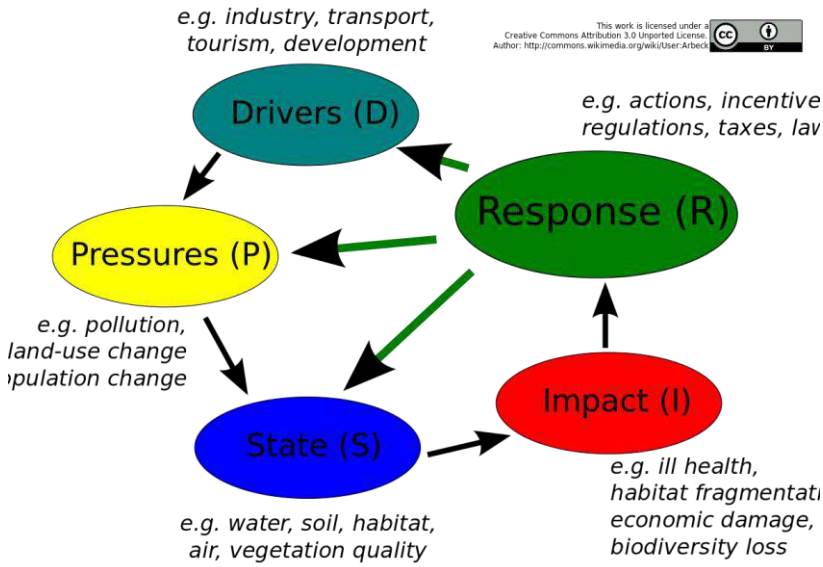

Gambar 2.1 Kerangka D-P-S-I-R

(Sumber : EEA, 2011)

Dari Gambar 2.1, terdapat lima indikator utama dalam kerangka DPSIR yang akan dianalisis, yaitu:

1. *Driving Force / Drivers* (Faktor Pemicu), yaitu aktivitas antropogenik yang mungkin memiliki efek terhadap lingkungan
2. *Pressure* (Tekanan), indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
3. *State* (Kondisi lingkungan hidup), indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
4. *Impact* (Dampak), indikator ini menggambarkan dampak lingkungan yang muncul akibat adanya *pressure*
5. *Response* (Respon), indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum hidup

Berdasarkan pedoman penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2020, analisis DPSIR dilakukan terhadap beberapa isu, yaitu :

1. Tata guna lahan
2. Kualitas air
3. Kualitas udara
4. Risiko bencana
5. Perkotaan
6. Tata Kelola

2.1 Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan di Kota Cimahi diklasifikasikan berdasarkan beberapa jenis pemanfaatannya. Isu terkait tata guna lahan di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan data tabel utama panduan tabel 1-tabel 17. Namun beberapa tabel tersebut tidak dilakukan analisis karena kondisi geografis di Kota Cimahi yang tidak terdapat lahan pada kondisi tersebut, seperti mangrove, padang lamun, hutan, tambang dan terumbu karang. Kondisi-kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting geografis dan fungsi lahan di Kota Cimahi sehingga tidak terdapat bahasan tersebut.

Sebagai penunjang, dalam analisis yang dilakukan dengan metode DPSIR ini terdapat beberapa data yang diambil dari dokumen lingkungan hidup terkait penggunaan lahan dan dokumen rencana tata ruang di kota Cimahi.

2.1.1 Driving Force

2.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor pemicu adanya perubahan lahan atau pertambahan kebutuhan lahan di Kota Cimahi. Seiring dengan jumlah penduduk yang terus-menerus meningkat akan menekan pertumbuhan perumahan/permukiman penduduk. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, data terkait kependudukan berdasarkan kecamatan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut. Selain itu, salah satu hal yang paling merepresentasikan data kependudukan adalah kepadatan penduduk, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Berikut Gambar 2.3 yang menunjukkan *trend* kepadatan penduduk setiap kecamatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Dari gambar di atas, diketahui jumlah penduduk total Kota Cimahi tahun 2019 sebanyak 553.755 jiwa dengan kepadatan penduduk 137 jiwa/Ha. Jumlah penduduk tersebut meningkat 0,98% dari tahun sebelumnya.

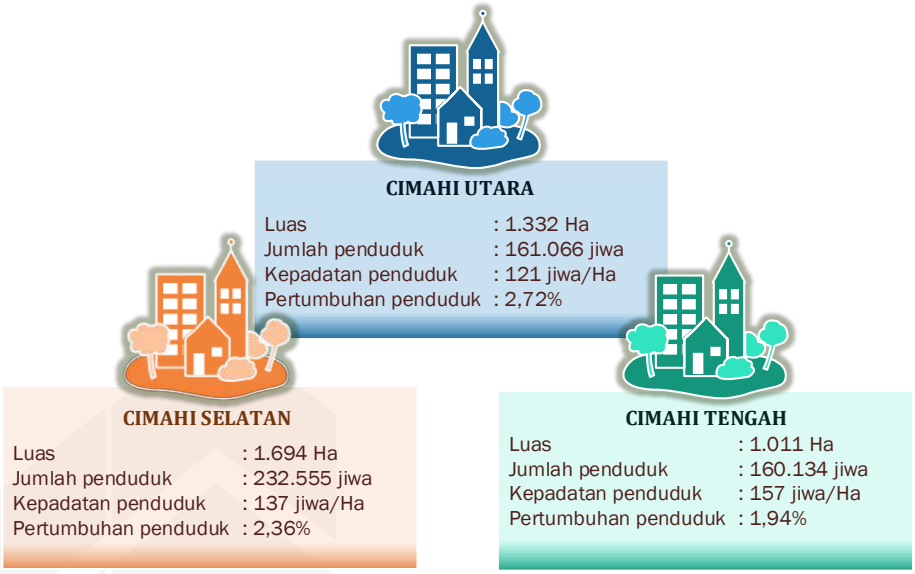

Gambar 2.2 Kependudukan Berdasarkan Kecamatan

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, 2019)

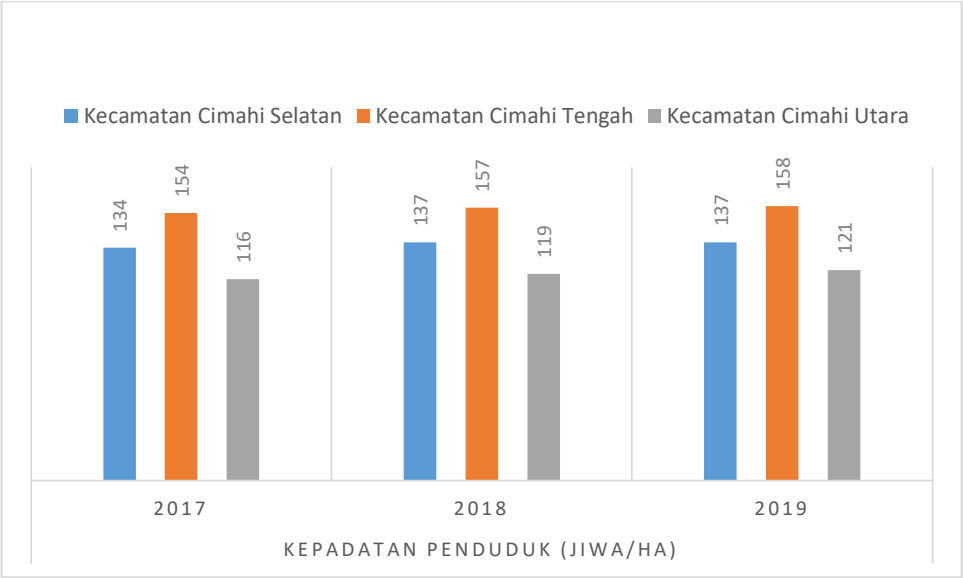

Gambar 2.3 *Trend* Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2019

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, 2019)

2.1.1.2 Perda Kawasan Bandung Utara (KBU)

Adanya perubahan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat No. 8 tahun 2008 menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 2 tahun 2016 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Bandung Utara. Mengakibatkan adanya perubahan cakupan luasan KBU pada Kota Cimahi yang semula mencakup 2 Kecamatan (8 Kelurahan) menjadi 2 Kecamatan 9 Kelurahan (penambahan sebagian Kel. Cigugur Tengah). Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 tersebut menyebabkan perubahan terhadap pola ruang di Kota Cimahi. Oleh karena itu, Perda KBU ini dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang tindih antara penggunaan lahan dengan pola ruang yang telah direncanakan.

Gambar 2.4 Kawasan Bandung Utara di Kota Cimahi
(Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2017)

Dalam Perda KBU, Kota Cimahi masuk kedalam zona L2, B4 dan B5, adapun penjelasannya :

a. Zona L-2, adalah Zona Lindung Tambahan, meliputi kawasan hutan masyarakat, kawasan rawan bencana II dan I Gunung Api Tangkuban Parahu, kawasan perdesaan dengan fungsi resapan air tinggi
b. Zona B-4, adalah Zona Pemanfaatan Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air sedang
c. Zona B-5, adalah Zona Pemanfaatan Sangat Terbatas Perkotaan, merupakan kawasan dengan tingkat kepadatan wilayah sedang sampai tinggi, meliputi kawasan perkotaan di kawasan resapan air tinggi.

2.1.1.3 Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang membentang sepanjang 142 km akan melewati sembilan kabupaten-kota yaitu Jakarta Timur, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabu paten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Proyek ini akan melakukan pembebasan lahan untuk jalur kerata pada daerah yang akan dilewati. Sehingga proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan memberikan dampak pada struktur ruang Kota Cimahi. Terdapat tiga kelurahan yang terdampak proyek kereta cepat tersebut, yaitu Kelurahan Cibeber, Kelurahan Melong, dan Kelurahan Leuwigajah. Berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), panjang jalur trase yang melalui Kota Cimahi mencapai 5,94 kilometer.

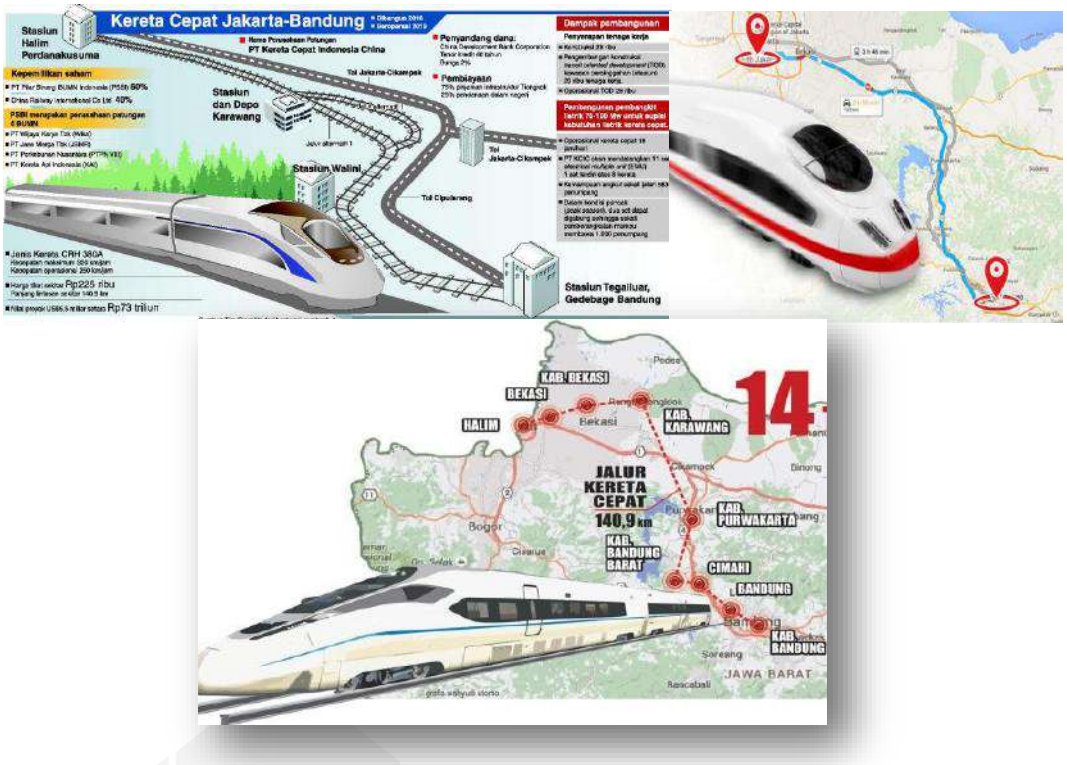

Gambar 2.5 Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
(Sumber: news.metrotv.com, 2019)

2.1.1.4 RTRW Kota Cimahi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota pada hakikatnya adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah kota. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjadi permasalahan utama suatu wilayah kota. Potensi, keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hendaknya terpetakan dalam rencana pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam RTRW Kota.

Berdasarkan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032, terdapat dua kebijakan dan strategi dalam pengembangan pola ruang di Kota Cimahi, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai pelindung kelestarian lingkungan hidup (mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan). Sedangkan kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Diketahui luas total kawasan lindung di Kota Cimahi adalah 1.093,46 Ha dengan rincian sebagai berikut:

- Kawasan resapan air = 58 Ha
- Sempadan Sungai = 35 Ha
- Ruang terbuka hijau = 755,46 Ha
- Kawasan rawan tanah longsor = 147 Ha
- Kawasan rawan letusan gunung berapi = 98 Ha

Kawasan tersebut merupakan wilayah yang perlu diperhatikan keberadaannya karena sebagai penyeimbang kawasan lainnya dan juga sebagai kawasan antisipasi adanya kejadian bencana alam.

Sedangkan kawasan budidaya di Kota Cimahi berdasarkan RTRW adalah sebesar 2.950,53 Ha. Arahan RTRW Kota Cimahi dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan peruntukkan lahan. Peningkatan lahan hijau dapat mempertimbangkan pola ruang Kota Cimahi yang dapat disesuaikan dengan program-program dari setiap instansi. Jika program pembangunan tidak sesuai dengan RTRW, akan berdampak dan menjadi faktor pemicu terhadap tumpang tindih pola ruang dan lahan eksisting Kota Cimahi. Selain itu, adanya program pembangunan juga seharusnya memiliki izin lingkungan yang nantinya tentu akan menjadi tekanan terhadap penggunaan lahan di Kota Cimahi. Berikut merupakan peta pola ruang Kota Cimahi berdasarkan RTRW Kota Cimahi 2012-2032 :

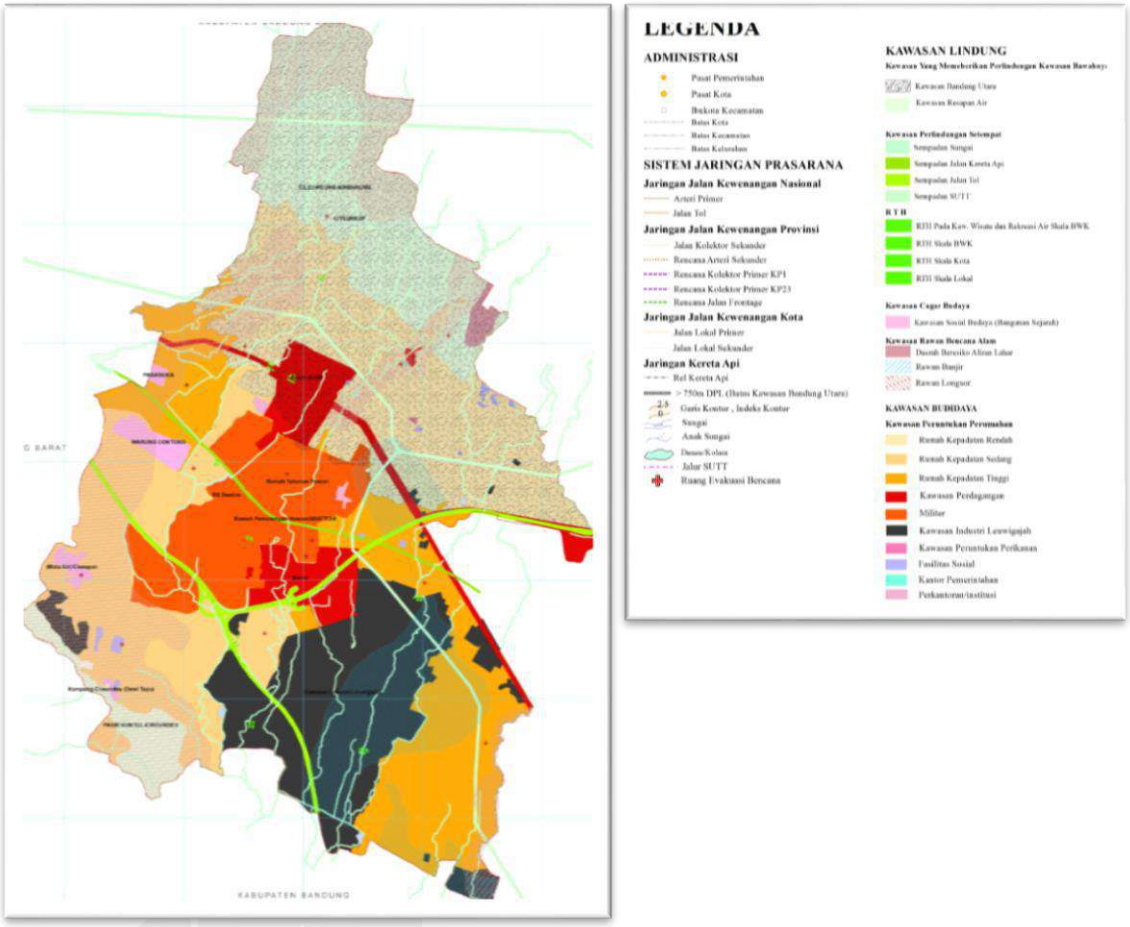

Gambar 2.6 Pola Ruang Kota Cimahi

(Sumber : RTRW Kota Cimahi 2012-2032, 2013)

2.1.1.5 RPJMD Kota Cimahi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 merupakan peraturan yang di dalamnya memuat tentang peningkatan perekonomian yang menjadi salah satu misi Kota Cimahi dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan salah satu penunjang dalam meningkatkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat Kota Cimahi. Namun di sisi lain, peningkatan ekonomi berkaitan juga dengan isu tata guna lahan. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat akan beriringan dengan meningkatnya aktivitas di bidang industri sehingga akan memberikan dampak, seperti adanya potensi kebutuhan lahan pada beberapa sektor pelaku usaha yang terus meningkatkan perekonomiannya.

2.1.2 Pressure

2.1.2.1 Pertumbuhan Perumahan Penduduk

Menyinggung beberapa poin-poin pemicu (*driving force*) yang sebelumnya telah dijelaskan, salah satu tekanan yang dapat timbul terkait tata guna lahan yaitu pertumbuhan perumahan penduduk. Hal ini akan terjadi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Jika diperhatikan lebih detail, pertumbuhan jumlah penduduk ini juga berkaitan dengan adanya peraturan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang mana Kota Cimahi termasuk ke dalam zona KBU dengan pemanfaatan zona seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tidak hanya KBU, hal ini juga disebabkan oleh perencanaan dalam RPJMD Kota Cimahi (2017-2022) yang memuat perencanaan tentang peningkatan perekonomian kota yang tidak menutup kemungkinan terjadinya migrasi penduduk.

Bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan diikuti dengan perubahan pemanfaatan lahan dari kawasan hijau menjadi kawasan

terbangun guna memenuhi kebutuhan permukiman dan infrastruktur dasar bagi penduduk. Hal tersebut menjadi tekanan bagi kawasan ekoregion karena berkurangnya lahan untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekosistem dan terganggunya struktur serta fungsi ekosistem untuk memproduksi jasa ekosistem secara optimal. Di sisi lain pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan terhadap jasa ekosistem penghasil pangan dan air, sehingga terjadi penambahan beban dalam pemanfaatan jasa ekosistem yang dapat berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup untuk pangan dan air. Untuk itu, perlu dipertimbangkan dan dianalisis lebih lanjut mengenai keterkaitan antara tekanan populasi dengan penurunan daya dukung lingkungan, kekurangan air bersih sebagai salah satu dampaknya.

Tekanan terhadap lingkungan di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan prediksi pertumbuhan populasi dalam kurun waktu dari tahun 2015 ke tahun 2025, 2035, dan 2045. Analisis tersebut dilakukan secara deskriptif dengan melihat pola pertumbuhan dan *trend* perubahan tutupan lahan, serta jenis jasa ekosistem yang terkena dampak tekanan. Peta prediksi pertumbuhan penduduk ini diturunkan dari peta populasi yang dimodelkan dengan bobot tutupan lahan dan jalan. Hal tersebut untuk melihat atau mempertimbangkan persebaran perumahan berdasarkan penggunaan lahannya. Pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 ke tahun 2025, 2035, dan 2045, dapat dilihat pada Gambar 2.6 Pertumbuhan penduduk secara signifikan terlihat di kawasan permukiman. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk dari 2015 hingga 2025, tekanan populasi terjadi secara signifikan tersebar hampir di sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Selatan, sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Utara dan Kecamatan Cimahi Tengah.

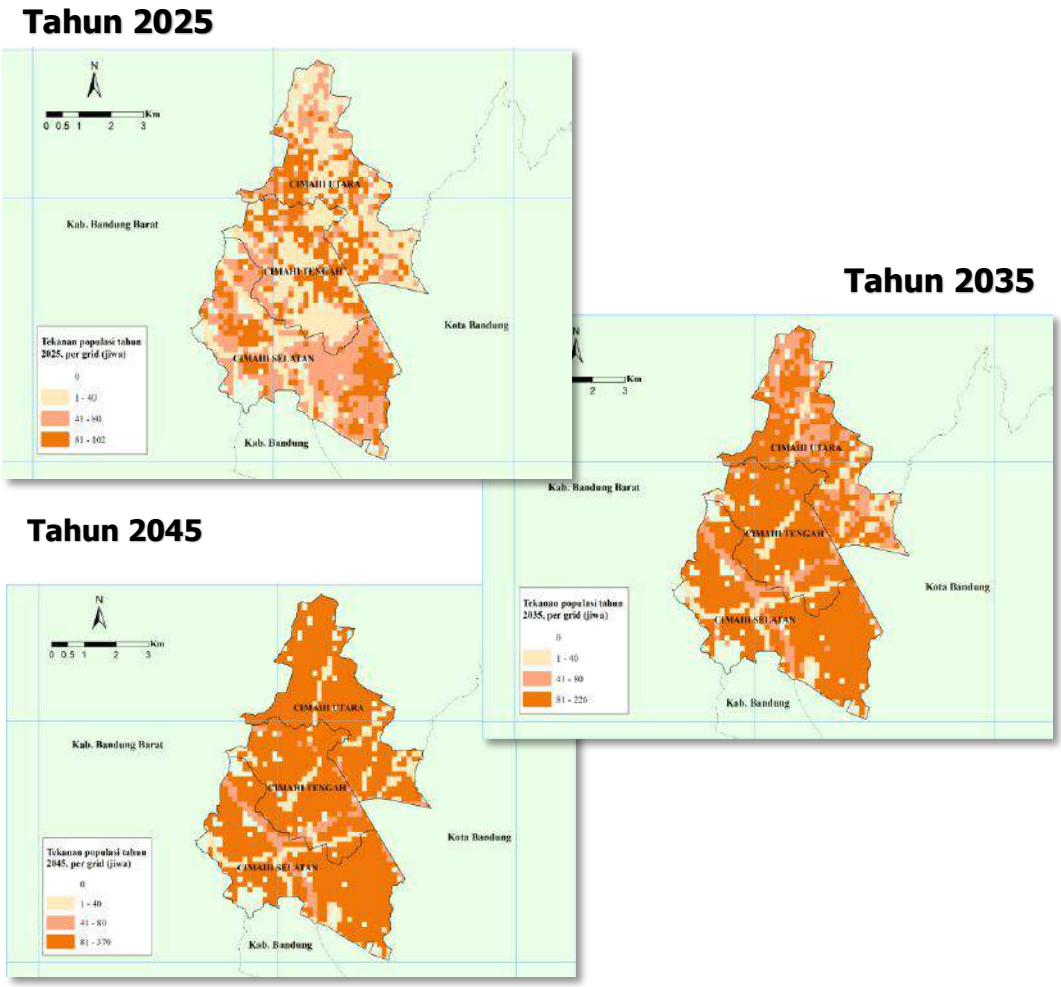

Gambar 2.7 Tekanan Populasi Kota Cimahi

(Sumber : RPPLH Kota Cimahi, 2017)

Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 hingga tahun 2035, tekanan populasinya meluas hampir di semua wilayah Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Tengah. Namun dari peta di bawah ini dapat terlihat bahwa wilayah Kecamatan Cimahi Utara juga mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 .

Proyeksi pertumbuhan penduduk juga dilakukan untuk melihat besarnya tekanan populasi pada tahun 2045. Hasil dari proyeksi tersebut menunjukkan daerah yang memiliki tekanan populasi yang pesat mencakup hampir semua wilayah di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Utara, dan Kecamatan Cimahi Tengah.

Adanya tekanan populasi tersebut akan berbanding lurus terhadap kebutuhan rumah bagi penduduk, semakin tinggi penduduk semakin meningkat juga kebutuhan akan tempat tinggal yang layak, sehingga kebutuhan akan lahan dan rumah tinggal yang layak dapat menjadi tekanan terhadap lingkungan untuk beberapa tahun kedepan.

2.1.2.2 Tumpang Tindih Penggunaan Lahan

Konflik penggunaan lahan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tumpang tindih area penggunaan lahan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, terutama apabila pemanfaatan yang dilakukan tidak memperhatikan fungsi ekologi atau jasa ekosistem di suatu kawasan. Jika dikaitkan dengan faktor-faktor pemicu dalam analisis ini, tumpang tindih penggunaan lahan mungkin saja dipicu oleh kebijakan dalam RPJMD Kota Cimahi dan program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung serta kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai izin lingkungan.

Hal tersebut dapat menjadi pemicu adanya revisi RTRW di Kota Cimahi. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya beberapa perencanaan pembangunan strategis yang belum tercantum dalam dokumen RTRW di Kota Cimahi sebelumnya. Kondisi eksisting tutupan lahan jika dibandingkan dengan pemanfaatan lahan berdasarkan RTRW dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. Kejadian tumpang tindih lahan antara kondisi eksisting dengan RTRW (perencanaan) dapat menimbulkan tekanan terhadap kondisi lingkungan, seperti status/indeks kualitas tutupan lahan dan penurunan muka air tanah.

Tabel 2.2 Luas Tumpang Tindih Lahan Berdasarkan Pemanfaatannya

Pemanfaatan Lahan Berdasarkan RTRW	Tutupan Lahan Eksisting	Luas Wilayah Tumpang Tindih (ha)
Kawasan yg memberikan perlindungan kawasan bawahnya	Permukiman	529,18
	Industri	2,53
	Pertanian	903,66
Kawasan Perlindungan Setempat	Permukiman	49,55
	Industri	14,47
	Pertanian	47,04
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Permukiman	1,31
	Industri	0,55
	Pertanian	0,06
Kawasan Cagar Budaya	Permukiman	3,75
	Industri	0,30
	Pertanian	10,00
Kawasan Rawan Bencana Alam	Permukiman	366,23
	Industri	109,90
	Pertanian	528,93
Kawasan Lindung Lainnya	Permukiman	5,87
	Industri	0,02
	Pertanian	10,91
Kawasan Perumahan	Pertanian	319,54
	Industri	9,80
Kawasan Industri	Permukiman	61,18
	Pertanian	64,35

Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2019

2.1.2.3 Aktivitas Industri dan Perdagangan

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Aktivitas perdagangan seperti ini biasanya terletak pada suatu

bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta terdapat seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut (BPS Kota Cimahi).

Adanya target prioritas pembangunan mendorong pemerintah untuk mewujudkan target tersebut ke dalam sebuah rencana pembangunan berbasis ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi 2012-2032. RTRW yang tertuang dalam Perda No.4 Tahun 2013 ini bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan dengan cara meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika. Peningkatan perekonomian juga berperan sebagai pemicu yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi penataan ruang yang terdiri atas:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
3. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Upaya dalam mencapai keberhasilan pembangunan pada sektor-sektor prioritas, yang salah satunya merupakan sektor perdagangan dan industri, akan sangat bergantung pada potensi, ketersediaan dan keterbatasan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kota Cimahi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional juga sangat menentukan tingkat keberhasilan. Letak geografis dan karakteristik bentang alam Kota Cimahi selain berperan sebagai salah satu aset pembangunan yang menyimpan berbagai potensi dan ketersediaan sumber daya alam untuk pembangunan, juga sekaligus berperan sebagai pembatas pembangunan, khususnya wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik ekoregion yang rentan dan/atau rawan bencana.

Sebaran kawasan perdagangan dan jasa di Kota Cimahi sebagian besar berada pada titik-titik keramaian atau pusat kota. Kawasan perdagangan tersebut tersebar di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Cimahi, dan Kelurahan Setiamanah. Secara visual, titik sebaran perdagangan dan jasa di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut.

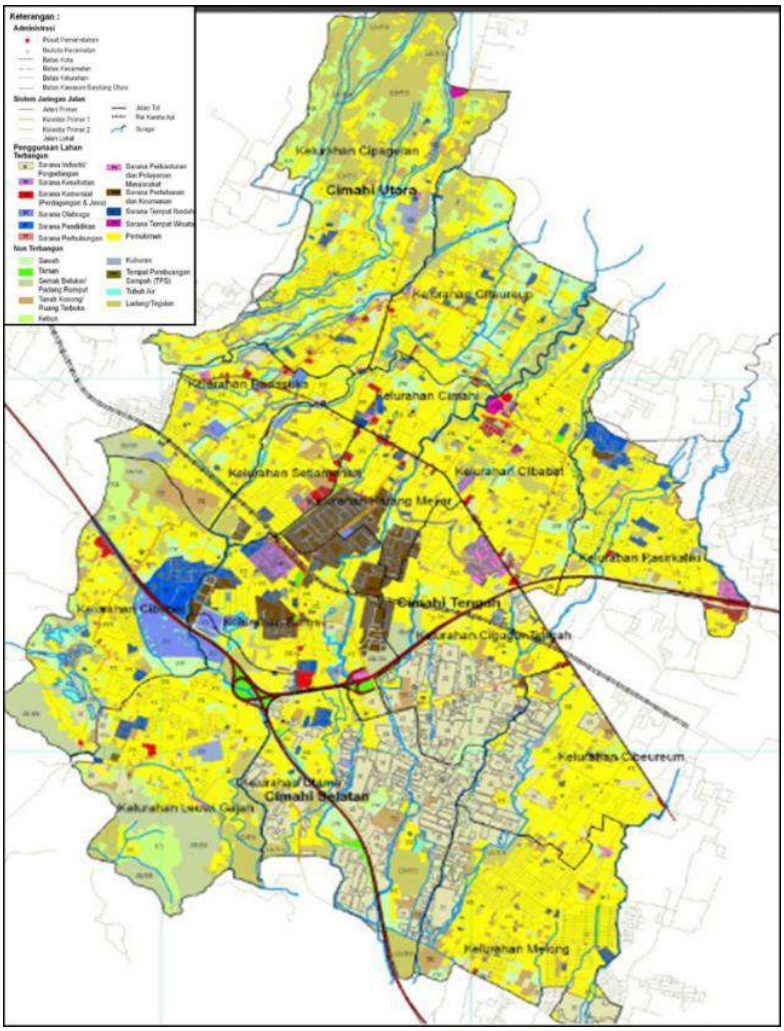

Gambar 2.8 Sebaran Kawasan Perdagangan dan Jasa

(Sumber : Bappeda Kota Cimahi, 2013)

Sebaran perdagangan dan jasa di Kota Cimahi cenderung memiliki pola jaringan jalan seperti halnya pasar, swalayan, toko-toko, serta kaki lima. Lokasi sebaran perdagangan dan jasa di Kota Cimahi sebagian besar berpusat di Kecamatan Cimahi Tengah sebagai area atau kawasan komersial. Persebaran kawasan industri ini dapat menekan status

penggunaan lahan. Secara tidak langsung, hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas tutupan lahan dan muka air tanah di kawasan tersebut.

2.1.2.4 Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Para pelaku usaha dapat menjadi tekanan terhadap tata guna lahan yang tersedia di Kota Cimahi, terutama jika para pelaku usaha tersebut tidak taat dalam pengelolaan lingkungan yang salah satu parameternya adalah kepemilikan izin lingkungan.

Pengawasan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup)/UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Pada tahun 2019 terdapat 59 industri atau kegiatan/usaha yang telah melaksanakan UKL/UPL (Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020).

2.1.2.5 Peningkatan Timbulan Limbah

Pertumbuhan penduduk tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk dan penggunaan lahan saja. Berdasarkan aspek lingkungan lainnya, secara tidak langsung pertumbuhan penduduk akan diiringi dengan peningkatan timbulan limbah, baik limbah cair maupun limbah padat (sampah). Beberapa penelitian menyebutkan perkiraan air yang akan menjadi air limbah dari hasil kegiatan manusia yaitu sebesar 70%-80%. Sedangkan timbulan limbah padat atau sampah untuk setiap sumber (rumah, kantor, pasar, jalan, dan sebagainya) berbeda-beda, mulai dari 0,05 liter/orang/hari hingga 3 liter/orang/hari. Pada tahun 2019, data menunjukkan Kota Cimahi dihuni oleh 553.755 jiwa penduduk. Tentu tidak sedikit limbah yang

ditimbulkan dari orang-orang yang tinggal di kota tersebut. Jika melihat data pada dua tahun ke belakang, jumlah timbulan limbah cair dan sampah memang berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 548.373 jiwa dengan timbulan sampah 1.365 m^3/hari dan timbulan air limbah 54.837,3 m^3/hari (RPPLH Kota Cimahi, 2019). Sedangkan pada tahun 2019 kota ini diduduki oleh 553.755 jiwa dengan timbulan sampah 1.378 m^3/hari serta timbulan air limbah 55.375,5 m^3/hari (RPPLH Kota Cimahi, 2019).

2.1.3 State

2.1.3.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah penggunaan tanah/lahan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya. Penggunaan lahan melibatkan manajemen dan modifikasi lingkungan alam. Penggunaan lahan dan pengelolaan lahan memiliki kaitan yang erat dengan sumber daya alam seperti air, tanah, nutrisi, tanaman dan hewan.

Di Kota Cimahi sendiri, tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan. Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, pengendalian bahaya banjir, pengelolaan air tanah, penahan angin, dan lain sebagainya. Pada Tahun 2018, luas hutan kota di Kota Cimahi adalah 230,09 Ha.

Jika dilihat dari luas penggunaan lahan utamanya, Pada Tahun 2019 penggunaan lahan didominasi oleh kegiatan non pertanian (mencapai luasan 3.492,208 Ha atau 86,8% dari total luas penggunaan lahan di Kota Cimahi). Persentase penggunaan lahan utama di Kota Cimahi disajikan pada Gambar 2.9 berikut.

Gambar 2.9 Penggunaan Lahan Utama

(Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2019)

Penggunaan lahan non pertanian adalah penggunaan lahan selain untuk pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Contoh penggunaan lahan non pertanian adalah untuk permukiman, kawasan industri, perdagangan, dan wilayah komersil lainnya.

2.1.3.2 Tutupan Lahan Vegetasi dan Keadaan Flora Fauna

Vegetasi merupakan bagian hidup yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi. Analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan komposisi spesies dan bentuk struktur vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Dalam ekologi hutan satuan yang diamati adalah suatu tegakan yang merupakan asosiasi konkrit (Rohman, 2001)

Jenis vegetasi pada suatu wilayah dipengaruhi oleh jenis ekoregion darat. Ekoregion sendiri merupakan daratan atau perairan luas yang melingkupi spesies-spesies, komunitas alam, dan kondisi lingkungan yang bersatu secara nyata dalam sebuah lingkup geografis. Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Ketiga jenis ekoregion tersebut masuk dalam kelas ekoregion darat Jawa Barat yaitu pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal (Gambar 2.10).

Dari Gambar 2.10 dapat terlihat bahwa Kota Cimahi didominasi oleh dataran vulkanik. Dataran vulkanik hampir mencakup seluruh kecamatan di Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Dataran vulkanik memiliki karakteristik kerapatan vegetasi yang rendah dan terdiri dari beberapa lapisan tajuk vegetasi. Tumbuhan *cauliflora* (tumbuhan yang berbunga pada batang) terdapat banyak pada ekosistem ini seperti jenis-jenis dari famili *Moraceae.*

Apabila dilihat dari kondisi tutupan lahan vegetasi, luas tutupan lahan vegetasi di Kota Cimahi adalah sebesar 52,96% dari luas total Kota Cimahi. Secara detail, komposisi luas tutupan vegetasi kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.11.

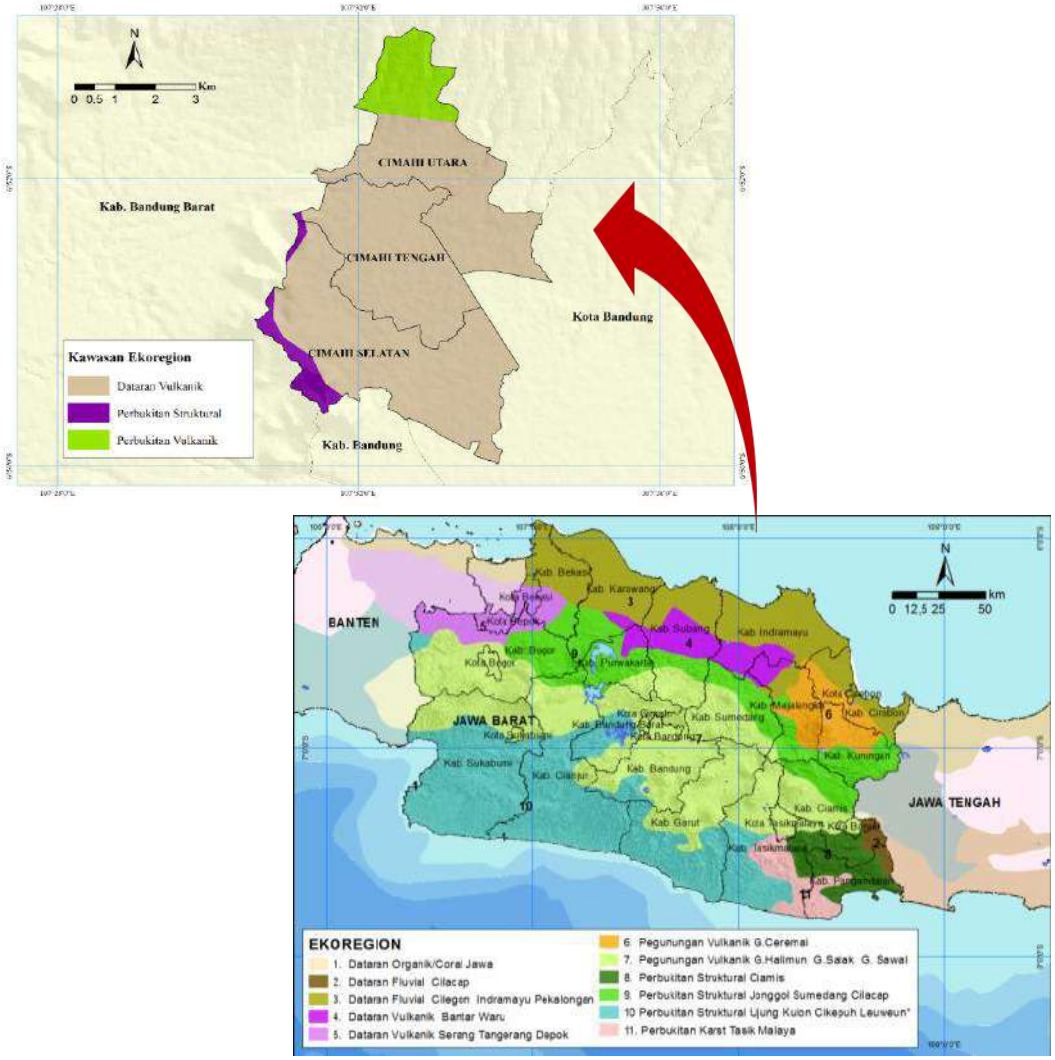

Gambar 2.10 Ekoregion Kota Cimahi

(Sumber : RPPLH Kota Cimahi, 2017)

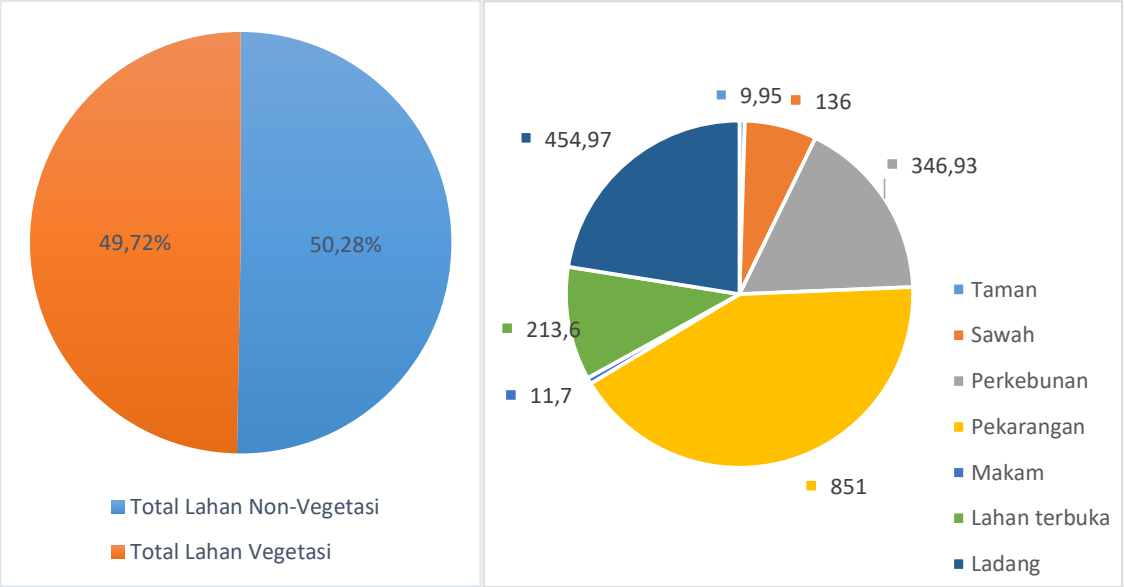

Gambar 2.11 Komposisi Luas Tutupan Vegetasi

(Sumber : Hasil Analisis, 2020)

Dari gambar 2.11, terlihat bahwa Kota Cimahi masih didominasi oleh pekarangan. Lahan pekarangan disini dapat tersebar di rumah-rumah ataupun perkantoran yang ditanami tumbuhan. Luas pekarangan yang berada di Kota Cimahi adalah sebesar 851,41 Ha atau 42,04% dari luas total lahan vegetasi di Kota Cimahi sebesar 2.024,15 Ha (50,28% dari luas Kota Cimahi secara keseluruhan)

Keadaan flora dan fauna di Kota Cimahi sangat beragam namun tidak terdapat flora dan fauna yang khas dari Cimahi. Terdapat beberapa hewan yang berstatus dilindungi dan tidak dilindugi, namun flora dan fauna di Kota Cimahi yang mendominasi dalam keadaan status tidak terancam.

2.1.3.3 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Dampak lain dari penggunaan lahan dan hal lain yang terkait adalah nilai indeks tutupan lahan. Nilai tersebut berpengaruh terhadap lahan hijau yang berada di suatu daerah. Jika terjadi kekurangan lahan hijau di suatu wilayah maka akan berdampak kecilnya nilai IKTL. Berdasarkan Perdirjen PPKL No.

P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan, IKTL dihitung berdasarkan luas tutupan hutan dan luas administrasi. Luas tutupan hutan dihitung berdasarkan :

a. Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman (a)

b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25 % (b)

c. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (c).

Kota Cimahi sendiri pada kondisi eksisting tidak memiliki area hutan. Berikut merupakan perhitungan IKTL Kota Cimahi.

Luas Tutupan Hutan= a + (b x 0,6) + (c x 0,6)

= 0 + (17,4 Ha x 0,6) + (237,12 Ha x 0,6) = 152,74Ha

Tutupan Hutan $= \frac{\text{LTH (Luas Tutupan Hutan)}}{\text{LWKP (luas wilayah Kota)}} = \frac{152{,}74\ \text{Ha}}{4025{,}73\ \text{Ha}} = 0{,}038$

IKTL $= 100 - \left(\left(84{,}3 - (\text{TH x } 100)\right) \text{x} \frac{50}{54{,}3}\right)$

$= 100 - \left(\left(84{,}3 - (0{,}038 \text{ x } 100)\right) \text{x} \frac{50}{54{,}3}\right) = \mathbf{25{,}87}$

Dari hasil perhitungan di atas maka diperoleh Indeks kualitas tutupan lahan Kota Cimahi Tahun 2019 adalah sebesar 25,87. Karena Beberapa hal tersebut terkait kondisi lingkungan di Kota Cimahi yang saling berkaitan dan berpotensi dalam beberapa tahun kedepan, maka perlu adanya sinergis antara pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, sehingga

lingkungan Kota Cimahi dapat memberikan dampak yang positif bagi warga yang tinggal, begitu pula dapat meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja daerah.

2.1.3.4 Penurunan Muka Air Tanah

Kedudukan geografis Kota Cimahi yang sangat strategis dan memiliki potensi sebagai sentra kegiatan pelayanan jasa, terutama industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan, menyebabkan peningkatan pengambilan sumber daya air. Berdasarkan data potensi air di Kota Cimahi, diketahui bahwa sumber air potensial di Kota Cimahi terdiri dari air tanah (mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dan air permukaan (danau/kolam dan Sungai Cimahi). Pengambilan air tanah umumnya dilakukan sebagian besar dengan menggunakan sumur bor untuk usaha industri, usaha komersial lainnya atau masyarakat, dimana beberapa pengambilan air tanah telah melebihi kapasitas yang diijinkan dalam SIPA/Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.

Berdasarkan Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, sejumlah kawasan di cekungan bandung yang sudah masuk dalam zona merah diantaranya kawasan industri di Kota Cimahi dan Bandung bagian selatan dan di Rancaekek Kab. Bandung. Sesuai peta konservasi air tanah, kawasan Cimahi Selatan seperti di Leuwigajah, Rancaekek dan Bandung Selatan termasuk zona merah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tahun 2008 lalu, dari potensi imbuhan air tanah di Cekungan Bandung sebesar 117 m^3/tahun, 55 persen dari jumlah tersebut sudah dipergunakan. Dari 55% potensi imbuhan Cekungan Bandung, sebagian besar diambil oleh industri.

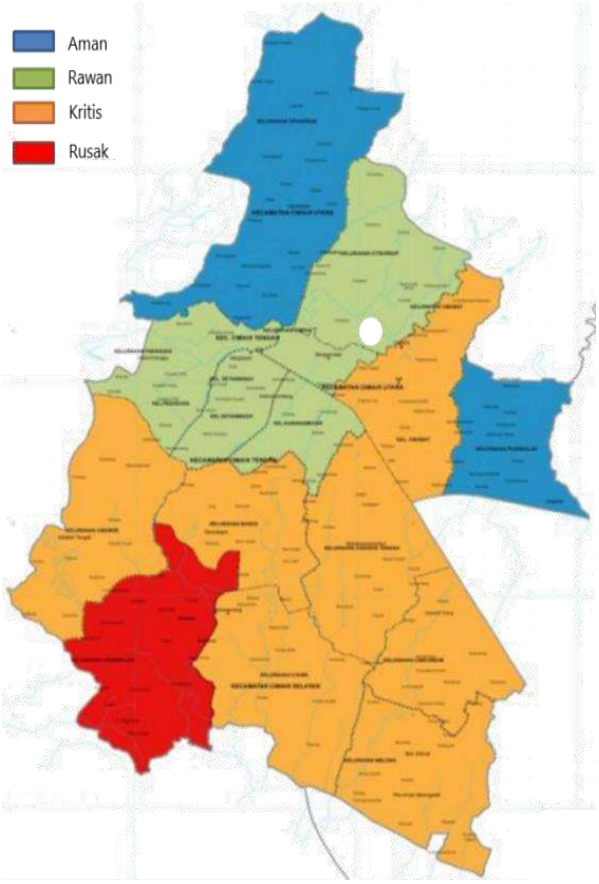

Gambar 2.12 Peta Penurunan Muka Air Tanah

(Sumber : Hastuti, 2017)

Dilansir dari laman Pikiran Rakyat (2019), Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang mengalami dampak dari eksploitasi air tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB), penurunan muka tanah di sejumlah titik di Bandung, termasuk Cimahi dapat mencapai 1-20 cm per tahun. Kota Cimahi terutama di kawasan industri seperti di Kelurahan Leuwigajah mengalami penurunan muka tanah yang cukup signifikan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penurunan muka air tanah. Saat ini Kota Cimahi hanya mengelola retribusi/pajak air tanah, namun tidak melakukan pengawasan lebih lanjut. Sehingga penyelidikan mengenai titik eksploitasi yang menyalahi aturan belum dan sulit dilakukan.

2.1.3.5 Pengelolaan Limbah

Berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan timbulan limbah termasuk limbah cair dan limbah padat (sampah), pengelolaannya tentu sangat berperan dalam analisis isu tata guna lahan dengan metode D-P-S-I-R ini. Dengan banyaknya limbah yang ditimbulkan di kota ini, pada kenyataannya, pada tahun 2017 cakupan pelayanan rata-rata air limbah di Kota Cimahi sebesar 79,46% (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019). Sedangkan untuk pengelolaan sampah, pada tahun 2018 Kota Cimahi, di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertanaman, melayani 79,50% sampah yang ditimbulkan dimana 6% tereduksi di sumber dan 73,50% terangkut ke TPA Sarimukti.

Jika dianalisis lebih lanjut dengan metode skoring berdasarkan Pedoman Strategi Sanitasi Kota, Kota Cimahi masih berisiko dalam pengelolaan limbah-limbah ini (Tabel 2.3). Terkait pengelolaan air limbah, dari total 15 kelurahan terdapat 4 kelurahan berisiko sangat tinggi, 2 kelurahan berisiko tinggi, 3 kelurahan berisiko rendah, dan 2 kelurahan berisiko sangat rendah. Sedangkan untuk pengelolaan sampah terdapat 3 kelurahan berisiko sangat tinggi, 1 kelurahan berisiko tinggi, 2 kelurahan berisiko rendah, dan 9 kelurahan berisiko sangat rendah.

Tabel 2.3 Jumlah Kelurahan Berdasarkan Tingkat Risiko Pengelolaan Limbah

Jenis Limbah	Jumlah kelurahan			
	Risiko sangat rendah	Risiko rendah	Risiko tinggi	Risiko sangat tinggi
Limbah cair	6	3	2	4
Limbah padat (sampah)	9	2	1	3

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.1.4 Impact

2.1.4.1 Kejadian dan Bencana

Dari adanya tekanan terhadap penggunaan lahan, terjadi beberapa dampak yaitu banjir dan tanah longsor. Banjir dapat terjadi akibat jumlah air yang ada di danau, sungai, ataupun daerah aliran air lainnya melebihi kapasitas atau daya dukung kondisi eksisting di wilayah tersebut (daya serap oleh tanah/tanaman dan kondisi drainase). Intensitas hujan yang tinggi juga tentu berperan sebagai penyebab terjadinya banjir. Sedangkan bencana longsor dapat terjadi akibat pergerakan tanah maupun pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Erosi atau pengikisan tanah yang terutama berada di dataran tinggi dan kelerengan yang curam juga mendukung terjadinya longsor. Namun, jumlah vegetasi atau pepohonan yang cukup dapat mencegah atau meminimalkan dampak longsor tersebut. Sehingga lahan yang digunakan untuk ruang terbuka hijau tentu sangat bermanfaat dalam pengendalian bencana ini.

Kejadian banjir dan tanah longsor selama tahun 2019 masing-masing tercantum dalam lampiran Tabel 44 dan Tabel 47 (meliputi waktu kejadian, lokasi, penyebab, dampak, dan penanggulangan). Secara ringkas, berdasarkan besarnya dampak, lokasi, dan frekuensi, terjadinya banjir dan tanah longsor tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.13 Dan Gambar 2.14.

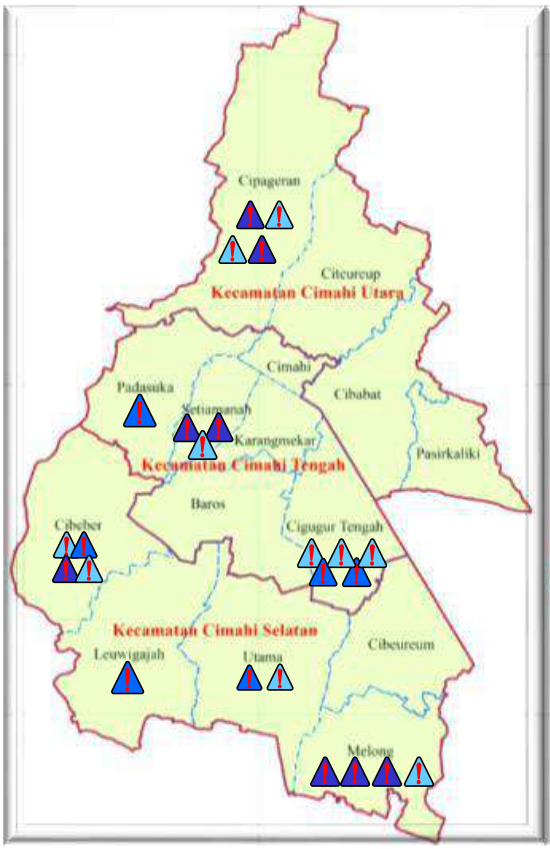

Gambar 2.13 Titik Lokasi Bencana Banjir Tahun 2019

Sumber: BPBD Kota Cimahi, 2019

Gambar 2.14 Titik Lokasi Bencana Tanah Longsor Tahun 2019

Sumber: BPBD Kota Cimahi, 2019

Berdasarkan Gambar 2.12 di atas, bencana banjir paling sering terjadi di Kecamatan Cimahi Selatan dengan besaran dampak yang beragam. Sedangkan kelurahan yang sering dilanda banjir yaitu Kelurahan Melong, Kelurahan cibeber, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Cipageran. Jika dikorelasikan dengan kondisi eksisting lahan, pada Gambar 2.6 (Peta Pola Ruang) terlihat bahwa Kelurahan Melong dan Kelurahan Cigugur Tengah merupakan wilayah padat penduduk, sedangkan Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Cipageran kepadatan sedang. Dari empat kelurahan tersebut, tiga kelurahan di antaranya telah teridentifikasi lebih dulu dalam pola ruang Kota Cimahi (RTRW) sebagai wilayah rawan banjir. Selain itu, hasil analisis risiko sanitasi sektor drainase juga memperkuat bahwa Kelurahan Melong masih memiliki risiko yang sangat tinggi dalam

pengelolaan sistem drainasenya (Hasil analisis berdasarkan Pedoman Strategi Sanitasi Kota, 2019).

Kemudian jika dilihat pada Gambar 2.14, nampak jelas bahwa Kelurahan Cipageran adalah satu-satunya kelurahan yang paling sering terjadi bencana tanah longsor, mulai dari dampak ringan hingga dampak berat (menyebabkan korban jiwa). Dalam Peta Pola Ruang Kota Cimahi, Kelurahan Cipageran telah ditetapkan sebagai wilayah rawan longsor. Berdasarkan kemiringan lerengnya, kelurahan ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan 8-15% dengan ketinggian 850-1.075 mdpl (kelurahan yang berada di dataran paling tinggi di Kota Cimahi). Walaupun masih terdapat vegetasi atau lahan hijau seperti ladang, kebun, belukar, dan sebagainya, kedua faktor tersebut masih cukup kuat sebagai penentu terjadinya bencana longsor. Selain itu jenis tanah dan intensitas hujan yang turun juga dapat dipertimbangkan dalam analisis lebih lanjut.

2.1.4.2 Kerusakan Lahan Kering

Lahan kering merupakan lahan yang tidak mengandung banyak air, sehingga biasanya lahan ini bergantung pada curah hujan. Walau begitu, lahan kering ini dapat digunakan sebagai lahan pertanian, lahan permukiman, lokasi industri, perkantoran, serta pembangunan lainnya yang menunjang kemajuan suatu daerah. Karena lahan kering biasanya banyak ditemui secara luas, maka evaluasi kualitas tanah pada analisis ini difokuskan pada lahan kering. Terdapat 11 parameter yang diuji pada tanah di Kota Cimahi. Karena keterbatasan, pengujian hanya dilakukan pada tanah yang berada di 9 titik, yaitu Cileuweung, Pakuhaji, Terobosan, Cimenteng 2, Lebaksaat, Ciuyah, Warung Mancung, Permana, dan Cimenteng. Berikut Tabel 2.4 yang menunjukkan kondisi lahan kering di Kota Cimahi.

Tabel 2.4 Evaluasi Lahan Kering

No.	Parameter	Satuan	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Uji	Kesesuaian dengan Peraturan
1	Ketebalan solum	cm	<20	>20	Memenuhi
2	Kebatuan permukaan	%	>40	50,74-76,98	9 lokasi tidak memenuhi
3	Komposisi fraksi	%koloid	<18	17-62	1 lokasi tidak memenuhi
4	Komposisi frkasi	%pasir	>80	10-39	Memenuhi
5	Berat isi	g/cm^3	>1,4	0,91-1,25	Memenuhi
6	Porositas	%	<30 ; >70	52,88-65,92	Memenuhi
7	Permeabilitas	cm/jam	<0,7 ; >8,0	7,39-31,23	8 lokasi tidak memenuhi
8	pH	-	<4,5 ; <8,5	5,28-6,90	Memenuhi
9	DHL	mS/m	>4,0	0,067-0,201	Memenuhi
10	Redoks	mV	<200	-13,1-15,8	Memenuhi
11	Jumlah mikroba	cfu/g tanah	$<10^2$	(0,54-1,6)) x 10^{10}	Memenuhi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020)

Secara umum kondisi lahan kering di Kota Cimahi masih banyak yang memenuhi ambang kritis, hanya 3 parameter yang melebihi ambang batas kritis di beberapa lokasi: komposisi fraksi (1 lokasi), permeabilitas (8 lokasi), dan kebatuan permukaan (9 lokasi).

Tanah atau lahan kering ini jika dibiarkan rusak dan tidak ada pengendalian, maka lahan tersebut sangat mungkin menjadi lahan kritis. Lahan kritis yaitu lahan yang mengalami penurunan fungsi akibat faktor alamiah dan faktor antropogenik (aktivitas manusia). Penurunan fungsi atau degradasi lahan tersebut dapat dibedakan berdasarkan aspek fisik, kimia, dan biologi. Aspek fisik dapat berupa erosi, pemadatan tanah, dan sebagainya. Sedangkan

aspek kimia dapat berupa perubahan pH, pencemaran oleh senyawa atau unsur kimia, dan lain-lain. Kemudian aspek biologi erat hubungannya dengan keberadaan mikroorganisme yang biasanya dipercepat oleh buangan dari aktivitas manusia.

Berdasarkan data spasial Kota Cimahi, terdapat 567,62 Ha lahan sangat kritis, 104, 37 lahan agak kritis, 121,86 lahan kritis dan terdapat 3.454,24 Ha lahan di Kota Cimahi yang merupakan berpotensi sebagai lahan kritis. Pemetaan Kota Cimahi berdasarkan lahan kritis dapat dilihat pada Gambar 2.15Jika dihubungkan dengan analisis sebelumnya (*driving force, pressure,* dan state), faktor yang mungkin paling representatif yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini secara tidak langsung menggambarkan jumlah penduduk dan ketersediaan lahannya, penggunaan lahan, banyaknya limbah yang ditimbulkan, banyaknya air tanah yang digunakan, dan sebagainya. Berdasarkan perhitungan dari data jumlah penduduk dan luas area terbangun, berikut kepadatan penduduk untuk setiap kelurahan di Kota Cimahi (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
Cimahi Utara	Pasirkaliki	267
	Cibabat	340
	Citeureup	212
	Cipageran	145
Cimahi Tengah	Baros	170
	Cigugur tengah	367
	Karang Mekar	226
	Setiamanah	308
	Padasuka	358
	Cimahi	285
Cimahi Selatan	Melong	374
	Cibeureum	402
	Utama	165
	Leuwigajah	206
	Cibeber	149

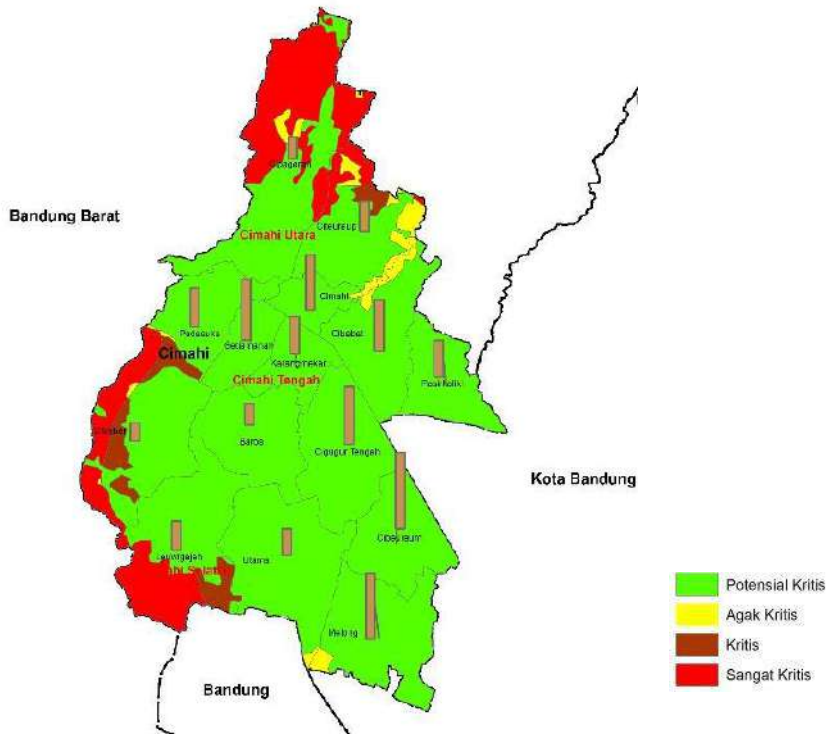

Gambar 2.15 Lahan Kritis

(Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat dan Hasil Analisis, 2020)

2.1.4.3 Kualitas Udara dan *Airborne Diseases*

Kondisi lingkungan seperti status pengunaan lahan dan tutupan vegetasi secara tidak langsung berkaitan dengan kualitas udara di suatu wilayah, termasuk hal nya di Kota Cimahi. Kualitas udara seperti yang disebutkan tidak hanya mempengaruhi lingkungan saja, tetapi juga akan berdampak terhadap manusia secara langsung. Hubungan antara penggunaan lahan, kualitas udara, dan *airborne diseases* (penyakit bawaan udara) yaitu ketika lahan di suatu wilayah didominasi oleh lahan non vegetasi, maka lingkungan dapat mengalami kekurangan lahan hijau atau tanaman. Dikutip dari Martuti (2013), tanaman atau pepohonan dapat berfungsi sebagai penyerap dan penjerap bahan pencemar serta debu di udara. Wilayah yang kekurangan vegetasi karena diperuntukkan untuk kegiatan domestik

maupun non domestik tentu tidak akan optimal untuk mengendalikan pencemaran udara secara alami ini.

Pencemaran udara yang tidak dikendalikan dapat memberi dampak terhadap lingkungan seperti udara terlihat tidak jernih, menimbulkan aroma yang tidak sedap, dan sebagainya. Sedangkan dampak terhadap kesehatan manusia dapat berupa *airborne disease* umumnya seperti infeksi saluran pernafasan, asthma, emfisema, kelainan jaringan paru-paru, bahkan gangguan sistem saraf pusat, tergantung pada senyawa yang terkandung dalam udara (Soemirat, 2011).

Secara ringkas, keterkaitan antara variabel-variabel di atas dapat dilihat pada Gambar 2.16. Sedangkan Tabel 2.6 menunjukkan kualitas udara ambien di Kota Cimahi pada tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran di beberapa lokasi *sampling*. Adapun parameter yang diuji ialah NO_2 dan SO_2 karena dianggap dua parameter ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia serta umum dihasilkan pada udara yang tercemar. Menurut Soemirat (2011), SO_2 dengan beragam konsentrasi, mulai dari yang rendah dan tinggi dapat menyebabkan penyakit bagi manusia. Pun dengan NO_2 yang bersifat toksik bagi manusia walau dengan konsentrasi rendah. Kedua parameter ini umumnya berasal dari pembakaran, mengingat banyak industri dan padat lalu lintas di Kota Cimahi.

Kemudian Gambar 2.17 menunjukkan angka penyakit yang umumnya diderita oleh penduduk Kota Cimahi (Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2019). Berdasarkan diagram tersebut terlihat jelas bahwa penyakit yang paling banyak diderita oleh penduduk adalah infeksi saluran pernafasan (94,13%). Angka tersebut dapat dikaitkan dengan penggunaan lahan yang memprioritaskan kegiatan domestik/non domestik tanpa tutupan vegetasi yang cukup.

Tabel 2.6 Hasil Uji Sampel Udara Ambien

No.	Titik *Sampling*	Lokasi		Konsentrasi (µg/Nm³)	
		Kelurahan	Kecamatan Cimahi	SO_2	NO_2
1	Kantor BPJS Kesehatan Jl. Sangkuriang	Cipageran	Utara	<2,57	17,4
2	PT Dewasutra	Cigugur Tengah	Tengah	23,97	21,1
3	Perum. Kamarung rgc.	Citeureup	Utara	6,57	18,7
4	Kantor Kelurahan Melong	Melong	Selatan	8,03	16,6
5	PT logam bima	Padasuka	Tengah	2,62	18,7
6	PT jenshiang nusantara	Melong	Selatan	34,16	21,2
7	Perumahan Pilar mas	Utama	Selatan	25,79	18,1
8	Kantor Kelurahan Cigugur tengah	Cigugur Tengah	Tengah	10,49	19

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019)

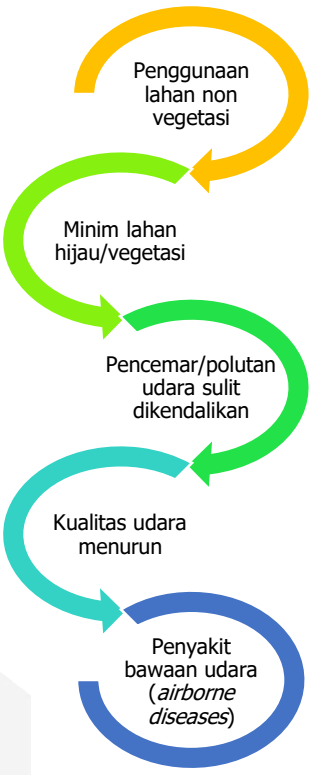

Gambar 2.16 Skema Keterkaitan Penggunaan Lahan - *Airborne Diseases*

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

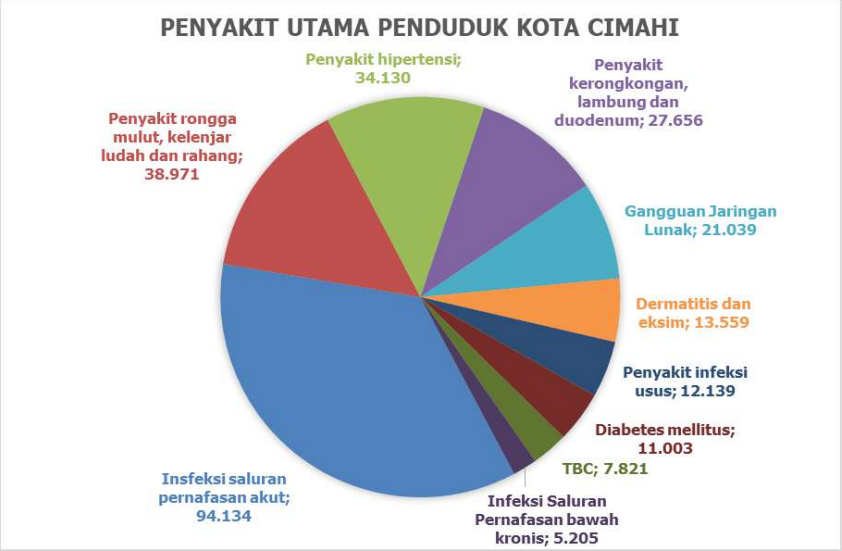

Gambar 2.17 Penyakit Terbanyak Penduduk Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2019)

2.1.4.4 Kualitas Air

Penurunan kualitas air khususnya air sungai dapat terjadi karena perubahan tata guna lahan. Terlebih jika penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam RTRW Kota Cimahi. Hal ini mungkin saja tidak terlalu memberi dampak jika air limbah domestik maupun non domestik di Kota Cimahi dikelola dengan baik dan melayani semua penduduk. Seperti data yang telah disebutkan dalam analisis sebelumnya, bahwa Kota Cimahi belum melayani 100% limbah penduduknya, terutama limbah domestik. Selain itu, pengawasan terhadap pembuangan limbah dari sektor non domestik seperti industri juga perlu ditingkatkan lagi.

Dalam analisis kualitas ini dibahas 3 parameter yang dianggap paling representatif, yaitu *Total Suspended Solid* (TSS), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Dissolved Oxygen* (DO). Dengan berbagai macam pencemar yang masuk ke dalam sungai tentu berhubungan dengan ketiga parameter tersebut secara tidak langsung. Limbah atau pengotor yang mencemari air sungai biasanya mengandung bahan organik, baik dari limbah domestik ataupun non domestik. Bahan organik ini digambarkan dengan konsentrasi

COD dalam air. Sedangkan limbah yang mengandung padatan tersuspensi juga sering ditemui dari berbagai sumber, seperti buangan limbah dari kegiatan domestik atau industri, atau berasal dari kikisan tanah yang terbawa oleh air (Tchobanoglous, et al., 2014). Parameter terakhir yaitu DO atau oksigen terlarut yang dapat menggambarkan tingkat tercemarnya suatu sungai. Pencemar yang umumnya mengandung zat organik sangat memerlukan oksigen dalam air untuk melakukan degradasi atau pengurangan. Maka dari itu, semakin banyak pencemar, semakin sedikit pula oksigen terlarut yang tersisa dalam air. Rendahnya konsentrasi DO ini juga dapat mengganggu kehidupan akuatik, menimbulkan bau, dan menghalangi penetrasi cahaya matahari ke dalam air (Effendi, 2003).

Hasil uji kualitas air sungai yang terdapat pada Gambar 2.18 hingga Gambar 2.20 di bawah merupakan data pengujian pada bulan Juli 2019. Data ini digunakan dalam analisis karena dilakukan pada musim kemarau yang tak lain kemampuan *self purification* air sungai tak sebesar pada musim hujan.

Gambar 2.18 *Trend* Konsentrasi TSS Air Sungai Tahun 2018-2019
(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

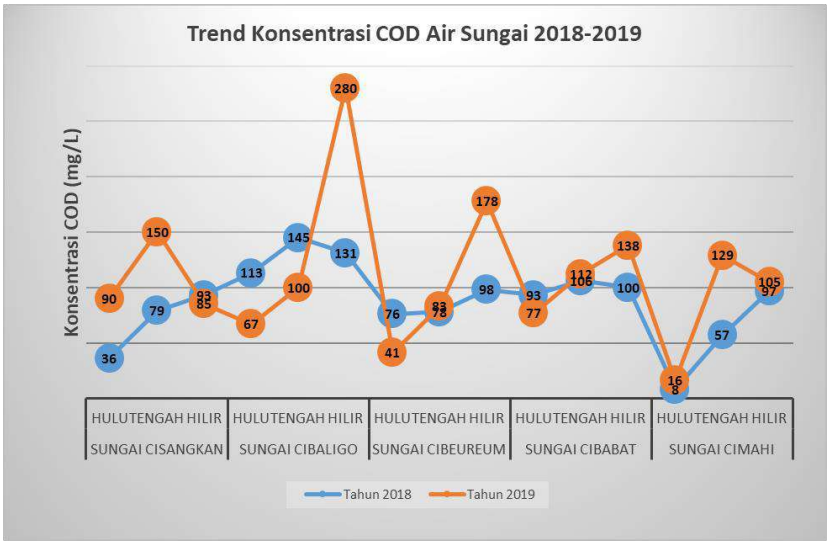

Gambar 2.19 *Trend* Konsentrasi COD Air Sungai Tahun 2018-2019

(Sumber: Hasil Analisis,2020)

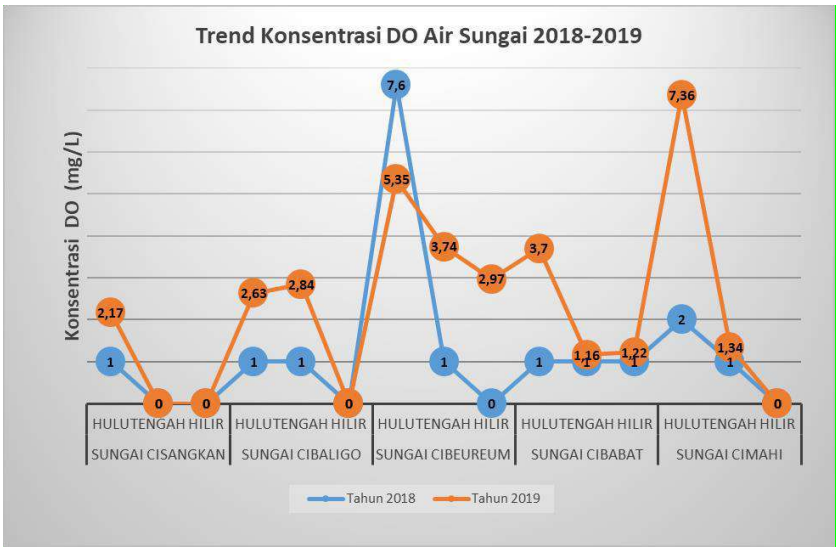

Gambar 2.20 *Trend* Konsentrasi DO Air Sungai Tahun 2018-2019

(Sumber: Hasil Analisis,2020)

2.1.4.5 Kekurangan Air Bersih

Lahan yang digunakan untuk pembangunan memang mendukung untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya di bidang ekonomi. Namun, jika pembangunan tersebut tidak menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, tentu tujuan pembangunan tersebut tidak tercapai secara optimal di masa mendatang atau bahkan merugikan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak terkait tata guna lahan ini dapat berupa keterbatasan air bersih. Alasan isu ini dapat menyebabkan terbatasnya air bersih yaitu ketika jumlah penduduk terus meningkat, secara tidak langsung jumlah air yang digunakan pun meningkat, termasuk penggunaan air tanah. Tidak hanya penggunaan untuk aktivitas domestik tetapi juga aktivitas non domestik seperti industri. Eksploitasi air tanah oleh industri dan masyarakat serta alih fungsi lahan serapan menjadi kawasan terbangun (kawasan beton) memperburuk kondisi ini. Berdasarkan kependudukan, kepadatan penduduk representatif dalam menggambarkan banyaknya penduduk di suatu kawasan di Kota Cimahi. Korelasi antara kepadatan penduduk tersebut dengan keterbatasan air bersih dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut ini.

Pada Gambar 2.21, terlihat kebutuhan air bersih di Kota Cimahi Tahun 2015 beragam di setiap wilayahnya, bergantung jumlah penduduk dan peruntukan wilayahnya. Pada tahun tersebut, wilayah yang paling membutuhkan air bersih tersebar di sebagian Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan sebagian kecil Cimahi Selatan. Namun, jika dipertimbangkan pasokan air bersih yang tersedia, tidak semua wilayah mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Gambar 2.22). Pasokan air bersih yang cukup berada di sebagian kecil Cimahi Utara dan sebagian kecil Cimahi Selatan, sedangkan wilayah dengan kebutuhan besar tersebar luas di seluruh kelurahan. Aspek keterjangkauan dalam hal ini tentu tidak akan terpenuhi. Dapat dilihat pada Gambar 2.23 titik-titik wilayah yang tidak memenuhi kebutuhan air bersih penduduknya. Wilayah yang paling krisis air bersih khususnya air tanah ini sebagian besar berada di Kelurahan Melong dan Cibeureum, sebagian kecil Kelurahan Leuwigajah dan Cibeber, Setiamanah, Cigugur Tengah, dan Cipageran.

Jika pada tahun tersebut sudah terjadi kekurangan air bersih, maka pada tahun selanjutnya tidak menutup kemungkinan krisis air bersih akan semakin meluas, mengingat jumlah penduduk yang terus bertambah dalam

masa pembangunan ini seperti yang terlihat pada Gambar 2.24. Dalam RTRW (2012-2032), sebagian wilayah Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis fungsi sosial (tanda berwarna merah dalam peta) yang didukung dengan padatnya sebaran penduduk. Dampak ini akan terus terjadi jika pengawasan eksploitasi air tanah masih belum ditingkatkan.

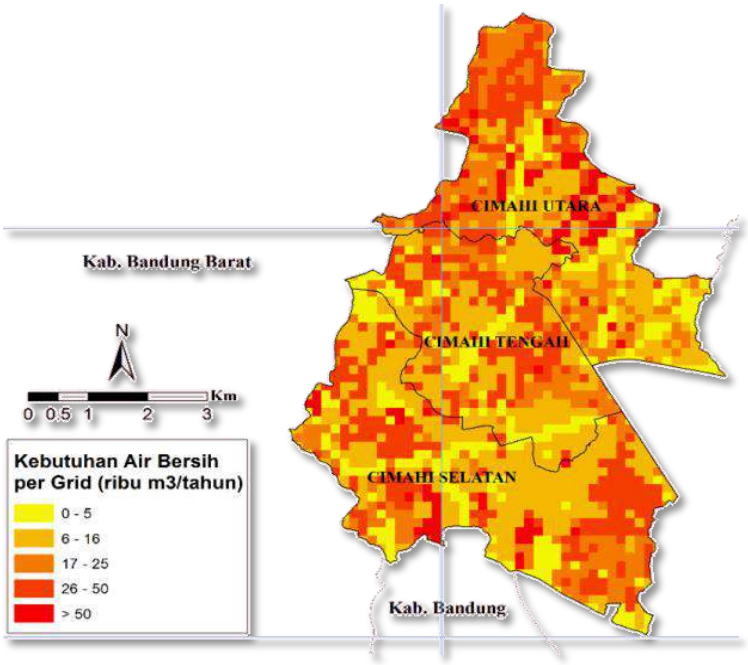

Gambar 2.21 Kebutuhan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015
(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

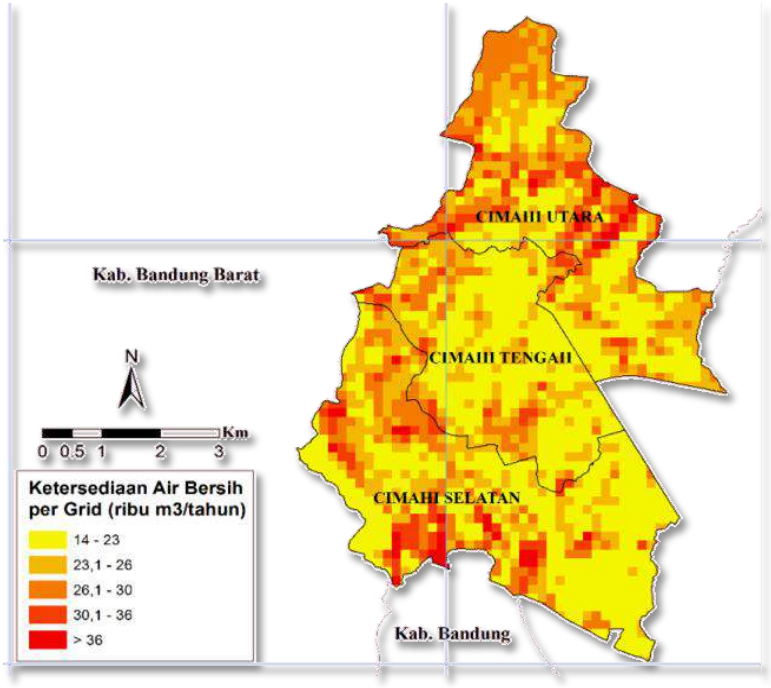

Gambar 2.22 Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

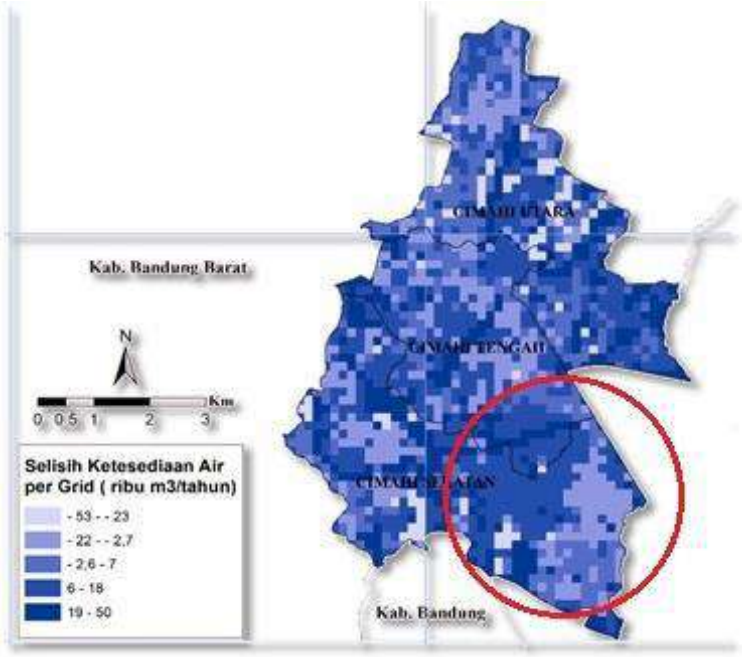

Gambar 2.23 Selisih Ketersediaan Air Bersih di Kota Cimahi Tahun 2015

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

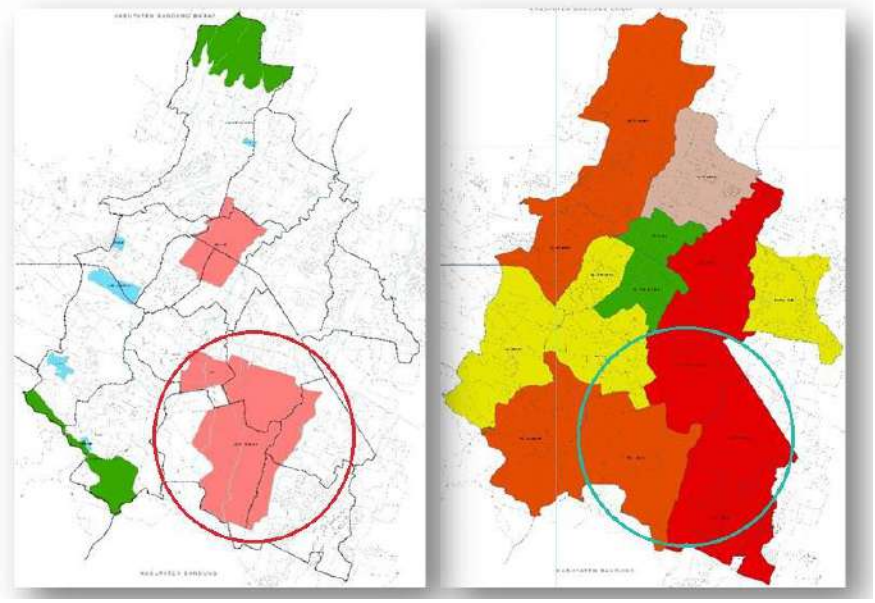

Gambar 2.24 Pemetaan Rencana Strategis dan Sebaran Penduduk Berdasarkan RTRW Kota Cimahi
(Sumber: RTRW Kota Cimahi 2012-2032)

2.1.5 Response

Isu mengenai tata guna lahan yang telah dianalisis berdasarkan pemicu (*driving force)*, penyebab (*pressure*), kondisi eksisting (*state*), dan dampaknya (*impact*) tentu memerlukan upaya agar dampak tidak semakin merugikan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RTRW Kota Cimahi, secara garis besar terdapat 2 fungsi kawasan yang telah ditetapkan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya (perumahan, perdagangan, militer, industri, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya). Opsi upaya penanggulangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.

2.1.5.1 Penambahan RTH dan Penghijauan

Salah satu cara untuk menanggulangi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW yaitu dengan penambahan RTH atau ruang terbuka hijau dan penghijauan. Penambahan pepohonan atau vegetasi tersebut sangat perlu dilakukan di sekitar permukiman dan industri. Selain untuk

mengurangi tingkat pencemar udara, vegetasi ini juga dapat meminimalkan risiko banjir karena aliran air mampu diserap oleh akar-akar tanaman.

Peningkatan RTH di wilayah Kota Cimahi akan direncanakan oleh pemerintah Kota Cimahi, guna memehui 30% lahan untuk RTH, dengan acuan adalah RTRW yang telah ada untuk lokasi-lokasi penambahan RTH di Kota Cimahi. Diharapkan dengan adanya penambahan RTH ini dapat menyeimbangkan ekosistem yang ada antara lingkungan sosial dan ekonomi yang saat ini sedang berkembang di Kota Cimahi.

Selain itu juga terdapat upaya penghijauan melalui penanaman pohon di setiap kecamatan sebagai upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Hingga tahun 2019, upaya yang dilakukan dalam penambahan ruang terbuka hijau ini berupa taman lingkungan dengan persebaran seperti yang terlihat pada Gambar 2.25.

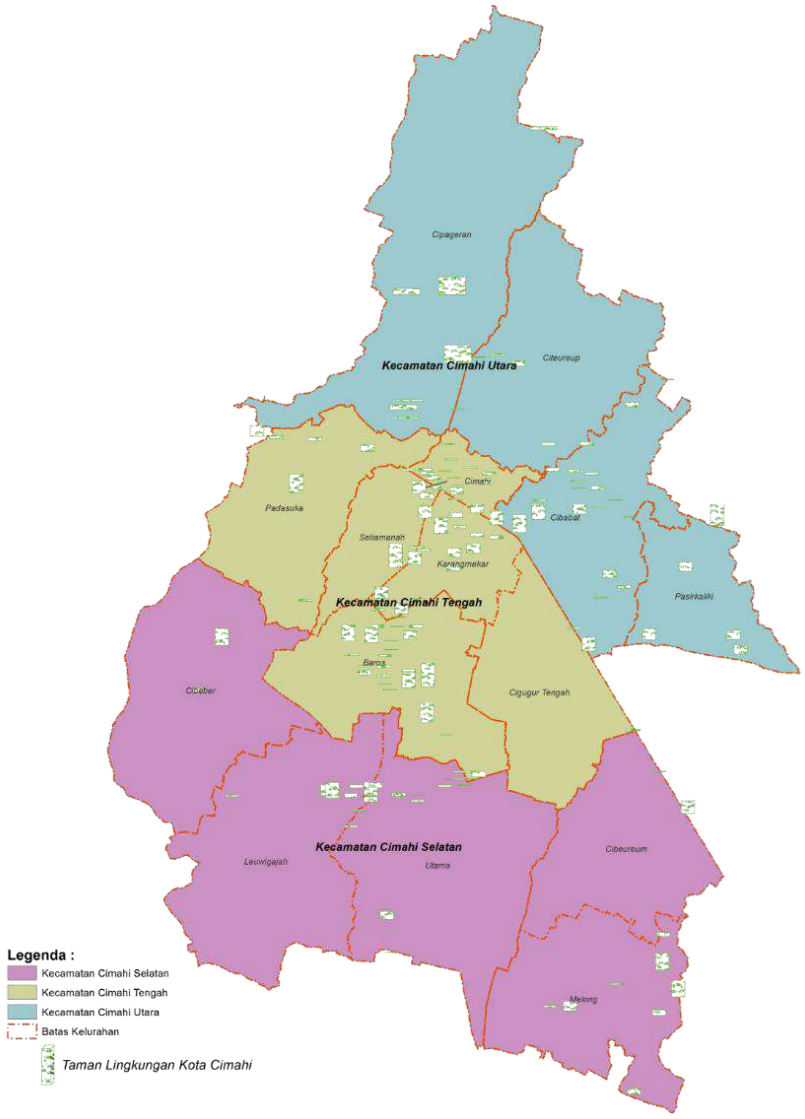

Gambar 2.25 Sebaran Taman Lingkungan

(Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dan Hasil Analisis, 2019)

2.1.5.2 Pengawasan Pengelolaan Limbah Domestik dan Non Domestik

Belum optimalnya pengawasan pemerintah mengenai pembuangan limbah terutama limbah industri di Kota Cimahi, menjadi salah satu dasar perlunya pengawasan yang lebih tepat. Dengan adanya pengawasan berkala pengelolaan limbah ini, diharapkan tidak ada lagi industri maupun sumber limbah lainnya yang membuang limbah tanpa pengolahan atau penanganan terlebih dahulu. Upaya ini dirasa perlu dilakukan untuk mengurangi risiko

penurunan kualitas air (air tanah dan air permukaan) bahkan risiko kerusakan lahan kering.

2.1.5.3 Pengunaan Filter Cerobong Industri

Penggunaan filter cerobong terutama pada pabrik-pabrik di kawasan industri dianjurkan untuk mengurangi tingkat pencemar udara ambien. Upaya ini merupakan salah satu cara mengelola udara emisi di sumber yang perlu dilakukan oleh semua pemilik usaha. Dengan digunakannya filter cerobong ini tentunya dapat mengurangi risiko penyakit bawaan udara (*airborne* diseases) pekerja dan juga masyarakat sekitar industri yang terpajan.

2.1.5.4 Normalisasi Sistem Drainase

Walau terdapat lahan yang digunakan tidak sepenuhnya sesuai seperti peruntukkan yang tercantum dalam RTRW, masih memungkinkan jika dilakukan upaya untuk mengurangi risiko atau hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Salah satunya ialah dengan normalisasi sistem drainase. Normalisasi yang dimaksud dapat berupa penambahan saluran, kapasitas, dan perubahan dimensi saluran, sehingga diharapkan air hujan yang turun tidak banyak yang menjadi air larian (*run off*). Normalisasi sistem drainase ini jelas bertujuan untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kota Cimahi.

2.1.5.5 Pengawasan Penggunaan Air Tanah dan Konservasi Air oleh Industri

Eksploitasi air tanah bukan lagi isu yang asing bagi masyarakat terutama pemerintah Kota Cimahi. Lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi air tanah industri ini menjadi salah satu penyebab tak langsung kasus kekurangan air bersih. Sehingga diharapkan dengan peningkatan pengawasan masalah ini, jumlah kekurangan air bersih di Kota Cimahi dapat dikurangi. Upaya ini dapat diiringi pula dengan konservasi air sebagai salah satu prinsip *green building*, yaitu memaksimalkan dan mengefisienkan

penggunaan air yang jatuh ke tanah. Dengan kata lain, konservasi air yang dapat dilakukan industri ini berupa penghematan dalam menggunakan air bersih.

2.2 Kualitas dan Kuantitas Air

Isu lingkungan yang tidak asing adalah mengenai kualitas dan kuantitas air. Seperti yang kita tahu dan kita rasakan bahwa air merupakan sumber daya alam yang selalu ada di setiap kebutuhan sehari-sehari manusia. Air sungai dan air tanah merupakan sumber air yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Kota Cimahi. Walaupun beberapa masyarakat telah menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kedua sumber air tersebut masih digunakan oleh sebagian besar penduduk. Jumlah/kuantitas yang cukup dan lokasi menjadi alasan badan air tersebut menjadi sumber air masyarakat. Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan lainnya, kualitas dan kuantitas air menjadi isu yang perlu diperhatikan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pencemaran air yang kerap terjadi di badan air sungai, waduk, danau, dan bahkan air tanah. Berikut penjelasan dan analisis faktor pemicu, penekan, kondisi eksisting, dampak, serta upaya dalam mengendalikan kualitas dan kuantitas air.

2.2.1 Driving Force

2.2.1.1 Kebijakan Pemerintah Terkait Kualitas Sungai (SK MenLHK 300/2017)

Hal pertama yang menjadi faktor pendorong/pemicu tentang kualitas air ialah ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 300 Tahun 2017 yang merupakan kebijakan pemerintah terkait kualitas sungai. Tersebut membahas Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran (DTBP) Air Sungai Citarum. SK ini disusun mengingat beban pencemaran si sungai tersebut telah melebihi daya dukung yang dimiliki. Perlu diketahui bahwa Sungai Citarum merupakan sumber air permukaan yang dijadikan pasokan air di Kota Bandung dan Jakarta, termasuk Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) sungai Citarum (Gambar 2.26). Karena Kota Cimahi merupakan bagian dari DAS tersebut, dengan terbitnya kebijakan dari pemerintah pusat tersebut menjadi faktor pemicu bagi Kota Cimahi untuk ikut serta dalam menurunkan beban pencemar sungai sehingga dapat memenuhi nilai daya tampung berdasarkan kebijakan tersebut.

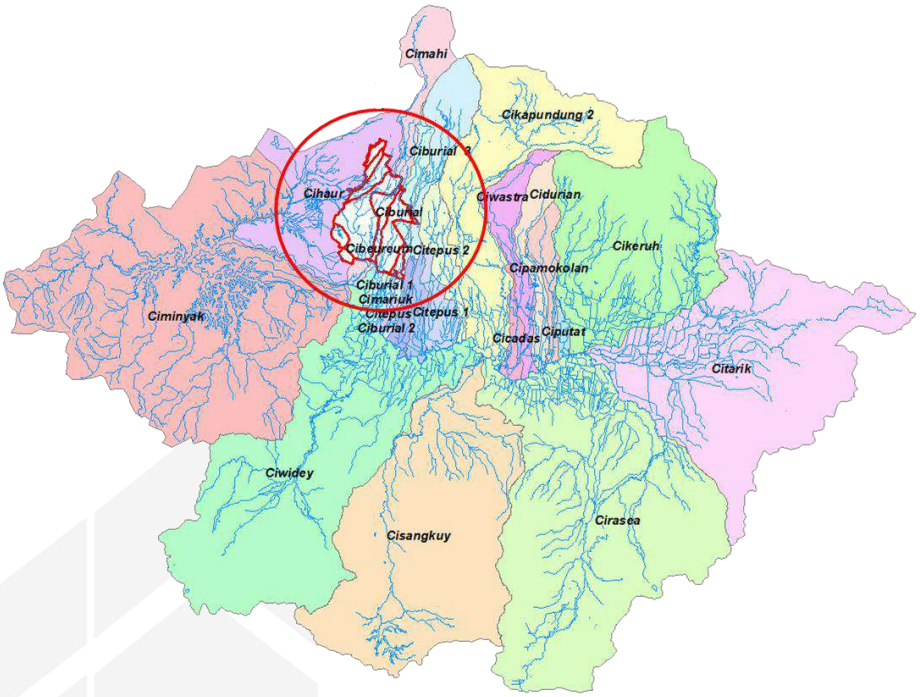

Gambar 2.26 Kota Cimahi dan DAS Sungai Citarum

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.2.1.2 Program Nasional Citarum Harum

Selain kebijakan mengenai penetapan daya tampung beban pencemar air Sungai Citarum, terdapat satu program yang mendorong Kota Cimahi untuk membenahi pengelolaan air sungai, yaitu Program Nasional Citarum Harum. Program tersebut didasari atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Keberadaan Kota Cimahi di daerah hulu (sungai orde 2 dan 3) (terutama pada kawasan bandung utara) menjadi faktor pemicu kualitas air selanjutnya ke bagian tengah hingga hilir, sehingga wilayah sungai di Kota Cimahi harus memiliki kualitas yang baik Jika tidak, hal tersebut tentu dapat berdampak terhadap aliran selanjutnya. Namun Sungai Citarum pada lokasi hulu atas merupakan bagian di Wilayah Kabupatan Bandung Barat, sehingga sungai Citarum/anak sungai citarum yang melintasi Kota Cimahi merupakan dampak dari wilayah sebelumnya yaitu wilayah di Kabupaten Bandung barat.

2.2.1.3 Kebijakan Pemerintah Terkait Air Minum (Permenkes 492/2010)

Sumber air seperti air sungai dan air tanah banyak digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, termasuk untuk dikonsumsi (minum dan memasak). Namun karena kualitas air menjadi isu lingkungan yang serius, maka perlu adanya peraturan yang menetapkan persyarakat kualitas air untuk dikonsumsi. Peraturan tersebut tercantum dalam PerMenKes No. 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Dengan adanya peraturan ini, penggunaan air untuk dikonsumsi didorong untuk mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2.2.1.4 RPJMD Kota Cimahi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 memuat salah satu misi kota berupa penigkatan perekonomian. Walaupun misi tersebut

ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup pendudknya, tetapi terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pendorong penurunan kualitas lingkungan, termasuk kualitas dan kuantitas air, Hal terebut adalah pertumbuhan penduduk akibat angka kelahiran maupun migrasi dari luar Kota Cimahi. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan pengendalian terkait pengelolaan lingkungan dikhawatirkan secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas dan kuantitas air.

2.2.1.5 Pertumbuhan Penduduk

Menyambung dari faktor pendorong sebelumnya (peningkatan perekonomian kota), pertumbuhan penduduk yang akan mengiri peningkatan ekonomi tersebut perlu dianalisis tersendiri. Parameter yang dianggap dapat merepresentasikan banyaknya penduduk setiap tahun ialah kepadatan penduduk. Kaitan antara jumlah penduduk dan perekonomian dapat digambarkan dengan pola konsumsi yang turut mengalami peningkatan. Semakin banyak sampah dan limbah yang ditimbulkan tanpa edukasi/pengetahuan yang cukup menjadi faktor pemicu utama menurunnya kualitas dan kuantitas air.

2.2.2 Pressure

2.2.2.1 Risiko Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan

Berhubungan dengan pertumbuhan penduduk seperti yang sebelumnya telah disinggung, pengelolaan air limbah dan sampah di Kota Cimahi juga berpengaruh besar terhadap kualitas air, baik air sungai maupun air tanah. Pada tahun 2017, cakupan pelayanan rata-rata air limbah di Kota Cimahi sebesar 79,46% (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019). Sedangkan untuk pengelolaan sampah, pada tahun 2019 Kota Cimahi, di bawah tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertanaman, melayani 95% sampah. Berdasarkan data tersebut, masih terdapat 5% sampah yang berpotensi mencemari lingkungan karena dibuang sembarangan, seperti ke sungai dan saluran drainase.

Hasil analisis risiko yang mengacu pada Pedoman Strategi Sanitasi Kota, Kota Cimahi masih berisiko dalam pengelolaan limbah-limbah. Terkait pengelolaan air limbah, dari total 15 kelurahan terdapat 4 kelurahan berisiko sangat tinggi, 2 kelurahan berisiko tinggi, 3 kelurahan berisiko rendah, dan 2 kelurahan berisiko sangat rendah. Sedangkan untuk pengelolaan sampah terdapat 3 kelurahan berisiko sangat tinggi, 1 kelurahan berisiko tinggi, 2 kelurahan berisiko rendah, dan 9 kelurahan berisiko sangat rendah. Berikut pemetaan area risiko persampahan dan limbah di Kota Cimahi (Gambar 2.27 dan Gambar 2.28)

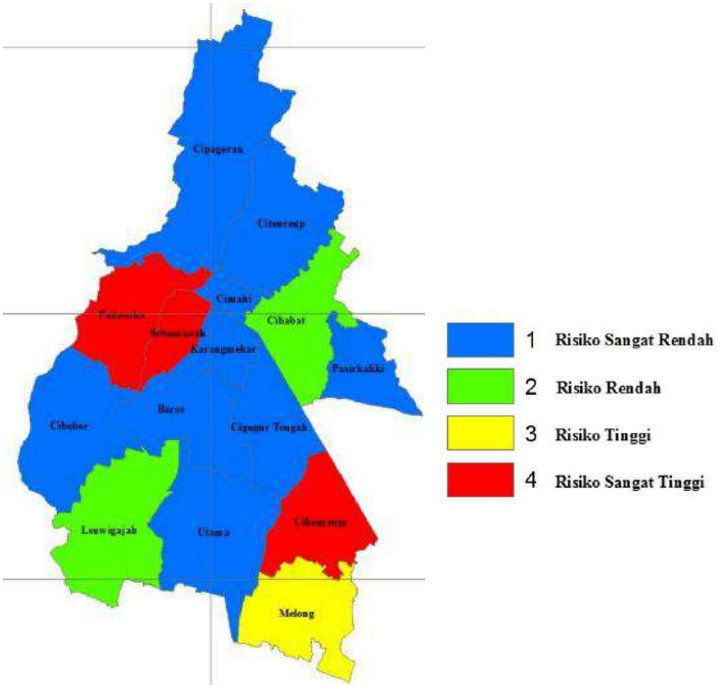

Gambar 2.27 Area Risiko Pengelolaan Persampahan Kota Cimahi
(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

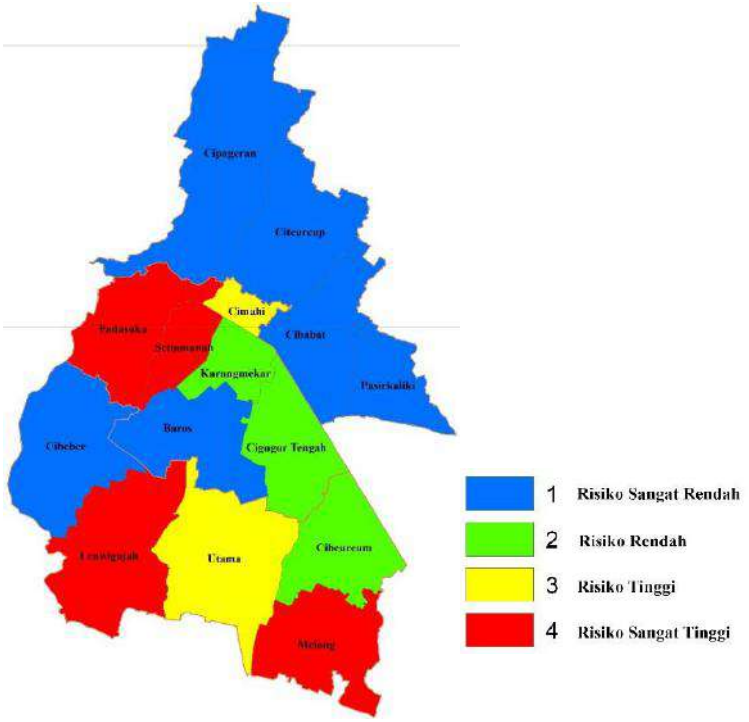

Gambar 2.28 Area Risiko Pengelolaan Air Limbah Kota Cimahi
(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.2.2.2 Beban Pencemar Sungai

Faktor berupa peningkatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memicu timbulan sampah dan limbah cair yang tidak sedikit dan semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan pengetahuan yang terbatas serta kurangnya arahan dari pemerintah, hal ini menekan angka pencemaran badan air dan menurunkan kualitasnya. Karena badan air seperti sungai memiliki daya tampung tersendiri, maka limbah yang masuk dan tidak terkendali sangat berpotensi untuk membebani daya tampung sungai tersebut. Daya tampung sendiri merupakan parameter yang menunjukkan kemampuan suatu badan air untuk menerima beban pencemar. Oleh karena itu, walaupun air dapat melakukan *self purification,* buangan limbah padat dan cair limbah tetap wajib dikendalikan.

Kota Cimahi memiliki beberapa sungai yang bermuara pada Sungai Citarum, diantaranya adalah Sungai Cibaligo, Cimahi, Cisangkan, Cibeureum dan Cibabat. Mengacu pada Surat Keterangan dari Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan: SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Citarum, berikut merupakan alokasi beban pencemar pada Sungai Citarum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

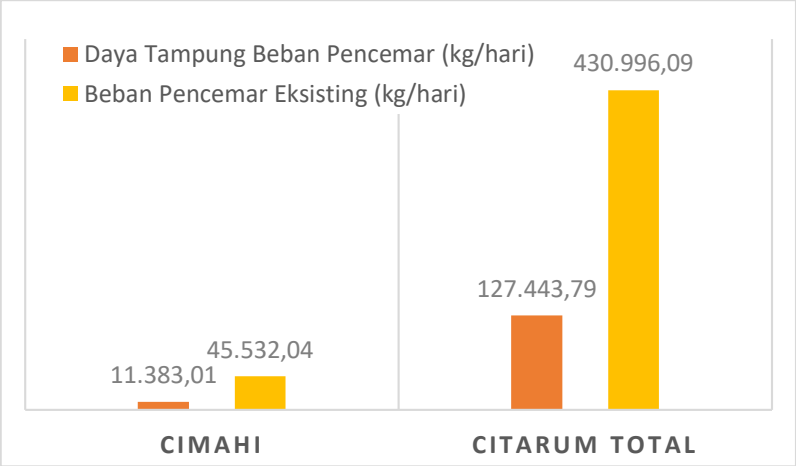

Gambar 2.29 Daya Tampung dan Beban Pencemar Eksisting DAS Citarum

(Sumber: SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017)

Dari hasil tersebut, Sungai Citarum memiliki daya tampung beban pencemar sebesar 127.443,79 kg/hari dengan beban pencemar eksisting 430.996,09 kg/hari sehingga Sungai Citarum telah melebihi daya tampung beban pencemaran sungai sebesar 303.552,3 kg/hari. Daerah aliran sungai yang bermuara ke Sungai Citarum yang melintasi wilayah administrasi Kota Cimahi memiliki beban pencemar eksisting sekitar 10,56% dari total beban pencemar di Sungai Citarum yaitu sebesar 45.532,04 kg/hari dan memiliki daya tampung sebesar 11.383,01 kg/hari. Sehingga daerah aliran sungai di Kota Cimahi perlu menurunkan beban pencemar sebesar 34.149,03 kg/hari. Sumber beban pencemar yang berada di Kota Cimahi diantaranya berasal dari beberapa sektor, seperti sektor domestik, pertanian, peternakan dan industri.

2.2.2.3 Aktivitas Industri

Salah satu parameter yang didorong oleh misi peningkatan perekonomian adalah aktivitas industri. Hubungan antara dua hal tersebut erat karena segala aktivitas perindustrian bertujuan untuk meningkatkan ekonomi. Namun dalam pembahasan isu kualitas dan kuantitas air ini, aktivitas industri menjadi penekan yang berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air. Kegiatan industri terbagi menjadi beberapa jenis macamnya, ada industri makanan, industri tekstil, industri pembuatan elektronik, industri pembuatan alat transportasi, hingga pembuatan alat-alat berat. Berikut merupakan sebaran industri yang berada di Kota Cimahi.

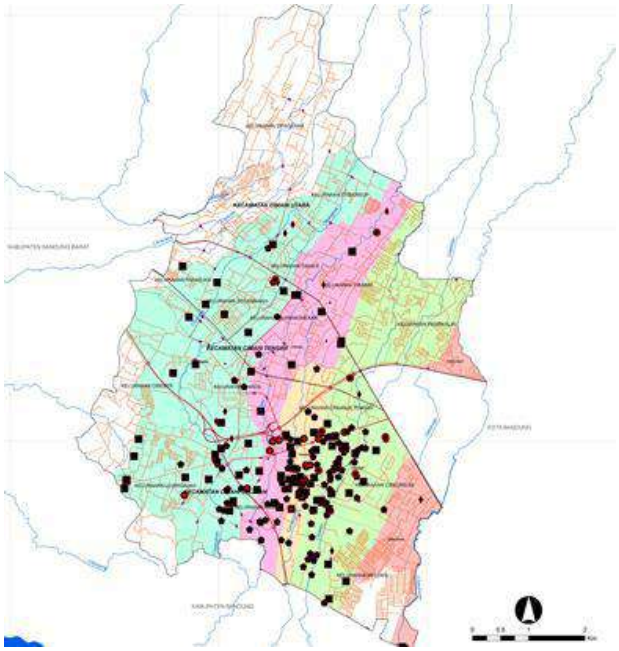

Gambar 2.30 Sebaran Industri

(Sumber: Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar serta DDDT Kota Cimahi, 2016)

Dengan banyaknya industri yang tersebar di Kota Cimahi, Gambar 2.31 menunjukkan sebaran industri yang berada di Kota Cimahi. Kota Cimahi berkontribusi terkait kualitas Sungai Citarum, karena anak sungai citarum

beberapa berada di lokasi Cimahi, yang secara tidak langsung membuang limbah cair tersebut melalui anak-anak sungai yang terdapat di Kota Cimahi.

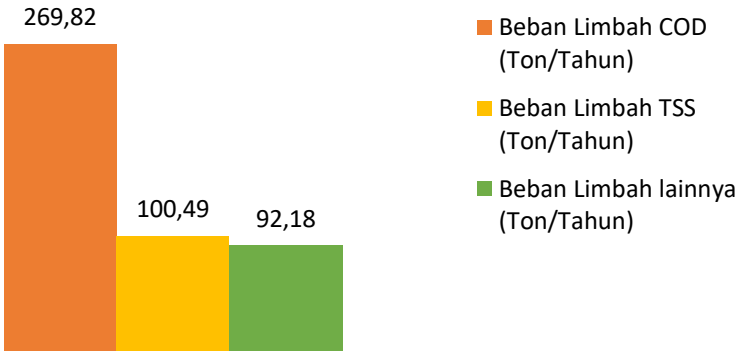

Gambar 2.31 Beban Limbah Industri

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Beban limbah yang berasal dari industri di Kota Cimahi yang terlapor, yang berasal dari parameter COD (269,82 ton/tahun), TSS (100,49 ton/tahun) dan limbah lainnya sebesar 92,18 ton/tahun. Berdasarkan data yang diperoleh industri textile di Kota Cimahi menjadi salah satu sumber pencemar yang mencemari yang diakibatkan oleh parameter COD, karena aktivitas dari industri tersebut yang banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Hal tersebut menjadi tekanan bagi kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air sungai di Kota Cimahi. Namun hal tersebut dapat teratasi apabila industri tersebut mengelola limbah cair tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan keberadaan industri juga dapat berpengaruh terhadap parameter TSS, yang bersumber dari buangan beberapa industri yang terdapat di Kota Cimahi. Ketika TSS tinggi maka akan mempengaruhi juga terhadap kualitas air sungai yang dapat menyebabkan kekeruhan yang tinggi.

Kota Cimahi sendiri bertangung jawab terhadap 10,56 % beban pencemar eksisting atau sekitar 45.532,04 kg/hari dari total beban pencemar eksisting yang dihasilkan pada daerah aliran sungai Citarum. Keberadaan industri merupakan sebagai salah satu sumber pencemar yang menyebabkan tinggi atau rendahnya suatu beban pencemar sungai.

2.2.2.4 Aktivitas Domestik

Selain sektor industri, kontributor utama lainnya jelas sektor domestik yang merupakan sumber pencemar paling berpengaruh karena ditentukan oleh jumlah penduduk yang tidak sedikit di Kota Cimahi. Aktivitas domestik atau aktivitas sehari-sehari tidak sedikit yang membutuhkan air sebagai penunjang, yang mana 80% dari air tersebut akan menjadi limbah rumah tangga. Pada tahun 2019, masyarakat Kota Cimahi menggunakan berbagai sumber air seperti mata air, air ledeng, air sumur, air kemasan, dan air PDAM (Gambar 2.32). Sedangkan untuk penggunaan air sungai, air hujan, dan sumber lainnya tidak dilakukan pendataan.

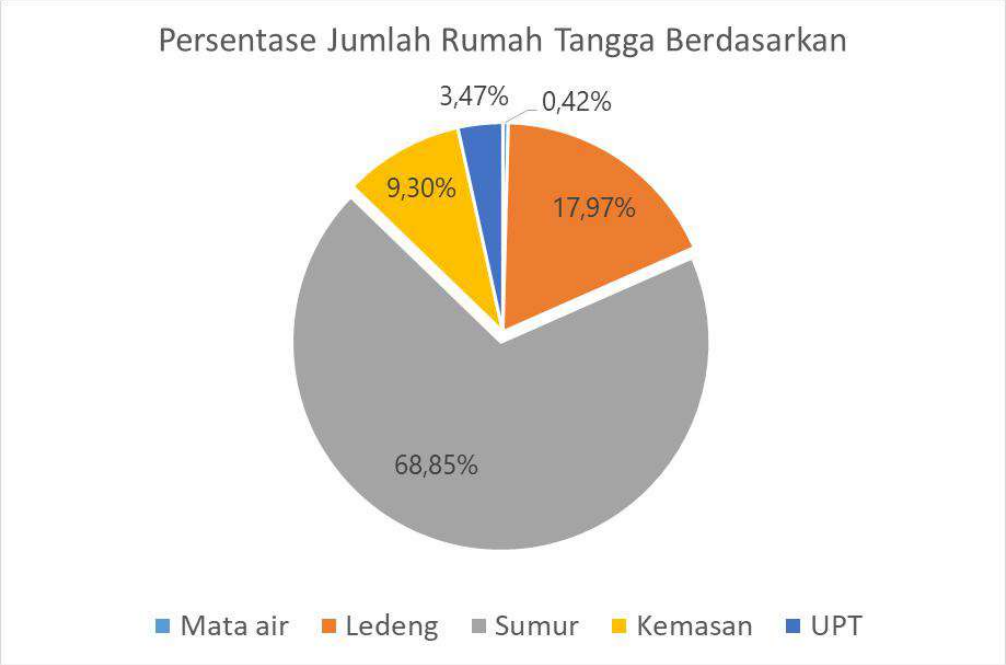

Gambar 2.32 Persentase Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2020)

Sedangkan terkait pembuangan air limbah, pada tahun 2019, tidak semua penduduk terfasilitasi sarana dan prasarananya. Terbukti dengan banyaknya jumlah Kepala Keluarga (KK) yang masih membuang limbah mereka ke sungai atau tidak terlayani, baik oleh jamban pribadi, IPAL komunal, maupun MCK.

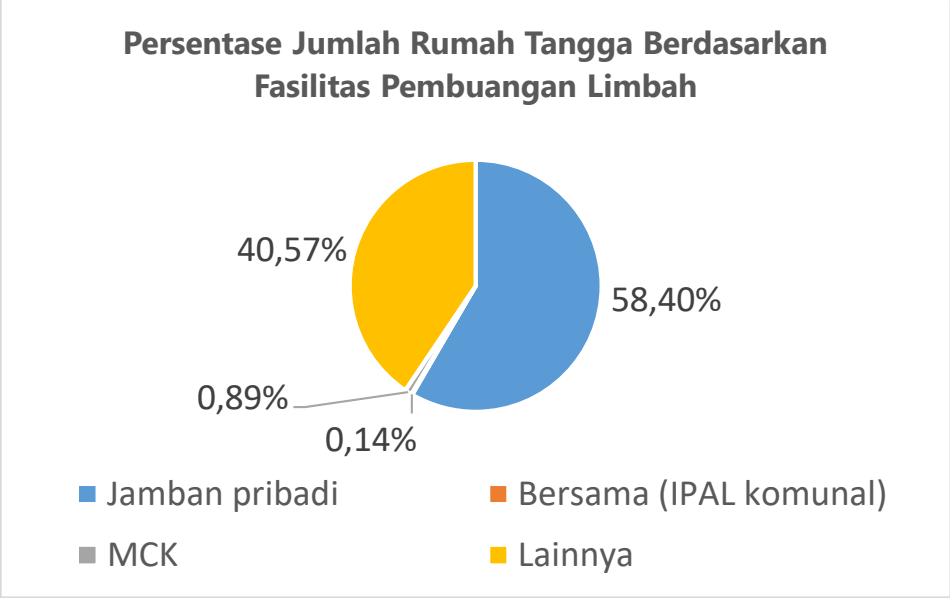

Gambar 2.33 Persentase Jumlah RT Berdasarkan Tempat Pembuangan Limbah

(Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019)

Selanjutnya untuk melihat beban pencemar dari sektor domestik, analisis dilakukan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, faktor emisi (kg/orang/hari), rasio ekivalen kota, dan koefisien transfer beban. Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam Gambar 2.34 berikut. Parameter kualitas air yang paling utama dalam limbah domestik yaitu BOD, COD, TSS. Sumber pencemar domestik berasal buangan dari aktivitas domestik seperti mandi, makan minum, cuci dan lain sebagainya. Banyaknya jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan potensi beban pencemar yang di hasilkan. Semakin tinggi penduduk maka semakin berpotensi menyumbang beban pencemar dari sektor domestik.

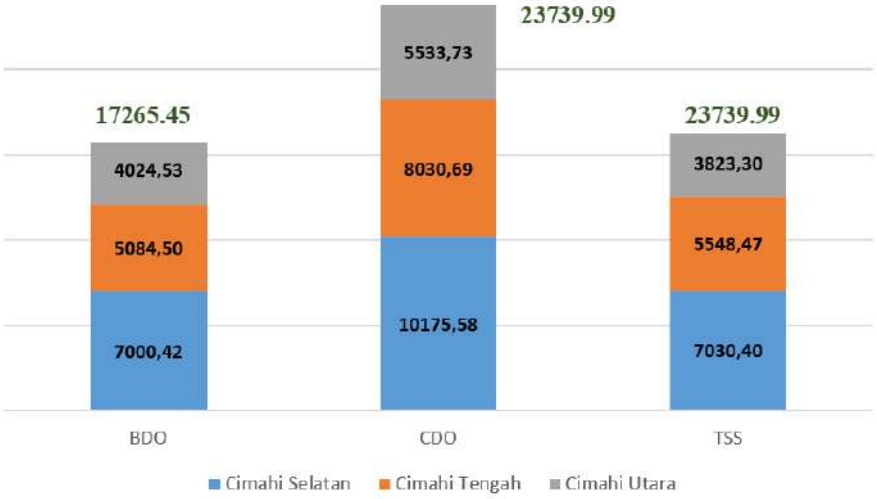

Gambar 2.34 Potensi Beban Pencemar Sektor Domestik (kg/hari)
(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

2.2.2.5 Kebutuhan Air Masyarakat dan Industri

Faktor pendorong berupa peningkatan perekonomian dan pertumbuhan penduduk yang terus terjadi di setiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan air bersih. Berdasarkan Pusair (2012), sumber daya air diklasifikasikan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Potensi sumber daya air Provinsi Jawa Barat adalah 66.256 juta m^3 per tahunnya, yaitu air permukaan sekitar 42.821 juta m^3/tahun dan sekitar 23.435 juta m^3/tahun untuk air tanah (RPPLH Kota Cimahi, 2017).

Sementara itu kebutuhan air untuk industri diperoleh dari data penggunaan air tanah oleh perusahaan di Kota Cimahi yang didata oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Penggunaan air tanah oleh 69 industri di Kota Cimahi mencapai 7.871.356.400 m^3. Informasi lengkap mengenai penggunaan air tanah di Kota Cimahi untuk industri dapat dilihat pada lampiran tabel tambahan (Tabel 3). Akumulasi dari kebutuhan total air bersih di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.35 Berdasarkan pola spasial kebutuhan air di Kota Cimahi pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa kebutuhan paling tinggi yaitu sebesar >50

ribu m^3/tahun tersebar di sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kecamatan Cimahi Tengah. Atas dasar kebutuhan ini, Kota Cimahi mengalami tekanan terkait ketersediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

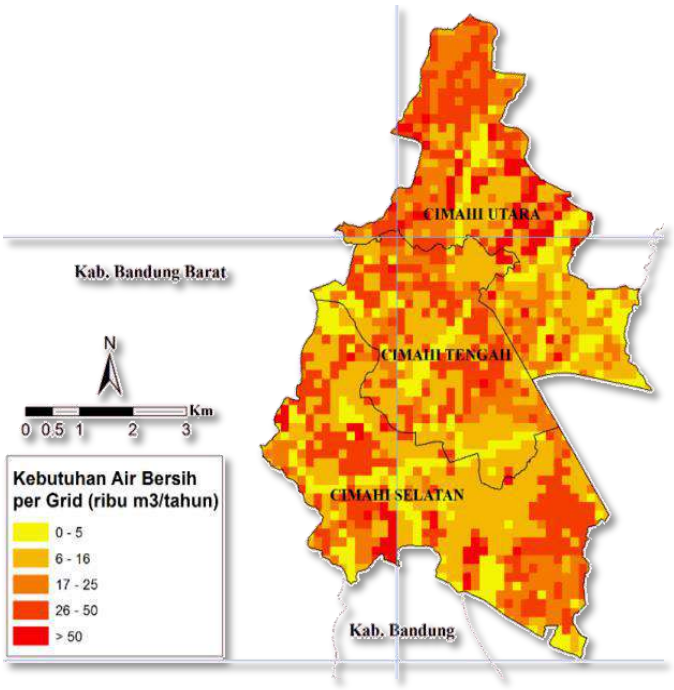

Gambar 2.35 Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi
(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

2.2.2.6 Perubahan Tataguna Lahan di Hulu

Isu mengenai kualitas dan kuantitas air secara tidak langsung juga berkaitan dengan perubahan tata guna lahan. Sebagai contoh, lahan yang seharusnya ditetapkan untuk daerah resapan, RTH, atau lahan hijau lainnya akan dialihfungsikan sebagai lahan terbangun, baik perumahan hingga industri. Hal ini akan mengurangi kemampuan tanah untuk meresap air dan menjadikannya air tanah. Sehingga dalam hal ini, kuantitas air tanah akan terkena dampaknya. Selain kuantitas, kualitas air tanah dan air sungai juga akan terpapar dampak jika limbah yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan tidak dikendalikan dengan baik. Semakin banyak limbah yang dibuang ke

lingkungan sebelum diolah, akan semakin berpotensi pula dalam menurunkan kualitas air tanah dan air sungai. Berkaitan dengan faktor pertumbuhan penduduk sebagai pemicu, dapat dilihat pada Tabel 2.7, luas lahan yang digunakan untuk permukiman mengalami perubahan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Tabel 2.7 Luas Perubahan Lahan Tahun 2018-2019

No	Jenis Penggunaan Baru	Luas Tahun 2018 (Ha)	Luas Tahun 2019 (Ha)
1	Pemukiman	1.966,38	2.120,05
2	Industri	500,575	494,43
3	Tanah Kering	1.901,773	198,64
4	Perkebunan	96,744	N/A
5	Semak Belukar	N/A	N/A
6	Tanah Kosong	122,329	N/A
7	Perairan/Kolam	N/A	16,69
8	Lainnya (Sebutkan)	N/A	N/A

(Sumber: Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi, 2019)

2.2.3 State

2.2.3.1 Kualitas Air Sungai

Faktor pemicu berupa peningkatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk serta faktor penekan berupa beban pencemaran sungai, aktivitas industri, aktivitas domestik, dan risiko air limbah Kota Cimahi akan menentukan status atau kondisi kualitas air sungai pada saat ini. Terdapat 18 parameter yang diuji oleh UPTD Laboratorium untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Namun, untuk analisis ini, dipilih 3 parameter yang sekiranya representatif dalam menggambarkan kualitas air sungai, yaitu parameter *Total Suspended Solid* (TSS), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Dissolved Oxygen* (DO).

Parameter TSS merupakan bahan-bahan atau material dengan diameter > 1 µm yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori sebesar 0,45 µm (Effendi, 2003). Selain disebabkan oleh adanya buangan limbah dari kegiatan domestik atau industri, kehadiran zat padat di dalam badan air juga dapat disebabkan oleh adanya kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa oleh air (Tchobanoglous, et al., 2014). Batas konsentrasi (baku mutu) yang digunakan untuk parameter TSS sebesar 50 mg/lt.

Parameter COD merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis, menjadi karbondioksida dan air (Effendi, 2003). Dengan demikian, nilai COD juga merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik. Parameter COD memiliki nilai baku mutu sebesar 25 mg/lt sebagai peruntukan kelas II.

Parameter DO merupakan banyaknya oksigen terlarut dalam suatu perairan. Semakin besar nilai kandungan DO, maka kualitas air tersebut semakin bagus. Parameter DO memiliki baku mutu kelas air (kelas 2) sebesar 4 mg/lt. berbeda dengan parameter lainnya, parameter DO merupakan parameter khusus. Jika nilai DO di sungai melebihi 4 mg/lt maka itu akan lebih baik ketimbang nilai DO di sungai di bawah 4 mg/lt. karena jika nilai DO semakin besar akan semakin baik untuk sumber oksigen terlarut pada proses respirasi.

Berkaitan dengan kualitas air yang telah dijelaskan pada bagian dampak tata guna lahan, *trend* konsentrasi ketiga parameter tersebut dari tahun 2018 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 2.18 hingga Gambar 2.20. Dari total 15 titik pantau, banyak konsentrasi yang mengalami peningkatan dan ada juga yang menurun. Dengan membandingkan konsentrasi hasil uji dengan baku mutu kelas II pada PP No. 82 Tahun 2001 (Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran), berikut kesimpulan yang didapat mengenai kualitas (3 parameter) 5 sungai (15 titik pantau) Kota Cimahi tahun 2019:

1. Terdapat **10 titik pantau** sungai mengandung TSS dengan konsentrasi **melebihi baku mutu**
2. Terdapat **13 titik pantau** sungai mengandung COD dengan konsentrasi **melebihi baku mutu**
3. Terdapat **13 titik pantau** sungai mengandung DO dengan konsentrasi **tidak memenuhi atau kurang dari baku mutu**

2.2.3.2 Indeks Kualitas Air

Selain kualitas air sungai yang dibandingkan dengan baku mutu seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya, suatu kondisi air juga dapat digambarkan dengan menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA). Salah satu tujuan dari penggunaan indeks ini ialah menyederhanakan data kualitas air yang banyak menjadi satu angka yang merupakan agregasi dari parameter-parameter kualitas air. Hubungan kualitas air dan IKA merupakan dua hal yang tidak terlepaskan karena perhitungan IKA bergantung pada hasil uji lba air sungai (kualitas air sungai), seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.36.

Selain itu, perhitungan IKA yang sebelumnya menggunakan metode Indeks Pencemar juga dapat diganti dengan metode atau Sistem Kalkulasi IKA-INA (SISKANA) untuk analisis ini. SISKANA sendiri merupakan *sheet* data yang berisi persamaan matematika untuk mengkalkulasi IKA-INA secara mudah dan cepat. Metode perhitungan SISKANA mengacu pada *National Sanitation Foundation-Water Quality Index* (NSF-WQI) yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KLL-KLHK). Pada dasarnya, metode ini terdiri dari pemilihan dan pembobotan parameter, transformasi satuan parameter, serta agregasi sub-indeks. Adapun parameter yang digunakan dalam perhitungan SISKANA yaitu TSS, TDS, pH, DO, BOD, COD, Total Fosfat, NH_3, NO_3, dan Fecal Coliform. Perbedaan SISKANA dengan Metode Indeks Pencemar dapat dilihat pada Gambar 2.37.

Berikut Tabel 2.8 yang menunjukkan kriteria dari skor IKA-INA dan Tabel 2.9 berupa hasil perhitungan IKA untuk air sungai Kota Cimahi Tahun 2019.

Tabel 2.8 Kriteria Indeks Kualitas Air (SISKANA)

Indeks Kualitas Air	Kriteria
100 ≥ IKA > 90	Sangat baik
90 ≥ IKA ≥ 80	Baik
80 > IKA ≥ 70	Cukup baik
70 > IKA > 50	Sedang
50 ≥ IKA > 35	Marginal
35 ≥ IKA ≥ 0	Buruk

(Sumber: P3KL KemenLHK, 2019)

Tabel 2.9 Indeks Kualitas Air Sungai Kota cimahi Tahun 2019

Parameter	Hasil Uji	Satuan	Q-nilai	Faktor Pembobotan	Sub Total
DO	2,98	mg/L	39,04	0,143	5,57
Fecal Coliform	816.897,33	/100 ml	2,56	0,134	0,34
COD	110,93	mg/L	9,67	0,120	1,16
pH	7,57	mg/L	93,08	0,117	10,88
BOD	41,40	mg/L	0,00	0,113	0,00
NH_3-N	6,61	mg/L	0.00	0,092	0,00
Total fosfat	0,35	mg/L	79,81	0,085	6,79
TSS	51,47	mg/L	82,70	0,074	6,08
NO_3-N	1,81	mg/L	91,04	0,069	6,31
TDS	1.000,20	mg/L	77,00	0,053	4,10
		Skor			**41,23**
		Kriteria			**Marginal**

(Sumber: Hasil Perhitungan, 2019)

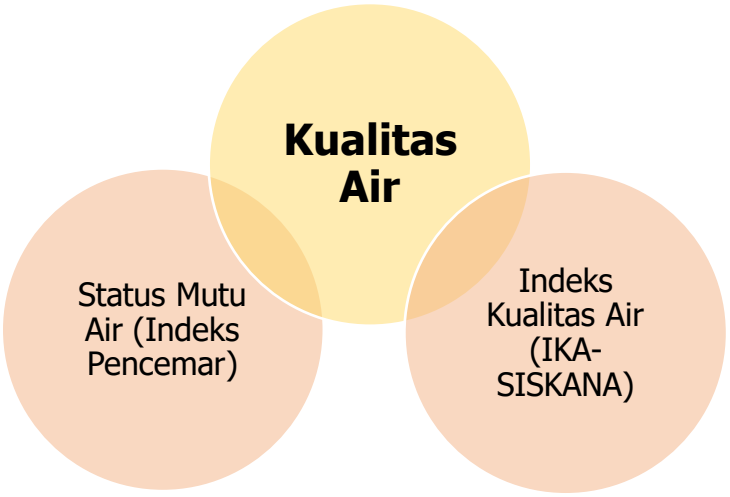

Gambar 2.36 Keterkaitan Nilai Kualitas Air

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

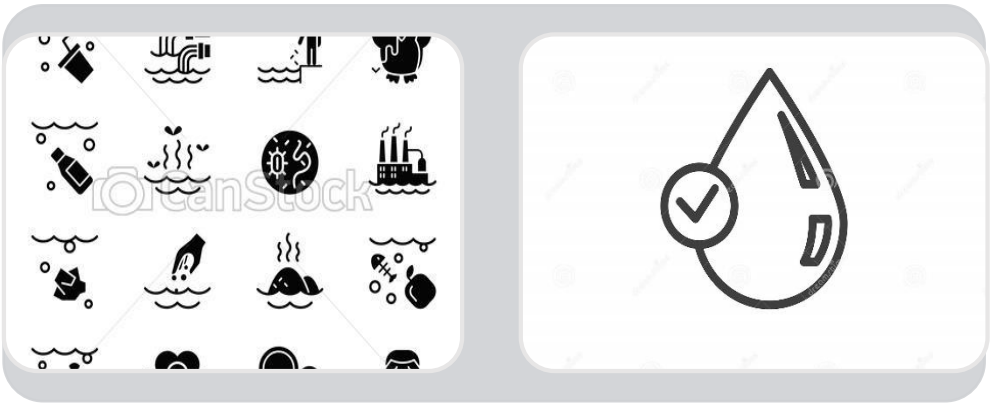

INDEKS PENCEMAR

- Tujuan: Memenuhi baku mutu air
- Menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan
- Penurunan kualitas air dengan meningkatkan nilai indeks (diperlukan normalisasi)

INDEKS KUALITAS AIR

- Informasi sederhana mengenai kualitas air untuk menetapkan kebijakan
- 10 parameter kualitas air
- Terintegrasi dengan IKLH

Gambar 2.37 Perbandingan Metode Indeks Pencemar dan Indeks Kualitas Air

(Sumber: P3KLL KLHK, 2019)

2.2.3.3 Kualitas Air Tanah

Selain dari pencemaran air sungai, kemungkinan buruknya kualitas air sumur atau air tanah juga dapat dipengaruhi oleh sanitasi rumah tangga yang tidak sesuai standar. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menguji 30 sampel air tanah. Parameter yang diukur antara lain suhu, pH, kekeruhan, warna, bau, TDS, NO_3, besi, mangan, seng, sulfat, dan total coliform. Berdasarkan 12 parameter air tersebut, terdapat beberapa diantaranya yang melebihi baku mutu, dengan rekapitulasi seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.

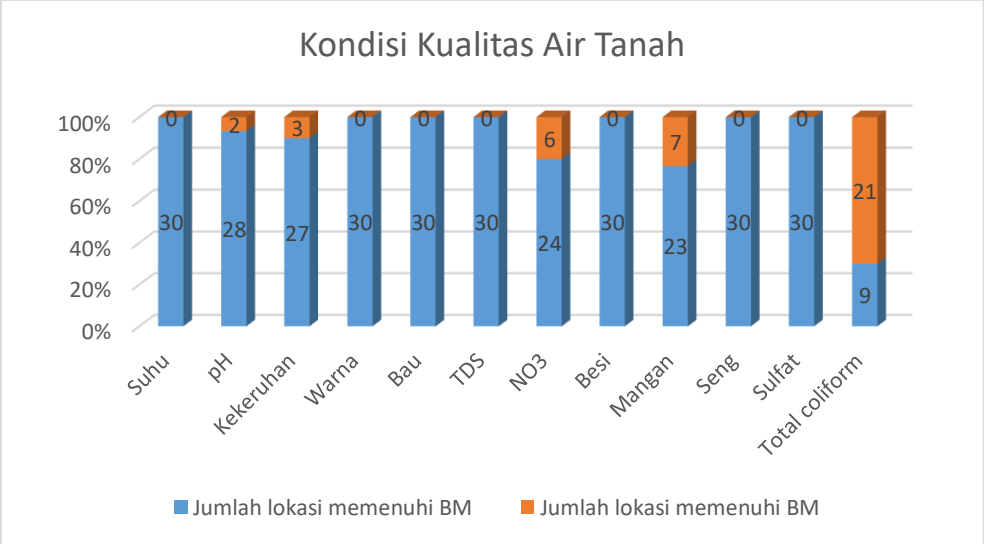

Gambar 2.38 Kondisi Air Tanah Berdasarkan Lokasi *Sampling*
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Analisis, 2020)

Panilaian kualitas air tanah dalam analisis ini dilakukan dengan mengacu pada PerMenKes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua,* dan Pemandian Umum. Baku mutu yang digunakan adalah standar pemakaian air tanah untuk higiene sanitasi, yaitu kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Berdasarkan baku mutu tersebut, parameter utama yang melebihi standar dari 30 lokasi *sampling* adalah total coliform, yaitu ketidaksesuaian mencapai 70%. Parameter lain

yang tidak memenuhi baku mutu yaitu pH, kekeruhan, nitrat (NO_3), dan mangan. Tingginya konsentrasi parameter-parameter tersebut dapat dipengaruhi oleh pengikisan batuan atau garam mineral dalam tanah (mangan dan kekekuran) serta pengaruh dari pupuk tanaman (NO_3 dan pH). Kualitas air tanah ini tentu mendapat tekanan dari *driving force* dan *pressure* yang sebelumnya telah dijelaskan. Faktor antropogenik yang erat dengan pencemaran air tanah yaitu pembuangan limbah yang tidak terkelola, baik limbah padat (sampah) maupun limbah cair.

2.2.4 Impact

2.2.4.1 Kekurangan Air

Ketersediaan air di Kota Cimahi di beberapa lokasi sangat tinggi mencapai >36 m^3/tahun. Hal tersebut perlu seimbang antara kebutuhan dan ketersediaan. Semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan akan air akan meningkat dan ketersediaan air akan menurun jika terus menerus digunakan tanpa adanya pengelolaan/pengendalain terhadap kualitas, kuantitas dan kontuinitas.

Selisih ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya. Selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan air bersih mengalami defisit di sebagian kecil wilayah Kec. Cimahi Tengah dan Kec. Cimahi Selatan. Wilayah kecamatan Cimahi Selatan dan Cimahi Tengah mengalami defisit berdasarkan daya dukung antara kebutuhan ketersediaan air.

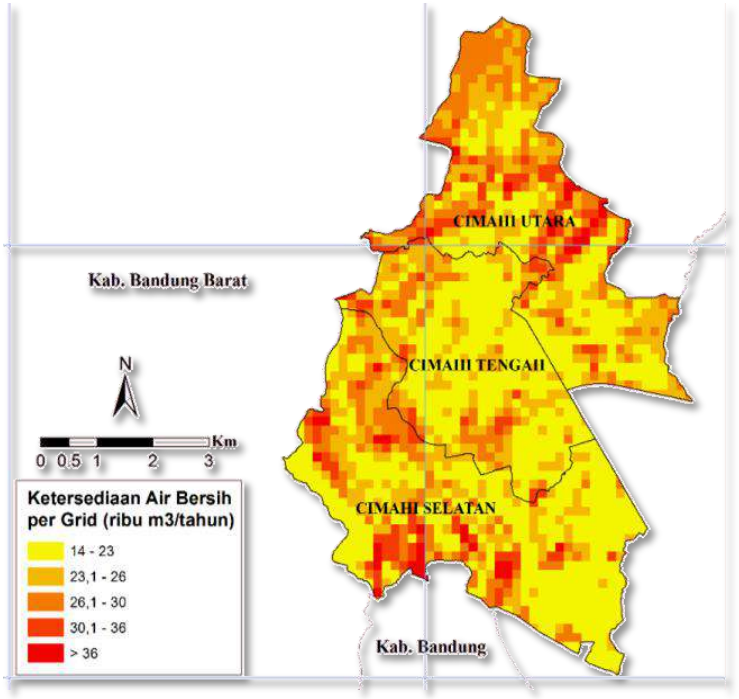

Gambar 2.39 Ketersediaan Air Kota Cimahi

(Sumber: RPPLH Kota cimahi, 2017)

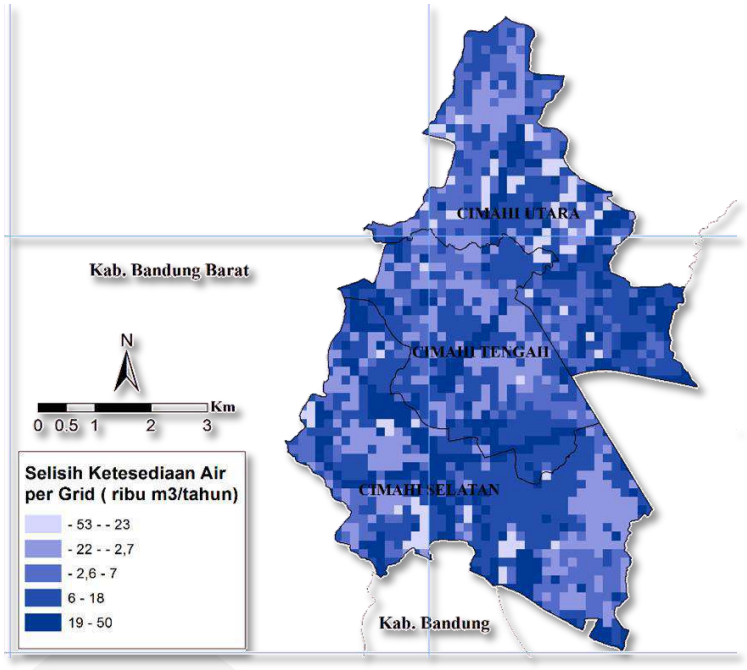

Gambar 2.40 Selisih Ketersediaan Air Kota Cimahi

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

2.2.4.2 Risiko Sanitasi Tinggi

Dampak dari pengelolaan air baik dari segi kualitas maupun kuantitas yaitu kondisi sanitasi. Semakin baik pengelolaan air, semakin rendah risiko sanitasi tersebut. Salah satu aspek yang dinilai dalam risiko sanitasi adalah penggunaan air bersih. Maka semakin baik kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, nilai risiko sanitasi juga akan semakin menurun. Selain itu, pengelolaan air limbah juga mempengaruhi kualitas air, baik air sungai maupun air tanah. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari badan air tersebut karena dijadikan sebagai tempat pembuangan. Berdasarkan analisis data tahun 2019, persebaran area risiko sanitasi secara keseluruhan serta risiko pengelolaan air limbah dapat dilihat pada Gambar 2.41 dan Gambar 2.42.

Gambar 2.41 Pemetaan Area Risiko Sanitasi Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Analisis, 2019)

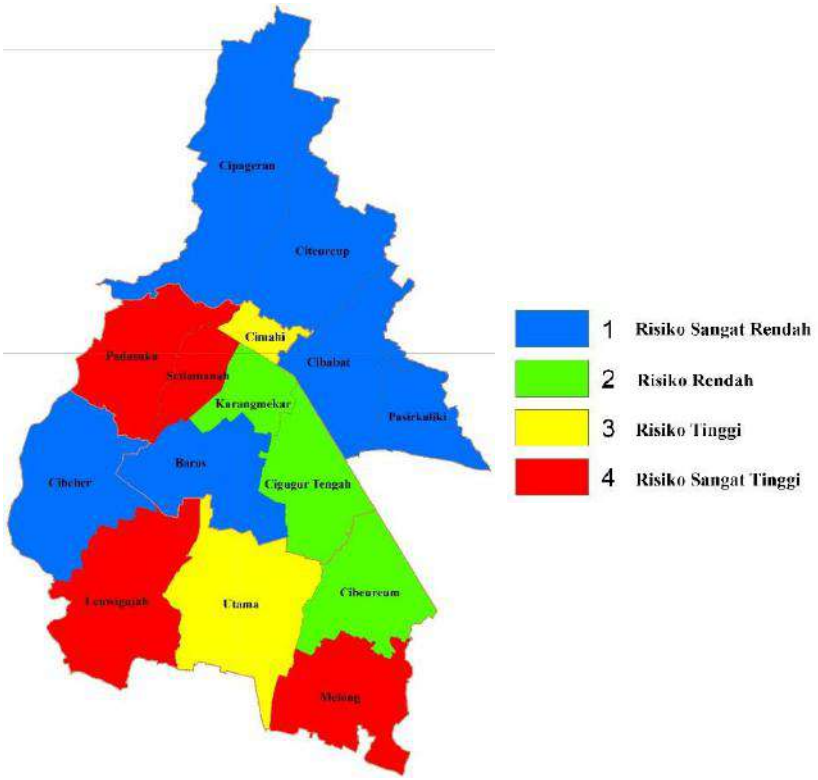

Gambar 2.42 Pemetaan Area Risiko Air Limbah Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.2.4.3 *Waterborne Disease*

Kualitas air selain dapat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan, akan berdampak juga terhadap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak yang berkaitan dari buruknya kualitas air adalah terkait kesehatan masyarakat atau penyakit bawaan air (*waterborne disease).* Pada Gambar 2.43 terlihat angka penyakit yang paling umum diderita oleh penduduk Kota Cimahi. Dapat dilihat terdapat penyakit dermatitis, infeksi saluran pencernaan (usus), dan penyakit kerongkongan, lambung dan duodenum dengan jumlah kasus/penderita yang tidak sedikit pada tahun 2019. Penyakit-penyakit tersebut memang tidah diidentifikasi penyebabnya, konsumsi air dengan kualitas buruk berpotensi untuk menimbulkan gejala penyakit-penyakit tersebut.

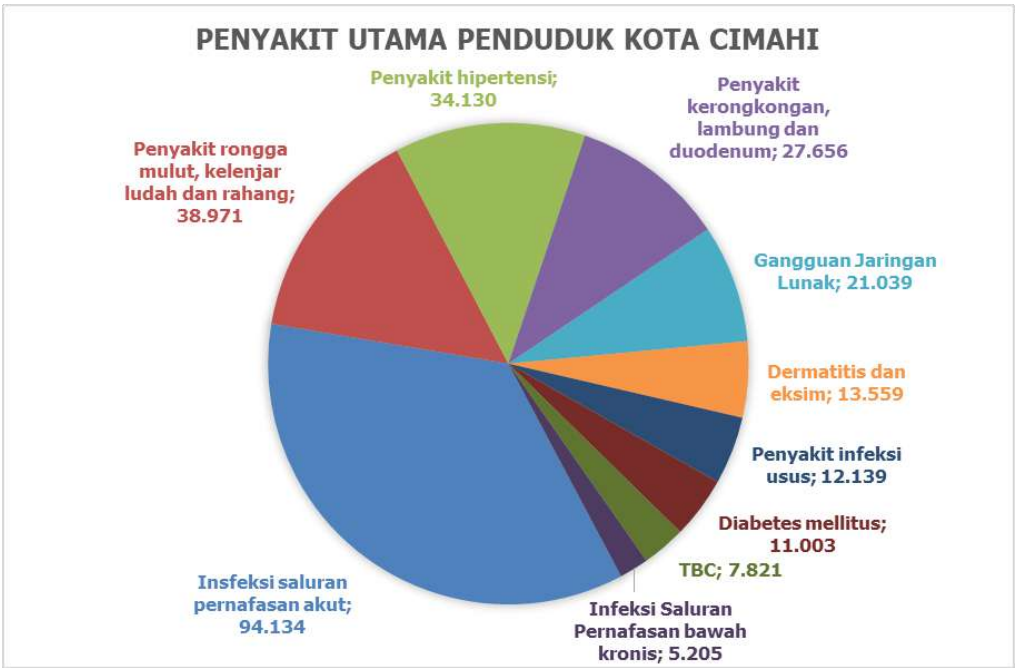

Gambar 2.43 Penyakit Umum yang Diderita

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

2.2.5 Response

2.2.5.1 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Tanah Berkala

Dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran air khususnya terkait dengan pencemaran yang masuk ke badan air. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi melakukan pemantauan air sungai sebanyak 3 kali periode pemantauan,. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat data series kualitas air setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengendalian jika didapati hasil kualitas yang kurang baik.

Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 Sungai dengan 3 titik pemantauan di setiap sungainya, sungai yang dilakukan pemantauan yaitu:

- Sungai Cisangkan
- Sungai Cibaligo
- Sungai Cibeureum

- Sungai Cimindi
- Sungai Cimahi

Masing-masing sungai dilakukan pemantauan pada bulan April, Juli, dan November 2019. Pemantauan tersebut dilakukan dengan tujuan monitoring kualitas air sungai setiap tahunnya. Hasil monitoring tersebut menjadi acuan dalam menganalisis sebab akibat dari hasil kualitas air sungai tersebut yang nantinya akan dilakukan pengelolaan atau suatu pengendalian untuk pemulihan kualitas air sungai.

Selain air sungai, DLH Kota Cimahi melakukan pemantauan air tanah dalam setahun yaitu 1 (satu) kali periode pemantauan. Lokasi pemantauan air tanah sebanyak 30 titik sampling yang tersebar di Kota Cimahi. Tujuan dari pemantauan air tanah tersebut, sama halnya dengan pemantauan kualitas air sungai, yaitu sebagai upaya dari DLH Kota Cimahi secaa objektif mengetahui kualitas dari air tanah di Kota Cimahi.

Dengan adanya keterkaitan antara pemantauan kualitas air dan kuntitas air baik untuk air sungai dan air tanah, kedua hal tersebut merupakan respon dari pemerintah Kota Cimahi untuk menentukan kebijakan ataupun kegiatan yang akan dilakukan dalam pengelolaan kualitas dan kuantitas air di Kota Cimahi. Selain poin-poin yang telah disebutkan di atas, DLH Kota Cimahi juga telah menerapkan sistem informasi lingkungan sebagai bentuk upaya pemantauan pengelolaan lingkungan di kota ini.

2.2.5.2 Penurunan Beban Pencemar Sungai

Dalam upaya pengendalian pencemaran air, khususnya adalah pencemaran sungai, Kota Cimahi berupaya dalam menurunkan beban pencemar untuk setiap sektor yang memang menjadi sumber pencemar terhadap sungai. peurunan beban pencemar dilakukan berdasarkan alokasi beban pencemar yang diperlukan terhadap Sungai Citarum, di bagian segmen sungai yang melintasi wiayah adminsitrasi Kota Cimahi, melalui Dinas Lingkungan Hidup

Kota Cimahi, berupaya menurunkan beban pencemar dari masing-masing sektor dengan berbagai macam program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Dokumen RPPLH Kota Cimahi. berikut merupakan upaya penurunan beban pencemar dari masing-masing sektor di Kota Cimahi :

a. Sektor Domestik

Sektor domestik menjadi salah satu sumber pencemar yang mempengaruhi kualitas air sungai, jika unsur buangan yang berusmber dari sektor domestik dibuang secara langsung tanpa adanya proses terlebih dahulu. Dengan adanya SK menteri terkait daya tampung beban pencemaran Sungai Citarum, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup, melakukan rencana penurunan beban pencemar terhadap sektor domestik dengan skala wilayah. Beriktu merupakan peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor domestik.

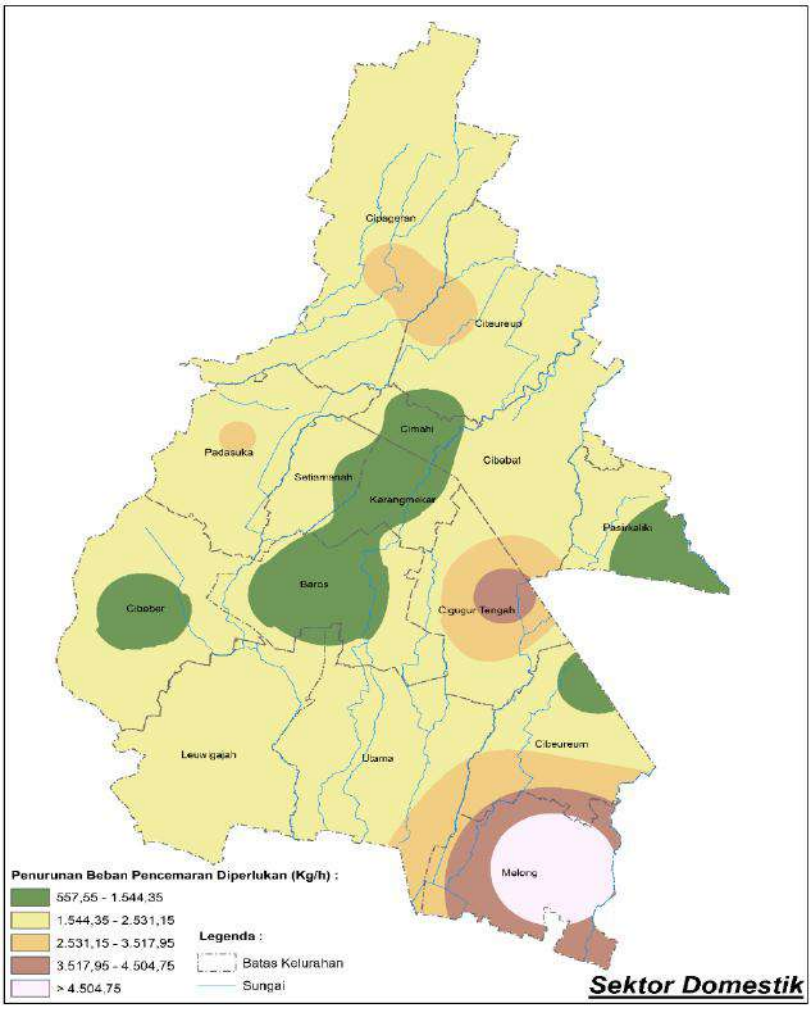

Gambar 2.44 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Domestik

(Sumber: Review RPPLH,2018; DLH Kota Cimahi dan Hasil Analisis, 2019)

b. Sektor Peternakan

Selain sektor domestik, Kota Cimahi berupaya menurunkan beban pencemar yang masuk ke sungai melalui sektor peternakan agar dapat mendukung memenuhi daya tampung sungai Citarum. Sektor peternakan di Kota Cimahi terdiri dari hewan sapi, domba, ayam, itik, kerbau, kuda, dan kambing. Beban BOD yang harus diturunkan dari sektor peternakan di Kota Cimahi adalah sebesar 602,89 kg/hari. Berikut

merupakan peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor peternakan.

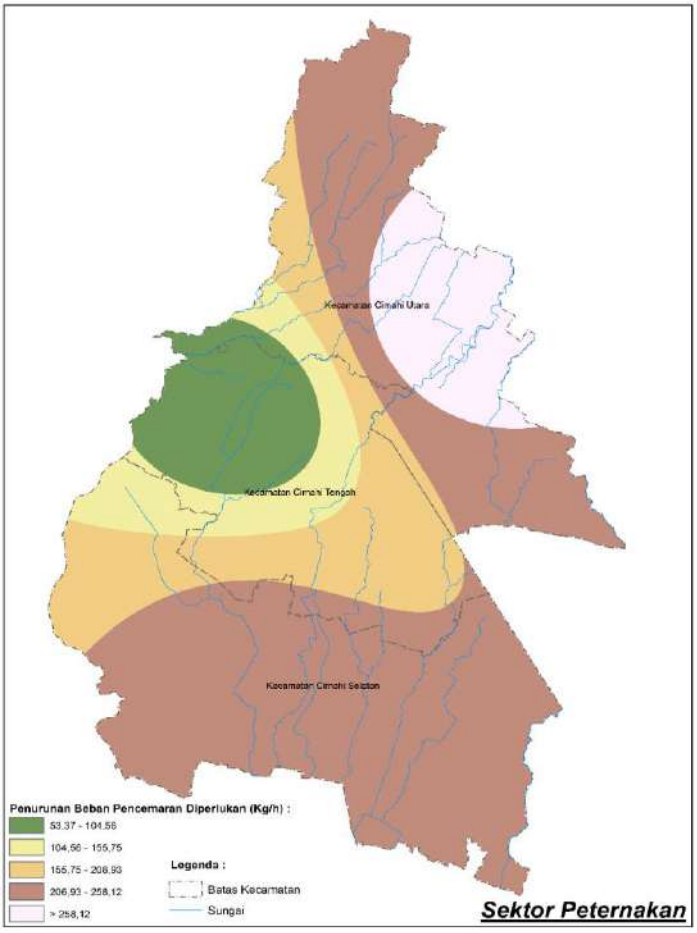

Gambar 2.45 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Peternakan

(Sumber: Review RPPLH,2018; DLH Kota Cimahi dan Hasil Analisis, 2019)

c. Sektor Pertanian

Adanya kebijakan yang mengharuskan Kota Cimahi menurunkan beban pencemar BOD sebesar 177,73 kg/hari dari sektor *NPS*, sehinggga pemerintah daerah perlu mengalokasikan penurunan tersebut untuk setiap wilayah administrasi yang merupakan masuk di kota Cimahi. Dari arahan total penurunan beban pencemar BOD yang harus diturunkan, di dapat masing-masing sektor sumber pencemar dari sawah dan kebun untuk setiap kecamatannya yang berasal dari persentase luasan total

penggunaan lahan yang dialokasikan berdasarkan total arahan penurunan beban pencemar BOD, sehingga di dapat alokasi penurunan beban pencemar BOD untuk setiap sektor sumber pencemar di setiap kecamatannya dalam kg/hari.

Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi yang salah satunya dilakukan melalui sektor pertanian. Berikut merupakan peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor pertanian.

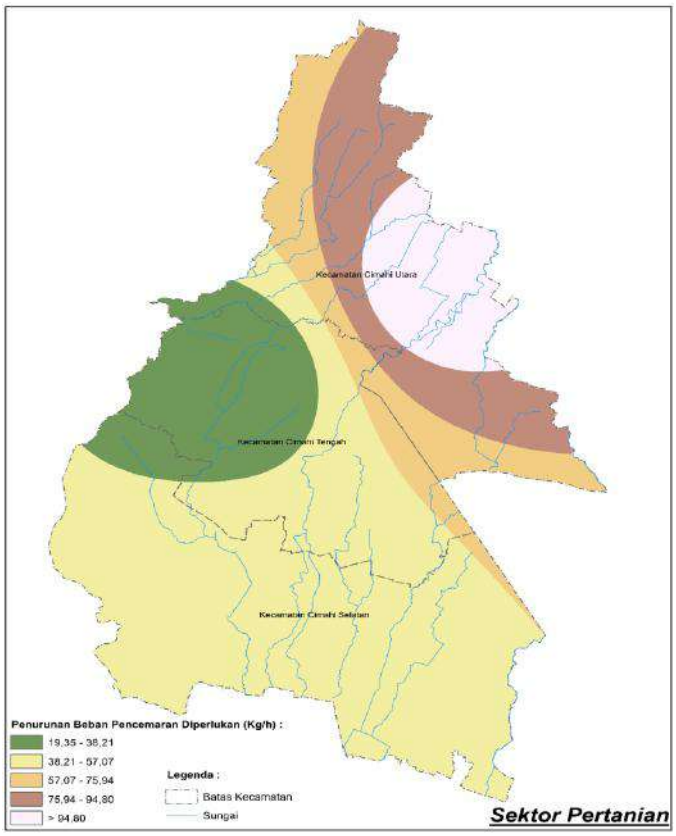

Gambar 2.46 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Pertanian

(Sumber: Review RPPLH,2018; DLH Kota Cimahi dan Hasil Analisis, 2019)

d. Sektor Industri

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.300/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017 Tentang Penetapan Daya

Tampung beban Pencemaran Air dan Alokasi beban Pencemaran Air Sungai Citarum, Kota Cimahi perlu menurunkan beban pencemar BOD sebesar 2.081,5 kg/hari dari sektor industri.

Upaya penurunan beban pencemar dilakukan dengan adanya *breakdown* jenis komoditi industri, sehingga didapatkan setiap jenis industri perlu menurunkan beban pencemarnya masing-masing. Berikut merupkan alokasi penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor industri.

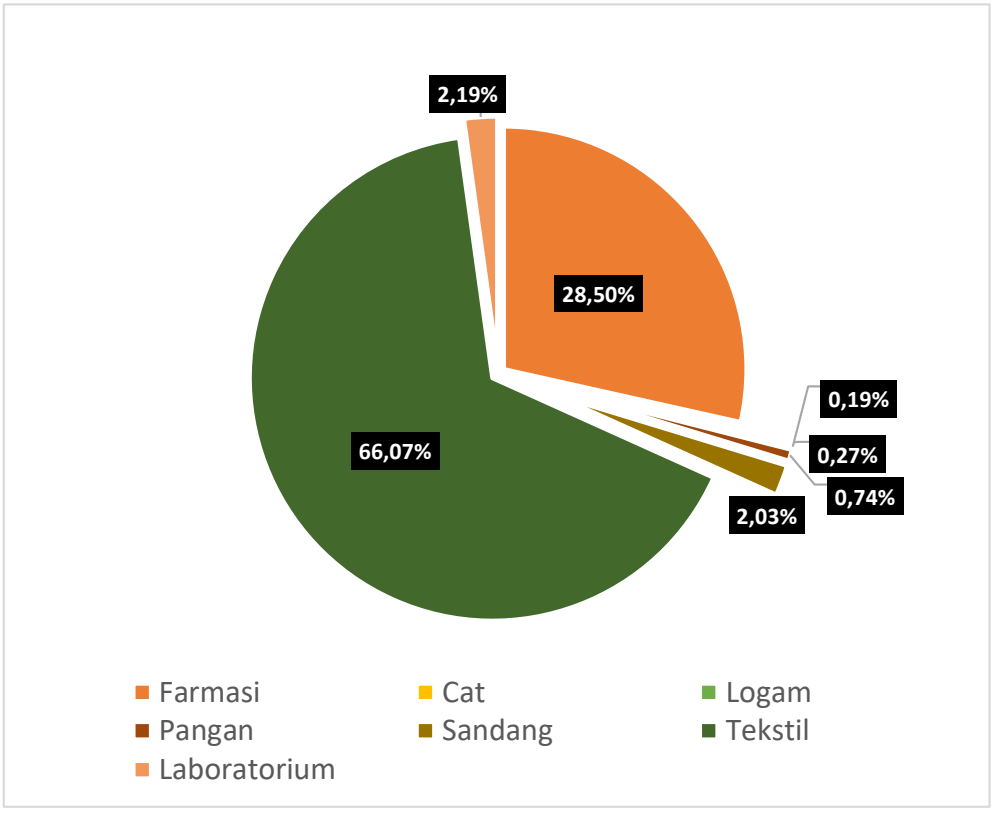

Gambar 2.47 Persentase Alokasi Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Industri

(Sumber: Review RPPLH,2018; DLH Kota Cimahi dan Hasil Analisis, 2019)

Beberapa program terkait upaya penurunan beban pencemar ke badan air yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi di antaranya adalah Wirausaha Sanitasi, Program Karismatik, Program Pengerukan Sedimen Sungai dan Drainase, Program Mantri Kamalir, dan Program Kajian Pembentukam Sentra Industri Pengolahan Kota Cimahi, Revitalisasi Sarana dan Prasarana

Pasar Atas, GAS (Gerakan Anti Sembarangan), Solar STBM, dan Program Haur Hiber.

2.2.5.3 Penambahan Cadangan Air

Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Ketiga jenis ekoregion tersebut masuk dalam kelas ekoregion darat Jawa Barat yaitu pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal.

Gambar 2.48 Ekoregion Provinsi Jawa Barat
(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

Pegunungan vulkanik merupakan daerah yang berupa kerucut vulkanik. Ekoregion ini tersusun dari produk letusan gunung berapi berupa perselingan batuan beku ekstrusif dan material piroklastik. Hasil letusan gunung berapi membentuk bentuk lahan bertopografi bergunung, berlereng terjal, kemiringan lereng rata-rata 45% dan amplitudo relief > 300 m. Ekoregion ini dapat ditemukan di bagian tengah dan selatan Jawa Barat.

Ekoregion ini umumnya beriklim tropika basah dengan suhu rata-rata 16-20°C. Curah hujan tahunan berkisar antara 3.000-4.500 mm. Ekoregion ini memiliki sumber daya air permukaan dan air tanah yang melimpah sepanjang tahun, sehingga pegunungan vulkanik berperan sebagai sumber cadangan air yang sangat besar. Aliran sungai dengan pola radial at au semiradial mengalir sepanjang tahun. Pada tekuk lereng bawah atau lereng kaki banyak dijumpai mata air artesis dan air terjun. Jenis tanah yang dominan adalah andosol, latosol, dan litosol. Jenis tanah andosol dan latosol tergolong subur.

2.2.5.4 Peningkatan Sarana Prasarana Persampahan

Sampah merupakan salah satu sumber pencemar yang dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Air larian yang tercampur sampah yang masuk ke badan air akan berpengaruh terhadap kulitas air sungai. selain itu juga sampah-sampah organik maupun non organik yang dibuang secara sembarangan ke badan air, akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas air, sedangkan pengaruh terhadap kuantitas air sungai yang disebabkan oleh sampah, diantaranya adanya potensi banjir karena aliran di sungai tersumbat oleh sampah.

Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengelola/mengendalikan kualitas air sungai yang disebabkan oleh sampah adalah dengan meningkatkan sarana prasarana persampahan di Kota Cimahi, dengan adanya sarana prasarana yang memadai dapat mengurangi sampah yang masuk ke sungai selain dari kesadaran diri setiap individu masyarakat. Kegiatan fisik terkait pengelolaan persampahan dalam meningkatkan sarana prasarana persampahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada lampiran tabel utama (Tabel 52).

Beberapa inovasi atau program yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi di antaranya adalah Program KTT (Kumpul Tukar Tebus) di bank sampah, Program HO-HA (Hari Organik dan Hari Anorganik), GPS (Gerakan Pungut

Sampah), Program siswa ber-*tumbler,* Program Katapel, dan Program Pengelolaan Pasar Rakyat.

2.3 Kualitas Udara

Kondisi kualitas udara di Kota Cimahi mengacu terhadap data Tabel 36 – Tabel 40. Selain itu jga didapatkan data penunjang lainnya yang dapat digunakan sebagai data analisis DPSIR pada isu kualitas udara di kota Cimahi.

2.3.1 Driving Force

2.3.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Setiap tahunnya jumlah penduduk Kota Cimahi mengalami peningkatkan, Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk maka semakin bertambah pula kebutuhan penduduk Kota Cimahi. Salah satu kebutuhannya adalah bahan bakar. Bahan bakar ini dibutuhkan untuk kegiatan transportasi, memasak, maupun industri. Peningkatan jumlah penduduk Kota Cimahi berdasarkan kecamatannya menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Peningkatan Penduduk Kota Cimahi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Pendududuk (%)
1	Kecamatan Cimahi Selatan	232.555	2,36
2	Kecamatan Cimahi Tengah	160.134	1,94
3	Kecamatan Cimahi Utara	161.066	2,72

(Sumber: Disdukcapil Kota Cimahi, 2019)

Dari Tabel 2.1 didapatkan jumlah penduduk total Kota Ciimahi Tahun 2019 sebanyak 553.755 Jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat 2,32% dari tahun sebelumnya, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan mengakibatan meningkat pula kebutuhan akan konsumsi bahan bakar. Meningkatnya konsmsi bahan akan menyebabkan meningkat pula emisi yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Peningkatan penduduk

juga dapat dilihat melalui peningkatan kepadatan penduduk di Kota Cimahi. *Trend* kepadatan penduduk di Kota Cimahi dapat diliat pada Gambar 2.3.

2.3.1.2 Jumlah Kendaraan Bermotor

Menurut Dinas perhubungan Kota Cimahi, minat penduduk Kota Cimahi menggunakan angkutan umum semakin menurun. Penduduk Kota Cimahi lebih memilih kendaraan pribadi atau kendaraan online. Hal tersebut akan menyebabkan peningkatan penggunaan bermotor di Kota Cimahi. Meningkatnya kendaraan bermotor akan mengakibatkan kualitas udara menurun. Kualitas udara menurun dikarenakan kendaran bermotor yang mengeluarkan gas buang atau emisi. Emisi tersebut akan mempengaruhi komposisi udara ambien, sehingga dianggap sebagai pencemar udara. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.49.

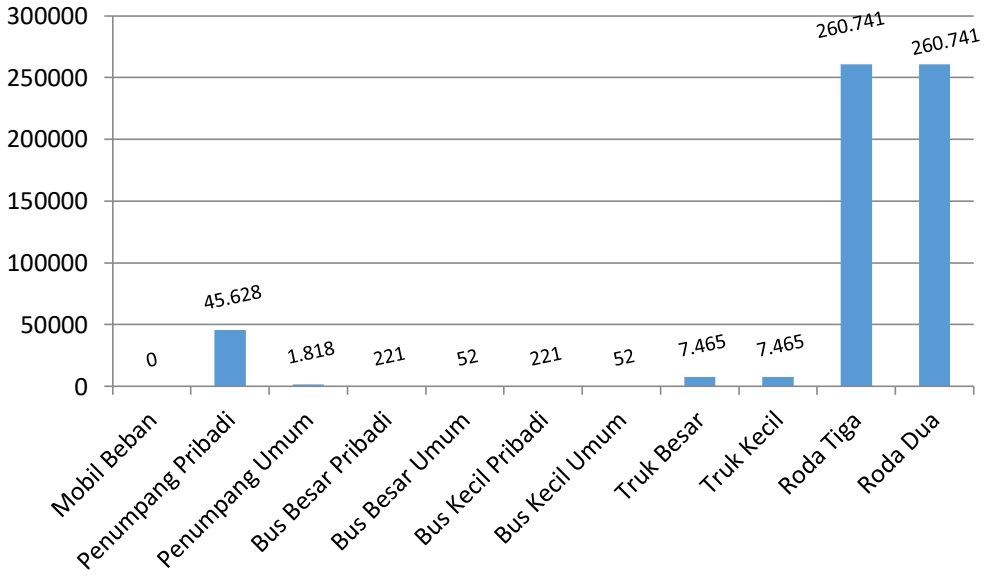

Gambar 2.49 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Cimahi
(Sumber: Badan Pendaaptan Daerah Prov. Jabar CPPD Wilayah Kota Cimahi, 2019)

2.3.1.3 RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

Pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022, salah satu misinya adalah mewujudkan

pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan guna untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkadilan. Misi tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara sehingga kualitas udara Kota Cimahi semakin meningkat. Selain itu juga dalam RPJMD Kota Cimahi, terdapat program peningkatan kualitas udara. Disisi lain jika pembangunan tidak dilakukan secara berkelanjutan maka akan memberi dampak pada kualitas udara Kota Cimahi.

2.3.2 Pressure

2.3.2.1 Emisi Bahan Bakar

Emisi bahan bakar ini disebabkan oleh kegiatan bahan bakar bagi untuk domestik, transportasi maupun industri. Emisi yang dihasilkan berupa gas rumah kaca diantaranya karbon dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Dinitrogen Oksida (N2O), selain gas rumah kaca dihasilkan juga pencemar udara berupa Nitrogen oksida (NOx), Sulfur oksida (Sox), Hidrokarbon (HC), Black Karbon (BC), *Non methane volatile organic compound* (NMVOC), *Particulate Matter* 10 (PM) 10, dan *Particulate Matter* 2.5 *(*PM 2.5). Unsur unsur tersebut merupakan parameter pencemaran udara, jika mengalami peningkatan konsentrasi di udara maka akan menyebabkan pencemaran udara karena kadarnya melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan, dengan meningkatnya kadar tersebut dampak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun manusia. Emisi bahan bakar juga dipengaruhi oleh jenis bahan bakar yang digunakannya. Bahan bakar tambahan yang umum dipakai oleh industri di Kota Cimahi adalah solar dan batubara. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan penggunaan bahan bakar tambahan di kota Cimahi.

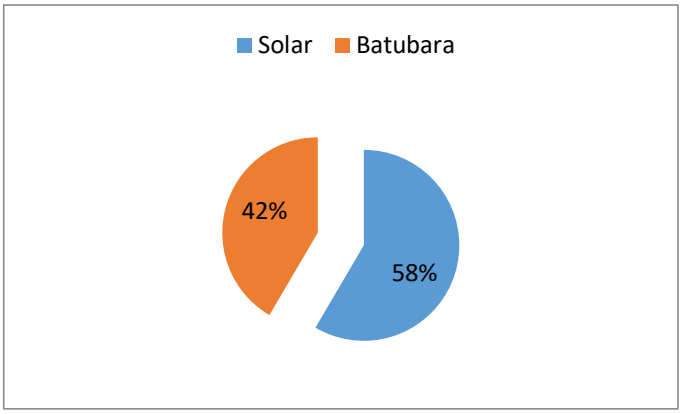

Gambar 2.50 Tambahan Bahan Bakar Sektor Industri di Kota Cimahi

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2017 (Tabel 39 DIKPLHD Kota Cimahi 2019)

Sumber pencemar udara berasal dari sumber titik, garis, dan area. Sumber titik adalah sumber tidak bergerak yang biasanya berupa industri manufaktur besar yang memiliki cerobong asap atau unit pembakaran. Sumber bergerak meliputi kendaraan darat dan berbasis rel, seperti kereta api, kendaraan air di sungai, danau dan laut dan kendaraan udara. Sumber area adalah sumber yang terdiri dari sumber-sumber titik kecil yang bersama-sama dapat mempengaruhi kualitas udara di suatu daerah. Contohnya, pembakaran bahan bakar di rumah tangga, TPA, kebakaran hutan (sumber alamiah), konstruksi pembangunan, dan jalan tidak beraspal.

2.3.2.2 Peningkatan Volume Kendaraan Bermotor

Volume kendaraan di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Cimahi didominasi oleh kendaraan bermotor (roda dua) rata-rata sebesar 76% kemudian kendaraan mobil penumpang 23% dan kendaraan angkutan barang 2%. Berikut grafik distribusi volume lalu lintas dibeberapa jalan di Kota Cimahi.

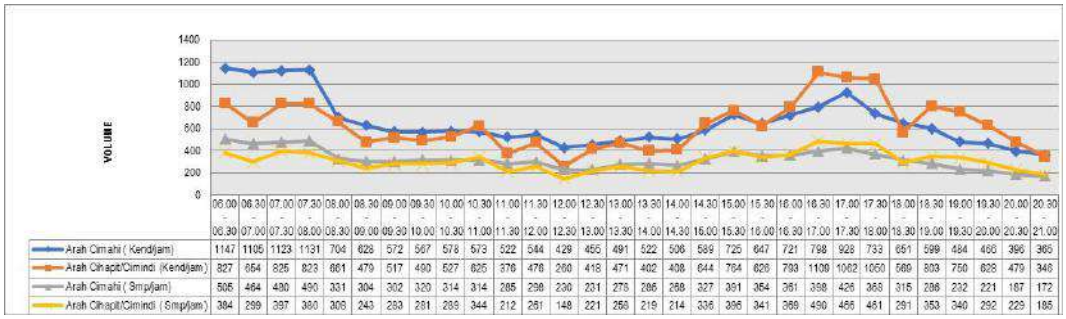

	06.00-06.30	06.30-07.00	07.00-07.30	07.30-08.00	08.00-08.30	08.30-09.00	09.00-09.30	09.30-10.00	10.00-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30	11.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	13.00-13.30	13.30-14.00	14.00-14.30	14.30-15.00	15.00-15.30	15.30-16.00	16.00-16.30	16.30-17.00	17.00-17.30	17.30-18.00	18.00-18.30	18.30-19.00	19.00-19.30	19.30-20.00	20.00-20.30	20.30-21.00
Arah Cimahi (Kend/jam)	1147	1105	1123	1131	704	628	572	567	578	573	522	544	429	455	491	522	506	589	725	647	721	798	928	733	651	599	484	466	396	365
Arah Cihapit/Cimindi (Kend/jam)	827	854	825	823	661	479	517	490	527	625	376	476	260	418	471	402	408	644	764	626	793	1109	1062	1060	569	803	750	628	479	346
Arah Cimahi (Smp/jam)	505	464	490	490	331	304	302	320	314	314	285	296	230	231	275	286	288	327	391	354	361	398	426	368	315	286	232	221	187	172
Arah Cihapit/Cimindi (Smp/jam)	384	399	397	380	308	243	283	281	289	344	212	261	148	221	258	219	214	336	396	341	369	490	466	461	291	353	340	292	229	185

Gambar 2.51 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Raya Kerkof Hari Kerja (06.00-21.00)

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2017)

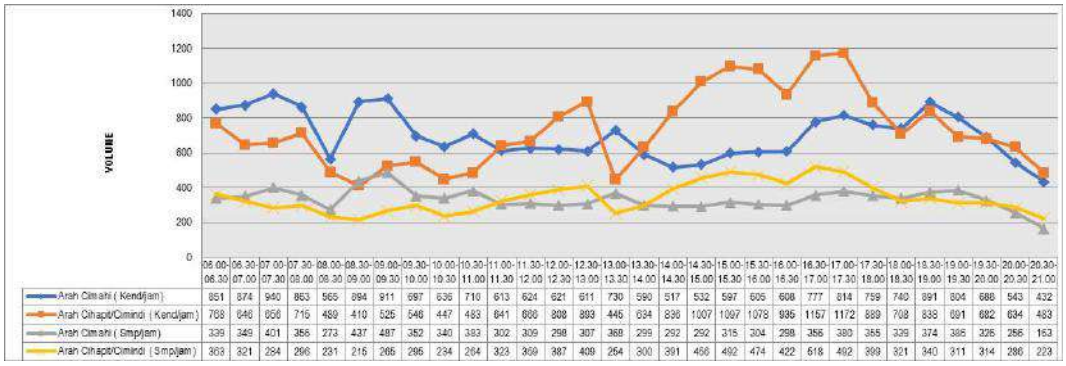

	06.00-06.30	06.30-07.00	07.00-07.30	07.30-08.00	08.00-08.30	08.30-09.00	09.00-09.30	09.30-10.00	10.00-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30	11.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	13.00-13.30	13.30-14.00	14.00-14.30	14.30-15.00	15.00-15.30	15.30-16.00	16.00-16.30	16.30-17.00	17.00-17.30	17.30-18.00	18.00-18.30	18.30-19.00	19.00-19.30	19.30-20.00	20.00-20.30	20.30-21.00
Arah Cimahi (Kend/jam)	851	874	940	853	565	894	911	697	636	716	613	624	621	611	730	590	517	532	597	605	608	777	814	759	740	891	804	686	543	432
Arah Cihapit/Cimindi (Kend/jam)	768	646	656	715	489	410	525	546	447	483	641	666	808	893	445	634	836	1007	1097	1078	936	1157	1172	889	708	838	691	682	634	483
Arah Cimahi (Smp/jam)	339	349	401	356	273	437	487	352	340	383	302	309	298	307	368	299	292	292	315	304	298	356	380	365	339	374	386	326	256	163
Arah Cihapit/Cimindi (Smp/jam)	368	321	284	296	231	216	266	296	234	264	323	359	387	409	264	300	391	466	492	474	422	618	492	399	321	340	311	314	286	223

Gambar 2.52 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Raya Kerkof Hari Libur (06.00-21.00)

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2017)

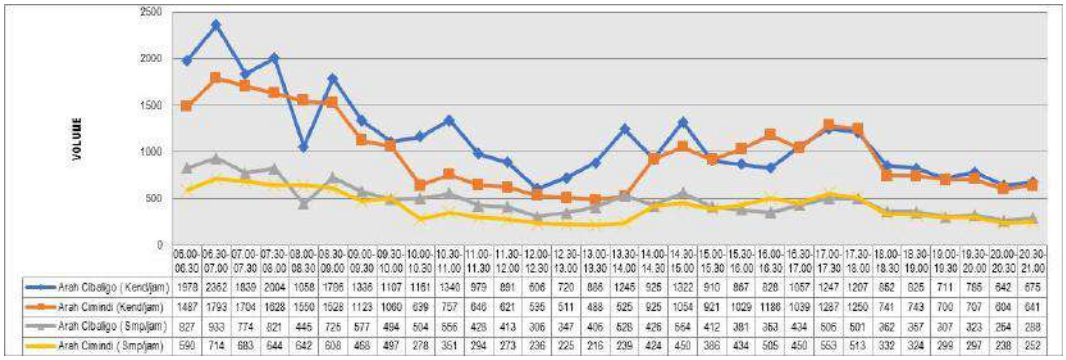

	06.00-06.30	06.30-07.00	07.00-07.30	07.30-08.00	08.00-08.30	08.30-09.00	09.00-09.30	09.30-10.00	10.00-10.30	10.30-11.00	11.00-11.30	11.30-12.00	12.00-12.30	12.30-13.00	13.00-13.30	13.30-14.00	14.00-14.30	14.30-15.00	15.00-15.30	15.30-16.00	16.00-16.30	16.30-17.00	17.00-17.30	17.30-18.00	18.00-18.30	18.30-19.00	19.00-19.30	19.30-20.00	20.00-20.30	20.30-21.00
Arah Cibaligo (Kend/jam)	1978	2362	1839	2004	1058	1706	1336	1107	1151	1348	979	891	606	720	886	1245	925	1322	910	867	828	1057	1247	1207	862	825	711	765	642	675
Arah Cimindi (Kend/jam)	1487	1793	1704	1628	1550	1528	1123	1060	639	757	646	621	595	511	488	525	925	1054	921	1029	1186	1039	1287	1250	741	743	700	707	604	641
Arah Cibaligo (Smp/jam)	827	933	774	821	445	725	577	494	504	656	428	413	306	347	406	526	426	564	412	381	353	434	506	501	362	357	307	323	264	288
Arah Cimindi (Smp/jam)	590	714	683	644	642	608	468	497	278	351	294	273	236	225	216	239	424	450	386	434	505	450	553	513	332	324	299	297	238	252

Gambar 2.53 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Leuwi Gajah Hari Kerja (06.00-21.00)

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2017)

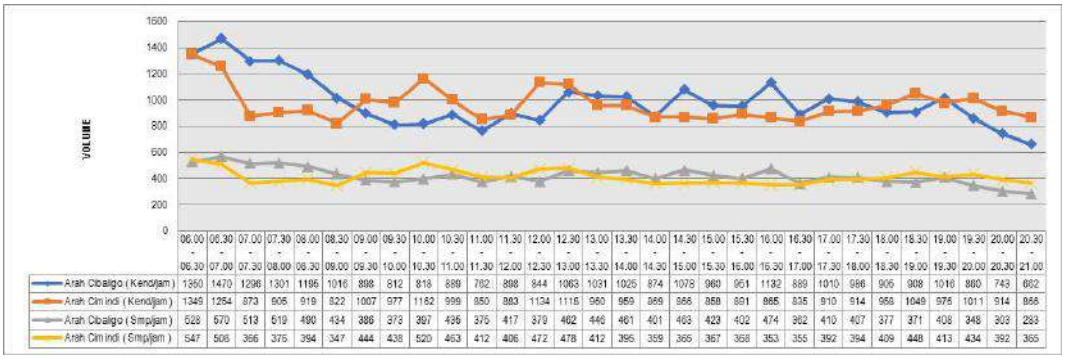

	06.00 - 06.30	06.30 - 07.00	07.00 - 07.30	07.30 - 08.00	08.00 - 08.30	08.30 - 09.00	09.00 - 09.30	09.30 - 10.00	10.00 - 10.30	10.30 - 11.00	11.00 - 11.30	11.30 - 12.00	12.00 - 12.30	12.30 - 13.00	13.00 - 13.30	13.30 - 14.00	14.00 - 14.30	14.30 - 15.00	15.00 - 15.30	15.30 - 16.00	16.00 - 16.30	16.30 - 17.00	17.00 - 17.30	17.30 - 18.00	18.00 - 18.30	18.30 - 19.00	19.00 - 19.30	19.30 - 20.00	20.00 - 20.30	20.30 - 21.00
Arah Cibaligo (Kend/jam)	1350	1470	1296	1301	1195	1016	898	812	818	889	782	898	844	1063	1031	1025	874	1078	960	951	1132	889	1010	986	905	908	1016	860	743	662
Arah Cimindi (Kend/jam)	1349	1254	873	905	919	822	1007	977	1162	999	950	983	1134	1115	960	959	969	966	858	891	865	835	910	914	958	1049	975	1011	914	956
Arah Cibaligo (Smp/jam)	528	570	513	519	490	434	386	373	397	435	375	417	379	462	446	461	401	463	423	402	474	362	410	407	377	371	408	348	303	283
Arah Cimindi (Smp/jam)	547	506	366	375	394	347	444	438	520	463	412	406	472	478	412	395	359	395	367	368	353	355	392	394	409	448	413	434	392	365

Gambar 2.54 Distribusi Volume Lalu Lintas Jl. Leuwi Gajah Hari Libur (06.00-21.00)

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2017)

Volume kendaraan tertinggi yang menuju keluar arah Cimahi adalah sepeda motor sebesar 55,61% sedangkan yang masuk ke Kota Cimahi 54,15% dari sepeda motor. Tingginya volume kendaraan yang berada di Kota Cimahi, menjadi tekanan terhadap emisi yang dihasilkan di udara bebas.

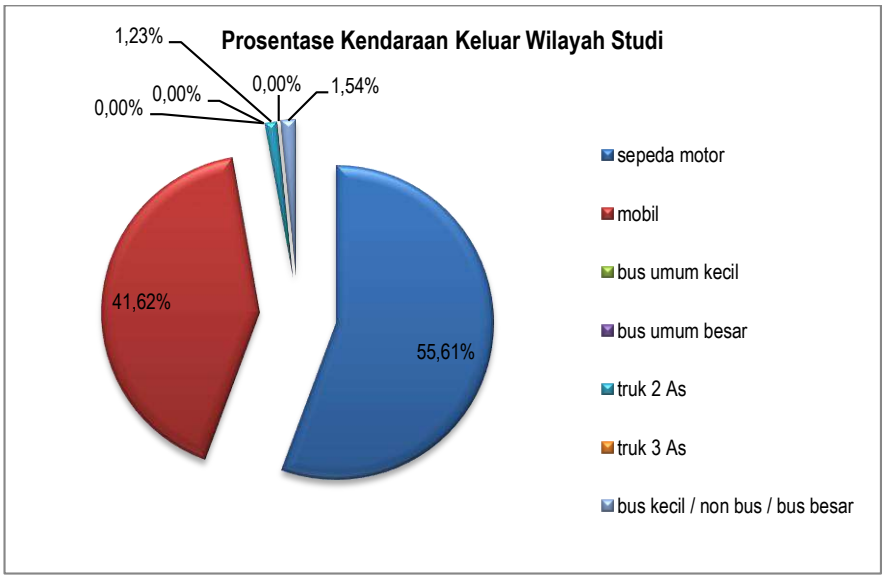

Gambar 2.55 Komposisi kendaraan dari Internal ke Eksternal

(Sumber: RIJLLAJ Kota Cimahi, 2018)

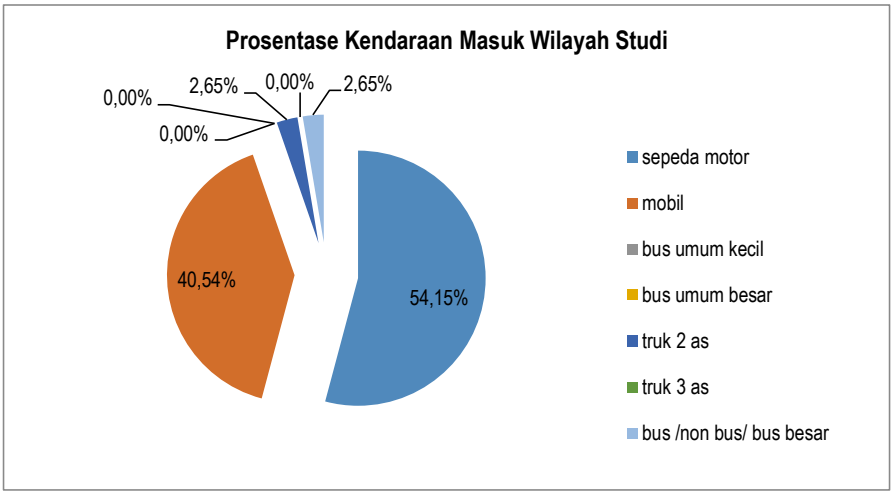

Gambar 2.56 Komposisi Kendaraan dari Eksternal ke Internal

(Sumber: RIJLLAJ Kota Cimahi, 2018)

2.3.3 State

2.3.3.1 Kualitas Udara Ambien

Kualitas udara ambien di Kota Cimahi dipengaruhi oleh pencemaran udara yang terjadi di Kota Cimahi. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Sumber sumber pencemar udara pada Kota Cimahi diantaranya yaitu kegiatan industri, transportasi, perniagaan dan pemukiman. Selain dari keempat sektor tersebut pencemaran udara di Kota Cimahi juga dipengaruhi oleh kegiatan pembakaran sampah yang masih banyak dilakukan. Berikut merupakan kondisi kualitas udara ambien di Kota Cimahi pada pemantauan tahun 2019 yang disajikan pada Tabel sebagai berikut.

Pada pengukuran kualitas udara ambien, baku mutu yang digunakan mengacu Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran udara, konsentrasi SO_2 yang diperbolehkan yaitu 365 µg/Nm^3 (waktu pengukuran 24 jam) dan konsentrasi NO_2 yang diperbolehkan yaitu 150 µg/Nm^3 (waktu pengukuran 24 jam).

Tabel 2.11 Kualitas Udara Ambien

Lokasi	Lama Pengukuran	SO2 (µg/Nm3)	NO2 (µg/Nm3)
Kantor BPJS Kesehatan, Jl. Sangkuriang No.65 Cibabat S : 06º 51' 52,1" E : 107º 32' 25,4"	1 hari	<2,57	17,40
PT Dewasutratex 1, Jl. Cibaligo No.76 Cigugur Tengah S : 06º 54' 06,7" E : 107º 33' 20,7"	1 hari	23,97	21,10
Perumahan Kemarung Regency, Jl. Kamarung Citeureup S : 06º 51' 23,4" E : 107º 32' 58,4"	1 hari	6,57	18,70
Kantor Kelurahan Melong, Jl. Melong Sakola No.72 Melong S : 06º 55' 15,2" E : 107º 33' 31,5"	1 hari	8,03	16,60
PT Logam Bima, Jl. Raya No.518 Padasuka S : 06º 52' 11,9" E : 107º 31' 50,3"	1 hari	2,62	18,70
PT Jenshiang Nusantara, Jl Mancong No.238 Melong S : 06º 55' 09,3" E : 107º 31' 50,3"	1 hari	34,16	21,20
Perum Pilar Mas, Jl. Mahar Martanegara Utama S : 06º 54' 02,7" E : 107º 32' 17,5"	1 hari	25,79	18,10
Kantor Kel Cigugur Tengah, <2,57 Jl Abdul Halim No 178 Cigugur Tengah S : 06º 53' 28,2" E : 107º 33' 16,6"	1 hari	10,49	19,00

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2019)

Menurut Tabel 2.12 hasil pengukuran parameter NO_2 dan SO_2 disetiap titik sampling masih memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dalam PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian pencemaran udara.

2.3.3.2 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Cimahi dapat menentukan tingkat pencemaran relative terhadap parameter uji kualitas udara yang diijinkan. Pengelolaan kualitas udara yang berdasarkan hasil indeks, dapat

memberikan masukan berupa pengambilan keputusan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas udara.

Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan 8 area lokasi tersebar diarea industri, perkantoran dan perumahan. Parameter yang digunakan dalam penentuan IKU adalah SO_2 dan NO_2. Digunakannya parameter NO_2 karena mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin sedangkan untuk parameter SO_2 merepresentatifkan emisi dari industri dan pemabakaran bahana bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Data hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kota Cimahi digunakan dalam penenetuan nilai IKU. Data hasil pemantauan dapat dilihat pada Tabel 2.11. Setelah mendapatkan konsentrasi dari SO_2 dan NO_2, kemudian konsentrasi tersebut dirata-ratakan, lalu dibandingkan dengan baku mutu (referensi EU) dan di konversi menjadi nilai indeks kualitas udara. Nilai indeks kualitas udara Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Indeks Kualitas Udara

Parameter	konsentrasi rata-rata (ug/m3)	I_{eu}	I_{eu} gabungan	IKU	Kelas Indeks
NO_2	18.85	0.5	0.6	73	cukup
SO_2	14.28	0.7			

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Berdasarkan Tabel 2.12, indeks kualitas kota cimahi termasuk cukup karena berada didalam rentang 66 -74. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

2.3.3.3 Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU)

Menurut Keputusan Bapedal No.107 tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemar udara, nilai ISPU dikelompokkan menjadi 5 kategori yaitu baik (0 - 50), sedang (51 – 100), tidak sehat (101 -199), sangat tidak sehat (200- 299), dan berbahaya (> 299). Berikut merupakan peta sebaran ISPU di Kota Cimahi.

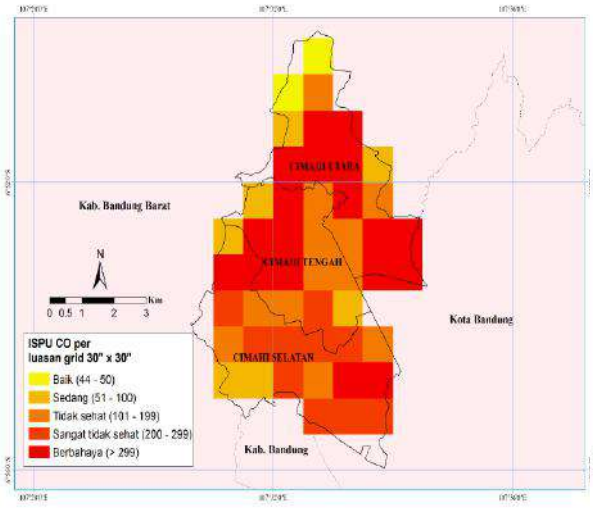

Gambar 2.57 ISPU CO dalam grid 30" x 30"

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi,2017)

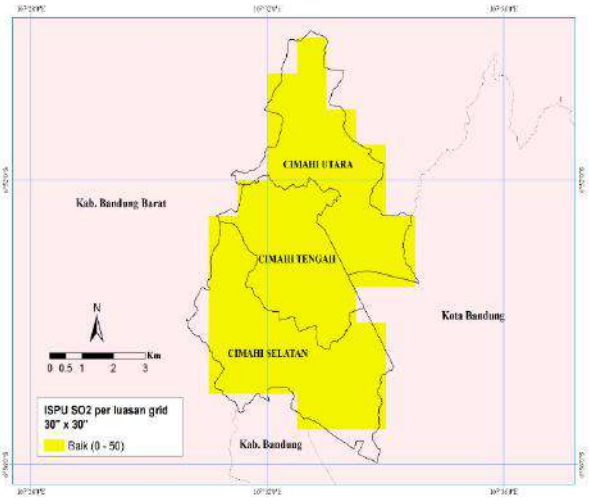

Gambar 2.58 ISPU SO_2 dalam grid 30" x 30"

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

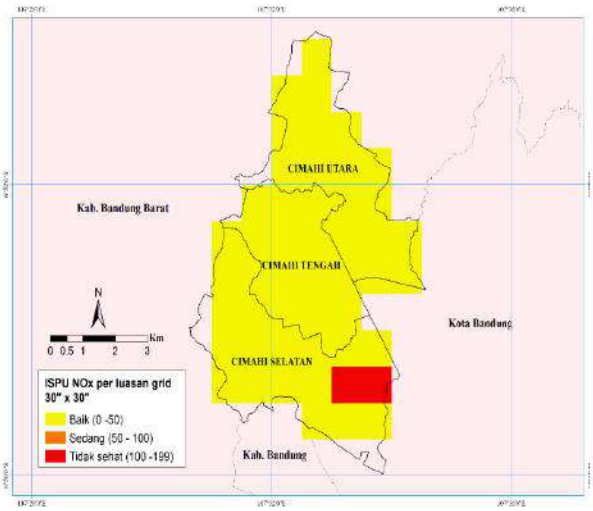

Gambar 2.59 ISPU NO_x dalam grid 30" x 30"

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

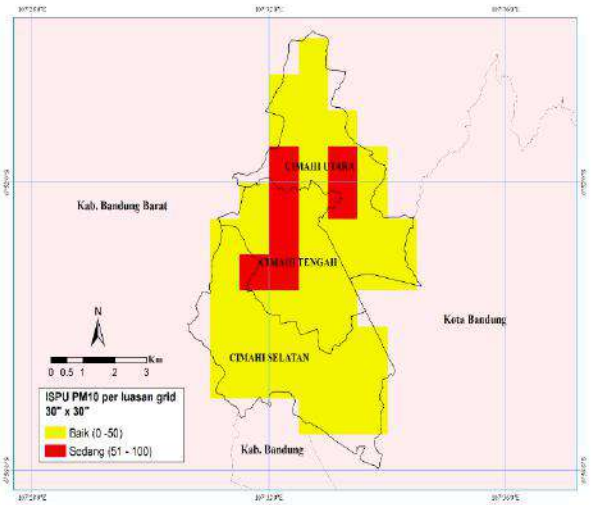

Gambar 2.60 ISPU PM_{10} dalam grid 30" x 30"

(Sumber: RPPLH Kota Cimahi, 2017)

2.3.3.4 Kepadatan Lalu Lintas

Kepadatan lalu lintas merupakan jumlah kendaraan dalam suatu ruas jalan tertentu. Kepadatan lalu lintas ini akan mempengaruhi kecepatan kendaraan dan volume kendaraan. Jika kepadatan meningkatkan maka kecepatan akan menurun dan berlaku sebaliknya akan tetapi apabila kecepatan sama dengan nol maka terjadi kemacetan. Volume maksimum terjadi ketika kapasitas suatu jalan sudah tercapai (penuh), ketika kapasitas sudah penuh maka volume akan menurun walapun kepadatan bertambah hingga terjadinya kemacetan.

Kemacetan di Kota Cimahi biasa terjadi pada jam jam sibuk, terdapat beberapa titik kemacetan di Kota Cimahi, titik-titik kemacetan tersebut berada di sekitar Pemkot Cimahi, Rumah Sakit Dustira, Daerah Baros, Cimindi, Jalan Amir Mahmud dan Citereup. Hal ini dikarenakan karakteristik Kota Cimahi sendiri merupakan wilayah yang memiliki jalan-jalan kecil ataupun kawasan militer sehingga dengan bertambahnya jumlah kendaraan yang ada membuat penumpukan dari kendaraan.

Gambar 2.61 Kepadatan Lalu Lintas di Jl. Amir Mahmud

2.3.4 Impact

2.3.4.1 Penyakit yang Diderita Masyarakat

Kualitas udara yang buruk dapat berdampak pada kesehatan manusia. Dampak tersebut diantaranya infeksi saluran saluran pernapasan, penyakit paru-paru, penyakit kulit, dan lain-lain. Berikut adalah jenis penyakit utama yang didertia penduduk Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 2.62.

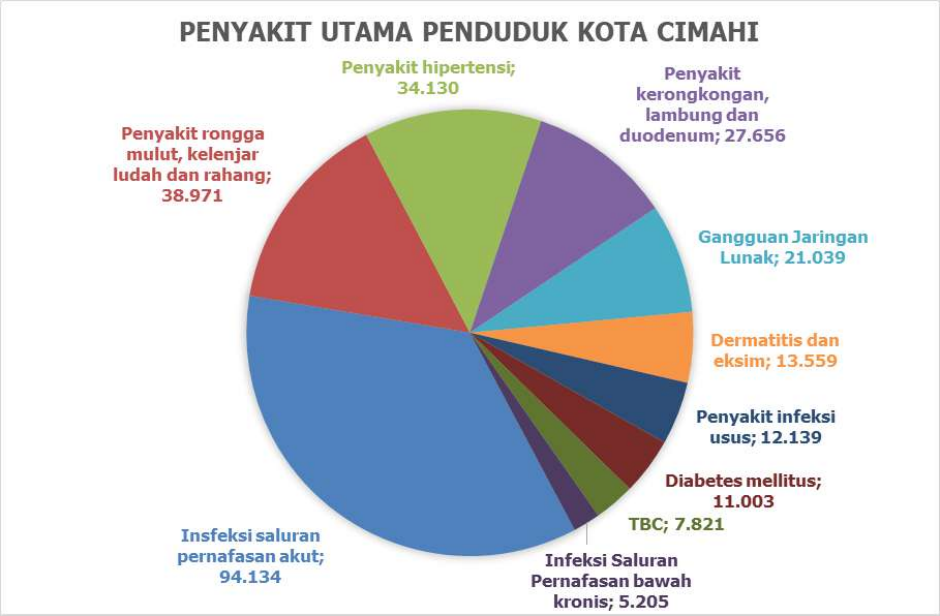

Gambar 2.62 Penyakit Terbanyak Penduduk Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

Menurut Gambar 2.63 tersebut**,** penyakit yang paling diderita yaitu penyakit Infeksi saluran pernafasan akut. Salah satu pemicu penyakit infeksi saluran pernafasan adalah kualitas udara yang buruk, dikarenakan pencemar udara terhirup dan masuk kedalam tubuh.

2.3.4.2 Efek Rumah Kaca

Efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca. Gas tersebut menyerap radiasi panas dari sinar inframerah dari permukaan bumi dan memantulkannya kembali ke lapisan bawah troposfer. Hal tersebut menyebabkan panas terperangkap di permukaan bumi. Gas-gas yang

menimbulkan efek rumah kaca adalah kloro fluoro karbon (CFC), uap air, karbon dioksida (CO_2), dintrous oksida (N_2O), dan metana (CH_4). Meningkatnya efek rumah kaca akan menimbulkan peristiwa yang dinamakan dengan pemanasan global. Pemanasan global ini merupakan naiknya suhu di seluruh permukaan bumi yang terjadi di seluruh dunia. Kenaikan suhu ini akan mengakibatkan makhluk hidup kesusahan dalam menjalani hidupnya, hal tersebut dikarena makhluk hidup harus terus beradaptasi akan iklim yang ada, tidak jarang terjadinya badai, musim kering, banjir, angina topan dan gejala cuaca lainnya yang mempunyai dampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi manusia.

Gas-gas rumah kaca umumnya disebabkan oleh pembakaran bahan bakar. Sektor industri pada masih banyak yang menggunakan bahan bakar, sehingga sektor industri berkontribusi dalam menimbulkan efek rumah kaca. Berikut adalah kontribusi kegiatan industri dalam menghasilkan gas rumah kaca terdapat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Emisi Gas Rumah Kaca dari Kegiatan Industri

Jenis Bahan Bakar	Jumlah Penggunaan bahan Bakar	Satuan	Beban Emisi CO_2 (ton/tahun)	Total (ton CO_2/tahun)
Bensin	4.258.258	Liter	221.323	16.776.436
Solar	12.649.711	Liter	779.870	
Minyak Tanah	13.853.738	Liter	831.730	
Batu Bara	153.510.873	Kg	14.752.395	
Gas PGN	1.721.209	m^3	67.592	
Gas LPG	347.708	kg	21.940	
Pelumas	1.732.366	Liter	101.586	

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Menurut tabel di atas, sektor industri mengemisikan gas rumah kaca (CO2) sebesar 16.776.436 ton CO2 setiap tahunnya. Tingginya emisi CO2 dikarenakan masih banyaknya penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama.

2.3.5 Response

2.3.5.1 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala

Dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara khususnya terkait dengan udara ambien. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi setiap tahunnya melakukan pemantauan air kualitas udara di beberapa titik pemantauan. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat data series kualitas udara setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengendalian jika didapati hasil kualitas yang kurang baik.

Pemantauan yang dilakukan merupakan daerah yang mewakili sektor-sektor sumber pencemar kualitas udara ambien diantaranya sektor perniagaan, permukiman, industri dan transportasi.

Selain pemantauan terhadap sumber tidak bergerak, pemerintah Kota Cimahi melakukan uji emisi terhadap sumber bergerak yaitu pada kendaraan-kendaraan di Kota Cimahi, hasil uji emisi tersebut bertujuan sebagai tolak ukur emisi yang dihaslkan oleh kendaraan yang berada di Kota Cimahi.

2.3.5.2 Rekayasa Lalu Lintas

Pemerintah Kota Cimahi menyadari salah satu sumber pencemar di Kota Cimahi yang mempengaruhi kualitas udara salah satunya adalah berasal dari kendaraan bermotor. Keberadaan kendaraan bermotor dan padatnya lalu lintas ketika hari kerja di Kota Cimahi menghasilkan emisi-emisi dari kendaraan bermotor.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas setiap hari libur (minggu) dengan dilakukan *Car Free Day*. Selain itu juga rekayasa lalu lintas dilakukan pada hari kerja melalui Dinas Perhubungan untuk mengurai kepadataan lalu lintas di beberapa ruas jalan.

2.3.5.3 Penataan Jalan

Permasalahan transportasi Kota Cimahi harus ditinjau dari sudut pandang kota sebagi bagian wilayah Metropolitan Cekungan Bandung. Pergerakan lalu lintas orang dan barang yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh internal Kota Cimahi saja, akan tetapi sebagai daerah perlintasan dari kota-kota sekitarnya. Kondisi inilah yang menyebabkan Kota Cimahi mengalami masalah kemacetan lalu lintas. Kemacetan yang terjadi di beberapa titik akan berdampak terhadap emisi kendaraan yang dihasilkan. Sehingga penataan jalan dilakukan sebagai mengurai kemacetan juga untuk dapat meminimalisir emisi kendaraan yang berada di satu lokasi dalam jangka waktu yang lama.

Kota Cimahi dilintasi oleh 2 (dua) Jalan Nasional yaitu Jalan Tol dan Jl. Jend. H. Amir Machmud dan 4 (empat) Jalan Provinsi yaitu Jl. Kol. Masturi, Jl. Gatot Subroto, Jl. Baros dan Jl. Nanjung. Aksesibilitas jalan menuju pintu masuk Jalan Tol di Kota Cimahi (Gerbang Tol Baros) merupakan jalan dengan kewenangan kota (Jl. HMS Mintaredja, SH) yang secara hierarki dua tingkat dibawahnya.

Adanya usulan penataan terhadap hierarki jalan di Kota Cimahi dengan melakukan perubahan peningkatan status jalan, yaitu Jl. HMS Mintaredja, SH. dan Jl. Mahar Martanegara yang semula sebagai jalan arteri skunder (kewenangan kota) menjadi jalan kolektor primer (kewenangan provinsi).

2.4 Risiko Bencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana dapat diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan. Bencana sering kita artikan pula sebagai kecelakaan atau bahaya. Dalam analisis ini, bencana di Kota Cimahi yang akan diidentifikasi keterkaitannya dengan lingkungan hidup antara lain banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor. Keempat bencana tersebut berpotensi untuk terjadi di kota ini.

Banjir sering terjadi di banyak kota dalam skala yang berbeda, penyababnya adalah berlebihnya jumlah aliran air di suatu daratan. Berlebihnya aliran tersebut dapat terjadi sebab jumlah air yang ada di danau, sungai, ataupun daerah aliran air lainnya melebihi kapasitas normal akibat adanya akumulasi air hujan atau pemampatan sehingga terjadi luapan ke daerah di sekitarnya. Sedangkan bencana berupa kekeringan dapat terjadi jika penggunaan air tanah dilakukan secara berlebih atau eksploitasi. Jika menggunakan air yang didistribusikan oleh pemerintah (melalui IPA), maka kekeringan bisa saja terjadi jika tingkat kebocoran tinggi.

Bencana lainnya yaitu kebakaran yang dapat terjadi karena faktor alam atau manusia. Faktor alam yang dimaksud dapat berupa sambaran petir dan akibat dari musim kemarau. Sedangkan faktor manusia contohnya kecerobohan manusia dan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Tanah longsor disebabkan oleh tingginya curah hujan, penebangan hutan secara liar, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal.

2.4.1 Driving Force

2.4.1.1 Pertumbuhan Penduduk dan Lahan Perumahan

Faktor pemicu pertama dalam mendorong terjadinya bencana seperti banjir, kebakaran, dan tanah longsor yaitu pertumbuhan penduduk. Walau tidak akan signifikan, pertumbuhan penduduk atau bertambahnya jumlah penduduk ini akan diiringi dengan bertambahnya kebutuhan lahan permukiman. Tidak hanya untuk tempat tinggal, lahan juga dapat bertambah karena adanya suatu usaha/kegiatan lainnya. Perubahan lahan ini perlu dipertimbangkan dalam menilai risiko bencana yang terdapat di Kota Cimahi. Tidak hanya menyebabkan perubahan lahan, pertumbuhan penduduk juga diiringi dengan timbulan sampah yang turut mempengaruhi isu ini. Kepadatan penduduk dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami peningkatan, baik di Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, maupun Cimahi Utara.

Sedangkan untuk melihat korelasinya dengan perubahan lahan dan timbulan sampah, maka akan dijelaskan pada bagian analisis berikutnya.

2.4.1.2 Daerah Berisiko Bencana Berdasarkan Topografi

Seperti yang kita tahu, topografi merupakan suatu studi yang membahas tentang bentuk permukaan bumi. Dalam kata lain, topografi sering diartikan juga sebagai kemiringan permukaan bumi. Kota Cimahi yang memiliki kelerengan beragam mulai dari 685 mdpl hingga 1.075 mdpl menjadi pedorong timbulnya risiko bencana di suatu wilayah, seperti bencana tanah longsor dan banjir di dataran yang lebih rendah. Dapat dilihat pada Tabel 2.14, kemiringan lereng di Kota Cimahi tersebar beragam di setiap kecamatan. Kedaan topografi seperti ini akan diperburuk dengan perubahan lahan yang mengganggu kestabilan tanah, seperti dibangunnya perumahan atau bangunan lainnya.

Tabel 2.14 Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Lereng

No.	Kecamatan	Kemiringan Lereng (%)					Total Luas
		0-8	8-15	15-25	25-40	>40	Km^2
1	Cimahi Utara	11,76	0,71	0,47	0,29	0,07	**13,3**
2	Cimahi Tengah	9,85	0,06	0,049	0,03	0,002	**10,0**
3	Cimahi Selatan	14,58	0,63	0,81	0,67	0,20	**16,9**
Total Luas (km^2)		**36,20**	**1,40**	**1,33**	**0,99**	**0,28**	**40,20**

(Sumber: Kota Cimahi dalam Angka, Bappeda, 2015)

Selain kemiringan, sesar lembang sepanjang 29 km mulai dari Gunung Batu (timur) ke daerah Cimeta Padalarang (Barat) juga menyababkan Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah rawan gempa bumi. Sesar lembang tersebut merupakan sebuah patahan geser aktif yang berpotensi menyebabkan gempa dengan kekuatan 6,8-7 skala richter.

Gambar 2.63 Lokasi Sesar Lembang

2.4.1.3 Cakupan Pelayanan Persampahan Kota Cimahi

Faktor pendorong ketiga yang dianggap dapat memicu risiko bencana yaitu cakupan pelayanan persampahan. Bukan hal asing, bahwa sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya bencana banjir. Namun, hal ini tidak begitu berarti jika sampah-sampah yang ditimbulkan dari semua sumber di Kota Cimahi dikelola dengan baik. Sebaliknya, jika pengelolaan yang mencakup pelayanan sampah masih belum optimal, tidak menutup kemungkinan pula hal ini menyebabkan bencana, mengingat jumlah populasi penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya dan kesadaran masyarakat yang rendah. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini mencakup pelayanan oleh pemerintah (dinas terkait) maupun pelayanan mandiri oleh masyarakat (penerapan 3R di sumber). Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, sampah yang kini ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup baru telah mencapai 95% dari total timbulan sampah. Sedangkan 5% sampah yang masih belum tertangani berpotensi untuk dibuang sembarangan, seperti ke saluran drainase, sungai, serta dibakar sehingga sangat mungkin memicu kejadian banjir bahkan kebakaran.

2.4.1.4 RPJMD Kota Cimahi

RPJMD merupakan rencana pembangunan yang disusun untuk suatu kota untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD Kota Cimahi saat yang berlaku saat ini yaitu RPJMD Tahun 2017-2022. Dalam dokumen perencanaan tersebut disebutkan bahwa salah satu misi yang akan ingin dicapai adalah peningkatan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan. Misi tersebut ditujukan sebagai upaya pengentas kemiskinan. Secara singkat, kaitan misi tersebut dengan analisis risiko bencana ini adalah ketika suatu wilayah dibangun untuk perkembangan ekonomi, tentu akan diikuti dengan pertumbuhan penduduk dan penambahan luas lahan terbangun sebagai pendukungnya. Hal tersebut lah yang menjadi pendorong rentannya suatu wilayah terjadi bencana. Lahan-lahan kosong yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air otomatis berkurang karena dialih-fungsikan menjadi bangunan yang kedap air, sehingga mempengaruhi jumlah air larian (*run off*) dan peresapan air ke dalam tanah.

2.4.1.5 Intensitas Curah Hujan

Salah satu bencana yang berpotensi terjadi di Kota Cimahi yaitu banjir. Fenomena ini erat juga kaitannya dengan curah hujan yang turun di suatu wilayah karena biasanya banjir terjadi setelah turunnya hujan. Besaran yang biasa digunakan dalam menyatakan curah hujan ini yaitu intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini dinyatakan dalam tinggi curah hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda, bergantung dari lamanya hujan turun dan frekuensi kejadiannya. Berdasarkan data DPKP Kota Cimahi dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, curah hujan yang turun di Kota Cimahi selama tahun 2019 di titik pantau Stasiun Cibereum dan Stasiun Geofisika Bandung dapat dilihat pada Gambar 2.64 berikut.

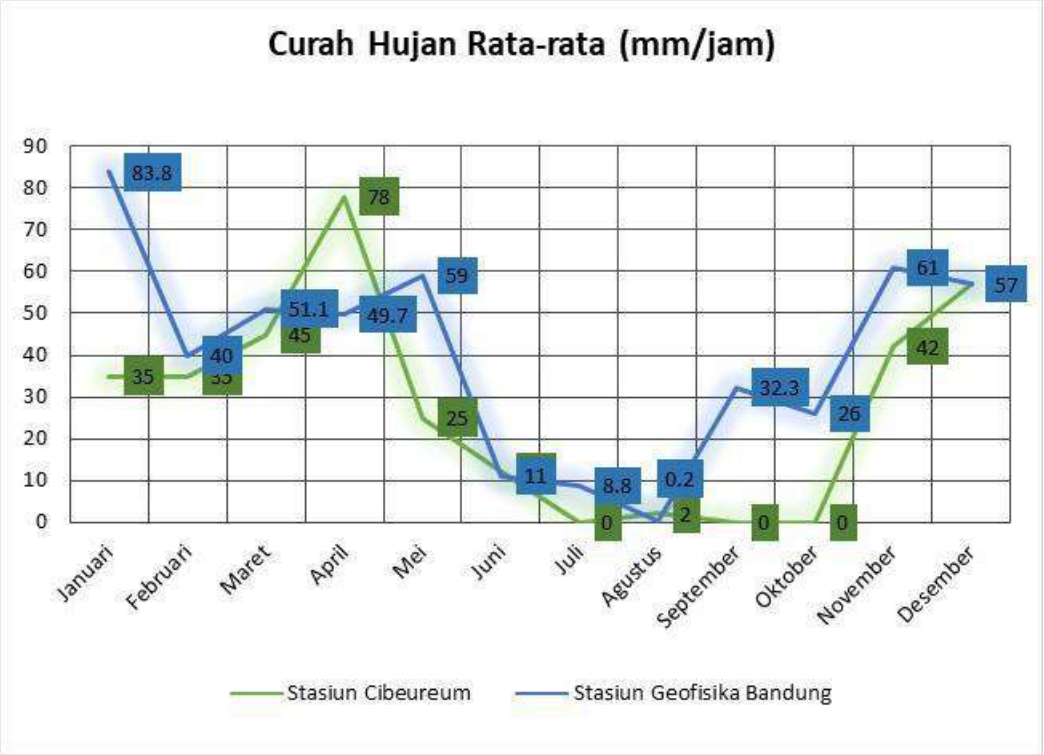

Gambar 2.64 Curah Hujan Rata-rata Tahun 2019

(Sumber: DPKP Kota Cimahi dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2020)

2.4.2 Pressure

2.4.2.1 Perubahan Tata Guna Lahan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa faktor pendorong berupa pertumbuhan penduduk akan diiringi pula dengan perubahan lahan atas dasar kebutuhan. Perubahan lahan ini perlu diidentifikasi pengaruh atau dampaknya terhadap lingkungan. Selama 3 tahun (2017-2019), berikut perubahan luas lahan di Kota Cimahi berdasarkan pemanfaatannya (Tabel 2.15). Sedangkan Gambar 2.65 menunjukkan perubahan luas lahan yang digunakan untuk permukiman dari tahun 2012 hingga tahun 2019. Luas lahan permukiman dari tahun ke tahun cenderung mengalami penambahan karena jumlah penduduknya pun bertambah setiap tahun (data kepadatan

penduduk pada Gambar 2.3). Kaitan kepadatan lahan ini dengan bencana dapat berupa risiko kebakaran yang lebih cepat menyebar di wilayah padat penduduk. Selain itu, padatnya lahan yang digunakan akan mengurangi daerah resapan air sehingga air hujan yang turun berpotensi lebih banyak yang menjadi air larian (*run off).* Tentu hal ini akan menyebabkan genangan atau bahkan banjir, terutama jika tidak didukung dengan sistem drainase yang memadai.

Gambar 2.65 *Trend* Luas Lahan Permukiman Tahun 2012-2019

(Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2020)

Tabel 2.15 Luas Perubahan Lahan

No	Jenis Penggunaan Baru	Luas Tahun 2017 (Ha)	Luas Tahun 2018 (Ha)	Luas Tahun 2019 (Ha)
1	Pemukiman	1.977,919	1.966,38	2.120,05
2	Industri	500,575	500,575	494,43
3	Tanah Kering	1.901,773	1.901,773	198,64
4	Perkebunan	96,894	96,744	N/A
5	Semak Belukar	N/A	N/A	N/A
6	Tanah Kosong	133,509	122,329	N/A
7	Perairan/Kolam	9,13	N/A	16,69
8	Lainnya (Sebutkan)	N/A	N/A	N/A

(Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2019)

2.4.2.2 Penurunan Muka Air Tanah

Berdasarkan Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Badan Geologi Kementerian ESDM, sejumlah kawasan di cekungan bandung yang sudah masuk dalam zona merah diantaranya kawasan industri di Kota Cimahi dan Bandung bagian selatan dan di Rancaekek Kab. Bandung. Sesuai peta konservasi air tanah, kawasan Cimahi Selatan seperti di Leuwigajah, Rancaekek dan Bandung Selatan termasuk zona merah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tahun 2008 lalu, dari potensi imbuhan air tanah di Cekungan Bandung sebesar 117 m^3/tahun, 55 persen dari jumlah tersebut sudah dipergunakan. Dari 55% potensi imbuhan Cekungan Bandung, sebagian besar diambil oleh industri. Para peneliti dari Institut Teknologi Bandung juga menyebutkan bahwa penurunan muka air tanah di Kota cimahi mencapai 20 cm setiap tahunnya.

2.4.2.3 Kondisi Saluran Drainase

Kondisi saluran drainase menjadi faktor penting yang turut berpengaruh dalam peningkatan risiko bencana, terutama bencana banjir. Selain didorong oleh perubahan lahan, kondisi saluran drainase juga dipengaruhi oleh timbulan sampah serta cakupan pelayanannya. Karena saluran drainase merupakan saluran yang mengalirkan air sebanyak-banyaknya ke sungai dan bermuara di laut, maka kondisi sungai juga perlu dipertimbangkan dalam analisis isu lingkungan ini.

Dikutip dari pernyataan Pemerintah Kota Cimahi, khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), hasil kajian *review* rencana induk drainase di tahun 2018 menunjukkan bahwa sungai-sungai di kota tersebut perlu diperlebar.Khususnya sungai-sungai yang ada di wilayah hilir yang akan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Sungai-sungai tersebut diantara ialah Sungai Cilember, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai cihaur, dan Sungai Cibiuk. Menyempitnya sungai tersebut menjadi faktor penekan terjadinya genangan bahkan banjir di Kota Cimahi. Selain

itu, berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, kondisi saluran drainase di kota terebut juga sudah tidak memadai. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sampah dan endapan, bangunan liar di atas saluran, utilitas umum PLN yang melintasi gorong-gorong, saluran yang curam, kurangnya pemeliharaan dan inspeksi, serta terdapatnya bendungan irigasi yang tidak berfungsi dan menghalangi aliran di tengah sungai. Untuk menunjukkan kondisi eksisting dari sistem drainase di Kota Cimahi, dapat dilihat pada Gambar 2.66 hingga Gambar 2.68 berikut.

Hasil analisis area risiko genangan dan banjir berdasarkan Pedoman strategi Sanitasi Kota 2018 menunjukkan terdapat 2 kelurahan berisiko sangat tinggi, 1 kelurahan berisiko tinggi, 5 kelurahan berisiko rendah, dan 7 kelurahan berisiko sangat rendah (Gambar 2.69). Analisis ini dilakukan berdasarkan pertimbangan kondisi eksisting drainase, kejadian ganangan dan banjir, dan kondisi lain terkait wilayah tersebut (kepadatan, ekonomi, kemiskinan, dan fungsi urban).

Gambar 2.66 Sempitnya Saluran Drainase Akibat Tekanan Penggunaan Lahan (Kelurahan Citeureup)

Gambar 2.67 Kondisi Saluran Drainase di Salah Satu Titik Kelurahan Melong

Gambar 2.68 Kondisi Saluran Drainase di Salah Satu Titik Kelurahan Cigugur Tengah

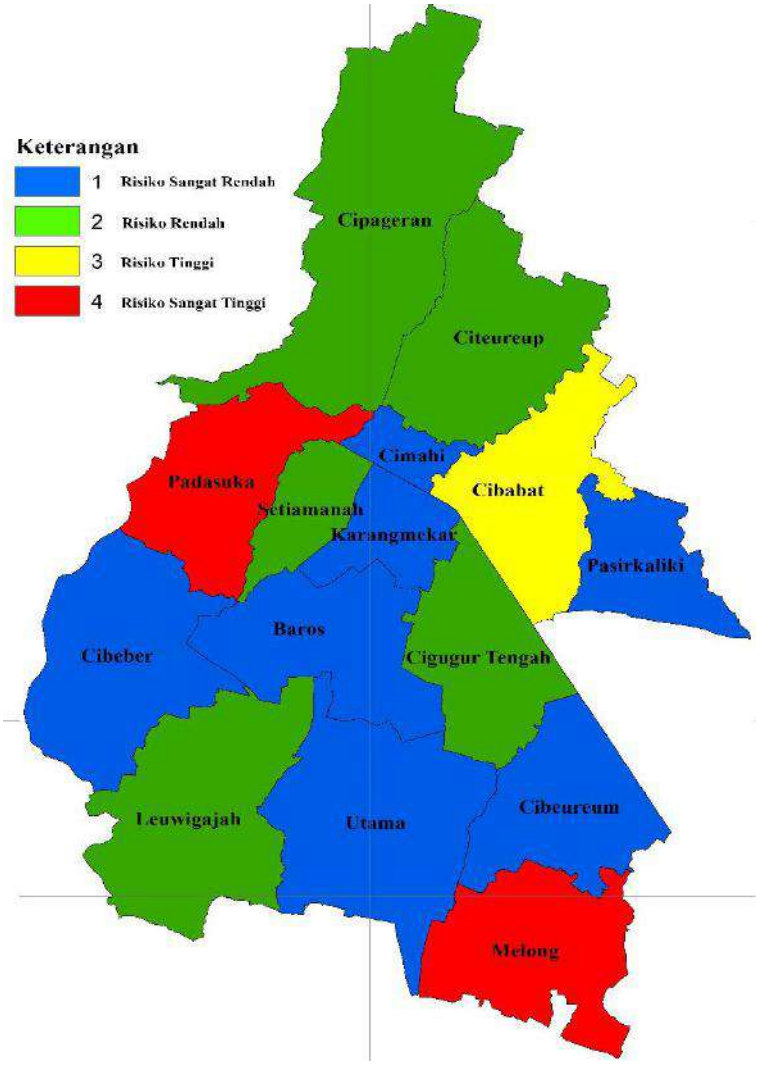

Gambar 2.69 Pemetaan Area Risiko Drainase Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

Gambar 2.70 Banjir di Kelurahan Melong Tahun 2019

2.4.2.4 Pola Konsumsi dan Kesadaran Masyarakat

Menyinggung salah satu misi Kota Cimahi dalam RPJMD 2017-2022 yang berupa peningkatan taraf ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun akan terpengaruh. Semakin tinggi tingkat perekonomian, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun dapat turut mengalami peningkatan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada taraf dan pola konsumsi. Dalam Dokumen "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi Tahun 2016" yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pengeluaran masyarakat Kota Cimahi lebih banyak digunakan untuk bahan non makanan dibanding bahan makanan. Dalam analisis tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cukup sejahtera. Pola konsumsi seperti ini dapat juga dikaitkan dengan jumlah sampah yang ditimbulkan. Semakin tinggi tingkat konsumsi, semakin banyak pula sampah yang ditimbulkan.

Di samping pola konsumsi, edukasi tentu merupakan hal yang hari ini perlu ditekankan terkait penimbulan sampah. Edukasi dapat berupa penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*) guna mengurangi sampah yang ditimbulkan dan edukasi mengenai penanganan sampah yang salah yang biasa dilakukan oleh masyarakat, seperti membakar sampah, membuangnya dalam saluran drainase maupun sungai. Selama tahun 2019, masyarakat Kota Cimahi masih ada saja yang membakar sampah hingga menyebabkan kebakaran (Lampiran Tabel 46). Selain dibakar, sampah-sampah juga masih ada yang dibuang ke salurah drainase ataupun sungai. Sampah yang tereduksi di sumber juga belum mencapai target yang tercantum dalam Kebijakan dan Strategi (Jakstranas) Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam kebijakan tersebut, target yang harus tercapai adalah 30% sampah tereduksi di sumber, sedangkan Kota Cimahi baru mencapai 16%. Dalam proses ini, kesadaran masyarakat merupakan kunci utama berhasilnya

program-program yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya pengurangan timbulan sampah.

2.4.2.5 Timbulan Sampah Kota Cimahi

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, timbulan sampah Kota Cimahi juga akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk sebanyak 553.755 jiwa, rerata timbulan sampah yang dihasilkan mencapai 1.378,85 m^3/hari. Dikutip dari data DLH Kota Cimahi bahwa kota ini telah menangani 95% sampah yang ditimbulkan, itu berarti sampah yang tertangani sebesar 1.309,91 m^3/hari, sedangkan 5% atau 68,94 m^3/hari masih terabaikan. Bukan jumlah yang sedikit jika setiap harinya terdapat 68,94 m^3 yang dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan dan penanganan yang tepat. Hal tersebut tentu akan mencemari dan merusak lingkungan. Banyak faktor yang turut mempengaruhi bahkan memperburuk hal ini, seperti kepadatan penduduk, tingkat kesadaran masyarakat, taraf ekonomi, dan pola konsumsi. Analisis risiko persampahan yang mempertimbangkan faktor-faktor tersebut telah dilakukan untuk Kota Cimahi dengan mengacu pada Panduan Strategi Sanitasi Kota 2018. Hasil analisis tersebut menunjukkan masih terdapat beberapa kelurahan yang memiliki risiko tinggi dan risiko sangat tinggi, seperti yang dapat dilihat pada penjelasan dan Gambar 2.71 berikut.

- Risiko sangat rendah : Kelurahan Utama, Cibeber, Baros, Cigugur Tengah, Karangmekar, Cimahi, Pasirkaliki, Citeureup, dan Cipageran
- Risiko rendah : Kelurahan Leuwigajah
- Risiko tinggi : Kelurahan Melong dan Cibabat
- Risiko sangat tinggi : Kelurahan Cibeureum, Setiamanah, dan Padasuka

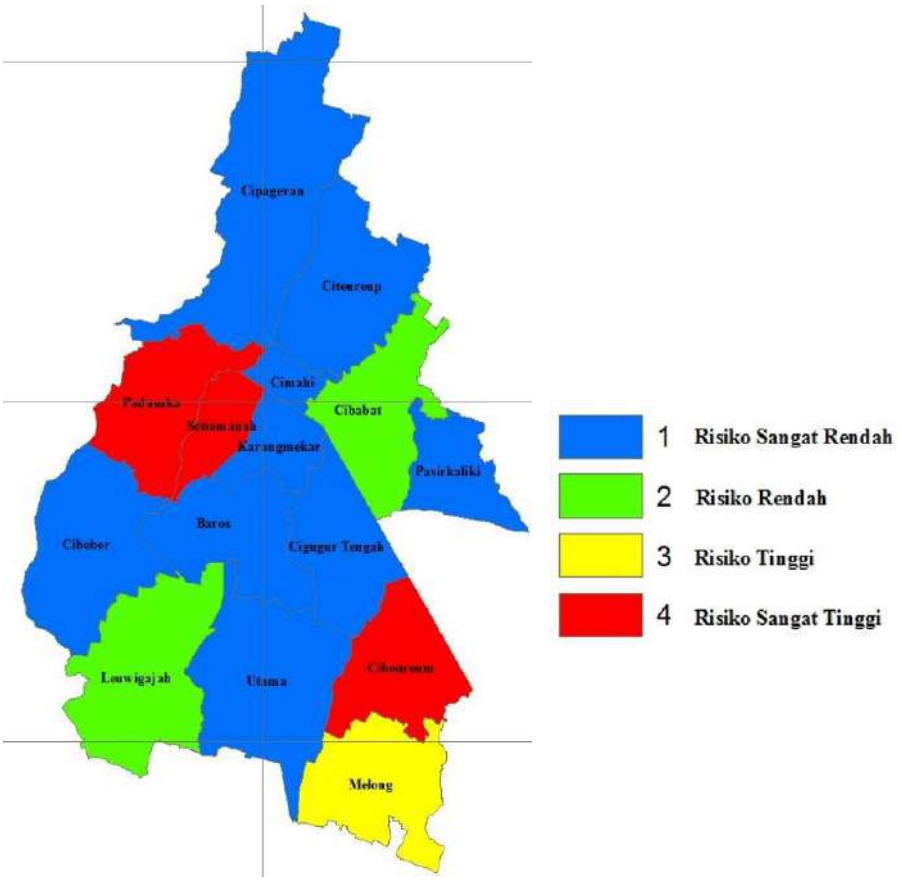

Gambar 2.71 Pemetaan Area Risiko Persampahan Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.4.2.6 Peningkatan *Run Off*

Peningkatan air larian atau *run off* merupakan salah satu parameter yang dipacu oleh berkurangnya lahan resapan air atau lahan saluran drainase. Kedua hal tersebut didorong oleh peningkatan kebutuhan lahan karena perumbuhan penduduk. Selain karena penyempitan lahan, topografi juga mempengaruhi aliran air *run off* ini, mengingat aliran air meningkat seiring bertambahnya kemiringan lahan. Semakin banyak air limpasan ini, risiko banjir juga akan semakin meningkat. Tidak hanya itu, air larian yang mengalir di tanah curam terutama saat intensitas hujan tinggi juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya tanah longsor. Tentu risiko

tersebut dapat diminimalkan jika terdapat akar-akar pohon yang mampu menyerap air hujan tersebut.

2.4.2.7 Risiko Timbulan Air Limbah

Hal lain yang menekan risiko bencana di Kota Cimahi yaituberkaitan dengan timbulan air limbah. Timbulan air limbah ini akan kian meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Jika cakupan pelayanan tidak kunjung maksimal, risiko pencemaran akibat air limbah ini tentu akan selalu ada. Tidak hanya karena cakupan pelayanan saja, kondisi wilayah dan kependudukan yang mencakup hal seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan kemiskinan juga turut mempengaruhi tingkat risiko akibat pengelolaan air limbah ini. Risiko pencemaran akibat air limbah ini terutama terhadap kualitas air perumkaan dan air tanah tentu akan mengurangi daya dukung air tersebut sebagai sumber air bersih yang digunakan oleh warga. Berdasarkan hasil analisis yang mengacu pada Pedoman Strategi Sanitasi Kota 2018, berikut pemetaan pada Gambar 2.72 yang menunjukkan tingkat risiko yang dimiliki setiap kelurahan di Kota Cimahi.

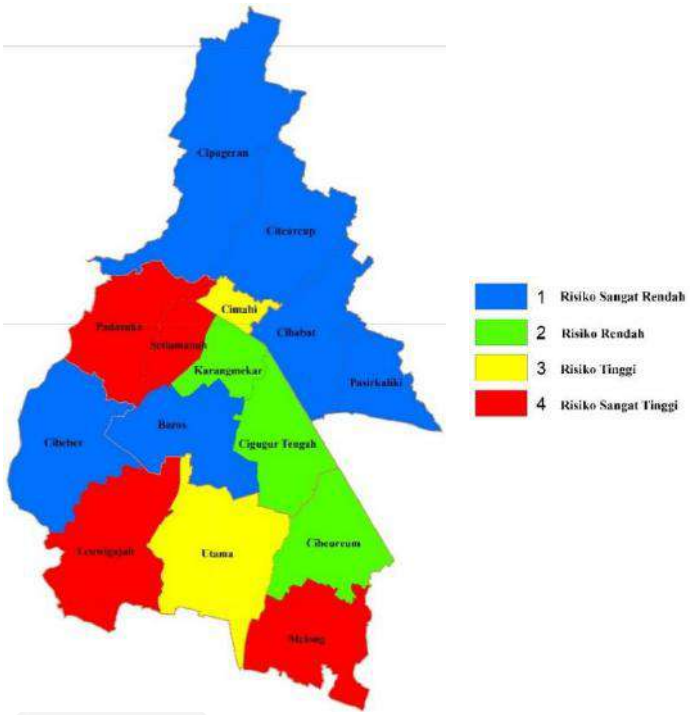

Gambar 2.72 Pemetaan Area Risiko Air Limbah Kota Cimahi
(Sumber: DPKP Kota Cimahi dan Hasil Analisis, 2019)

2.4.3 State

2.4.3.1 Banjir

Status bencana banjir di Kota Cimahi merupakan suatu data yang menunjukkan frekuensi dan tingkat keparahan dari bencana tersebut. Selama tahun 2019, banjir beberapa kali terjadi di kota ini. Rata-rata penyebab terjadinya banjir adalah tersumbatnya atau kurangnya kemampuan saluran drainase untuk mengalirkan air hujan. Hal tersebut sangat erat dengan kebiasaan masyarakat akan membuang sampah ke saluran drainase atau sungai. Kesadaran masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah di sumber juga masih belum terealisasi sesuai dengan rencana pemerintah. Bencana banjir ini juga kerap terjadi setelah hujan turun dengan intensitas yang tinggi. Pada tahun tersebut, kelurahan yang sempat merasakan bencana ini yaitu Kelurahan Cipageran, Padasuka, Setiamanah, Cibeber, Cigugur Tengah, Leuwigajah, Utama, dan Melong. Dengan frekuensi banjir dan besaran dampak yang berbeda, berikut pemetaan yang merepresentasikan kejadian banjir di Kota Cimahi selama tahun 2019 (Gambar 2.73). Warna tanda yang lebih tua menandakan dampak yang ditimbulkan lebih besar. Sedangkan semakin banyak tanda menunjukkan frekuensi terjadinya banjir di wilayah/kelurahan tersebut. Penjelasan lebih detail untuk masing-masing kejadian banjir tersebut dapat dilihat pada Tabel 44 dalam lampiran.

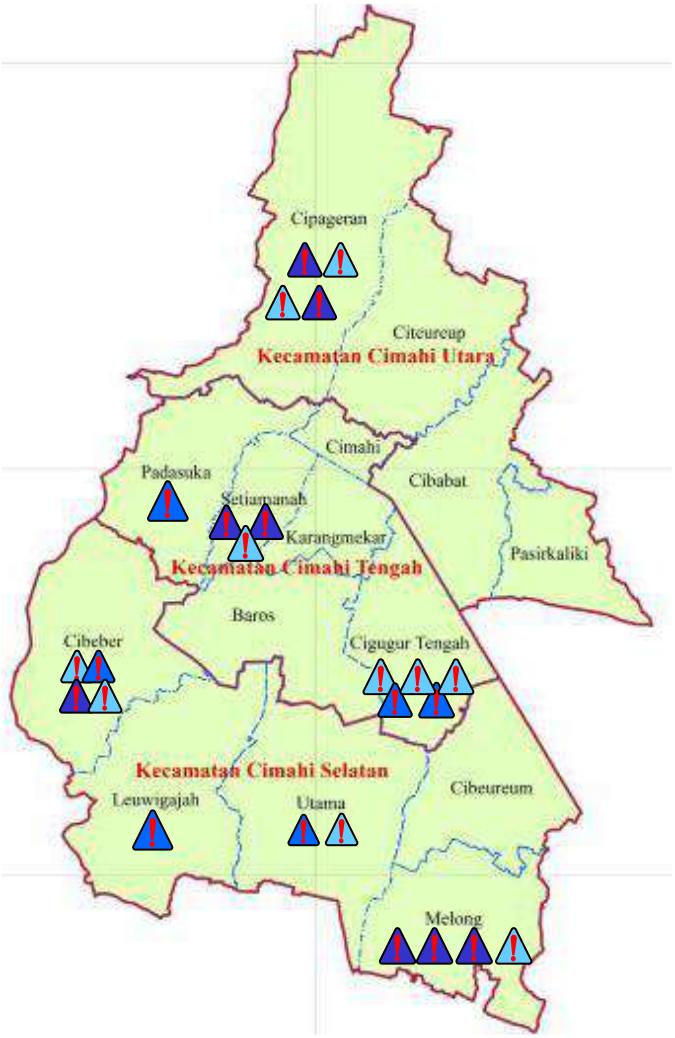

Gambar 2.73 Pemetaan Kejadian Banjir Tahun 2019

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

2.4.3.2 Kekeringan

Risiko bencana selanjutnya yaitu kekeringan. Dengan segala karakteristik daerah, pelayanan air bersih, penggunaan air tanah maupun air permukaan oleh warga, tidak menutup kemungkinan kota ini juga mengalami kekeringan. Kekeringan tersebut dapat terjadi akibat berkurangnya pasokan debit air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Berkurangnya kuantitas tersebut dapat disebabkan oleh kebocoran pipa yang tidak terdeteksi sehingga sulit dikendalikan. Kekeringan juga dapat menimpa masyarakat pengguna air tanah. Kejadian tersebut tentu semakin berpotensi jika penggunaan air tanah tidak dikendalikan dan diawasi,

terutama penggunaan air tanah oleh industri dalam jumlah besar. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) memprediksi Kota Cimahi akan mengalami krisis air pada tahun 2030. Analisis tersebut didukung oleh data penurunan muka air tanah di Kota Cimahi mencapai 1-20 cm setiap tahunnya. Wilayah yang termasuk ke dalam zona merah yaitu Kelurahan Leuwigajah dan kawasan industri di Kota Cimahi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tahun 2008 lalu, dari potensi imbuhan air tanah di Cekungan Bandung sebesar 117 m^3/tahun, 55 persen dari jumlah tersebut sudah dipergunakan. Dari 55% potensi imbuhan Cekungan Bandung, sebagian besar diambil oleh industri.

Selain itu, kekeringan atau keterbatasan pasokan air bersih juga dapat terjadi jika sumber air yang biasa digunakan oleh warga memiliki kualitas yang buruk sehingga tidak layak untuk dikonsumsi untuk kegiatan sehari-hari. Masalah-masalah tersebutlah yang menjadi penyebab utama terjadinya kekeringan. Selama tahun 2019, kekeringan terjadi di beberapa titik di Kota Cimahi (Gambar 2.74) dengan frekuensi dan tingkat keparahan dampak yang berbeda (penjelasan detail mengenai kejadian dapat dilihat pada Tabel 45 dalam lampiran). Bencana kekeringan yang terjadi di kota ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan air dari PDAM dan buruknya kualitas sumber air (air permukaan) mengingat kelurahan-kelurahan di Kota Cimahi masih memiliki risiko akibat pengelolaan air limbah.

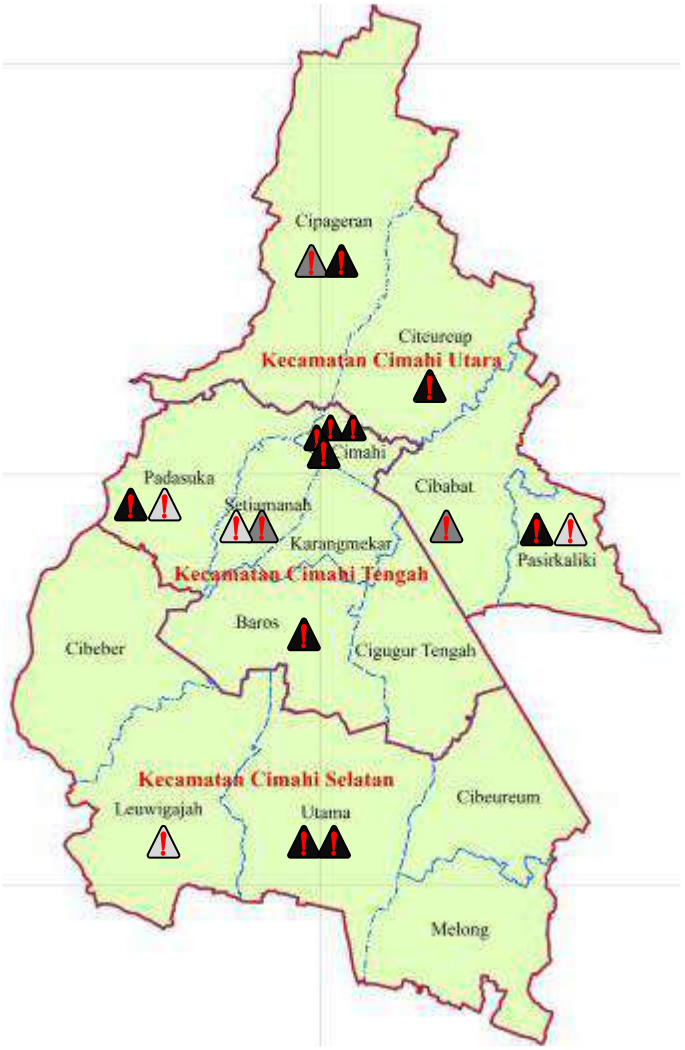

Gambar 2.74 Pemetaan Kejadian Kekeringan Tahun 2019

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

2.4.3.3 Kebakaran

Selama tahun 2019, kebakaran sering terjadi di Kota Cimahi. Jika dilihat pada Gambar 2.77 kebakaran paling banyak terjadi di Kelurahan Cipageran, Cibeber, dan Leuwigajah dengan sebagian besar dampak merupakan dampak berat (berdasarkan kerugian materi). Penyebab kebakaran-kebakaran tersebut didominasi oleh pembakaran sampah dan korslet listrik. Jika dilihat pada peta penggunaan lahan, ketiga kelurahan tersebut banyak terdapat lahan hijau seperti kebun, rerumputan, atau ladang. Hal ini meningkatkan potensi penyebaran api. Tidak hanya lahan hijau yang berpotensi menyebarkan api, tetapi juga wilayah dengan kepadatan rumah

yang tinggi. Semakin dekat jarak antar rumah (kepadatan tinggi), semakin cepat api menyebar dan menimbulkan kerugian lebih banyak. Dari 2 hal penyebab utama kebakaran ini, dapat dilihat bahwa pengetahuan masyarakat mengenai penanganan sampah masih rendah.

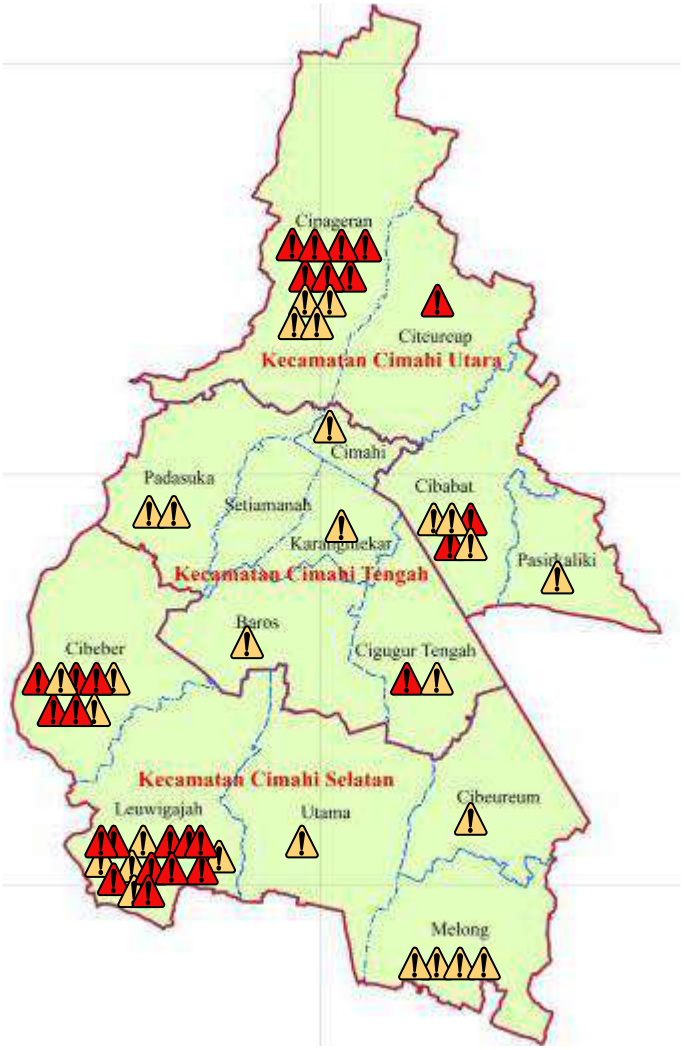

Gambar 2.75 Pemetaan Kejadian Kebakaran Tahun 2019

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

2.4.3.4Tanah Longsor

Kondisi topografi Kota Cimahi yang beragam terutama lahan yang curam berpotensi memicu risiko tanah longsor. Diketahui bahwa kelurahan yang berada di dataran paling tinggi Kota Cimahi dan memiliki kemiringan lereng yang cukup curam adalah Kelurahan Cipageran. Berdasarkan data Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, pada tahun 2019, tanah longsor paling sering terjadi di Kelurahan Cipageran, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.76. Selain Kelurahan Cipageran, tanah longsor juga terjadi di Kelurahan Citeureup, Cimahi, Padasuka, Baros, Cigugur Tengah, Cibeber, Utama, dan Cibereum. Kejadian tanah longsor ini dapat dikendalikan atau diminimalkan jika terdapat pepohonan dengan akar yang cukup mampu menahan erosi tanah. Oleh karena itu, kejadian tanah longsor tidak hanya dipengaruhi oleh topografi saja, tetapi juga penggunaan lahan.

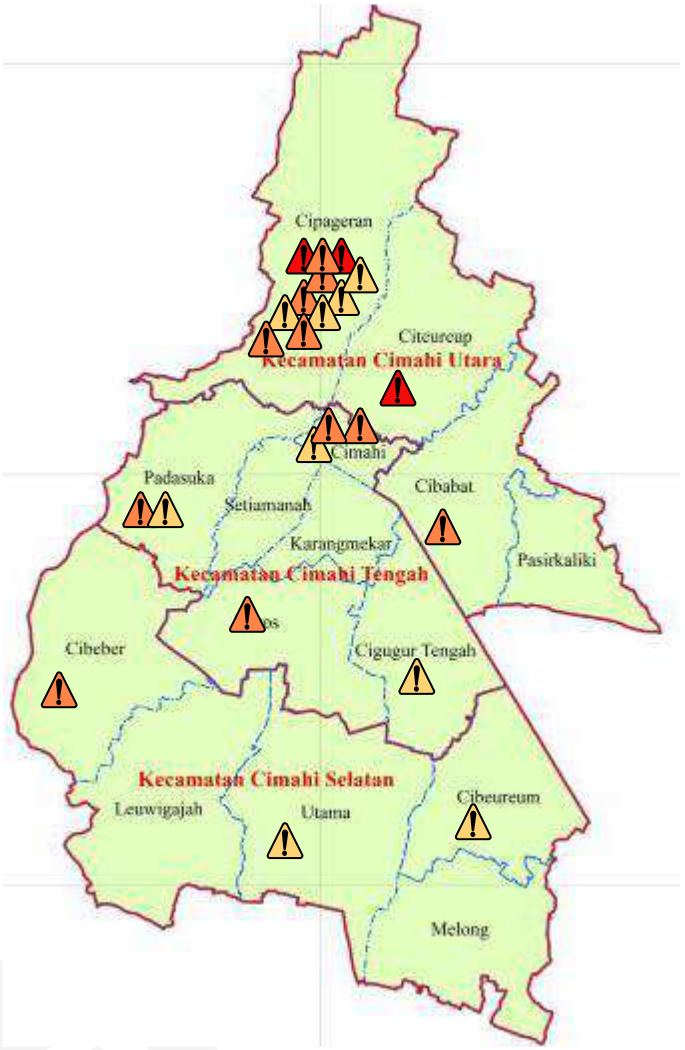

Gambar 2.76 Pemetaan Kejadian Tanah Longsor Tahun 2019

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

2.4.4 Impact

2.4.4.1 Dampak Bencana Banjir

Berdasarkan data BPBD Kota Cimahi tahun 2019, bencana banjir yang melanda kota tersebut selama setahun telah merugikan lebih dari 987 jiwa penduduk. Banjir terjadi di 28 titik lokasi selama periode tahun tersebut. Walaupun tidak menyebabkan korban luka maupun meninggal dunia, bencana banjir yang terjadi ini tentu menimbulkan kerugian secara materi. Penjelasan detail dari dampak tersebut dapat dilihat pada Tabel 44 dalam lampiran.

2.4.4.2 Dampak Bencana Kekeringan

Bencana kekeringan yang terjadi di Kota Cimahi selama tahun 2019 sebagian besar disebabkan oleh berkurangnya pasokan air dari PDAM dan buruknya kualitas sumber air permukaan. Selama 1 tahun tersebut, terjadi kekeringan sebanyak 11 kali dan menyabar di 17 titik lokasi. Besaran dampak yang di ditimbulkan berbeda-beda setiap kejadiannya, namun secara total jumlah penduduk yang terkena dampak kekeringan ini mencapai 7.823 jiwa. Pemetaan lokasi kejadian dapat dilihat pada Gambar 2.76 dengan penjelasan pada Tabel 45 dalam lampiran.

2.4.4.3 Dampak Bencana Kebakaran

Pada tahun 2019, bencana kebakaran kerap terjadi akibat ulah masyarakat yang membakar sampah dan kecerobohan lainnya seperti korslet listrik. Kebakaran terjadi sebanyak 38 kali dan tersebar di 55 titik lokasi di wilayah Kota Cimahi selama tahun 2019. Kejadian ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia saat longsor terjadi di Jalan Mancong, Kelurahan Leuwigajah pada tanggal 22 Oktober 2019. Selain itu, 1 orang mengalami luka bakar di Kelurahan Cibeber pada tanggal 16 November 2019.

Jika diakumulasi, total luas lahan yang terbakar di setiap Kecamatan Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, dan Cimahi Utara masing-masing sebesar 10,09

Ha; 0,04 Ha; dan 1,06 Ha. Ini berarti pada tahun tersebut kebakaran telah merugikan lahan seluas 11,19 Ha. Jika dilihat pada Gambar 2.77, Cimahi Selatan memang sangat sering terjadi kebakaran dengan dampak (jiwa) yang tidak ringan. Penjelasan detail mengenai dampak yang terjadi dari bencana kebakaran ini dapat dilihat pada Tabel 46 dalam lampiran.

2.4.4.4 Dampak Bencana Tanah Longsor

Bencana terakhir yang dibahas dalam analisis isu ini yaitu bencana tanah longsor. Sebelumnya telah disebutkan titik-titik lokasi terjadi tanah longsor selama tahun 2019, Dari total jumlah hari terjadinya longsor (12 hari), terdapat 27 titik lokasi yang menjadi titik bencana longsor. Kejadian tersebut memberi dampak pada 103 jiwa penduduk, bahkan hingga merenggut 2 korban jiwa. Total luas lahan yang terdampak yaitu seluas 930,5 m^2 dengan total kerugian sebesar Rp 329.550.000. Penjelasan lengkap mengenai kejadian longsor ini dapat dilihat pada Tabel 47 dalam lampiran.

2.4.5 Response

2.4.5.1 Response Banjir

Kota Cimahi memiliki target bebas genangan banjir pada tahun 2022. Target tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022. Berikut response yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan banjir:

1. Peraturan

Rencana pengendalian banjir dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032. Berikut penjelasan mengenai pengendalian banjir berdasarkan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032:

Pasal 22

Rencana pengembangan jaringan sumber daya air di Kota Cimahi salah satunya adalah pengembangan sistem pengendalian banjir. Sistem pengendalian banjir yang dimaksud dilakukan melalui:

a. pengaturan dan pembinaan peil banjir untuk menghindari terjadinya banjir – banjir setempat
b. meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan drainase dan sarana pengendalian banjir di Kelurahan Utama, Kelurahan Melong, Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cibeureum.

Pasal 24

Rencana pengembangan sistem drainase di Kota Cimahi meliputi sistem saluran drainase primer, sekunder, dan tersier.

Rencana sistem drainase primer:

a. Pengerukan sungai pada titik-titik yang telah mengalami pendangkalan (sedimentasi) seperti Sungai Cibaligo, Sungai Cisangkan di Bagian Selatan Kota
b. Pelebaran sungai pada titik-titik yang telah mengalami penyempitan diarahkan pada badan-badan sungai Ciputri, Cibeureum dan Cikendal
c. Pelurusan atau penyodetan sungai pada titik-titik yang tidak efisien dalam mengalirkan aliran air sungai terutama sistem sungai-sungai dibagian selatan kota

Rencana sistem drainase sekunder:

a. Penyodetan drainase sekunder yang mengalihkan aliran air hujan yang menggenangi jalan-jalan untuk secepatnya menuju sistem sungai terdekat, hal ini diterapkan dibagian utara kota yang memiliki kemiringan curam
b. Pelebaran drainase sekunder di jalan-jalan utama kota yang dapat mengalihkan aliran air hujan secepatnya menuju sistem sungai, hal ini

diterapkan dibagian utara jalan nasional, dan jalan - jalan utama kota lainnya

c. Rehabilitasi dan pelebaran drainase sekunder yang melewati kantong-kantong perumahan dilengkapi dengan sarana pembagian aliran air untuk memudahkan operasi pengaliran air baik saat banjir di musim hujan maupun kebutuhan penggelontoran kota pada saat kemarau
d. Pembangunan embung terintegrasi dengan drainase sekunder sebagai sarana pengendali banjir maupun cadangan muka air tanah saat kemarau

Rencana sistem drainase tersier:

a. Pembangunan sumur resapan oleh masyarakat terintegrasi dengan saluran pembuang dari rumah ke drainase tersier lingkungan
b. Pengaturan tertib membangun dan memelihara saluran drainase tersier di lingkungan perumahan agar sistem drainase berfungsi baik secara hirarkis dari drainase tersier di Perumahan ke drainase sekunder dan primer

2. Kegiatan Fisik oleh Instansi

Kegiatan fisik yang dilakukan oleh instansi terkait upaya pengendalian dan pencegahan banjir berupa pembersihan saluran air sungai dan embung yang ditanggungjawabi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tabel 2.16). Selain itu, kegiatan fisik yang dilakukan oleh DLH Kota Cimahi berupa pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan juga mendukung upaya pencegahan banjir akibat sampah (Lampiran Tabel Utama 52).

Tabel 2.16 Kegiatan Fisik Pengendalian Banjir

No	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
1	Pembersihan Saluran Air	Sungai Cimahi & saluran sekundernya	DPKP
2	Pembersihan Saluran Air	Sungai Cilember & saluran sekundernya	DPKP
3	Pembersihan Saluran Air	Sungai Cibeureum & saluran sekundernya	DPKP
4	Pembersihan Saluran Air	Sungai Cisangkan-Cihaur & saluran sekundernya	DPKP
5	Pembersihan Embung	Embung Pemkot	DPKP
6	Pembersihan Embung	Embung Cibabat	DPKP
7	Pembersihan Embung	Embung Setiamanah	DPKP
8	Pembersihan Embung	Embung Leuwigajah 1	DPKP
9	Pembersihan Embung	Embung Leuwigajah 2	DPKP
10	Pembersihan Embung	Embung Melong	DPKP

(Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2019)

3. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan

Salah satu misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Adapun salah tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan kualitas permukiman dengan sasaran meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan.

Saat ini, 95% dari total sampah yang ditimbulkan telah tertangani oleh DKP Kota Cimahi. Berdasarkan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, target capaian pelayanan pengelolaan persampahan pada tahun 2022 adalah 100%. Target tersebut merupakan sebuah perwujudan keseriusan Pemerintah Kota Cimahi dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan

persampahan. Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan menjadi response Pemerintah Kota Cimahi untuk mencegah sampah yang tidak tertangani dibuang secara sembarangan. Bila seluruh timbulan sampah dapat tertangani, maka risiko terjadinya bencana banjir akibat penyumbatan saluran drainase dapat berkurang.

4. Penanggulangan Saat Banjir Terjadi

Upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan tingkat risiko bencana banjir tidak cukup hanya meliputi kegiatan-kegiatan *preventive* atau pencegahan. Kegiatan penanggulangan pada saat banjir terjadi jelas sangat dibutuhkan untuk mencegah bertambahnya risiko/dampak. Selama terjadi banjir beberapa kali di tahun 2019, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi yaitu:

- Melakukan *assessment* atau penilaian cepat ke lokasi kejadian
- Melakukan koordinasi antara BPBD Kota Cimahi dengan kepala warga
- Melakukan koordinasi antara BPBD dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk menutup jalan
- Melakukan koordinasi antara BPBD dengan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk pengedotan air genangan/air banjir
- Memberi bantuan logistik kepada warga yang terkena dampak
- Memantau tinggi muka air banjir
- Melakukan kerja sama dengan warga setempat seperti halnya pembuatan tanggul sementara

2.4.5.2 Response Kekeringan

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kekeringan yang terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan melakukan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) serta Pemadam Kebakaran untuk mendistribusikan

air bersih kepada warga yang terkena dampak. Banyaknya air yang didistribusikan bergantung pada jumlah warga di setiap lokasi kejadian.

Selain kegiatan penanggulangan pada saat kejadian, kegiatan preventif juga harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menghindari berulangnya bencana kekeringan ini. Karena kekeringan yang terjadi di Kota Cimahi disebabkan oleh pasokan air PDAM, maka langkah pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau aliran distribusi air bersih, khususnya terkait kebocoran pipa. Sebagai contoh, perencanaan yang dapat diterapkan dalam upaya ini yaitu merencanakan *District Meter Area* (DMA) sebagai monitor kondisi aliran air, baik kuantitas (debit) maupun tekanannya. Jika menyinggung kekeringan akibat buruknya kualitas sumber air, maka upaya yang dapat dilakukan adalah pengawasan pembuangan air limbah, baik domestik maupun non domestik. Hal tersebut juga sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sumber air permukaan atau air tanah memiliki kualitas yang layak untuk digunakan/dikonsumsi. Sedangkan jika kekeringan terjadi karena air tanah sulit didapati, maka upaya yang perlu dilakukan yaitu menghentikan atau mengawasi oknum yang mengeksploitasi air tanah. Sehingga diharapkan muka air tanah di Kota Cimahi tidak terus menurun setiap waktunya.

2.4.5.3 Response Kebakaran

Upaya penanggulangan bencana kebakaran sudah pasti memerlukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar sebagai unit yang bertanggungjawab untuk menangani kebakaran di Kota Cimahi ini. Saat ini jumlah pemadam kebakaran sebesar 54 orang dengan rincian 45 orang pada bidang pencegahan dan 9 orang pada bidang penanggulangan dengan mobil pancar sebanyak 8 unit. Namun jika melihat penyebab kebakaran yang didominasi oleh kecerobohan masyarakat dalam membakar sampah, maka upaya yang perlu dilakukan yaitu mengedukasi masyarakat terkait penangan sampah di sumber yang tepat.

2.4.5.4 Response Tanah Longsor

Berdasarkan analisis sebelumnya yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya tanah longsor di Kota Cimahi adalah perubahan lahan, maka upaya untuk mengurangi risiko bencana ini dengan mengoptimalisasi penggunaan lahan seperti yang direncanakan dalam RTRW tahun 2012-2032. Hal ini berkaitan dengan keberadaan pohon yang cukup sebagai penangkal erosi tanah terutama saat intensitas hujan tinggi. Maka upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya ialah melakukan penghijauan. Berikut adalah data realisasi penghijauan dan jumlah pohon yang telah ditanam hingga tahun 2019 (Tabel 2.17). Selain itu, penetapan lokasi-lokasi untuk taman lingkungan di Kota Cimahi juga merupakan upaya yang dapat menekan risiko terjadinya tanah longsor.

Tabel 2.17 Realisasi Penghijauan hingga Tahun 2019

No	Kecamatan	Penghijauan	
		Luas Realisasi (Ha)	Jumlah Pohon (batang) Realisasi
1	Cimahi Utara	117,67	1.681
2	Cimahi Tengah	36,96	528
3	Cimahi Selatan	55,44	792

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota cimahi, 2019)

2.5 Perkotaan (Persampahan)

Definisi sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah selalu dihasilkan setiap harinya. Semakin banyak manusia dan proses alam yang terjadi, kemungkinan besar sampah yang ditimbulkan juga meningkat. Permasalahan sampah masih tidak kunjung selesai, sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya, menjadi polusi air karena penanganan air lindinya *(leachate)* kurang baik sehingga meresap ke dalam tanah pada berbagai tempat yang tidak seharusnya, menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan serta menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

Dampak yang ditimbulkan oleh sampah menandakan pentingnya pengelolaan sampah. Pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan merupakan bagian dari pengelolaan sampah.

2.5.1 Driving Force

2.5.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor meningkatnya timbulan sampah. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula meningkatnya timbulan sampah karena timbulan sampah kota merupakan hasil perkalian dari timbulan sampah perorang dikalikan dengan jumlah penduduk di kota tersebut. Data pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18 Pertumbuhan Penduduk Kota Cimahi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Pendududuk (%)
1	Kecamatan Cimahi Selatan	232.555	2,36
2	Kecamatan Cimahi Tengah	160.134	1,94
3	Kecamatan Cimahi Utara	161.066	2,72
	Total	**553.755**	

(Sumber: Disdukcapil Kota Cimahi, 2019)

Dari Tabel 2.18 didapatkan jumlah penduduk total Kota Ciimahi Tahun 2019 sebanyak 553.755 Jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat 2,32% dari tahun sebelumnya, dengan meningkatnya jumlah penduduk maka akan mengakibatan meningkat pula kebutuhan. Meningkatnya kebutuhan bahan akan menyebabkan meningkat pula timbulan sampah hal tersebut dikarenakan setiap kebutuhan pasti menghasilkan sampah.

Pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan peningkatan kepadatan penduduk, trend kepadatan penduduk dapat dilihat pada Gambar 2.3.

2.5.1.2 Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Tingkat ekonomi penduduk suatu kota juga termasuk dalam faktor meningkatnya timbulan sampah. Tingkat ekonomi dapat digambarkan dengan kategori pemukiman. Berikut adalah timbulan sampah perorangnya menurut jenis pemukiman, dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 Timbulan Sampah per Orang Kota Cimahi

No	Jenis Pemukiman	Timbulan Sampah		Berat Jenis Sampah (Kg/m3)
		kg/org/hari	Liter/org/hari	
1	*Middle up*	0.43	2.88	150.48
2	*Middle*	0.44	2.009	211.44
3	*Middle low*	0.46	2.51	224.78

(Sumber: Penyusunan Kajian Potensi Timulan Sampah Kota Cimahi, 2015)

Berdasarkan Tabel 2.19, jenis pemukiman menengah kebawah timbulan sampah perorangnya lebih tinggi dibandingkan denha masyarakat menengah dan menengah keatas. Selain itu juga tingkat ekonomi juga dapat mempenaruhi cara mengelola sampah, seperti masyarakat menengah kebawah tidak memiliki sistem pewadahan yang memadai atau tidak mampunya dalam membayar retribusi sampah untuk sistem pengumpulan ataupun pengangkutan. Berikut adalah gambaran masyarakat menengah kebawah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20 Jumlah Rumah Tangga Miskin

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Jumlah Rumah Tangga Miskin (KK)	Prosentase Rumah Tangga Miskin
1	Kecamatan Cimahi Selatan	66720	8678	13.01%
2	Kecamatan Cimahi Tengah	46484	2590	5.57%
3	Kecamatan Cimahi Utara	45386	4371	9.63%
	Jumlah	158590	15639	28.21%

(Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi, 2015)

2.5.1.3 Tidak Memiliki TPPAS Mandiri

Permasalahan terbesar Kota Cimahi dalam penanganan sampah adalah belum adanya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) mandiri di Kota Cimahi. Sulitnya Kota Cimahi dalam pencarian lahan menjadi penyebab utama dalam keterbatasan Kota Cimahi dalam menangani sampahnya. Saat ini Kota Cimahi masih menggunakan TPA Regional Sarimukti sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah. Jenis tempat pembuangan akhir (TPA) yang digunakan oleh Kota Cimahi dijelaskan pada Gambar 2.77 berikut.

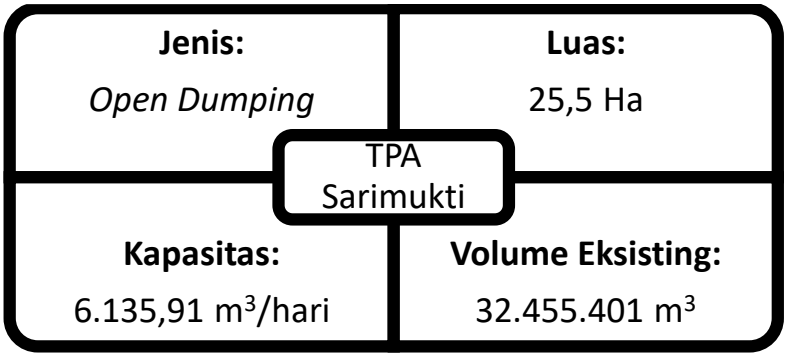

Gambar 2.77 TPA yang Digunakan Kota Cimahi
(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2020)

2.5.1.4 Ketersediaan TPS Terbatas

Sistem pengumpulan sampah merupakan syarat pertama tercapainya sanitasi lingkungan dari gangguan akibat sampah yang tidak tertangani. Dengan demikian lingkungan menjadi bersih tidak terdapat sampah yang tercecer, dibuang ke saluran, ke sungai ke tempat-tempat ilegal lainnya.

Keberadaan TPS di Kota Cimahi dinilai belum memadai baik dari segi jumlah maupun kapasitas, hal ini terlihat dari kondisi TPS yang tidak pernah kosong dari sampah. Setiap kelurahan di Kota Cimahi memiliki 2-3 unit TPS baik berupa TPS Kontainer maupun TPS Pasangan Bata untuk melayani 4.000-19.000 KK/kelurahan. Umumnya pengangkutan sampah di tiap TPS dilakukan sebanyak 2 rit/hari namun tumpukan sampah di TPS masih belum

tuntas. Agar permasalahan sarana TPS dapat teridentifikasi secara kuantitaif, maka dilakukan perhitungan kecukupan jumlah kapasitas dan TPS saat ini.

2.5.1.5 Perwal Jakstrada

Jakstrada yang dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 hingga 2025 memuat:

a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui:

a. Pemilahan
b. Pengumpulan
c. Pengangkutan
d. Pengolahan
e. Pemrosesan akhir

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi:

a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025

penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

2.5.1.6 RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

Peningkatan ekonomi menjadi salah satu misi yang tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Misi tersebut dapat memberikan dampak pada isu persampahan. Terdapat keterkaitan antara tingkat ekonomi dengan timbulan sampah. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat di suatu daerah, maka daya beli juga meningkat. Peningkatan daya beli tersebut berdampak pada banyaknya produk yang dibeli sehingga pada akhirnya meningkatkan timbulan sampah. Semakin banyaknya sampah yang dihasilkan menyebabkan kebutuhan sarana dan prasarana dan biaya operasional pengelolaan persampahan meningkat.

2.5.2 Pressure

2.5.2.1 Perubahan Pola Konsumsi Masyarakat

Pertumbuhan penduduk akan sebanding dengan meningkatnya timbulan sampah suatu kota, selain itu pola konsumsi masyarakat akan menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Seiring dengan semakin beragamnya karakteristik maka pengelolaan disumber semakin sulit seperti semakin sulitnya dilakukan pemisahan sampah. Hal tersebut akan mengakibatkan sampah yang terkumpul ke TPS dan terangkut ke TPA semakin meningkat.

Data pada dokumen Penyusunan Kajian Potensi Timbulan Sampah Kota Cimahi Tahun 2015 menunjukkan perbandingan komposisi sampah organik dan anorganik di Kota Cimahi tidak berbeda jauh. Komposisi sampah organik sebesar 50,6%, sedangkan komposisi sampah anorganik sebesar 49,4%. Komposis sampah Kota Cimahi dapat dilihat Gambar 2.78.

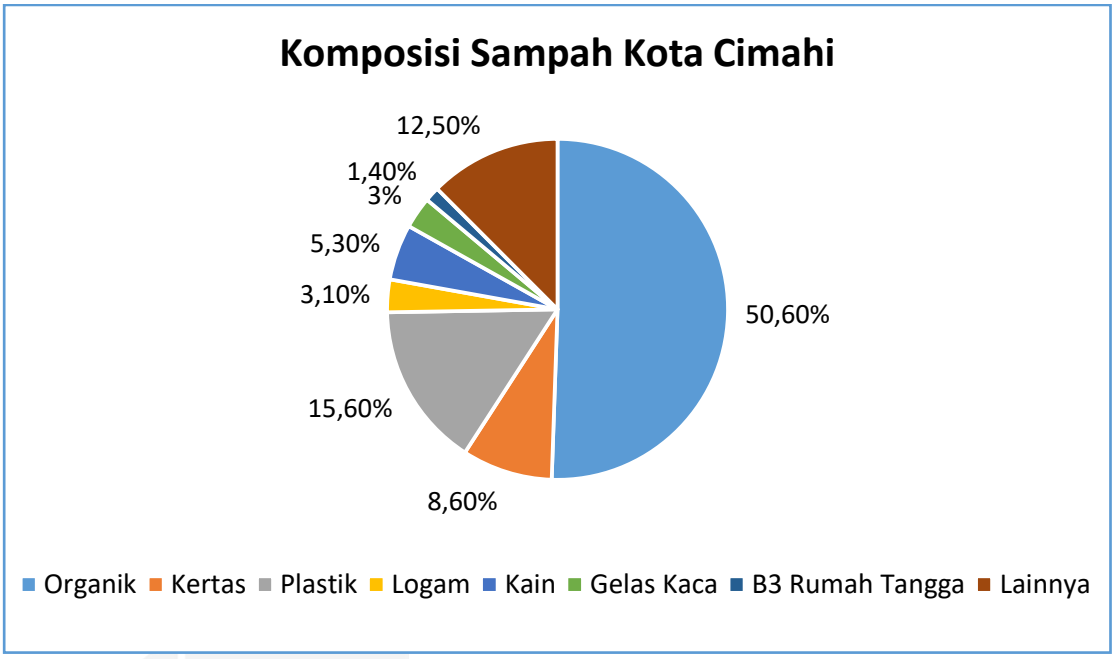

Gambar 2.78 Komposisi Sampah Kota Cimahi

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2020)

2.5.2.2 Pola Kumpul-Angkut-Buang

Pada sistem pengelolaan sampah Kota Cimahi sudah 95% timbulan sampah sudah tertangani (teralayani) dan 5% timbulan belum terlayani dengan jumlah timbulan sebesar 13.432 ton/hari. Pada timbulan sampah yang terlayani sebanyak 10,96% terekduksi (dilakukannya pengurangan) di sumber dan sebanyak 84,04% terangkut ke TPA. Masih besarnya sampah yang terangkut ke TPA masih menjadi masalah bagi pengelolaan Kota Cimahi. Tingginya sampah yang dikelola dengan pola lama menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah menjadi besar karena Kota Cimahi tidak memiliki TPPAS mandiri.

2.5.2.3 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Terdapat beberapa hal yang belum sesuai apabila ditinjau dari peraturan induknya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2017-2037, ketidaksesuaian tersebut diantaranya:

a. Belum mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah.
b. Belum mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pengurangan sampah melalui penggunaan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang mudah terurai, mengumpulkan dan menyerahkan kembali kemasan yang sudah digunakan.

c. Pengaturan tentang penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah diatur lebih lanjut dalam Perda berupa pengaturan teknis pengelolaan sampah.
d. Pengaturan ketentuan pengelolaan sampah dalam Perda dengan materi yang sangat teknis dan rinci sehingga menjadikan ketentuan yang diatur bersifat kaku sehingga sulit untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti dalam ketentuan penggunaan teknologi pengolahan sampah yang sangat cepat perubahannya.
e. Perda Pengelolaan Sampah dibentuk sebelum keluarnya PP Nomor 81 Tahun 2012, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan pelaksanaan pengelolaan sampah dalam PP tersebut.

Selain Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah terdapat juga peraturan terkait pelayanan sampah. Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur ketentuan tentang tarif retribusi pelayanan pengelolaan sampah. Pengaturan tentang wajib bayar retribusi telah meliputi seluruh wajib bayar, meliputi rumah tangga, pedagang pasar, toko, industri, hotel/penginapan, restoran/rumah makan, rumah sakit dan puskemas, tempat hiburan, jasa perkantoran, stasiun, apotik, perusahaan/gudang, pengangkutan langsung ke TPA.

Permasalahan yang berkaitan dengan Perda yang mengatur retribusi persampahan adalah mengenai besaran tarif yang belum sesuai dengan biaya pelayanan. Walaupun besaran tarif belum sesuai dengan besaran biaya pelayanan, terdapat kesulitan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan terhadap seluruh wajib bayar disebabkan oleh tingkat kemauan membayar *(willingness to pay)* yang masih rendah.

2.5.2.4 Kelembagaan

Lembaga yang berwenang untuk mengelola sampah di Kota Cimahi adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2017-2037, permasalahan dalam kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan sampah dijalankan hanya oleh satu bidang dalam sebuah Dinas, tanpa adanya pemisahan peran regulator dan operator. Walau Kota Cimahi merupakan kota dengan beban pengelolaan sampah yang relatif belum terlalu tinggi, namun keberadaan fungsi regulator dan adanya unit operator sangat diperlukan, mengingat sistem pengelolaan sampah selayaknya terus didorong agar mampu menjalankan amanat UU No 18 tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah tidak hanya penanganan, tetapi juga pengurangan sampah.
b. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM pengelola persampahan.
c. Pembagian kinerja dalam struktur organisasi di dalam bidang kebersihan masih belum jelas dan lengkap. Sebagaimana lingkup pengelolaan sampah adalah penanganan dan pengurangan, maka didalam pengaturan kelembagaan, perlu adanya seksi yang menangani kedua urusan tersebut. Urusan penanganan sampah, membutuhkan pengurusan menyeluruh dari hulu ke hilir. Demikian dengan urusan pengurangan, perlu adanya pengaturan dan pengurusannya. Sebagai contoh dalam hal penerapan kebijakan pengurangan sampah kantong plastik yang saat ini sudah mulai diberlakukan di Kota Cimahi.
d. Permasalahan lain kelembagaan ditemukan dalam operasional pengumpulan sampah. Saat ini berdasarkan Perda Pengelolaan Sampah Kota Cimahi, dan sudah terwujud sejak lama, bahwa pengumpulan sampah dari sumber ke TPS diserahkan kepada lembaga RT/RW. Berdasarkan pengamatan, saat ini belum semua RT/RW memiliki

petugas pengelola sampah. Untuk mencapai target pelayanan 100% pada tahun 2020, sebagaimana dicanangkan secara nasional, hal ini perlu mendapat perhatian besar. Keberadaan dan beroperasinya sistem pelayanan yang baik di sumber sampah permukiman, diiringi dengan penegakan aturan yang tegas, akan menjamin tidak adanya sampah dibuang ke sungai atau dibuang sembarangan. Hal ini memerlukan pengaturan kelembagaan pelaksana operasi pengumpulan sampah di sumber, terutama di kawasan permukiman.

e. Dalam misi lembaga DKP Kota Cimahi, dicanangkan bahwa dalam menjalankan tugasnya DKP melakukan pendekatan peran serta masyarakat untuk mendorong efektifitas kinerja. Hal ini sudah terlihat dengan banyaknya kegiatan dan program yang melibatkan peran serta masyarakat di Kota Cimahi. Namun demikian, urusan peningkatan peran serta masyarakat ini belum masuk dalam struktur organisasi DKP.
f. Dalam menjalankan operasional pengolahan sampah, saat ini DKP menggunakan tenaga harian lepas (THL). Pendekatan ini cukup baik dari sisi efektifitas tugas yang dijalankan oleh para THL tersebut. Namun pendekatan ini tidak menjamin adanya keberlanjutan pengoperasian dari tahun ke tahun anggaran. Kedepan, pengolahan sampah di Kota Cimahi akan menghadapi tantangan besar, karena itu perlu adanya sebuah unit yang mengatur dan menjalankan tugas pengolahan sampah ini.

2.5.2.5 Keuangan

Permasalahan keuangan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah adanya ketidak seimbangan antara pertumbuhan kebutuhan pembiayaan pengelolaan sampah dengan kemampuan dalam penyediaan anggaran untuk pendanaan pengelolaan sampah. Jumlah volume beban pengelolaan sampah terus bertambah sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas perekonomian, sedangkan penyediaan anggaran biaya pengelolaan sampah baik untuk kebutuhan biaya

operasional, pemeliharaan dan penggantian sarana yang sudah habis umur teknisnya tidak mengalami kenaikan

Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2017-2037, anggaran biaya operasional dan pemeliharaan penanganan sampah tahun 2016 sebesar Rp. 14.802.385.197. Jumlah beban sampah yang harus dikelola rata-rata dalam setiap hari sebanyak 215 ton atau 106.475 ton/tahun. Berdasarkan kondisi ini maka anggaran biaya yang disediakan untuk penanganan setiap ton sampah sebesar Rp. 188.625, atau sebesar Rp. 565.876 per rit truk dengan kapasitas rata-rata 3 ton/rit truk. Ketersediaan anggaran biaya sebesar Rp. 565.876 per rit truk hanya cukup untuk biaya pengangkutan saja sedangkan masih dibutuhkan biaya untuk pengumpulan, pengolahan TPS 3R dan biaya TPA.

2.5.2.6 Peran Serta Masyarakat

Untuk mencapai pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien, peran serta masyarakat perlu di tingkatkan terus menerus, tidak ada kata berhenti dalam menumbuh kembangkan peran masyrakat ini. Dari peran pasif, yaitu masyarakat hanya mau membayar retribusi, hingga menjadi peran aktif yaitu mulai mau berbuat nyata misalnya mau memilah, dan mengolah sampah dan perilaku aktif yang lebih jauh adalah mau merobah perilaku hidup yang lebih ramah lingkungan dengan merobah pola konsumsi dan penggunaan kemasan.

Stakeholders dalam pembangunan secara lengkap disebutkan sebagai politikus dan pemerintah, planner, pengusaha, penduduk/masyarakat, pers, LSM, dan informal leader. Sebagaimana pada proses pembangunan lainnya maka stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sampah adalah Pemerintah, Masyarakat, Swasta, Para ahli dan akademisi (perencana profesional), serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

2.5.2.7 Teknis Operasional

Teknis operasional pengelolaan sampah terdiri dari pemilahan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Kota Cimahi tahun 2017-2037, berikut penjelasan permasalahan masing-masing teknis operasional:

a. Pemilahan/Pewadahan

   Jika dilihat berdasarkan jenis, keberadaan wadah sampah dan penerapan kegiatan pemilahan di Kota Cimahi, beberapa permasalahan dalam pemilahan/pewadahan sampah yang ditemui adalah sebagai berikut:

   - Kapasitas wadah sampah yang disediakan di beberapa lokasi tidak memadai akibatnya sampah berserakan di sekitar area wadah sampah
   - Penerapan kegiatan pemilahan pada setiap wadah terpilah masih terbatas

b. Pengumpulan

   Berdasarkan sistem pengumpulan yang telah berjalan di Kota Cimahi, tingkat pengumpulan kawasan permukiman dapat dinilai kecukupannya berdasarkan kertersediaan kendaraan pengumpul yang dimiliki oleh masing-masing kelurahan.

   Berdasarkan informasi DKP Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi telah memberikan bantuan sarana pengumpulan sampah yang diberikan kepada DKP Kota Cimahi. Selajutnya bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat melalui Kelurahan se-Kota Cimahi.

   Pelayanan pengumpulan sampah permukiman masih terbilang rendah dikarenakan jumlah armada pengumpul masih terbatas, dimana 1 (satu) kelurahan memiliki 16 unit armada pengumpul berupa motor

sampah dan gerobak untuk melayani 200-1.200 KK/kelurahan. Umumnya permukiman yang belum mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah dari RT/RW setempat menangani sampahnya dengan cara dibakar dan ditimbun di dalam tanah.

c. Pemindahan

Sarana pemindahan sampah di Kota Cimahi dibedakan menjadi dua jenis TPS yaitu kontainer dan pasangan bata. TPS kontainer dan pasangan bata secara berurutan memiliki kapasitas 6 m^3 dan 2,8-3 m^3. Tercatat terdapat 38 unit sarana pemindahan/TPS di Kota Cimahi yang terdiri atas 19 unit TPS kontainer, 15 unit TPS pasangan bata, dan 4 lokasi titik kumpul yang tersebar di seluruh wilayah administrasi Kota Cimahi. Dalam hal ini sarana pemindahan resmi yang diakui oleh DKP Kota Cimahi terdapat 34 unit TPS.

Keberadaan TPS di Kota Cimahi dinilai belum memadai baik dari segi jumlah maupun kapasitas, hal ini terlihat dari kondisi TPS yang tidak pernah kosong dari sampah. Berdasarkan hasil survey konsultan, setiap kelurahan di Kota Cimahi memiliki 2-3 unit TPS baik berupa TPS Kontainer maupun TPS Pasangan Bata untuk melayani 4.000-19.000 KK/kelurahan. Umumnya pengangkutan sampah di tiap TPS dilakukan sebanyak 2 rit/hari namun tumpukan sampah di TPS masih belum tuntas.

d. Pengangkutan

Pada tahun 2016, beban sampah yang mampu diangkut adalah sebesar 1,100.40 m^3/hari atau setara dengan 215,2 ton/hari, dengan ritasi pengangkutan yang dilakukan sebanyak 3 rit/unit/hari. Jika dibandingkan terhadap rata-rata sampah terangkut ke TPA Sarimukti bedasarkan data BPSR Jawa Barat Tahun 2016 adalah 215,1 ton/hari, maka angka tersebut telah sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun

pencapaian tersebut masih lebih kecil bila dibandingkan dengan beban sampah kota yang ditimbulkan yaitu sebesar 1.461,46 m^3/hari. Sehingga tingkat kecukupan sarana pengangkutan sampah di Kota Cimahi baru mencapai 74%.

e. Pengolahan

DKP Kota Cimahi, sejak tahun 2005, yaitu sejak longsornya TPA Leuwigajah telah banyak melakukan usaha pengolahan sampah, terutama sampah organik. Banyak metoda pengolahan organik yang di ujicobakan oleh DKP, mulai dari Takakura, Bioreaktor mini dan Pengomposan *Box-methode* dan juga *windrow system*. Dan beberapa tahun terakhir, diujicobakan juga Metoda Pengomposan dengan Reaktor Komposter dari pasangan Bata. Disamping komposter aerobic, DKP juga telah mencoba menerapkan biodegester, namun masih terbatas jumlahnya. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar saat ini tidak beroperasi dengan optimal. Permasalahan utama adalah tidak adanya operator yang menjalankan instalasi tersebut. Selama ini, sebagian besar sarana tersebut dibangun oleh DKP dan diserahkan operasionalisasinya kepada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir ini, DKP menjalankan operasionalisasi instalasi tersebut dengan menugaskan tenaga harian lepas. Ini lebih menjamin beroperasinya instalasi tersebut. Namun perlu ada peningkatan kapasitas dari tenaga harian lepas yang ada dalam hal teknik operasional setiap sarana yang dijalankan di Kota Cimahi.

Di pandang dari sisi operasionalisasi penanganan sampah material daur ulang, Bank Samici dan Bank Sampah lainnya yang berkembang di Kota Cimahi nampak belum mampu mencapai target yang tinggi. Dari 78,73 ton/hari potensi yang ada, baru terambil 0,5 ton/hari (Data Bank Samici, 2015). Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- Sempitnya lahan Bank Sampah, sehingga tidak bisa menampung dalam jumah besar
- Kurangnya peralatan pendukung operasionalisasi rutin Bank Sampah seperti kendaraan penjemputan material daur ulang dari nasabah
- Masih kurangnya jumlah nasabah, sehingga pemasukan masih rendah dan pendapatan belum mampu menutupi seluruh biaya operasional. Saat ini, tenaga kerja Bank Samici masih dibantu oleh DKP
- Sampah material daur ulang yang kurang
- Tidak rutinnya pengangkutan

f. Pemrosesan akhir

Permasalahan terbesar Kota Cimahi dalam penanganan sampah adalah belum adanya Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) mandiri di Kota Cimahi. Sulitnya Kota Cimahi dalam pencarian lahan menjadi penyebab utama dalam keterbatasan Kota Cimahi dalam menangani sampahnya. Saat ini Kota Cimahi masih menggunakan TPA Regional Sarimukti sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah.

2.5.3 State

2.5.3.1 Perkiraan Timbulan Sampah

Jumlah timbulan sampah Kota Cimahi sebesar 268.703 ton/hari, saat ini Kota Cimahi sudah dapat melayani pengelolaan sampah 95% sebesar 255.271 ton/hari. Berdasarkan hasil pengamatan di TPPAS Sarimukti, dihasilkan bahwa proporsi timbulan sampah permukiman Kota Cimahi adalah sebesar 63% dari timbulan sampah kota. Sehingga proporsi timbulan sampah non permukiman hanya 37% nya saja dari total sampah kota. Berikut adalah hasil survey proporsi timbulan sampah Kota Cimahi berdasarkan hasil studi Kajian Pengukuran Potensi Timbulan Sampah dari Kegiatan Non Domestik di Kota Cimahi Tahun 2015.

Berikut adalah data proporsi timbulan sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti, dapat dilihat pada Gambar 2.79.

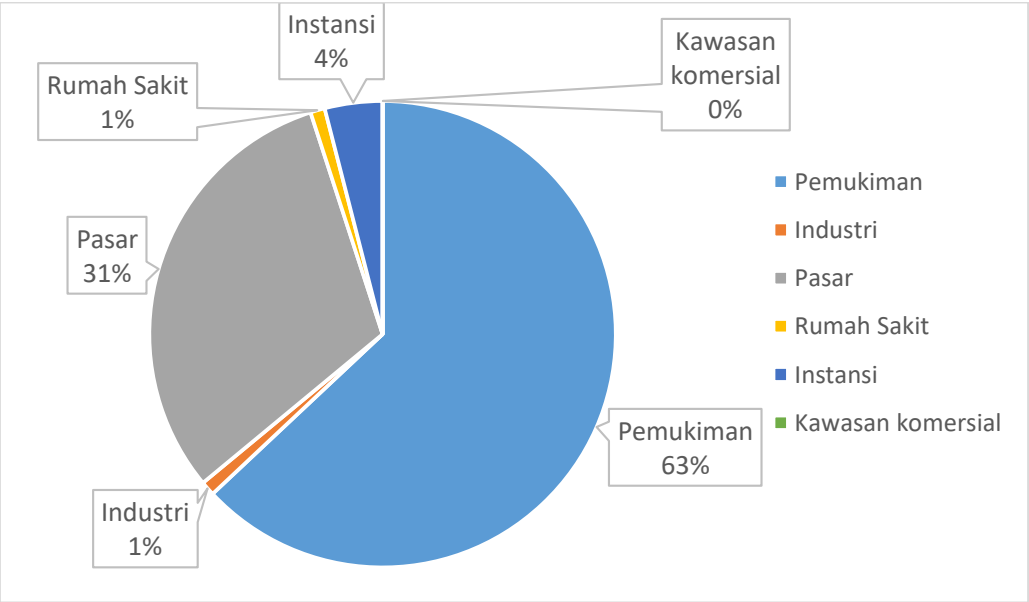

Gambar 2.79 Proporsi Timbulan Sampah yang Terangkut ke TPA Sarimukti

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2019)

Pemukiman menjadi penyumbang terbesar sampah yang dihasilkan di Kota Cimahi. Sampah permukiman memiliki komposisi terbesar dikarenakan pola konsumsi dan pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi yang meningkat setiap tahunnya. Sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak segera terangkut dapat menyebabkan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi kesehatan dan lingkungan.

Berikut adalah peta timbulan sampah Kota Cimahi, dapat dilihat pada Gambar 2.80.

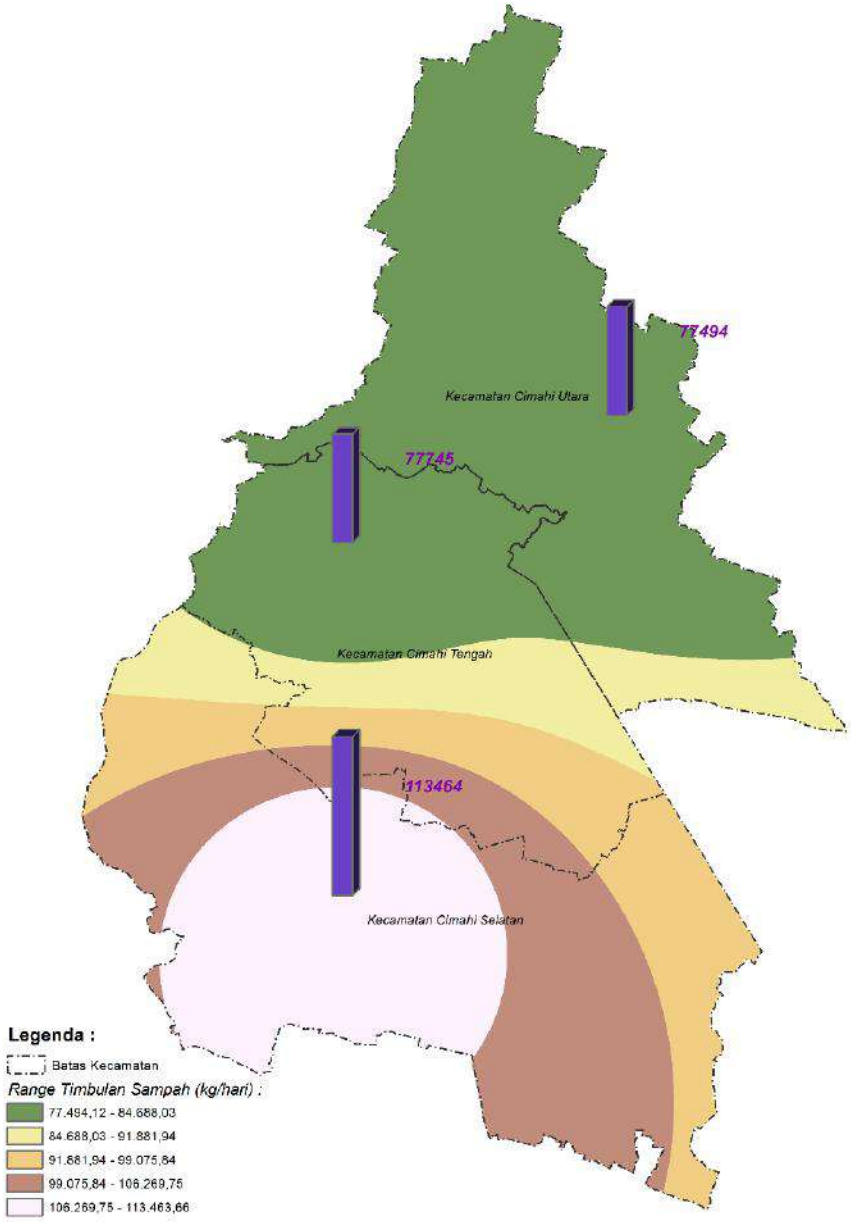

Gambar 2.80 Peta Timbulan Sampah Kota Cimahi
(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.5.3.2 Sarana dan Prasarana Persampahan

- Pengumpulan

Sarana pengumpulan sampah di Kota Cimahi terdiri dari motor roda 3 dan gerobak dengan jumlah masing-masing secara berurutan adalah 69 dan 178. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Sarana Pengumpulan Sampah

No	Jenis Kendaraan	Peruntukkan Penggunaan	Jumlah (Unit)	
1	Motor roda 3	Seluruh Kelurahan se-Kota Cimahi	65	69
		DKP Kota Cimahi	4	
2	Gerobak	Seluruh Kelurahan se-Kota Cimahi	175	178
		DKP Kota Cimahi	3	

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2020)

- Pemindahan

Kota Cimahi memiliki 38 TPS dengan total ritasi pengangkutan sebanyak 191 rit/minggu. Tiap kelurahan rata-rata memiliki 2-3 TPS dengan rata-rata ritasi pengangkutan sebanyak 5 rit/minggu. Konstruksi TPS di Kota Cimahi bervariasi, mulai dari beton dan kontainer, kontainer dan lantai tanah, hingga pasangan bata.

- Pengangkutan

Sarana pengangkutan sampah di Kota Cimahi terdiri dari *Arm Roll, Dump Truck, Compactor Truck, Pick Up,* mobil roda 4, motor roda 3, dan motor roda 2 dengan total jumlah unit 102 (96 akitf dan 6 tidak aktif). Jumlah unit dan kapasitas masing-masing jenis kendaraan dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22 Sarana Pengangkutan Sampah

No	Jenis Kendaraan		Jumlah Unit	Kapasitas (m^3)	Jumlah Unit	
					Aktif	Tidak Aktif
1		Arm Roll	22	10-12	8	0
				6	14	0
2		Dump Truck	13	10	1	0
				6	11	0
				24	1	0
3		Compact or Truck	3	10	0	1
				6	0	2
4		Pick Up	8	3	8	0
5		Motor Roda 3	40	1,5	37	3

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2020)

- Pengolahan

Sarana pengolahan sampah di Kota Cimahi terdiri dari komposter, *composting plant*, reaktor kompos, biogas, bank sampah unit, dan TPS 3R dengan 17,67 ton sampah yang terolah setiap hari. Data sarana pengolahan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Sarana Pengolahan Sampah

No	Jenis Sarana Pengolahan	Jumlah (Unit)
1	Komposter	48
2	Reaktor Kompos mini	300
3	Reaktor Kompos	22
4	Biogas	2
5	Bank Sampah Unit	231
6	TPS 3R	9
7	Bank Sampah Induk	1
8	Galery 3R	1
9	Biodegester	11

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2020)

- Pemrosesan Akhir

Kota Cimahi tidak memiliki TPA mandiri sehingga sampah yang dihasilkan diproses di TPPAS Regional Sarimukti. Jenis TPA yang digunakan oleh Kota Cimahi dijelaskan pada Gambar 2.77.

2.5.4 Impact

2.5.4.1 Penyakit

Sampah yang tidak tertangani akan menimbulkan masalah bagi kehidupan dan kesehatan lingkungan, terutama kehidupan manusia. Menurut Damanhuri (2010), permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan sampah diantaranya:

- Gangguan berupa estetika (keindahan) dan kenyamanan akibat sampah yang berserakan dan kotor

- Sampah campuran bahan organik dan anorganik yang terakumulasi dalam jumlah besar dapat menjadi sarang binatang yang menjadi vektor penyakit, sehingga akumulasi tersebut merupakan sumber penyakit
- Timbulan lindi yang dapat mencemari badan air sekitar
- Sampah kering yang mudah berterbangan dan terbakar dapat menimbulkan bahaya
- Tersumbatnya saluran air buangan dan drainase akibat sampah yang dibuang sembarangan

Berdasarkan penjelasan pada bagian state, terdapat 5% yaitu sebesar 13.432 ton/hari sampah yang belum tertangani di Kota Cimahi, umumnya masyarakat mengelola sampahnya sendiri dengan cara dibakar dan ditimbun di halaman rumah. Hal tersebut tentu berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut adalah jenis penyakit yang diderita masyarakat Kota Cimahi.

Tabel 2.24 Jenis Penyakit yang Diderita Masyarakat Kota Cimahi

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Insfeksi saluran pernafasan akut	94.134
2	Penyakit rongga mulut, kelenjar ludah dan rahang	38.971
3	Penyakit hipertensi	34.130
4	Penyakit kerongkongan, lambung dan duodenum	27.656
5	Gangguan Jaringan Lunak	21.039
6	Dermatitis dan eksim	13.559
7	Penyakit infeksi usus	12.139
8	Diabetes mellitus	11.003
9	TBC	7.821
10	Penyakit pernafasan bawah kronis	5.205

(Sumber: Dinkes Kota Cimahi, 2020)

Berdasarkan Tabel 2.24, penyakit yang paling diderita adalah infeksi saluran pernafasan akut. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya msyarakat Kota Cimahi yang melakukan pembakaran sampah. Pembakaran sampah

sendiri dapat menghasilkan gas dioksin yang dapat memicu penyakit kanker.

2.5.4.2 Banjir

Selama tahun 2019, banjir terjadi di Kota Cimahi sebagian besar diakibatkan oleh tersumbatnya aliran drainase dan sungai oleh sampah. Pada tahun tersebut, 8 kelurahan yang terdampak banjir yaitu Kelurahan Cipageran, Padasuka, Setiamanah, Cibeber, Leuwigajah, Utama, Cigugur Tengah, dan Melong. Kejadian banjir ini merupakan salah satu dampak yang berkaitan pula dengan pengelolaan persamapahan di Kota Cimahi, mengingat masing-masing kelurahan masih memiliki risiko terhadap cakupan pelayanan sampah, upaya pengurangan sampah, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, dan hal terkait lainnya.

2.5.4.3 Kualitas Air

Berdasarkan penjelasan pada bagian state, terdapat 5% yaitu sebesar 13.432 ton/hari sampah yang belum tertangani di Kota Cimahi. Terdapat kemungkinan sampah yang belum tertangani tersebut dibuang secara sembarangan ke sungai. Masyarakat yang tinggal di sekitar sempadan sungai berpotensi untuk membuang sampah ke sungai bila tidak terdapat sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia. Sampah yang masuk ke sungai dapat menurunkan kualitas air. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), nilai yang dimiliki sungai di Kota Cimahi sebesar 41,23 dengan kriteria marginal.

2.5.5 Response

2.5.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam upaya mengatasi isu lingkungan persampahan yang terjadi di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) membuat program/kegiatan yang bersumber dari APBD. Program/kegiatan yang dilaksanakan diantaranya penyediaan sarana dan

prasarana persampahan, bimbingan teknis, penyusunan dan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Kegiatan terkait pengelolaan persampahan dengan sumber APBD di Kota Cimahi pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25 Kegiatan dengan Sumber APBD tahun 2018

Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)
APBD	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	313.830.500	-
APBD	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2.339.516.000	-
APBD	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	141.000.000	-
APBD	Pengembangan teknologi persampahan	1.862.961.600	-
APBD	Bimbingan teknis persampahan	302.792.500	-
APBD	Kerjasama pengelolaan persampahan	5.085.827.000	5.699.800.000
APBD	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	205.326.000	-
APBD	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	-	79.200.000
APBD	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan	356.603.000	-
APBD	Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan	210.695.500	-
APBD	Pelayanan pengelolaan persampahan	7.268.573.640	10.263.934.500
APBD	Peningkatan kinerja daur ulang sampah organik	-	1.581.800.400
APBD	Peningkatan kinerja daur ulang sampah non organik	-	210.790.000
APBD	Peningkatan kinerja pengangkutan sampah terpilah	-	682.570.000
APBD	Peningkatan kinerja pengumpulan sampah terpilah	-	5.782.889.000

Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun 2019 (Rp)
APBD	Pengadaan alat angkut sampah *dump truck*	-	808.421.000
APBD	Pengelolaan persampahan perkotaan-revitalisasi TPS 3R	-	550.000.000
APBD	Pengelolaan persampahan perkotaan-penyediaan sarana dan prasarana persampahan	-	1.370.000.000

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2019)

2.5.5.2 Strategi Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah di sumber dilakukan dengan cara komposter, *composting plant*, *reactor* kompos, biodigester, bank sampah dan TPS 3R. Terdapat program-program yang telah terealisasi di Kota Cimahi terkait upaya pengurangan sampah ini, di antaranya ialah Program KTT, HO-HA, SIDA, Siswa Ber-*tumbler*, GPS, Haur Hiber, GAS, dan sebagainya. Untuk penjelasan lebih detail dari program-program tersebut, dapat dilihat pada bagian inovasi daerah dalam dokumen ini. Selain itu, dengan dilakukannya perencanaan, berikut tabel-tabel yang menunjukkan alternatif upaya yang juga dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah. Berikut adalah data data pengurangan sampah di Kecamatan di Kota Cimahi.

Tabel 2.26 Pengurangan Sampah di Kelurahan Melong

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	4	4	4	4
2	Composting Plant	0,615	1	1	1	3
3	Reaktor Kompos	0,034	1	1	1	4
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	3	3	3	3
6	TPS 3R	1,601	1	2	4	5
7	TPS		5			

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			33,09		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		2,31	3,91	7,11	10,04
	Persentase Reduksi Sampah		**7%**	**12%**	**21%**	**30%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.27 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cibeureum

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	3	3	3	3
2	Composting Plant	0,615	1	1	1	3
3	Reaktor Kompos	0,034	0	0	0	0
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	3	3	3	3
6	TPS 3R	1,601	0	4	4	5
7	TPS		5			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			31,71		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		0,66	7,06	7,06	9,89
	Persentase Reduksi Sampah		**2%**	**22%**	**22%**	**31%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.28 Pengurangan Sampah di Kelurahan Utama

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	1	1	1	1
2	Composting Plant	0,615	1	1	1	4
3	Reaktor Kompos	0,034	3	3	3	3
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	2	2	2	2
6	TPS 3R	1,601	1	1	1	2
7	TPS		6			
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			17,83		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		2,33	2,33	2,33	5,78
	Persentase Reduksi Sampah		**13%**	**13%**	**13%**	**32%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.29 Pengurangan Sampah di Kelurahan Leuwigajah

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	2	2	2	2
2	Composting Plant	0,615	2	2	3	3
3	Reaktor Kompos	0,034	2	2	3	2
4	Biodigester	0,021	1	1	1	1
5	Bank Sampah	0,022	3	3	3	3
6	TPS 3R	1,601	2	2	2	3
7	TPS		2			
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			22,11		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		4,55	4,55	5,20	6,76
	Persentase Reduksi Sampah		**21%**	**21%**	**23%**	**31%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.30Pengurangan Sampah di Kelurahan Cibeber

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	0	0	0	0
2	Composting Plant	0,615	1	1	3	2
3	Reaktor Kompos	0,034	0	0	0	4
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	2	2	2	2
6	TPS 3R	1,601	0	1	1	2
7	TPS		3			
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			13,47		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		0,62	2,22	3,45	4,57
	Persentase Reduksi Sampah		**5%**	**16%**	**26%**	**34%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.31 Pengurangan Sampah di Kelurahan Baros

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	8	8	8	8
2	Composting Plant	0,615	0	0	1	0
3	Reaktor Kompos	0,034	3	3	3	3
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	8	8	8	8
6	TPS 3R	1,601	1	1	1	2
7	TPS		21			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			10,94		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		1,86	1,86	2,47	3,46
	Persentase Reduksi Sampah		**17%**	**17%**	**23%**	**32%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.32 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cigugur Tengah

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	1	1	1	1
2	Composting Plant	0,615	2	2	2	4
3	Reaktor Kompos	0,034	2	2	2	2
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	8	8	8	8
6	TPS 3R	1,601	1	1	1	3
7	TPS		7			
8	TPST		2			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		24,06			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		2,95	2,95	2,95	7,38
	Persentase Reduksi Sampah		**12%**	**12%**	**12%**	**31%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.33 Pengurangan Sampah di Kelurahan Karangmekar

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	9	9	9	9
2	Composting Plant	0,615	0	0	0	2
3	Reaktor Kompos	0,034	2	2	3	3
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	3	3	3	3
6	TPS 3R	1,601	1	1	1	1
7	TPS		3			
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		8,35			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		1,77	1,77	1,80	3,03
	Persentase Reduksi Sampah		**21%**	**21%**	**22%**	**36%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.34 Pengurangan Sampah di Kelurahan Setiamanah

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	0	0	0	0
2	Composting Plant	0,615	0	2	2	3
3	Reaktor Kompos	0,034	2	2	2	2
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	2	2	2	2
6	TPS 3R	1,601	0	1	1	1
7	TPS		3			
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		11,36			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		0,07	2,90	2,90	3,52
	Persentase Reduksi Sampah		1%	26%	26%	31%

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.35 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cimahi

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	5	5	5	5
2	Composting Plant	0,615	1	1	1	1
3	Reaktor Kompos	0,034	0	0	0	0
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	4	4	4	4
6	TPS 3R	1,601	1	1	1	1
7	TPS		2			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		5,53			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		2,29	2,29	2,29	2,29
	Persentase Reduksi Sampah		**41%**	**41%**	**41%**	**41%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.36 Pengurangan Sampah di Kelurahan Padasuka

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	3	3	3	3
2	Composting Plant	0,615	1	2	2	3
3	Reaktor Kompos	0,034	1	1	1	1
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	5	5	5	5
6	TPS 3R	1,601	0	2	2	2
7	TPS		4			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			19,49		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		1,69	5,50	5,50	6,12
	Persentase Reduksi Sampah		**9%**	**28%**	**28%**	**31%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.37 Pengurangan Sampah di Kelurahan Pasirkaliki

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	0	0	0	0
2	Composting Plant	0,615	0	0	1	2
3	Reaktor Kompos	0,034	0	0	0	0
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	6	6	6	6
6	TPS 3R	1,601	0	1	1	1
7	TPS		2			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)			8,16		
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		0,02	1,63	2,24	2,85
	Persentase Reduksi Sampah		**0,3%**	**20%**	**27%**	**35%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.38 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cibabat

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	3	3	3	3
2	Composting Plant	0,615	3	3	3	5
3	Reaktor Kompos	0,034	4	4	4	4
4	Biodigester	0,021	1	1	1	1
5	Bank Sampah	0,022	4	4	4	4
6	TPS 3R	1,601	2	2	3	3
7	TPS		7			
8	TPST		1			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		25,88			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		5,31	5,31	6,91	8,14

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.39 Pengurangan Sampah di Kelurahan Citereup

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	6	6	6	6
2	Composting Plant	0,615	1	1	1	1
3	Reaktor Kompos	0,034	2	2	2	2
4	Biodigester	0,021	0	0	0	0
5	Bank Sampah	0,022	4	4	4	4
6	TPS 3R	1,601	0	1	2	3
7	TPS		0			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		17,92			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		0,75	2,35	3,95	5,55
	Persentase Reduksi Sampah		**4%**	**13%**	**22%**	**31%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Tabel 2.40 Pengurangan Sampah di Kelurahan Cipageran

No.	Jenis Pengolahan yang Beroperasi	Kapasitas Pengolahan (ton/unit/hari)	Jumlah (unit)			
			Kondisi Eksisting	Strategi 1	Strategi 2	Strategi 3
1	Komposter	0,010	3	3	3	3
2	Composting Plant	0,615	1	1	1	2
3	Reaktor Kompos	0,034	0	0	0	0
4	Biodigester	0,021	1	1	1	1
5	Bank Sampah	0,022	1	1	1	1
6	TPS 3R	1,601	1	1	3	3
7	TPS		1			
8	TPST		0			
	Jumlah Timbulan Sampah (ton/hari)		18,80			
	Jumlah Sampah Tereduksi (ton/hari)		2,27	2,27	5,47	6,09
	Persentase Reduksi Sampah		**12%**	**12%**	**29%**	**32%**

(Sumber: Hasil Perencanaan, 2020)

Gambar 2.81 *Composting Plant* di Kota Cimahi

2.5.5.3 Gerakan Pungut Sampah

Kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh sekelompok komunitas, yang merupakan gabungan Ikatan Alumni (IKA) setingkat SMA di Kota Cimahi, antara lain, IKA SMAN 1 CIMAHI, IKA SMAN 2 CIMAHI, IKA SMAN 3 CIMAHI, IKA SMAN 4 CIMAHI, IKA SMAN 5 CIMAHI, IKA SMKS PUSDIKHUBAD, IKA TUT WURI HANDAYANI. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan di lokasi Alun-alun Kota Cimahi dan sepuratan Jl. Jend. Amir Mahmud, akan tetapi melihat lokasi

lapangan Brigif yang setiap minggu dijadikan ajang kumpul masyarakat melakukan aktifitas seperti olahraga dan niaga dan jumlah pengunjung yang sangat banyak setiap minggunya, maka diputuskan untuk melakukan kegiatan GPS ini setiap 2 minggu sekali di Lokasi lapangan Brigif Kota Cimahi dan di Lokasi Taman Kartini yang setiap hari minggu ramai pengunjungnya. Saat ini kegiatan GPS melibatkan berbagai komunitas lingkungan dan pecinta alam dan juga dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, bakhan ada juga keterlibatan dari luar Kota Cimahi, dan masih menerima juga relawan yang ingin bergabung dalam kegiatan ini. Target sasaran kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat yang berada di lokasi kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya memunguti sampah yang berceceran di lokasi akan tetapi juga memberikan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemantaan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, melalui Bank Sampah, kreasi Daur Ulang Sampah, *Ecobrick*, Lubang Biopori, Tukar Sampah. Selain itu disediakan juga ruang edukasi anak.

Gambar 2.82 Dokumentasi GPS

2.5.5.4 Program Hari Organik dan Hari Anorganik (HO-HA)

Program ini merupakan program yang dilakukan di masyarakat dalam penjadwalan pengangkutan sampah. Sesuai dengan amanat perda pengelolaan sampah, bahwa sampah yang dihasilkan disumber sampah

harus dipilah sejak dari sumber sampah, sehingga mencegah terjadinya tercampur kembali sampah dan pemberian edukasi kepada masyarakat agar mau memilah, maka ditetapkan hari pengangkutan khusus sampah organik dan sampah an-organik secara terpisah, sebagai contoh di RW. 07 Pasirkaliki ditetapkan hari pengangkutan sampah organik adalah pada hari Kamis dan hari sampah an-organik adalah hari minggu.

2.5.5.5 Kegiatan Fisik Oleh Instansi

Upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Cimahi adalah dengan kegiatan fisik oleh instansi. Pada tahun 2019, terdapat 8 kegiatan fisik terkait persampahan yang dilaksanakan. Kegiatan fisik tersebut misalnya revitalisasi 3R, pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bimbingan teknis, dan penyusunan Perwal Jakstrada Kota Cimahi. Kegiatan fisik oleh instansi Kota Cimahi dapat dilihat pada lampiran tabel utama (Tabel 52)..

2.6 Tata Kelola

Tata kelola merupakan salah satu isu yang harus dianalisis berdasarkan pedoman penyusunan DIKPLHD 2019. Secara umum, isu ini membahas pengelolaan lingkungan hidup terkait kelembagaan, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan tersebut juga mencakup regulasi dan anggaran dalam pengelolaan. Berikut analisis pemicu, tekanan, status, dampak, dan upaya mengenai tata kelola di Kota Cimahi.

2.6.1 Driving Force

2.6.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu langkah yang harus sangat ditaati berdasarkan peraturan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Karena pengelolaan ini mencakup skala besar, tentu melibatkan manusia sebagai kunci saat merencanakan pengelolaan ini. Dalam analisis pemicu tata kelola, hal pertama yang perlu

dipertimbangkan adalah pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi, mengingat jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya (Gambar 2.3).

2.6.1.2 RTRW (Kawasan Budidaya)

Faktor pemicu kedua ialah adanya penetapan lahan sebagai kawasan budidaya. Penetapan tersebut tercantum dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Peratuan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013). Kawasan budidaya sendiri merupakan area yang dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Adanya perencanaan ini dalam RTRW mengharus pemerintah turut mempertimbangkannya dalam mengelola lingkungan hidup.

Dalam peraturan tersebut pengembangan kawasan budidaya termasuk dalam salah satu kebijakan dan strategi pola ruang di Kota Cimahi. Strategi tersebut dilakukan dengan mengembalikan fungsi lindung dari kawasan budidaya di Kawasan Bandung Utara (KBU) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

a. pengembangan dan pengendalian perumahan
b. pengendalian kawasan perdagangan dan jasa skala lokal maupun regional
c. pengembangan industri kreatif dan industri yang ramah lingkungan
d. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan
e. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana
f. pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagai salah satu ruang publik kota
g. pengembangan potensi wisata terpadu, wisata budaya lokal dan fasilitas olahraga

2.6.1.3 RPJMD Kota Cimahi

Faktor pemicu kedua yaitu misi peningkatan taraf ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang tercantum

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Tujuan misi tersebut ialah untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi aspek teknis dan non teknis jelas harus mempertimbangkan tujuan tersebut. Misi yang direncanakan oleh pemerintah ini akan mempengaruhi pendapatan daerah, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, penerapan izin lingkungan beserta pengawasannya, jumlah dan kapasitas SDM, dan sebagainya.

2.6.2 Pressure

2.6.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Salah satu kunci keberhasilan penataan dan pengelolaan lingkungan ialah anggaran yang mencukupi. Namun, anggaran pengelolaan pun juga bergantung pada pendapatan daerah. Maka dalam analisis ini, tekanan pertama yang sangat berpengaruh dalam tata kelola lingkungan adalah pendapatan asli daerah. Tabel 2.43 berikut menunjukkan pendapatan Kota Cimahi. Diketahui sumber pendapatan Kota Cimahi terdiri dari pajak, retribusi, laba BUMD, dan pendapatan sah lainnya. Berdasarkan data Badan Pengelola Pendapatan Daerah tersebut, Kota Cimahi mengalami sedikit penurunan pendapatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.

Tabel 2.41 Pendapatan Asli Daerah

No.	Sumber	Jumlah Pendapatan (Rp)	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pajak	245.821.741.388,00	163.136.977.065,00
2	Retribusi	12.859.294.744,86	15.856.315.921,00
3	Laba BUMD	0	9.297.600.000,00
4	Pendapatan Sah Lainnya	175.682.502.521	191.372.612.413,15
Jumlah		**434.363.538.653,86**	**379.663.505.399,15**

(Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, 2020)

2.6.2.2 Regulasi Perizinan Lingkungan

Penataan dan pengelolaan lingkungan yang harus dilakukan bergantung pula dengan regulasi umum terkait izin lingkungan. Segala hal yang berkaitan dengan perizinan tersebut akan menjadi landasan pemerintah dalam menerapkan tata kelola sehingga peraturan merupakan salah satu tekanan dalam analisis DPSIR ini. Regulasi terkait yang menjadi panduan dalam hal ini antara lain:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengendai Dampak Lingkungan Hidup

2.6.3 State

Status dalam analisis tata kelol lingkungan terdiri dari jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran pengelolaan, implementasi izin lingkungan oleh perusahaan terkait pembangunan usaha/kegiatan dan pembuangan limbah B3. Berikut penjelasan dari masing-masing status tersebut.

2.6.3.1 Jumlah dan Kapasitas SDM

Jumlah SDM di lembaga pengelola lingkungan merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi keberhasilan tata kelola. Jumlah dan kapasitas SDM ini juga akan berpengaruh pada anggaran yang harus dialokasikan oleh pemerintah. Pada tahun 2019, jumlah personil yang terikat dengan lembaga pengelola lingkungan hidup yaitu 93 orang dengan keterangan berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.42. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional, jumlah SDM dalam

lembaga ini sebanyak 10 orang (terdiri dari jabatan fungsional PPLH dan PPNS LH) dengan rincian seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.42 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktor (S3)	0	0	0
2	Master (S2)	9	1	10
3	Sarjana (S1)	14	15	29
4	Diploma (D3/D4)	2	3	5
5	SLTA	23	0	23
6	SMP/SD	25	1	26
	Jumlah	**73**	**20**	**93**

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

Tabel 2.43 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	Dinas Lingkungan Hidup	PPLH	1	1	2	2
2	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS LH	2	0	2	0
3	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS	0	0	0	0
4	Dinas Lingkungan Hidup	Pranata Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.3.2 Anggaran Pengelolaan Lingkungan hidup

Kondisi eksisting atau status kedua Kota Cimahi dalam tata kelola yang perlu diperhatikan adalah anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Secara tidak langsung, alokasi dana untuk hal ini dapat menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mengelola dan menjaga kualitas lingkungan.

Faktor penekan dalam isu tata kelola adalah anggaran pengelolaan lingkungan hidup. Adanya alokasi dana untuk pengelolaan lingkungan hidup mengindikasikan apakah suatu daerah memiliki keseriusan untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran sehingga kualitas lingkungannya terjaga. Besaran dana yang dialokasikan disesuaikan dengan peruntukkannya. Total peruntukkan yang dijadikan dasar oleh DLH Kota Cimahi mencapai 124 kegiatan. Selama tahun 2019 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 197.375.882.434 untuk 72 kegiatan. Rincian dana tersebut dapat dilihat pada Tabel Utama 62 dalam lampiran.

2.6.3.3 Implementasi Izin Lingkungan Perusahaan

Kondisi eksisting dari implementasi tata kelola dapat dilihat salah satunya dari daftar perusahaan yang telah mendapatkan izin lingkungan. Sepanjang tahun 2019, Pemerintah Kota Cimahi telah mengizinkan 28 kegiatan usaha, mulai dari pembangunan perumahan, toko, perusahaan, *minimarket*, hingga industri. Dokumen yang dikeluarkan pada tahun tersebut terdiri dari dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Rincian terkait kegiatan dan pemrakarsa tercantum dalam lampiran Tabel Utama 41. Selain itu, penerapan izin lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan di Kota Cimahi juga ditandai dengan perizinan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hingga tahun 2019, terdapat 23 perusahaan yang telah mendapat izin mengelola mencakup penyimpanannya. Daftar perusahaan yang telah mendapat izin tersebut dapat dilihat pada Tabel Utama 42 dalam lampiran.

2.6.4 Impact

2.6.4.1 Program Lingkungan Tidak Berjalan Optimal

Salah satu dampak yang paling umum dari tata kelola yaitu gagalnya atau tidak optimalnya suatu program, baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Penyebab ketidakberhasilan ini mungkin berbeda untuk setiap programnya. Maka, dalam analisis tata kelola, perlu

diidentifikasi penyebab suatu program tidak berjalan optimal. Jika program-program yan dicanangkan tidak optimal, tentu upaya pengelolaan lingkungan pun tidak tertuju sempurna.

2.6.4.2 Pengaduan Masyarakat

Potensi dampak yang selajutnya dapat ditimbulkan dari tata kelola yaitu hadirnya pengaduan-pengaduan oleh masyarakat. Selama tahun 2019, terdapat beberapa pengaduan oleh masyarakat maupun pihak lembaga tertentu. Jumlah pengaduan yang terjadi selama tahun tersebut sebanyak 13 kasus. Pengaduan tersebut dipicu oleh permasalahan yang mereka hadapi, seperti pencemaran udara, pencemaran air, pelanggaran perizinan, pembakaran sampah dan rerumputan, pohon tumbang, dan sebagainya. Beberapa pengaduan mengenai masalah persampahan erat juga dengan kualitas udara karena disebabkan oleh pembakaran sampah oleh warga sehingga mencemari kualitas udara. Ke-13 pengaduan tersebut telah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Keterangan lebih jelas mengenai status pengaduan ini dapat dilihat pada Tabel 53 dalam Lampiran Tabel Utama.

Gambar 2.83 Status Pengaduan Masyarakat
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.4.3 Pencemaran Lingkungan

Dampak ketiga dan dampak yang paling mengkhawatirkan ditunjukkan dengan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas antropogenik yang disengaja. Dampak-dampak berupa penurunan kualitas lingkungan ini dapat pula dilihat pada analisis sebelumnya mengenai isu tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, dan persampahan (Sub bab 2.1-2.5).

- **Tata Guna Lahan**

Pemberian izin membangun pada suatu daerah dapat menyebabkan perubahan lahan. Lahan kosong atau lahan yang sebelumnya merupakan daerah resapan air berubah menjadi perkerasan sehingga berisiko bencana seperti banjir dan longsor.

- **Kualitas dan Kuantitas Air**

Pemberian izin membangun industri dapat memberikan dampak terhadap penurunan kualitas air. Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang baik dapat menyebabkan pencemaran pada badan air. Penurunan kualitas air akan berdampak terhadap daya dukung, daya tampung, dan kesehatan masyarakat.

- **Kualitas Udara**

Industri yang mendapatkan izin untuk beroperasi dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas udara. Proses pembakaran pada industri dapat menghasilkan asap, debu, dan pencemar lainnya yang dapat menurunkan kualitas udara. Aktivitas masyarakat seperti penggunaan kendaraan bermotor dan pembakaran sampah juga dapat menurunkan kualitas udara.

- **Risiko Bencana**

Bencana yang terjadi di Kota Cimahi adalah banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor. Bencana tersebut terjadi akibat tata kelola sistem drainase yang kurang baik, faktor alam dan aktivitas manusia, dan perubahan tata guna lahan.

- **Perkotaan (Persampahan)**

Tata kelola yang tidak baik dapat menyebabkan masalah pada isu persampahan. Sampah yang tidak terkelola kemungkinan dibakar, ditimbun, dan dibuang secara sembarangan. Hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan estetika dan kesehatan.

2.6.4.4 Kesehatan Masyarakat

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, tata kelola lingkungan hidup yang tidak baik akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Tidak optimalnya pengelolaan lingkungan hidup akan mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, dan tidak tertanganinya sampah di suatu wilayah. Bila dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, maka penyakit yang diderita di Kota Cimahi sebagian besar adalah infeksi saluran pernafasan. Penyakit tersebut erat dengan kualitas udara yang kurang baik. Selain infeksi saluran pernafasan, penyakit-penyakit lain juga terdiri dari penyakit rongga mulut, hipertensi, penyakit kerongkongan dan lambung, dermatitis, dan sebagainya (Gambar 2.84). Jika dihubungkan dengan pencemar lingkungan, penyakit yg mungkin dapat disebabkan ialah dermatisis (kualitas udara dan air), rongga mulut (kualitas air), infeksi saluran pencemaran (kualitas air), dan sebagainya.

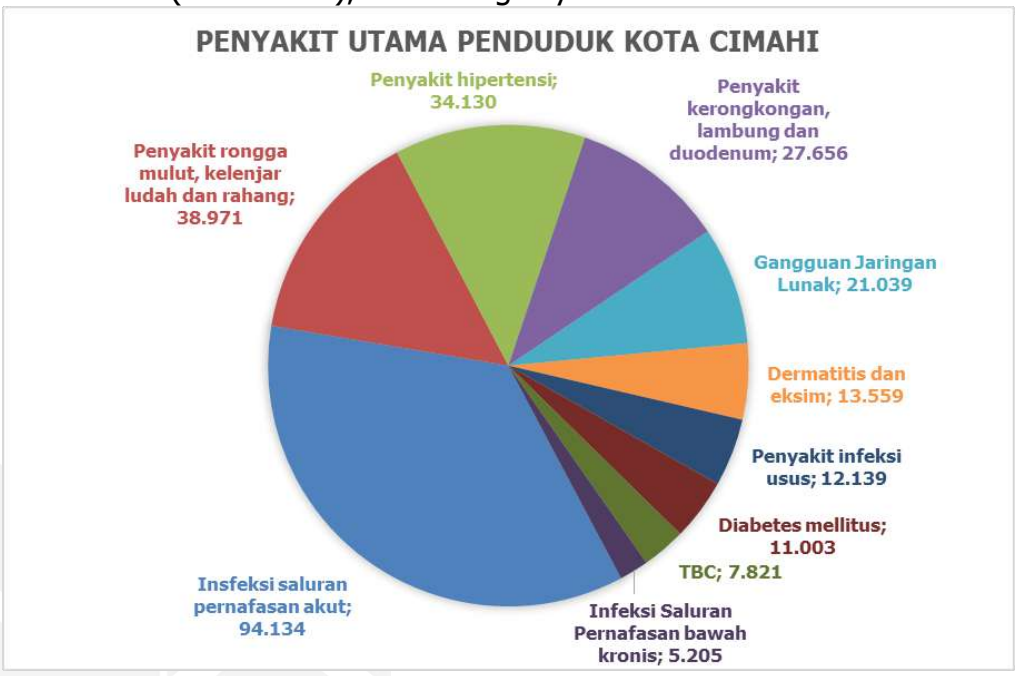

Gambar 2.84 Penyakit Utama Penduduk Kota Cimahi
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2020)

2.6.4.5 Sanksi dan Sengketa Lingkungan

Tata kelola yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya sengketa terkait lingkungan. Bila pemerintah tidak tegas dalam menegakkan aturan atau izin membangun usaha, maka penyelewangan izin lingkungan dapat terjadi. Ujung dari permasalahan sengketa lingkungan ini adalah pencemaran lingkungan. Sengketa lingkungan dapat mempengaruhi isu tata guna lahan, kualitas air dan kuantitas air, kualitas udara, risiko bencana, dan persampahan. Dengan demikian, pemerintah harus tegas untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar izin lingkungan karena selama tahun 2019, masih terus terjadi penggaran-pelanggaran ini.

2.6.5 Response

Response atau upaya dilperlukan untuk mengatasi dan mendukung penerapan tata kelola yang lebih baik. Upaya tersebut dapat disusun berdasarkan faktor pemicu, penekan, kondisi eksisting (status), maupun dampak yang dimbulkan, mengingat keempat faktor tersebut saling berkaitan. Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi untuk mengelola lingkungan hidup.

2.6.5.1 Kemitraan

Program pengelolaan yang disusun oleh pemerintah terkadang masih belum efektif dan tidak mencapai tujuan. Salah satu penyebab utamanya ialah peran serta masyarakat yang masih rendah. Untuk itu, pengelolaan lingkungan bisa saja melibatkan masyarakat untuk mendukung berjalannya program. Salah satu cara yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah dengan membentuk kemitraan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tahun 2019, Kota Cimahi memiliki 20 LSM lingkungan hidup, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut.

Tabel 2.44 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cimahi

No	Nama LSM	Alamat
1	APPLI Kota Cimahi	Jln Bomber I V No 14 RT 05/ RW 29 Kel. Melong Cimahi Selatan
2	Badan Advokasi Lingkungan Cimahi	Kp. Leuweung Gede RT 01/11 Kelurahan Cibeureum
3	Forum DAS dan Lingkungan TELDUP	Jln. Perumnas Blok 6 Gang Pepaya No 88 RT 05/RW 13
4	Forum Dinamika Masyarakat Peduli Kota Cimahi	Kp. Babakan Utama RT 02 RW 01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
5	Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Cimahi	Jl. Budi RT 01 RW12 Kel. Pasir Kalilki Kec. Cimahi Utara
6	FPL Kelurahan Karang Mekar	Jl. H. Tajudin No. 134 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah
7	Forum Peduli Rakyat (FPRC) Kota Cimahi	Jl. Melong No.8 RT 03 RW 02 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
8	Forum Pemberdayaan Masyarakat (FPM) Kel. Utama	Jl. Mahar Martanegara RT 04 RW 07 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
9	GEMMILANG	Jl. Melong Tengah
10	Gerakan Asri Lingkungan Kota Cimahi	Komplek Perumnas Cijerah 2 Gg. Tanjung RT 02 RW 19 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
11	Gerakan Masyarakat Pepapi Cimahi (Gempe)	Jl. Joyo Dikromo No. 104 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
12	Kelompok Karya Wahana Kota Cimahi (KKWKC)	Jl. Sangkuriang Barat II Belakang No, 169 RT 04 RW 07 Kel. Cipageran
13	Kelompok Lingkungan Alam	Jl. Mekarsari RT 04 RW 07 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah
14	KMPL Kel. Citeureup	Jl. Encep Kartawiria No. 140 RT 04 RW 02 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara
15	KMPL Kel. Leuwigajah	Jl. Sadarmanah No.11 RT 01 RW 05 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan
16	KMPL Kel. Citeureup	Jl. Kamarung No. 09 RT 03 RW 04 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara
17	Konsorsium Peduli Masyarakat Kel. Leuwigajah	Jl. Kihapit Timur No.11 01/06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan
18	LSM Cimahi Alami Kota Cimahi	Jln. Boling Utara No 21 Melong Green Garden Kel. Melong
19	LSM Pecinta Alam Jaya Lestari	Komplek KCVRI Blok A No. 13-14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Tengah
20	Relawan Peduli Lingkungan Kel. Leuwigajah	Jl. Cibogo RT 04/06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangas Kota Cimahi, 2019)

2.6.5.2 Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan

Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup menaungi 93 orang personil dan 10 orang staf fungsional. Namun, jumlah SDM yang banyak juga belum tentu optimal dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan hidup. Satu hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan meningkatkan kapasitas SDM tersebut sehingga secara tak langsung dapat meningkatkan kinerja yang baik. Cara ini juga perlu untuk menurunkan risiko gagalnya program-program pemerintah dan LSM. Upaya yang utama perlu dilakukan ialah melakukan edukasi atau pendidikan untuk memberi pemahaman kepada SDM. Tidak cukup sampai di tahap edukasi, kapasitas SDM juga tentu bergantung pada penerapan mereka dari materi yang telah didapat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kapasitas SDM tersebut. Kedua hal ini merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM.

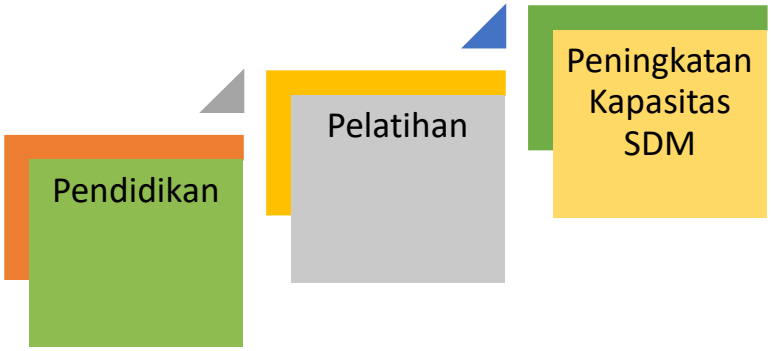

Gambar 2.85 Alur Peningkatan Kapasitas SDM
(Sumber: Hasil Analisis, 2019)

2.6.5.3 Pengawasan Izin Lingkungan

Salah satu upaya mengenai izin lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi ialah memastikan tidak adanya pelanggaran izin lingkungan. Bentuk usaha dari upaya ini berupa pengawasan terhadap perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan. Pada tahun 2019 hingga awal tahun 2020, pemerintah telah mengawasi 75 perusahaan/pemrakarsa

pemilik izin lingkungan. Hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan semua perusahan tersebut telah melaksanakan UKL-UPL seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan. Daftar perusahaan/pemrakarsa dapat dilihat pada Tabel 43 dalam lampiran tabel utama.

2.6.5.4 Penerimaan Penghargaan Lingkungan Hidup

Peningkatan kinerja pemerintah dalam mengelola lingkungan merupakan hal yang perlu didukung, salah satunya dengan penghargaan-penghargaan lingkungan hidup. Penghargaan ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk menjalankan pengelolaan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selain menjadi motivasi, penghargaan yang didapat juga dapat dijadikan sebagai inovasi dalam mengembangkan program-program, dalam kata lain penghargaan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Pada tahun 2019, Kota Cimahi hanya mendapat 13 penghargaan, terdiri dari penghargaan Adiwiyata Nasional dan Proper Biru (Tabel 2.45).

Tabel 2.45 Penghargaan Lingkungan Hidup Tahun 2018 dan 2019

No	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SMPN 8 Kota Cimahi	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
2	SMAN 5 Cimahi	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
3	PT. Ajutex	Proper Biru	KLHK	2019
4	PT Fuji Palapa Textiles Industries	Proper Biru	KLHK	2019
5	PT. Guna Mitra Prima	Proper Biru	KLHK	2019
6	PT Oriental Embriodery	Proper Biru	KLHK	2019
7	PT Sanbe Farma	Proper Biru	KLHK	2019
8	PT. Best Jeans Indo Citranusa	Proper Biru	KLHK	2019
9	PT Margajaya	Proper Biru	KLHK	2019
10	PT. Hegar Mulya	Proper Biru	KLHK	2019
11	Fasilamindo Utama, PT	Proper Biru	KLHK	2019
12	PT. Sinar Continental	Proper Biru	KLHK	2019
13	PT. Ayoe Indotama Tektile	Proper Biru	KLHK	2019

(Sumber: Dinas Lingkungan hidup Kota Cimahi, 2020)

2.6.5.5 Produk Hukum

Hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hukum berperan sebagai landasan yang dijadikan dasar pemerintah dalam melakukan setiap langkah upaya pengelolaan lingkungan. Produk hukum yang paling umum biasanya berupa peraturan. Pada tahun 2019, Kota Cimahi telah mengeluarkan 7 produk hukum yang terdiri dari 6 Peraturan Daerah dan 1 Peraturan Walikota dengan keterangan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.46. Sejak tahun 2003 hingga 2019 Kota Cimahi telah menghasilkan 83 produk hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 2.46 Produksi Hukum Bidan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Peraturan Daerah	2/ 23 April 2019	Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum
2	Peraturan Daerah	6/ 23 April 2019	Penyelenggaraan Pengelolaan Samah
3	Peraturan Daerah	7/ 25 Juni 2019	Pasar Pemerintah
4	Peraturan Daerah	9/ 28 Juni 2019	Pendaftaran Usaha Pariwisata
5	Peraturan Daerah	10/ 28 Juni 2019	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025
6	Peraturan Daerah	11/ 28 Juni 2019	Retribusi Jasa Umum
7	Peraturan Walikota	55/ 6 November 2019	Retribusi Lab. Lingkungan

(Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, 2020)

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Isu lingkungan diidentifikasi dari hasil literature review kemudian menjadi shortlist (daftar pendek) isu lingkungan, yang dinamakan isu lingkungan potensial. Isu potensial yang teridentifikasi berdasarkan review literatur yang di kombinasikan dengan kriteria menghasilkan beberapa isu lingkungan. Penetapan isu prioritas dengan menggunakan pendekatan DPSIR.

BAB III

ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1 Perumusan Isu Prioritas

Setelah enam isu lingkungan utama dianalisis dengan metode *driving force-pressure-state-impact-response*, penapisan perlu dilakukan untuk memilih isu yang sangat perlu diprioritaskan. Pada bagian dokumen ini, tahap *screening* tersebut dijelaskan dengan metode *scoring* untuk memilih tiga hingga 5 isu terpenting untuk dievaluasi. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1, berikut merupakan alur dalam penyusunan isu prioritas lingkungan hidup Kota Cimahi tahun 2020.

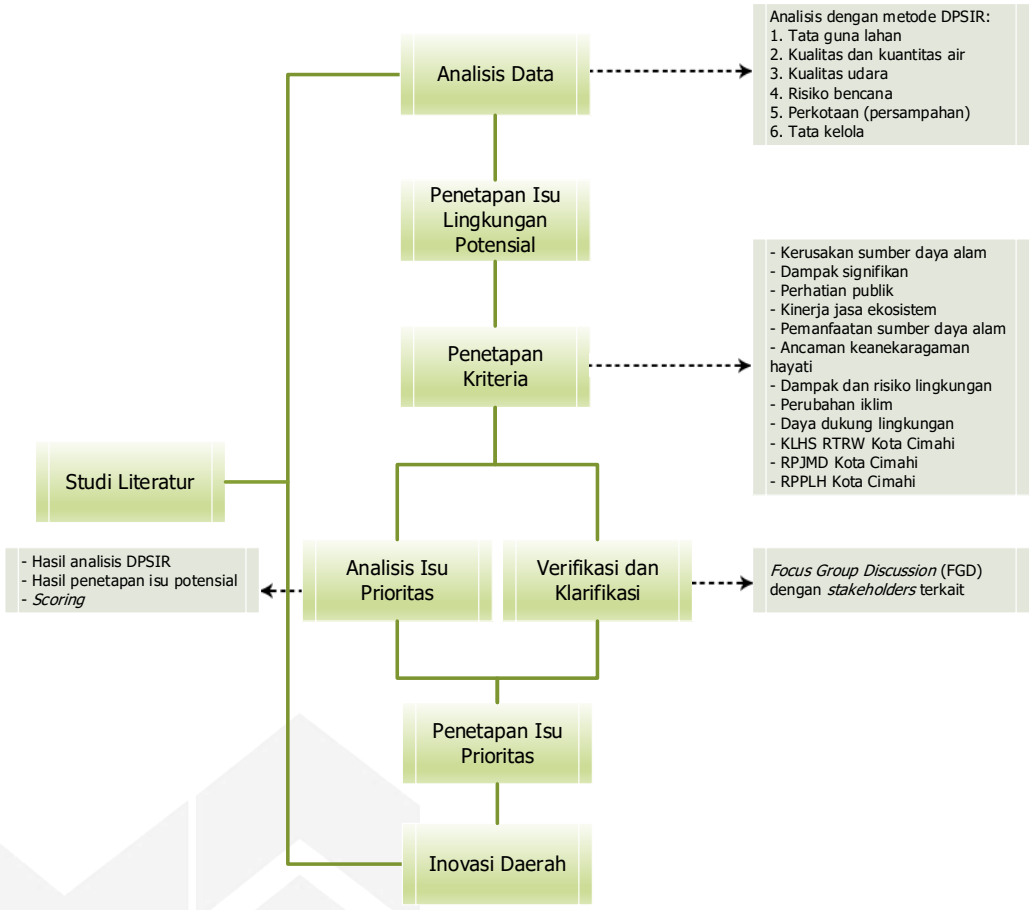

Gambar 3.1 Alur Perumusan Isu Prioritas
(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Pada alur tersebut terlihat bahwa selama penentuan isu dilakukan beriringan dengan studi literatur. Tahapan dimulai dengan analisis DPSIR 6 isu utama yang disarankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pedoman Penyusunan DIKPLHD (tercantum dalam Bab II). Sedangkan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi adakan dijelaskan pada Bab IV dokumen ini.

3.2 Studi Literatur

3.2.1 Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah :

"Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya"

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni : Maju, Agamis, dan Berbudaya, dengan uraian sebagai berikut :

Maju: Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan.

Agamis: Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembagalembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban

tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Berbudaya: Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Untuk mencapai visi-visi tersebut, maka perlu dijabarkan menjadi beberapa misi, strategi, atau upaya yang akan dilakukan pemerintah Kota Cimahi. Misi yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berahlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam dimensi pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan kepemerintahan yang baik *(good governance)* dan Pemerintahan yang bersih *(clean goverment)*, anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, *rule of law*, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya usaha kecil menengah.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan *(sustainable development)* yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan *guidelines* kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Misi kelima ini secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika perubahan pemerintahan dalam pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan kapasitas (capacity building) aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, kompetensi dan tingkat kesejahteraan yang baik yang outputnya adalah kinerja pemerintahan yang mampu bersinergi dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada bidang lingkungan tercantum dalam Misi ke-4, yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Pada misi tersebut pilar dari konsep pembangungan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, dapat digambarkan sebagai pilar yang saling tergantung dan berhubungan secara mutualisma satu sama lain (Juwana, Perera, & Muttil, 2010). Lebih jauh visi tersebut, pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) di Kota Cimahi harus dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria yaitu : (1) Tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau *depletion of natural resources;* (2) Tidak menimbulkan polusi dan dampak lingkungan lainnya; (3) Kegiatannya harus dapat meningkatkan *useable resources* ataupun *replaceable resource* (Salim, 1990). Prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan harus dijadikan salah satu acuan penting.Sasaran dari visi bidang lingkungan sangat jelas merupakan sasaran dari pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan terpenuhinya kepentingan dasar manusia dalam pengelolaan lingkungan.

Jika diperhatikan dan dibandingkan antara arahan misi dan sasaran dari pembangunan, maka sasaran-sasaran pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan tersebut diarahkan pada unsur penekan dominan yaitu penduduk dan pengendalian pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan bernilai tambah. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya: Penataan ruang berkelanjutan; Pemulihan kualitas lingkungan; Pelestarian fungsi kawasan lindung; Menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

3.2.2 Rencana Strategis DLH Kota Cimahi 2018-2022

Literasi kedua merujuk pada Rencana Strategis DLH Kota Cimahi yang menyantumkan pengelolaan lingkungan hidup periode 2018-2022 sebagai rencana utamanya. Perlunya mempertimbangkan renstra ini untuk menentukan isu prioritas dan inovasi yang saling terintegrasi sehingga tujuan dapat dicapai dengan efektif. Adapun beberapa poin penting dalam

renstra DLH Kota Cimahi yang meliputi sasaran, program, dan indikator kinerja, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Sasaran, Program, dan Indikator Kinerja dalam Resntra dLH Kota Cimahi 2018-2022

Sasaran	Program	Indikator Kinerja
Meningkatkan Pelayanan Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terselenggaranya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kota Cimahi
	Program Peningkatan kinerja pelayanan penanganan sampah berwawasan lingkungan	Cakupan Layanan pengelolaan sampah terpilah (kombinasi target SDGs dan jakstranas) (Prosentase sumber sampah terlayani sistem pengumpulan dan pengangkutan terpilah)
	Program Peningkatan Kinerja Pengurangan Sampah	Pengurangan timbulan sampah yang diangkut ke TPA dibandingkan dengan total timbulan sampah
Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan (Air, Tanah dan Udara)
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlindunginya kondisi lingkungan melalui upaya pengendalian dampak perubahan iklim serta pemantauan tingkat emisi gas rumah kaca di Kota Cimahi
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Meningkatnya usaha pengendalian polusi di Kota Cimahi
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau
	Program Peningkatan Kualitas Udara	Persentase Peningkatan Kualitas Udara Ambien
Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air	Program Peningkatan Kualitas Air Permukaan	Persentase Peningkatan Kualitas Air Permukaan
Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Program Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Terlindunginya kondisi lingkungan melalui upaya pengendalian dampak perubahan iklim serta

Sasaran	Program	Indikator Kinerja
		pemantauan tingkat emisi gas rumah kaca di Kota Cimahi
	Program Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2018)

3.2.3 *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang menggantikan kesepakatan sebelumnya (*Millennium Development Goals*/MDGs). SDGs disepakati oleh lebih dari 190 negara, berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Masa berlakunya dimulai sejak tahun 2015 hingga tahun 2030. Suatu hal yang perlu juga untuk mengaitkan isu lingkungan di Kota Cimahi ini dengan kebijakan *universal*.

Gambar 3.2 17 Sustainable Development Goals

SDGs memiliki lima pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraaan. Di antara 17 target sasaran utama (Gambar

3.2), terdapat beberapa target yang berkaitan langsung dengan aspek lingkungan yaitu:

a. *Goal* 2. Tanpa Kelaparan, Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan.
b. *Goal* 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Berkelanjutan Sumber Daya Air dan Sanitasi Untuk Semua Orang
c. *Goal* 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Terpercaya, Berkelanjutan serta Modern Untuk Semua Orang
d. *Goal* 9. Membangun Infrastruktur dan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
e. *Goal* 11. Mewujudkan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Berketahanan serta Berkelanjutan.
f. *Goal* 12. Menjamin Pola Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan
g. *Goal* 13. Melakukan Aksi Nyata Memerangi Perubahan Iklim dan Dampak yang Ditimbulkan.
h. *Goal* 14. Konservasi dan Keberlanjutan Pemanfaatan Sumber Daya Laut untuk Pembangunan Berkelanjutan
i. *Goal* 15. Melindungi, Mengembalikan dan Mempromosikan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat, Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan, Menghentikan Tukar Guling serta Degradasi Tanah dan Kerugian Akibat Penurunan Keanekaragaman Hayati

3.2.4 DIKPLH Kota Cimahi Tahun 2019

Rujukan berikutnya dalam melakukan studi literatur dapat didasari oleh Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan hidup Daerah Kota Cimahi tahun 2019. Hal tersebut perlu dilakukan untuk memastikan dan memperkuat dalam penentuan isu prioritas yang memang sedang dihadapi oleh kota dan perlu segera ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil *skoring* dan analisis serta verifikasi dengan *stakeholders*, disimpulkan 3 isu prioritas

lingkungan tahun 2019: persampahan, kualitas dan kuantitas air, serta perubahan lahan.

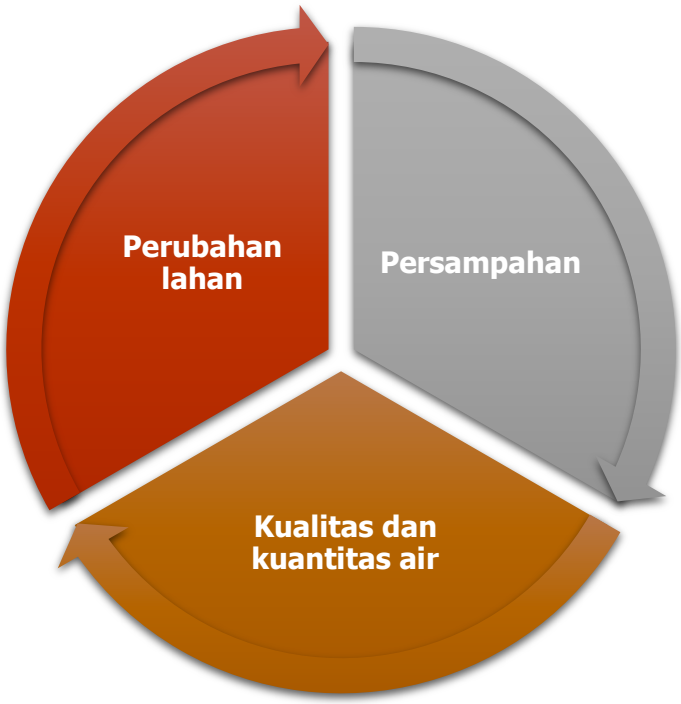

Gambar 3.3 Isu Lingkungan Prioritas Kota Cimahi
(Sumber: DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2019)

3.3 Analisis D-P-S-I-R Tahun 2020

Penetapan isu prioritas juga sangat mengacu pada hasil analisis DPSIR yang sebelumnya telah banyak dituliskan pada Bab II dokumen. Dengan melihat keterkaitan antara elemen pemicu (D), tekanan (P), kondisi eksisting (S), dampak (I), upaya yang dilakukan (R), penetapan isu prioritas diharapkan akan lebih mudah dan representatif. Enam isu utama tersebut terdiri dari tata guna lahan, kualitas dan kuantitas air, kualitas udara, risiko bencana, persampahan kota, dan tata kelola. Berikut rangkuman hasil analisis dalam bentuk diagram (tercantum juga dalam Tabel 3.2).

1. Tata Guna Lahan

Berdasarkan pedoman Nirwasita Tantra 2019, analisis DPSIR untuk isu tata guna lahan ini disusun dengan berdasar pada data-data pendukung seperti yang tercantum dalam lampiran Tabel Utama 1-17 (kecuali Tabel 3, 5, 10,

11, 12, 15, dan 17). Data-data dalam tabel tersebut menunjang analisis mengenai masalah penggunaan lahan di Kota Cimahi pada tahun 2019.

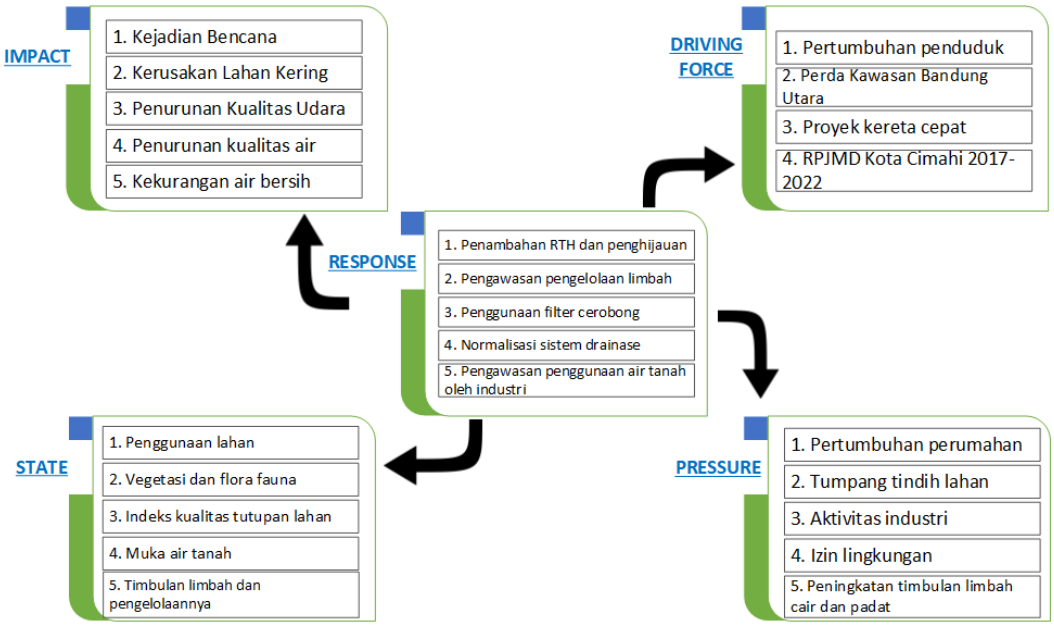

Gambar 3.4 DPSIR Tata Guna Lahan

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

2. Kualitas dan Kuantitas Air

Salah satu faktor pemicu dalam isu kualitas dan kuantitas air yang juga mempengaruhi isu lain adalah pertumbuhan penduduk. Lingkup dari analisis DPSIR isu ini ialah air sungai dan air tanah/sumur, baik kualitas maupun kuantitasnya. Analisis air ini ditunjangi oleh beberapa data dasar yang tercantum dalam lampiran tabel utama (Tabel 6, 22, 29, 31, 33) yang terdiri dari hasil uji kualitas air sungai, hasil uji kualitas air tanah, kondisi lahan kritis, data penyakit, dan data pembuan gan limbah padat dan limbah cair. Berikut Gambar 3.5 yang menunjukkan rangkaian poin-poin dalam analisis DPSIR isu kualitas dan kuantitas air.

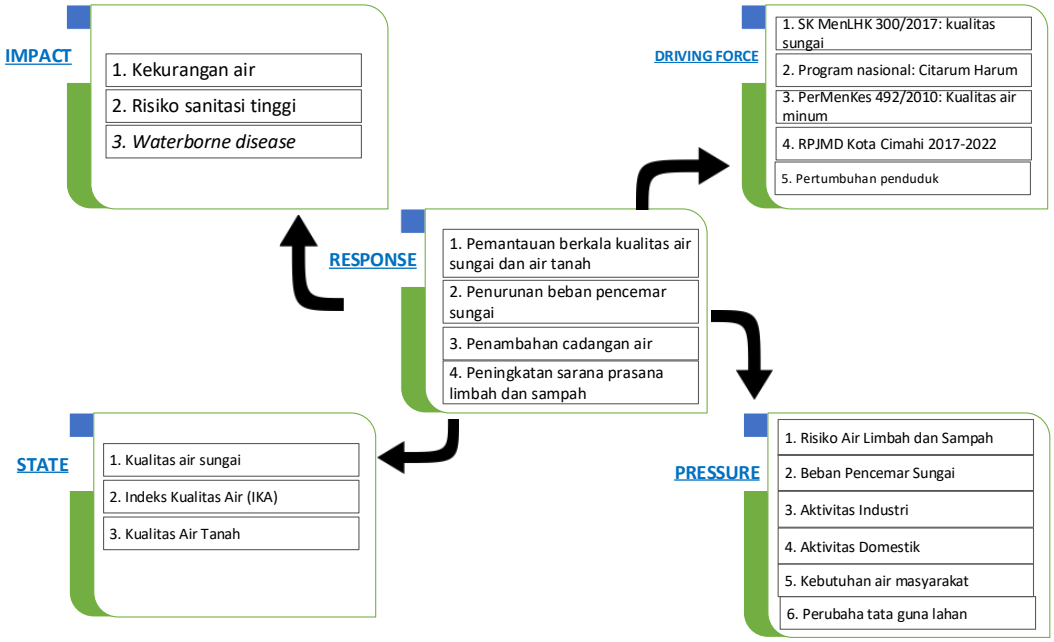

Gambar 3.5 DPSIR Kualitas dan Kuantitas Air

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

3. Kualitas Udara

Analisis isu lingkungan ketiga, yaitu kualitas udara, didasari oleh data utama yang terdiri dari data kependudukan, jumlah kendaraan bermotor beserta jenis bahan bakarnya, dan kualitas udara ambien. Sedangkan info lainnya terkait kualitas udara dalam analisis ini merupakan hasil pengolahan data utama, seperti emisi bahan bakar, Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), dan efek rumah kaca. Berikut Gambar 3.6 yang menunjukkan rangkuman dari hasil analisis DPSIR isu kualitas udar di Kota Cimahi.

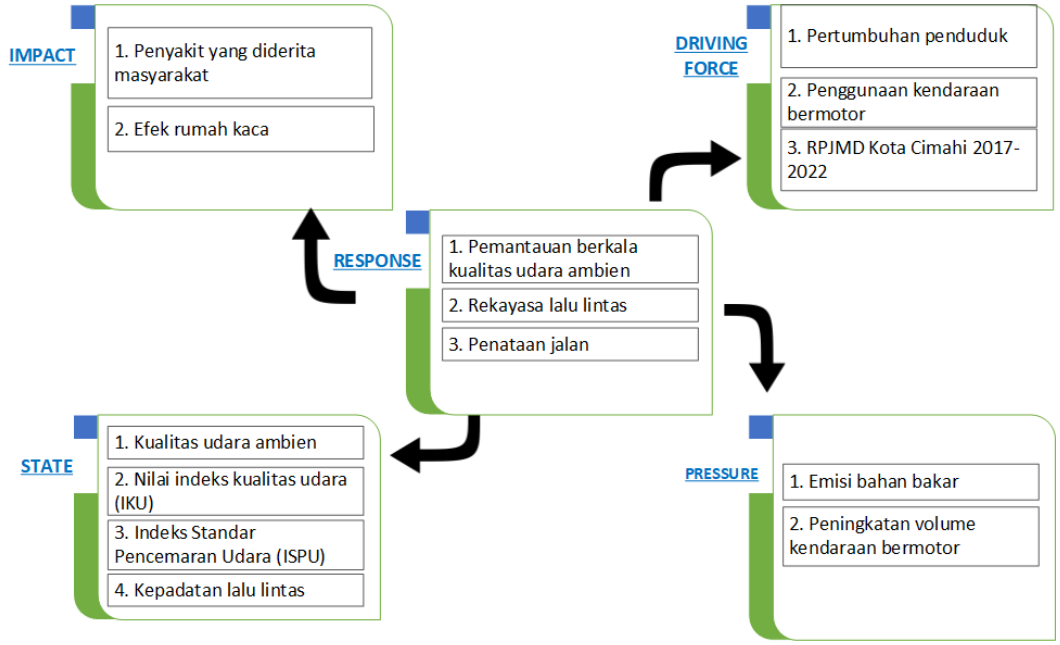

Gambar 3.6 DPSIR Kualitas Udara

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

4. Risiko Bencana

Melalui analisis DPSIR, diketahui bahwa Kota Cimahi memiliki risiko untuk terjadinya bencana. Bencana tersebut terdiri dari banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor. Data yang meliputi kejadian bencana pada tahun 2019 tercantum pada lampiran tabel utama nomor 44, 45, 46, dan 47. Informasi yang tercantum dalam tabel tersebut meliputi waktu kejadian, lokasi kejadian, dampak yang ditimbulkan, hingga penanggulangan saat bencana terjadi. Berikut diagram pada Gambar 3.7 yang menunjukkan rangkuman keseluruhan dari analisis DPSIR untuk isu risiko bencana Kota Cimahi tahun 2019.

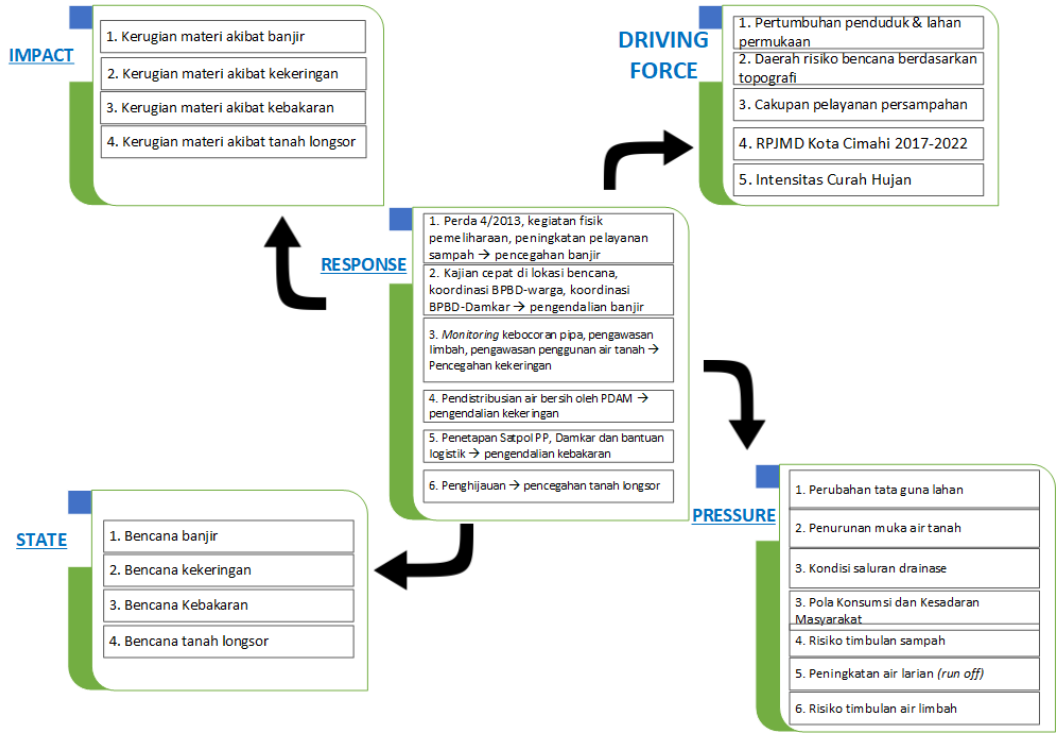

Gambar 3.7 DPSIR Risiko Bencana

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

5. Perkotaan (Persampahan)

Isu persampahan kota yang dicakup dalam analisis DPSIR ini secara umum mencakup pengelolaan eksisting persampahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Cimahi. Adapun data pendukung yang digunakan yaitu data timbulan sampah, data bank sampah, anggaran yang digunakan, upaya/inovasi pemerintahdan, serta data lainnya (tercantum dalam lampiran tabel utama nomor 50, 51, 62, dan 64). Berikut rangkuman dari hasil analisis DPSIR persampahan Kota Cimahi tahun 2019.

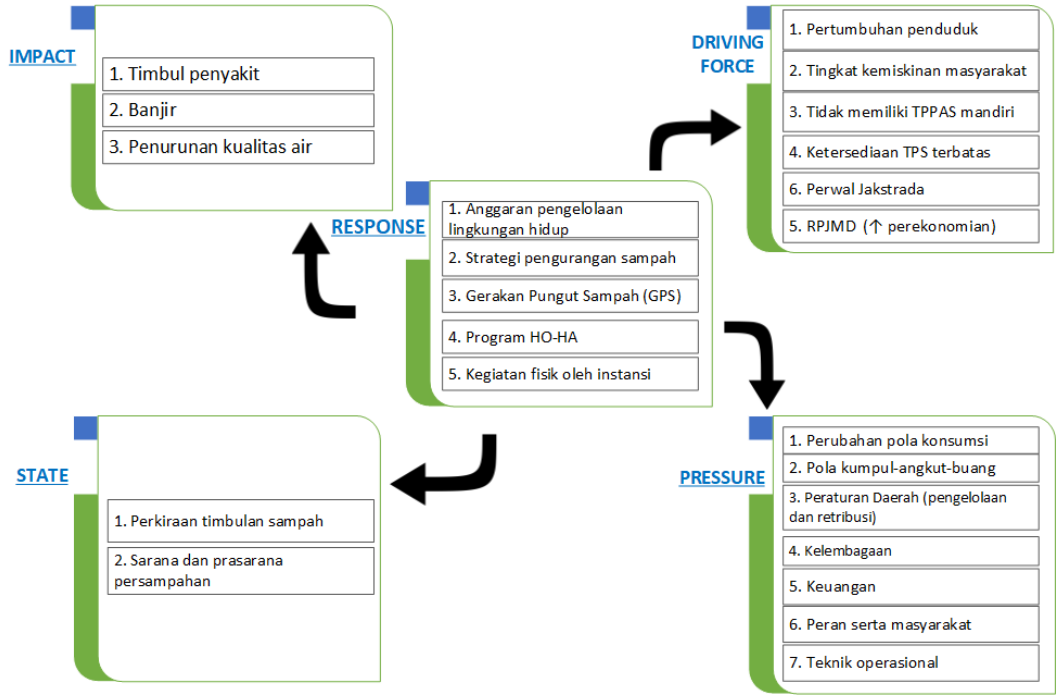

Gambar 3.8 DPSIR Persampahan

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

6. Tata Kelola

Sedikit berbeda dengan analisis isu-isu lingkungan sebelumnya, isu terakhir yang merupakan tata kelola ini membahas isu dalam pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan yang mencakup keuangan, kelembagaan, perizinan, dan sebagainya. Berikut ringkasan dari analisis tata kelola Kota Cimahi dengan metode DPSIR (Gambar 3.9).

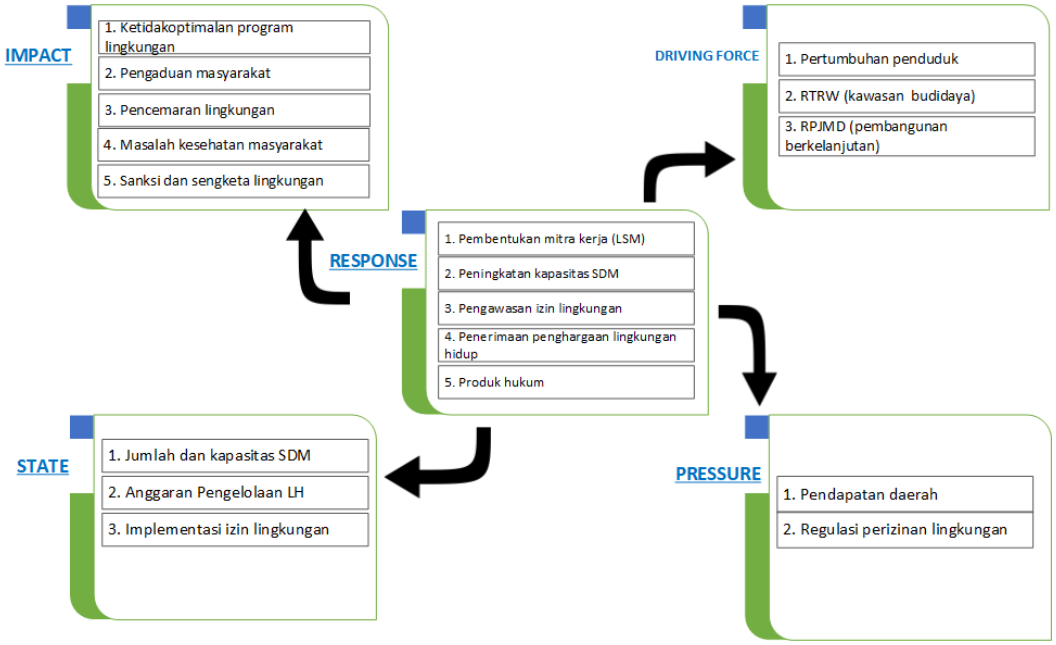

Gambar 3.9 DPSIR Tata Kelola

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Tabel 3.2 Rekapitulasi Hasil Analisis DPSIR

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Tata Guna Lahan	1.Pertumbuhan penduduk 2.Perda kawasan Bandung Utara 3.Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung 4.RPJMD Kota Cimahi	1.Pertumbuhan perumahan penduduk 2.Tumpang tindih lahan 3.Aktivitas industri 4.Izin lingkungan 5.Peningkatan timbulan limbah cair dan padat	1.Penggunaan lahan 2.Veegtasi dan flora fauna 3.Nilai indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) 4.Muka air tanah 5.Tumbulan limbah dan pengelolaannya	1.Kejadian bencana 2.Kerusakan lahan kering 3.Penurunan kualitas udara 4.Penurunan kualitas air 5.Kekurangan air bersih	1.Penambahan RTH dan penhijauan 2.Pengawasan pengelolaan limbah 3.Penggunaan filter cerobong (industri) 4.Normalisasi sistem drainase 5.Pengawasan penggunaan air tanah
Kualitas Air	1.SK MenLHK 300/2017: Kualitas sungai 2.Progra nasional: Citaruh Harum 3.PerMenKes 492/2010:	1.Risiko air limbah dan sampah 2.Beban pencemar sungai 3.Aktiivtas industri 4.Aktivitas domestik	1.Kualitas air sungai 2.Indeks kualitas air (IKA) 3.Kualitas air tanah	1.Kekurangan air 2.Risiko sanitasi tinggi 3.*Waterborne disease*	1.Pemantauan kualitas air sungai dan air tanah berkala 2.Penurunan beban pencemar sungai 3.Penambahan cadangan air

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
	Kualitas air minum 4.RPJMD Kota cimahi 2017-2022 5.Pertumbuhan penduduk	5.Kebutuhan air masyarakat 6.Perubahan tata guna lahan			4.Peningkatan sarana dan prasarana limbah dan sampah
Kualitas Udara	1.Pertumbuhan penduduk 2.Penggunaan kendaraan bermotor 3.RPJMD Kota Cimahi 2017-2022	1.Emisi bahan bakar 2.Peningkatan volume kendaraaan bermotor	1.Kualitas udara ambien 2.Indeks kualitas udara (IKU) 3.Indeks standar Pencemaran Udara (ISPU) 4.Kepadatan lalu lintas	1.Penyakit yang diderita masyarakat 2.Efek rumah kaca	1.Pemantauan kualitas udara ambien berkala dan uji emisi 2.Rekayasa lalu lintas 3.Penataan jalan
Risiko Bencana	1.Pertumbuhan penduduk 2.Daerah risiko becana berdasarkan topografi 3.Cakupan pelayanan persampahan 4.RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 5.Intensitas curah hujan	1.Perubahan tata guna lahan 2.Penurunan muka air tanah 3.Kondisi saluran drainase 4.Pola konsumsi dan kesadaran masyarakat 5.Riisko timbulan sampah 6.Peningkatan air larian (*run off*) 7.Risiko timbulan air limbah	1.Kejadian banjir 2.Kejadian kekeringan 3.Kejadian kebakaran 4.Kejadian tanah longsor	1.Kerugian materi akibat banjir 2.Kerugian materi akibat kekeringan 3.Kerugian materi akibat kebakaran 4.Kerugian materi akibat tanah longsor	1. Peraturan Daerah 4/2013, kegiatan fisik pemeliharaan, peningkatan pelayanan sampah → pencegahan banjir 2. Kajian cepat di lokasi bencana, koordinasi BPBD-warga, koordinasi BPBD-damkar → pengendali banjir 3. *Monitoring* kebocoran pipa, pengawasan limbah, pengawasan penggunaan air tanah → pencegahan kekeringan 4. Pendistribusian air bersih oleh PDAM → pengendalian kekeringan 5. Penetapan Satpol PP, damkar, dan

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
					bantuan logistik → pengendalian kebakaran 6. Penghijauan → pencegahan tanah longsor
Persampahan	1. Pertumbuhan penduduk 2. Tingkat kemiskinan masyarakat 3. Tidak memiliki TPPAS mandiri 4. Ketersediaan TPS terbatas 5. Perwal Jakstrada 6. RPJMD Kota Cimahi	1. Perubahan pola konsumsi 2. Pola kumpul-angkut-buang 3. Peraturan daerah (pengelolaan dan retribusi) 4. Kelembagaan 5. Keuangan 6. Peran serta masyarakat 7. Teknik operasional	1. Perkiraan timbulan sampah 2. Sarana dan prasarana persampahan	1. Timbulan penyakit 2. Banjir 3. Penurunan kualitas air	1. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup 2. Strategi pengurangan sampah 3. Gerakan Pungut Sampah (GPS) 4. Program HO-HA 5. Kegaitan fisik oleh instansi
Tata Kelola	1. Pendapatan asli daerah 2. RTRW (kawasan budidaya) 3. RPJMD Kota Cimahi	1. Pendapatan asli daerah 2. Regulasi perizinan lingkungan	1. Jumlah dan kapasitas SDM 2. Anggaran pengelolaan lingkungan hidup 3. Implementasi izin lingkungan	1. Ketidakoptimalan program lingkungan 2. Pengaduan masyarakat 3. Pencemaran lingkungan 4. Masalah kesehatan masyarakat 5. Sanksi dan sengketa lingkungan	1. Pembentukan mitra kerja (LSM) 2. Peningkatan kapasitas SDM 3. Pengawasan izin lingkungan 4. Penerimaan penghargaan lingkungan hidup → motivasi 5. Produk hukum

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

3.4 Penetapan Isu Potensial

Jika poin-poin berdasarkan hasil analisis DPSIR diurai berdasarkan kelompok isu tersendiri, maka kita dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi isu prioritas. Sebelum penetapan isu prioritas, hasil analisis DPSIR diurai menjadi daftar pendek (*shortlist*) isu lingkungan yang dinamakan sebagai isu potensial. Penetapan isu potensial ini juga didasari atas studi literatur yang dilakukan selama analisis. Selain itu, isu potensial ini juga mengacu pada Panduan Nirwasita Tantra dari Kementerian

Lingkungan Hidup (10 pilihan isu potensial) dan Kehutanan serta UU. No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu isu potensial termasuk ke dalam isu utama dalam analisis. Penetapan isu potensial ini juga didapat dari hasil penyimpulan, baik secara tersurat maupun tersirat dari analisis DPSIR (Tabel 3.2). Adapun uraian daftar isu yang perlu dipertimbangkan sebelum penentuan isu prioritas, yaitu:

1. Kualitas air sungai dan air tanah
2. Kuantitas air
3. Kualitas udara
4. Kepadatan lalu lintas
5. Persampahan
6. Penggunaan lahan
7. Sanitasi dan higiene perseorangan
8. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
9. Perubahan iklim
10. Bencana alam (banjir, kekeringan, kebakaran, tanah longsor)
11. Tata Kelola

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, daftar berupa *shortlist* isu tersebut ditetapkan atas dasar penjelasan dari analisis DPSIR untuk 6 isu utama, baik dari faktor pemicu (*driving force*), faktor penekan (*pressure*), kondisi eksisting (*state*), dampak yang terjadi (*impact*), maupun upaya yang telah atau perlu dilakukan (*response*). Setelah tersusunnya *shortlist* ini, kemudian isu prioritas dipilih dengan berdasar pada 12 kriteria yang akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

3.5 Kriteria Penetapan

Penetapan kriteria dilakukan sesuai dengan pedoman Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), UU Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan

kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga didapatkan kriteria sebagai berikut :

1. Kerusakan sumber daya alam, yakni seberapa besar kerusakan alam yang ditimbulkan dengan adanya isu lingkungan tersebut.
2. Dampak signifikan, kriteria ini membantu penetapan isu lingkungan potensial dengan menganalisis isu lingkungan yang memberikan dampak signifikan (penting) terhadap berbagai aspek lain, misalnya aspek sosial dan ekonomi.
3. Perhatian publik, isu lingkungan yang menjadi perhatian publik dan mendapat sorotan tajam dalam berbagai diskusi ilmiah, forum masyarakat, serta media massa menjadi salah satu parameter untuk ditetapkan sebagai isu lingkungan potensial.
4. Kinerja jasa ekosistem, yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) jenis layanan, yaitu:
   - Layanan fungsional (*provisioning services*): Jasa/produk yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumberdaya genetika, makanan, air dll.
   - Layanan regulasi (*regulating services*): Manfaat yang didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi, pengendalian dampak perubahan iklim dll.
   - Layanan kultural (*cultural services*): Manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
   - Layanan pendukung kehidupan (*supporting services*): Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya produksi biomasa, produksi oksigen, nutrisi,air dan lainnya.
5. Pemanfaatan sumber daya alam, yang berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 Pasal 12 menjelaskan bahwa Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup). Namun, apabila RPPLH sebagaimana dimaksud belum tersusun, pemanfaatan sumberdaya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
c) Keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat

6. Ancaman keanekaragaman hayati, kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap,menurun atau meningkat.Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan,kemerosotan dan kerusakan
7. Dampak dan resiko lingkungan, yaitu dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar; dapat diukur dari beberapa media lingkungan antara lain:tanah, air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan UUPPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b. Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yangdimaksud meliputi:
   - Perubahan iklim;
   - Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
   - Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
   - Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
   - Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
   - Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
   - Peningkatan risiko terhadap kesehatan dankeselamatan manusia
8. Perubahan iklim, seperti dijelaskan pada UU No.32 Tahun 2009 pasal 1 bahwa perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada

kurun waktu yang dapat dibandingkan. Kerentanan terhadap perubahan iklim adalah kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim) atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.

9. Daya dukung lingkungan, yakni kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya (UU.No.32 Tahun 2009). Daya dukung lingkungan juga merupakan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatua ktifitas sampai pada batas tertentu; Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih mampu mendukung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lain.
10. KLHS RTRW, merupakan salah satu instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang mana setiap daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (UU.No.32 Tahun 2009).
11. KLHS RPJMD, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen yang mampu memberikan rekomendasi dengan fokus utama: mengintegrasikan pertimbangan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan program pembangunan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 15). Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini

selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembagunan daerah, salah satunya dokumen RPJMD.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* di Indonesia terdiri dari 319 indikator yang mengacu indikator yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Aspek pembangunan berkelanjutan terdiri dari aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD. Maksud pembuatan KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Cimahi.

Pilar-pilar lingkungan yang tercantum dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) di antaranya air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan dan ekosistem daratan. Pemerintah daerah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memegang tanggung jawab sebesar 10 indikator TPB. Indikator tersebut umumnya adalah bagian dari pilar-pilar lingkungan. Isu-isu strategis yang tertuang dalam KLHS RPJMD Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

- Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

12. RPPLH Kota Cimahi, yaitu Rencana perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

    RPPLH Kota Cimahi ini bertujuan untuk memberikan indikasi arahan kebijakan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi didasarkan pada tantangan utama dan isu strategis lingkungan hidup di setiap ekoregion di wilayah Kota Cimahi. Indikasi arahan kebijakan tersebut meliputi indikasi arahan bagi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam; pemeliharaan dan

perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Seluruh indikasi arahan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekaligus pengendali pembangunan wilayah dan sektor di Kota Cimahi.

Berdasarkan dokumen RPPLH, rumusan tantangan utama dan isu strategis di Kota Cimahi sebagai berikut:

- Kualitas air sungai di Kota Cimahi sudah tercemar berat. Terkait kualitas air sungai, khususnya parameter kunci BOD, COD, dan TSS dengan potensi beban pencemar paling besar di ekoregion dataran vulkanik. Tingginya parameter-parameter kunci ini disebabkan oleh aktivitias domestik dan pertanian. Tantangan dan isu strategis untuk kualitas air sungai adalah mengembalikan fungsi sungai untuk dapat digunakan sebagaimana fungsi ekosistemnya.
- Status kualitas air sumur di ekoregion Kota Cimahi tidak layak dijadikan sebagai sumber air minum. Tantangan dan isu strategis terkait kualitas air sumur adalah investigasi penyebab kualitas air sumur tidak memenuhi baku mutu, diantaranya investigasi terhadap hubungan antara kualitas air sumur dengan air sungai, sanitasi warga dan aktivitas pertanian.
- Kondisi kualitas udara pada setiap parameter di Kota Cimahi masih tergolong baik, terkecuali parameter CO. Terkait kualitas udara dengan beban emisi pencemar CO_2 yang tinggi pada kawasan ekoregion Dataran Vulkanik. Sedangkan untuk emisi udara lainnya: HC, CO, SO_2, NO_X, PM_{10} juga tinggi di kawasan ekoregion Dataran Vulkanik, dan rendah di kawasan ekoregion Perbukitan Vulkanik dan Perbukitan Struktural.

- Persebaran RTH di Kota Cimahi dipengaruhi oleh jasa pendukung keanekaragaman hayati dan jasa pengaturan iklim. Jasa pengaturan iklm sedang (nilai IJE 0,3 -0,6) dan tinggi (nilai IJE 0,6 – 1,0) berpotensi sebagai RTH.

3.6 Analisis Isu Prioritas

Berdasarkan penetapan isu potensial dan kriteria penetapan, isu prioritas dipilih dengan menggunakan metode *scoring*. Semakin besar skor yang ditetapkan, artinya isu potensial tersebut terhadap kriteria semakin penting dan harus diperhatikan. Hasil analisis skor isu prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. Penetapan isu prioritas secara keseluruhan dilakukan sebanyak dua kali, berdasarkan analisis dan berdasarkan verifikasi serta klarifikasi dengan *stakeholders* terkait melalui *forum Group Discussion* (FGD). Berdasarkan tabel 3.3 tersebut, didapat 6 isu yang bernilai paling tinggi sehingga perlu dijadikan prioritas. Karena dalam pedoman Nirwasita Tantra 2019, isu prirotas dipilih 3 hingga 5 dari total *shortlist* isu potensial. Dalam hal ini, kualitas air dan kuantitas air dapat dilebur menjadi satu kesatuan isu yang sama. Sehingga isu prioritas yang didapat dari hasil analisis *scoring* ini yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas air
2. Persampahan
3. Penggunaan lahan
4. Limbah B3
5. Bencana alam

Tabel 3.3 *Scoring* Isu Prioritas

No.	Isu lingkungan potensial	Kriteria												Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Kualitas air sungai dan air tanah	5	5	3	5	5	5	5	2	5	5	5	5	55
2	Kuantitas air	4	5	5	5	4	3	4	2	4	5	5	3	49
3	Kualitas udara	4	4	4	3	4	3	5	4	4	3	2	5	45

No.	Isu lingkungan potensial	Kriteria												Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Kepadatan lalu lintas	3	3	4	5	3	2	3	3	4	1	2	1	34
5	Persampahan	4	5	5	4	3	3	5	3	4	4	4	5	49
6	Penggunaan lahan	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	58
7	Sanitasi masyarakat dan higiene perseorangan	4	5	3	4	4	1	4	1	4	2	2	2	36
8	Limbah B3	5	5	5	4	3	4	5	2	3	3	4	4	47
9	Bencana alam	5	4	5	3	3	4	5	4	3	4	4	4	48
10	Perubahan iklim	3	4	2	5	2	4	4	1	3	1	1	5	35
11	Tata kelola	3	5	4	5	2	1	5	1	3	3	3	3	38

(Sumber: Hasil Analisis, 2020)

Keterangan kriteria:

1	: Kerusakan SDA	5	: Pemanfaatan SDA	9	: Daya dukung lingkungan
2	: Dampak signifikan	6	: Ancaman keanekaragaman hayati	10	: KLHS RTRW
3	: Perhatian publik	7	: Dampak dan risiko lingkungan	11	: KLHS RPJMD
4	: Kinerja jasa ekosistem	8	: Perubahan iklim	12	: RPPLH Kota Cimahi

3.7 Verifikasi dan Klarifikasi

Isu prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan analisis dirasa tidak cukup jika tidak mempertimbangkan masukan atau penilaian langsung dari *stakeholders*. *Stakeholders* yang dimaksud mencakup dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, dinas/instansi terkait di lingkungan Kota Cimahi, pemangku kepentingan (akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, filantropi, masyarakat adat, dan lembaga masyarakat lainnya) serta narasumber penyusun KLHS sebagaimana terlampir dalam daftar absensi kegiatan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, masyarakat, komunitas peduli lingkungan, akademisi, dan sebagainya. Verifikasi dan klarifikasi untuk membahas isu prioritas DIKPLHD tahun 2020 ini dilakukan FGD melalui *Video Conferences*. Tujuan diadakannya FGD ini adalah untuk membuka kemungkinan berpendapat mengenai isu lingkungan yang terjadi menurut sudut pandang *stakeholders*. FGD ini juga diharapkan dapat

meyakinkan tim penyusun dalam menetapkan isu-isu yang memang harus diprioritaskan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2020 ini diawali dengan pembukaan oleh Bapak Mochamad Ronny sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi hasil analisis DPSIR 6 isu utama lingkungan oleh tim penyusun DIKPLHD. Selanjutnya tahap utama ialah diskusi, tanya-jawab, dan penyampaian pendapat dari masing-masing perwakilan partisipan. Dari hasil diskusi, disimpulkan bahwa isu prioritas yang terpilih antara lain:

1. Tata guna lahan
2. Kualitas dan kuantitas air
3. Persampahan
4. Kualitas udara

3.8 Penetapan Isu Prioritas

Penetapan isu prioritas telah dilakukan dengan dua cara, berdasarkan analisis dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Tahap terakhir yaitu melakukan *cross-check* antara 2 hasil penetapan isu prioritas tersebut. Jika diurai kembali, isu prioritas yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Penetapan Isu Prioritas

No	Hasil analisis	Verifikasi dan klarifikasi
1	Kualitas dan kuantitas air	Tata guna lahan
2	Persampahan	Kualitas dan kuantitas air
3	Penggunaan lahan	Persampahan
4	Limbah B3	Kualitas udara
5	Bencana alam	-

(Sumber: Hasil Analisis dan Diskusi, 2020)

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, penetapan akhir dilakukan dengan menggabungkan antara hasil analisis dan verifikasi. Dengan mempertimbangkan keterkaitan antara faktor pemicu (*driving force*), faktor penekan (*pressure*), kondisi eksisting (*state*), dampak (*impact*), dan upaya

(response), isu prioritas yang ditetapkan dalam DIKPLHD tahun 2020 ini adalah:

1. Tata guna lahan
2. Kualitas dan kuantitas air
3. Kualitas udara
4. Persampahan

Isu berupa limbah B3 dan bencana alam dapat dimasukkan bersama ke dalam isu lainnya, mengingat di setiap analisis DPSIR, upaya yang dilakukan berlaku untuk mengatasi faktor pemicunya, faktor penekannya, kondisi/status eksistingnya, dan juga dampaknya. Isu limbah B3 dan bencana alam tersebut sangat memungkinkan termasuk ke dalam faktor-faktor tersebut dari isu prioritas yang telah ditetapkan.

BAB IV

INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola lingkungan seperti *Cimahi Zero Waste City*, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Digital dan inovasi lainnya.

BAB IV

INOVASI DAERAH

Dalam penyusunan inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah, fokus inovasi pengelolaan daerah diarahkan pada isu lingkungan prioritas yang telah dibahas pada bab 3, yakni penentuan isu prioritas lingkungan hidup daerah, dimana isu lingkungan prioritas yang sudah ditetapkan adalah:

1. Tata Guna Lahan
2. Kualitas dan Kuantitas Air
3. Kualitas Udara
4. Persampahan

Secara ringkas, inovasi lingkungan Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.

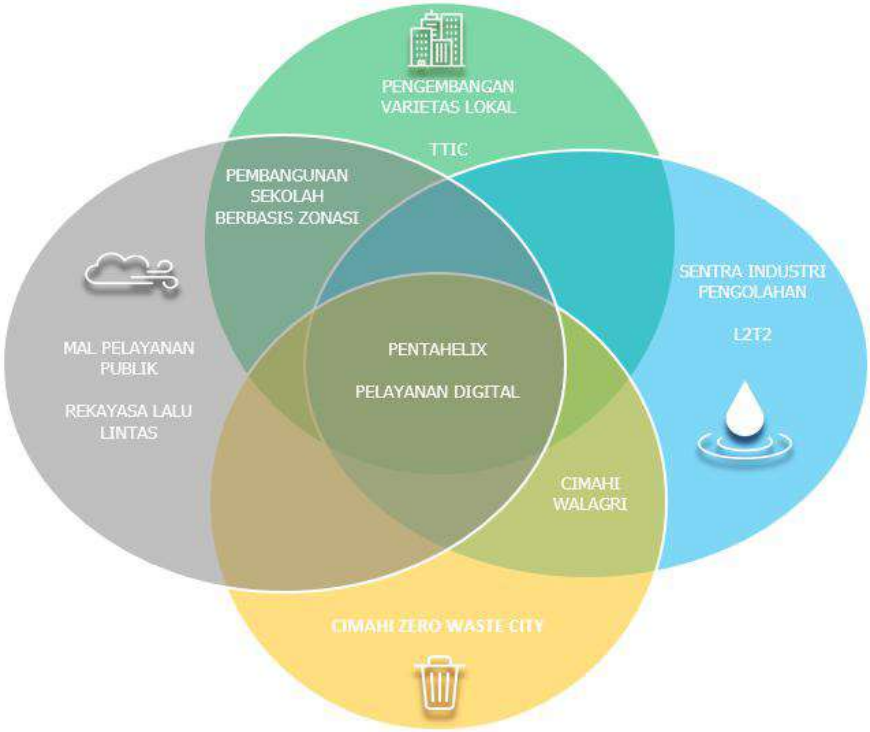

Gambar 4.1 Pemetaan Inovasi Berdasarkan Isu Lingkungan Prioritas Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019)

4.1 Mall Pelayanan Publik

Peningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui mal pelayanan publik demi terciptanya pelayanan prima dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan pemerintah khususnya di Kota Cimahi. Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah terjangkau, aman dan nyaman.

Gambar 4.2 Peninjauan Proses Pembangunan MPP oleh Walikota Cimahi dan Design Mal Pelayanan Publik

Mal pelayanan publik dibangun untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi, dengan memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Dilihat dari aspek lingkungan, Mal Pelayanan Publik diperkirakan dapat menekan angka kualitas udara di Kota Cimahi. Bergabungnya instansi pusat

dan provinsi yang bergabung dalam MPP Kota Cimahi akan mengurangi mobilitas kendaraan dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari satu tempat ke tempat lainnya, sehingga menjadi salah satu penyumbang sumber emisi di Kota Cimahi. Saat ini pembangunan MPP telah memasuki konstruksi tahap ke-dua, dan direncanakan tahap konstruksi ini akan selesai pada akhir tahun 2020, sehingga pelayanan MPP dapat diselenggarakan pada awal tahun 2021.

Tabel 4.2 Daftar Instansi Pusat dan Provinsi yang akan Bergabung di Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi

No.	Instansi	Jenis Layanan
1	Kepolisian Resort Kota Cimahi	Layanan Kepolisian : perpanjangan SIM, SKCK
2	Kantor Agraria dan Tata Ruang BPN Kota Cimahi	Layanan Konsultasi Pertanahan
3	KADIN Kota Cimahi	Konsultasi Usaha dan Pembuatan KTA
4	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cimahi	Penerbitan NPWP dan SKT
5	BPJS Ketenagakerjaan	Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
6	BPJS Kesehatan	Pendaftaran BPJS Kesehatan
7	PDAM Tirta Raharja	Jasa Pelayanan Air Minum
8	Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi (Samsat)	Layanan Pajak Kendaraan
9	DPMPTSP Provinsi Jawa Barat	Layanan OSS dan KBU
10	Kantor Pos Cabang Kota Cimahi	Layanan Postal
11	Kantor Imigrasi	Layanan Passport
12	Kejaksaan Negeri Kota Cimahi	Layanan Konsultasi Hukum
13	PLN Kota Cimahi	Layanan Kelistrikan
14	Kantor Bea Cukai	Layanan Bea Cukai
15	Badan POM	Layanan Rekomendasi/Sertifikat
16	PT. Taspen	Layanan Pensiun
17	BJB Kota Cimahi	Layanan Perbankan dan Pembayaran

(Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2019)

4.2 Rekayasa Lalu Lintas

4.2.1 Jaringan Trayek Perkotaan Baru

Penambahan jaringan trayek perkotaan di Kota Cimahi didasari oleh Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 551.2/Kep.1611-Dishub/2019 tentang

Jaringan Trayek Perkotaan di Wilayah Kota Cimahi. Jaringan trayek perkotaan di Kota Cimahi dilakukan untuk memberikan pelayanan jasa angkutan umum kepada masyarakat, khususnya untuk menunjang operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi yang berada di Jalan Aruman yang selama ini belum terlayani jaringan trayek perkotaan. Adanya pelayanan jasa angkutan umum diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pengunjung MPP sekaligus juga dapat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat, sehingga dapat mengurangi besaran pencemaran udara di Kota Cimahi.

Gambar 4.3 Peresmian Jaringan Trayek Perkotaan Baru oleh Walikota Cimahi

4.2.2 Mudik Gratis

Fenomena pulang kampung (mudik) telah menjadi budaya di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 551.2/Kep.58-Dishub/2019 tentang Panitia Pelepasan Angkutan Mudik Gratis Lebaran Tahun 2019, pelaksanaan Mudik Gratis Lebaran Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas pengguna jalan dan mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi pada periode angkutan arus mudik lebaran guna menjamin kelancaran arus lalu lintas, serta membantu warga Kota Cimahi yang akan melakukan mudik melalui program pelaksanaan mudik gratis lebaran. Ribuan kendaraan memadati ruas jalan menimbulkan kemacetan, dan meningkatkan polusi udara dari emisi kendaraan bermotor. Adanya mudik gratis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dapat mengurangi kepadatan kendaraan dan mengurangi polusi udara.

Gambar 4.4 Pelepasan Peserta Mudik Gratis Tahun 2019

4.2.3 *Car Free Day* (Hari Bebas Kendaraan Bermotor)

Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 551.11/Kep.1299-Dishub/2019 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *CAR FREE DAY* dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan *CAR FREE DAY* di Kota Cimahi. Kegiatan *car free day* mengurangi jumlah pemakaian kendaraan bermotor di Kota Cimahi, yang berdampak pada berkurangnya polusi udara yang berasal dari gas buang kendaraan.

Pelaksanaan *Car Free Day* di Kota Cimahi dilakukan setiap hari Minggu dengan dilakukan penutupan jalan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan

10.00 WIB yang berlokasi di ruas Jalan Raden Demang Hardjakusumah. Ketentuan dan tata tertib pada *Car Free Day*, masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan di kawasan CFD, menjaga kebersihan dan ketertiban di kawasan CFD serta penggunaan suara musik dan radio tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan.

Gambar 4.5 Kegiatan Car Free Day

Selain itu, kegiatan car free day juga seringkali dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya adalah peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2019 yang juga dilaksanakan di area CFD. Kegiatan ini diikuti oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi. Masyarakat yang mengikuti CFD di edukasi untuk mengganti kantong plasik dengan kantong belanja yang ramah lingkungan.

4.2.4 Pelaksanaan Sistem Satu Arah

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Cimahi diperlukan upaya manajemen rekayasa lalu lintas melalui penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di sejumlah ruas jalan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas, termasuk di kawasan Dustira yang meliputi Jalan Baros, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Dustira. Sistem Satu Arah ini berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor: 551/Kep.906-Dishub/2019 tentang Pelaksanaan Sistem Satu Arah di Kawasan Dustira.

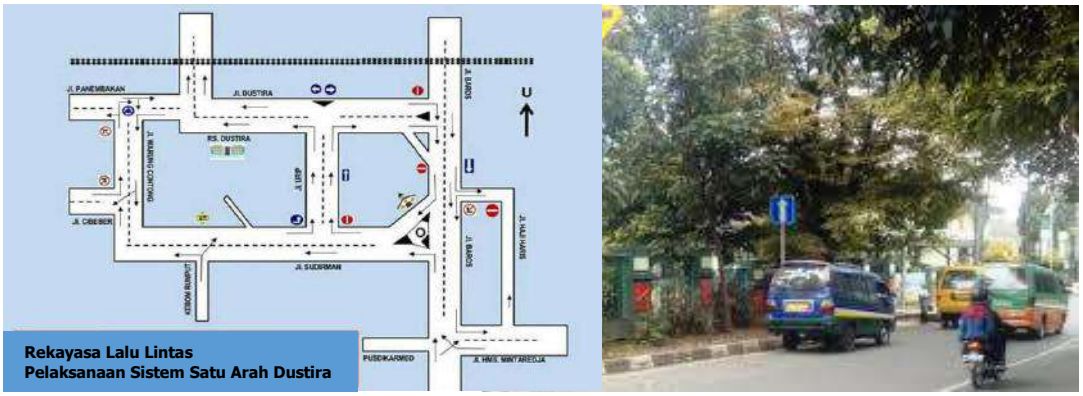

Gambar 4.6 Pelaksanaan Sistem Satu Arah di Kawasan Dustira

4.2.5 Kawasan Tertib Lalu Lintas

Sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, kawasan tertib lalu lintas dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Cimahi. Keterangan ruas jalan dan panjang ruas jalan yang diberlakukan kawasan tertib lalu lintas tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor: 551/Kep.421-Dishub/2019 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Cimahi.

Gambar 4.7 Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tertib Lalu Lintas

4.3 Cimahi Zero Waste City

Cimahi Zero Waste City merupakan gerakan pengurangan sampah yang telah dicanangkan di Kota Cimahi sejak tahun 2017. Kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan edukasi pemilahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pemanfaatan sampah terpilah yang dilakukan di permukiman warga, sekolah, maupun instansi pemerintah. Persentase pengurangan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 28,99% atau sebesar 3.115,59 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 total sampah tereduksi yaitu 10.743,69 ton/tahun, sementara pada tahun 2019 sampah tereduksi 13.859,29 ton/tahun, dengan timbulan sampah yang belum tertangani berkurang yang semula 5% pada tahun 2018 menjadi 3,94% pada tahun 2019. Neraca pengelolaan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Gambar 4.8.

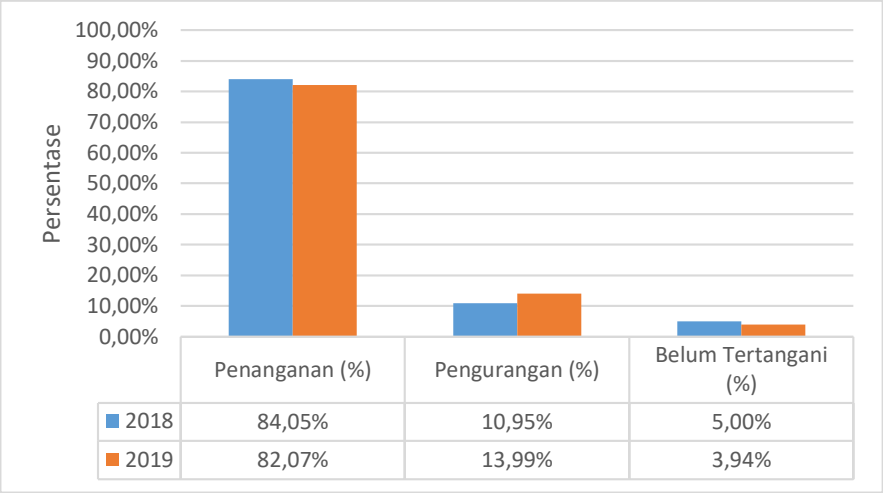

	Penanganan (%)	Pengurangan (%)	Belum Tertangani (%)
2018	84,05%	10,95%	5,00%
2019	82,07%	13,99%	3,94%

Gambar 4.8 Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi Tahun 2018-2019

Untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPAS Sarimukti, sepanjang tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Cimahi menambah sarana prasarana pengelolaan sampah dengan membangun Pusat Daur Ulang Sampah di RW 05 Kelurahan Citeureup, TPS 3R Brigif Kujang 15 di RW 23 Kelurahan Baros, dan meningkatkan kapasitas pengolahan TPST RW 31 Melong. Pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah ini didahului dengan pelaksanaan *door to door education* kepada warga masyarakat yang berada di wilayah layanan sarana pengolahan tersebut, agar keberadaan sarana prasarana pengolahan sampah menjadi efektif.

Gambar 4.9 Sarana Prasarana Persampahan Terbangun Tahun 2019

4.3.1 Siswa Bertumbler

Merupakan Program yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang dilkukan dengan cara memberikan sosialisasi surat edaran dan sosialisasi secara langsung agar sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi mengharuskan siswa dan warga sekolah membiasakan penggunaan tempat minum dan membawa kotak makan dan jajan sendiri dari rumah, sehingga dapat mengurangi kemasan minuman dan pembungkus makanan/jajanan disekolah. Pihak sekolah menyediakan air isi ulang di kelas atau berkoordinasi dengan pihak kantin agar tidak lagi menjual air minum kemasan tetapi menjual air minum isi ulang menggunakan galon. Siswa juga tetap diperbolekan jajan di lingkungan sekolah dengan catatan membawa sendiri kotak untuk makanan.

Gambar 4.10 Sosialisasi dan Pelaksanaan Gerakan Siswa Bertumbler

4.3.2 HO-HA

Program ini merupakan program yang dilakukan di masyarakat dalam penjadwalan pengangkutan sampah. Sesuai dengan amanat perda pengelolaan sampah, bahwa sampah yang dihasilkan disumber sampah harus dipilah sejak dari sumber sampah, sehingga mencegah terjadinya

tercampur kembali sampah dan pemberian edukasi kepada masyarakat agar mau memilah, maka ditetapkan hari pengangkutan khusus sampah organik dan sampah an-organik secara terpisah. Di tahun 2019 program Hari Organik – Hari Anorganik mulai diterapkan di 2 RT di Kelurahan Pasirkaliki dan sedang melakukan uji coba di daerah layanan TPS3R Brigif 15 Kujang. Sampah organik dimanfaatkan oleh petugas sampah setempat sedangkan untuk sampah anorganik bekerja sama dengan Bank Sampah Induk Kota Cimahi.

Gambar 4.11 Pelaksanaan Hari Organik Hari Anorganik

4.3.3 KTT Bank Sampah

Bank Sampah Induk Kota Cimahi bekerjasama dengan Twin Tulipware yang berada di Kota Cimahi dalam program KTT ini. Program ini adalah salah satu cara untuk melakukan pengelolaan sampah anorganik yang banyak dihasilkan di masyarakat. Untuk mengikuti program ini, masyarakat harus menjadi nasabah Bank Sampah terlebih dahulu. Masyarakat mengumpulkan sampah anorganik dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan untuk mendapatkan poin, kemudian poin tersebut dapat ditukarkan untuk menebus barang yang tercantum didalam program antara lain Tumbler, Kotak makan, dll dengan harga subsidi (diskon 50%).

Program ini telah berjalan selama 6 periode, sejak pertengahan tahun 2018. Satu Periode berlangsung selama 3 bulan. Masing-masing periode memiliki ketentuan dan jenis barang yang berbeda-beda. Manfaat dari program ini adalah masyarakat menjadi lebih perduli terhadap sampah anorganik yang dihasilkan, karena sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Selain itu barang yang terdapat dalam program KTT ini juga jadi membiasakan masyarakat untuk menggunakan tempat minum dan tempat makan sendiri dari rumah.

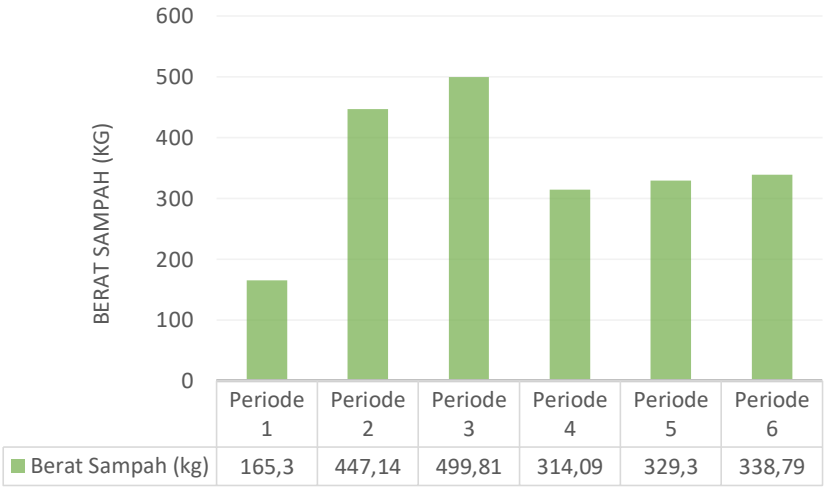

Gambar 4.12 Sampah Terkumpul di Kegiatan KTT

Pada periode 1 KTT, ada 4 jenis sampah yang bisa dikumpulkan yaitu bekas Kemasan Kopi, Kresek, Botol Mineral (PET) dan Minuman Cup. Dari Periode 1 berhasil dikumpulkan sebanyak 55.780 pcs sampah. Di Periode 2 KTT, jenis sampah yang bisa dikumpulkan menjadi bertambah menjadi 5 jenis sampah, ditambah dengan bekas sedotan, terkumpul sebanyak 117.335 pcs sampah. KTT Periode 3 masih dengan jenis sampah yang sama dengan KTT 2, berhasil dikumpulkan sampah sebanyak 140.772 pcs sampah. KTT Periode 4, jenis sampah yang dikumpulkan ada 7 jenis, ditambah dengan kemasan minyak goreng dan kemasan produk unilever (bekerjasama dengan unilever). Dari KTT periode 4 sampah yang dikumpulkan sebanyak 314,09 kg.

KTT periode 5 masih dengan 7 jenis sampah berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 91.420 pcs sampah, dan pada periode 6 KTT sampah yang dikumpulkan sebanyak 87.510 pcs sampah. Dari KTT Periode 3 ke KTT periode 4 dan seterusnya dapat dilihat bahwa jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan jumlahnya menurun, hal tersebut dikarenakan berkurangnya jumlah sampah jenis PET, minuman cup dan kresek, yang dipengaruhi oleh kebiasaan membawa tempat minum dan kantong belanja sendiri.

Gambar 4.13 Jenis Sampah dan Barang di Kegiatan KTT

4.3.4 Sosialisasi Pasar Rakyat

Peserta kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar Rakyat berasal dari 4 Pengelola Pasar dan perwakilan dari 4 pedagang Pasar yaitu Pedagang dari

Pasar Atas Baru, Pedagang dari Pasar Cimindi , Pedagang dari Pasar Melong dan Pedagang dari Pasar Citeureup. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar Rakyat ini mengundang 3 (tiga) Narasumber yaitu:

1. Lik Gayantini Ari, S.E., MBA (*Business Mentor School Business of Management* – ITB), menyampaikan materi pentingnya Kolaborasi antara Pengelola Pasar dan Para pedagang dalam rangka membuat sebuah Pasar Rakyat menjadi ramai oleh pengunjung, selain itu beliau pun menyampaikan pentingnya sebuah kreatifitas dalam mengelola sebuah Pasar Rakyat.
2. Raden Roro Lucyani (Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi), menyampaikan materi tentang Pentingnya Kebersihan di Pasar Rakyat. Beliau menyampaikan bahwa Konsumen sekarang sudah pintar mereka akan berbelanja ke sebuah Pasar Rakyat apabila Pasar tersebut dalam keadaan bersih dan aman.
3. Mochamad Ronny (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), menyampaikan materi tentang cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah , beliau menyampaikan bahwa sampah sebetulnya dapat bermanfaat apabila tahu Ilmunya tentang cara mengelola sampah

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) sehingga dapat merubah pola pikir (*mindset*), kesadaran (*awareness*), dan perilaku (*behaviour*) para pengelola dan pedagang pasar dalam mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, dan nyaman di Kota Cimahi.

Gambar 4.14 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar

4.4 Pentahelix

Kekuatan pembangunan suatu negara atau wilayah perlu didukung oleh semua elemen. Percepatan pembangunan tak bisa dilakukan satu pihak. Maka konsep pembangunan 'pentahelix', di mana unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha (kolaborasi *Academician, Business, Community, Government, Media* / ABCGM) kelima unsur tersebut harus kompak, saling support, untuk membangun Citarum yang harum, bersih, sehat, dan lestari dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 dapat mengikuti model Pentahelix yang melibatkan elemen *Government* (G), *Academics* (A), *Business* (B), *Community* (C), dan *Media* (M) atau disingkat ABCGM.

Visi dari Forum Sinergi Pentahelix adalah menjadi rumah partisipasi bagi hadirnya harmoni sinergi dalam merawat alam. Tujuan kegiatan adalah untuk memperkenalkan konsep industri bersih kepada pelaku usaha, selanjutnya membuat kesepakatan lisan dan tertulis untuk menjalankan konsep industri bersih.

Komitmen unsur pemerintah (*government*) sebagai regulator memastikan aturan berjalan dengan adil. Serta dukungan dari elemen akademisi, media

dan komunitas untuk turut berperan memberi dukungan dan gagasan solutif maupun hal yang bersifat korektif.

Gambar 4.15 Gerakan Komitmen Bersama Forum Sinergitas Pentahelix Industri Bersih Kota Cimahi

4.4.1 GNPDAS

Kegiatan GNPDAS ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam memlulihkan hutan dan lahan untuk penyelamatan sumber daya air, produktivitas lahan, perubahan iklim dan pencegahan bencana hidro meteorologi. Diharapkan kegiatan ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien serta memperhatikan pemanfaatannya untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS) dilaksanakan di Taman Keanekaragaman Hayati, Cimenteng, Cimahi Utara. Pada kegiatan ini dilakukan penanaman bibit durian kamajaya oleh Wali Kota Cimahi, Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Lembaga Masyarakat. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk konservasi lahan dan memperbaiki kualitas serta kuantitas air di Kota Cimahi.

Tabel 4.3 Lokasi Penanaman GNPDAS

No	Lokasi	Luasan (ha)	Komunitas
1	RW 18 Lebak Saat	0,48	Gerakan Pungut Sampah
2	Penambahan Taman Kehati	0,93	Karang Taruna
3	RW 8 Cibeber	0,9	Forum Penanggulangan Risiko Bencana
4	RW 5 Citeureup PDU (Pusat Daur Ulang)	0,22	Earth Hour
5	RW 12 Cipageran	0,86	Pramuka
6	RW 21 Cipageran	0,2	Rumah Zakat
7	RW 21 Cipageran	0,55	Laskar Merah Putih
8	RW. 07 Kelurahan Cibeber	0,08	GreeOne Go Green
	Total Luasan	**4,22**	

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019)

Gambar 4.16 Pelaksanaan Kegiatan GNPDAS Bersama Wali Kota Cimahi

4.4.2 Gerakan Pungut Sampah

Kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh sekelompok komunitas, yang merupakan gabungan Ikatan Alumni (IKA) setingkat SMA di Kota Cimahi, antara lain, IKA SMAN 1 CIMAHI, IKA SMAN 2 CIMAHI, IKA SMAN 3 CIMAHI, IKA SMAN 4 CIMAHI, IKA SMAN 5 CIMAHI, IKA SMKS PUSDIKHUBAD, IKA TUT WURI HANDAYANI. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan di lokasi Alun-alun Kota Cimahi dan sepuratan Jl. Jend. Amir Mahmud, akan tetapi melihat lokasi lapangan Brigif yang setiap minggu dijadikan ajang kumpul masyarakat melakukan aktifitas seperti olahraga dan niaga dan jumlah pengunjung yang sangat banyak setiap minggunya, maka diputuskan untuk melakukan kegiatan GPS ini setiap 2 minggu sekali di Lokasi lapangan Brigif Kota Cimahi dan di Lokasi Taman Kartini yang setiap hari minggu ramai pengunjungnya.

Saat ini kegiatan GPS melibatkan berbagai komunitas lingkungan dan pecinta alam dan juga dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, bakhan ada juga keterlibatan dari luar Kota Cimahi, dan masih menerima juga relawan yang ingin bergabung dalam kegiatan ini. Target sasaran kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat yang berada di lokasi kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya memunguti sampah yang berceceran di lokasi akan tetapi juga memberikan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemantaan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, melalui Bank Sampah, kreasi Daur Ulang Sampah, *Ecobrick*, Lubang Biopori, Tukar Sampah. Selain itu disediakan juga ruang edukasi anak.

Gambar 4.17 Kegiatan Gerakan Pungut Sampah

4.4.3 Solar STBM

Sesuai dengan SDG's tujuan pembangunan berkelanjutan 6 yaitu menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan. Dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu:

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*);
2. Peningkatan kebutuhan sanitasi (*demand creation*);
3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi (*supply improvement*);

Kegiatan yang dilakukan pada Program Solar STBM berlokasi di Kelurahan Cibeber pada tahun 2019 diantaranya adalah:

a. Pelatihan Wirausaha Sanitasi
b. Penantanganan Komitmen
c. Pembentukkan Tim Verifikasi

Wirausaha sanitasi juga melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Baznas dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) telah melakukan CSR pembuatan jamban sehat dan tangki septik pribadi. Sampai dengan tahun 2019 sudah terbangun 269 unit jamban sehat dan tangki septik dengan data:

Tabel 4.4 Jumlah Unit Jamban dan Tangki Septik

No	Kelurahan	Akses KK Terlayani (KK)	
		Baznaz	BJB
1.	Cipageran	33	196
2.	Cibeber	15	19
3.	Karangmekar	5	0

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2019)

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Program STBM memiliki indikator outcome dan output. Indikator *outcome* STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku. Sedangkan indikatoroutput STBM adalah sebagai berikut:

a. Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
b. Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
c. Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
d. Setiap rumah tangga mengelola sampah dan limbahnya dengan benar.

Gambar 4.18 Pelaksanaan Kegiatan Solar STBM

4.4.3.2 Goyang Gotik

GOYANG GOTIK adalah akronim dari Gotong Royong Nabung Kanggo Tangki Septik. Warga yang sudah terpicu dan ingin membangun tangki septik, menabung dengan cara mengumpulkan sampah yang masih bernilai guna. Tahun 2019 dilakukan perekrutan anggota yang ingin mengumpulkan sampahnya untuk selanjutnya ditabung untuk membuat tangki septik. Pengumpulan sampah bekerja sama dengan Bank Samici.

Gambar 4.19 Pelaksanaan Kegiatan Goyang Gotik

4.5 Cimahi Walagri

4.5.1 Mantri Kamalir

Pendataan saluran yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berisi data kondisi saluran (panjang, lebar, tinggi), identitas saluran, kriteria saluran dan pendokumentasian saluran. Permasalahan yang terjadi di saluran seperti adanya sedimentasi, sampah, crossing dan kapasitas saluran yang tidak memenuhi dilihat dari bahan saluran maupun kapasitas yang tidak sesuai dengan debit saluran.

Data saluran tersebut dibuat menjadi data base yang selanjutnya akan di gabung dengan data GIS menjadi data spasial.

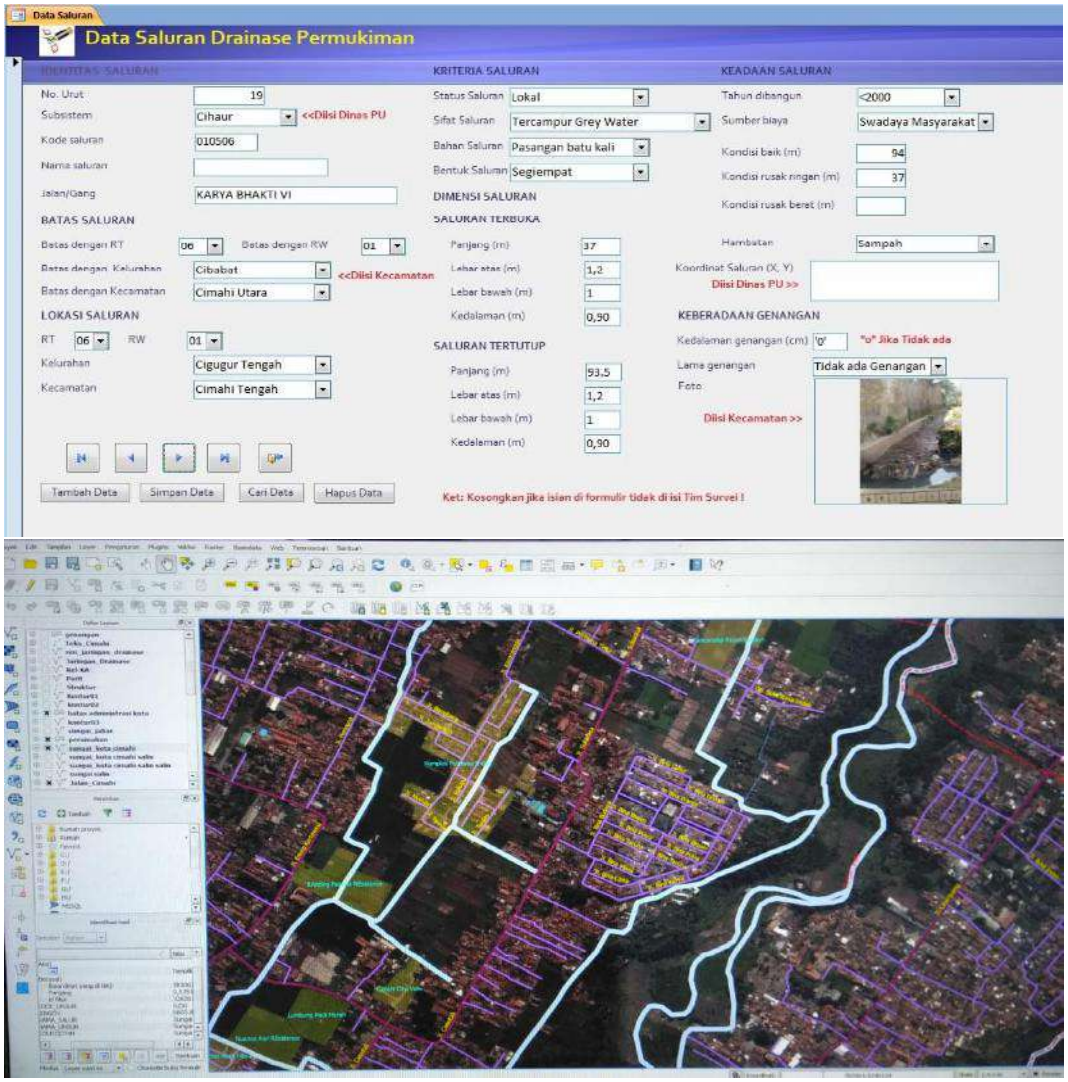

Gambar 4.20 Tampilan Data Saluran Drainas dan *Geographic Information System* (GIS) Kondisi Saluran Kota Cimahi

4.5.2 Griya Plus/Rutilahu

GRIYA artinya rumah, sedangkan **PLUS** adalah akronim dari **P**astikan **L**ayak huni, **U**payakan **S**ehat. Mewujudkan kondisi rumah masyarakat yang masuk kategori **RU**mah **TI**dak **LA**yak **Hu**ni (RUTILAHU) menjadi rumah yang tidak hanya layak huni saja tetapi dapat lebih menjadikan penghuninya sehat. Salah satu syarat hunian layak huni diantaranya adalah tersedianya sanitasi yang baik, dengan adanya sarana pengolahan air limbah domestik (septictank). Tahun 2019 Dinas Pertamanan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah memperbaiki 1600 unit rumah tidak layak

huni. Dengan adanya inovasi griya plus, fasilitas sanitasi masyarakat akan membaik dan berdampak positif terhadap kualitas dan kuantitas air. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Jamban Keluarga merupakan kerjasama Dinas Pertamanan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dengan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR).

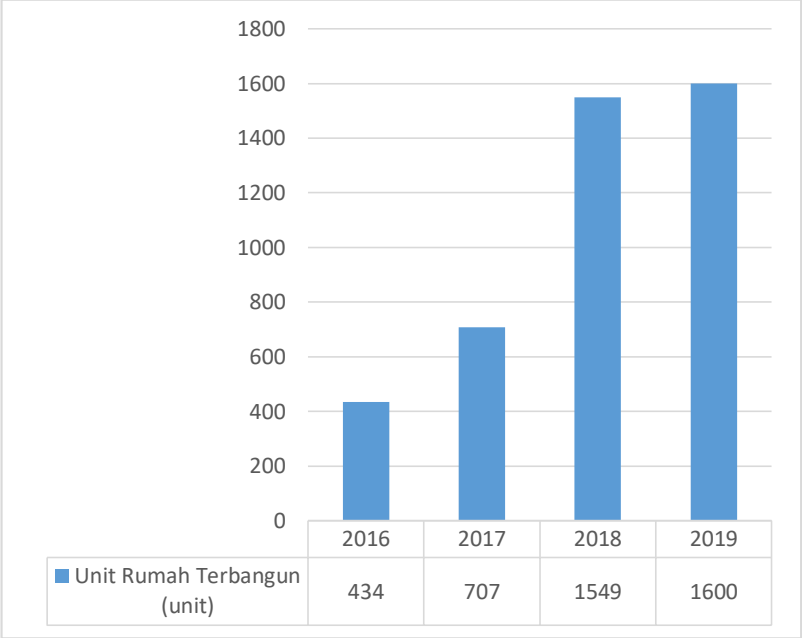

Gambar 4.21 Data Rumah Tinggal Layak Huni Terbangun Kota Cimahi Tahun 2016-2019

Gambar 4.22 Proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

4.6 Pelayanan Digital

4.6.1 Sitarung

Tingkat kepadatan Kota Cimahi Tahun 2015 adalah 145.92 jiwa/Ha. Dari sisi demografi, Kota Cimahi saat ini telah berkembang menjadi salah satu kota terpadat di Jawa Barat. Meningkatnya jumlah penduduk telah mendorong banyak terjadinya alih fungsi lahan, peningkatan arus transportasi, aktivitas industri, perdagangan dan perkembangan fisik di Kota Cimahi.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat maka akan mempengaruhi pola pikir dan cara kerja manusia khususnya untuk mendapatkan informasi secara tepat dan akurat, salah satu informasi tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota CimahiTahun 2012-2032 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2013. Untuk menjawab hal tersebut maka perlu dibuat sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) yang disebut sistem informasi penataan ruang yang dapat menampilkan RTRW Kota Cimahi dan rencana rincinya berbasis web.

SIG merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan data dan informasi geografis berikut atributnya -atributnya. Data yang tersaji dalam SIG terdiri dari data spasial dan data atribut. Data tersebut diolah dengan operasi tertentu dengan menampilkan dan menganalisa data melalui SIG.

Informasi geospasial kini menjadi suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial. Untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan menyebarluaskan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang Informasi Geospasial, baik pusat maupun daerah sebagai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun

2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Akses ke laman ini adalah www.sitarung.cimahikota.go.id.

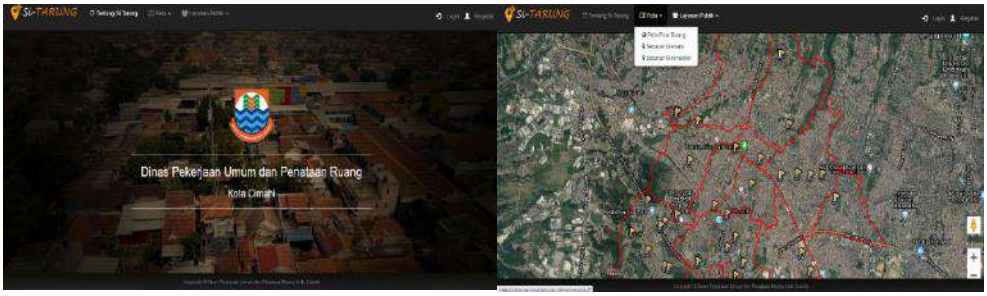

Gambar 4.23 Halaman Depan Sitarung

4.6.2 Pengembangan Modul Sistem Informasi Lingkungan

Sistem Informasi Lingkungan (SIL) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan modul SIL yaitu pelayanan pemeriksaan air di UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Cimahi agar dapat dilakukan secara online sampai mendapatkan hasil uji laboratorium. Dilakukannya pelayanan uji air secara online, akan meminimalkan mobilitas penggunaan kendaraan sehingga mengurangi emisi gas buang dari kendaraan.

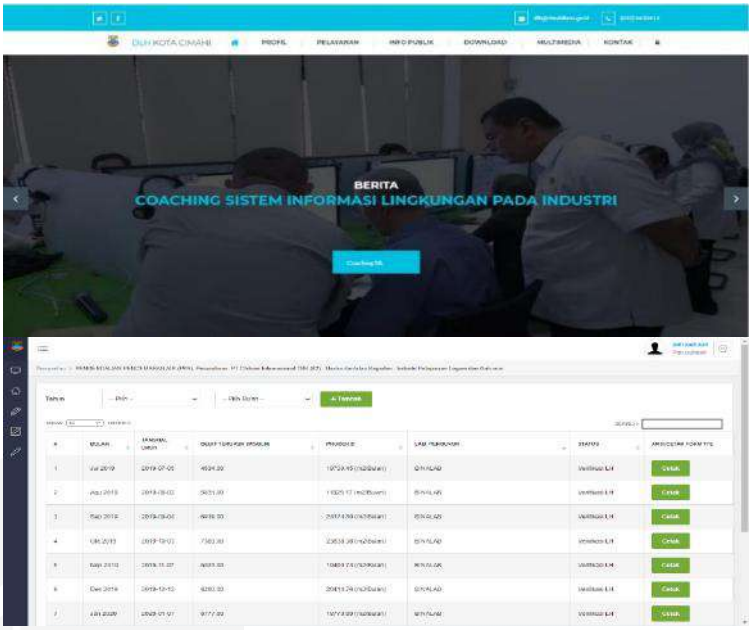

Gambar 4.24 Sistem Informasi Lingkungan

Kota Cimahi memiliki beragam industri seperti tekstil, pelapisan logam, industri cat dan lainnya. Pemantauan lingkungan berkaitan dengan limbah yang dihasilkan oleh industri harus dilaporkan secara berkala kepada kepala daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Laporan monitoring dilaporkan berbasis online di website www.dlh.cimahikota.go.id , sehingga mengurangi timbulan sampah kertas. Konsep paperless diterapkan dalam upaya meminimalisir sampah yang diangkut ke pembuangan akhir.

Dalam praktiknya, pengguna website perlu beradaptasi dengan peralihan sistem pelaporan yang semula manual menjadi berbasis online. Sehingga, coaching dirasa perlu dilakukan untuk mensosialisasikan praktik pelaporan monitoring lingkungan hidup mengenai tahapan dan tata cara pengisian.

Gambar 4.25 Pelaksanaan *Coaching* Sistem Informasi Lingkungan (SIL)

4.6.3 Tandatangan Digital

Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Digital Dalam Mendukung Program Go Green Office telah diterapkan dibeberapa sistem informasi di Kota Cimahi seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP. Ide dari penerapan tanda tangan digital adalah untuk menciptakan perkantoran yang *paperless* dengan membubuhkan tandatangan digital pada suatu output sistem (file dokumen) sebagai keabsahan dokumen sehingga tidak perlu dilakukan tanda tangan manual pada kertas yang dicetak. Dokumen-dokumen persetujuan yang ditujukan untuk eksternal sering kali harus menggunakan tanda tangan. Dengan

teknologi terkini, maka tanda tangan digital dapat dibuat dan dibubuhkan pada dokumen tanpa harus dicetak.

Gambar 4.26 Pengaplikasian Tanda Tangan Digital

4.6.4 Cimahi Reading Habbit

Meningkatkan minat baca anak dalam meningkatkan kemampuan literasi anak dengan metode membaca buku/bahan bacaan kemudian membuat review hasil bacaannya. Selanjutnya guru sebagai fasilitator memverifikasi hasil review anak dengan memberikan paraf dan cap dalam buku histori baca setiap anak didiknya. Untuk meningkatkan motivasi, setiap anak yang telah membaca sejumlah buku akan diberi gimmick/hadiah per level pencapaian membaca tersebut.

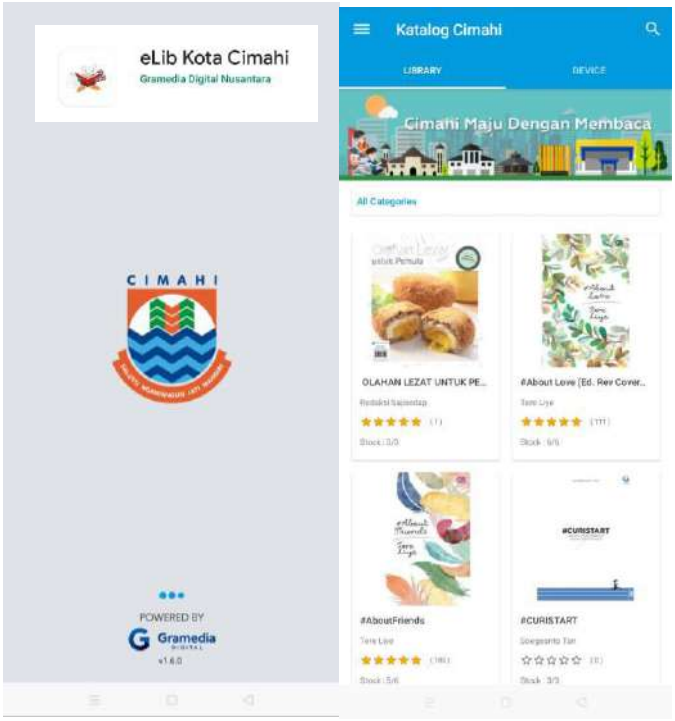

Gambar 4.27 Aplikasi E-Library Kota Cimahi

Konsep *paperless* menjadi penting seiring dengan perkembangan dunia yang semakin lama mengesampingkan faktor lingkungan dalam kegiatannya, yang akan membahayakan bagi keberlangsungan planet bumi ke depannya. Dengan semakin banyaknya kertas yang dibuat, maka akan semakin banyak pula batang pohon yang ditebang untuk mengakomodasi kebutuhan dari industri kertas tersebut. Konsep *paperless* yang diterapkan melalui aplikasi *e-library* memberi dampak yang besar pada pengurangan deforestasi, membatasi polusi yang disebabkan oleh pembuatan kertas dan mengurangi limbah padat.

4.6.5 Jaringan Internet Gratis

Kebutuhan internet saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seluruh RW di Kota Cimahi (Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) telah memiliki akses jaringan internet. Ruang publik di Kota Cimahi juga sudah terfasilitasi jaringan internet yang dapat diakses oleh masyarakat secara gratis untuk menunjang kebutuhan masyarakat. *Free Wifi* di ruang publik berlokasi di Masjid Agung Kota Cimahi, Taman Kartini,

Taman Aspirasi, Taman Technopark dan Ruang Pelayanan (Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan).

Gambar 4.28 Jaringan Internet Gratis di Taman Kartini

4.6.6 Open Data Statistik

Sebagai Walidata Kota Cimahi, Bidang yang mengurus statistik pada Diskominfoarpus Kota Cimahi wajib menyusun dan menyajikan data statistik daerah yang merupakan kumpulan data-data dari setiap perangkat daerah di Kota Cimahi. Data Statisik Daerah ini sangat penting dalam memberikan dukungan data dalam mengambil keputusan di setiap aktivitas pembangunan daerah seperti perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu guna mempermudah dalam pengumpulan data yang lebih update, maka dikembangkan aplikasi open data sebagai sarana untuk menyediakan informasi sekaligus untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi. Website open data dapat di akses melalui link www.data.cimahikota.go.id .

Gambar 4.29 Tampilan Website Cimahi Open Data

Dengan adanya apliasi open data statistik ini memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam mendapatkan data/informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah menjadi terkumpul dalam satu tempat.

4.6.7 Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah (SID) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk menampung gagasan, ide ataupun harapan yang akan di wujudkan di masa depan dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan sebagai suatu "sistem" dengan melibatkan berbagai aktor terkait dan tidak dilaksanakan sebagai parsial, Pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam dokumen SID diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan jadwal. Sistem inovasi daerah dapat di akses pada laman www.sid.cimahikota.go.id.

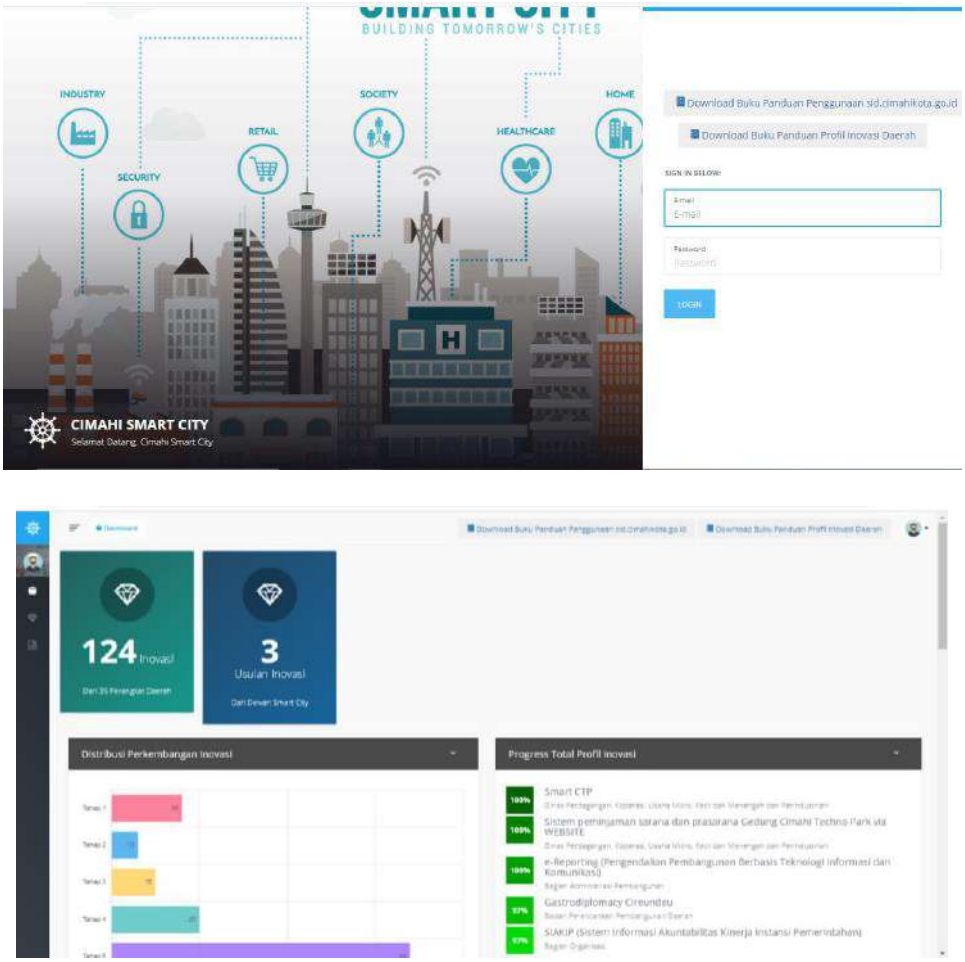

Gambar 4.30 Halaman Depan Website Sistem Inovasi Daerah

4.7 Pengembangan Varietas Lokal

4.7.1 Konservasi Durian Kamarung

Konservasi Durian Lokal yang hanya tersisa 1 pohon maka dilakukan perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi. Untuk menjamin keaslian varietas durian kamarung maka dilakukan pendaftaran varietas lokal dengan nama varietas "KAMAJAYA. Tanda Daftar Varietas Tanaman Varietas Lokal Nomor: 1050/PVL/2019 Tanggal 22 Maret 2019 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian pada Kementerian Pertanian

Gambar 4.31 Penanaman Durian Kamarung

Luasan yang digunakan untuk penanaman durian kamarung menjadi kawasan konservasi, menjadi response untuk isu lingkungan mengenai tata guna lahan di Kota Cimahi. Berikut tabel luasan lahan yang dipergunakan untuk penanaman varietas durian kamarung.

Tabel 4.5 Luasan Lahan Bibit Varietas Durian Kamarung

No	Lokasi	Jumlah Pohon	Luasan (ha)
1	Taman Kehati Kelurahan Cipageran	70	0,7
2	Gunung Padakasih	30	0,3
3	Kodim 0609	10	0,1
4	Kelurahan Citeureup	130	1,3
5	Pusdik Armed	70	0,7
6	Pusdikjas	10	0,1
7	Taman Mutiara Kelurahan Karangmekar	5	0,05
	Total	**325**	**3,25**

(*Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2019)*

4.8 Sentra Industri Pengolahan

Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan di Kota Cimahi, merupakan hasil kerjasama Bidang Perindustrian Disdagkoperin Kota Cimahi dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) UNPAD dan bersinergi dengan Jurusan Teknik Kimia UNJANI dan POLBAN. Kajian tersebut berupaya mengidentifikasi IKM Kota Cimahi melalui analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, & Threats*) dan Bussiness Model Canvas (BMC) dalam rangka pembentukan dan

pengembangan sentra industri pengolahan di Kota Cimahi, khususnya sentra IKM Tempe di Jalan Margaluyu RT 07 RW 02 Kelurahan Cimahi.

Dari hasil kajian terungkap bahwasannya kondisi lingkungan di sekitar IKM tempe secara umum kondusif untuk keberlangsungan produksi tempe. Sementara itu, limbah dalam bentuk ampas atau kulit kedelai dimanfaatkan untuk pakan ternak, tetapi untuk air limbah masih langsung dibuang ke sungai Cimahi. Hasil identifikasi awal kondisi existing pengelolaan limbah IKM tempe tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah tempe (filterisasi) dan juga penelitian dan pengembangan pupuk cair dari limbah cair tempe oleh Jurusan Teknik Kimia UNJANI dan POLBAN. Disamping mengidentifikasi kondisi existing IKM Tempe, hasil analisis Kolaborasi SWOT-BMC dalam kajian tersebut juga memberikan arahan & rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan tahapan rencana program dan kegiatan pengembangan sentra IKM tempe yang mensinergikan semua potensi stakeholders yang ada (*Academic, Bussines, Community, & Government*).

Adapun tahapan yang dimaksud terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama pada tahun 2020 merupakan tahap Konsolidasi (strategi pertahanan & strategi stabilisasi) dengan kegiatannya berbentuk peresmian sentra IKM tempe oleh Bidang Perindustrian Disdagkoperin Kota Cimahi. Dengan peresmian sentra industri diharapkan terjadi *spill-over effect* /eksternalitas positif baik di dalam dan di luar sentra industri serta sinergitas berbagai kegiatan dari stakeholders terkait seperti penjaminan ketersediaan bahan baku (rantai pasok) baik kuantitas maupun kualitas, investasi sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan lain-lain akan lebih mudah dilakukan sehingga dengan demikian paradigma pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor, & pro-environment* akan lebih mudah di implementasikan. Tahapan Kedua pada tahun 2021-2022 merupakan tahap Perluasan (strategi diversifikasi dan strategi agresif) dengan rencana kegiatan berupa peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi untuk

menghasilkan produk-produk baru (diversifikasi produk), peningkatan skala produksi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan menjangkau pasar yang lebih luas, dan lain-lain.

Gambar 4.32 Pengolahan Industri

4.9 Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)

Pemakaian tangki septik sebagai tangki pengumpul lumpur tinja akan mengakibatkan munculnya timbulan lumpur tinja. Proses pengolahan tinja oleh tangki septik masih sangat terbatas dan belum sempurna sehingga beberapa paramenter pencemar dan bakteri pathogen masih terkandung cukup tinggi, oleh karena itu buangan lumpur tinja tersebut perlu diolah lebih lanjut, karena dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dengan baik. Unit Pelayanan Teknis Pengelola Air Limbah Domestik (UPT PALD) melakukan inovasi berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air dengan pelayanan penyedotan lumpur tinja terjadwal yang dilakukan secara berkala. Terhitung pada tahun 2019 ada 140 pelanggan yang rutin melakukan penyedotan tinja di UPT PALD Kota Cimahi.

Gambar 4.33 Proses Penyedotan Lumpur Tinja

4.10 Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Toko Tani Indonesia Center atau yang disebut TTIC adalah lembaga yang melakukan fasilitasi pengadaaan pasokan pangan dalam pendistribusian dari Gapoktan/LUPM/pemasok ke konsumen/masyarakat serta sumber informasi ketersediaan dan harga pangan. Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kota Cimahi melaksanakan bazzar pangan murah berkualitas setiap bulan 2 kali, yaitu 1 kali pelaksanaan di Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi dan 1 kali di wilayah kelurahan atau kecamatan.

Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kota Cimahi akan menggunakan metode mobile, dengan metode mobile seluruh masyarakat Kota Cimahi akan menikmati keberadaan TTIC Kota Cimahi dalam hal memperoleh bahan pangan strategis yang murah dan berkualitas, sekaligus sosialisasi kepada masyarat tentang keberadaan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kota Cimahi. Sosialisasi bertujuan untuk memancing minat masyarakat tani, KWT, kelompok KRPL untuk lebih giat berusaha tani karena sudah ada wadah untuk memasarkan hasil produk mereka, yaitu melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Kota Cimahi.

Gambar 4.34 Kegiatan TTIC di Selasar Gedung B Pemerintah Kota Cimahi

4.11 Pembangunan Sekolah Berbasis Zonasi

Dengan keterbatasan lahan yang dimiliki disertai jumlah peserta didik yang terus bertambah dan tidak meratanya prasarana pendidikan dimiliki maka dilakukan merger untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Kota Cimahi. Merger dilakukan dengan menggabungkan beberapa SD sehingga hasil penggabungan SD dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan Pendidikan serta efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi.

Kota Cimahi memiliki 102 Sekolah Dasar Negeri (SDN), dengan merger sekolah dasar akan dibuat menjadi 70 SD. Penggabungan dilakukan untuk lebih mengefisienkan anggaran, sarana prasarana, di samping juga pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan Indonesia.

Pada kebijakan merger di beberapa sekolah, bangunan yang tidak terpakai dimanfaatkan untuk pendirian SMP Negeri yang baru. Untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020/2021, Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan membuka 4 SMP Negeri rintisan di Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeber, dan perbatasan Kelurahan Melong-Kelurahan Cibeureum. Dari penggabungan sekolah tersebut, Kota Cimahi akan membuat Sekolah Menegah Pertama Negeri yaitu SMPN 12 Kota Cimahi,

SMPN 13 Kota Cimahi, SMPN 14 Kota Cimahi, SMPN 15 Kota Cimahi dan SMPN 16 Kota Cimahi.

Kebijakan merger sekolah dasar ini juga bertujuan untuk mengefektifkan penggunaan lahan di Kota Cimahi dan mendekatkan pelayanan pendidikan, terutama Sekolah Menengah Pertama sehingga mengurangi mobilitas warga sekolah agar dapat mengurangi tingkat pencemaran udara Kota Cimahi.

Tabel 4.6 Penggabungan Sekolah

No	Sebelum Penggabungan	Setelah Penggabungan
1	- SDN Pasirkaliki 1 - SDN Pasirkaliki 2 - SDN Pasirkaliki 3 - SDN Pasirkaliki 5 - SDN Pasirkaliki 6	SDN Pasirkaliki Mandiri 2
2	- Budi Karya - Budi Asih	SDN Cigugur Tengah Mandiri 2
3	- SD Sosial 1 - SD Sosial 2	SDN Cigugur Tengah Mandiri 1

(Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cimahi, 2019)

BAB V

PENUTUP

Simpulan

Rencana Tindak Lanjut

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2020, dapat disimpulkan beberapa hal:

a. Sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Penyusunan DIKPLHD oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagian besar data yang dibutuhan telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan data ini dilakukan guna memberikan informasi dasar mengenai isu lingkungan di Kota Cimahi pada tahun 2019;
b. Metode analisis yang digunakan adalah DPSIR (*Driving Force-Pressure-State-Impact-Response)* untuk 6 (enam) isu lingkungan utama:
    1. Tata Guna Lahan
    2. Kualitas dan Kuantitas Air
    3. Kualitas Udara
    4. Risiko Bencan
    5. Perkotaan (Persampahan)
    6. Tata Kelola;
c. Penetapan isu lingkungan prioritas dilakukan berdasarkan analisis DPSIR dan verifikasi serta klarifikasi dengan *stakeholder* guna memperkuat dan menyesuaikan hasil analisis dengan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan;
d. Isu prioritas lingkungan Kota Cimahi berdasarkan Dokumen IKPLHD 2020:
    1. Tata Guna Lahan
    2. Kualitas dan Kuantitas Air
    3. Kualitas Udara

4. Perkotaan (Persampahan);

e. Tersusunnya DIKPLHD 2020 ini dapat dijadikan dasar bagi pemangku kepentingan dalam penetapan kebijakan, penyusunan program, atau bentuk peningkatan pembangunan berkelanjutan lain terkait lingkungan hidup Kota Cimahi untuk masa yang akan datang.
f. Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi isu lingkungan prioritas dituangkan dalam bentuk Inovasi Daerah Kota Cimahi.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang dimaksud dalam hal ini merupakan upaya yang perlu dilakukan dan dikembangkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan atau isu prioritas tanpa mengesampingkan isu-isu lingkungan lainnya. Berdasarkan analisis dan studi literatur, berikut daftar upaya yang dilakukan Pemerintah Kota cimahi untuk mengatasi isu lingkungan prioritas tahun 2019:

a. Sistem Inovasi Daerah (SID)
b. Tanda tangan digital
c. Kajian pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan di Kota Cimahi
d. Sosialisasi pasar rakyat
e. Siswa ber-tumbler
f. Merger sekolah dasar
g. Gerakan Pungut Sampah (GPS)
h. Sistem satu arah Dustira
i. *Car Free Day* (bebas kendaraan bermotor)
j. Mudik gratis
k. Kawasan tertib lalu lintas
l. Jaringan proyek perkotaan
m. Jaringan proyek perkotaan
n. Pentahelix
o. Cimahi Barengras

DAFTAR PUSTAKA

Alaerts, G., & Santika, S. S. (1987). Metode penelitian air. *Usaha Nasional. Surabaya, 309*.

Badan Pusat Statistik. (2018). Kota Cimahi Dalam Angka 2018.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. (2018). Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2018-2022.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (2017). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Effendi, H. (2003). *Telaah kualitas air, bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan*: Kanisius.

Gustiani, Herawati Murti dan Utami, Dian (2017). Strategi Kesatuan Negatif Pada Masyarakat Kampung Adat Cireundeu. The 1st Education and Language International Conference Proceedings Center for International Language Development of Unissula. Website: jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/viewFile/1251/959, Diakses pada tanggal 23 Januari 2018.

Juwana, I., Muttil, N., & Perera, B. (2012). Indicator-based water sustainability assessment—A review. *Science of the Total Environment, 438*, 357-371.

Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2010a). A water sustainability index for West Java–Part 2: refining the conceptual framework using Delphi technique. *Water Science and Technology, 62*(7), 1641-1652.

Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2010b). A water sustainability index for West Java. Part 1: developing the conceptual framework. *Water Science and Technology, 62*(7), 1629-1640.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Maharani, Lidya (2016). 3 Manfaat Daun Reundeu Untuk Kesehatan Yang Luar Biasa. Website:http://www.kinisehat.com/2016/03/manfaat-

daun-reundeu-kesehatan-luar.html. Diakses pada tanggal 23 Januari 2018.

Noviandi, Ilham Pratama (2014). Pemanfaatan Tumbuhan Obat pada Masyarakat Kasepuhan Kampung Ciptarasa dan Ciptagelar Sukabumi.. Skipsi, Institut Pertanian Bogor. Website: repository.ipb.ac.id/handle/123456789/71709. Diakses pada tanggal 23 januari 2018.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cimahi (2017).

Salim. (1990). Towards a sustainable future *Development* (Vol. 2, pp. 61-63): Christengraf.

Soemirat, J. (2011). Epidemiologi Lingkungan Edisi Revisi: UGM Press, Jogjakarta.

Sustainable Development Goals (SDGs).

Tchobanoglous, G., Stensel, D., Tsuchihashi, R., Burton, F., Mohammad, A., Bowden, G., & Pfrang, W. (2014). Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery (Metcalf & Eddy, Inc: McGraw-Hill, New York.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

UNDSD. (1996). Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies: New York.

LAMPIRAN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

LAMPIRAN I

- SK Tim Penyusun
- Biodata Penyusun
- Undangan Rapat Pengumpulan Data
- Notulensi Rapat Pengumpulan Data
- Daftar Hadir Rapat Pengumpulan Data
- Undangan FGD DIKPLHD 2020
- Berita Acara FGD DIKPLHD 2020
- Notulensi FGD DIKPLHD 2020
- Daftar Hadir FGD DIKPLHD 2020
- Biodata Peserta FGD DIKPLHD 2020

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 660.1 / Kep. 532 - DLH / 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup;

b. bahwa dalam rangka menyusun informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi, maka perlu dibentuk tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor : 061.1/29-ND/TL, Tanggal 8 Januari 2020, Hal : Pengajuan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. melakukan analisis data pendukung Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 yang dihimpun dari setiap Perangkat Daerah;
b. melaksanakan verifikasi data dan informasi yang berkaitan dengan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019; dan
c. melaksanakan penyusunan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019, berupa :
    a. Buku I : Buku yang menyajikan ringkasan eksekutif dari informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah; dan
    b. Buku II : Buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Adapun rincian tugas tim tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya untuk mendukung tugas Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 12 Februari 2020

WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 660.1 / Kep. 532 - DLH /2020
TANGGAL : 12 Februari 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

SUSUNAN TIM

I. Pengarah : Wali Kota Cimahi
II. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
III. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
IV. Anggota :
1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi;
4. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
5. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
6. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
7. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
8. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;

9. Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
10. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
11. Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi;
12. Kepala Seksi Inovasi dan Kerja Sama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
13. Rudi Nugroho Catur Rangga, S.T., M.Si.
    NIP. 19800520 200604 1 015;
14. Cahyadi, S.E.
    NIP. 19740416 199503 1 001;
15. Perdian Nur Idham
    NIP. 19760302 200801 1 005;
16. Muhammad Andri Darmawan, S.IP.
    NIP. 19810506 201001 1 012;
17. Rohmat, S.E.
    NIP. 19790627 200901 1 005;
18. Nandang Sunjaya, S.Kom.
    NIP. 19731011 200501 1 002;
19. Fitria Ivadanti, S.T.
    NIP. 19770918 201001 2 004;
20. Saefulloh, S.T.
    NIP. 19780926 201409 1 001;
21. Dadang Ramdhan
    NIP. 19820627 201001 1 009;
22. Yana Erawan, S.T.
    NIP. 19790923 201001 1 007;
23. R. Siti Yasyfina Windhiyani, S.T., M.T., M.A.
    NIP. 19750530 200501 2 006;
24. Kus Setiawan Sidik Ahmad
    NIP. 19820617 201001 1 007;

25. Anggia Yuningtyas, S.T., M.Si.
    NIP. 19840212 200902 2 001;
26. Vidya Adhaninggar Dyah Lukitaningrum, S.T.
    NIP. 19950410 201902 2 001;
27. Dewita Rachman, S.T.
    NIP. 19820617 201001 2 009;
28. Mohammad Natsir, S.E.
    NIP.19760217 200902 1 002;
29. Ita Ruswati, S.Si.T.
    NIP. 19790328 201001 2 004;
30. Citra Sylvanite Choerunoer, S.T.
    NIP. 19950801 201902 2 002;
31. Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D.
    (Institut Teknologi Nasional Bandung);
32. Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjadjaran Bandung;
33. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani;
34. Yayasan Greeone Go Green
    (Lembaga Swadaya Masyarakat);
35. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Lembaga Swadaya Masyarakat);
36. Heksantia R. Yasya, S.T.
    (Tenaga Ahli).

WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 660.1 / Kep. 532 -DLH /2020
TANGGAL : 12 Februari 2020
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019

URAIAN TUGAS TIM

I. Pengarah : Memberikan arahan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2019.

II. Ketua :
1. Bertanggung jawab terhadap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Melakukan pengaturan, pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota yang ada di bawahnya;
3. Menyusun jadwal tahapan rencana kerja tim penyusun dalam penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan;
4. Mengawasi kerja seluruh anggota tim penyusun;
5. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja anggota tim penyusun;
6. Melakukan fungsi kontrol agar pencapaian tujuan kegiatan optimal; dan
7. Melaporkan hasil kegiatan tim penyusun kepada Wali Kota Cimahi.

III. Sekretaris :
1. Menyusun format penyusunan dokumen yang akan digunakan;
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan bersama anggota; dan
3. Menyiapkan draf laporan yang akan disampaikan kepada Wali Kota Cimahi.

IV. Anggota : 1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan konsultasi, konsolidasi dan koordinasi, baik dengan sesama anggota, sekretaris serta ketua tim penyusun dalam rangka pencapaian hasil kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan secara bersama-sama dengan sekretaris dan anggota lainnya; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim penyusun.

WALI KOTA CIMAHI,

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

CURRICULUM VITAE

Personal Information

Full Name: Iwan JUWANA
Nationality: Indonesia
Date of Birth: 03-01-1977
Gender: Male

Contact Information

Home Address: Citra Asri Permai F12A, Jalan Gunung Batu Dalam, Cimahi 40514
Email: juwana@itenas.ac.id
Telephone: 022-7272215 ext. 144
Mobile: +62 813 2071 9427

Professional Information

Current Employer: National Institute of Technology (ITENAS), Bandung
Current Work Address: JL. PHH Mustafa 23 Bandung, 40123
Current Position: Lecturer

Education Profile

- Philosophy of Doctor (PhD), Water Resource Management, Victoria University – Australia, 2012
- Postgraduate Diploma, Environmental Management, Maastricht School of Management – the Netherlands, 2005
- Master, Environmental Management, University of New South Wales – Australia, 2004
- Bachelor, Environmental Engineering, Bandung Institute of Technology (ITB), Bandung, 2000

Work Experience

Lecturer, National Institute of Technology (ITENAS) Bandung, 2001 – now
Lecturer, Engineering Academy of Tirta Wiyata (AKATIRTA) Magelang, 2000 - 2001

Recent Publications and Reports (authored or co-authored)

- Juwana, I., N. Muttil, and B. J. C. Perera. "Uncertainty and sensitivity analysis of West Java Water Sustainability Index–A case study on Citarum catchment in Indonesia." *Ecological Indicators* 61 (2016): 170-178.
- Juwana, Iwan, Nitin Muttil, and B. J. C. Perera. "Application of West Java water sustainability index to Citarum catchment in West Java, Indonesia." *Water Science & Technology: Water Supply* 14.6 (2014): 1150-1159.

- Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2012). Indicator-based Water Sustainability Index: A Review. *Science of the Total Environment Journal*.
- Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2010a). A water sustainability index for West Java – Part 1: developing the conceptual framework. *Water science and technology: a journal of the International Association on Water Pollution Research, 62*(7), 1629-1640.
- Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2010b). A water sustainability index for West Java – Part 2: refining the conceptual framework using Delphi technique. *Water science and technology: a journal of the International Association on Water Pollution Research, 62*(7), 1641-1652.

- The Development of West Java Environmental Indicators, West Java Environmental Protection Agency (EPA), 2013, (A Report)
- Evaluation of the Implementation of Action Plans for Climate Change Mitigation and Adaptations, West Java Environmental Protection Agency (EPA), 2015 (A Report)
- Development of Action Plans for Climate Change Mitigation and Adaptations for 5 Pilot Cities in Indonesia, GIZ, 2013, (A Report)
- Contributor for book "Contribution Matters", *Association of Indonesian Students in Australia (PPIA), 2011*
- Contributor for book "Catatan dari Negeri Selatan (A Note from the Land of South), *Forum Lingkar Pena Australia, Canberra,* 2011
- Contributor for book "The Voice of Indonesian Future Leaders", *Association of Indonesian Students in Australia (PPIA),* 2011
- Development of Hazardous Waste Manual for Cities in West Java, West Java Environmental Protection Agency (EPA), 2007 (A Report)

Grants Received and/or Participation in Research Projects
- Victoria University Scholarships, Postdoctoral, 2013-2015
- Australian Development Scholarships (AusAid), Doctorate Degree, 2008-2011
- Netherlands Fellowship Programme (NFP), Postgraduate Diplome Degree, 2005
- Australian Development Scholarships (AusAid), Master Degree, 2003-2004

Additional Professional Information
- Trainer, HSE Training – Pertamina Hulu Energi, 2013
- Lead Consultant, Greenhouse Gas Reduction from Waste Sector, GIZ – Indonesia, 2013
- Team Leader, West Java Environmental Indicators, West Java EPA – Indonesia, 2013
- Lead Auditor , OHSAS External Audit, SKK Migas – Indonesia, February, 2013 – March, 2013

- Reviewer for International Journal of Tropical Natural Sciences, 2012 - now
- Reviewer for International Journal: Water Resources Management, 2012 - now
- Reviewer for International Journal: Science of the Total Environment, 2012 – now
- Reviewer for International Journal of Cleaner Production, 2011 - now
- Reviewer for International Journal: Water Science and Technology, 2010 - now

Others
- Guest Speaker, Research Student Induction, *the Office for Postgraduate Research, Victoria University,* 2011

Major Accomplishments/Awards
- Best Lecturer, Faculty of Civil and Planning ITENAS, 2015
- Finalist Three Minute Thesis Competition – Victoria University, 2011
- Secomb Research Grant, Victoria University, 2010
- Australian Development Scholarships (AusAid), 2008-2011
- Netherlands Fellowship Programme (NFP), 2005
- Australian Development Scholarships (AusAid), 2003-2004

Training Courses
- Energy Auditing Course, SGS International, Jakarta, 25-28 May, 2013
- Helicopter Underwater Evacuation (HUET) and Sea Survival (SS) Training, Transafe, Jakarta, 31 Agustus, 2013
- Advanced EMS Auditor Course, SGS International, Jakarta, 4-8 July, 2005
- EMS Course, University of New South Wales, Sydney, 7-9 July, 2003
- OHSAS Lead Auditor Course, SGS International, Jakarta, 29 May - 2 June, 2006
- Environmental Auditing Course, University of New South Wales & QSA International, Sydney, 19-23 April, 2004
- HSE Course, University of New South Wales, Sydney, 2004
- Introduction to Health, Safety, Environment, Sucofindo, Bandung, 2005
- Health, Safety, Environment Management SystemTraining, Itenas – Balai Hiperkes, Bandung, 2001

Professional or Community Membership/Affiliation
IATPI, Indonesian Environmental Engineering Association
MASTAN, Standardisation Community
HATHI, Indonesian Association of Hydraulic Engineers

Other relevant information that demonstrate your leadership potential and communication/ interpersonal skills

- Student Rover, Victoria University, 2010-2011
- Student Assistant, Victoria University, 2010-2011
- Head of Public Affair, VUISA, 2010-2011
- Candidate for President of Indonesian Student Association - Australia (PPIA), 2010-2011
- 20th World IMACS/MODSIM Congress, *Presenter,* December, 12-16, 2011, Perth, Australia
- Committee of International Conference, PPIA Australia, 2010
- 32nd Hydrology and Water Symposium, , *Presenter,* 30 November – 3 December 2009, Newcastle, Australia
- 18th World IMACS/MODSIM Congress, *Presenter,* July, 13-17, 2009, Cairns, Australia
- International Seminar On " Environmental Management, Infrastructure and Spatial Development " – *Presenter,* June, 18-19, 2009, Bandung Institute of Technology, Bandung, Indonesia
- International Seminar On "Climate Change Impacts On Water Resources And Coastal Management In Developing Countries – *Presenter,* May, 11-13, 2009, Sintesa Peninsula Hotel Manado, Manado, Indonesia
- International Conference on Green Technology 2009 15-17 April 2009 – *Presenter,* April, 15-17, 2009, Universitas Malahayati, Lampung, Indonesia
- Head of Department, Environmental Engineering, ITENAS, 2006-2007
- Head of Centre for Environmental Studies (PUSDAL), ITENAS, 2005-2006

DATA PRIBADI

Nama : Heksantia Rahmadinda Yasya

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Desember 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sanggar Kencana III No. 22 CD
Komp. Sanggar Hurip, Jatisari, Buahbatu
Kota Bandung

Agama : Islam

Pendidikan Formal

2003 – 2009 :	SDI An-Najah Jakarta
2009 – 2012 :	SMP Negeri 177 Jakarta
2012 – 2015 :	SMA Negeri 90 Jakarta
2015 – 2019 :	Institut Teknologi Nasional (ITENAS) – Jurusan Teknik Lingkungan

Pengalaman Organisasi:

Tahun	Nama Organisasi	Jabatan
2016	HMTL (Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan) Itenas – Bandung	Anggota
2015-2016	Jinggaswara Itenas Choir, Itenas – Bandung	Anggota

Seminar dan Training

- 2015, Pelatihan Dasar Pengembangan Diri - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2015, Program Persiapan Belajar di Perguruan Tinggi (*Pre University*) - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2016, Pelatihan Dasar Pengembangan Relasi - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2017, Pelatihan Dasar Pengembangan Kepemimpinan - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2017, Pelatihan *Microsoft Office Specialist*
- 2018, Pelatihan Dasar Pengembangan Kewirausahaan - Institut Teknologi Nasional (ITENAS) Bandung
- 2019, Presenter dalam seminar internasional "4th International Symposium On Green Technology For Value Chains 2019"

Pengalaman Kerja

Waktu	Instansi	Jabatan
Februari - Mei 2018	Institut Teknologi Nasional	Asisten Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan
Juni - Juli 2018	PT. Pindad Kota Bandung	Magang/Kerja Praktik
Februari - Mei 2019	Institut Teknologi Nasional	Asisten Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan
September - Desember 2019	Institut Teknologi Nasional	Asisten Laboratorium Pengukuran dan Analisis Kualitas Lingkungan I
Februari – Juli 2020	Institut Teknologi Nasional	Asisten Mata Kuliah Desain Pengolahan Air Minum

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telp. (022) 6654274, 6641963, 6641931, Fax (022) 6654274 *Website* : www.cimahikota.go.id
Email : dinaslhcimahi@gmail.com Cimahi 40513 JAWA BARAT

Cimahi, 30 Januari 2020

Kepada :

Nomor : 005/420/DLH.
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : **Undangan**

Yth. (daftar terlampir)
di-
Cimahi

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2019, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Pengumpulan Data Pendukung Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 6 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si, M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19720520 199901 1 001

Tembusan :
1. Wali Kota Cimahi
2. Wakil Wali Kota Cimahi

LAMPIRAN SURAT
Nomor : 005 /420 / DLH
Tanggal : 30 Januari 2020
Hal : **Undangan**

PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
2. **Ruswanto, ATD**

   Sekretaris Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi
3. **Ermayanti Rengganis**

   Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi
5. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
6. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
7. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
8. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
9. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
10. **Supriyatin, S.IP**

    Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
11. **Sustiyanti Pusporini, SKM**

    Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi
12. **Dhortina Thiodora Simamora, SE**

    Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
13. **Fitria Ivadanti, ST**

    Penelaah Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
14. **Dadang Ramdhan**

    Pengelola Data Pameran dan Kemitraan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi

15. **Muhammad Andri Darmawan, S.IP**

    Perencana pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi

16. **Perdian Nur Idham**

    Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

17. **Kus Setiawan Sidik Ahmad**

    Penyuluh Pertanian Pelaksana pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

18. **Anggia Yuningtyas, ST.,M.Si**

    Pelaksana Analis Perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

19. **Saefulloh, ST**

    Analis Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

20. **Rudi Nugroho Catur Rangga, ST.,M.Si**

    Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

21. **R. Siti Yasyfina Windhiyani, ST.,MT.,MA**

    Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi

22. **Nandang Sunjaya, S.Kom**

    Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

23. **Cahyadi, SE**

    Pengelola Data Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

24. **Yana Erawan, ST**

    Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

25. **Rohmat, SE**

    Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

26. **Ita Ruswati, S.Si.T**

    Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

27. **Dewita Rachman, ST**

    Analis Lingkungan Hidup pada Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

28. **Citra Sylvanite Choerunoer, ST**

    Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

29. **Vidya Adhaninggar Dyah Lukitaningrum, ST**

    Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

30. **Mohammad Natsir**

    Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si,M.M
Pembina Tingkat I
NIP.19720520 199901 1 001

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax.(022) 6632614 Website : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

NOTULEN

Kegiatan	:	Rapat Pengumpulan Data Pendukung DIKPLHD Tahun 2019
Hari/Tanggal	:	Kamis, 6 Februari 2020
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Disdukcasip, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Staf Bidang Tata Lingkungan.

Hasil Rapat:

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dilanjutkan dengan pembahasan pengumpulan data pendukung untuk penyusunan DIKPLHD Tahun 2019.
2. Rapat dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Disdukcasip, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.
3. Dokumen diupload dengan batas waktu maksimal 31 Mei 2020 dengan mengirimkan *softcopy* ke nirwasitatantra@menlhk.go.id juga melakukan import tabel pada aplikasi SILKD melalui www.dataalam.menlhk.go.id .
4. Inovasi tiap perangkat daerah dikaitkan dengan lingkungan tidak harus bersinggungan secara langsung dengan dampak terhadap lingkungan. Inovasi daerah dilengkapi dengan keterangan deskripsi kegiatan dan foto inovasi.
5. Rekapitulasi data peraturan daerah, peraturan walikota dan SK yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Peraturan daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup diantaranya adalah:

c. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2019
d. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019
e. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2019
f. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2019
g. Peraturan Wali Kota No. 55 Tahun 2019
h. Peraturan Wali Kota No. 14 Tahun 2019

6. Menyusun timeline penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).
7. Melakukan rapat lanjutan untuk pengumpulan dan pembahasan data DIKPLHD Kota Cimahi pada tanggal 21 Februari 2020.

NOTULEN,

Citra Sylvanite Choerunoer, ST

Dokumentasi Rapat 6 Februari 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax.(022) 6632614 *Website : www.cimahikota.go.id*
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR HADIR

ACARA : Rapat Pengumpulan Data Pendukung DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2019
HARI / TANGGAL : Kamis, 6 Februari 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

NO	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN
1	KOMME ESIRINGORINGO	DLH	1
2	Rusmanto	Dishub	2
3	Dyah Ajuni L	DLH	3
4	ROHMAT	BPBD	4
5	Rudi	Diskominfoarpus	5
6	Kus Setiawan Sidik A.	DISPangtan	6
7	Saefulloh	DPMPTSP	7
8	[illegible]	[illegible]	8
9	Dewita R	PSLB3 DLH	9
10	Vidya A	PHL DLH	10
11	Cahyadi	BAPPENDA	11
12	Fustyanti [illegible]	Dinkes	12
13	Dorthina T. S	Disdukcapil	13
14	Supriyatin	Kesbang	14
15	Dadi Madali	Bag. Hukum	15
16	M. NATSIR	DLH	16
17	Evi Yanti	Bappeda	17
18	Citra Sylvanite	DLH	18
19	Ita R	DLH	19
20	ANDRE	DLH	20

NO	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN
21	Mula	DLH	21 .....
22			22 .....
23			23 .....
24			24 .....
25			25 .....
26			26 .....
27			27 .....
28			28 .....
29			29 .....
30			30 .....

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telp. (022) 6654274, 6641963, 6641931, Fax (022) 6654274 *Website* : www.cimahikota.go.id
Email : dinaslhcimahi@gmail.com Cimahi 40513 JAWA BARAT

Cimahi, 18 Februari 2020

Kepada :

Nomor : 005/789/DLH.
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : **Undangan**

Yth. (daftar terlampir)
di-
Cimahi

Sehubungan dengan kegiatan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2019, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Pengumpulan Data Pendukung Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	21 Februari 2020
Pukul	:	09.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19720520 199901 1 001

Tembusan :
1. Wali Kota Cimahi
2. Wakil Wali Kota Cimahi

Catatan: Peserta kegiatan diharapkan agar membawa tumbler (

LAMPIRAN SURAT,
Nomor : 005 / 789 / DCH.
Tanggal : 18 Februari 2020
Hal : **Undangan**

PERANGKAT DAERAH

1. Sekretaris Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cimahi
5. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
6. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
7. Kepala Seksi Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
8. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
9. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
10. **Supriyatin, S.IP.**
    Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi
11. **Sustiyanti Pusporini, SKM.**
    Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi
12. **Ahmad Indra Yusnan, S.E.**
    Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi
13. **Fitria Ivadanti, S.T.**
    Penelaah Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
14. **Dadang Ramdhan**

15. **Muhammad Andri Darmawan, S.IP.**
    Perencana pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi
16. **Perdian Nur Idham**
    Pengelola Data pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
17. **Kus Setiawan Sidik Ahmad**
    Penyuluh Pertanian Pelaksana pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
18. **Anggia Yuningtyas, S.T., M.Si.**
    Pelaksana Analis Perencanaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
19. **Saefulloh, S.T.**
    Analis Dokumen Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi
20. **Rudi Nugroho Catur Rangga, S.T., M.Si.**
    Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi
21. **R. Siti Yasyfina Windhiyani, S.T., M.T., M.A.**
    Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi
22. **Nandang Sunjaya, S.Kom.**
    Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi
23. **Cahyadi, S.E.**
    Pengelola Data Rekonsiliasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi
24. **Yana Erawan, S.T.**
    Analis Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi
25. **Rohmat, S.E.**
    Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi
26. **Ita Ruswati, S.Si.T.**
    Analis Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
27. **Dewita Rachman, S.T.**
    Analis Lingkungan Hidup pada Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

28. **Citra Sylvanite Choerunoer, S.T.**
    Penyuluh Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
29. **Vidya Adhaninggar Dyah Lukitaningrum, S.T.**
    Pengendali Dampak Lingkungan pada Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
30. **Mohammad Natsir, S.E.**
    Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP.19720520 199901 1 001

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax.(022) 6632614 Website : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

NOTULEN

Kegiatan	:	Rapat Pengumpulan Data Pendukung DIKPLHD Tahun 2019
Hari/Tanggal	:	Jumat, 21 Februari 2020
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Satpol PP dan Damkar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Staf Bidang Tata Lingkungan.

Hasil Rapat:

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan dilanjutkan dengan pembahasan pengumpulan data pendukung untuk penyusunan DIKPLHD Tahun 2019.
2. Rapat dihadiri oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Kesbang, Dispangtan, Bappenda, Bagian Hukum, DPMPTSP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi.
3. Tabel penggunaan bahan bakar industri tahun 2019 menggunakan proyeksi dari data BPS Provinsi Jawa Barat (tidak ada data Kota Cimahi).

8. Tabel 31 Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar untuk data fasitlitas tempat BAB umum, komunal dan sungai dilengkapi DPKP dan data fasitlitas tempat BAB sendiri dilengkapi oleh Dinas Kesehatan.
9. Forum Group Discussion untuk penenentuan isu lingkungan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2019 direncanakan pada akhir bulan Maret 2020.

NOTULEN,

Citra Sylvanite Choerunoer, ST

Dokumentasi Rapat 21 Februari 2020

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax.(022) 6632614 *Website : www.cimahikota.go.id*
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR HADIR

ACARA : Rapat Pengumpulan Data Pendukung DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2019
HARI / TANGGAL : Jumat, 21 Februari 2020
TEMPAT : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Cimahi

NO	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN
1	Rumranto	Dishub	1
2	Dyah Ayuni	DLH	2
3	ANDRE	DLH	3
4	Bulan R	DLH	4
5	Susiyanti puspawar	Dinkes	5
6	Rudi	Diskominfo arpus	6
7	INDRA.Y	DISDUKCAPIL	7
8	Kug Setiawan Sidik.A.	Dispangtan	8
9	Ifa Yasyfina	Bappeda	9
10	Rohman	BPBD	10
11	Saefullah	DPMPTSP	11
12	Dadi Madali	Bag. Hukum	12
13	Dewita R	PSLB3PK DLH	13
14	Muh Ardi D.	Disdik	14
15	Dadang Ramdhan	Disdagkoperin	15
16	Nandang Sunjaya	BPKAD	16
17	Ferdian	satpol pdamkar	17
18	Vidya A	DLH (PHL)	18
19	Anggia T	Disbudparpora	19
20	Citra Sylvanite	DLH (PKLH)	20

NO	NAMA	INSTANSI	TANDATANGAN
21	Mula Febianto	DLH	21 ....
22			22 ....
23			23 ....
24			24 ....
25			25 ....
26			26 ....
27			27 ....
28			28 ....
29			29 ....
30			30 ....

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telp. (022) 6654274, 6641931, 6641963
Fax (022) 6654274 Website : www.cimahikota.go.id
Email: dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

Cimahi, 30 Juni 2020

Nomor : 005/1953/DLH.
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Undangan Peserta**

Kepada :
Yth. Daftar terlampir
di-

TEMPAT

Sehubungan akan dilaksanakannya Fokus Grup Diskusi (FGD) Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2020, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menghadiri Fokus Grup Diskusi secara daring menggunakan *Video Conference*, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juli 2020
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tautan : *Zoom Meeting ID* : 210 620 0109
Password : DLHCIMAHI

Adapun materi paparan dapat diakses melalui tautan bit.ly/FGDdikplhd2020, sedangkan saran, masukan dan tanggapan tertulis disampaikan melalui alamat email chsylvanite@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 3 Juli 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Citra (082115590893).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannnya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720520 199901 1 001

LAMPIRAN SURAT
Nomor : 005/1953/DLH.
Tanggal : 30 Juni 2020
Hal : **Undangan Peserta**

DAFTAR UNDANGAN

I. **PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI**

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Plt. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
10. Kepala Dinas Perhubungan
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja
13. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
14. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
17. Kepala Dinas Pendidikan
18. Inspektur
19. Plt. Direktur RSUD Cibabat
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22. Plt. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa
23. Camat Cimahi Utara
24. Camat Cimahi Tengah
25. Camat Cimahi Selatan
26. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
27. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
28. Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
29. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

30. Kepala UPTD Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
31. Kepala UPTD Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
32. Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
33. Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar Dinas Pangan dan Pertanian
34. Kepala UPTD Technopark Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

II. **LEMBAGA MASYARAKAT**

1. Ketua LPM Kota Cimahi
2. Ketua TP PKK Kota Cimahi
3. Ketua Karang Taruna Kota Cimahi
4. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara
5. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Tengah
6. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Selatan
7. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Utara
8. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Tengah
9. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Selatan
10. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Utara
11. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Tengah
12. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Selatan

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720520 199901 1 001

BERITA ACARA
FOKUS GRUP DISKUSI DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020
Cimahi, 2 Juli 2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh, melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan **Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2020,** yang dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas/Instansi terkait di lingkungan Kota Cimahi, Pemangku Kepentingan (Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Filantropi, masyarakat adat, dan lembaga masyarakat lainnya) serta Narasumber Penyusunan DIKPLHD sebagaimana dalam lampiran absensi pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

Isu prioritas yang disepakati dan akan dibahas dalam dokumen:
1. Tata Guna Lahan
2. Kualitas dan Kuantitas Air
3. Persampahan
4. Kualitas Udara

Demikian Berita Acara Kegiatan **Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2020** ini dibuat dan ditandatangani.

Cimahi, 2 Juli 2020

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani	Masyarakat Adat Kampung Cireundeu
(Mochamad Ronny)	(Dr. Titin Rohayatin, S.IP.,M.Si)	(Yana)
Palang Merah Indonesia Kota Cimahi	APINDO Kota Cimahi	Yayasan Greeone Go Green
(Imal Hambali, S.Pd.I)	(Christina Sri Manunggal, SH)	(Eva Yohana)

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang
Telepon /Fax.(022) 6632614 Website : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

NOTULEN

Kegiatan	:	Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2020
Hari/Tanggal	:	Kamis, 2 Juli 2020
Waktu	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas / Instansi terkait di lingkungan Kota Cimahi, Pemangku Kepentingan (Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Filantropi, masyarakat adat, dan lembaga masyarakat lainnya), Kepala Bidang Tata Lingkungan, Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup, Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Kepala Seksi Konservasi Lingkungan dan Staf Bidang Tata Lingkungan.

Hasil Rapat:

1. Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dilanjutkan Paparan dan Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2020.
2. Fokus Grup Diskusi merupakan bagian dari tahapan penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020, untuk menentukan isu lingkungan yang akan dibahas dalam dokumen.
3. Rapat dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas/Instansi terkait di lingkungan Kota Cimahi, Pemangku Kepentingan (Akademisi, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Filantropi, masyarakat adat, dan lembaga masyarakat lainnya).
4. Penggunaan metode menggunakan DPSIR yang merupakan ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup. 6 isu utama dalam panduan penyusunan yaitu tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, persampahan dan tata kelola. Berdasarkan

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan.

5. DPSIR adalah tools untuk melakukan analisa dan indentifikasi aspek terkait dengan isu lingkungan, 6 kajian harus dikaji namun bukan batasan yang terikat (boleh ditambahkan).

Konsep DPSIR

Analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (Driving force), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (Pressure), keadaan lingkungan (State), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (Impact) dan kemungkinan adanya respon dari masyarakat (Response)

Tata Guna Lahan

Pertumbuhan penduduk (driving force), menyebabkan pertumbuhan perumahan (pressure), perubahan penggunaan lahan (state), dampaknya kejadian bencana, lahan kering, kualitas udara dan kualitas air serta kekurangan air bersih. Dengan menganalisa setiap komponen DPSI dapat menentukan respon.

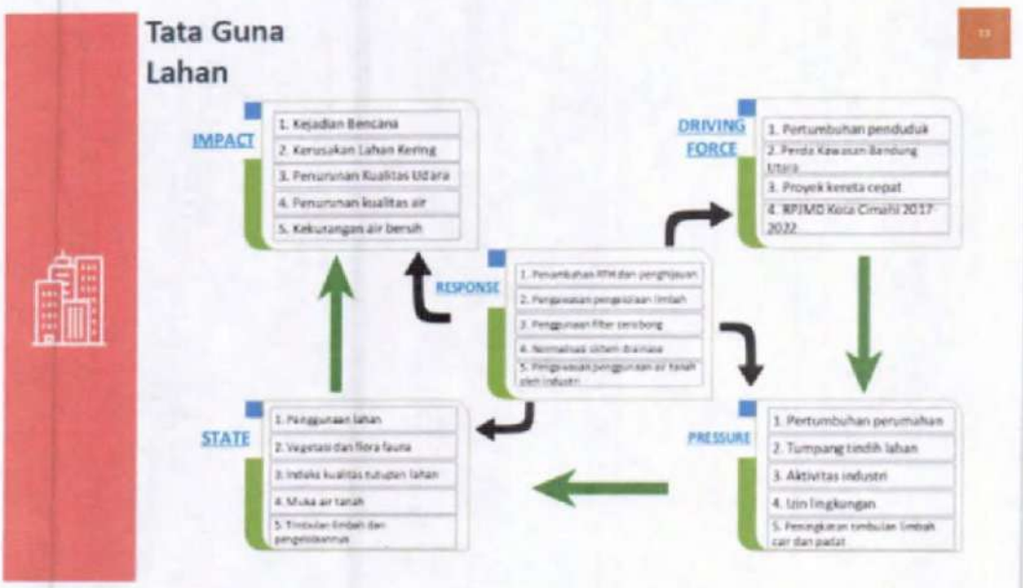

Data yang ditampilkan merupakan data time series. Adanya kereta cepat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Cimahi akan berdampak pada peningkatkan taraf hidup. Pressure pertumbuhan perumahan penduduk, tumpang tindih lahan, aktivitas perdagangan. State penggunaan lahan dan tutupan lahan. Impact kejadian bencana, kualitas udara dan kualitas air menyebabkan airbone disease, kekurangan air bersih. Response, penambahan RTH, pengawasan limbah.

Kualitas Air

Driving Force dari kualitas air adalah adanya pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi, selain itu adanya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 300 Tahun 2017 mengenai kualitas sungai, program citarum harum, Peraturan Menteri Kesehatan No. 492 Tahun 2010 mengenai kualitas air minum dan RPJMD Kota Cimahi.

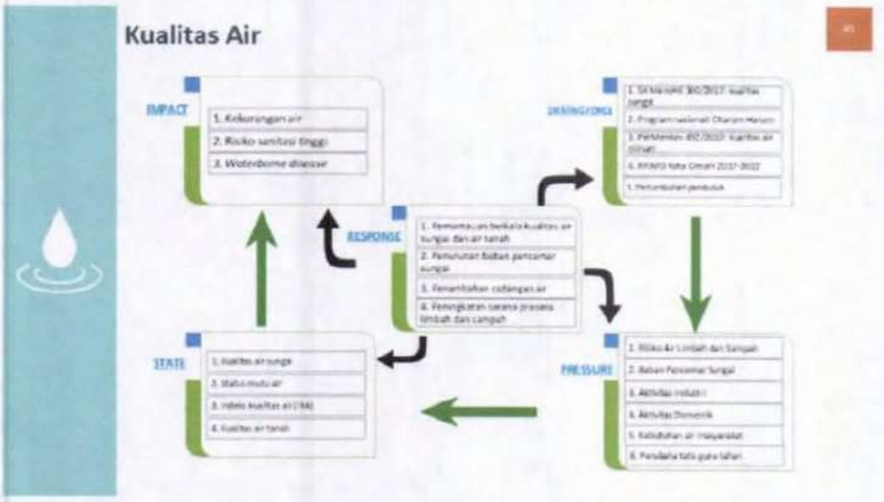

OPD perlu mengidentifikasi response terkait isu lingkungan di sertai data dan dokumentasi. Tekanan dari adanya driving force tersebut diantaranya adanya aktivitas industry, domestic, kebutuhan aur dan perubahan tata guna lahan. Kondisi eksisting yang ada di Cimahi dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air, status mutu dan kualitas air hujan. State yang ada berdampak kepada kekurangan air dan penyakit bawaan air (waterborne disease). Yang kemudian response yang dilakukan dengan melakukan pemantauan dan peningkatan sarana dan pra sarana untuk menurunkan beban pencemar sungai.

Kualitas Udara

Naiknya jumlah penduduk dan banyaknya penggunaan kendaraan bermotor merupakan pemciu dari adanya emisi bahan bakar. Penurunan kualitas udara ambien dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara (IKU) yang akan menurun dengan adanya kepadatan lalu lintas dikarenakan banyaknya kendaraan bermotor. IKU yang menurun akan berdampak pada kesehatan masyarakat misalnya kenaikan angka penyakit ISPA dan kerusakan lapisan ozon (efek rumah kaca). Response yang dilakukan adalah melakukan pemantauan udara secara berkala dan melakukan rekayasa lalu lintas.

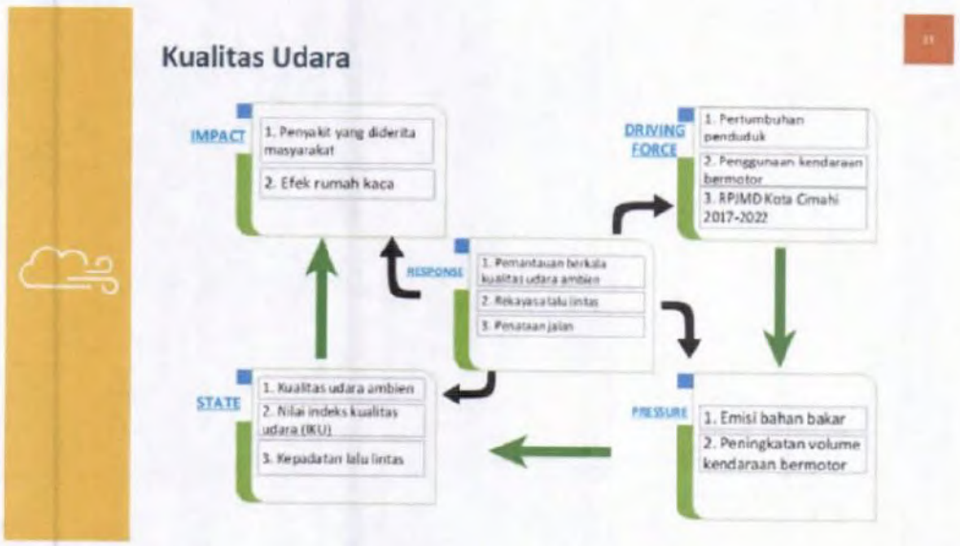

Persampahan

Timbulan sampah akan meningkat sejalan dengan adanya penambahan jumlah penduduk di Kota Cimahi. Cimahi tidak memiliki TPA dan ketersediaan TPS yang terbatas. Pressure dari isu persampahan adalah perubahan pola konsumsi, pengelolaan dan retribusi (peraturan daerah). State dapat dilihat dari perkiraan timbulan sampah dan sarana prasarana persampahan. Dampak yang ditimbulkan adanya banjir dan penurunan kualitas air dikarenakan adanya air lindi (leachate) yang masuk ke badan air. Menanggapi hal tersebut yang dilakukan adalah anggaran pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi composting plant, pengelolaan berbasis masyarakat dan Perwal Jakstrada.

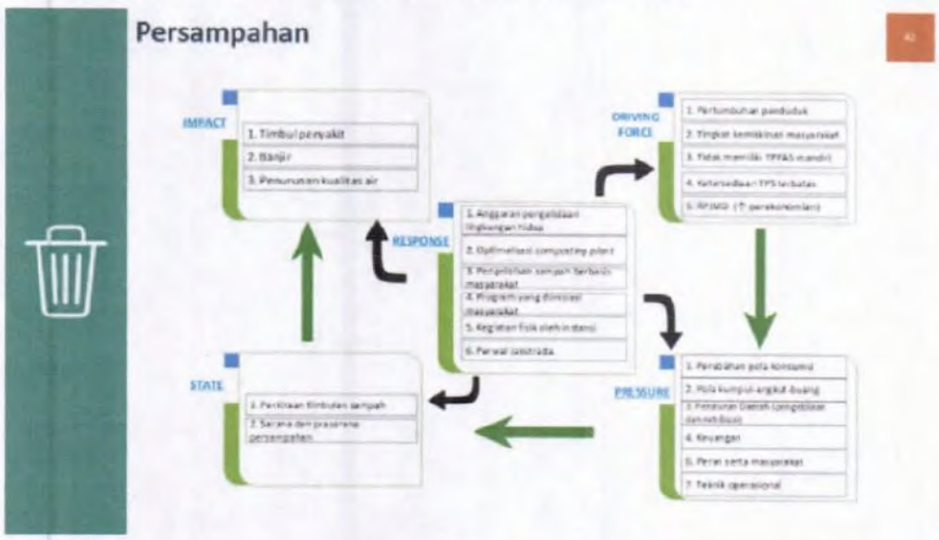

Tata Kelola

RTRW, RPJMD dan pertumbuhan penduduk Kota Cimahi adalah pemicu pada tata kelola. Tekanan berupa pendapatan daerah dan regulasi perizinan lingkungan. State dapat dilihat dari kapasitas SDM, anggaran pengelilaan lingkungan. Impact dari state pada tata kelola

adalah tidak optimalnya program lingkungan, pengaduan masyarakat, pencemaran lingkungan dan sanksi. Produk hukum dan penerimaan penghargaan lingkungan menjadi response pada isu tata kelola.

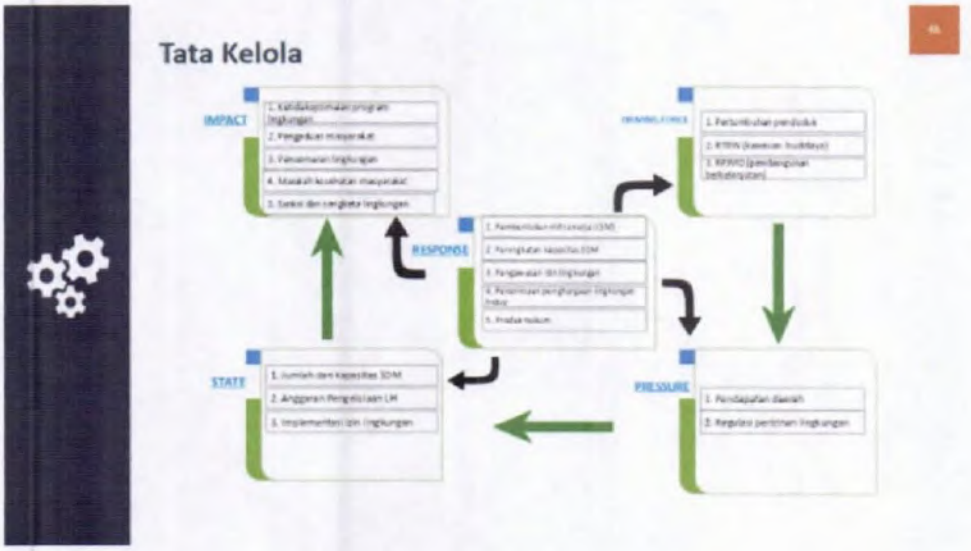

Risiko Bencana

Intensitas hujan, lahan permukaan, pelayanan persampahan dan pertumbuhan penduduk merupakan driving force. Adanya pemicu tersebut memberi tekanan perubahan lahan, penurunan muka air tanah, peningkatan air larian. State dari risiko bencana yang timbul yaitu banjir, kekeringan dan tanah longsor yang berdampak pada kerugian materi. Response yang dilakukan adalah adanya kajian oleh BPBD, melakukan monitoring, pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sampah untuk pencegahan bencana.

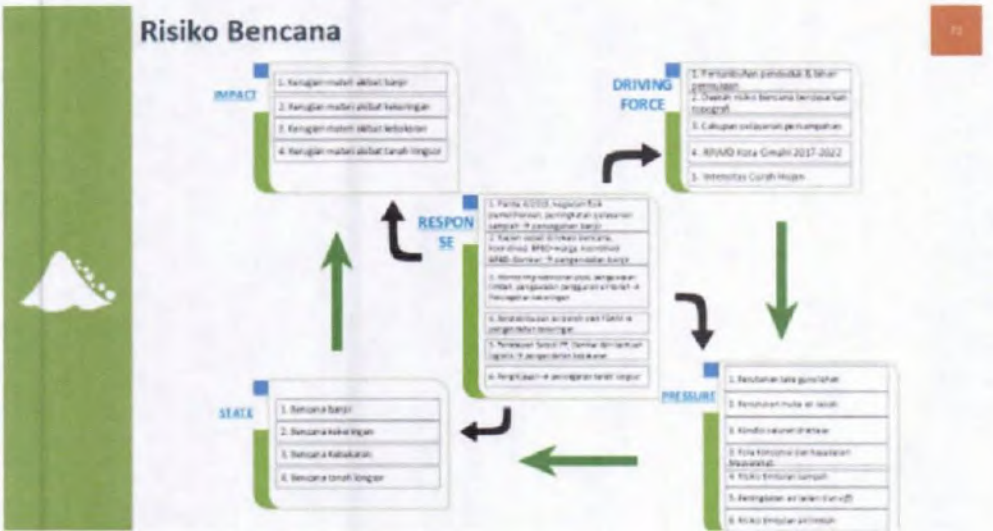

Diskusi

Titin Rohayatin (Akademisi)

Walaupun sudah dipandang bagus dalam perumusan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020, dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi catatan saya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan perumusan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020.

Berbicara tentang Skala Prioritas/ Komponen Tinjauan yang dirumuskan oleh Tim perumus dalam Slide pada halaman 5 dan 6 terdapat 6 Skala prioritas, yaitu

1. Tata Guna Lahan
2. Kualitas Air
3. Kualitas Udara
4. Resiko Bencana
5. Persampahan
6. Tata Kelola.

Dari ke enam prioritas itu saya mempunyai pandangan untuk point 6 (TATA KELOLA) tidak perlu dibuat tersendiri/ terpisah dengan alasan bahwa di setiap komponen tinjauan pasti berbicara tentang management/ Tata Kelola dari setiap komponen tinjauan. Tatkala kita bicara tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, resiko Bencana dan persampahan pasti disertakan dengan management nya sehingga dapat terumuskan dengan baik sehingga itu alasan untuk komponen Tata Kelola tidak perlu terpisah akan tetapi TERINTEGRASI dengan komponen lain.

Untuk komponen TATA GUNA LAHAN hal ini harus disinergikan dengan Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi, sehingga tidak terjadi Tumpang Tindih Lahan, dalam hal ini perlu ditinjau kembali oleh pihak terkait perihal Perda Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi, menurut pandangan saya Perda tersebut untuk segera diperbaiki karena banyak hal yang sudah tidak sesuai/ tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Begitu juga saya lihat saat ini penggunaan lahan di Kota Cimahi sudah tidak lagi sesuai dengan Peruntukannya. Perlu disadari oleh Pemerintah Cimahi bahwa luas wilayah Cimahi itu sangat sempit bahkan luas wilayah Kota Cimahi sebesar 70% milik TNI AD, hanya 30 % milik Kota Cimahi. Hal ini jika dikaitkan dengan UU Lingkungan Hidup 30% itu hanya diperuntukan sebagai resapan. Atas dasar itu perlu adanya Strategi Pemerintah dalam pemanfaatan lahan tersebut, sehingga lahan sedikit mempunyai manfaat banyak dan tentunya diperkuat oleh Regulasinya. Begitu juga harus diperhatikan tentang Ruang Terbuka Hijaunya (RTH). Apalagi RTH masuk dalam Program Pemerintah saat ini.

Berbicara tentang KUALITAS AIR di Kota Cimahi menurut pandangan saya saat ini di Cimahi sudah dapat dikatakan Krisis baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Secara kuantitas saat ini sudah berkurang, jika mengalami musim kemarau baru sedikit saja Cimahi sudah kekeringan, hal ini bisa saja dikarenakan jumlah penduduk yang padat, sehingga dalam hal ini saya memberikan saran dalam hal ini melakukan Kerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah yang merupakan perbatasan dengan Kota Cimahi (misalnya KBB, Kabupaten Bandung, Kota Bandung). Perlu adanya Strategi Kerjasama yang dibangun antar pemerintah Daerah sehingga nantinya diharapkan secara kuantitas akan tetap stabil dan dapat mencukupi kebutuan masyarakat Kota Cimahi. Selain Kerjasama dengan daerah perbatasan Pemerintah juga perlu mempersiapkan strategi pengelolaan dan pengolahan air secara TERBARUKAN sehingga selain dapat memenuhi kebutuhan masyarakat juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi dari system pengolahan tersebut, Sistem pengelolaan dan pengelohan ini Pemerintah bisa bekerjasama dengan Peguruan Tinggi. Begitu juga bicara air secara kualitas harus adanya strategi pengelolaan dan Kerjasama dengan industry jangan sampai kualitas air dapat tercemar dengan limbah industry. Sebenarnya Pemerintah Daerah bisa melimpahkan kepada industry terkait kualitas air, industry diminta untuk mengelola air dengan mekanisme terbarukan di wilayah industrynya sehingga kualitas air akan tetap terjaga dengan baik. Dalam hal ini Pemerintah melihat peluang mana yang di Kelola oleh Pemerintah mana yang dikelola oleh Pihak ke 2 atau pihak ke 3. Jika hal ini dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah diharapkan kualitas dan kuantitas air dapat terjaga dengan baik.

Berbicara tentang KUALITAS UDARA, banyak hal yang mempengaruhi tentang kualitas udara diantaranya adalah kurang terkelolanya dengan baik pengelolaan sampah, limbah industry yang tidak dikelola dengan baik, volume kendaraan yang banyak sehingga hal tersebut dapat mengurangi dari kualitas udara. Untuk itu perlu adanya beberapa strategi untuk dapat mempertahankan kualitas udara misalnya sampah dikelola dengan baik, limbah industry dikelola dengan baik, begitu juga volume kendaraan dikelola dengan baik. Mengingat semakain padatnya penduduk cimahi ini juga berdampak kepada meningkatnya voplume kendaraan di Kota Cimahi, sehingga di Cimahi mengalami kemacetan yang luar biasa di Kota Cimahi, dalam hal ini perlu Kerjasama dengan instansi terkait untuk penataan arus lalu lintas sehingga dapat mengurai kemacetan di Cimahi. Dalam komponen Kualitas udara saya menyarankan ada sub bagian bicara tentang volume kendaraan yang menimbulkan kemacetan dan kualitas udara berkurang. Dalam hal ini pengelolaannya baik dari pengelolaan sampah, pengelolaan limbah dan pengelolaan transportasi pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan hal tersebut.

Berbicara tentang PERSAMPAHAN. Mengenai sampah ini merupakan hal yang tidak mudah, Sampah dapat berdampak ke berbagai aspek/ komponen tinjauan seperti ke Kualitas air, kualitas udara bahkan ke tata guna lahan dan kepada resiko bencana. Pengelolaan sampah perlu dengan kehati-hatian. Tata Kelola persampahan ini harus secara pertahap diterapkan sehingga tidak membawa pengaruh negative ke komponen yang lainya. Perlu adanya tempat pembuangan akhir sampah yang permanen, perlu adanya pemilahan dan pengolahan sampah dengan baik. Sampah jika dikelola dengan baik akan menjadi sesuatu yang menguntungkan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Sampah jika dikelola dengan baik akan membuka lapangan pekerjaan, Dengan adanya pengelolaan sampah dengan baik tentu diharapkan tidak membawa aspek negative kepada komponen kualitas air, kualitas udara dan dapat mengurangi resiko bencana. Perlu adanya pemikiran yang lebih ekstra bagaimana supaya sampah menjadi sesuatu yang menghasilkan dan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat setempat sehingga dalam hal ini perlu adanya inovasi – inovasi dalam pengelolaan sampah, jangan sampai sampah menjadi beban masyarakat, menjadi beban pemerintah akan tetapi perlu ada strategi atau perubahan pola bahwa sampah justru menjadi sesuatu yang meringankan beban pemerintah dan beban masyarakat dengan cara inovasi yang diterapkan dalam pengelolaan sampah sehingga sampah menjadi sesuatu yang dianggap membantu dan menguntungkan lingkungan baik lingkungan pemerintaha maupun lingkungan di luar pemerintahan. Salah satunya inovasi yang sederhana sampah jika dikelola dengan baik salah satunya bisa menjadi bahan bakar, dan banyak lagi pemanfaatan dari sampah jika dikelola dengan baik bahkan dapat dikelola secara home industry sehingga dapat membantu memperbaiki perekonomian masyarakat.

Masyarakat Adat (Kang Yana)

Pertumbuhan penduduk berpengaruh pada tata guna lahan. Bagaimana tata kelola berfungsi sebagai pengatur keseimbangan keberlangsungan hidup. Menjadikan Kampung Cireundeu menjadi pilot project agar dikelola bersama untuk mengedukasi masyarakat untuk tata kelola lahan. Pemerintah ikut berperan untuk memperbaiki tata guna lahan melalui tata kelola. Penegakan hukum harus jelas. Fungsi budaya, sosial dan lingkungan.

LPM Kota Cimahi (Pak Indra)

Tata guna lahan, penghijauan di sempadan sungai. Dari sini akan berdampak pada kualitas udara, kuantitas dan kualitas air. Pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau dan ketahanan pangan.

GGG (Eva Yohana)

Tata guna lahan, kualitas air dan persampahan. Banyak lahan negara yang dikuasai pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Masyarakat adat menggunakan lahan bekas TPA Leuwigajah dimanfaatkan didukung oleh pemerintah kota dan provinsi. KCIC di Cimahi Selatan mohon diawasi oleh pemerintah, karena jalur KCIC akan banyak menimbulkan dampak kuantitas dan kualitas air bersih dan risiko bencana. Bank Sampah bersinergi dengan Satgas Citarum Harum untuk mengelola lingkungan. Perubahan perilaku masyarakat harus diedukasi oleh akademisi. Karang taruna memberdayakan pemuda dioptimalkan untuk pengelolaan lingkungan. Regulasi dan control sosial perlu dilakukan.

APINDO (Bu Christina)

Industri mendukung perbaikan lingkungan di Kota Cimahi, namun pada poin pengolahan limbah diharapan ada standard dan baku mutu yang jelas untuk pengelolaan limbah. Sampah industri dikelola dengan baik karena sampah industri masih memiliki nilai jual. Kemacetan menjadi masalah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

NOTULEN,

Citra Sylvanite Choerunoer, ST

Dokumentasi Kegiatan FGD DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020

Daftar Hadir FGD DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020 Report

Form: Daftar Hadir FGD DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2020

NAMA	INSTANSI	Nomor Telepon	TANDA TANGAN	Added Time	Referrer Name	Task Owner
Christina SM, SH	APINDO	08112290995		02-Jul-2020 20:36:44		chsylvanite@gmail.com
Arisna	Dlh	082216998869		01-Jul-2020 22:11:41		chsylvanite@gmail.com
Diena Fadiah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	081805960171		01-Jul-2020 21:44:29		chsylvanite@gmail.com
Irfan Salim TH	LPM KOTA CIMAHI	087825148826		01-Jul-2020 21:23:08		chsylvanite@gmail.com
Agus Rohendi,SE.,Msi	DPMPTSP	081211621092		01-Jul-2020 21:23:03		chsylvanite@gmail.com
Ade	Ketua PKK Kec.Cimahi Tengah	081320069698		01-Jul-2020 21:21:33		chsylvanite@gmail.com
IMAL HAMBALI	PMI KOTA CIMAHI	08986133599		01-Jul-2020 21:20:53		chsylvanite@gmail.com
Dr Dikke Suseno Isako MMRS	Dinas kesehatan	0818220398		01-Jul-2020 21:16:50		chsylvanite@gmail.com
Ifa Yasyfina	Bappeda Kota Cimahi	08112249893		01-Jul-2020 21:11:54		chsylvanite@gmail.com
EVA YOHANA	YAYASAN GREEONE GO GREEN	081214029391		01-Jul-2020 21:06:11		chsylvanite@gmail.com
Jajang Bintaya	DLH	082120076196		01-Jul-2020 21:02:54		chsylvanite@gmail.com
YANA	MASYARAKAT ADAT KAMPUNG CIREUNDEU	085221357509		01-Jul-2020 20:45:21		chsylvanite@gmail.com
ajat sudrajat	BPBD Kota Cimahi	081220080005		01-Jul-2020 20:45:14		chsylvanite@gmail.com
Heksantia Rahmadinda Yasya	Itenas Bandung	083134918337		01-Jul-2020 20:39:14		chsylvanite@gmail.com

NAMA	INSTANSI	Nomor Telepon	TANDA TANGAN	Added Time	Referrer Name	Task Owner
Aneke P. Kesumajana	UPTD SPALD DPKP Kota Cimahi	081320025360		01-Jul-2020 20:37:39		chsylvanite@gmail.com
HERRY SETIAWAN	KECAMATAN CIMAHI TENGAH	082120197796		01-Jul-2020 20:35:21		chsylvanite@gmail.com
SRI SURYA	DISBUDPARPORA	082115343130		01-Jul-2020 20:33:41		chsylvanite@gmail.com
Puji Astuti, SKM.MM	RSUD Cibabat Cimahi	082115499075		01-Jul-2020 20:31:03		chsylvanite@gmail.com
CIMUT	KECAMATAN CIMAHI UTARA	022 6654591		01-Jul-2020 20:30:42		chsylvanite@gmail.com
Citra Sylvanite	DLH	082115590893		01-Jul-2020 20:24:32		chsylvanite@gmail.com
Iwan Juwana	Institut Teknologi Nasional Bandung	081320719427		01-Jul-2020 20:24:06		chsylvanite@gmail.com
Achadiyat Djundjunan, SKM	RSUD Cibabat Kota Cimahi	082120013589		01-Jul-2020 20:23:35		chsylvanite@gmail.com
Syaeful Rachman	BPKAD	085861897455		01-Jul-2020 20:21:04		chsylvanite@gmail.com
alfi fauziah	dinas perhubungan	082128938767		01-Jul-2020 20:19:50		chsylvanite@gmail.com
Sambas Subagdja	DPKP Kota Cimahi	081394141707		01-Jul-2020 20:18:27		chsylvanite@gmail.com
Dyah	DLH	082121954153		01-Jul-2020 20:18:21		chsylvanite@gmail.com
Dr. Titin Rohayatin, S.IP.,M.SI	Unjani	083820083070		01-Jul-2020 20:02:31		chsylvanite@gmail.com
DADANG RAMDHAN HENDARSYAH	DISDAGKOPERIN KOTA CIMAHI	085721513745		01-Jul-2020 20:00:51		chsylvanite@gmail.com
Fatima Kudsyana	DLH Cimahi	083822306618		01-Jul-2020 19:39:07		chsylvanite@gmail.com
agus isharyanto	DLH	081214646043		01-Jul-2020 19:38:45		chsylvanite@gmail.com

NAMA	INSTANSI	Nomor Telepon	TANDA TANGAN	Added Time	Referrer Name	Task Owner
Tenri Pakki	Dispangtan	081809007676		01-Jul-2020 19:38:18		chsylvanite@gmail.com
afif mego nugroho	uptd lab lingkungan dlh	081395171756		01-Jul-2020 19:36:57	android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/	chsylvanite@gmail.com
Nanda Kusumahsari	Dinas Lingkungan Hidup	085793228835		01-Jul-2020 19:35:20		chsylvanite@gmail.com
ITA RUSWATI	DLH KOTA CIMAHI	081910371307		01-Jul-2020 19:33:57		chsylvanite@gmail.com
Ardhana Mulia	Kasi IPLH Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	082117810056		01-Jul-2020 19:33:06		chsylvanite@gmail.com
Asep Hendrayana	BKPSDMD Kota Cimahi	081931456550		01-Jul-2020 19:28:47		chsylvanite@gmail.com
Dewita Rachman	Bidang PSLB3PK DLH	08122074880		01-Jul-2020 19:21:53		chsylvanite@gmail.com
Andre Yuliandi	DLH Kota Cimahi	081221221144		01-Jul-2020 19:21:21		chsylvanite@gmail.com
Mochamad Ronny	Dinas Lingkungan Hidup	081225858999		01-Jul-2020 19:12:27		chsylvanite@gmail.com
Nia Fatmawati H, S. Kom	Dinas Pangan dan Pertanian	0818234044		01-Jul-2020 19:09:09		chsylvanite@gmail.com

DATA INFORMASI NARASUMBER

Nama (lengkap & Gelar) : Dr. Titin Rohayatin, S.IP., M.Si

Alamat Rumah : Jl. Pemda 2 No 73 Cibabeu

NIP : 4121 415 . 73

Pangkat/Gol. : III . d.

Jabatan : Dosen

Instansi : Unjani

Pendidikan Terakhir : S-3 .

NPWP : 07.305.612.3.421.000 .

No. Rekening Bank : (BNI) 128 7230 49 / 128 7230 49

Nomor Telepon : 0838 2008 3070 .

Cimahi, 2020

( )

DATA INFORMASI NARASUMBER

Nama (lengkap & Gelar) : Eva Yohana

Alamat Rumah : Jl. Baros utama No. 28 Rt 05 Rw 03

NIP : -

Pangkat/Gol. : -

Jabatan : Sekretaris YGBG

Instansi : Yayasan Greene Go Green

Pendidikan Terakhir : D III

NPWP : 84.289.050.1-421.000

No. Rekening Bank : 132.002.108.2350 Mandiri

Nomor Telepon : 081214029391

Cimahi, 3/7/2020

(Eva Yohana)

DATA INFORMASI NARASUMBER

Nama (lengkap & Gelar) : christina Sri Manunggal, SH.

Alamat Rumah : Bukit Cipageran Indah A No 83 Cimahi

NIP : .....

Pangkat/Gol. : .....

Jabatan : Sekretaris

Instansi : DPK Apindo Cimahi

Pendidikan Terakhir : Sarjana

NPWP : .....

No. Rekening Bank : BCA 0081451175

Nomor Telepon : 081122 90995

Cimahi, 2020

Chi

(christina SM)

DATA INFORMASI NARASUMBER

Nama (lengkap & Gelar) : IMAL HAMBALI S.Pdi

Alamat Rumah : Kp. Sawah Leusa RT 02/02 Cipageuran

NIP : -

Pangkat/Gol. : -

Jabatan : Relawan KSR Kota Cimahi

Instansi : PMI Kota Cimahi

Pendidikan Terakhir : Sarjana

NPWP : -

No. Rekening Bank :

Nomor Telepon : 089861335 99

Cimahi, 2020

( )

DATA INFORMASI NARASUMBER

Nama (lengkap & Gelar) : YANA

Alamat Rumah : Kp. Cireundeu RT 02 RW 10 Kel. Leuwigajah

NIP : -

Pangkat/Gol. : -

Jabatan : Masyarakat

Instansi : Masyarakat adat kp. Cireundeu

Pendidikan Terakhir : SMP.

NPWP : 00 847 032 2-421 000

No. Rekening Bank : - 3669 0100 2535539 (BRI)

Nomor Telepon : 085221357509

Cimahi, 6 July 2020

(Yana.)

LAMPIRAN II

TABEL UTAMA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		0	0	0	0	0
		2. Kawasan Bergambut		0	0	0	0	0
		3. Kawasan Resapan Air		16,69	-	-	-	-
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		0	0	0	0	0
		2. Sempadan Sungai		29,2	-	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk		3,0	0	0	0	0
		4. Ruang Terbuka Hijau		772,5	-	-	-	-

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		0	0	0	0	0
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya		0	0	0	0	0
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Marga Satwa Laut		0	0	0	0	0
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		0	0	0	0	0
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		0	0	0	0	0
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		0	0	0	0	0
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		0	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		0	0	0	0	0
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		147	-	-	-	-
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		0	0	0	0	0
		3. Kawasan Rawan Banjir		0	0	0	0	0
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	0	0	0	0	0
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	0	0	0	0	0
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	0	0	0	0	0
		2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	0	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	0	0	0	0	0
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	0	0	0	0	0
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	0	0	0	0	0
			v. Kawasan Rawan Tsunami	0	0	0	0	0
			vi. Kawasan Rawan Abrasi	0	0	0	0	0
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	0	0	0	0	0
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	0	0	0	0	0

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
		Terhadap Air Tanah	ii. Sempadan Mata Air	0	0	0	0	0
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		0	0	0	0	0
		2. Ramsar		0	0	0	0	0
		3. Taman Buru		0	0	0	0	0
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		0	0	0	0	0
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		0	0	0	0	0
		6. Terumbu Karang		0	0	0	0	0
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau BiotaLaut yang Dilindungi		0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada data tersedia
3. Luasan dinyatakan dalam satuan Ha
4. Didapat dari RTRW Kota Cimahi 2012-203

Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2019

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kota	Luas Lahan Non Pertanian	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Kering	Luas Lahan Perkebunan	Luas Lahan Hutan	Luas Lahan Badan Air
1	Cimahi	3.492,208	136	198,64	184	6,668	3,484

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada data tersedia
3. Luasan dinyatakan dalam satuan Ha
4. Hutan yang dimaksud merupakan hutan kota di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	0
2	Hutan Lindung	0
3	Taman Nasional	0
4	Taman Wisata Alam	0
5	Taman Buru	0
6	Cagar Alam	0
7	Suaka Margasatwa	0
8	Taman Hutan Raya	0
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	0
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0
3	Hutan Kota	237,12
4	Taman Hutan Raya	0
5	Taman Keanekaragaman Hayati	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada data tersedia
3. Data diambil dari SK Walikota Tahun 2012 dan Profil Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cimahi Tahun 2016

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
1. Hewan menyusui	*Canis sp*	Anjing		Tidak	Tidak	Ya
	Felis silvestris catus	Kucing		Tidak	Tidak	Ya
	Felis domestika	Kucing		Tidak	Tidak	Ya
	Mus sp	Mencit		Tidak	Tidak	Ya
	Rattus rattus	Tikus rumah		Tidak	Tidak	Ya
	Rattus argentiventer	Tikus sawah		Tidak	Tidak	Ya
	Rattus norvegicus	Tikus got		Tidak	Tidak	Ya
	Rattus tiomanicus	Tikus pohon		Tidak	Tidak	Ya
	Bandicota indica	Tikus wirok		Tidak	Tidak	Ya
	Canis familiaris domesticus	Anjing		Tidak	Tidak	Ya
	Lariscus insignus	Bajing		Ya	Tidak	Ya
	Lutrogale perspicillata	Berang-berang/ Wregul		Ya	Tidak	Ya
	Cynopterus sphinx	Codot		Tidak	Tidak	Ya
	Herpetes javanicus	Garangan		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Pteropus vampyrus	Kalong		Ya	Tidak	Ya
	Paradoxurus hermaphroditus	Musang/ Luwak		Ya	Tidak	Ya
	Tupaia javanica	Tupai		Ya	Ya	Tidak
	Bos taurus	Sapi potong		Tidak	Tidak	Ya
	Bosindicus	Sapi potong		Tidak	Tidak	Ya
	Bos taurus	Sapi perah		Tidak	Tidak	Ya
	Bubalus bubalis	Kerbau		Tidak	Tidak	Ya
	Equus ferus caballus	Kuda		Tidak	Tidak	Ya
	Capra aegagrus hircus	Kambing		Tidak	Tidak	Ya
	Ovis aries	Domba		Tidak	Tidak	Ya
	Sus scrofa demestica	Babi		Tidak	Tidak	Ya
	Lepus sp	Kelinci		Tidak	Tidak	Ya
2. Burung	*Passer montanus*	Burung gereja		Tidak	Tidak	Ya
	Acciptridae	Alap-alap		Ya	Ya	Tidak
	Falco severus	Alap-alap macan		Ya	Ya	Tidak
	Gallus gallus	Ayam hutan hijau		Ya	Tidak	Ya
	Gallus varius	Ayam hutan merah		Ya	Tidak	Ya
	Leptoptilius javanicus	Bangau		Ya	Tidak	Ya
	Psittacula alexandri	Betet		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Ardeola speciosa	Blekok sawah		Ya	Tidak	Ya
	Lonchura leucogastroides	Bondol jawa		Ya	Tidak	Ya
	Lonchura punctulata	Bondol peking		Ya	Tidak	Ya
	Bubu sp	Burung hantu		Ya	Tidak	Ya
	Otus migicus beccarii	Burung hantu		Ya	Tidak	Ya
	Anthreptes malacensis	Burung madu kelapa		Ya	Ya	Tidak
	Nectarinia jugularis	Burung madu Sriganti		Ya	Ya	Tidak
	Centropus bengalensis	Burung but-but		Ya	Tidak	Ya
	Dicaeum trochileum	Cabe Jawa		Ya	Tidak	Ya
	Larus sp	Camar		Ya	Tidak	Ya
	Halcyon cyanoventris	Cekakak Jawa		Ya	Ya	Tidak
	Phylloscopus borealis	Cikrak Kutub		Ya	Tidak	Ya
	Orthotomus ruficeps	Cinenen Kelabu		Ya	Tidak	Ya
	Orthotomus sutorius	Cinenen Pisang		Ya	Tidak	Ya
	Aegithina tiphia	Cipoh Kacat		Ya	Tidak	Ya
	Pycnonotus aurigaster	Cucak Kutilang		Ya	Tidak	Ya
	Pycnonotus zeylanicus	Cucak rowo		Ya	Tidak	Ya
	Streptopelia bitorquata	Deruk jawa		Ya	Tidak	Ya
	Accipiter soloensis	Elang Alap Cina		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Spilornis cheela	Elang Ular Bido		Ya	Ya	Tidak
	Lonchura maja	Emprit haji		Tidak	Tidak	Ya
	Corvus enca	Gagak hutan		Ya	Ya	Tidak
	Pada oryzivora	Gelatik		Ya	Tidak	Ya
	Parus major	Gelatik batu kelabu		Ya	Tidak	Ya
	Sturnus contra	Jalak suren		Ya	Tidak	Ya
	Sturnus melanopterus	Jalak putih		Ya	Ya	Tidak
	Acridotherus javanicus	Jalak kerbau		Ya	Ya	Tidak
	Leucopsarrothschildii	Jalak Bali		Ya	Ya	Tidak
	Zosterops palpebrosus	Kacamata biasa		Ya	Tidak	Ya
	Zosterops flavus	Kacamata jawa (Pleci)		Ya	Tidak	Ya
	Copsychus sechellarum	Kacer jawa		Ya	Tidak	Ya
	Cuculus saturatus	Kangkok ranting		Ya	Tidak	Ya
	Hypothymis azurea	Kehicap ranting		Ya	Tidak	Ya
	Oriolus chinensis	Kepodang kuduk hitam		Ya	Tidak	Ya
	Serinus canaria	Kenari		Ya	Tidak	Ya
	Bulbucus ibis	Kuntul		Ya	Ya	Tidak
	Pycnonotus aurigaster	Kutilang		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Hirundo rustica	Layang layang api		Ya	Tidak	Ya
	Pycnonotus goiavier	Merbah cerukcuk		Ya	Tidak	Ya
	Columbia lifia	Merpati		Tidak	Tidak	Ya
	Copsychus malabaricus	Murai batu		Ya	Tidak	Ya
	Melopsittacus endulatus	Parkit		Ya	Tidak	Ya
	Malacocincla sepiarium	Pelanduk semak		Ya	Tidak	Ya
	Lanius sp	Pentet		Ya	Tidak	Ya
	Prinia polychroa	Perenjak coklat		Ya	Tidak	Ya
	Prinia inornata	Perenjak padi		Ya	Tidak	Ya
	Prinia familiaris	Perenjak jawa		Ya	Tidak	Ya
	Geopelia striata	Perkutut		Ya	Tidak	Ya
	Alcnedo atthis	Prenjak		Ya	Tidak	Ya
	Streptopelia bitorquata	Puter		Ya	Tidak	Ya
	Turnix suscifator	Puyuh		Tidak	Tidak	Ya
	Phyloscocum moratus	Raja udang		Ya	Tidak	Ya
	Pericrocotus cinnamomeus	Sepah kecil		Ya	Tidak	Ya
	Tyto alba	Serak Jawa		Ya	Tidak	Ya
	Anthereptes malacensis	Sesap madu		Ya	Tidak	Ya
	Pernis ptilorhynchus	Sikep madu asia		Ya	Tidak	Ya
	Hirundo rustica guturalis	Sriti		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Streptopelia chinensis	Tekukur biasa		Ya	Tidak	Ya
	Pycnonotus goiavier	Terucuk		Ya	Tidak	Ya
	Colocalia esculenta	Walet sapi		Tidak	Tidak	Ya
	Collocalia linchi	Walet linchi		Ya	Tidak	Ya
	Gallus gallus domesticus	Ayam Buras		Tidak	Tidak	Ya
	Gallus gallus	Ayam Ras Petelur		Tidak	Tidak	Ya
	Gallus gallus	Ayam Ras Pedaging		Tidak	Tidak	Ya
	Anas sp	Itik		Tidak	Tidak	Ya
	Turnix suscitator	Puyuh		Tidak	Tidak	Ya
	Meleagris gallopavo	Kalkun		Tidak	Tidak	Ya
3. Reptil	*Naja sputatrix*	Ular cobra/sendok		Ya	Tidak	Ya
	Trimeresurus albbolabris	Ular hijau		Ya	Tidak	Ya
	Acerochordus granulatas	Ular kadut		Ya	Tidak	Ya
	Xenopeltis unicolor	Ular pelangi		Ya	Tidak	Ya
	Python reticulatus	Ular sawah		Ya	Tidak	Ya
	Bungarus javanicus	Ular welang		Ya	Tidak	Ya
	Rhamphotyphlops braminus	Ular kawat		Ya	Tidak	Ya
	Python reticulatus	Ular sanca kembang		Ya	Tidak	Ya
	Morelia viridis	Ular sanca hijau.		Ya	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Homalopsis buccata	Ular kadut belang		Ya	Tidak	Ya
	Ahaetulla prasina	Ular gadung		Ya	Tidak	Ya
	Boiga dendrophila	Ular cincin mas		Ya	Tidak	Ya
	Dendrelaphis pictus	Ular tambang		Ya	Tidak	Ya
	Ptyas korros	Ular tikus / ular jali		Ya	Tidak	Ya
	Sibynophis geminatus	Ular serasah		Ya	Tidak	Ya
	Calloselasma rhodostoma	Ular tanah		Ya	Tidak	Ya
	Bungarus canddius	Ular weling		Ya	Tidak	Ya
	Calotes cristatellus	Bunglon		Tidak	Tidak	Ya
	Cosymbotus platyuru	Cecak tembok		Tidak	Tidak	Ya
	Hemidactylus frenatus	Cecak kayu		Tidak	Tidak	Ya
	Gehyra mutilata	Cecak gula		Tidak	Tidak	Ya
	Cyrtodactylus marmoratus	Cecak batu		Tidak	Tidak	Ya
	Mabuya multifasciata	Kadal kebun		Tidak	Tidak	Ya
	Takydromus sexlineatus	Kadal rumput		Tidak	Tidak	Ya
	Gecko gecho	Tokek rumah		Tidak	Tidak	Ya
	Gecko monarchus	Tokek berbintik		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Cerberus rynchops	Ular air		Tidak	Tidak	Ya
	Varanus salvator	Biawak		Ya	Tidak	Ya
	Chelydra serpentia	Kura-kura		Ya	Tidak	Ya
4. Amphibi	*Bufo asper*	Bangkong sungai		Tidak	Tidak	Ya
	Microhyla achatina	Precil jawa		Tidak	Tidak	Ya
	Rana limnocharis	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
	Rana cancrivora	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
	Rana erythraea	Katak kolam		Tidak	Tidak	Ya
	Rana macrodon	Katak sungai		Tidak	Tidak	Ya
	Rana chalconota	Katak sungai		Tidak	Tidak	Ya
	Rana macrodon	Katak hijau		Tidak	Tidak	Ya
	Rana limnocharis	Katak rawa		Tidak	Tidak	Ya
	Rana cancrivora	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
5. Ikan	*Monopterus albus*	Belut		Tidak	Tidak	Ya
	Channa sp	Ikan gabus		Tidak	Tidak	Ya
	Aplocheilus panchax	Ikan kepala timah		Tidak	Tidak	Ya
	Poecilia reticulata	Ikan seribu		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Barbodes gonionotus	Ikan Tawes		Tidak	Tidak	Ya
	Clarias batrachus	Lele lokal		Tidak	Tidak	Ya
	Oshpronemus gouramy	Gurame		Tidak	Tidak	Ya
	Ctenopharyngodon idella	Grass carp		Tidak	Tidak	Ya
	Cyprinus carpio	Ikan Emas		Tidak	Tidak	Ya
	Clarias batrachus	Lele		Tidak	Tidak	Ya
	Oreochromis mossambica	Mujair		Tidak	Tidak	Ya
	Oreochromis nilotica	Nila		Tidak	Tidak	Ya
	Pangasius sp	Patin		Tidak	Tidak	Ya
	Macrobrachium pilimanus	Udang galah		Tidak	Tidak	Ya
	Litopenacus sp	Udang vename		Tidak	Tidak	Ya
	Xiphophorus maculatus platy	Plati		Tidak	Tidak	Ya
	Poecillia reticulata guppy	Guppy		Tidak	Tidak	Ya
	Poecilia latipinna saifin molly	Molly		Tidak	Tidak	Ya
	Carassius auratus	Koki		Tidak	Tidak	Ya
	Cyprinus carpio	Koi		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Betta splendens	Ikan cupang		Tidak	Tidak	Ya
6. Keong	*Achatina fulica*	Bekicot		Tidak	Tidak	Ya
	Limnaea javanica	Keong sawah		Tidak	Tidak	Ya
	Pomacea canaliculata	Keong mas		Tidak	Tidak	Ya
	Helix sp	Siput kebun		Tidak	Tidak	Ya
	Brotia testudinaria	Molusca air tawar/siput		Tidak	Tidak	Ya
	Lymnaea sp	Molusca air tawar/siput		Tidak	Tidak	Ya
	Hydrometridae	Pengukur air		Tidak	Tidak	Ya
	Corbicula javanica	Remis		Tidak	Tidak	Ya
7. Serangga	*Oxya japonica*	Belalang hijau		Tidak	Tidak	Ya
	Valanga nigricormis	Belalang kayu		Tidak	Tidak	Ya
	Montis religiosa	Belalang sembah		Tidak	Tidak	Ya
	Periplaneta australasiae	Kecoa		Tidak	Tidak	Ya
	Neurothemis sp	Capung air		Tidak	Tidak	Ya
	Bombyx mori	Ngengat (ulat sutera)		Tidak	Tidak	Ya
	Antheraca	Ngengat		Tidak	Tidak	Ya
	Dundabia manifera	Tonggeret		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Nilaparvata lugens	Wereng coklat		Tidak	Tidak	Ya
	Leptocorisa oratorius	Walang sangit		Tidak	Tidak	Ya
	Orycetes rhinocerrous	Kumbang tanduk		Tidak	Tidak	Ya
	Diconocoris hewetti	Kepik		Tidak	Tidak	Ya
	Photuris lucicrescens	Kunang-kunang		Tidak	Tidak	Ya
	Apis cerana	Lebah madu/lokal		Tidak	Tidak	Ya
	Monomorium pharaonis	Semut pharaoh		Tidak	Tidak	Ya
	Solenopsis invicta	Semut api		Tidak	Tidak	Ya
	Oecophylla saragillina	Semut rangrang		Tidak	Tidak	Ya
	Oxyopes javanus	Laba-laba		Tidak	Tidak	Ya
	Androctonus sp	Kalajengking		Tidak	Tidak	Ya
	Musca domestica	Lalat rumah		Tidak	Tidak	Ya
	Culex	Nyamuk		Tidak	Tidak	Ya
	Julus virgatus	Kaki seribu		Tidak	Tidak	Ya
	Scoloppdridae	Kelabang		Tidak	Tidak	Ya
	Gryllotalpa sp	Jengkerik		Tidak	Tidak	Ya
	Fragaria vesea	Arben		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
8. Tumbuh-tumbuhan	*Crinum asiaticum L.*	Bakung		Tidak	Tidak	Ya
	Hensiowia frutescens champ	Benalu		Tidak	Tidak	Ya
	Bauhinia purpurea	Bunga kupu-kupu		Tidak	Tidak	Ya
	Allmania nodiflora R.Br.	Jenis rumput		Tidak	Tidak	Ya
	Borreria repens D.C.	Jenis rumput		Tidak	Tidak	Ya
	Cyperus aristatus Rottr	Jenis rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
	Cyperus cyperinus V.S	Jenis rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
	Ipomoea carssicaulis Rob	Krangkongan		Tidak	Tidak	Ya
	Portulaca olerarea L	Krokot		Tidak	Tidak	Ya
	Hibiscus rosasinensis	Kembang Sepatu		Tidak	Tidak	Ya
	Phyllantuhus acidus	Maja		Tidak	Tidak	Ya
	Euphorbia hirta	Patikan kebo		Tidak	Tidak	Ya
	Leucaena leucephala	Petai cina		Tidak	Tidak	Ya
	Buchanania arborescens	Popohan		Tidak	Tidak	Ya
	Mimosa pudica	Putri malu		Tidak	Tidak	Ya
	Euphorbia pulcherrima Willd.	Racunan		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Panicum repens	Rumput balungan		Tidak	Tidak	Ya
	Paspalum vaginatum Sw.	Rumput asinan		Tidak	Tidak	Ya
	Corchorus acutangulus lamk.	Rumput bayam		Tidak	Tidak	Ya
	Cyperus rotundus L	Rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
	Heteropogon contortus	Rumput tombak		Tidak	Tidak	Ya
	Eragrostis unioloides	Rumput udang		Tidak	Tidak	Ya
	Eleusine indica L.gaertn	Suket tulangan		Tidak	Tidak	Ya
	Cassytha filiformis L	Taliputri		Tidak	Tidak	Ya
	Hanguana malayana	Bakung air		Tidak	Tidak	Ya
	Cyanotis cristata	Eceng		Tidak	Tidak	Ya
	Eichhornia crassipes	Eceng gondok		Tidak	Tidak	Ya
	Hydrilla verticillata	Ganggang		Tidak	Tidak	Ya
	Ficus septica burm.f	Awar-awar		Ya	Tidak	Ya
	Gigantolochloa apus kurz	Bambu apus		Tidak	Tidak	Ya
	Bambusa spinosa	Bambu duri		Tidak	Tidak	Ya
	Bambusa vulgaris	Bambu gading		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Ficus benyamina	Beringin		Ya	Tidak	Ya
	Casuarina equisetifolia	Cemara laut/udang		Tidak	Tidak	Ya
	Casuarina junghuniana	Cemara gunung		Tidak	Tidak	Ya
	Durio kutejensis	Durian hutan		Ya	Tidak	Ya
	Ficus glomerata roxb.	Elo		Ya	Tidak	Ya
	Delonix regia	Flamboyan		Ya	Tidak	Ya
	Dioscorea composita	Gadung		Tidak	Tidak	Ya
	Glyricidia sepium	Gamal		Tidak	Tidak	Ya
	Inocarpus edulis	Gayam		Ya	Tidak	Ya
	Pithecelobium jiringa	Jengkol		Tidak	Tidak	Ya
	Datura metel	Kecubung		Tidak	Tidak	Ya
	Moringa oleifera lam	Kelor		Ya	Tidak	Ya
	Murraya paniculata	Kemuning		Ya	Tidak	Ya
	Terminalia catapa	Ketapang		Tidak	Tidak	Ya
	Morinda citrifolia	Mengkudu		Tidak	Tidak	Ya
	Garcinia dulcis	Mundu		Ya	Tidak	Ya
	Morus alba	Murbei		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Mesua nagassarium	Nagasari		Ya	Tidak	Ya
	Cycas rumphi	Pakis haji		Tidak	Tidak	Ya
	Ceiba petranda	Randu		Tidak	Tidak	Ya
	Bombaxma labaricum	Randu Alas		Ya	Tidak	Ya
	Manilkara kauki	Sawo kecik		Ya	Tidak	Ya
	Achras zapota var	Sawo manila		Tidak	Tidak	Ya
	Caesalpinia sappan	Secang		Ya	Tidak	Ya
	Sesbania grandiflora	Turi		Tidak	Tidak	Ya
	Hibiscus tiliaceus	Waru		Tidak	Tidak	Ya
	Avicennia sp	Api-api		Tidak	Tidak	Ya
	Rhizophora sp	Bakau		Tidak	Tidak	Ya
	Limnocharis flava	Genjer		Tidak	Tidak	Ya
	Ipomoea aquatica	Kangkung air		Tidak	Tidak	Ya
	Nypa fruticans Wurmb	Nipah		Tidak	Tidak	Ya
	Nasturtium officinale	Selada air		Tidak	Tidak	Ya
	Pistia stratiotes	Selada air/ kapu-kapu		Tidak	Tidak	Ya
	Bruguiera sp	Tanjang		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Nymphoides indica	Teratai		Tidak	Tidak	Ya
	Marantha arundacea	Garut		Tidak	Tidak	Ya
	Dioscorea hispida dennst	Gadung		Tidak	Tidak	Ya
	Canna edulis	Ganyong		Tidak	Tidak	Ya
	Dioscorea aculeata	Gembili		Tidak	Tidak	Ya
	Dioscorea bulbifera L	Gembolo		Tidak	Tidak	Ya
	Zea mays	Jagung		Tidak	Tidak	Ya
	Phaseolus vulgaris	Kacang hijau		Tidak	Tidak	Ya
	Arachis hypogea	Kacang tanah		Tidak	Tidak	Ya
	Glicyne max	Kedelai		Tidak	Tidak	Ya
	Xanthosoma atrovirens	Kimpul		Tidak	Tidak	Ya
	Oryza sativa	Padi		Tidak	Tidak	Ya
	Oryza glutinosa	Padi ketan		Tidak	Tidak	Ya
	Ipomoea batatas	Ubi Jalar		Tidak	Tidak	Ya
	Manihot utilisima	Ubi kayu		Tidak	Tidak	Ya
	Colocasia esculenta schott	Talas bogor		Tidak	Tidak	Ya
	Zea Mays	Jagung		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Pandanus sp	Pandan		Tidak	Tidak	Ya
	Saccarum officinarum	Tebu		Tidak	Tidak	Ya
	Nicotiana tabacum	Tembakau rakyat		Tidak	Tidak	Ya
	Persea americana	Alpokat		Tidak	Tidak	Ya
	Vitis vinifera L.	Anggur		Tidak	Tidak	Ya
	Averrhoa carambola	Belimbing manis		Tidak	Tidak	Ya
	Averrhoa bilimbi	Belimbing wuluh		Tidak	Tidak	Ya
	Cucumis melo var canta	Blewah		Tidak	Tidak	Ya
	Hylocereus undatus	Buah Naga		Tidak	Tidak	Ya
	Artocarpus champeden	Cempedak		Tidak	Tidak	Ya
	Phyllanthus acidus	Cermai		Tidak	Tidak	Ya
	Punica granatum	Delima		Tidak	Tidak	Ya
	Lansium domesticum	Duku		Tidak	Tidak	Ya
	Durio zibethinus	Durian		Tidak	Tidak	Ya
	Syzygium aqueum	Jambu air		Tidak	Tidak	Ya
	Psidium guajava L	Jambu biji		Tidak	Tidak	Ya
	Syzygium jambos	Jambu mawar		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Eugenia densiflora	Jambu klampok		Tidak	Tidak	Ya
	Syzygium malaccense	Jambu bol/darsana		Tidak	Tidak	Ya
	Anacardium occidentale	Jambu mete		Tidak	Tidak	Ya
	Citrus nobilis	Jeruk siem		Tidak	Tidak	Ya
	Citrus aurantifolia	Jeruk nipis		Tidak	Tidak	Ya
	Spondias dulcis	Kedondong		Tidak	Tidak	Ya
	Dimocarpus longan	Kelengkeng		Tidak	Tidak	Ya
	Cucumis sativus L	Ketimum		Tidak	Tidak	Ya
	Dispyros kaki L	Kesemek		Tidak	Tidak	Ya
	Artocarpus altilis	Kluwih		Tidak	Tidak	Ya
	Lansium equem (Jacq) Miq	Kokosan		Tidak	Tidak	Ya
	Mangifera odorata	Kweni		Tidak	Tidak	Ya
	Mangifera indica L	Mangga		Tidak	Tidak	Ya
	Gracinia mangostana	Manggis		Tidak	Tidak	Ya
	Passiflora edulis	Markisa		Tidak	Tidak	Ya
	Pometia pinnata	Matoa		Tidak	Tidak	Ya
	Passiflora edulio	Markisa		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Cucumis melo	Melon		Tidak	Tidak	Ya
	Annona reticulata	Mulwo		Tidak	Tidak	Ya
	Garcinia dulcis	Mundu		Tidak	Tidak	Ya
	Morus alba	Murbei		Tidak	Tidak	Ya
	Artocarpus communis	Nangka		Tidak	Tidak	Ya
	Ananas comosus	Nanas		Tidak	Tidak	Ya
	Nephelium lappaceum	Rambutan		Tidak	Tidak	Ya
	Carica papaya Linn	Pepaya		Tidak	Tidak	Ya
	Musa sp	Pisang		Tidak	Tidak	Ya
	Salaca edulis	Salak		Tidak	Tidak	Ya
	Manilkara zapota	Sawo		Tidak	Tidak	Ya
	Achras zapota L	Sawo manila		Tidak	Tidak	Ya
	Citrulus vulgaris	Semangka		Tidak	Tidak	Ya
	Annona muricata	Sirsat		Tidak	Tidak	Ya
	Annona squamosa	Sirkaya		Tidak	Tidak	Ya
	Borassus sp	Siwalan		Tidak	Tidak	Ya
	Fragaria vesca	Stroberi		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Artocarpus commu nis forst	Sukun		Tidak	Tidak	Ya
	Amaranthus caudatus rumph	Bayam		Tidak	Tidak	Ya
	Allium cepa L.	Bawang merah		Tidak	Tidak	Ya
	Capsicum annum L.	Cabe merah		Tidak	Tidak	Ya
	Capsicum trutescens L.	Cabe rawit		Tidak	Tidak	Ya
	Luffa acutangula	Gambas		Tidak	Tidak	Ya
	Pithecellobium jiringa Prain	Jengkol		Tidak	Tidak	Ya
	Auricularia auriculatia	Jamur kuping		Tidak	Tidak	Ya
	Volvariella volvacea	Jamur merang		Tidak	Tidak	Ya
	Lentinus edodes	Jamur shitake		Tidak	Tidak	Ya
	Pleurotus ostreatus	Jamur tiram		Tidak	Tidak	Ya
	Citrus hystrix	Jeruk purut		Tidak	Tidak	Ya
	Vigna sinensis	Kacang panjang		Tidak	Tidak	Ya
	Cajanus cajan	Kacang gude		Tidak	Tidak	Ya
	Ipomoea aquatica forsk	Kangkung		Tidak	Tidak	Ya
	Dolichos lablab	Kara		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Xanthosoma violaceum schoot	Kimpul		Tidak	Tidak	Ya
	Lagenaria leucantha	Labu air		Tidak	Tidak	Ya
	Cucurbita mocshata Duch	Labu parang/kuning		Tidak	Tidak	Ya
	Sechium edule	Labu siem		Tidak	Tidak	Ya
	Gnetum gnemon L	Melinjo		Tidak	Tidak	Ya
	Momordica charantia	Pare		Tidak	Tidak	Ya
	Trichosanthes cucumerina	Pare ulo		Tidak	Tidak	Ya
	Brassica chinensis	Petsai/caisim		Tidak	Tidak	Ya
	Brassica campestris	Sawi hijau		Tidak	Tidak	Ya
	Brassica juncea	Sawi putih		Tidak	Tidak	Ya
	Apium graveolens L	Seledri		Tidak	Tidak	Ya
	Solanum melongena L.	Terong		Tidak	Tidak	Ya
	Lycopersicon esculente	Tomat		Tidak	Tidak	Ya
	Sesbania grandiflora pers	Turi		Tidak	Tidak	Ya
	Helianthus annus	Bunga matahari		Tidak	Tidak	Ya
	Clerodendron paniculatum	Bunga pagoda		Tidak	Tidak	Ya
	Mirabilis jalapa	Bunga pukul empat		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Hibiscus rosa sinensis	Bunga sepatu		Tidak	Tidak	Ya
	Kalanchoe blossfeldiana	Cocor bebek		Tidak	Tidak	Ya
	Dracaena sp	Dracaena		Tidak	Tidak	Ya
	Euphorbia sp	Euphorbia		Tidak	Tidak	Ya
	Dracaena fragrans	Hanjuang		Tidak	Tidak	Ya
	Coleus sp	Iler		Tidak	Tidak	Ya
	Celosia cristata L	Jengger ayam		Tidak	Tidak	Ya
	Gloriosa superba L	Kembang sungsang		Tidak	Tidak	Ya
	Datura metel L.	Kecubung		Tidak	Tidak	Ya
	Coriandrum sativum L.	Ketumbar		Tidak	Tidak	Ya
	Strobilanthes crispus bl.	Keji beling		Tidak	Tidak	Ya
	Cocos nicifera L.	Kelapa		Tidak	Tidak	Ya
	Piper cubeba l.f	Kemukus		Tidak	Tidak	Ya
	Murraya paniculata	Kemuning		Tidak	Tidak	Ya
	Acacia sp	Akasia		Tidak	Tidak	Ya
	Pterocarpus indica willd	Angsana		Tidak	Tidak	Ya
	Antocephalus cadamba	Jabon		Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Status			
	Nama Latin	Nama Lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
	Tectona grandis L.	Jati		Tidak	Tidak	Ya
	Swietenia mahagoni jacq	Mahoni		Tidak	Tidak	Ya
	Albiziz falcataria	Sengon		Tidak	Tidak	Ya
	Dalbergia pinnata	Sono keling		Tidak	Tidak	Ya
	Pithecolobium saman benth	Trembesi		Tidak	Tidak	Ya

Keterangan : Profil Keanekaragaman Hayati tahun 2016
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, 2019

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang Ditangkarkan
1	-	-	-

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak terdapat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kota	Kritis (Ha)				Sangat Kritis (Ha)				Penyebab Lahan Kritis
		Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan	
1	Cimahi Utara	0	0	0	84,95	0	0	0	439,99	Topografinya berupa garis patahan / tebing
2	Cimahi Tengah	0	0	0	3,43	0	0	0	2,97	Topografinya berupa garis patahan / tebing
3	Cimahi Selatan	0	0	0	33,48	0	0	0	174,66	Topografinya berupa garis patahan / tebing

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Di Kota Cimahi tidak terdapat kawasan hutan sehingga tidak terdapat lahan kritis atausangat kritis di kawasan hutan

3. Data berdasarkan SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2019

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
1	< 20 cm	0,2 – 1,3	N/A	N/A
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	N/A	N/A
3	50 - <100 cm	4,0 - < 9	N/A	N/A
4	100 – 150 cm	9,0 – 12	N/A	N/A
5	> 150 cm	> 12	N/A	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada dilakukannya pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Parameter	Satuan	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Uji	Kesesuaian dengan Peraturan
1	Ketebalan solum	cm	<20	>20	Memenuhi
2	Kebatuan permukaan	%	>40	50,74-76,98	9 lokasi tidak memenuhi
3	Komposisi fraksi	%koloid	<18	17-62	1 lokasi tidak memenuhi
4	Komposisi frkasi	%pasir	>80	10-39	Memenuhi
5	Berat isi	g/cm^3	>1,4	0,91-1,25	Memenuhi
6	Porositas	%	<30 ; >70	52,88-65,92	Memenuhi
7	Permeabilitas	cm/jam	<0,7 ; >8,0	7,39-31,23	8 lokasi tidak memenuhi
8	pH	-	<4,5 ; <8,5	5,28-6,90	Memenuhi
9	DHL	mS/m	>4,0	0,067-0,201	Memenuhi
10	Redoks	mV	<200	-13,1-15,8	Memenuhi
11	Jumlah mikroba	cfu/g tanah	$<10^2$	$(0,54-1,6)) \times 10^{10}$	Memenuhi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
1	Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10%/5 tahun untuk gambut < 3 m	0	0
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5	0	0
3	Kedalaman air tanah dangkal	> 25 cm	0	0

Keterangan :
1. Angka (0) menunjukan tidak terdapat kerusakan di lahan yang dimaksud

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, 2019

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
1	0	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat kawasan mangrove di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
1	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat kawasan padang lamun di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
1	0	0	0	0	0	0

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat kawasan laut dan terumbu karang di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-13. Perubahan Lahan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Jenis Penggunaan Baru	Luas Baru (Ha)	Luas Baru (Ha)
1	Pemukiman	1.966,38	2.120,05
2	Industri	500,575	494,43
3	Tanah Kering	1.901,773	198,64
4	Perkebunan	96,744	N/A
5	Semak Belukar	N/A	N/A
6	Tanah Kosong	122,329	N/A
7	Perairan/Kolam	N/A	16,69
8	Lainnya (Sebutkan)	N/A	N/A

Keterangan:
1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada pendataan

Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2019

Tabel-14. Pemanfaatan Lahan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
1	Tambang	0	Besar	0	Di Kota Cimahi tidak terdapat Kawasan pertambangan
			Menengah	0	
			Kecil	0	
			Rakyat	0	
2	Perkebunan	0	Besar	0	Tidak ada lahan yang diusahakan untuk tanaman perkebunan
			Menengah	0	
			Kecil	0	
			Rakyat	0	
3	Pertanian	136	Besar	0	Pertanian berupa sawah yang dikelola masyarakat secara pribadi
			Menengah	0	
			Kecil	0	
			Rakyat	136	
4	Pemanfaatan Hutan	0	Besar	0	Di Kota Cimahi tidak terdapat Kawasan Hutan selain hutan Kota
			Menengah	0	
			Kecil	0	
			Rakyat	0	

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Luas dinyatakan dalam satuan Ha

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2019

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	0	0	0	0	0

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat kawasan pertambangan di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi Penghijauan (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon	Target (Ha)	Luas Realisasi Reboisasi	Realisasi Jumlah Pohon
1	Cimahi Utara	0,2463	0,10086	1.681	0	0	0
2	Cimahi Tengah		0,03168	528	0	0	0
3	Cimahi Selatan		0,04752	792	0	0	0

Keterangan:

1. Permen PU No. 5 Tahun 2008: Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan
2. Dokumen kontrak pengadaan tanaman
3. Angka (0) menunjukkan tidak ada peruntukkan tersebut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kota/Kecamatan	Luas (Ha)	Kedalaman (M)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
1	0	0	0	0	0

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat lahan gambut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-18. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
1	Cimahi Utara	0	0	0
2	Cimahi Tengah	0	0	0
3	Cimahi Selatan	0	0	0

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat jenis usaha yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-19. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
1	Cimahi Utara	0	0	0
2	Cimahi Tengah	0	0	0
3	Cimahi Selatan	0	0	0

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat jenis usaha yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Spesies	Bagian-Bagian Yang Diperdagangkan	Status Menurut CITES
1	0	0	0

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat perdagangan satwa dan tumbuhan di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Jenis IUPJLWA							SK
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)	
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: DPMPTSP, 2019

Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
1	RT 04 RW 03 Kelurahan Citereup	9-Sep-19	06o51'34"	107o32'53"	24,5	7,59	3,45	<1,61	-	Tidak Berbau	227
2	Masjid Al-Hidayah, RT 01 RW 12, Kelurahan Pasir Kaliki	9-Sep-19	06o53'15"	107o33'14"	25	7,62	2,39	<1,61	-	Tidak Berbau	133
3	RT 04 RW 21, Kelurahan Cibereum	9-Sep-19	06o54'40"	107o33'42"	25	7,74	70,9	12,2	-	Tidak Berbau	397
4	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibabat	10-Sep-19	06o52'48"	107o33'21"	25	7,19	2,48	<1,61	-	Tidak Berbau	198

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
5	RT 01 RW 15 Kelurahan Cipageran	9-Sep-19	06o51’17”	107o32’14”	26	7,09	3,8	35,5	-	Tidak Berbau	354
6	RT 04 RW 09 Kelurahan Cipageran	9-Sep-19	06o51’16”	107o32’27”	25	7,73	0,5	1,89	-	Tidak Berbau	380
7	RT 02 RW 21 Kelurahan Cibabat	9-Sep-19	06o53’41”	107o33’14”	25	8,01	2,08	<1,61	-	Tidak Berbau	331
8	RT 03 RW 07 kelurahan Cimahi	12-Sep-19	06o52’13”	107o32’27”	26	7,74	9,03	<1,61	-	Tidak Berbau	232
9	RT 03 RW 18 Kelurahan Leuwigajah	2-Sep-19	06o33’55”	107o31’31”	25	8,43	0,83	<161	-	Tidak Berbau	312
10	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibereum	9-Sep-19	06o42’21”	107o33’52”	25	7,43	49,4	6,09	-	Tidak Berbau	314
11	RT 01 RW 16 Kelurahan Setiamanah	12-Sep-19	06o52’31”	107o32’10”	25	7,59	22,4	1,95	-	Tidak Berbau	431

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
12	RT 06 RW 07 Kelurahan Citereup	9-Sep-19	06o51’50”	107o32’57”	25	7,72	2,97	9,56	-	Tidak Berbau	372
13	RT 01 RW 10 Kelurahan Pasir Kaliki	9-Sep-19	06o53’18”	107o33’42”	24	7,5	0,85	1,88	-	Tidak Berbau	340
14	RT 04 RW 02 Kelurahan Leuwigajah	2-Sep-19	06o54’006”	107o31’476”	24	7,5	0,85	1,88	-	Tidak Berbau	340
15	RT 01 RW 03 Kelurahan Baros	10-Sep-19	06o53’26”	107o32’31”	24	7,81	8,39	12,9	-	Tidak Berbau	249
16	RT 06 RW 14 Kelurahan Karang Mekar	10-Sep-19	06o52’37”	107o32’33”	25,5	7,23	1,23	<1,61	-	Tidak Berbau	496
17	RT 05 RW 05 Kelurahan Cibeber	2-Sep-19	06o53’349”	107o31’076”	24	7,68	34,8	31,7	-	Tidak Berbau	332
18	RT 01 RW 03 Kelurahan Karang Mekar	10-Sep-19	06o52’32”	107o32’37”	25	9	1,16	<1,61	-	Tidak Berbau	295

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
19	RT 03 RW 06 Kelurahan Cimahi	12-Sep-19	06o52’19”	107o32’26”	25,5	7,31	2,98	<1,61	-	Tidak Berbau	295
20	RT 01 RW 07 Kelurahan Melong	2-Sep-19	06o55’17”	107o33’30”	25	7,26	1,78	6,66	-	Tidak Berbau	408
21	RT 06 RW 19 Kelurahan Padasuka	12-Sep-19	06o52’35”	107o31’51”	28	8.48	1.26	<1,61	-	Tidak Berbau	394
22	RT 03 RW 03 Kelurahan Cigugur Tengah	10-Sep-19	06o53’33”	107o33’16”	24	7.53	1.31	6.54	-	Tidak Berbau	208
23	RT 03 RW 09 Kelurahan Melong	9-Sep-19	06o54’56”	107o33’48”	26	6.92	9.67	2.15	-	Tidak Berbau	369
24	RT 01 RW 03 Kelurahan Setiamanah	12-Sep-19	06o52’26”	107o32’12”	24	8.7	1.56	3.71	-	Tidak Berbau	320
25	RT 05 RW 05 Kelurahan Baros	10-Sep-19	06o53’24”	107o32’20”	25	7.75	263	3.01	-	Tidak Berbau	380

No	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS
			Lintang	Bujur							
26	RT 01 RW 10 Kelurahan Utama	2-Sep-19	06o55’484”	107o32’228”	25.5	7.44	14.3	<1,61	-	Tidak berbau	281
27	RT 06 RW 06 Kelurahan Padasuka	12-Sep-19	06o52’41”	107o31’38”	25	8.47	2.12	<1,61	-	Tidak Berbau	285
28	RT 04 RW 10 Kelurahan Utama	2-Sep-19	06o54’455”	107o32’161”	25.5	7.79	15.7	<1,61	-	Tidak Berbau	366
29	RT 04 RW 04 Kelurahan Cibeber	2-Sep-19	06o53’351”	107o31’150”	25	7.53	4.94	<1,61	-	Tidak Berbau	311
30	RT 01 RW 16 Kelurahan Cigugur Tengah	10-Sep-19	06o53’20”	107o33’16”	24	7.62	5.08	3.36	-	Tidak Berbau	179

(Tabel 22 Lanjutan)

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (Vi) (mg/L)
1	RT 04 RW 03 Kelurahan Citereup	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Masjid Al-Hidayah, RT 01 RW 12, Kelurahan Pasir Kaliki	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-
3	RT 04 RW 21, Kelurahan Cibereum	-	-	-	-	16,2	-	-	-	-	-	-	-	-
4	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibabat	-	-	-	-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RT 01 RW 15 Kelurahan Cipageran	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (Vi) (mg/L)
6	RT 04 RW 09 Kelurahan Cipageran	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RT 02 RW 21 Kelurahan Cibabat	-	-	-	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-
8	RT 03 RW 07 kelurahan Cimahi	-	-	-	-	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	RT 03 RW 18 Kelurahan Leuwigajah	-	-	-	-	4,8	-	-	-	-	-	-	-	-
10	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibereum	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RT 01 RW 16 Kelurahan Setiamanah	-	-	-	-	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-
12	RT 06 RW 07	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (Vi) (mg/L)
	Kelurahan Citereup													
13	RT 01 RW 10 Kelurahan Pasir Kaliki	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-
14	RT 04 RW 02 Kelurahan Leuwigajah	-	-	-	-	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-
15	RT 01 RW 03 Kelurahan Baros	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RT 06 RW 14 Kelurahan Karang Mekar	-	-	-	-	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-
17	RT 05 RW 05 Kelurahan Cibeber	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
18	RT 01 RW 03 Kelurahan	-	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (Vi) (mg/L)
	Karang Mekar													
19	RT 03 RW 06 Kelurahan Cimahi	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	RT 01 RW 07 Kelurahan Melong	-	-	-	-	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-
21	RT 06 RW 19 Kelurahan Padasuka	-	-	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-
22	RT 03 RW 03 Kelurahan Cigugur Tengah	-	-	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-
23	RT 03 RW 09 Kelurahan Melong	-	-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-
24	RT 01 RW 03 Kelurahan Setiamanah	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (Vi) (mg/L)
25	RT 05 RW 05 Kelurahan Baros	-	-	-	-	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-
26	RT 01 RW 10 Kelurahan Utama	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
27	RT 06 RW 06 Kelurahan Padasuka	-	-	-	-	13.4	-	-	-	-	-	-	-	-
28	RT 04 RW 10 Kelurahan Utama	-	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-
29	RT 04 RW 04 Kelurahan Cibeber	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-
30	RT 01 RW 16 Kelurahan Cigugur Tengah	-	-	-	-	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-

(Tabel 22 Lanjutan)

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
1	RT 04 RW 03 Kelurahan Citereup	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	21,9	-
2	Masjid Al-Hidayah, RT 01 RW 12, Kelurahan Pasir Kaliki	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	8,79	-
3	RT 04 RW 21, Kelurahan Cibereum	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	46,6	-
4	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibabat	-	<0,126	-	0,245	-	<0,0189	-	-	-	-	24,1	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
5	RT 01 RW 15 Kelurahan Cipageran	-	0,247	-	5	-	<0,0189	-	-	-	-	19,9	-
6	RT 04 RW 09 Kelurahan Cipageran	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	33,2	-
7	RT 02 RW 21 Kelurahan Cibabat	-	<0,126	-	0,328	-	<0,0189	-	-	-	-	19,2	-
8	RT 03 RW 07 kelurahan Cimahi	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	38,4	-
9	RT 03 RW 18 Kelurahan Leuwigajah	-	<0,126	-	0,0964	-	<0,0189	-	-	-	-	32	-
10	RT 01 RW 05	-	<0,126	-	0,344	-	<0,0189	-	-	-	-	28,1	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
	Kelurahan Cibereum												
11	RT 01 RW 16 Kelurahan Setiamanah	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	33,3	-
12	RT 06 RW 07 Kelurahan Citereup	-	0,291	-	0,593	-	<0,0189	-	-	-	-	39,6	-
13	RT 01 RW 10 Kelurahan Pasir Kaliki	-	<0,126	-	0,206	-	<0,0189	-	-	-	-	26,1	-
14	RT 04 RW 02 Kelurahan Leuwigajah	-	<0,126	-	0,206	-	<0,0189	-	-	-	-	26,1	-
15	RT 01 RW 03 Kelurahan Baros	-	<0,126	-	0,34	-	<0,0189	-	-	-	-	15,4	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
16	RT 06 RW 14 Kelurahan Karang Mekar	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	19,3	-
17	RT 05 RW 05 Kelurahan Cibeber	-	<0,126	-	0,745	-	<0,0189	-	-	-	-	29,8	-
18	RT 01 RW 03 Kelurahan Karang Mekar	-	<0,126	-	0,0639	-	<0,0189	-	-	-	-	25,1	-
19	RT 03 RW 06 Kelurahan Cimahi	-	<0,126	-	0,222	-	<0,0189	-	-	-	-	26,6	-
20	RT 01 RW 07 Kelurahan Melong	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	85,6	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
21	RT 06 RW 19 Kelurahan Padasuka	-	<0,126	-	0.763	-	0.0254	-	-	-	-	34.3	-
22	RT 03 RW 03 Kelurahan Cigugur Tengah	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	18.9	-
23	RT 03 RW 09 Kelurahan Melong	-	<0,126	-	0.628	-	<0,0189	-	-	-	-	39.5	-
24	RT 01 RW 03 Kelurahan Setiamanah	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	35.9	-
25	RT 05 RW 05 Kelurahan Baros	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	21.4	-

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
26	RT 01 RW 10 Kelurahan Utama	-	<0,126	-	3.1	-	<0,0189	-	-	-	-	18.6	-
27	RT 06 RW 06 Kelurahan Padasuka	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	15.7	-
28	RT 04 RW 10 Kelurahan Utama	-	<0,126	-	0.278	-	<0,0189	-	-	-	-	33.1	-
29	RT 04 RW 04 Kelurahan Cibeber	-	<0,126	-	1.28	-	<0,0189	-	-	-	-	43.9	-
30	RT 01 RW 16 Kelurahan Cigugur Tengah	-	<0,126	-	<0,0595	-	<0,0189	-	-	-	-	15.5	-

(Tabel 22 Lanjutan)

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
1	RT 04 RW 03 Kelurahan Citereup	-	-	60	-	-
2	Masjid Al-Hidayah, RT 01 RW 12, Kelurahan Pasir Kaliki	-	-	20	-	-
3	RT 04 RW 21, Kelurahan Cibereum	-	-	140	-	-
4	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibabat	-	-	120	-	-
5	RT 01 RW 15 Kelurahan Cipageran	-	-	40	-	-
6	RT 04 RW 09 Kelurahan Cipageran	-	-	180	-	-

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
7	RT 02 RW 21 Kelurahan Cibabat	-	-	340	-	-
8	RT 03 RW 07 kelurahan Cimahi	-	-	160	-	-
9	RT 03 RW 18 Kelurahan Leuwigajah	-	-	40	-	-
10	RT 01 RW 05 Kelurahan Cibereum	-	-	20	-	-
11	RT 01 RW 16 Kelurahan Setiamanah	-	-	60	-	-
12	RT 06 RW 07 Kelurahan Citereup	-	-	120	-	-
13	RT 01 RW 10 Kelurahan Pasir Kaliki	-	-	140	-	-
14	RT 04 RW 02 Kelurahan Leuwigajah	-	-	140	-	-

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
15	RT 01 RW 03 Kelurahan Baros	-	-	20	-	-
16	RT 06 RW 14 Kelurahan Karang Mekar	-	-	240	-	-
17	RT 05 RW 05 Kelurahan Cibeber	-	-	40	-	-
18	RT 01 RW 03 Kelurahan Karang Mekar	-	-	120	-	-
19	RT 03 RW 06 Kelurahan Cimahi	-	-	180	-	-
20	RT 01 RW 07 Kelurahan Melong	-	-	40	-	-
21	RT 06 RW 19 Kelurahan Padasuka	-	-	160	-	-
22	RT 03 RW 03 Kelurahan Cigugur Tengah	-	-	140	-	-
23	RT 03 RW 09 Kelurahan Melong	-	-	360	-	-

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)
24	RT 01 RW 03 Kelurahan Setiamanah	-	-	160	-	-
25	RT 05 RW 05 Kelurahan Baros	-	-	200	-	-
26	RT 01 RW 10 Kelurahan Utama	-	-	1000	-	-
27	RT 06 RW 06 Kelurahan Padasuka	-	-	100	-	-
28	RT 04 RW 10 Kelurahan Utama	-	-	160	-	-
29	RT 04 RW 04 Kelurahan Cibeber	-	-	40	-	-
30	RT 01 RW 16 Kelurahan Cigugur Tengah	-	-	40	-	-

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan pada Bulan September 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi

2. Baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih yang terdapat pada Lampiran I
3. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-23. Kualitas Air Laut

Provinsi/Kota : Jawa Barat/Cimahi

Tahun Data : 2018

No	Nama Lokasi	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)
			Lintang	Bujur									
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Tabel 23 Lanjutan)

No	Nama Lokasi	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD_5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO_2-N (mg/l)	NO_3-N (mg/l)	PO_4-P (mg/l)	Sianida (CN^-) (mg/l)	Sulfida (H_2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat laut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-24. Curah Hujan Rata-rata
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Stasiun Cibeureum	35	35	45	78	25	12	0	2	0	0	42	57
2	Stasiun Geofisika Bandung	83,3	40	51,1	49,7	59	11	8,8	0,2	32,3	26	61	57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
1	Cimahi Utara	475	5.923	42.447	N/A	N/A	5.803	N/A
2	Cimahi Tengah	55	13.629	26.235	N/A	N/A	4.934	N/A
3	Cimahi Selatan	018	3.855	20.988	N/A	N/A	1.370	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2019

Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Waktu Pemantauan	pH	DHL (µmhos/em)	SO_4 (mg/L)	NO_3 (mg/L)	Cr (mg/L)	NH_4 (mg/L)	Na (mg/L)	Ca^{2+} (mg/L)	Mg^{2+} (mg/L)
Februari	8.68	18.3	6.02	0.4	0.122	N/A	N/A	N/A	N/A
Maret	6.13	14.1	2.57	0.2	<0,0813	N/A	N/A	N/A	N/A
April	7.95	13.2	8.5	1.3	<0,0813	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan
2. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, DLH Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/det)
1	**Cisangkan Hulu-Hilir**	16,91					
	Cisangkan Hulu	-	2	2	0,20	0,99	0,02
	Cisangkan Tengah	-	3	3	0,30	1,19	0,05
	Cisangkan Hilir	-	6	6	0,70	2,44	0,3
2	**Cibaligo Hulu-Hilir**	35,04					
	Cibaligo Hulu	-	3	3	1,20	1,64	0,05
	Cibaligo Tengah	-	2,5	2,5	0,5	1,54	0,18
	Cibaligo Hilir	-	3	3	0,65	1,14	0,06
3	**Cibabat Hulu-Hilir**	35,04					
	Cibabat Hulu	-	1,5	1,5	0,20	1,77	0,08
	Cibabat Tengah	-	4	4	0,60	3,68	0,01
	Cibabat Hilir	-	2	2	0,30	1,11	0,06
4	**Cibeureum Hulu-Hilir**	24,66					
	Cibeureum Hulu	-	4	4	0,75	3,02	0,62
	Cibeureum Tengah	-	6	6	0,50	3,10	0,09
	Cibeureum Hilir	-	8	8	0,50	6,76	0,46

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m3/dtk)	Debit Min (m3/det)
5	**Cimahi Hulu-Hilir**	18,61					
	Cimahi Hulu	-	6	6	0,3	1,93	0,14
	Cimahi Tengah	-	4	4	0,5	1,85	0,13
	Cimahi Hilir	-	7	7	1	1,93	0,33

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama Danau/ Waduk/ Situ/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1	Embung RSUD Cibabat (Kel. Cibabat)	0,06	3.040
2	Embung Pemkot	0,036	1.333,5
3	Embung Brigif	1,06	10.6665
4	Embung Gg. Keramat (Kel. Leuwigajah 1)	0,108	6.480
5	Embung (Kel. Leuwigajah 2)	0,08	4.020
6	Embung (Kel. Setiamanah)	0,04	1.204,5
7	Embung Melong (Belakang Rusunawa)	0,1	6.336
8	Danau Ciseupan	2	130.000

Keterangan :
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2019

Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	06°52'15,6"LS	107°32'06,2"BT	1-Apr-19	24.8	7.35	-	290
		Sungai Cisangkan Tengah	06°52'57.2"LS	107°31'46,2"BT	1-Apr-19	26	7.21	-	350
		Sungai Cisangkan Hilir	06°52'57,2"LS	107°31'46,2"BT	2-Apr-19	27.8	7.55	-	598
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	06°53'87,6"LS	107°03'32,9"BT	4-Apr-19	23.5	7.56	-	352
		Sungai Cibaligo Tengah	06°54'31,2"LS	107°33'06,5"BT	4-Apr-19	27.8	8.01	-	770
		Sungai Cibaligo Hilir	06°55'29,5"LS	107°32'58,9"BT	2-Apr-19	28.6	7.76	-	1320
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	06°54'37,8"LS	107°34'07,5"BT	1-Apr-19	25.2	7.32	-	532

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
		Sungai Cibeureum Tengah	06°55'09,7"LS	107°33'55,5"BT	2-Apr-19	25.1	7.2	-	514
		Sungai Cibeureum Hilir	06°55'55,0"LS	107°33'42,9"BT	2-Apr-19	25.8	7.44	-	836
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	06°52'28,9"LS	107°33'41,3"BT	4-Apr-19	24	7.42	-	342
		Sungai Cibabat Tengah	06°53'21,9"LS	107°33'24,3"BT	4-Apr-19	23.5	7.35	-	450
		Sungai Cibabat Hilir	06°54'00,8"LS	107°32'54,6"BT	5-Apr-19	25	7.42	-	1784
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	06°51'17,6"LS	107°33'44,6"BT	5-Apr-19	23.3	7.67	-	162
		Sungai Cimahi Tengah	06°53'35,3"LS	107°32'27,9"BT	1-Apr-19	24.4	7.35	-	260
		Sungai Cimahi Hilir	06°55'29,2"LS	107°32'58,9"BT	5-Apr-19	23.7	7.64	-	394

(Tabel 29 Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	23	4.25	< 2	< 7	0.235	2.6	< 1,1	0.04
		Sungai Cisangkan Tengah	25	< 1	6	23	< 0,01	1.8	< 1,1	0.07
		Sungai Cisangkan Hilir	< 20	1.73	19	42	0.098	1.4	< 1,1	0.09
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	82	4.87	19	39	0.68	8.8	< 1,1	0.05
		Sungai Cibaligo Tengah	< 20	2.67	57	104	< 0,01	< 0,2	1.6	0.07
		Sungai Cibaligo Hilir	35	< 1	129	228	0.01	8.2	< 1,1	0.09
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	15	5.74	7	26	0.68	6.3	< 1,1	0.04
		Sungai Cibeureum Tengah	72	3.31	50	84	0.414	6.1	< 1,1	0.05
		Sungai Cibeureum Hilir	38	3.3	24	50	0.486	5.3	< 1,1	0.08
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	26	5.38	6	29	0.305	7.9	< 1,1	0.04
		Sungai Cibabat Tengah	21	2.1	24	60	< 0,01	1	< 1,1	0.06
		Sungai Cibabat Hilir	32	2.27	46	122	< 0,01	1	< 1,1	0.09
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	81	7.19	4	12	0.02	2.8	< 1,1	0.05

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
		Sungai Cimahi Tengah	62	6.04	4	11	0.204	2.8	< 1,1	0.04
		Sungai Cimahi Hilir	< 20	6.19	6	27	0.256	2.9	< 1,1	0.05

(Tabel 29 Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	0.78	0.0225	< 1,11	0.075	460,000	460,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cisangkan Tengah	0.86	< 0,0181	< 1,11	0.149	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cisangkan Hilir	0.94	0.1189	< 1,11	0.148	93,000	240,000	< 0,008	< 0,12
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	0.51	0.0285	< 1,11	0.068	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibaligo Tengah	0.39	0.0468	< 1,11	0.137	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
		Sungai Cibaligo Hilir	3.65	0.173	< 1,11	0.394	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	0.021	1.25
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	0.48	< 0,181	< 1,11	0.075	460,000	460,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibeureum Tengah	0.44	0.0667	2	0.019	240,000	240,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibeureum Hilir	0.82	0.0795	< 1,11	0.104	460,000	460,000	< 0,008	< 0,12
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	0.48	0.0313	< 1,11	0.044	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibabat Tengah	0.93	0.0879	< 1,11	0.101	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibabat Hilir	1.08	0.0444	< 1,11	0.132	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	0.28	0.0185	< 1,11	0.03	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cimahi Tengah	0.36	< 0,0181	< 1,11	0.042	240,000	1,100,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cimahi Hilir	0.33	0.0992	< 1,11	0.077	≥ 1.100.000	≥ 1.100.000	< 0,008	< 0,12

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan pada Bulan April 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung
2. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (µmhos/cm)
			Lintang	Bujur					
1	Air Embung Makam Kramat	18-Maret-2018	06○53'804"LS	107○31'799"BT	24	253	17.9	8.45	403
2	Air Embung Cibabat	18-Maret-2018	06○52'653"LS	107○33'072"BT	25	330	35.8	7.84	690
3	Air Embung Setiamanah	18-Maret-2019	06○52'383"LS	107○32'058"BT	26	280	42	8.05	374
4	Air Embung Rusunawa Melong	18-Maret-2018	06○54'361"LS	107○33'291"BT	29	320	63.3	9.99	465
5	Air Embung dekat Pemkot Cimahi	18-Maret-2018	06○52'179"LS	107○33'291"BT	24	204	16.7	9.03	179
6	Air Embung Ciseupan	18-Maret-2019	06○53'623"LS	107○30'891"BT	28	258	23.3	8.44	383
7	Air Embung Brigif	18-Maret-2018	06○53'610"LS	107○31'816"BT	25	173	47.3	8.68	347

(Tabel 30 Lanjutan)

No	Nama	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (µg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-p (mg/L)
1	Air Embung Makam Kramat	253	17.9	3.18	12	37.8	0.14	<0,4	<0,053	30.4	-
2	Air Embung Cibabat	330	35.8	1.78	23.3	66.1	0.03	1.4	6.31	0.61	-
3	Air Embung Setiamanah	280	42	8.72	20.3	60.4	0.03	0.5	0.21	0.58	-
4	Air Embung Rusunawa Melong	320	63.3	11.4	28	81.2	<0,02	<0,4	0.387	0.58	-
5	Air Embung dekat Pemkot Cimahi	204	16.7	4.88	9	26.4	0.07	1.8	0.06	0.48	-
6	Air Embung Ciseupan	258	23.3	4.02	8.7	28.3	0.08	<0,4	<0,053	16.2	-
7	Air Embung Brigif	173	47.3	4.43	19	58.5	0.08	<0,4	<0,053	0.52	-

(Tabel 30 Lanjutan)

No	Nama	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (Jmlh/100 ml)	Total coliform (Jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
1	Air Embung Makam Kramat	-	-	0.742	-	440000	-	-
2	Air Embung Cibabat	-	-	2.75	-	650000	-	-
3	Air Embung Setiamanah	-	-	0.284	-	100000	-	-
4	Air Embung Rusunawa Melong	-	-	0.564	-	10000	-	-
5	Air Embung dekat Pemkot Cimahi	-	-	0.396	-	120000	-	-
6	Air Embung Ciseupan	-	-	0.378	-	200000	-	-
7	Air Embung Brigif	-	-	1.71	-	80000	-	-

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Cimahi Utara	48.986	38.565	90	530	48.366
2	Cimahi Tengah	50.398	31.564	78	571	49.749
3	Cimahi Selatan	71.756	40.137	76	430	71.250

Keterangan:

1. Penduduk yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar secara bertahap dialihkan menjadi komunal/bersama sesuai target 2020: 100% limbah terkelola
2. Data pada kolom (3) bersumber dari Disduk Semester I tahun 2019
3. Data pada kolom (4) bersumber dari Dinkes, Data Jamban Sehat Tahun 2019
4. Data pada kolom (5) menunjukkan jumlah KK yang terakses dengan IPAL komunal
5. Data pada kolom (6) menunjukkan jumlah KK yang terakses dengan MCK
6. Data pada kolom (7) menunjukkan jumlah KK yang tidak terakses oleh jamban sehat, IPAL komunal, MCK

Tabel-32. Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Cimahi Selatan	34,289	32,377	13,847	17,378	20,674	22,199	36,567	31,639
2	Cimahi Tengah	22,647	21,421	6,632	9,100	12,707	14,270	28,980	24,927
3	Cimahi Utara	22,460	21,151	11,395	13,301	10,968	11,426	21,979	20,363

(Tabel 32 Lanjutan)

No	Kecamatan	Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Cimahi Selatan	3,980	4,672	6,492	5,994	630	405	79	38
2	Cimahi Tengah	3,465	4,217	4,586	4,581	575	371	49	35
3	Cimahi Utara	4,070	4,648	7,263	6,635	1,330	785	211	75

Keterangan: -
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catata Sipil Kota Cimahi, 2019

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	Insfeksi saluran pernafasan akut	94134
2	Penyakit rongga mulut, kelenjar ludah dan rahang	38971
3	Penyakit hipertensi	34130
4	Penyakit kerongkongan, lambung dan duodenum	27656
5	Gangguan Jaringan Lunak	21039
6	Dermatitis dan eksim	13559
7	Penyakit infeksi usus	12139
8	Diabetes mellitus	11003
9	TBC	7821
10	Penyakit pernafasan bawah kronis	5205

Keterangan: -
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2019

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
1	Kecamatan Cimahi Utara	45.386	4.371	9,63%
2	Kecamatan Cimahi Tengah	46.484	2.590	5,57%
3	Kecamatan Cimahi Selatan	66.720	8.678	13,01%
	Jumlah	158.590	15.639	28,21%

Keterangan: -
Sumber: Dinas Dosial Kota Cimahi, 2019

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Sumber Pencemaran	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
1	PT. Afiat	Industri Farmasi	-	-	-	1,895	-
2	Anugrah Sinar Abadi	Industri Tekstil	15	-	-	404,70	-
3	CV. Daya Utama Logam	Industri Pelapisan Logam	-	-	-	5,16	-
4	CV. Suritex	Industri Tekstil	-	-	-	0,92	-
5	PT. Ginatex	Industri Tekstil	0,5	-	-	328,77	5,9
6	PT. Indah Jaya	Industri Tekstil	-	-	-	27,92	-
7	Klinik Prodia	Farmasi	-	-	-	0,59	3,304
8	Klinik Yudisman	Farmasi	-	-	-	0,41	-
9	PLN UID Jawa Barat UP3 Cimahi	Industri Tekstil	-	-	-	0,37	-
10	PT. Antelas	Industri Tekstil	0,6077	-	-	1.915,49	-
11	PT. Ayoetex	Industri Tekstil	4,8791	-	-	34,15	0,012
12	PT. Benang Warna Indonusa	Industri Tekstil	1,267	-	-	71,19	-

No.	Sumber Pencemaran	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
13	PT. Best Jeans Indo Citranusa	Industri Tekstil		-	-	-	444
14	PT. Binausaha Cipta Prima	Industri Tekstil	-	-	-	560,74	0,258
15	PT. Central Gerorgette Nusantara	Industri Tekstil	15,5	-	-	3.323,28	-
16	PT. Chitose International Tbk		-	-	-	150,08	-
17	PT. Dewasutratex II	Industri Tekstil	15	-	-	1.070,6	-
18	PT. Diamond Cold Storage	Industri Makanan	-	-	-	1,22	-
19	PT. Dwimulya Tata Tunggal	Industri Tekstil	0,62	-	-	257,15	-
20	PT. Elizabeth Hanjaya		-	-	-	3,75	-
21	PT. Fasilamindo Utama	Industri Tekstil	-	-	-	0,59	-
22	PT. Fuji Palapa Textile	Industri Tekstil	2,11	-	-	0,05	-
23	PT. Garuda Mas Semesta	Industri Tekstil	3,7942	-	-	236,61	-
24	PT. Gede Indah	Industri Tekstil	-	-	-	65,28	-
25	PT. Gucci Ratu Textile	Industri Tekstil	8,8195	-	-	1.231,325	-
26	PT. Guna Mitra Prima	Industri Tekstil	4,5005	-	-	994,81	1,969
27	PT. Hegar Mulya	Industri Tekstil	5,5409	-	-	707,362	3,72
28	PT. Holi Pharma	Farmasi	0,6417	-	-	7,32	1,23503
29	PT. Indo Extrusions	Industri Pelapisan Logam	1,8613	-	-	39.82	0,01

No.	Sumber Pencemaran	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
30	PT. Jerdytex	Industri Tekstil	-	-	-	571,91	-
31	PT. Kahatex	Industri Tekstil	-	-	-	2.500,81	0,012
32	PT. Kamarga Kurnia Textile	Industri Tekstil	-	-	-	208,15	-
33	PT. Kawi Mekar	Industri Tekstil	-	-	-	1,23	-
34	PT. Longsun	Industri Tekstil	2,2412	-	-	270,05	2,37
35	PT. Matahari Sentosa	Industri Tekstil	2	-	-	121,05	-
36	PT. Nisshinbo Indonesia	Industri Tekstil	-	-	-	4720.5	-
37	PT. Oriental Embroidery	Industri Tekstil	40	-	-	293.27545	1,2612
38	PT. Logam Bima	Industri Alat Dapur	-	-	-	1.98	-
39	PT. Ragam Jaya Utama	Industri Tekstil	-	-	-	477,1	-
40	PT. Ras Jaya	Industri Tekstil	0,2705	-	-	25,091	-
41	PT. Sanbe Farma Unit I	Farmasi	0,17	-	-	39,58344	-
42	PT. Sanbe Farma Unit II	Farmasi	0,5612	-	-	18,5	-
43	PT. Sanbe Farma R&D	Farmasi	-	-	-	13	-
44	PT. Setia Busanatex	Industri Tekstil	1,0073	-	-	413,533	-
45	PT. Triana Harvestindo Nusantara	Industri Tekstil	4,8218	-	-	990,141	1,575

No.	Sumber Pencemaran	Tipe/Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)
46	PT. Trisula Textile	Industri Tekstil	13,4211	-	-	769,34	0,353
47	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia	Industri Pengelola Limbah B3	-	-	-	0,19	2.377,802
48	RS Avisena	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	5,98	-
49	RS Dustira	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	41,389	-
50	RSU Kasih Bunda	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	25,06409	-
51	RSUD Cibabat	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	50,4876	-

Keterangan: Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan
Sumber: Dinas Dosial Kota Cimahi, 2019

Tabel-36. Suhu Udara Rata-rata Bulanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan(°C)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Stasiun Geofisika Bandung	23,68	23,83	23,65	23.,96	23,84	23,32	22,9	23,04	23,84	24,87	24,2	23,74

Keterangan: -
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2019

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Lokasi	Lama Pengukuran	SO_2 ($\mu g/Nm^3$)	CO ($\mu g/Nm^3$)	NO_2 ($\mu g/Nm^3$)	O_3 ($\mu g/Nm^3$)	HC ($\mu g/Nm^3$)	PM_{10} ($\mu g/Nm^3$)	$PM_{2,5}$ ($\mu g/Nm^3$)
Kantor BPJS Kesehatan, Jl. Sangkuriang No.65 Cibabat S : 06º 51' 52,1" E : 107º 32' 25,4"	14 hari	<2,57	N/A	17.40	N/A	N/A	N/A	N/A
PT Dewasutratex 1, Jl. Cibaligo No.76 Cigugur Tengah S : 06º 54' 06,7"	14 hari	23,97	N/A	21,10	N/A	N/A	N/A	N/A

Lokasi	Lama Pengukuran	SO_2 ($\mu g/Nm^3$)	CO ($\mu g/Nm^3$)	NO_2 ($\mu g/Nm^3$)	O_3 ($\mu g/Nm^3$)	HC ($\mu g/Nm^3$)	PM_{10} ($\mu g/Nm^3$)	$PM_{2,5}$ ($\mu g/Nm^3$)
E : 107º 33' 20,7"								
Perumahan Kemarung Regency, Jl. Kamarung Citeureup S : 06º 51' 23,4" E : 107º 32' 58,4"	14 hari	6,57	N/A	18,70	N/A	N/A	N/A	N/A
Kantor Kelurahan Melong, Jl. Melong Sakola No.72 Melong S : 06º 55' 15,2"	14 hari	8,03	N/A	16,60	N/A	N/A	N/A	N/A

Lokasi	Lama Pengukuran	SO_2 ($\mu g/Nm^3$)	CO ($\mu g/Nm^3$)	NO_2 ($\mu g/Nm^3$)	O_3 ($\mu g/Nm^3$)	HC ($\mu g/Nm^3$)	PM_{10} ($\mu g/Nm^3$)	$PM_{2,5}$ ($\mu g/Nm^3$)
E : 107º 33' 31,5"								
PT Logam Bima, Jl. Raya No.518 Padasuka S : 06º 52' 11,9" E : 107º 31' 50,3"	14 hari	2,62	N/A	18,70	N/A	N/A	N/A	N/A
PT Jenshiang Nusantara, Jl Mancong No.238 Melong S : 06º 55' 09,3" E : 107º 31' 50,3"	14 hari	34,16	N/A	21,20	N/A	N/A	N/A	N/A

Lokasi	Lama Pengukuran	SO_2 ($\mu g/Nm^3$)	CO ($\mu g/Nm^3$)	NO_2 ($\mu g/Nm^3$)	O_3 ($\mu g/Nm^3$)	HC ($\mu g/Nm^3$)	PM_{10} ($\mu g/Nm^3$)	$PM_{2,5}$ ($\mu g/Nm^3$)
Perum Pilar Mas, Jl. Mahar Martanegara Utama S : 06º 54' 02,7" E : 107º 32' 17,5"	14 hari	25.79	N/A	18.10	N/A	N/A	N/A	N/A
Kantor Kel Cigugur Tengah, Jl Abdul Halim No 178 Cigugur Tengah S : 06º 53' 28,2" E : 107º 33' 16,6"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Tabel 37 Lanjutan)

Lokasi	TSP (µg/Nm^3)	Pb (µg/Nm^3)	Dustfall (µg/Nm^3)	Total Fluorides sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor Index (µg/Nm^3)	Khlorin& Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulphat Index (µg/Nm^3)
Kantor BPJS Kesehatan, Jl. Sangkuriang No.65 Cibabat S : 06º 51' 52,1" E : 107º 32' 25,4"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PT Dewasutratex 1, Jl. Cibaligo No.76 Cigugur Tengah S : 06º 54' 06,7" E : 107º 33' 20,7"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Perumahan Kemarung Regency, Jl. Kamarung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lokasi	TSP (µg/Nm^3)	Pb (µg/Nm^3)	Dustfall (µg/Nm^3)	Total Fluorides sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor Index (µg/Nm^3)	Khlorin& Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulphat Index (µg/Nm^3)
Citeureup S : 06º 51' 23,4" E : 107º 32' 58,4"							
Kantor Kelurahan Melong, Jl. Melong Sakola No.72 Melong S : 06º 55' 15,2" E : 107º 33' 31,5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PT Logam Bima, Jl. Raya No.518 Padasuka S : 06º 52' 11,9" E : 107º 31' 50,3"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lokasi	TSP (µg/Nm^3)	Pb (µg/Nm^3)	Dustfall (µg/Nm^3)	Total Fluorides sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor Index (µg/Nm^3)	Khlorin& Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulphat Index (µg/Nm^3)
PT Jenshiang Nusantara, Jl Mancong No.238 Melong S : 06º 55' 09,3" E : 107º 31' 50,3"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Perum Pilar Mas, Jl. Mahar Martanegara Utama S : 06º 54' 02,7" E : 107º 32' 17,5"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kantor Kel Cigugur Tengah, Jl Abdul Halim No 178 Cigugur Tengah S : 06º 53'	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lokasi	TSP (µg/Nm^3)	Pb (µg/Nm^3)	Dustfall (µg/Nm^3)	Total Fluorides sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor Index (µg/Nm^3)	Khlorin& Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulphat Index (µg/Nm^3)
28,2" E : 107º 33' 16,6"							

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan pada Bulan Mei 2020 oleh PT. Anugrah Analisis Sempurna
2. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2019

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batu Bara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
1	Kimia Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Mesin dan Logam Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Industri Kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Aneka Industri	N/A	N/A	13.853.737,91	1.721.209,29	153.510.873,42	347.708,48	N/A	N/A	N/A	4.258.257,80	12.649.710,82

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Cimahi, 2019

Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
2	Penumpang Pribadi	45.861	N/A	N/A	N/A
3	Penumpang Umum	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bus Besar Pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bus Besar Umum	183	N/A	N/A	N/A
6	Bus Kecil Pribadi	59	N/A	N/A	N/A
7	Bus Kecil Umum	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Truk Besar	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Truk Kecil	6.803	N/A	N/A	N/A
10	Roda Tiga	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Roda Dua	244.519	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Bappenda Provinsi Jawa Barat, 2019

Tabel-40. Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan Dua Tahun Terakhir(Km)	
		2018	2019
1	Jalan Bebas Hambatan	N/A	N/A
2	Jalan Raya	8,78	4,32
3	Jalan Sedang	12,153	9,36
4	Jalan Kecil	97,945	105,193

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi, 2019

Tabel-41. Dokmen Izin Lingkungan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
1	UKL-UPL	PT. DOM PIZZA INDONESIA (DOMINOS PIZA) REKOM ATAS DPLH	JAP JANTI KUSUMA JAYA
2	PERMOHONAN REKOM LINGKUNGAN	PABRIK KERUPUK Pk. Asli	CUNCUN WINATA
3	UKL-UPL	BURGER KING PT. SARI BURGER INDONESIA	JAP JANTI KUSUMA JAYA
4	UKL-UPL	ASRAMA BERBAYAR	VITRI RENNY TRIYANTI SP.MP
5	UKL-UPL	ASRAMA BERBAYAR	YUDHY CHANDRA JAYA
6	PERMOHONAN REKOM LINGKUNGAN	PEMB.RUMAH TINGGAL DAN ASRAMA BERBAYAR	LAILATUL HIKMAH
7	UKL-UPL	RUMAH TINGGAL, TOKO DAN REKLAME	NENDA KHOERUNNISA
8	UKL-UPL	RUMAH MAKAN (KIAMBANG RAYA)	AGUS WANDRI
9	UKL-UPL	PERUMAHAN NUSA *EXCULSIVE CLUSTER*	EMIL PERKASA
10	UKL-UPL	RUMAH TINGGAL, KANTOR DAN TEMPAT USAHA (CV. SINAR NUGRAHASTEEL)	RICHARD NUGRAHA SETIADARMA
11	UKL-UPL	RUMAH TINGGAL,ASRAMA BERBAYAR DAN TOKO	MURWULAN IROMASTI
12	UKL-UPL	WORKSHOP REBAR & BATCHING PLANT PROYEK KCIC	MOCH. ARIFIN
13	UKL-UPL	GUDANG	IRA SUSANTO SANTOSA
14	UKL-UPL	INDUSTRI TEKSTIL DAN GARMEN GUNARAS DANUBRATA	IPAN SOPIAN
15	PERMOHONAN REKOM LINGKUNGAN	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk	TEDDIE TJAHJANA
16	UKL-UPL	PERUMAHAN NUSA EXCULSIVE CLUSTER	EMIL PERKASA

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
17	UKL-UPL	PT. ELIZABETH HANJAYA	DENNY SUBALI
18	UKL-UPL	PT.CIPTA ANEKA PANGAN PRIMA (PABRIK DAN GUDANG)	NATALI ALIMMARGONO
19	UKL-UPL	PT.AKARA INTER DESAIN	STEFANUS ALVIN GUNAWAN
20	UKL-UPL	PT. BEAUTY ESSENCE	dr. DAVID BUDI WARTONO
21	UKL-UPL	PEMBANGUNAN TEMPAT CUCI MOBIL	SRI DIANA SATAWATI
22	REKOM DPLH	ASRAMA BERBAYAR	MIEN RUKMINI
23	REKOM UKL-UPL	INDUSTRI OBAT TRADISIONAL	DEVRY EKAPUTRA a.n PT. Vphar Laboratories Indonesia
24	REKOM UKL-UPL	RT (ASRAMA BERBAYAR)	HJ. INDARTI TRIMURTINI dr,. M.Kes
25	REKOM DPLH	MINIMARKET	HARMONI AGUNG KRISTIANTO a.n INDOMARCO PRISMATAMA
26	REKOM DPLH	MINIMARKET	HARMONI AGUNG KRISTIANTO a.n INDOMARCO PRISMATAMA
27	REKOM UKL-UPL	RT DAN ASRAMA BERBAYAR	LAILATUL HIKMAH
28	REKOM UKL-UPL	ASRAMA BERBAYAR	RICHARDUS TAGAR PUJASAMBADA
29	SPPL	PT. Akara Inter Desain	Stefanus Aylwin Gunawan
30	SPPL	Yabesindo Global Makmur	Cecep Suryadi
31	SPPL	Primer Koperasi Kartika Poncol	Dayat
32	SPPL	Pembangunan Rumah Tinggal dan Kantor a.n Perorangan	Siti Sarah Daliyus

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
33	SPPL	Dongeng Semesta Nusantara	Pudji Rahayu
34	SPPL	Kantor a.n Perorangan	Rika Kadam
35	SPPL	Toko a.n Perorangan	Ujang Nasril
36	SPPL	PD. Berkah Abadi	M. Eri Ahri S
37	SPPL	Karya Mandiri Sejahtera	Syarif Hamdani
38	SPPL	Toko Laris	Algi
39	SPPL	Toko Awan	Awan Fernando
40	SPPL	CV. Putra Lagadar	Hani Karyati
41	SPPL	PT. Sugema Jaya Tekindo	Maryadi Adiyata
42	SPPL	PT. BPR Teguh Ayusuastika	Wawan Hermawan
43	SPPL	Kantor a.n Perorangan	Leman
44	SPPL	PT. Putri Amani / Putri Amani Tour & Travel	Rachmat Rofika
45	SPPL	Toko a.n Perorangan	Nurul Fatimah
46	SPPL	Tempat Pencucian Mobil dan Motor	Sri Diana Saptawati
47	SPPL	PT. Mega Lestari Jaya	Wana Yuwana
48	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Muh. Haidir
49	SPPL	CV. Granada	Gandi Hermawan
50	SPPL	Kantor HKI	Agus Suprijono
51	SPPL	Toko Saluyu	Ende Solehudin
52	SPPL	Toko a.n Perorangan	Rusdianto

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
53	SPPL	CV. Annafa Engineering	Yahya Nurudin
54	SPPL	Klinik Siliwangi	Drg. Laskawina
55	SPPL	CV. Cempaka	Rully Sujana
56	SPPL	CV. Araiya Dua Ratus	Ipah Saripah
57	SPPL	PT Ganesha Multi Karya	Dadan Saepudin
58	SPPL	PT. Sectoor Indonesia	Hisar Rumapea
59	SPPL	CV. Gosyen Anugrah Lestari	Jefri Andreas
60	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Syarif Hidayat
61	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Rukiah / Wahyu Hidayat
62	SPPL	CV. Ghulwani	Mira Oktaviani
63	SPPL	PT. Sari Burger Indonesia	Permatasari Onggowarsito
64	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Herry
65	SPPL	Roko a.n Perorangan	Enok Yani
66	SPPL	Teguh Rahayu	Hermina Retnawati
67	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Gede Suadyana
68	SPPL	CV. Citatya	Roy Firmansyah
69	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko an Perorangan	Jap Luey
70	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko an Perorangan	Jap Gie
71	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Triady Fauzy Sidiq
72	SPPL	CV. Lunar Jaya	Indra Ruchwijaya

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
73	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko	Andri Rusito
74	SPPL	Toko Sadarmanah	Shinta Damayanti
75	SPPL	CV. Erytech Jaya	Endi Rusyadi
76	SPPL	Primkop Kartika Dharmagati	Widi Nugroho
77	SPPL	Klinik Ananda	Desiana SY
78	SPPL	Toko Kelontong an Perorangan	Adi Juliardi
79	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Zuriati
80	SPPL	CV. Arase Abadi	Ferry Perdana, S.Ked
81	SPPL	Chaang Lighting	Kwik Tjieng Ling
82	SPPL	TB. Agung	David
83	SPPL	PT. Bentara Reka Semesta	Andri
84	SPPL	CV. Fatra Technology Solution	Widia Nurmaidayanti
85	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Erwin Yulianto
86	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Erwin Yulianto
87	SPPL	Primkop Kartika Ardagusema	Suwandi
88	SPPL	Cake Foker	Isah Hindasyah
89	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Wahyudiati
90	SPPL	CV. Anugerah Jaya	Jatnika Okki Suwanda
91	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Jonshon Simatupang
92	SPPL	PT. Asia Tranzmark Racing	Roy Darma Putra

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
93	SPPL	Kandang Ayam	Shendy Lukito Heryawan
94	SPPL	Pengrajin Karet	Musdianto
95	SPPL	Santosa	Rudi Lo
96	SPPL	Estetik	Arlani Sesantini
97	SPPL	PT. Optima Pratama Konsultan	Dr. Yudhi Koesworodjati
98	SPPL	AR Motor	Eddy Suryana
99	SPPL	CV. Buana Gajah Nusantara Mitra Teknik	Lenny Solihat
100	SPPL	Tiara Utama Elektronik	Tiara Faradila
101	SPPL	PT. Subur Inti Makmur	Jon Wihardja
102	SPPL	CV. Bagja Waluya	Drg Lilis Sukmayani
103	SPPL	TB. Langganan Baru	Tjioe Swie Tiauw
104	SPPL	Pembangunan Kantor a.n Perorangan	Stephanie Anne Sugono
105	SPPL	Pembangunan Kantor a.n Perorangan	Sumyem Hasumi
106	SPPL	Ujung Jaya	Agung Laksana
107	SPPL	PT. Maju Panca Anugrah	Welly Arianto
108	SPPL	PB. Batera	Slamet Soesmantoro
109	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Halimah Tusadiyah
110	SPPL	PT. Indosat Tbk	Tendi Oktendi
111	SPPL	CV. Rahayu Mandiri	Atun Rahayu
112	SPPL	Cimahi Photo	Juliana

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
113	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Hj. Ade Hariman
114	SPPL	PT. Niaga Sarae Internusa	Mursyid Faqih Asqar
115	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Yanni Rustandi
116	SPPL	PT. Ashafa Berkah Multindo	Yaya Supriadi
117	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Susan Sugiono
118	SPPL	PT. Kimia Farma	Muhammad Ikhwan
119	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Mien Rukmini
120	SPPL	CV. Paska Perdana	Samsam Pribadi
121	SPPL	Cv. Adrifina Fajar Alam	Salamuddin
122	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Kateni
123	SPPL	PT. Indosains Niaga Sejahtera	Novy Lousiane
124	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Subagja
125	SPPL	Perusahaan Kerupuk Asli	Cuncun Winata
126	SPPL	Toko a.n Perorangan	Lionard Sutandi
127	SPPL	Cekeran Midun	Akhmad Rizalullah
128	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Akhmad Ridwan 1
129	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Akhmad Ridwan 2
130	SPPL	CV. Purnama Teknik	Asep Wardiman
131	SPPL	Koperasi Pegawai P3GT Bandung	Harry Suryahadi
132	SPPL	Warung Nasi Padang	IIM SUMIATI

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
133	SPPL	TB. Mekar Sawargi	Asep Wawan
134	SPPL	Toko a.n Perorangan	Deden Misbah
135	SPPL	CV. Abdijabar Teknik Sakti	Martin Wirabuana
136	SPPL	a.n Perorangan	Yong Ay Tjiau
137	SPPL	Primkop Kartika Nirbhaya	Hilman Ridlo
138	SPPL	Primkop Kartika Wira Bhakti	Rusmawandi
139	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Nugroho Tri Widarto
140	SPPL	CV. Arshaka Jaya	Rio Prabowo
141	SPPL	Oyster Seafood Restoran	Nurul Sutianti
142	SPPL	CV. Anugrah Cipta Rasa	Yeni
143	SPPL	TB. HL Putra	Herman
144	SPPL	CV. Andana Tridaya Corporation	Andri Triyana
145	SPPL	a.n Perorangan	Yenny Harjono
146	SPPL	Primkop Kartika Prakasa Bhakti	Juhara
147	SPPL	PT. Multi Informasi Indonesia	Yayat Tahyan
148	SPPL	a.n Perorangan	Teddy Hendra
149	SPPL	Warung Alina	Iwan Maulana
150	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	H. Bardjah
151	SPPL	CV. Holy Aesthetic Indonesia	Jusuf Lewi
152	SPPL	Gor dan Rumah Tinggal	Ani Cuwani Agustianah

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
153	SPPL	CV. Anjati Mandiri	Jajang Jaenudin
154	SPPL	CV. Tri Usaha Mandiri	Drs. Sadewo
155	SPPL	PT. Sarana Daya Karya	R. Airlangga Kertarajasa
156	SPPL	PT. Sina Indotech Global	Nugroho Tri Widarto
157	SPPL	Profesi Group	Revi Siti Mutia
158	SPPL	PT. Salasa Masajid	Maman
159	SPPL	Toko Anugerah Abadi	James Aritonang
160	SPPL	Toko a.n Perorangan	Haryadi Lukas
161	SPPL	Apotek Sohabat	Ismail Yudantara
162	SPPL	Toko & Gudang a.n Perorangan	Dicky Prasetyo
163	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Inna Nurjani Kesuma
164	SPPL	Rumah Tinggal, kantor dan tempat usaha a.n Perorangan	Richard Nugraha Setiadarma
165	SPPL	Primer Koperasi Kartika Dustira	Sri Damayanti S.Kep
166	SPPL	PT. Elang Pakindo Perkasa	Lauw Santo Triharto
167	SPPL	PT. Putra Jaya Perceka	Edi Wiharyadi
168	SPPL	Apotek Multi Farma	Hj. Ida Swatuti
169	SPPL	CV. Sukajaya	Aep Saepul Anwar
170	SPPL	PT. Lima Saudara	Bagus Widjanarko
171	SPPL	PT. Sawakala Karya Apindo	Budi Herdiana Amin
172	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Kijat Wirar

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
173	SPPL	PT. Cipta Aneka Pangan Prima dan PT. Cipta Cipta Surya Cemerlang	Natali Alimmargono
174	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Adi Juliardi 2
175	SPPL	Rukan a.n Perorangan	Mariyanti
176	SPPL	PT. Berkah Berlimpah Kurnia	Cynthia Flaviana Kusumaputri
177	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Lailatul Hikmah
178	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko an Perorangan	Agus Saefullah
179	SPPL	PT. Komido Tech	Yun Seokjin
180	SPPL	Apotek Raya Farma	Cepi Akhmad
181	SPPL	PT. BPRS Daarul Tauhid	Ikka Dryyuli
182	SPPL	CV. Putra Puspasari	Ono Darsono
183	SPPL	Rumah Tinggal dan Toko (Eterno)	Lenny Rachmawaty
184	SPPL	CV. Sasqia Rezha Pratama	Asep Saepudin
185	SPPL	TK dan SD Terpadu (Yayasan Pendidikan Paripurna Jaya)	Ratna Juwita
186	SPPL	Kantor Bank Sampah Induk Cimahi	Tigor Sitinjak (Dinas LH Cimahi)
187	SPPL	Sinar Rezeki	Erwin Budianto
188	SPPL	Klinik Pratama Adeeva Aesthetic	Lilis Tarmilah
189	SPPL	CV. Limbres	Meradat Limbong
190	SPPL	CV. Sinar Santosa Sejahtera	Muhamad Juniar Akbar
191	SPPL	PT Tesla Daya Elektrika	Gumilang Dewananta
192	SPPL	Yayasan Bina Insani	Hidayat

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
193	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Ekom Wahyu Saputra
194	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Dede Karnasih
195	SPPL	PT. Sebastian Citra Indonesia	Jemmy Wantono
196	SPPL	PT Notes Pos Berusaha	Patahanan Sinaga
197	SPPL	PT. Erha Clinic Indonesia	Ricardo Handoko
198	SPPL	PT. Cakra Vimana Diinamycx dan PT Cendrawasih Vaskita Darma	Sunanto Ajidarmo
199	SPPL	CV. BOC Inti Maxima	Ferli Sugandi
200	SPPL	Yayasan Al-Mas'udiyah Cimahi	KH. Mas'ud Sidiq
201	SPPL	CV. Seger Utama	Ary Huniarto
202	SPPL	Gudang a.n Perorangan	Ira Susanto Santoso
203	SPPL	CV. Putra Karya Sarana	Cynthia Flaviana Kusumaputri
204	SPPL	Ruko dan Sarana Olahraga a.n Perorangan	Budi Arisnawati
205	SPPL	Ruko a.n Perorangan	H. Ade Hariman
206	SPPL	Toko a.n Perorangan	Neneng Mutiah
207	SPPL	PT. Mahligai Puteri Berlian	Umar Dani
208	SPPL	Primkop Kartika 0609 KABUBACI	Dedi Rusyana
209	SPPL	PT. Dinamika Multi Usaha Sejahtera	Martin Wirabuana
210	SPPL	Canting Kopi By Batik Sekar Putri	Renny Yuniarti
211	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Dede Rohendi
212	SPPL	Klinik a.n Perorangan	Milayanti

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
213	SPPL	Ruko & Rukan a.n Perorangan	Meilianny Lesmana
214	SPPL	PT. Grenatama Teknik Alternatindo	Hubertus Bonar Saut Maruli
215	SPPL	a.n Perorangan	Hendarko
216	SPPL	a.n Perorangan	Alpius Tjen
217	SPPL	CV. Atha Adi Karya	Lilis Nurbayani, SE
218	SPPL	Kantor a.n Perorangan	Wirawan Broto
219	SPPL	CV. Tekno Buana	Amanda Wista Fitria
220	SPPL	PT. Ryan Putra Energi	Yanto
221	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Iing Sopandi
222	SPPL	Primkop Kartika Vyati Cakti	Vanlly Towoliu
223	SPPL	Pidu'a Sepuh	Suherman
224	SPPL	Yayasan Musthofa Kamil	Drs. Zaenal Ahmad Mustopa
225	SPPL	PT. Graha Cipta Abadi (I)	Hadi Sularyo
226	SPPL	Nusa Permai Motor	Merry Yansen
227	SPPL	PT. Techno Multi Utama	Adi Dharma Soelaiman
228	SPPL	Karya Utama Putra	Lie Yulius Agustinus W, ST
229	SPPL	Kantor a.n Perorangan	Nandang Suhara
230	SPPL	Karya Jaya Steel I (satu)	Riki Yakub
231	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Drg. Malati Paggi
232	SPPL	Tempat Pencucian Mobil a.n Perorangan	H. Eman Sulaeman

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
233	SPPL	Waroeng Steak and Shake Expres	Siti Hariani Nur Utami
234	SPPL	PT. Graha Cipta Abadi (II)	Hadi Sularyo
235	SPPL	PT. EL SHABAZ GEMILANG PERSADA	H. Andi Haditia
236	SPPL	TB. Trijaya	Jap Tjie Sing
237	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Hj. Indarti Trimurtini
238	SPPL	Perorangan	Ahmad Sofyan
239	SPPL	2 Naz Orikav	Rini Susanti
240	SPPL	Batik Sekar Putri	Rienny Yuniarty
241	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Amadhea Yudith Eryanti
242	SPPL	Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Wafaa	KH. Abdaloh Almahdawi
243	SPPL	a.n Perorangan	Rizky Aditya Kusuma
244	SPPL	CV. Anugrah Berkah Insani	Candra Gusnawan
245	SPPL	TOHAGA	Lazuardi Annata Hayat
246	SPPL	PT. Athira Jaya Abadi	Muawiyah
247	SPPL	Toko Noval	Purwanto
248	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Wawan Syarif Hidayat
249	SPPL	PT. Pegadaian (Persero)	Mufri Yandi
250	SPPL	Ruko a.n Perorangan	Drs. H. Banban
251	SPPL	PT. Eigerindo Multi Produk Industri	Christian Hartanto Sarsono
252	SPPL	PT. Anyar Retail Indonesia	Kelvin Sumarli

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
253	SPPL	Primer Koperasi Kartika Prakarsa	Koharudin
254	SPPL	Pratama Catering	Aip Sunarya
255	SPPL	PT. Kurnia Saleh Sagapasa	Fauzy Kurniawan Shaleh
256	SPPL	PT. Gumilang Wening Asih	Edi Sudrajat
257	SPPL	TB. Putra Bungsu	Asep Taufik Muharam
258	SPPL	PT. PLN (Persero) UP3 Cimahi	Anats Pram Andreas
259	SPPL	PT. Disya Karya Pratama	Budi Hermawan
260	SPPL	PT. Bartech Media Solusi	Toni Hidayat
261	SPPL	a.n Perorangan	Budi Arisnawati
262	SPPL	CV. Dinamis Maju Sejahtera	Hendra Kurniawan
263	SPPL	Pemerintah Kota Cimahi	Sodikin, SE
264	SPPL	Primkop Kartika Viyata Bhakti	Achmad Dumiyati
265	SPPL	a.n Perorangan	Widodo
266	SPPL	a.n Perorangan	N. Mamay Ainul Mardiyah
267	SPPL	a.n Perorangan	Nabhan
268	SPPL	a.n Perorangan	Yani Haryani Sutrisna
269	SPPL	CV. Nabylla	Handika Putra Mahatmanto
270	SPPL	CV. Izzati	Drg . Poppy Yunita
271	SPPL	PT. Surganya Motor Indonesia	Indra Trianto
272	SPPL	PT. Surganya Motor Indonesia	Indra Trianto

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
273	SPPL	PT. Surganya Motor Indonesia	Indra Trianto
274	SPPL	CV. Berkat	Nazrul Handayani
275	SPPL	Asrama Berbayar a.n Perorangan	Richardus Tagar Pujasambada
276	SPPL	Tempat Pengelolaan Sampah (3821)	Tigor Sitinjak (Dinas LH Cimahi)
277	SPPL	PT. Karya Cipta Pasundan & PT. Balad Bumi Priangan	Cecep Somantri
278	SPPL	PT. Putra Jaya Perceka	Edi Wiharyadi
279	SPPL	Karya Jaya Steel	H. Oyo Mulyadi
280	SPPL	a.n Perorangan	Sastra Winata
281	SPPL	PT. Refacindo Teknik Utama	Iyan Sofyan
282	SPPL	a.n Perorangan	Diah Lestari
283	SPPL	a.n Perorangan	Dalmi
284	SPPL	a.n Perorangan	Melly Gunawan
285	SPPL	a.n Perorangan	Trimurti Endajani
286	SPPL	Primkop Kartika Kujang II Siliwangi	Syaefudin, SIP
287	SPPL	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Edi Yani Putra
288	SPPL	PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia	Edi Yani Putra
289	SPPL	PT. Fernusa Jaya Abadi	Muhamad Feri
290	SPPL	a.n Perorangan	Dede Roehendi
291	SPPL	a.n Perorangan	Andri Prasetyo
292	SPPL	PT. Bandha Karya Persada	Ayi Karnawan

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
293	SPPL	CV. Baladesa	Fanhas Maulana
294	SPPL	CV. Biaby Karya Abadi	Aathira Farah Salsabila
295	SPPL	a.n Perorangan	Ulvi Yulfiani Jaelanni
296	SPPL	a.n Perorangan	Andrew Purnomo
297	SPPL	a.n Perorangan	Laela Purnamaningsih
298	SPPL	Mesjid Baiturrohman	Teddy Ahmad Suyasa
299	SPPL	a.n Perorangan	Armen Nugraha
300	SPPL	CV. Tiga Puteri	Eky Rukila
301	SPPL	GSG Graha Singosari	Hj. Nia Rahmawati
302	SPPL	Kumon Singosari	Irene
303	SPPL	a.n Perorangan	Ildenfonso ADC
304	SPPL	CV. Sandy Karya	Sahmin
305	SPPL	Viva Motor	Erom Ruhimat
306	SPPL	a.n Perorangan	Endang Permana
307	SPPL	PT. Permana Jaya Kencana	Budhi Setiawan
308	SPPL	Klinik Utama, Pratama, Bersalin, Salon, Apotek, Laboraturium, Kantor	Nur Farah
309	SPPL	PT. Triputra Karya Lestari	Nie Ka Siong
310	SPPL	PT. Srikandi Podo Mulyo	Irmina Adiningrih Rahajuni
311	SPPL	a.n Perorangan	Rini Lusy Windharti
312	SPPL	a.n Perorangan	Moch Syafik

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
313	SPPL	CV. Sakura Jaya	Susy Adelina Halim Sastra
314	SPPL	a.n Perorangan	Nina Lisnawati
315	SPPL	TB. Galuh Mandiri	Oom Nandang
316	SPPL	PT. Bakti Adikarya Sejahtera	Susiyanto, SE
317	SPPL	Cimahi Mebel	Jovan Gunawan
318	SPPL	a.n Perorangan	Supijan Malik
319	SPPL	PT. Surganya Motor Indonesia	Indra Trianto
320	SPPL	Vidiz Baniar	dr. Didit Widagdo
321	SPPL	a.n Perorangan	Namen Siahaan, Ir
322	SPPL	PT. Mega Indah Lestari	Hindarta Sanjaya
323	SPPL	PT. Akatara Kharisma Sinergi	Deni Kusmawan
324	SPPL	Abadi Mulya 8	Mistar Jayadi
325	SPPL	CV. Mitra Swadaya Mandiri	Asep Dana Sukmara
326	SPPL	CV. Bianglala	Herry
327	SPPL	PT. Baros Karunia Medika	dr. Christian Kurniawan
328	SPPL	Baros Electronic	Hadi Kurniawan
329	SPPL	Agam Makmur	Iskandar
330	SPPL	CV. Cimindi Guest House	Virley Shearer Sugono
331	SPPL	CV. Baruna Medika	Dewi Umu Kalsum M.Kep
332	SPPL	PT. Selaras Prima Solusi	Sunarto, SE

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
333	SPPL	CV. Sabahal Mandiri	Wandi Sagala, ST
334	SPPL	a.n Perorangan	Hasan Putramas
335	SPPL	PT. Gumilang Wening Asih	Edi Sudrajat Ahmad
336	SPPL	a.n Perorangan	Yuyung Priyani
337	SPPL	CV. Donat Madu Cihanjuang	Fanina Nisfulaily
338	SPPL	Koperasi Pegawai Stikes Jendral Ahcmad Yani	Lela Juariah
339	SPPL	PT. Angel Jaya Globalindo	Jianing Xu
340	SPPL	a.n Perorangan	Sutjiati
341	SPPL	a.n Perorangan	Sutisna
342	SPPL	Klinik dr. Andres	Andres Christina
343	SPPL	a.n Perorangan	Nani Tjahja
344	SPPL	a.n Perorangan	Sri Wahyuni, SIP, M.HUM
345	SPPL	CV. Enggalindo Carpentry	Albert Handly Hutami
346	SPPL	PT. Jayus Transport Putra	Jayus Brianmay Putra

Keterangan: -
Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2019

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
1	ACHMAD KOMARUDIN	-	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	0017-HER/1888/DPMPTSP/2019
2	AFFANDI HERMAWAN (PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRI)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	0006-HER/1218/DPMPTSP/2019
3	AFFANDI HERMAWAN (PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRI)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0003-HER/0895/DPMPTSP/2019
4	ARDANY WANTOUW (PT.AYOE INDOTAMA TEXTILE)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0011-HER/1598/DPMPTSP/2019
5	BEDJO STEFANUS (PT. HOLI PHARMA)	Farmasi	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0010-HER/1597/DPMPTSP/2019
6	CHRISTINA SRI MANUNGGAL (PT. NISSHINBO INDONESIA)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0004-HER/1171/DPMPTSP/2019
7	DEDE RAHMAT/DR.ANTON HARYANTO Sp. PD(RS. MITRA KASIH)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0007/1708/DPMPTSP/2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
8	DEDY, SH (PT. GUNA MITRA PRIMA)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0002-HER/0544/DPMPTSP/2019
9	DEDY WIDJAJA DHARMA (PT. BERDIKARI METAL ENGINEEGERING)	Industri Elektroplating	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0005/1217/DPMPTSP/2019
10	DENY SUBALI (PT. ELIZABETH HANJAYA)	Industri Domestik	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0014-HER/1707/DPMPTSP/2019
11	dr. RERI MARLILAH.MM / dr. TRIAS NUGRAHADI SpKN	-	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0008-HER/1326/DPMPTSP/2019
12	FADJAR SWATYAS (PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK)	Industri Pelapisaan Logam dan Galvanis	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0009-HER/1444/DPMPTSP/2019
13	FERRY ERAWATI (PT. PRODIA WIDYAHUSADA TBK)	Klinik	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0013-HER/1648/DPMPTSP/2019
14	GUNARAS DANUBRATA (sansan saudaratex 2)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0004/1142/DPMPTSP/2019
15	GUNARAS DANUBRATA (sansan saudaratex 2)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0003/1170/dpmptsp/2019
16	INDRI YULIANTI a.n PT. OPELON GARMENT INDONESIA	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	0016-Her/1889/DPMPTSP/2019
17	KO PAI HSIANG (PT. KARYA PRIMA SENTOSA TEXTILE)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0006/1314/DPMPTSP/2019

No.	Nama Perusahaan	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
18	MATIUS AGUS SUSANTO (PT. BINA USAHA CIPTA PRIMA)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0009-HER/1420/DPMPTSP/2019
19	OIEY TONY (PT. TRIANA HARVESTINDO NUSANTARA)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0012-HER/1600/DPMPTSP/2019
20	SUBEKTI SH (PT. HEKSATEX INDAH)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0007-HER/1219/DPMPTSP/2019
21	RIRIP TER, SE (PT. SANBE FARMA UNIT 1)	Farmasi	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0008/1935/DPMPTSP/2019
22	UCU SURYANA (PT. KAHATEX)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/002/0098/DPMPTSP/2019
23	YACOB KUSMANTO (PT. TEGAR PRIMANUSANTARA)	Industri Tekstil	IZIN PENYIMPANAN LIMBAH B3	503.31/0018-HER/1936/DPMPTSP

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: DPMPTSP Kota Cimahi, 2019

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
1	PT. BENANG WARNA INDONUSA	9-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
2	PT. SANBE FARMA UNIT I	4-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
3	PT. SANBE FARMA UNIT II	4-Jun-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
4	PT. SANBE FARMA UNIT R&D	4-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
5	HETZER MEDICAL	3-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
6	PT. DAM SINAR BUTTON FACTORY	19-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
7	PT. LOGAM BIMA	31-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
8	PT. KERETA CEPAT INONESIA CHINA (KCIC)	22-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
9	PT. MULYA LESTARI	12-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
10	PT. STANLI TRIJAYA MANDIRI	14-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
11	PT. AVISENA MANDIRI SEJAHTERA (RS. AVISENA)	9-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
12	PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES	19-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
13	PT. GINATEX	31-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
14	PT. LAJU MAKMUR SENTOSA	12-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
15	PT. SINAR PANGJAYA MULIA TEXTILE INDUSTRIES	2-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
16	PT. HOLI PHARMA	18-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
17	PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA	1-Oct-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
18	PT. HEGAR MULYA	23-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
19	PT. FUJI PALAPA TEXTILE INDUSTRIES	29-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
20	KLINIK YUDISMAN	9-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
21	PT. KAHATEX	26-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
22	PT. POLA MANUNGGAL SEJATI	25-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
23	RSUD. CIBABAT KOTA CIMAHI	5-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
24	PT. BIAN USAHA CIPTA PRIMA	11-Oct-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
25	PT. TEODORE PAN GARMINDO	19-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
26	PT. DAYA ADICIPTA	5 November 2019	Telah melaksanakan UKL/UPL
27	PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA	31 oktober3 2019	Telah melaksanakan UKL/UPL
28	PT. SETIABUSANATEX	18-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
29	PT. AFIAT PHARMACEUTICAL	10-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
30	PT. MARGAJAYA	25-Oct-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
31	PT. ORIENTAL EMBROIDERY	26-Oct-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
32	PT. FOKUS GAYA GRAHA	6-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
33	PT. OPELON GARMENT	12-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
34	PT. SAN SAN SAUDARATEX JAYA V	-	Telah melaksanakan UKL/UPL

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
35	PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk	29-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
36	RUMAH SAKIT AVISENA	9-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
37	PT. DEWA SUTRATEX II	11-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
38	PT. KARYA PRIMA SENTOSA	16-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
39	PT. TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk	19-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
40	PT. HOLI PHARMA	18-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
41	PT. BINTANG WARNA MANDIRI	19-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
42	PT. RAJAWALI HYOTO	30-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
43	PT. KCIC (KERETA API CEPAT)	-	Telah melaksanakan UKL/UPL
44	PT. STANLI TRIJAYA MANDIRI (GARMELIA BAKERY)	14-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
45	PT. LAJU MAKMUR SENTOSA	12-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
46	PT. MULYA LESTARI	12-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
47	PT. JERDYTEX	08-Nov-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
48	PT. NICKROME INDOJAYA	9-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
49	PT. PERUSAHAAN LOGAM BIMA	31-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
50	PT. DAM SINAR BUTTON FACTORY	19-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
51	PT. SINAR PANGJAYA MULYA TEXTILE INDUSTRY	2-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
52	HETZER MEDICAL	3-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
53	PT. GINATEX	31-Jul-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
54	PT. NIAGATAMA HIJAU RAYA	23-Aug-19	Telah melaksanakan UKL/UPL

No.	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
55	RSUD CIBABAT	4-Feb-20	Telah melaksanakan UKL/UPL
56	PT. SARIMELATI KENCANA (Pizza Hut)	23-Dec-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
57	PT. BINA NUSANTARA PRIMA	20-Sep-19	Telah melaksanakan UKL/UPL
58	PT. FUJI PALAPA TEXTILE	-	Telah melaksanakan UKL/UPL
59	PT. CENTRAL GEORGETE NUSANTARA (CGN)	15-Oct-19	Telah melaksanakan UKL/UPL

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-44. Bencana Banjir, Koraban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	Total Area Terendam (Ha)	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Mengungsi	Meninggal	
1	Cimahi Utara	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cimahi Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-45. Bencana Kekeringan, Luas, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Total Area (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
1	Cimahi Utara	N/A	N/A
2	Cimahi Selatan	N/A	N/A
3	Cimahi Tengah	N/A	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-46. Bencana Kebakaran Hutan/Lahan, Luas, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Perkiraan Luas Hutan/ Lahan Terbakar (Ha)	Perkiraan Kerugian (Rp)
1	Cimahi Utara	10,09	N/A
2	Cimahi Selatan	0,04	N/A
3	Cimahi Tengah	1,06	N/A

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-47. Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Korban Meninggal (jiwa)	Perkiraan Kerugian (Rp.)
1	Cimahi Utara	Longsor	2	231.300.000
6	Cimahi Tengah	Longsor	0	22.250.000
7	Cimahi Selatan	Longsor	0	16.000.000

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan terdapat korban jiwa

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-48. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kota	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
1	Cimahi Selatan	16.94	232555	2,36	137,28 jiwa/ha
2	Cimahi Tengah	10.11	160134	1,94	158,34 jiwa/ha
3	Cimahi Utara	13.32	161066	2,72	120,89 jiwa/ha

Keterangan: -
Sumber: Database Konsolidasi Bersih Semester II, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, 2019

Tabel-49. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kota	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m^3/hari)	Volume Eksiting (m^3)
1	Cimahi	TPPAS Regional Sarimukti	Open Dumping	25,5	6.135,91	32.455.401

Keterangan : -
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-50. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kota	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m3/hari)
1	Cimahi	553.755	1.378,85

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-51. Jumlah Bank Sampah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
1	Bank Samici	-	20.061,65		Kota Cimahi	-	8 orang	-
2	RSUD Cibabat	-	1.879,70		-	-	-	-
3	SDN Mandiri 2	-	39,60		-	-	-	-
4	SMAN 3 Cimahi	-	13,60		-	-	-	-
5	RW. 17 Padasuka	-	75,79		-	-	-	-
6	PT. Trisula	-	289,25		-	-	-	-
7	Rs. Kasih Bunda	-	367,40		-	-	-	-
8	SMAN 2 Cimahi	-	89,83		-	-	-	-
9	Kantor DPRD	-	125,90		-	-	-	-
10	Stikes A.Yani	-	101,00		-	-	-	-
11	SMAN 6 Cimahi	-	34,08		-	-	-	-
12	SD Nurul Aulia	-	32,25		-	-	-	-
13	Bank Sampah Sehati	-	231,02		-	-	-	-
14	RW. 08 Cimahi tengah	-	149,30		-	-	-	-
15	Bank Permata 2	-	113,75		-	-	-	-
16	RW. 12 Leuwigajah	-	33,25		-	-	-	-
17	RW. 17 Cigugur Tengah	-	164,85		-	-	-	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
18	SMPN 3 Cimahi	-	38,00		-	-	-	-
19	Koperasi Trisula	-	460,00		-	-	-	-
20	Bank sampah Eropa Cipageran	-	150,87		-	-	-	-
21	SD Hikmah Teladan	-	25,50		-	-	-	-
22	Bank Sampah Teratai RW 14 Pasirkaliki	-	83,50		-	-	-	-
23	Bank Sampah Nata Endah	-	13,58		-	-	-	-
24	SDN Baros Mandiri 1	-	43,50		-	-	-	-
25	SMK Pusdikhubad	-	75,60		-	-	-	-
26	SDN Baros Mandiri 3	-	88,16		-	-	-	-
27	RT. 02 RW. 05 Pasirkaliki	-	27,25		-	-	-	-
28	RT. 03 RW. 05 Pasirkaliki	-	139,75		-	-	-	-
29	PT Beton Elemen Persada	-	46,60		-	-	-	-
30	RW. 03 Baros Cimahi	-	389,20		-	-	-	-
31	RW. 07 Pasirkaliki	-	15,79		-	-	-	-
32	RT.01 RW.19 Cigugur Tengah	-	216,25		-	-	-	-
33	Puskesmas Padasuka	-	19,37		-	-	-	-
34	Puskesmas Citeureup	-	63,87		-	-	-	-
35	RSKB Halmahera	-	151,16		-	-	-	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
36	RT. 05 RW.31 Melong	-	354,25		-	-	-	-
37	RW. 16 Leuwigajah	-	92,25		-	-	-	-
38	RW. 04 Citeureup	-	263,50		-	-	-	-
39	Dinas Kesehatan Cimahi	-	27,60		-	-	-	-
40	BEM KMF Psikologi Unjani	-	31,06		-	-	-	-
41	Puskesmas Cimahi Tengah	-	134,75		-	-	-	-
42	Unit Ciputri RW. 05 Cigugur Tengah	-	128,30		-	-	-	-
43	Bank sampah Bismillah RW. 08 Cigugur	-	282,25		-	-	-	-
44	Unit Sarbuk	-	315,00		-	-	-	-
45	Citaman RW. 04 Cigugur Tengah	-	85,50		-	-	-	-
46	Bank sampah Tabah RW.26 melong	-	170,00		-	-	-	-
47	PT. PLN Area Cimahi	-	60,50		-	-	-	-
48	Bank Sampah Mawar RT. 01 RW. 06 Cibogo	-	181,87		-	-	-	-
49	Bambu Cimindi RW. 18 Cibeureum	-	120,00		-	-	-	-
50	Salfa Marwah RW. 02 Cigugur Tengah	-	280,20		-	-	-	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
51	RT. 06 RW. 27 Cibeureum	-	338,15		-	-	-	-
52	Bank sampah berkah RW. 07 Cigugur Tengah	-	192,00		-	-	-	-
53	Marsa RW. 07 Kolmas	-	233,15		-	-	-	-
54	Ecovillage rena RW. 01 Margamulya	-	290,50		-	-	-	-
55	PT Gistex	-	367,50		-	-	-	-
56	Puspa Bukit RW. 22 Permata	-	268,50		-	-	-	-
57	RW 11 Pasirkaliki	-	183,00		-	-	-	-
58	Trio Angel	-	22,00		-	-	-	-
59	Perum Kota Mas	-	18,80		-	-	-	-
60	SMAN 1 Cimahi	-	17,00		-	-	-	-
61	Pagar Nusa SMK TI Garuda Nusantara	-	14,00		-	-	-	-
62	Unit Cetar RW.18 Cibeureum	-	22,25		-	-	-	-
63	UPTD. Labotarorium Lingkungan	-	94,00		-	-	-	-
64	RW. 03 RT.02 Kebon Kalapa	-	58,00		-	-	-	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
65	Mawar 2	-	1.968,50		-	-	-	-
66	PT. Chitose International TBK	-	661,00		-	-	-	-
67	HMBF UPI	-	12,50		-	-	-	-
68	Bukit Berlian	-	198,00		-	-	-	-
69	RW. 17 Cibeureum	-	98,50		-	-	-	-
70	Mekar Harapan 6 RW. 09 Melong	-	322,50		-	-	-	-
71	SDn Padasuka Mandiri 1	-	85,00		-	-	-	-
72	Mutty RW. 10 Cibabat	-	320,50		-	-	-	-
73	PT. Nutrifood Indonesia	-	303,00		-	-	-	-
74	SMAN 4 Cimahi	-	49,00		-	-	-	-
75	RW. 17 Kenanga Komplek Buciper	-	215,00		-	-	-	-
76	SMP santo Mikael	-	25,00		-	-	-	-
77	Gerakan Pungut sampah (GPS)	-	12,00		-	-	-	-
78	MTS Baiturrahim	-	14,50		-	-	-	-
79	Puskesmas Pasirkaliki	-	31,00		-	-	-	-
80	Obor 327 RW. 27 Cibeureum	-	319,50		-	-	-	-
81	Blok Baru RW. 08 Kihapit	-	105,25		-	-	-	-
82	Anggaraja RW. 04 Cipageran	-	331,00		-	-	-	-
83	Koperasi Yon Armed	-	82,00		-	-	-	-
84	SDN Cibeureum 5	-	144,50		-	-	-	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
85	SD Santa Maria	-	314,50		-	-	-	-
86	Makso Mymo	-	88,50		-	-	-	-
87	SMPK BPK Penabur Cimahi	-	261,50		-	-	-	-
88	Lestrai RW.10 Cibeber	-	213,20		-	-	-	-
89	Mandiri RW. 16 Cigugur	-	82,50		-	-	-	-
90	Bagian Admin kesra	-	102,00		-	-	-	-
91	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Cimahi	-	29,00		-	-	-	-
92	Hujung Kidul RW.07	-	89,00		-	-	-	-
93	Tim PKM POLBAN	-	555,00		-	-	-	-
94	Rusunawa Leuwigajah RT.12 RW.09	-	137,50		-	-	-	-
95	Kantin MI Nur Al Hijrah	-	18,50		-	-	-	-
96	SD Kartika XIX-5	-	134,50		-	-	-	-
97	TK Daya Nusa	-	84,00		-	-	-	-
98	Rusunawa Leuwigajah gedung B	-	72,50		-	-	-	-
99	MTS - MA Asih Putra	-	478,00		-	-	-	-
100	MI Asih Putra	-	238,00		-	-	-	-
101	SMAN 5 Cimahi	-	45,00		-	-	-	-
102	Pancalaksana RW.16 Cijerah	-	152,50		-	-	-	-
103	SDN Baros Mandiri 4	-	22,00		-	-	-	-
104	Innaka Coffee	-	18,50		-	-	-	-

No.	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
105	MTS Fatahillah	-	754,50		-	-	-	-
106	PT. Griya Pratama Yogya Cimahi	-	461,00		-	-	-	-
107	Mawar 14 RW. 14 Cijerah Melong	-	96,50		-	-	-	-
108	Staff Tulipware	-	47,00		-	-	-	-
109	RS. Dustira	-	792,50		-	-	-	-
110	Kartini RW. 14 Cibogo Permai	-	16,50		-	-	-	-
Jumlah			**21.036,85**					

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Bank Sampah Induk Kota Cimahi, 2019

Tabel-52. Kegaitan Fisik Lainnya oleh Instansi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
1	Pembangunan Gedung Sekolah Jenjang SD	SDN Baros Mandiri 3 Cimahi, Jl. Haji Haris Kel. Baros Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi (pembangunan Lanjutan Gedung Sekolah)	Dinas Pendidikan
2	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilititas Parkir Jenjang SD	1. SDN Cipageran Mandiri 1 Cimahi 2. SDN Cibodas 1 Cimahi dan SDN Cibodas 2 Cimahi 3. SDN Cimahi Mandiri 3 Cimahi Kota Cimahi (Pemasangan Pavingblok) 4. SDN Pasirkaliki 1 Cimahi	Dinas Pendidikan
3	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Jenjang SD	Sekolah Dasar Kota Cimahi	Dinas Pendidikan
4	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD	Sekolah Dasar Kota Cimahi	Dinas Pendidikan
5	Pembangunan Gedung Sekolah Jenjang SMP	SMP NEGERI 10 CIMAHI : Jl. Daeng Muhammad Ardiwinata Km. 2,5 Kel.Cibabat Kec. Cimahi Utara (Pembangunan gedung Sekolah)	Dinas Pendidikan
6	Penambahan Ruang Kelas Baru SMP	SMP NEGERI 11 CIMAHI : Jl Torobosan Cimenteng Kel. Cipageran Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi (Pembangunan Gedung Sekolah)	Dinas Pendidikan

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
7	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Belajar dan Ruang Penunjang Belajar Jenjang SMP	1. SMP NEGERI 5 CIMAHI 2. SMP NEGERI 7 CIMAHI	Dinas Pendidikan
8	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SMP	Kota Cimahi	Dinas Pendidikan
9	Revitalisasi TPS 3R	Kelurahan Melong	DLH
10	Pembangunan TPS 3R	Kelurahan Baros	Satker PLP Disperkim Jabar
11	Penataan TPS 3R	Keurahan Leuwigajah	DLH
12	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Tidak Permanen	Kota Cimahi	DLH
13	Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Permanen	Kota Cimahi	DLH
14	Pengadaan Troly sampah	Kota Cimahi	DLH
15	Pengadaan tempat sampah 1 m3	Kota Cimahi	DLH
16	Pengadaan Peralatan Bahan Penunjang Operasional Kebersihan di TPPAS dan TPS	Kota Cimahi	DLH

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
17	Kajian Kebutuhan petugas pengelola sampah dan petugas pelayanan sampah	Kota Cimahi	DLH
18	Pengadaan Kompos, Peralatan dan perlengkapan Pengomposan serta dan Daur Ulang	Kota Cimahi	DLH
19	Pengadaan Motor Roda 3 Sampah	Kota Cimahi	DLH
20	Pengadaan Gerobak Dorong	Kota Cimahi	DLH
21	Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Lokasi PDU	Kota Cimahi	DLH
22	Pembangunan Pagar di Lokasi PDU	Kota Cimahi	DLH
23	Perkerasan Jalan di Lokasi PDU	Kota Cimahi	DLH
24	Pengadaan Peralatan dan Penunjang Bank Sampah	Kota Cimahi	DLH
25	Pengadaan Biodegester skala kawasan huni (portable)	RW. 01 Cibabat, RW. 18 Padasuka, RW. 19 Leuwigajah, RW. 16 Utama, RW. 04 Baros, RW. 01 Cibeber	DLH

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
26	Pengadaan Biodegester skala kawasan (tanam)	RW. 05 Citeureup dan RW. 31 Melong	
27	Pengadaan Dump Truck 6 m3	Kota Cimahi	DLH
28	Pengadaan Arm Roll 6 m3	Kota Cimahi	DLH
29	Pengadaan Container 6 m3	Kota Cimahi	DLH
30	Pengadaan Container 10 m3	Kota Cimahi	DLH
31	Pengadaan Pick Up Sampah	Kota Cimahi	DLH
32	Pelatihan Petugas Operator unit pengelolaan sampah organik dan TPS 3R	Kota Cimahi	DLH
33	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Pemilahan	Kota Cimahi	DLH
34	Pengadaan Mesin Pencacah	Kota Cimahi	DLH
35	Pemeliharaan Gedung TPS, TPST dan Pengelolaan Persampahan	TPS Pasar atas, TPS Cibeber, TPS 3R Leuwigoong, TPS Pasar Baros	
36	Pengadaan sarana home composting (takakura)	Kota Cimahi	DLH
37	Peningkatan Kapasitas Patroli Kebersihan	Kota Cimahi	DLH

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
38	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Bank Sampah	Kota Cimahi	DLH
39	Pengadaan Tas Belanja Pengganti Kantong Plastik	Kota Cimahi	DLH
40	Bimbingan Teknis Bagi Operator Pengelolaan Limbah B3	Kota Cimahi	DLH
41	Pengadaan tempat sampah an Organik	Kota Cimahi	DLH
42	Peringatan HPSN Tingkat Kota Cimahi	Kota Cimahi	DLH
43	Pengadaan Sarana Penunjang Adiwiyata/SBL/Ecoschool / rw Hijau	Kota Cimahi	DLH
44	Pembinaan dan Penilaian SBL Tingkat Kota	Kota Cimahi	DLH
45	Mall Pelayanan Publik (MPP)	Kota Cimahi	DPMPTSP

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, dan DPKP Kota Cimahi 2019

Tabel-53. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Progres Pengaduan
1	LSM KOMPAS (surat nomor 7.001/Lapdu/LSMKOMPAS	Dugaan adanya pencemaran udara yang dilakukan oleh PT. Antelas jl. Industri I no. 88 Kota Cimahi dan PT. Dwimulya Tatatunggal jln Industri II No 21 Kota Cimahi	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
2	Forum Peduli Rakyat Kota Cimahi	Dugaan adanya pelanggaran lingkungan hidup dan perizinan terhadap PT Mewah Niagajaya	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
3	Forum Pasundan Bergerak dari tanah sunda untuk Indonesia	- Dugaaan pencemaran air akibat pembuangan limbah ke sungai pada pukul 01.00 (melintasi Sungai Cimindi, Cibaligo dan Melong) - Diduga Pencemaran lingkungan di kelurahan Melong dan Utama	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Progres Pengaduan
4	Kelurahan Cibeureum, Kec Cimahi Selatan No. Surat 005/16/SPL/2019 tgl surat 7 Des 2019	Diduga pencemaran udara akibat pembakaran Sampah di wilayah RW 27 Kelurahan Cibeureum	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
5	Surat dari kelurahan Melong nomor 300/93/sekr , tanggal 5 april 2019	PT Dewasutratex2 , diduga pondasi, dinding beton pembatasnya retak dan bercelah dan dikhawatirkan dinding beton tersebut jebol sehingga akan menggenangi rumah warga RW 02 kelurahan Melong	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
6	Warga RT 05/RW 04 Jl. Sukajaya (pengaduan melalui situs website melapor ke pemerintah Kota Cimahi)	Diduga ada Pembakaran arang Didaerah Sukajaya RT 05/ RW 04 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi utara Kota Cimahi	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Progres Pengaduan
7	Warga RT07 /03 Nusa Cisangkan Permai Kel. Padasuka Cimahi Tengah Kota Cimahi (Pengaduan melalui Website)	- Diduga ada hewan ternak di lokasi komplek nusa cisangkan permai RT 07/03 - Warga mengeluh merasa terganggu dengan bau hewan ternak dan menyebabkan adanya lalat	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
8	Asti, Jl. Melong Blok Sukarintih No. 93 RW 5 Kel. Melong (Rumah Belakang Alfamart RS. Avisena)	- Diduga ada pembakaran rerumputan dan sampah	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
9	Video Doc. FPRB Kota Cimahi	Diduga pencemaran udara dari Uap mesin Dyeing PT Trisulatex Jl. Mahar Martanegara No 170 Kota Cimahi	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
10	Via DiskomimfoKota Cimahi	Diduga pencemaran udara dari pembakaran sampah di daerah sekitar komplek pondok baru Cipageran RT05 RW15 Cipageran Cimahi	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
11	Via Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup Cimahi	Pelaporan warga mengenai pohon di pemakaman umum yang sudah rapuh	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Progres Pengaduan
12	Via Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup Cimahi	Pelaporan warga mengenai potensi pohon tumbang di daerah Cimahi Utara	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti
13	Via Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup Cimahi	Pelaporan mengenai pengangkutan sampah di sekolah Dharma Kartini Kota Cimahi	Telah diverifikasi dan ditindaklanjuti

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-54. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
1	APPLI Kota Cimahi	N/A	Jln Bomber I V No 14 RT 05/ RW 29 Kel. Melong Cimahi Selatan
2	Badan Advokasi Lingkungan Cimahi	N/A	Kp. Leuweung Gede RT 01/11 Kelurahan Cibeureum
3	Forum DAS dan Lingkungan TELDUP	N/A	Jln. Perumnas Blok 6 Gang Pepaya No 88 RT 05/RW 13
4	Forum Dinamika Masyarakat Peduli Kota Cimahi	N/A	Kp. Babakan Utama RT 02 RW 01 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
5	Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Kota Cimahi	N/A	Jl. Budi RT 01 RW12 Kel. Pasir Kalilki Kec. Cimahi Utara
6	FPL Kelurahan Karang Mekar	N/A	Jl. H. Tajudin No. 134 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
7	Forum Peduli Rakyat (FPRC) Kota Cimahi	N/A	Jl. Melong No.8 RT 03 RW 02 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
8	Forum Pemberdayaan Masyarakat (FPM) Kel. Utama	N/A	Jl. Mahar Martanegara RT 04 RW 07 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
9	GEMMILANG	N/A	Jl. Melong Tengah
10	Gerakan Asri Lingkungan Kota Cimahi	N/A	Komplek Perumnas Cijerah 2 Gg. Tanjung RT 02 RW 19 Kel. Melong Kec. Cimahi Selatan
11	Gerakan Masyarakat Pepapi Cimahi (Gempe)	N/A	Jl. Joyo Dikromo No. 104 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan
12	Kelompok Karya Wahana Kota Cimahi (KKWKC)	N/A	Jl. Sangkuriang Barat II Belakang No, 169 RT 04 RW 07 Kel. Cipageran
13	Kelompok Lingkungan Alam	N/A	Jl. Mekarsari RT 04 RW 07 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah
14	KMPL Kel. Citeureup	N/A	Jl. Encep Kartawiria No. 140 RT 04 RW 02 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara

No.	Nama LSM	Akta Pendirian	Alamat
15	KMPL Kel. Leuwigajah	N/A	Jl. Sadarmanah No.11 RT 01 RW 05 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan
16	KMPL Kel. Citeureup	N/A	Jl. Kamarung No. 09 RT 03 RW 04 Kel. Citeureup Kec. Cimahi Utara
17	Konsorsium Peduli Masyarakat Kel. Leuwigajah	N/A	Jl. Kihapit Timur No.11 01/06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan
18	LSM Cimahi Alami Kota Cimahi	N/A	Jln. Boling Utara No 21 Melong Green Garden Kel. Melong
19	LSM Pecinta Alam Jaya Lestari	N/A	Komplek KCVRI Blok A No. 13-14 Kel. Cipageran Kec. Cimahi Tengah
20	Relawan Peduli Lingkungan Kel. Leuwigajah	N/A	Jl. Cibogo RT 04/06 Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan

Keterangan : Huruf (N/A) menunjukkan tidak ada pendataan
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-55. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	0	0	0
2.	Master (S2)	9	1	10
3.	Sarjana (S1)	14	15	29
4.	Diploma (D3/D4)	2	3	5
5.	SLTA	23	0	23
6.	SMP/SD	25	1	26
	Jumlah	**73**	**20**	**93**

Keterangan :
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-56. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf yang sudah diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	PPLH	1	1	2	2
2.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS LH	2	0	2	0
3.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS	0	0	0	0
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Pranata Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat staf yang dimaksud
2. PPLH dan Pranata Laboratorium Lingkungan belum diangkat oleh Walikota sebagai jabatan fungsional

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-57. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	SMPN 8 Kota Cimahi	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
2	SMAN 5 Cimahi	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
3	PT. Ajutex	Proper Biru	KLHK	2019
4	PT Fuji Palapa Textiles Industries	Proper Biru	KLHK	2019
5	PT. GUNA MITRA PRIMA	Proper Biru	KLHK	2019
6	PT Oriental Embriodery	Proper Biru	KLHK	2019
7	PT Sanbe Farma	Proper Biru	KLHK	2019
8	PT. Best Jeans Indo Citranusa	Proper Biru	KLHK	2019
9	PT Margajaya	Proper Biru	KLHK	2019
10	PT. Hegar Mulya	Proper Biru	KLHK	2019
11	Fasilamindo Utama, PT	Proper Biru	KLHK	2019
12	PT. Sinar Continental	Proper Biru	KLHK	2019

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
13	PT. Ayoe Indotama Tektile	Proper Biru	KLHK	2019

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-58. Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
1	PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA	DISKOMINFOARPUS	MASYARAKAT USIA ANAK (SD KEBAWAH)	12 BULAN
2	PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	DISKOMINFOARPUS	PELATIHAN TIK MASYARAKAT (RW)	1 BULAN
3	Penyuluhan dan Pendampingan Petani & Pelaku Agribisnis	Dispangtan	Kelompok Tani	Jan - Des
4	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dispangtan	Kelompok Tani	Jan - Des

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
5	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Dispangtan	Kelompok Peternak	Jan - Des
6	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Dispangtan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Jan - Des
7	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Dispangtan	Kelompok Pembudidaya Ikan	Jan - Des
8	Edukasi MILAMPAH dan BANK SAMPAH	Yayasan Go Green Cimahi	Kelompok Masyarakat di Wilayah Kota Cimahi	Januari 2019
9	Gerakan Pungut sampah War of Waste	DLH dan Ikatan Alumni SMAN 2 Cimahi	Masyarakat di sekitar Alun-alun Kota Cimahi dan Sepanjang Jalan Amir mahmud Kota Cimahi	Januari 2019
10	Bakti Sosial pada Milennial Road Safety Festival	POLRES Cimahi	Masyarakat Kota Cimahi	Februari 2019

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
11	Bebersih Petak dan Jalur Rel dari Stasiun Cimindi hingga Stasiun Cimahi	Komunitas Edan Sepur Indonesia	Stasiun Cimindi hingga stasiun Cimahi	Februari 2019
12	Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional	DLH dan Komunitas di Kota Cimahi	Gerakan Pungut sampah secara masal di seluruh wilayah kota cimahi, Kegiatan Rampok Plastik di Car Free Day	Februari 2019 - Maret 2019
13	KAPELESET (Kampung Pengolahan Limbah dan Sampah Plastik Terpadu)	BERSSERI Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi	kelompok Masyarakat	Maret 2019
14	Vocational High School Healty Work, Creative and Activity	PMR SMK Bhakti Kencana Cimahi	SMP/MTS Sederajat dan SMA/SMK/MA Sederajat Se Jawa Barat	Maret 2019
15	Peduli Akan Lingkungan	MAPALA Wiragana STIA Cimahi	Pelajar SMA se Kota Cimahi	April 2019

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
16	Training of Trainer GPS	Ikatan Alumni SMAN 2 Cimahi	Ikatan Alumni se Kota Cimahi dan Duta Kebersihan SMA se Kota Cimahi	April 2019
17	Penanaman Pohon dan Pungut Sampah	STIA Cimahi	Mahasiswa STIA dan SMA Sederajat se Kota Cimahi	April 2019
18	Sosialisasi Pemanfaatan Sampah Plastik	POLRES Cimahi	Bhayangkari Cabang Cimahi	Mei 2019
19	Sosialisasi Pengelolaan sampah	Yayasan santo Dominukus Cimahi	Kepala Sekolah dan Guru Yayasan Santo Dominikus	Mei 2019
20	Zero Waste Academy	YPBB, GAIA, dan USAID	Perwakilan Komunitas, Lembaga dan DLH di Indonesia	Juni 2019 - Juli 2019
21	Edukasi STBM tentang Pengelolaan Sampah	DLH dan DINKES Kota Cimahi	Siswa SMP se Kota Cimahi	Juli 2019

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
22	Naik SAKOCI tukar Sampah	Komunitas Bank Sampah Kota Cimahi	Masyarakat Kota Cimahi	Juli 2019
23	Eco School Yayasan Asih Putera	Yayasan Asih Putera	Siswa dan Guru Yayasan Asih Putera	Agustus 2019
24	peningkatan Kapasitas Bank sampah Induk dan Bank Sampah Unit	salam Institute	Bank SAMICI dan Bank sampah Unit di Kota Cimahi	September 2019
25	Program Pembelajaran EBTKE dan Lingkungan	Yayasan Asih Putera dan Fakultas Teknik Industri ITB	Siswa MA Asih Putera	September 2019
26	Simulasi Sekolah Sungai problem Sampah	UNJANI	Mahasiswa UNJANI	November 2019
27	Sosialisasi perngelolaan Sampah Supermarket	TOSERBA YOGYA Cimahi	Karyawan YOGYA Cimahi	November 2019
28	Dialog tentang Pemerintah Kota Cimahi Menuju Zero Waste Cities	Laskar Merah Putih	Anggota LPM Laskar merah Putih dan Masyarakat Sekitar	November 2019
29	Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan	PASISTRI Kota Cimahi	Anggota PASISTRI Kota Cimahi	November 2019

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
30	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Politeknik Kesehatan Bandung Jurusan Kesehatan Lingkungan	Dosen, Mahasiswa dan Cleaning Servise POLTEKES Bandung Jurusan kesehatan Lingkungan	November 2019
31	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	PKK Kota Cimahi	Kader PKK se Kota Cimahi	Desember 2019
32	Sosialosai Pengelolaan sampah	kelurahan Baros	Warga Masyarakat Padasuka	Desember 2019
33	Pelaksanaan Door to Door Education (Program Zero Waste)	YPBB	RW di wilayah Kota Cimahi	Sepanjang Tahun 2019
34	Pelatihan Unit 3R	Tim 3R	Kelompok Daur Ulang sampah di masyarakat dan sekolah	Sepanjang Tahun 2019
35	Sosialisasi Pengomposan	Tim Kompos DLH	Kelompok masyarakat, instansi dan sekolah yang memerlukan pelatihan dan sosialisasi	Sepanjang Tahun 2019
36	Sosialisasi Daur Ulang Sampah	Tim Daur Ulang DLH	Kelompok masyarakat, instansi dan sekolah	Sepanjang Tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
			yang memerlukan pelatihan dan sosialisasi	
37	Sosialisasi Bank Sampah	Tim Bank Sampah DLH	Kelompok masyarakat, instansi dan sekolah yang memerlukan pelatihan dan sosialisasi	Sepanjang Tahun 2019
38	Sosialisasi Persampahan	Tim PATIH	Kelompok masyarakat, instansi dan sekolah yang memerlukan pelatihan dan sosialisasi	Sepanjang Tahun 2019
39	Pasar wisata legok awi	Disbudparpora	Masyarakat di sekitar wilayah legok awi	September 2019- sampai sekarang tetap berlangsung setiap hari minggu

Keterangan : -
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2019

Tabel-59. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	URAIAN	2017	2018	2019
1	Pertanian	58.533,77	60.598,60	65.074,72
	a. Pertanian Sempit	N/A	N/A	N/A
	- Tanaman Bahan Makanan	N/A	N/A	N/A
	- Tanaman Perkebunan	N/A	N/A	N/A
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	N/A	N/A	N/A
	b. Kehutanan	-	-	-
	c. Perikanan	N/A	N/A	N/A
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	12.199.201,27	13.639.673,79	15.408.257,69
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	100.728,54	114.460,11	124.012,77
5	Bangunan	3.366.031,43	3.777.636,39	4.086.435,17
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4.571.454,73	4.838.006,48	5.170.267,33
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.729.641,80	2.967.590,45	3.211.693,41

No	URAIAN	2017	2018	2019
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.080.998,99	1.184.700,02	1.248.748,25
9	Jasa-Jasa	2.473.485,02	2.657.367,18	2.911.534,10
PRODUK DOMESTIK BRUTO				
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		20.019.177,05	29.240.033,02	32.226.023,44

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak terdapat peruntukkan kehutanan dan pertambangan di Kota Cimahi
2. Huruf (N/A) menunjukkan tidak tersedia data
3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015-2019

Sumber: BPS Kota Cimahi, 2019

Tabel-60. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	URAIAN	2017	2018	2019
1	Pertanian	32.632,75	32.808,16	33.588,51
	a. Pertanian Sempit	N/A	N/A	N/A
	- Tanaman Bahan Makanan	N/A	N/A	N/A
	- Tanaman Perkebunan	N/A	N/A	N/A
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya	N/A	N/A	N/A
	b. Kehutanan	-	-	-
	c. Perikanan	N/A	N/A	N/A
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
3	Industri Pengolahan	8.983.519,08	9.675.440,07	10.584.561,09
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	63.447,95	67.014,50	67.507,62
5	Bangunan	2.601.749,62	2.786.348,33	2.913.314,19
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.490.134,21	3.591.571,48	3.722.031,13
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.303.562,91	2.481.018,25	2.652.387,61
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	796.067,47	855.197,09	888.221,22
9	Jasa-Jasa	1.636.016,30	1.703.205,96	1.780.217,90
PRODUK DOMESTIK BRUTO		16.572.903,31	21.192.603,84	22.641.829,27

No	URAIAN	2017	2018	2019
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		16.572.903,31	21.192.603,84	22.641.829,27

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak terdapat peruntukkan kehutanan dan pertambangan di Kota Cimahi
2. Huruf (N/A) menunjukkan tidak tersedia data
3. Produk Domestik Regional Bruto Kota Cimahi Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2015-2019

Sumber: BPS Kota Cimahi, 2019

Tabel-61. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
1	Peraturan Daerah	0	Nomor 2 Tahun 2019, 23 April 2019	Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum
2	Peraturan Daerah	0	Nomor 6 Tahun 2019, 23 April 2019	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah
3	Peraturan Daerah	0	Nomor 7 Tahun 2019, 25 Juni 2019	Pasar Pemerintah
4	Peraturan Daerah	0	Nomor 9 Tahun 2019, 28 Juni 2019	Pendaftaran Usaha Pariwisata
5	Peraturan Daerah	0	Nomor 10 Tahun 2019, 28 Juni 2019	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
6	Peraturan Daerah	0	Nomor 11 Tahun 2019, 28 Juni 2019	Perubahan Katiga Atas Perda Kota Cimahi nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
7	Peraturan Daerah	0	Nomor 55 Tahun 2019, 6 November 2019	Retribusi Lab. Lingkungan

Keterangan:

1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat produk hukum yang dimaksud

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, 2019

Tabel-62. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
1	APBD	Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura	-	79,200,000
2	APBD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	-	650,597,200
3	APBD	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	-	50,190,000
4	APBD	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	-	104,047,040
5	APBD	Pengembangan produksi ramah lingkungan	-	51,267,800.0
6	APBD	Koordinasi penyusunan AMDAL	411,834,000	470,999,400
7	APBD	Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup	-	182,743,240
8	APBD	PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN	778,845,500	531,178,000
9	APBD	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	-	983,754,200
10	APBD	PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	-	174,838,400

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
11	APBD	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	-	1,151,433,420
12	APBD	PENINGKATAN KINERJA DAUR ULANG SAMPAH ORGANIK	-	1,581,800,400
13	APBD	PENINGKATAN KINERJA DAUR ULANG SAMPAH NON ORGANIK	-	210,790,000
14	APBD	PEMANTAUAN KUALITAS UDARA	261,705,000	286,743,000
15	APBD	PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN	-	562,329,900
16	APBD	PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN LABORATORIUM	-	1,172,088,300
17	APBD	PELAYANAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7,268,573,640	10,263,934,500
18	APBD	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan	210,695,500	
19	APBD	KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	5,699,800,000
20	APBD	PENINGKATAN KINERJA PENGANGKUTAN SAMPAH TERPILAH	-	682,570,000
21	APBD	PENINGKATAN KINERJA PENGUMPULAN SAMPAH TERPILAH	-	5,782,889,000
22	APBD	Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truck	-	808,421,000

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
23	APBD	Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Revitalisasi TPS 3R	-	550,000,000
24	APBD	Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	-	1,370,000,000
25	APBD	PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	232,284,600
26	APBD	PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN	172,362,300	175,906,400
29	APBD	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	-	55,000,000
30	APBD	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, LISTRIK DAN AIR	-	122,515,000
31	APBD	PENYEDIAAN MEDIA MASSA, BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	-	113,010,000
32	APBD	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	-	6,450,500,000
33	APBD	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	-	126,450,449
34	APBD	PENYEDIAAN GUDANG KANTOR	-	50,000,000
35	APBD	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	-	10,762,000

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
36	APBD	PENATAAN ARSIP DAERAH	-	65,513,800
37	APBD	PENYEDIAAN JASA JAMINAN KESEHATAN DAN KETENAGAKERJAAN	-	335,844,000
38	APBD	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	-	49,610,000
39	APBD	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDINASAN	-	200,000,000
40	APBD	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	-	15,000,000
41	APBD	PEMELIHARAAN RUMAH DAN GEDUNG DINAS	-	86,142,200
42	APBD	PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARIS BARANG	-	7,353,000
43	APBD	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	-	17,559,800
44	APBD	PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA PD	-	76,315,000
45	APBD	PENYUSUNAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSAAN KEGIATAN, LKIP DAN LPPD PD	-	21,264,000
46	APBD	PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBERDAYA PEGAWAI	-	506,036,000
47	APBD	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	1,304,237,990
48	APBD	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	-	49,466,762,968
49	APBD	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	-	137,134,625
50	APBD	Peningkatan Surveilance Epidemiologi Penanggulangan Wabah	-	152,657,000

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
51	APBD	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	-	9,055,348,516
52	APBD	Pemeliharaan Dekorasi Kota	-	933,145,000
53	APBD	Pembangunan Dekorasi Kota Baru	-	3,379,430,950
54	APBD	Pemeliharaan Taman	2,876,523,600	3,180,379,537
55	APBD	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	1,228,660,000	586,454,000.0
56	APBD	Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	8,157,720,076	12,801,456,635
57	APBD	Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	1,724,851,429	1,663,147,872
58	APBD	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	2,891,208,600	4,382,016,600
59	APBD	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	638,364,000	-
60	APBD	Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	5,270,347,600	-
61	APBD	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana air limbah	1,010,407,800	-
64	APBD	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Air Bersih / Air Minum	1,358,432,000	-
65	APBD	Promosi Air Bersih	25,000,000	-

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
66	APBD	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	681,871,000	645,250,000
67	APBD	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	9,415,980,311	8,419,974,776
68	APBD	Pengelolaan Pelayanan Air Bersih	1,760,250,000	1,898,390,528
69	APBD	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	-	1,772,930,000
70	APBD	Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	-	4,373,732,578
71	APBD	Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	294,172,200
72	APBD	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	-	7,876,561,000
73	APBD	Pengelolaan Rusunawa	-	3,217,173,200
74	APBD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	-	3,118,088,092
75	APBD	Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan	-	94,606,000
76	APBD	Pengelolaan Pemakaman	-	556,124,920
77	APBD	Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan	-	291,225,200

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
78	APBD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	-	1,247,400,000
79	APBD	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	-	-
80	APBD	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	918,122,600	-
81	APBD	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	179,991,000	-
82	APBD	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	57,353,500	-
83	APBD	Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	316,422,000	-
84	APBD	Pengawasan pemanfaatan ruang	160,367,000	-
85	APBD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14,500,000	-
86	APBD	Penyediaan makanan dan minuman	42,450,000	-
87	APBD	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	354,812,336	-
88	APBD	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas	52,800,000	-
89	APBD	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	96,800,000	-

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
90	APBD	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6,500,160,000	-
91	APBD	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	394,500,000	-
92	APBD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,171,482,500	-
93	APBD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,881,000	-
94	APBD	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,650,000	-
95	APBD	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19,500,000	-
96	APBD	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan	4,619,262,000	-
97	APBD	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7,919,000	-
98	APBD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9,783,000	-
99	APBD	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,700,000	-
100	APBD	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	221,715,300	-
101	APBD	Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air	813,355,000	-
102	APBD	Pembinaan Pegawai	239,114,000	-
103	APBD	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	810,596,000	-
104	APBD	Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih	120,000,000	-
105	APBD	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	402,425,000	-

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
106	APBD	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	418,845,000	-
107	APBD	Pembangunan Sarana dan Prasarana Persampahan	356,603,000	-
108	APBD	Pengawasan pemanfaatan ruang	780,618,000	-
109	APBD	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	233,487,000	-
110	APBD	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	313,830,500	-
111	APBD	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2,339,516,000	-
112	APBD	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	141,000,000	-
113	APBD	Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan	1,862,961,600	-
114	APBD	Bimbingan teknis persampahan	302,792,500	-
115	APBD	Kerjasama pengelolaan persampahan	5,085,827,000	-
116	APBD	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	205,326,000	-
117	APBD	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	190,388,900	-
118	APBD	Pemantauan Kualitas Lingkungan	495,965,912	-
119	APBD	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	406,975,000	-
120	APBD	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	110,218,300	-

No	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran (Kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya 2018 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan 2019 (Rp)
121	APBD	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	156,534,400	-
122	APBD	Pengembangan produksi ramah lingkungan	56,813,000	-
123	APBD	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	316,665,000	-
124	APBD	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Laboratorium	1,506,410,700	-
Jumlah			**89,153,134,304**	**197,375,882,434**

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak terdapat anggaran untuk kegiatan yang dimaksud

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-63. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
1	Pajak	163.136.977.065,00
2	Retribusi	15.856.315.921,00
3	Laba BUMD	9.297.600.000,00
4	Pendapatan Lainnya Yang Sah	191.372.612.413,15
	Jumlah	**379.663.505.399,15**

Keterangan: -
Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-64. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
1	Kota Cimahi	SISTEM INOVASI DAERAH	Sistem Inovasi Daerah (SID) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk menampung gagasan, ide ataupun harapan yang akan di wujudkan di masa depan dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan sebagai suatu "sistem" dengan melibatkan berbagai aktor terkait dan tidak dilaksanakan sebagai parsial, Pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam dokumen SID diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan jadwal Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Digital Dalam Mendukung Program Go	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah Peraturan Wali Kota Cimahi No. 53 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah Kota Cimahi - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Mengenai Satu Data Indonesia - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			Green Office telah diterapkan dibeberapa sistem informasi di Kota Cimahi seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP. Ide dari penerapan tanda tangan digital adalah untuk menciptakan perkantoran yang paperless dengan membubuhkan tandatangan digital pada suatu output sistem (file dokumen) sebagai keabsahan dokumen sehingga tidak perlu dilakukan tanda tangan manual pada kertas yang dicetak. Sebagai Walidata Kota Cimahi, Bidang yang mengurus statistik pada Diskominfoarpus Kota Cimahi wajib menyusun dan menyajikan data statistik daerah yang merupakan kumpulan data-data dari setiap perangkat daerah di Kota Cimahi. Data Statisik Daerah ini sangat penting dalam memberikan dukungan data dalam mengambil keputusan di setiap aktivitas pembangunan daerah seperti perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta	Surat Perintah Kepala Dinas

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			monitoing dan evaluasi. Oleh karena itu guna mempermudah dalam pengumpulan data yang lebih update, maka dikembangkan aplikasi open data sebagai sarana untuk menyediakan informasi sekaligus untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi. MENINGKATKAN MINAT BACA ANAK DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI ANAK DENGAN METODE MEMBACA BUKU/BAHAN BACAAN KEMUDIAN MEMBUAT REVIEW HASIL BACAANNYA. SELANJUTNYA GURU SEBAGAI FASILITATOR MEMVERIFIKASI HASIL REVIEW ANAK DENGAN MEMBERIKAN PARAF DAN CAP DALAM BUKU HISTORI BACA SETIAP ANAK DIDIKNYA. UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI, SETIAP ANAK YANG TELAH MEMBACA SEJUMLAH BUKU AKAN DIBERI GIMMICK/HADIAH PER LEVEL PENCAPAIAN MEMBACA TERSEBUT.	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
2	Kota Cimahi	PENERAPAN TANDATANGAN DIGITAL	Lomba IT Kreatif adalah sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan ide/gagasan dan solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat dengan membangun suatu aplikasi atau software. Pada tahun 2019 kategori yang dilombakan adalah mobile apps dan motion graphic. Dengan adanya lomba ini, Pemerintah Kota Cimahi diberikan banyak keuntungan yang diantaranya adalah mendapatkan ide solusi dari suatu permasalahan yang ada di masyarakat dan mendapatkan source code aplikasi dalam membantu pengembangan sistem pelayanan publik Sistem Inovasi Daerah (SID) adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk menampung gagasan, ide ataupun harapan yang akan di wujudkan di masa depan dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan	SK TIM Kepala Dinas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			Pemerintahan Daerah. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan sebagai suatu "sistem" dengan melibatkan berbagai aktor terkait dan tidak dilaksanakan sebagai parsial, Pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam dokumen SID diharapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan jadwal	
3	Kota Cimahi	APLIKASI OPEN DATA STATISTIK	Penggunaan Sertifikat Elektronik Untuk Tanda Tangan Digital Dalam Mendukung Program Go Green Office telah diterapkan dibeberapa sistem informasi di Kota Cimahi seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DPMPTSP. Ide dari penerapan tanda tangan digital adalah untuk menciptakan perkantoran yang paperless dengan membubuhkan tandatangan digital pada suatu output sistem (file dokumen) sebagai keabsahan dokumen sehingga tidak perlu dilakukan tanda tangan manual pada kertas yang dicetak.	Peraturan Wali Kota Cimahi No. 53 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah Kota Cimahi

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
4	Kota Cimahi	CIMAHI READING HABIT	Sebagai Walidata Kota Cimahi, Bidang yang mengurus statistik pada Diskominfoarpus Kota Cimahi wajib menyusun dan menyajikan data statistik daerah yang merupakan kumpulan data-data dari setiap perangkat daerah di Kota Cimahi. Data Statisik Daerah ini sangat penting dalam memberikan dukungan data dalam mengambil keputusan di setiap aktivitas pembangunan daerah seperti perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta monitoing dan evaluasi. Oleh karena itu guna mempermudah dalam pengumpulan data yang lebih update, maka dikembangkan aplikasi open data sebagai sarana untuk menyediakan informasi sekaligus untuk meminimalisir terjadinya sengketa informasi.	- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Mengenai Satu Data Indonesia - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5	Kota Cimahi	LOMBA IT KREATIF	MENINGKATKAN MINAT BACA ANAK DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN LITERASI ANAK DENGAN METODE MEMBACA BUKU/BAHAN BACAAN KEMUDIAN MEMBUAT	Surat Perintah Kepala Dinas

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			REVIEW HASIL BACAANNYA. SELANJUTNYA GURU SEBAGAI FASILITATOR MEMVERIFIKASI HASIL REVIEW ANAK DENGAN MEMBERIKAN PARAF DAN CAP DALAM BUKU HISTORI BACA SETIAP ANAK DIDIKNYA. UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI, SETIAP ANAK YANG TELAH MEMBACA SEJUMLAH BUKU AKAN DIBERI GIMMICK/HADIAH PER LEVEL PENCAPAIAN MEMBACA TERSEBUT.	
6	Kota Cimahi	Konservasi Durian Lokal Kota Cimahi (Nama Varietas KAMAJAYA)	- Konservasi Durian Lokal yang hanya tersisa 1 pohon maka dilakukan perbanyakan tanaman dengan teknik okulasi - Untuk menjamin keaslian varietas durian kamarung maka dilakukan pendaftaran varietas lokal dengan nama varietas "KAMAJAYA"	Tanda Daftar Varietas Tanaman Varietas Lokal Nomor : 1050/PVL/2019 Tanggal 22 Maret 2019 dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian pada Kementerian Pertanian
7	Kota Cimahi	Program KTT (Kumpul Tukar	Bank Sampah Induk Kota Cimahi bekerjasama dengan Twin Tulipware yang berada di Kota	Perda Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
		Tebus) di Bank Sampah	Cimahi dalam program KTT ini. Program ini adalah salah satu cara untuk melakukan pengelolaan sampah an organik yang banyak dihasilkan di masyarakat. untuk mengikuti program ini, masyarakat harus menjadi nasabah Bank Sampah terlebih dahulu. Masyarakat mengumpulkan sampah an organik dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan untuk mendapatkan poin, kemudian poin tersebut dapat ditukarkan untuk menebus barang yang tercantum didalam program antara lain Tumbler, Kotak makan, dll dengan harga subsidi (diskon 50%). Program ini telah berjalan selama 6 periode, sejak pertengahan tahun 2018. 1 Periode berlangsung selama 3 bulan. Masing-masing periode memiliki ketentuan dan jenis barang yang berbeda-beda. Manfaat dari program ini adalah masyarakat menjadi lebih perduli terhadap sampah an organik yang	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			dihasilkan, karena sampah tersebut memiliki nilai ekonomis. Selain itu barang yang terdapat dalam program KTT ini juga jadi membiasakan masyarakat untuk menggunakan tempat minum dan tempat makan sendiri dari rumah. Pada periode 1 KTT, ada 4 jenis sampah yang bisa dikumpulkan yaitu bekas Kemasan Kopi, Kresek, Botol Mineral (PET) dan Minuman Cup. Dari Periode 1 berhasil dikumpulkan sampah sebanyak 165,3 kg sampah atau sebanyak 55.780 pcs sampah. Di Periode 2 KTT, jenis sampah yang bisa dikumpulkan menjadi bertambah menjadi 5 jenis sampah, ditambah dengan bekas sedotan. dari periode 2 berhasil dikumpulkan sampah sebanyak 447,14 kg atau sebanyak 117.335 pcs sampah. KTT Periode 3 masih dengan jenis sampah yang sama dengan KTT 2, berhasil dikumpulkan sampah sebanyak 499,81 kg	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			atau sebanyak 140.772 pcs sampah. KTT Periode 4, jenis sampah yang dikumpulkan ada 7 jenis, ditambah dengan kemasan minyak goreng dan kemasan produk unilever (bekerjasama dengan unilever). Dari KTT periode 4 sampah yang dikumpulkan sebanyak 314,09 kg atau sebanyak 62.750 pcs. KTT periode 5 masih dengan 7 jenis sampah berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 329,3 kg atau sebanyak 91.420 pcs sampah, dan pada periode 6 KTT sampah yang dikumpulkan sebanyak 338,79 kg atau sebanyak 87.510 pcs sampah. Dari KTT Periode 3 ke KTT periode 4 dan seterusnya dapat dilihat bahwa jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan jumlahnya menurun, hal tersebut dikarenakan berkurangnya jumlah sampah jenis PET, minuman cup dan kresek, yang dipengaruhi oleh kebiasaan membawa tempat minum dan kantong belanja sendiri.	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
8	Kota Cimahi	Program HO- HA (Hari Organik dan Hari An-Organik)	program ini merupakan program yang dilakukan di masyarakat dalam penjadwalan pengangkutan sampah. Sesuai dengan amanat perda pengelolaan sampah, bahwa sampah yang dihasilkan disumber sampah harus dipilah sejak dari sumber sampah, sehingga mencegah terjadinya tercampur kembali sampah dan pemberian edukasi kepada masyarakat agar mau memilah, maka ditetapkan hari pengangkutan khusus sampah organik dan sampah an-organik secara terpisah, sebagai contoh di RW. 07 Pasirkaliki ditetapkan hari pengangkutan sampah organik adalah pada hari Kamis dan hari sampah an-organik adalah hari minggu.	Perda Pengelolaan Sampah Kota Cimahi
9	Kota Cimahi	GPS (Gerakan Pungut Sampah)	Kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS) ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh sekelompok komunitas, yang merupakan gabungan Ikatan Alumni (IKA) setingkat SMA di Kota Cimahi, antara lain, IKA SMAN 1	Perda Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			CIMAHI, IKA SMAN 2 CIMAHI, IKA SMAN 3 CIMAHI, IKA SMAN 4 CIMAHI, IKA SMAN 5 CIMAHI, IKA SMKS PUSDIKHUBAD, IKA TUT WURI HANDAYANI. Pada awalnya kegiatan ini dilakukan di lokasi Alun-alun Kota Cimahi dan sepuratan Jl. Jend. Amir Mahmud, akan tetapi melihat lokasi lapangan Brigif yang setiap minggu dijadikan ajang kumpul masyarakat melakukan aktifitas seperti olahraga dan niaga dan jumlah pengunjung yang sangat banyak setiap minggunya, maka diputuskan untuk melakukan kegiatan GPS ini setiap 2 minggu sekali di Lokasi lapangan Brigif Kota Cimahi dan di Lokasi Taman Kartini yang setiap hari minggu ramai pengunjungnya. Saat ini kegiatan GPS melibatkan berbagai komunitas lingkungan dan pecinta alam dan juga dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, bakhan ada juga keterlibatan dari luar Kota Cimahi, dan masih menerima juga	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			relawan yang ingin bergabung dalam kegiatan ini. Target sasaran kegiatan ini adalah seluruh warga masyarakat yang berada di lokasi kegiatan. Kegiatan ini tidak hanya memunguti sampah yang berceceran di lokasi akan tetapi juga memberikan edukasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, seperti pemantaan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, melalui Bank Sampah, kreasi Daur Ulang Sampah, Ecobrick, Lubang Biopori, Tukar Sampah. Selain itu disediakan juga ruang edukasi anak.	
10	Kota Cimahi	Siswa bertumbler	Merupakan Program yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang dilkukan dengan cara memberikan sosialisasi surat edaran dan pemantauan secara langsung agar sekolah-sekolah yang ada di Kota Cimahi mengharuskan siswa dan warga sekolah membiasakan penggunaan tempat minum dan membawa kotak makan dan jajan sendiri dari rumah, sehingga dapat mengurangi kemasan minuman dan pembungkus makanan/jajanan disekolah. Pihak sekolah menyediakan air isi ulang di	Perda Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			kelas atau berkoordinasi dengan pihak kantin agar tidak lai menjual air minum kemasan tetapi menjual air minum isi ulang menggunakan galon. Siswa juga tetap diperbolekan jajan di lingkungan sekolah dengan catatan membawa sendiri kotak untuk makanan.	
11	KOTA CIMAHI	MERGER SEKOLAH DASAR	Dengan Keterbatasan lahan yang dimiliki disertai jumlah peserta didik yang terus bertambah dan tidak meratanya prasarana pendidikan dimiliki maka dilakukan merger untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Kota Cimahi. Merger dilakukan dengan menggabungkan beberapa SD sehingga hasil penggabungan SD dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan Pendidikan serta efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi.	1. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 2. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2016

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
12	RT 07 RW 02 Kelurahan Cimahi	Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan di Kota Cimahi	Kajian Pembentukan dan Pengembangan Sentra Industri Pengolahan di Kota Cimahi, merupakan hasil kerjasama Bidang Perindustrian Disdagkoperin Kota Cimahi dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) UNPAD dan bersinergi dengan Jurusan Teknik Kimia UNJANI dan POLBAN. Kajian tersebut berupaya mengidentifikasi IKM Kota Cimahi melalui analisis SWOT (Strengths,Weaknesses,Opportunities, & Threats) dan Bussiness Model Canvas (BMC) dalam rangka pembentukan dan pengembangan sentra industri pengolahan di Kota Cimahi, khususnya sentra IKM Tempe di Jalan Margaluyu RT 07 RW 02 Kelurahan Cimahi. Dari hasil kajian terungkap bahwasannya kondisi lingkungan di sekitar IKM tempe secara umum kondusif untuk keberlangsungan produksi tempe. ***Sementara itu, limbah dalam bentuk***	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. UU RI No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian 3. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 tentang RIPIN Tahun 2015-2035 4. Perpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 6. Perda Jabar No.08 Tahun 2018 tentang RPIP Jawa Barat Tahun 2018-2038 7. Perda Kota Cimahi No 02 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Cimahi 2017-2022

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			ampas atau kulit kedelai dimanfaatkan untuk pakan ternak, tetapi untuk air limbah masih langsung dibuang ke sungai Cimahi. Hasil identifikasi awal kondisi existing pengelolaan limbah IKM tempe tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah tempe (filterisasi) dan juga penelitian dan pengembangan pupuk cair dari limbah cair tempe oleh Jurusan Teknik Kimia UNJANI dan POLBAN. Disamping mengidentifikasi kondisi existing IKM Tempe, hasil analisis Kolaborasi SWOT-BMC dalam kajian tersebut juga memberikan arahan & rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan tahapan rencana program dan kegiatan pengembangan sentra IKM tempe yang mensinergikan semua potensi stakeholders yang ada (Academic,	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			Bussines, Community, & Government). Adapun tahapan yang dimaksud terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu ***tahap pertama pada tahun 2020 merupakan tahap Konsolidasi (strategi pertahanan & strategi stabilisasi)*** dengan kegiatannya berbentuk peresmian sentra IKM tempe oleh Bidang Perindustrian Disdagkoperin Kota Cimahi. Dengan peresmian sentra industri diharapkan terjadi ***spill over effect /eksternalitas positif baik di dalam dan di luar sentra industri serta sinergitas berbagai kegiatan dari stakeholders terkait seperti penjaminan ketersediaan bahan baku (rantai pasok) baik kuantitas maupun kualitas, investasi sarana dan prasarana, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan lain-lain akan lebih mudah dilakukan sehingga dengan demikian paradigma***	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, & pro environment akan lebih mudah di implementasikan. Tahapan Kedua pada tahun 2021-2022 merupakan tahap Perluasan (strategi diversifikasi dan strategi agresif) dengan rencana kegiatan berupa peningkatan daya saing melalui inovasi teknologi untuk menghasilkan produk-produk baru (diversifikasi produk), peningkatan skala produksi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan menjangkau pasar yang lebih luas, dan lain-lain.	
13	Pasar Atas Baru, Jalan Pasar Atas Kota Cimahi	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pasar Atas	Selama ini, instalasi pengelolaan limbah dan aktivitas merokok didalam pasar menimbulkan pencemaran udara didalam lingkungan Pasar Atas. Dengan dipasangnya exhaust fan pada instalasi pengelolaan limbah dan dilakukannya revitalisasi smoking area dapat mengurangi	1. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 2. PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.2

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			pencemaran udara didalam pasar sekaligus mendukung terwujudnya pasar bersih	Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar
14	Pasar Atas Baru, Jalan Pasar Atas Kota Cimahi	Sosialisasi Pengelolaan Pasar Rakyat	Peserta kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar Rakyat berasal dari 4 Pengelola Pasar dan perwakilan dari 4 pedagang Pasar yaitu Pedagang dari Pasar Atas Baru , Pedagang dari Pasar Cimindi , Pedagang dari Pasar Melong dan Pedagang dari Pasar Citeureup. Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Pasar Rakyat ini mengundang 3 (tiga) Narasumber yaitu : 1. Lik Gayantini Ari, S.E., MBA (Business Mentor School Business Of management – ITB), menyampaikan materi pentingnya Kolaborasi antara Pengelola Pasar dan Para pedagang dalam rangka membuat sebuah Pasar Rakyat menjadi ramai oleh pengunjung, selain itu beliau pun menyampaikan pentingnya sebuah kreatifitas dalam mengelola sebuah Pasar Rakyat 2. Raden Roro Lucyani (Ketua Tim Penggerak	1. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 2. PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 3. Peraturan Daerah Kota Cimahi No.2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			PKK Kota Cimahi), ***menyampaikan materi tentang Pentingnya Kebersihan di Pasar Rakyat. Beliau menyampaikan bahwa Konsumen sekarang sudah pintar mereka akan berbelanja ke sebuah Pasar Rakyat apabila Pasar tersebut dalam keadaan bersih dan aman*** 3. Mochamad Ronny (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), **menyampaikan materi tentang cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah , beliau menyampaikan bahwa sampah sebetulnya dapat bermanfaat apabila tahu Ilmunya tentang cara mengelola sampah** Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan (knowledge) sehingga dapat merubah pola pikir (mind set), kesadaran (awareness), dan perilaku (behaviour) para pengelola dan pedagang	

No.	Prov/Kota/Kec	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
			pasar dalam mewujudkan pasar rakyat yang bersih, aman, dan nyaman di Kota Cimahi.	
15	Kec Cimahi Utara	Pasar Wisata Legok Awi	Pemanfaatan kebun bambu yang cukup luas di daerah legok awi menjadi tempat wisata dengan tetap mempertahankan unsur tradisional setempa dan tidak merusak susunan bambu yang sudah ada	

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-65. Pelestarian Kearifan Lokal Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
1	Cimahi selatan	Menggunakan bahan pangan pengganti nasi	-	masyarakat melakukan kebiasaan menggunakan singkong dan tidak makan nasi dalam kehidupan sehari - hari.
2	Cimahi selatan	Kebiasaan tidak menggunakan alas kaki ketika beraktifitas di sekitar hutan larangan	-	masyarakat sekitar memiliki kebiasaan tidak menggunakan alas kaki ketika memasuki wilayah hutan larangan dengan alasan agar lebih berinteraksi dg alam, menyehatkan dan menjadi lebih dekat dengan Pencipta

No.	Kecamatan	Bentuk Kearifan Lokal	Nama Kearifan Lokal	Deskripsi
				laam semesta tanpa ada pembatasan

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Cimahi, 2019

LAMPIRAN III

TABEL TAMBAHAN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

Tabel-1a. Tabel Tambahan Rincian Kawasan Sempadan Sungai di Kota Cimahi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Sempadan	Luas (Ha)
1	Sungai Cimahi	11
2	Sungai Ciputri	2
3	Sungai Cibaligo	3
4	Sungai Cikendal	2
5	Sungai Cisangkan	7
6	Saluran Irigasi Bongkok	2
7	Saluran Irigasi Leuwitereup	2
8	Sungai Cibeureum	2
9	Sal. Pasirkaliki	1
10	Seluruh Embung	3

Keterangan: Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2016
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-3a. Tabel Tambahan SK Wali Kota Cimahi Tahun 2012 tentang Hutan Kota
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Lokasi	Luas (Ha)
1	Kawasan Blok Cimenteng	4,00
2	Kawasan Jl. Jend. H. Amir Machmud	0,864
3	Kawasan Jl. Baros	0,284
4	Kawasan Simpang Jl. Leuwigajah Nanjung	0,354
5	Kawasan Jl. Gandawijaya	0,080
6	Kawasan Jl. Sudirman	0,22

No.	Lokasi	Luas (Ha)
7	Kawasan Jl. Urip Sumihardjo	0,060
8	Kawasan Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	0,120
9	Kawasan Jl. Mahar Martanegara	0,156
10	Kawasan Jl. HMS Mintadiredja	0,280
11	Kawasan Citeureup	0,25
	Total	**6,668**

Keterangan: -
Sumber: SK Walikota Cimahi Tahun 2007 tentang Hutan Kota

Tabel-3b. Tabel Tambahan Rincian Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kota Cimahi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Lokasi	Luas (Ha)
1	Hutan Kota Publik dan privat lainnya	213,6
2	RW 18 Lebak Saat	0,48
3	Penambahan Taman Kehati	0,93
4	Peta Kawasan RTH dari PUPR (RTRW 2012-2022)	4,17
5	RW 8 Cibeber	0,9
6	RW 5 Citeureup PDU (Pusat Daur Ulang)	0,22
7	RW 12 Cipageran	0,86
8	RW 21 Cipageran	0,2
9	RW 21 Cipageran	0,43
10	RW 21 Cipageran	0,55
11	RW.15 Padasuka	0,098
12	Hutan Kota (SK 2007)	8,017
13	Hutan Kota (SK 2012)	6,668
	Total	**237,123**

Keterangan: Hanya terdapat hutan kota di Kota Cimahi
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019

Tabel-3c. Tabel Tambahan Rincian Kawasan Hutan Publik dan Privat di Kota Cimahi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Fungsi Hutan	Luas (m^2)
1	Kawasan RW 10 Kel Leuwigajah	50.000,00
2	Kawasan Sepanjang Jalan Tol Cipularang	188.000,00
3	Kawasan UNJANI	100.000,00
4	Kawasan Bukit Cirendeu	250.000,00
5	Kawasan Perkantoran TTUC	50.000,00
6	Kawasan Lap Brigif TNI AD	140.000,00
7	Gunung Bohong	500.000,00
8	Bukit Cibogo	822.000,00
9	Tikungan Ciawitali	4.000,00
10	P4TK	30.000,00
11	Hutan Perumahan Kota Mas	1.650,00
12	DPRD Kota Cimahi	350,00
13	Cimenteng	18.000,00
14	Hutan Kota SK 2012	66.680,00
	Total (m^2)	**2.220.680,00**
	Total (Ha)	**222,07**

Keterangan: Profil Keanekaragaman Hayati Tahun 2016
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-7a. Tabel Tambahan Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Waktu	Jenis Sampel	Jenis Tanah	Lokasi	Kedalaman (cm)	Parameter					
					Bobot Isi (g/cm^3)	Permeabilitas (cm/jam)		Porositas (%)		Kadar Air (%)
						Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	
30 Agustus 2019	Tanah (*Undisturb soil*)	Tanah Tegalan	Cileuweung Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	0.98	23	Cepat	63	Baik	44.92
		Tanah Tegalan	Pakuhaji Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	0.98	7.39	Agak Cepat	62.85	Baik	38.93
		Tanah Tegalan	Terobosan Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	1.01	14.32	Cepat	62.07	Baik	39.58
		Tanah Tegalan	Cimenteng 2 Utuh,	0-60 cm	1.13	23.64	Cepat	57.36	Baik	35.61

Waktu	Jenis Sampel	Jenis Tanah	Lokasi	Kedalaman (cm)	Parameter					
					Bobot Isi (g/cm^3)	Permeabilitas (cm/jam)		Porositas (%)		Kadar Air (%)
						Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	
			Kec. Cimahi Utara							
		Tanah Tegalan	Lebaksaat Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	1.19	27.02	Sangat Cepat	55.27	Baik	31.88
		Tanah Tegalan	Ciuyah Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	1.25	29.7	Sangat Cepat	52.88	Baik	23.02
		Tanah Tegalan	Warung Muncang Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	0.95	26.92	Sangat Cepat	64.25	Porous	40.5
		Tanah Tegalan	Permana Utuh, Kec.	0-60 cm	1.02	23.22	Cepat	61.53	Porous	49.26

Waktu	Jenis Sampel	Jenis Tanah	Lokasi	Kedalaman (cm)	Parameter					
					Bobot Isi (g/cm^3)	Permeabilitas (cm/jam)		Porositas (%)		Kadar Air (%)
						Nilai	Kriteria	Nilai	Kriteria	
			Cimahi Utara							
		Tanah Tegalan	SPL 14.1, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	0.91	31.23	Sangat Cepat	65.92	Porous	46.5
		Tanah Tegalan	Cimenteng Utuh, Kec. Cimahi Utara	0-60 cm	0.91	31.23	Sangat Cepat	65.92	Porous	46.5

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-25a. Tabel Tambahan Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum dari WTP (UPT)
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kecamatan	WTP (UPT)
1	Cimahi Selatan	0
2	Cimahi Tengah	4.419
3	Cimahi Utara	96

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-29a. Tabel Tambahan Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	06°52'15,6"LS	107°32'06,2"BT	10-Jul-19	22.9	7.34	-	312
		Sungai Cisangkan Tengah	06°52'57.2"LS	107°31'46,2"BT	10-Jul-19	25.7	7.33	-	406
		Sungai Cisangkan Hilir	06°52'57,2"LS	107°31'46,2"BT	8-Jul-19	26.9	7.57	-	514
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	06°53'87,6"LS	107°03'32,9"BT	16-Jul-19	24.3	7.57	-	382
		Sungai Cibaligo Tengah	06°54'31,2"LS	107°33'06,5"BT	15-Jul-19	23.7	8.07	-	680
		Sungai Cibaligo Hilir	06°55'29,5"LS	107°32'58,9"BT	8-Jul-19	26	7.93	-	806
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	06°54'37,8"LS	107°34'07,5"BT	9-Jul-19	23.7	7.45	-	492

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
		Sungai Cibeureum Tengah	06°55'09,7"LS	107°33'55,5"BT	8-Jul-19	25.2	7.44	-	476
		Sungai Cibeureum Hilir	06°55'55,0"LS	107°33'42,9"BT	8-Jul-19	25.2	7.72	-	858
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	06°52'28,9"LS	107°33'41,3"BT	12-Jul-19	27.2	7.59	-	398
		Sungai Cibabat Tengah	06°53'21,9"LS	107°33'24,3"BT	12-Jul-19	27.8	7.56	-	408
		Sungai Cibabat Hilir	06°54'00,8"LS	107°32'54,6"BT	16-Jul-19	28.1	7.43	-	1704
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	06°51'17,6"LS	107°33'44,6"BT	10-Jul-19	25.9	7.99	-	194
		Sungai Cimahi Tengah	06°53'35,3"LS	107°32'27,9"BT	10-Jul-19	26.2	7.21	-	242
		Sungai Cimahi Hilir	06°55'29,2"LS	107°32'58,9"BT	9-Jul-19	28.2	7.72	-	2408

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	31	2.17	24	90	0.01	0.7	1.8	0.23
		Sungai Cisangkan Tengah	84	< 1	34	150	0.01	1.6	14.4	0.17
		Sungai Cisangkan Hilir	29	< 1	21	85	0.01	1.6	16.6	0.05
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	71	2.63	31	67	0.348	3.2	5.5	0.11
		Sungai Cibaligo Tengah	44	2.84	29	100	0.01	2.4	7.2	0.07
		Sungai Cibaligo Hilir	79	< 1	64	280	0.01	1.8	1.4	0.05
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	156	5.35	29	41	0.54	4.9	1.3	0.05
		Sungai Cibeureum Tengah	70	3.74	22	83	0.425	5	< 1,1	0.07
		Sungai Cibeureum Hilir	182	2.97	51	178	0.211	5.2	0.2	0.06
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	48	3.7	15	77	0.192	1.5	1.4	0.08
		Sungai Cibabat Tengah	346	1.16	83	112	0.01	0.9	< 1,1	0.17
		Sungai Cibabat Hilir	74	1.22	78	138	0.01	2.5	8.4	0.05
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	76	7.36	5	16	< 0,01	2	< 1,1	< 0,02

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
		Sungai Cimahi Tengah	317	1.34	25	129	< 0,01	1.6	4	0.2
		Sungai Cimahi Hilir	40	< 1	30	105	0.01	0.7	5.6	0.48

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	0.4	0.0563	1.4	1.5	6,488,000	24,196,000	0.013	0.38
		Sungai Cisangkan Tengah	0.79	0.0568	1	4.16	13,140,000	2,359,000	< 0,008	0.32
		Sungai Cisangkan Hilir	1.05	0.0037	< 0.35	0.81	15,000,000	17,329,000	< 0,008	0.29
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	0.25	0.0356	0.59	1.78	6,488,000	21,430,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibaligo Tengah	0.21	0.3347	< 0.35	3.54	10,462,000	12,997,000	< 0,008	0.42

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
		Sungai Cibaligo Hilir	0.77	0.042	< 0,35	2.09	43,600,000	72,700,000	< 0,008	0.48
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	< 0,16	0.0203	0.4	2.24	1,860,000	11,870,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibeureum Tengah	< 0,16	0.0225	< 0,35	4.53	2,282,000	7,701,000	< 0,008	0.13
		Sungai Cibeureum Hilir	0.41	0.0347	< 0,35	1.82	840,000	24,196,000	< 0,008	0.64
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	< 0,16	0.005	< 0,35	1.48	528,000	1,168,000	< 0,008	0.35
		Sungai Cibabat Tengah	0.26	0.0287	0.595	2.73	7,890,000	20,980,000	0.008	0.96
		Sungai Cibabat Hilir	0.16	0.0253	< 0,35	2.8	15,531,000	77,010,000	< 0,008	0.45
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	< 0,16	0.0654	< 0,35	5.22	310	341,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cimahi Tengah	0.2	0.0476	0.62	2.28	1,480,000	7,120,000	< 0,008	0.42
		Sungai Cimahi Hilir	0.38	0.045	< 0,35	1.56	9,880,000	21,430,000	< 0,008	0.22

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan pada Bulan Juli 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung
2. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-29b. Tabel Tambahan Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	06°52'15,6"LS	107°32'06,2"BT	07-Nov-19	22.9	7.47	-	468
		Sungai Cisangkan Tengah	06°52'57.2"LS	107°31'46,2"BT	05-Nov-19	28.2	7.41	-	540
		Sungai Cisangkan Hilir	06°52'57,2"LS	107°31'46,2"BT	05-Nov-19	30	7.5	-	1200
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	06°53'87,6"LS	107°03'32,9"BT	06-Nov-19	27.5	7.52	-	244

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
		Sungai Cibaligo Tengah	06°54'31,2"LS	107°33'06,5"BT	06-Nov-19	26.4	7.63	-	943
		Sungai Cibaligo Hilir	06°55'29,5"LS	107°32'58,9"BT	06-Nov-19	26.4	7.75	-	1428
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	06°54'37,8"LS	107°34'07,5"BT	04-Nov-19	24.8	7.43	-	720
		Sungai Cibeureum Tengah	06°55'09,7"LS	107°33'55,5"BT	04-Nov-19	24.9	7.43	-	666
		Sungai Cibeureum Hilir	06°55'55,0"LS	107°33'42,9"BT	04-Nov-19	25.4	7.37	-	680
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	06°52'28,9"LS	107°33'41,3"BT	07-Nov-19	24	7.64	-	430
		Sungai Cibabat Tengah	06°53'21,9"LS	107°33'24,3"BT	04-Nov-19	25.7	7.49	-	530
		Sungai Cibabat Hilir	06°54'00,8"LS	107°32'54,6"BT	06-Nov-19	28	7.6	-	3076
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	06°51'17,6"LS	107°33'44,6"BT	07-Nov-19	26.4	8.05	-	248

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
		Sungai Cimahi Tengah	06°53'35,3"LS	107°32'27,9"BT	05-Nov-19	25.2	7.42	-	314
		Sungai Cimahi Hilir	06°55'29,2"LS	107°32'58,9"BT	05-Nov-19	30.1	7.82	-	3516

(Tabel 29b Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	26	3.46	53	113	0.156	3.5	5.3	0.05
		Sungai Cisangkan Tengah	35	< 1	98	204	0.01	3	14.8	0.08
		Sungai Cisangkan Hilir	33	< 1	48	118	< 0,01	0.9	6.2	0.1
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	22	< 1	26	61	0.11	1	3.5	0.03
		Sungai Cibaligo Tengah	30	1.29	18	100	< 0,01	0.8	8.6	0.04
		Sungai Cibaligo Hilir	26	< 1	78	192	< 0,01	1.5	17.4	0.04

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	98	6.19	22	50	0.23	3.6	3.3	0.03
		Sungai Cibeureum Tengah	72	5.53	39	92	0.26	2.5	4.1	0.03
		Sungai Cibeureum Hilir	57	4.31	21	73	0.29	3.5	4.9	0.04
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	211	3.97	47	126	0.29	1.5	1.1	0.02
		Sungai Cibabat Tengah	35	1.03	59	151	< 0,01	1	17.6	0.03
		Sungai Cibabat Hilir	36	1.3	61	200	< 0,01	0.9	6.4	0.04
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	36	7.69	5	15	0.02	1.5	< 1,1	0.02
		Sungai Cimahi Tengah	35	5	9	31	0.15	1.3	< 1,1	0.04
		Sungai Cimahi Hilir	< 20	< 1	37	138	< 0,01	0.6	3.8	0.08

(Tabel 29b Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	0.2	0.131	1.2	0.6	< 100	< 1000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cisangkan Tengah	0.6	0.12	2.3	0.4	30,760,000	64,880,000	< 0,008	0.14
		Sungai Cisangkan Hilir	0.6	0.171	2.3	0.3	780,000	61,310,000	0.008	-
2	**Cibaligo**	Sungai Cibaligo Hulu	0.4	0.043	1.4	0.5	11,199,000	27,550,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibaligo Tengah	0.3	0.05	1.86	0.2	4,366,500	38,730,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibaligo Hilir	1	0.045	1.8	0.5	12,010,000	111,990,000	< 0,008	< 0,12
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	0.2	0.056	0.54	0.04	3,076,000	17,220,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibeureum Tengah	< 0,16	0.107	1.53	0.1	5,475,000	22,470,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibeureum Hilir	0.16	0.105	1.1	0.19	1,455,000	22,470,000	< 0,008	< 0,12

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
4	**Cibabat**	Sungai Cibabat Hulu	< 0,16	0.186	1.2	< 0,02	5,480,000	27,550,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibabat Tengah	0.5	0.01	4.8	0.6	12,033,000	92,080,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cibabat Hilir	0.3	0.179	0.86	0.5	21,870,000	36,540,000	< 0,008	< 0,12
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	< 0,16	0.016	0.4	< 0,02	74,000	630,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cimahi Tengah	0.19	0.061	1.4	0.13	816,000	4,570,000	< 0,008	< 0,12
		Sungai Cimahi Hilir	0.3	0.055	2.1	0.2	13,140,000	29,090,000	< 0,008	< 0,12

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan pada Bulan November 2019 oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung
2. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-33a. Tabel Tambahan Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Kode ICD-10	Jenis Penyakit	Kasus Baru			Kasus Lama			Total Kasus
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	J00-j06	Insfeksi saluran pernafasan akut	31265	40558	71823	9769	12542	22311	94134
2	K00-K14	Penyakit rongga mulut, kelenjar ludah dan rahang	9404	17073	26477	4045	8449	12494	38971
3	I10-I15	Penyakit hipertensi	3843	9617	13460	5707	14963	20670	34130
4	K20-K31	Penyakit kerongkongan, lambung dan duodenum	5885	14793	20678	1875	5103	6978	27656
5	M60-M79	Gangguan Jaringan Lunak	4232	10923	15155	1585	4299	5884	21039
6	L20-L30	Dermatitis dan eksim	4237	6427	10664	1173	1722	2895	13559
7	A00-A09	Penyakit infeksi usus	4813	5216	10029	1051	1059	2110	12139
8	E10-E14	Diabetes mellitus	1066	2325	3391	2353	5259	7612	11003
9	A15-A19	TBC	861	964	1825	2890	3106	5996	7821

No.	Kode ICD-10	Jenis Penyakit	Kasus Baru			Kasus Lama			Total Kasus
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
10	J40-J47	Penyakit pernafasan bawah kronis	1368	1581	2949	1147	1109	2256	5205

Tabel-35a. Tabel Tambahan Jumlah Potensi Pencemar Badan Air dari Industri/Kegiatan Usaha
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
	a. Bergerak						
	b. Tidak Bergerak						
1	RSUD Cibabat	Fasilitas Kesehatan	4368.00	-	1.64	0.50	0.60
2	RS Mitra Anugrah Lestari	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-
3	RS Mitra Kasih	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-
4	RS Kasih Bunda	Fasilitas Kesehatan	360.00	-	0.02	0.00	0.0044
5	RS Avisena	Fasilitas Kesehatan	-	-	0.01	0.01	0.00222336
6	RSB Harapan Bunda	Fasilitas Kesehatan	-	-	-	-	-
7	Rumkit Tk II Dustira	Fasilitas Kesehatan	-	-	0.39	0.17	0.15
8	CV. Daya Utama Logam	Industri Pelapisan	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
		Logam dan Galvanis					
10	CV Sinar Anugrah Lestari Textindo	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
11	CV. Suritex	Industri Tekstil	6111.04	-	65.2	7.64	14.8
12	PT. Afiat Pharmaceutical	Industri Farmasi	195	-	0.005	0.0009	0.003
13	PT. Agrin Nusantara		-	-	-	-	-
14	PT. Ajutex	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
15	PT. Antelas	Industri Tekstil	2160	-	0.92	0.12	0.41
16	PT. Anugrah Sinar Abadi	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
17	PT. Aswindo Jaya Sentosa	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
18	PT. Ayoe Indotama Textile	Industri Tekstil	4484	-	1.4	0.54	0.6
19	PT. Bangun Bumi Waluya (The Edge)	Perhotelan	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
20	PT. Benang Warna Indonusa	Industri Tekstil	3065.7	-	0.031	0.03	0.02
21			-	-	-	-	-
22	PT. Bina Nusantara Prima	Industri Tekstil	60000	-	13.6	0.5	0.6
23	PT. Bina Usaha Cipta Prima	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
24	PT. Bintang Warna Mandiri	Industri Tekstil	6000	-	0.063	0.012	0.014
25	PT. Cahaya Baru Textile		-	-	-	-	-
26	PT. Central Georgette Nusantara	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
	PT. Chitose Internasional Tbk		238549	-	-	-	-
27	PT. Cibaligo Indah Textile Mills	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
	PT. Dam Sinar Button Factory		26594.4	-	-	0.007	-
28	PT. Dewa Sutratex I	Industri Tekstil	2672.2	-	16.3	3.04	6.53

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
29	PT. Dewa Sutratex II	Industri Tekstil	9902.94	-	53.2	17.6	21.3
30	PT. Diamond Cold Storage	Industri Makanan	-	-	-	-	-
31	PT. Duta Setia Garment		-	-	-	-	-
32	PT. Dwi Mulya Tatatunggal	Industri Tekstil	-	-	3.2	0.32	1.05
33	PT. Fatatex		-	-	-	-	-
34	PT. Fuji Palapa Textile Industry	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
35	PT. Garuda Food Putra Putri Jaya		-	-	-	-	-
36	PT. Garuda Mas Semesta	Industri Tekstil	3705.3	-	0.59	0.12	0.23
37	PT. Gede Indah	Industri Tekstil		-			
38	Ginatex	Industri Tekstil	1764	-	5.33	0.46	2.29
39	PT. Gucci Ratu Textile	Industri Tekstil	10800	-	3.78	1	1.13
40	PT. Guna Mitra Prima	Industri Tekstil	2096	-	16.18	2.87	5.14

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
41	PT. Hegar Mulia	Industri Tekstil	1998.52	-	14.05	2.64	5.03
42	PT. Hetzer Medical	Industri Farmasi	-	-	-	-	-
43	PT. Hexatex Indah	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
44	PT. Holi Pharma	Industri Farmasi	60	-	0.05	0.014	0.02
45	PT. How Are You Indonesia	Industri Tekstil	300000	-	0.0018	0	0.00072
46	PT. Ihchi Tekstile Muls & Machinery	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
47	PT. Indah Jaya	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
48	PT. Indo Extrusion	Industri Pelapisan Logam dan Galvanis	71218.4	-	-	0.003	-
49	PT. Indowira Putra		-	-	-	-	-
50	PT. Jenshiang Nusantara	Industri Bahan Kimia Tekstil	2148.18		0.15	0.03	0.08

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
51	PT. Kahatex	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
52	PT. Kamarga Kurnia Textile Industry	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
53	PT. Kawi Mekar	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
54	PT. Laju Makmur Sentosa	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
55	PT. Leuwijaya Utama Textile	Industri Tekstil	9971.52	-	0.022	0.005	0.01
56	PT. Logam Bima	Industri Alat Dapur	-	-	-	-	-
57	PT. Long John Indonesia	-	-	-	-	-	-
58	PT. Long Sun Indonesia	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
59	PT. Madani Jaya Sentosa	-	-	-	-	-	-
60	PT. Mandiri Mekar Putratama	-	-	-	-	-	-
61	PT. Marga Jaya	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
62	PT. Matahari Sentosa Jaya	Industri Tekstil	-	-	0.28	0.06	0.09
63	PT. Mbangun Praja Industri (Bapintri)	-	-	-	-	-	-
64	PT. Mewah Dinamika Indonesia	-	-	-	-	-	-
65	PT. Mewah Niaga Jaya	-	-	-	-	-	-
66	PT. Mewah Niagatama	-	-	-	-	-	-
67	PT. Mulia Lestari	Industri Tekstil	2714.2	-	1.04	0.5	0.3
68	PT. Multi Kimia Agung	-	-	-	-	-	-
69	PT. Multi Laris Jaya Sukses	-	-	-	-	-	-
70	PT. Nam Nam Fashion Industries	-	-	-	-	-	-
71	PT. Niagatama Hijau Raya	-	-	-	-	-	-
72	PT. Nickel Chrome Indo Jaya	Industri Pelapisan	172330	-	-	0.07	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
		Logam dan Galvanis					
73	PT. Nisshinbo Indonesia	-	-	-	-	-	-
74	PT. Oladia Lestari Parahiyangan	-	-	-	-	-	-
75	PT. Old and New Hybridtech	-	-	-	-	-	-
76	PT. Opelon Garment Indonesia	-	-	-	-	-	-
77	PT. Ophiraya Indonesia	-	-	-	-	-	-
78	PT. Oriental Embroidery	Industri Tekstil	322.63	-	0.97	0.31	0.34
79	PT. Padajaya	-	-	-	-	-	-
80	PT. Pola Manunggal Sejati	-	-	-	-	-	-
81	PT. Press Metal Indojaya	-	-	-	-	-	-
82	PT. Primatex	-	-	-	-	-	-
83	PT. Puninar Sarana Raya	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
84	PT. Rajawali Hiyoto	Industri Cat	8178.44	-	-	0.04	0.21
	PT. Ragam Jaya Utama	Industri Tekstil	3520701	-	6.19	0.8	2.72
85	PT. Ras Jaya	Industri Tekstil	816	-	0.06	0.02	0.024
86	PT. Sama Indah	-	-	-	-	-	-
87	PT. Sanbe Farma (unit R & D)	Industri Farmasi	-	-	-	-	-
88	PT. Sanbe Farma I	Industri Farmasi	-	-	-	-	-
89	PT. Sanbe Farma II	Industri Farmasi	-	-	-	-	-
90	PT. Sanlit Inti Plastik	-	-	-	-	-	-
91	PT. Sansan Saudaratex Jaya I	Industri Tekstil	3487.2	-	36	12.97	18.82
92	PT. Sansan Saudaratex Jaya II	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
93	PT. Sansan Saudaratex Jaya V	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
94	PT. Sapta Jaya Tekstilindo	Industri Tekstil	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
95	PT. Setia Busanatex	Industri Tekstil	1033732	-	1.34	0.23	0.57
96	PT. Shamsco Kusmajaya	-	-	-	-	-	-
97	PT. Sinar Austral Tekstil Industri	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
98	PT. Sinar Continental	Industri Tekstil	342.36		1.88	0.61	0.76
99	PT. Sinar Terang Logam Jaya	-	-	-	-	-	-
100	PT. Sinar Garuda Sentosa	-	-	-	-	-	-
101	PT. Sinar Metalindo Utama	-	-	-	-	-	-
102	PT. Sinar Pangjaya Mulia	Industri Tekstil	4042212	-	1.27	0.15	0.2
103	PT. Sintotex Lestari	-	-	-	-	-	-
104	PT. Soko Lancar	Industri Tekstil	190.2	-	0.001221	0.0000496	0.00045
105	PT. Sukses Investo Anugrah Propertindo	Industri Tekstil	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
106	PT. Sumber Baja	-	-	-	-	-	-
107	PT. Sumber Tanushu Pharmaceutical	-	-	-	-	-	-
108	PT. Suminoe Surya Techno	-	-	-	-	-	-
109	PT. Tegar Prima Nusantara	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
110	PT. Theodore Garmindo Indonesia	-	-	-	-	-	-
111	PT. Tirta Ria	-	-	-	-	-	-
112	PT. Tomost Raja Utama	-	-	-	-	-	-
113	PT. Triana Harvestindo Nusantara	Industri Tekstil	1146174	-	5.79	3.46	2.33
114	PT. Tridharma Megamitra Textile	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
115	PT. Trigunawan	Industri Tekstil	-	-	-	-	-
116	PT. Trijaya Properti	-	-	-	-	-	-

No.	Nama Industri	Jenis Industri	Produksi (Ton/Tahun)	Beban Limbah (Ton/Tahun)	Beban Limbah COD (Ton/Tahun)	Beban Limbah TSS (Ton/Tahun)	Beban Limbah BOD (Ton/Tahun)
117	PT. Trijaya Utama	-	-	-	-	-	-
118	PT. Trisula Textile Mills	Industri Tekstil	2120	-	0	0	0

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2019

Tabel-44a. Tabel Tambahan Bencana Banjir, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
9 Januari 2019	BANJIR	GENANGAN	Kp. Margasari Gg. Irmain	Cimahi Tengah	Hujan dengan intensitas tinggi	• Sebanyak 3 rumah terdampak di RT. 3 RW. 12 rumah milik Bpk. Boni wildan (55th) 1kk 4 jiwa, Bpk. Rial aditia (32th) 1kk 5jiwa, Bpk. Ruhiat (68 th) 3kk 7jiwa terendam dengan tinggi muka air 50cm selama 1 jam; • Sebanyak 2 rumah di RT. 1 RW. 3 rumah milik Bpk. H. Saidi (90th) 2kk 5jiwa, kontrakan 4 kamar milik Bpk.H. Saidi, ibu titi (46th) 1kk 6jiwa, dan kontrakan 7 kamar milik	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan RT dan RW setempat;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						Ibu Titi terendam dengan tinggi muka air 50cm selama 1 jam; • Tidak ada korban jiwa maupun luka;	
13 Januari 2019	BANJIR	GENANGAN	• Kp. Margasari	Cimahi Tengah	Drainase yang tidak baik dipicu hujan dengan intensitas tinggi	• Sebanyak 9 rumah terdampak di RT. 3 RW. 12 rumah milik Bpk. Boni wildan (55th) 1kk 4 jiwa, Bpk. Rial aditia (32th) 1kk 5 jiwa, Bpk. Ruhiat (68 th) 3kk 7 jiwa, Bpk. Anokarno (52th) 2KK 5 jiwa, Bpk. Agusman (55th) 1KK 3 jiwa, Bpk. Dede Tarya (51th) 1KK 11 jiwa, Bpk. Uu Suryana (60th) 1KK 6 jiwa, Bpk. Panji Yuwono (35th) 1 KK 3 jiwa, dan Bpk. Ogi (31th) 1KK 3 jiwa	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan RT dan RW setempat;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						terendam dengan tinggi muka air 50cm selama 1 jam; • Sebanyak 2 rumah di RT. 1 RW. 3 rumah milik Bpk. H. Saidi (90th) 2kk 5jiwa, kontrakan 4 kamar milik Bpk.H. Saidi, ibu titi (46th) 1kk 6jiwa, dan kontrakan 7 kamar milik Ibu Titi terendam dengan tinggi muka air 50cm selama 1 jam; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	
13 Januari 2019	BANJIR	GENANGAN	• Jl. Sangkuriang Barat Anggaraja	Cimahi Utara	Luapan air dari kali Cikendal yang dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi	• Sebanyak 18 rumah 22KK 72 jiwa terdampak luapan air dengan Tinggi Muka Air (TMA) ± 80cm; • Tidak ada korban jiwa maupun luka;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi bersama DAMKAR Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							dan TAGANA melakukan penutupan jalan dan berkoordinasi dengan RT dan RW setempat; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik;
13 Januari 2019	BANJIR	GENANGAN	• Jl. Ibu Ganirah	Cimahi Selatan	Tidak adanya drainase dan meluapnya air selokan yang ada di Jl. Ibu Ganirah dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi	• Sebanyak 9 rumah terdampak luapan air selokan dari RW.03 dengan Tinggi Muka Air (TMA) 50cm. Rumah milik Bpk. Mamat (60th) 3KK 9 jiwa, Bpk. Muhtar 3 jiwa, Bpk. Dede 7 jiwa, Bpk. Tatang 2 jiwa, Bpk. Iding 4 jiwa, Mas Winarto 2 jiwa, Mas Mugiono 4 jiwa, Bpk. Heri 6 jiwa, Bpk. Toto 5; • Sebanyak 9 kontrakan	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi bersama DAMKAR Kota Cimahi dan TAGANA melakukan penyedotan; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan RT dan RW setempat;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						terdampak luapan air selokan dari RW.03 dengan Tinggi Muka Air (TMA) 30cm. Kontrakan milik Bpk. H. Badan (alm) yang dihuni oleh Bpk. Timan (35th) 1KK 3 jiwa, Bpk. Fajar (22th) 1KK 2 jiwa, kontrakan Ibu Tini 5 jiwa, kontrakan Ibu Cucu 7 jiwa, kontrakan Bpk. Bangbang 6 jiwa, kontrakan Bpk. Budi 20 jiwa, kontrakan Bpk. Asep 5 jiwa, kontrakan Mas Ronggo 4 jiwa, kontrakan Bpk. H. Badar 6 jiwa terdampak luapan air selokan dari RW.03 dengan Tinggi Muka Air (TMA) 50cm;	

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban jiwa maupun luka;	
13 Januari 2019	BANJIR	GENANGAN	• Jl. Pojok	Cimahi Tengah	Meluapnya air dari sungai Cilokoto	• Roboh nya kirmir dengan luas area terdampak ± 10m2; • Sebanyak 10 rumah terdampak 11KK 41 jiwa (3 balita), Bpk. Edi (59th) 1KK 4 jiwa, Bpk. Eno (45th) 1KK 5 jiwa, Bpk. Ahmad (52th) 2 KK 4 jiwa, Bpk. Bahrudin (52th) 1 KK 2 jiwa, Bpk. Kosasih (51th) 1 KK 4 jiwa, Bpk. Diki (39th) 2KK 6 jiwa, Bpk. Sartono (45th) 1KK 4 jiwa, Ibu Odah (67th) 2 KK 6 jiwa, Bpk. Andri (27th) 1 KK 3 jiwa, dan Bpk. Saeful (47th) 1KK 3 jiwa; • Sebanyak 9 kamar kontrakan terdampak	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan TAGANA, RT dan RW setempat;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						11KK 35 jiwa (6 balita); • Tidak ada korban jiwa maupun luka;	
13 Januari 2019	BANJIR	GENANGAN	• Jl. Pojok Selatan	Cimahi Tengah	Meluapnya air dari sungai Cilokoto	• Sebanyak 80 rumah terdampak dengan Tinggi Muka Air (TMA) 50cm • Tidak ada korban jiwa maupun luka;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan RT dan RW setempat;
04 April 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Amir Machmud depan Bank BJB Cimahi	Cimahi Tengah	Sistem drainase yang tidak baik dipicu hujan dengan intensitas tinggi	• Air luapan drainase yang menggenangi jalan dengan ketinggian air ± 10cm menyebabkan terganggunya arus lalu lintas	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi luapan air; • BPBD Kota Cimahi melakukan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							pemantauan tinggi muka air.
04 April 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Mahar Martanegara	Cimahi Tengah	Luapan sungai Rancabali	• Air luapan sungai Rancabali yang menggenangi beberapa ruas jalan dengan ketinggian air ± 50 cm • Menyebabkan kemacetan lalu lintas dan tidak bisa dilalui • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi untuk melakukan pemblokiran jalan
04 April 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Cibaligo depan PT. Hintex	Cimahi Tengah	Luapan sungai Rancabali	• Air meluap dengan ketinggian ± 60 cm menggenangi badan	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan	kejadian • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi untuk pemblokiran jalan
04 April 2019	BANJIR	GENANGAN	Melong	Cimahi Selatan	Meluapnya air dari sungai cikendal	• Air meluap dengan ketinggian ± 60cm mengggenangi pemukiman warga dengan korban terdampak 163 kk, ± 600 jiwa • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan RT RW setempat, Bhabinsa, Tagana, dan Damkar Kota Cimahi • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							• Damkar Kota Cimahi melakukan penyedotan • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik
26 April 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Sangkuriang Barat (Anggaraja)	Cimahi Utara	Tingginya curah hujan melebihi daya tampung drainase	• Air meluap dengan ketinggian ± 60cm mengggenangi pemukiman warga dengan korban Sebanyak 12 Rumah 16 KK 67 Jiwa; • Arus lalu lintas tidak bisa dilalui oleh KR 2 maupun KR 4;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar, Tagana, KSB Cipageran, RT dan RW setempat; • BPBD Kota Cimahi bersama Damkar dan Tagana

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							melakukan penyedotan;
05 Mei 2019	BANJIR	GENANGAN	•Jl. Sadarmanah Kp. Nyeyerean	Cimahi Selatan	Tingginya curah hujan melebihi daya tampung drainase	• Sebanyak 27 Rumah dan kontrakan 3 kamar terdampak limpasan air dengan Tinggi Muka Air (TMA) ± 30 cm; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar, Tagana, RT dan RW setempat • Air sudah surut pada pukul 19.11 WIB

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
18 September 2019	BANJIR	GENANGAN	Kp. Cilember	Cimahi Tengah	Luapan Kali Cibeureum	• ± 30 rumah terdampak di Rt. 04/06; • ± 10 Rumah terdampak di Rt. 05/06; • ± 10 Kios Pakaian terdampak luapan air dengan Tinggi ± 70 cm;(Wilayah Kota Bandung) • Korban terdampak RT 04 = 60 KK (balita 5-6 tahun 11 jiwa) dan RT 05 = 15 KK; • Tinggi Muka Air ± 30 Cm s/d 1 Meter; • Kondisi surut dalam waktu ± 1 jam; • Tidak ada korban jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan dan asessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan kordinasi dengan aparat Kelurahan Cigugur Tengah.
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Amir Machmud	Cimahi Utara	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung	Luapan air menggenangi jalan raya dengan ketinggian air ± 10cm	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					debit curah hujan		melakukan pemantauan tinggi muka air
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN		Cimahi Utara	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung debit curah hujan	Luapan air menggenangi jalan raya dengan ketinggian air ± 10cm	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Ketua RW setempat untuk melakukan pemantauan tinggi muka air; • Pukul 18:40 WIB air sudah mulai surut.
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN		Cimahi Tengah	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung	Tidak ada luapan air yang memasuki pemukiman warga	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					debit curah hujan		melakukan pemantauan tinggi muka air.
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN		Cimahi Selatan	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung debit curah hujan	a. Tinggi Muka Air ± 50cm. b. RT 01 luapan air masuk ke pemukiman warga, terdampak 50 rumah tergenang air; c. RT 03 tidak ada air luapan yang memasuki pemukiman.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Ketua RW setempat untuk melakukan pemantauan tinggi muka air; • Warga RT 01 secara serentak membuat tanggul sementara untuk menutupi aliran air yang memasuki pemukiman; • Pukul 19:39 WIB air

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							sudah mulai surut.
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Mancong	Cimahi Selatan	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung debit curah hujan	a. Luapan air menggenangi jalan raya dengan ketinggian air ± 40cm; b. Jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air; • Pukul 19:50 WIB air sudah mulai surut dan bisa dilalui oleh kendaraan.
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN		Cimahi Selatan	Daya tampung drainase yang tidak bisa	a. Tinggi muka air ± 40cm. b. 4 rumah terdampak genangan : • 2 rumah terdampak	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					menampung debit curah hujan	sampai pekarangan rumah a/n Pak Ruhiyat dan Pak Haji Saidi; • 2 rumah terdampak luapan air masuk ke dalam rumah a/n Pak Boni dan Ibu Titi. c. Kebutuhan logistik : (nihil).	• BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Ketua RT setempat melakukan pemantauan tinggi muka air; • Korban terdampak sudah melakukan pembersihan rumah secara mandiri; • Pukul 19:39 WIB air luapan sudah mulai surut.
Sabtu, 30 November 2019	BANJIR	GENANGAN	Kp. Lembur Sawah	Cimahi Selatan	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung debit curah hujan	a. Luapan air menggenangi jalan pemukiman dengan ketinggian ± 30cm; b. Terdampak 3 rumah luapan air masuk ke dalam rumah a/n Pak Kusnadi, Pak Pepen, dan Pak Atang.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Ketua RW setempat melakukan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							pemantauan tinggi muka air; • Korban terdampak dan warga sekitar sudah melakukan pembersihan rumah secara mandiri; • Pukul 19:48 WIB air luapan sudah mulai surut.
Jumat, 13 Desember 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Cipageran	Cimahi Utara	Daya tampung drainase yang tidak bisa menampung debit curah hujan	• Luapan air menggenangi sebagian pemukiman dan jalan raya. • Luapan air masuk ke 1 rumah milik Ibu Siti Rosmaniah (1 kk/4 jiwa) dengan ketinggian air ± 40 cm.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Warga setempat secara mandiri membersihkan jalan. • Pukul 16:30 WIB air sudah mulai surut
Jumat. 13 Desember 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Amir Machmud, Cilember	Cimahi Tengah	Daya tampung drainase yang tidak	luapan air dari selokan yang menggenangi sebagian ruas jalan	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					bisa menampung debit curah hujan		• Pukul 16:30 WIB air sudah mulai surut dan jalan sudah bisa dilalui kendaraan
Selasa, 17 Desember 2019	BANJIR	GENANGAN	Cibeber	Cimahi Selatan	Daya tampung drainase yang tidak sesuai dengan debit air luapan	• Luapan air menggenangi sebagian pemukiman dan jalan raya dengan ketinggian air ± 50cm	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan tinggi muka air; • Pukul 18:09 WIB air sudah surut
Selasa, 17 Desember 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Mancong	Cimahi Selatan	Saluran drainase terputus sehingga tidak bisa mengalirkan air	• 5 unit rumah tergenang air dengan tinggi muka air ± 40cm • Rumah terdampak milik Ibu Onih (55) 2 kk 3 jiwa, Bapak Khoeruman (40) 1 kk 4 jiwa, Ibu Awang (80) 2 kk 4 jiwa, Bapak Herman (55) 1 kk 4	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan RT dan RW setempat; • Warga setempat secara mandiri membuat tanggul

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						jiwa, dan Bapak Adoh (55) 1 kk 3 jiwa	
Minggu, 22 Desember 2019	BANJIR	GENANGAN	Jl. Melong	Cimahi Selatan	Daya tampung drainse yang kurang idel Hujan dengan intensitas tinggi.	Terjadinya luapan air ke jalan dengan kedalaman ± 30 cm dan berdampak masuk ke sebagian pemukiman warga RT 01 dan RT 02 RW 02 Melong. Korban terdampak 2 unit rumah a.n Ibu Rosmawati 6 KK, 25 Jiwa (2 Balita) dan Bapak Ujang 2 KK 7 Jiwa (1 balita).	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan penyedotan untuk rumah yang terdampak; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik yang dibutuhkan.
Selasa, 31 Desember 2019	BANJIR		Cipageran	Cimahi Utara	Debit air melebihi daya tampung drainase dipicu hujan dengan	• Air meluap menggenangi ruas jalan depan kelurahan Cipageran RT. 04 RW. 09 dengan Tinggi Muka Air (TMA) 50 cm	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					intensitas tinggi	• Air surut ± 45 menit kemudian • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	Tagana dan Kelurahan.
Selasa, 31 Desember 2019	BANJIR		Komplek Bukit Cipageran	Cimahi Utara	Tertutupinya selokan oleh material bangunan dipicu hujan deras dan angin kencang.	• Terendamnya 3 unit rumah milik 1. Bpk. Edi (65) 1 KK 4 jiwa 2. Bpk. Taufik 1 KK 4 jiwa 3. Rumah akupuntur 4. Bpk. Tonisman 1 KK 3 jiwa 5. Bpk. Adit 1 KK 4 jiwa (balita 4 tahun) 6. Bpk. Sudiono 1 KK 3 jiwa 7. Bpk. Laoli 1 KK 4 Jiwa 8. Bpk. Yayat 1 KK 5 jiwa 9. Ibu Yumna 1 KK 3 jiwa • Terjadi longsor yang menimpa 1 unit rumah	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Pembersihan material banjir dilakukan oleh warga/pemilik rumah.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						milik Bpk. Abdul Rahman bagian tembok belakang dengan luas area terdampak ± 3x5 m² • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	
Selasa, 31 Desember 2019	BANJIR		Jl. Warung Contong	Cimahi Tengah	Debit air melebihi daya tampung drainase dipicu hujan dengan intensitas tinggi	• Air meluap menggenangi ruas jalan wilayah RT. 03-04 RW. 09 dengan Tinggi Muka Air (TMA) 50 cm; • Air surut ± 30 menit kemudian; • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Tagana dan Kelurahan.

Keterangan:

1. Penyebab terjadinya banjir rata-rata dikarenakan tersumbatnya/kurang lebarnya saluran drainase
2. Banjir di Cimahi Selatan relatif terjadi setiap kali intensitas hujan tinggi di setiap tahunnya

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-45a. Tabel Tambahan Bencana Kekeringan, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
05 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Pesantren	Cimahi Utara	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Sebanyak 25 KK 100 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih	• BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih sebanyak 5000 Liter
06 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Singkurmulya	Cimahi Utara	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 80 KK, 322 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5000 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
06 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Komplek suaka	Cimahi Selatan	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 13 KK, 52 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3200 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih
06 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Sukimun	Cimahi Tengah	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 85 KK, 350 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5000 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih
07 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Warung Contong	Cimahi Tengah	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 80 KK 178 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3200 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
07 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Warung Contong	Cimahi Selatan	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 40 KK 86 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3200 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih
07 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Nanjung	Cimahi Selatan	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 148 KK 450 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3200 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih
07 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Joyodikromo	Cimahi Selatan	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 300 KK 750 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3200 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
08 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Kp. Margamulya	Cimahi Tengah	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Berkurangnya debit/kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Sebanyak 120 KK 480 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih Sebanyak 5000 liter
14 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Mahar Martanegara Jl. Nanjung	Cimahi Selatan	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	• Di RT. 3 sebanyak 90 KK 365 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5000 liter; • Di RT. 1 dan 2 sebanyak KK 185 jiwa 554 kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5000 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih sebanyak 10000 liter

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
14 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Kp. Lebaksaat	Cimahi Utara	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Jumlah 45 KK 135 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5000 liter	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih sebanyak 5000 liter
16 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl . Gunung Rahayu	Cimahi Utara	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Sebanyak 15 KK 50 jiwa kesulitan mendapatkan air bersih	BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih dalam pendistribusian air bersih sebanyak 5000 liter
26 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Kp Cimekar	Cimahi Utara	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	• Di RT. 01 sebanyak 130 KK 600 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3.500 liter • Di RT. 03	• BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih terkait jadwal pendistribusian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					Sebanyak 50 KK 300 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3.500 liter Total jumlah 180 KK 900 jiwa	dengan Damkar Kota Cimahi dalam pendistribusian air bersih. Jumlah total air bersih yang di distribusikan sebanyak 7.000 liter
29 Agustus 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Nanjung	Cimahi Selatan	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	• Di RT. 03 sebanyak 165 KK 495 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 3.000 liter • Di RT. 04 sebanyak 398 KK 1.194 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5.000 liter	• BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih terkait jadwal pendistribusian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi dalam pendistribusian air bersih. Jumlah total air bersih yang di

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						distribusikan sebanyak 8.000 liter
10 September 2019	**KEKERINGAN**	Jl. Padasuka	Cimahi Tengah	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber yang berada di permukiman	• RT 01 sebanyak 80 KK 240 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 4.000 liter • RT 02 Sebanyak 50 KK 150 Jiwa kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 4.000 liter Total jumlah 130 KK 390 jiwa	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih terkait jadwal pendistribusian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi dalam pendistribusian air bersih. Jumlah total air bersih yang di distribusikan sebanyak 8.000 liter

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
18 September 2019	**KEKERINGAN**	SDN Sukamaju 1	Cimahi Tengah	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	Kesulitan mendapatkan air bersih. Total jumlah distribusi air bersih ± 5.000	• BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih terkait jadwal pendistribusian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi dalam pendistribusian air bersih. Jumlah total air bersih yang di distribusikan sebanyak 5.000 liter
19 September 2019	**KEKERINGAN**	Kp. Kamarung	Cimahi Utara	• Berkurangnya pasokan debit air oleh PDAM • Buruknya kualitas air dari sumber air yang berada di permukiman	• RT 01 RW 04 sebanyak 20 KK 70 Jiwa • RT 02 RW 04 sebanyak 11 KK 44 Jiwa • RT 03 RW 04 sebanyak 12 KK 47 Jiwa • RT 04 RW 04	• BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan DKP Kota Cimahi dan UPT Air Bersih terkait jadwal pendistribusian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi

Tangga Kejadian	Jenis Bencana	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					sebanyak 25 KK 82 Jiwa • RT 05 RW 04 sebanyak 11 KK 30 Jiwa • RT 06 RW 04 sebanyak 50 KK 113 Jiwa • RT 07 RW 04 sebanyak 11 KK 36 Jiwa	dalam pendistribusian air bersih. Jumlah total air bersih yang di distribusikan sebanyak 8.000 liter

Keterangan: -

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-46a. Tabel Tambahan Bencana Kebakaran, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
22 Januari 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Sadarmanah Kp. Saradan No. 110	Cimahi Selatan	Konsleting listrik pada saat mencharge handphone	• 1 Unit rumah terbakar di bagian kamar tidur dengan luas area terbakar ± 6 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	
5 Febuari 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Cihanjuang Komplek Duta Regency	Cimahi Utara	Konsleting listrik	• 1 Unit rumah milik Bpk. Fandi (42 th) terbakar di bagian lantai 2 Gudang penyimpanan barang dan tempat mencuci pakaian dengan luas area terbakar ± 6 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dan TAGANA melakukan tindakan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 3 unit Pancar dan 2 unit Rescue beranggotakan dengan 15 personil;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
21 Maret 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Mahar Martanegara No. 174	Cimahi Selatan	Dari percikan mesin las yang menyambar tiner dan tumpukan kardus	• Terbakarnya ruang pompa PT. Sanbe Farma dengan luas area terdampak 2 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 4 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 14 personil
08 April 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Sentral	Cimahi Utara	Dari percikan kembang api yang menyambar bensin	• Sebuah bengkel motor terbakar dengan luas area terdampak 62 m2 • Api merambat ke bangunan di samping bengkel toko souvenir, salon dan kontrakan • Terdampak dua korban luka bakar atas nama Bpk. Lutfi dan Ibu Nenden	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 6 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 14 personil • BPBD Kota Cimahi melakukan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							evakuasi korban dari lokasi kejadian dan dilarikan ke rumah Sakit Cibabat
05 Juni 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Ciputri No. 39	Cimahi Tengah	Penyebab kebakaran belum diketahui	• Tempat pembuangan sampah dan penyimpanan barang bekas dengan luas area terbakar ± 200 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 4 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 15 personil
17 Juni 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Kalidam	Cimahi Tengah	Diduga konsleting listrik	• Terbakar nya rumah tinggal milik Bpk. Muslihat dengan luas area terbakar ± 20 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 3 unit pancar dan 2 unit

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							rescue beranggotakan 14 personil
16 Juli 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Melong	Cimahi Selatan	Dari pembakaran sampah	• Terbakar nya alang-alang dengan luas area terbakar ± 20 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 2 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 11 personil
24 Juli 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Ibu Ganirah	Cimahi Selatan	Dari pembakaran sampah	Terbakarnya area pembuangan sampah yang berada dipinggiran tebing setinggi ±30 m yang merembet ke lahan kosong dengan luas area terdampak ±20 m2 2 Orang mengalami sesak napas : 1. Yaya (67) 2. Sawijan (71) Korban ditangani langsung di TKP oleh PMI	BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 5 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 19 personil BPBD Kota Cimahi menghimbau warga agar menjauh dari lokasi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							kebakaran dikarenakan asap sangat tebal BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan DAMKAR, Bpk. Lurah, Tagana, PMI, Babinkamtibmas, Babinsa, Dinas Lingkungan Hidup, RT dan RW setempat
25 Juli 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Amir Machmud Gg. Mustopa 2	Cimahi Utara	Pembakaran sampah yang merambat ke lemari dan kursi	Terbakarnya rumah kosong milik Ibu Ani dengan luas area terdampak ± 80m2 Tidak ada korban jiwa maupun luka	BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 4 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 14 personil BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, PMI, Kelurahan Cibabat
27 Juli 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Sari Sambi 4 Pharmindo	Cimahi Selatan	Dari pembakaran sampah	Terbakarnya alang-alang dan tempat pembuangan sampah dengan luas area terdampak ± 50 m2 Tidak ada korban jiwa maupun luka	BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							menurunkan 3 unit pancar dan 1 unit rescue beranggotakan 11 personil BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan DAMKAR, Tagana, PMI, RT dan RW setempat
04 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Cidamar	Cimahi Utara	Dari pembakaran sampah	• Terbakarnya lahan kosong (rumpun bambu) dengan luas area terdampak ± 24 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 1 unit pancar 1 unit rescue beranggotakan 7 personil • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Lurah Pasirkaliki, Tagana dan RT RW setempat
06 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Kolonel Masturi KM 3 Bukit Mas Cipageran	Cimahi Utara	Asal api diduga dari pembakaran sampah	• Sebuah lahan kosong (alang-alang) terbakar di sekitar area Komplek Bukit Mas Cipageran dengan luas area terdampak ± 200 m2	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban jiwa maupun luka	dan pendinginan dengan menurunkan 2 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 14 personil; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan DAMKAR Kota Cimahi, Polsek Cimahi, Tagana, dan KIC Polres Cimahi.
06 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Ciseupan	Cimahi Selatan	Asal api diduga dari pembakaran sampah	• Terbakarnya alang-alang dan sampah tiblock dengan luas area terdampak ± 100 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 3 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 15 personil
13 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Komplek Pondok Cipta Mas Blok A2 No. 1	Cimahi Selatan	Konsleting listrik	• Terbakar nya rumah tinggal milik Bpk. Ratnoto dengan luas area terbakar ± 300 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan, Damkar Kota Cimahi, Tagana, RT dan RW

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							setempat • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman, pendinginan dan pengecekan dengan menurunkan 3 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 15 personil
13 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Pancanaka Hill	Cimahi Selatan	Pembakaran Lahan Kosong	• Terbakarnya lahan kosong milik pengembang PT. Sanghiyang Daya Khuyu (Sanghiyang Pancanaka Hills) dengan luas area terbakar ± 50 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan KIC, Security dan masyarakat Setempat • BPBD Kota Cimahi bersama KIC melakukan pemadaman secara manual
19 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cibogo	Cimahi Selatan	Dari daun kering yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab	• Terbakaranya lahan kosong dengan luas area terbakar ± 50 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi melakukan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							pemadaman serta berkoordinasi Kodim, Kelurahan Leuwigajah, dan RT setempat • Pukul 13:20 WIB kondisi api sudah mengecil
23 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Kebon Kopi	Cimahi Selatan	Dari daun kering dan pembakaran sampah	• Terbakaranya lahan kosong dengan luas area terbakar ± 50 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 1 unit motor pemadam kebakaran milik Kelurahan Melong • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Melong, FPRB Melong dan Pengelola Rusun
23 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Sambi Sari	Cimahi Selatan	Pembakaran sampah	• Terbakaranya lahan kosong dengan luas area terbakar ± 35 m2;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban jiwa maupun luka	lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 1 Unit Pancar beranggotakan 3 personil; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Bhabinsa, dan FPRB
26 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Leuwi Muncang No. 39	Cimahi Tengah	Konsleting Listrik	• 1 unit rumah tinggal (mess TNI) Bapak Kasdu (70) terbakar dengan luas area terdampak ± 30 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 4 Unit Pancar dan 1 Unit Rescue beranggotakan 17 personil; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							Cimahi, Tagana, dan Aparat TNI
30 Agustus 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Pancanaka perbatasan	Cimahi Utara	Pembakaran lahan yang menyebar ke beberapa area tanaman liar yang kering	• Terbakarnya lahan kosong dengan luas area terdampak ± 25x30 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 2 Unit Pancar beranggotakan 11 personil • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat setempat untuk melakuakan ronda di sekitar wilayah terdampak dan lebih waspada terhadap lahan yang kering • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, Kelurahan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							Citeureup, Bhabinkamtibmas, dan KIC Polres Cimahi
02 September 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Kp. Pakuhaji	Cimahi Utara	Di duga dari Konsleting listrik	• 2 unit rumah terbakar dengan luas area terbakar ± 170 m2 • 1 unit rumah semi permanen milik Bpk. Baryat (60) 1 KK 2 Jiwa terbakar habis • 1 unit rumah semi permanen milik Bpk. Cecep (28) 1 KK 3 Jiwa terbakar bagian atap • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, Babinsa, Babinkamtibmas, pihak kelurahan, KSB, RT dan RW setempat; • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman, pendinginan dan pengecekan dengan menurunkan 3 unit pancar dan 2 unit rescue beranggotakan 12 personil; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik berupa : Air Mineral 4 dus, Tikar 2 Lembar

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							Selimut 4 lbr, daster 3 pcs, Kaos oblong 4 pcs, ember 2 buah, gayung 2 buah, alat dapur 2 paket, sarung 3 pcs
05 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Bukit Cibogo	Cimahi Selatan	Asal api diduga dari pembakaran oleh Warga	• Terbakar nya area lahan kosong yang berada di wilayah Kota Cimahi akibat pembakaran lahan yang merembet ke wilayah kab. Bandung Bukit Cibogo (Puncak Salam) dengan luas area terbakar ± 500 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan BPBD kab. Bandung, Tagana Kota Cimahi, babinkamtibmas, RT dan RW Setempat • BPBD Kota Cimahi, BPBD kab. Bandung dan TAGANA kota cimahi melakukan pemadaman secara manual
06 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Komplek bukit mas	Cimahi Utara	Asal api diduga dari	• Terbakar nya alang-alang dengan luas area terbakar ± 300 m2	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
					pembakaran oleh Warga	• Tidak ada korban jiwa maupun luka	lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan RT, RW dan warga setempat • Api dapat dipadamkan oleh warga setempat dengan cara manual
06 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cirendeu Jl. Saptadaya	Cimahi Selatan	Asal api diduga dari pembakaran oleh Warga	• Terbakar nya alang-alang dengan luas area terbakar ± 800 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman, pendinginan dan pendataan dengan menurunkan 2 unit pancar dengan 7 personil
08 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Ciseupan	Cimahi Selatan	Asal api diduga dari pembakaran sampah oleh warga	• Terbakarnya lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang kering dengan luas area terdampak ± 80 m² • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 1 unit

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							pancar dan 1 unit rescue beranggotakan 11 personil • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi Damkar Kota Cimahi dan Tagana
09 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Komplek Bukit Indah ResidentKp. Ciseupan	Cimahi Utara	Pembakaran Majun	• Terbakar nya alang-alang yang berada ditanah kosong milik KAMARUNG REGENCY dengan luas area terbakar ± 200 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan warga setempat • BPBD Kota Cimahi berama masyarakat melakukan pemadaman secara manual
10 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cirendeu Jl. Saptadaya	Cimahi Selatan	Asal api diduga dari pembakaran oleh Warga	• Terbakar nya alang-alang dengan luas area terbakar ± 600 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman, pendinginan dan pendataan dengan menurunkan 2 unit pancar dan 1 unit rescue beranggotakan 9 personil

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
12 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Lapangan Golf Brigif	Cimahi Tengah	Diduga oknum yang membuang puntung rokok	• Terbakarnya lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang dengan luas area terdampak ± 40 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • Pemadam Kebakaran Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 2 unit pancar dan 1 unit rescue beranggotakan 8 personil • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Satuan Brigif, dan Tagana
19 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Ibu Ganirah	Cimahi Selatan	Diduga oknum masyarakat yang melakukan pembakaran lahan	• Sebuah lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang dengan cepat terbakar; • Ada beberapa titik api yang merambat dikarenakan percikan api terbawa angin dengan luas area terdampak ± 6 ha;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi, Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dan Tagana melakukan pemadaman dengan menurunkan

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban jiwa maupun luka	3 unit pancar dan 1 unit rescue beranggotakan 20 personil • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, Polsek, Lurah Cibeber, dan Ketua RW setempat • Api sudah mulai padam pada pukul 15:40 WIB
19 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cireundeu	Cimahi Selatan	Diduga oknum masyarakat yang membakar sampah	• Terbakarnya area lahan kosong dengan luas area terbakar ± 70 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan dikarenakan titik api berada di tebing bukit • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah dan lebih waspada

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							terhadap lahan yang kering • Api sudah mulai padam pada pukul 15:15 WIB
19 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cibogo	Cimahi Selatan	Diduga pembakaran oleh oknum tidak bertanggung jawab	• Terbakarnya lahan kosong perbukitan yang banyak ditumbuhi alang alang dengan luas area terdampak tidak diketahui, dikarenakan api terus merambat terbawa angin • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi dibantu masyarakat setempat untuk melakukan pemadaman secara manual dengan menggunakan tongkat dan menaburkan tanah ke beberapa titik api yang terdampak • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Kasi Sapras, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Relawan, Ketua RW, dan masyarakat setempat • BPBD Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan lebih waspada terhadap lahan yang kering • Api sudah mulai padam pada pukul 17:40 WIB
19 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Sanghiang Pancanaka Hill	Cimahi Selatan	Diduga oknum masyarakat yang melakukan pembakaran lahan	• Terbakarnya lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang dengan cepat terbakar dengan luas area terdampak ± 600 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi dan Damkar Kota Cimahi melakukan pemantauan lokasi alang alang yang terbakar. Akses menuju lokasi titik api sulit dijangkau dengan kendaraan pemadam, dikarenakan titik api berada di atas bukit • BPBD Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Babinsa, KIC, dan warga setempat • Pukul 20:10 WIB jarak titik api menjauh dari pemukiman warga • Api sudah mulai padam pada pukul 21:25 WIB
20 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Sanghiang Pancanaka Hill	Cimahi Selatan	Diduga oknum masyarakat yang melakukan pembakaran lahan	• Terbakarnya lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang dengan cepat terbakar dengan luas area terdampak ± 600 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi dan Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 1 unit pancar • Pukul 13:16 WIB dalam pendinginan; • Api sudah mulai padam pada pukul 13:52 WIB

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
22 September 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Bukit Pasir Panji Cihapit	Cimahi Selatan	Diduga oknum masyarakat yang melakukan pembakaran lahan	• Terbakarnya alang-alang dan pohon bambu dengan luas area terdampak ± 8000 m2 • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, TAGANA, KSB Leuwigajah, Kapolsek Cimahi Selatan, Danramil, RT, RW dan masyarakat setempat; • BPBD Kota Cimahi bersama TAGANA, KSB Leuwigajah dan masyarakat setempat melakukan tindakan pemadaman secara manual. • Api mulai padam pada pukul 15.29 WIB

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Selasa, 01 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Mancong	Cimahi Selatan	Asal api belum diketahui	• Sebuah gudang penyimpanan majun terbakar dengan luas area terdampak ± 90 m2; • Tidak ada korban jiwa atau pun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi bekerja sama dengan BPBD Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 3 unit Pancar dan 2 unit Rescue; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan
Selasa, 01 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Sambi Sari	Cimahi Selatan	Pembakaran sampah oleh masyarakat	• Terbakarnya lahan kosong dengan luas area terbakar ± 35 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemadaman secara

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							manual; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak membakar sampah; • Api sudah mulai padam pukul 23:37 WIB
Rabu, 02 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Ciseupan Jl. Nikaragua	Cimahi Selatan	Asal api dari pembakaran sampah oleh oknum warga	• Sebuah lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang-alang terbakar dengan luas area terdampak ± 200 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi bekerja sama dengan personil BPBD Cimahi untuk melakukan pemadaman dengan menurunkan 1 unit pancar dan 1 unit rescue; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, dan Babinsa; • Api sudah mulai padam pukul 12:55 WIB

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Rabu, 02 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Ciuyah	Cimahi Utara	Asal api belum diketahui	• Sebuah lahan bambu terbakar dengan luas area terdampak ± 2.500 m2; • Kepulan asap menutupi sebagian akses jalan untuk warga melintas; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pemadaman secara manual dengan menaburkan tanah ke beberapa titik api; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan kebakaran dikarenakan ada beberapa titik api yang sulit dijangkau dan berada di kemiringan 80°; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan; • Api sudah mulai padam pukul 17:55 WIB

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Jumat, 04 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Pakuhaji	Cimahi Utara	Asal api belum diketahui	• Terbakarnya lahan kosong dan pohon bambu mlik Bpk. Baryat (65) dengan luas area terbakar ± 5000 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Dinas Sosial, TAGANA, Babinkamtibmas, Babinsa, RT dan RW setempat; • BPBD Kota Cimahi bekerja sama dengan TAGANA dan masyarakat sekitar untuk melakukan pemadaman secara manual; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan kebakaran dikarenakan ada beberapa titik api yang sulit dijangkau dan berada di kemiringan 80°; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							sampah atau lahan
Sabtu, 05 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Kolmas Komplek Bukit Mas	Cimahi Utara	Asal api belum diketahui	• Terbakarnya lahan kosong yang banyak ditumbuhi alang alang dengan luas area terdampak ± 100 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan
Minggu, 13 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Karya Bakti Kp. Pasir Kiara	Cimahi Utara	Pembakaran Sampah	• Sebuah lahan kosong dan kebun jamur milik Bpk. Rahya terbakar dengan luas area terdampak ± 160 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dengan menurunkan 3 unit pancar. • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							melakukan pembakaran sampah atau lahan. • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, dan Ketua RW 16.
Selasa, 15 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Legok Saat	Cimahi Utara	Pembakaran oleh warga yang tidak bertanggung jawab	• Terbakar nya kebun Bambu dan Alang-alang dengan luas area terdampak ± 10x5 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan TAGANA dan KSB Cipageran; • BPBD Kota Cimahi bersama TAGANA dan KSB Cipageran melakukan pemadaman secara manual; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak melakukan pembakaran

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							sampah atau lahan.
Selasa, 15 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Sapta Daya	Cimahi Selatan	Pembakaran oleh warga yang tidak bertanggung jawab	• Terbakarnya kebun Pisang dan Alang- alang dengan luas area terdampak ± 70x30 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan KSB Leuwigajah; • BPBD Kota Cimahi bersama KSB Leuwigajah melakukan pemadaman secara manual; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat sekitar untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau lahan.
Minggu, 20 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl Pasantren No. 81	Cimahi Utara	Belum diketahui	• Terbakarnya gudang mebeul milik Bpk. Dadang dengan Luas Area terbakar 15x20 m2;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban jiwa maupun luka.	berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, RW setempat dan Babinsa; • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 3 unit pancar dan 1 unit rescue.
Minggu, 20 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cireundeu	Cimahi Selatan	Pembakaran oleh warga yang tidak bertanggung jawab	• Terbakar nya Alang-alang dan pohon bambu dengan luas area terbakar 200 x 100 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan titik api di lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi memberikan himbauan kepada warga sekitar agar tidak membakar lahan di musim kemarau.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Senin, 21 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Pacinan No. 29	Cimahi Tengah	Pembakaran Dari sisa bangunan	• Terbakar ruang kosong di lantai 4 SMAN 5 Cimahi dengan luas area yang terdampak 8x8 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian dengan menurunkan 3 unit pancar dan 1 unit rescue; • BPBD Kota Cimahi melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.
Senin, 21 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Gunung letik Cireundeu	Cimahi Selatan	Pembakaran sampah	• Terbakarnya sebagian lahan penimbunan sampah dengan luas area terdampak 200 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pemadaman secara manual dan melakukan pemantauan titik api di lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							Berkoordinasi dengan KSB Leuwigajah.
Selasa, 22 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cijerah Tegal Kawung Cireundeu	Cimahi Utara	Belum diketahui	• Terbakarnya sebagian lahan kebun bambu dan area tempat pemakaman dengan luas area terdampak 500 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi bersama masyarakat melakukan pemadaman secara manual dan melakukan pemantauan titik api di lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi Berkoordinasi dengan masyarakat sekitar.
Selasa, 22 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Mancong No. 168	Cimahi Selatan	Belum diketahui	• Terhambatnya arus lalu lintas di ruas tol dikarenakan asap pekat dari kebakaran, sehingga menyebabkan kemacetan di ruas tol Purbaleunyi KM 130 sehingga di lakukan penutupan	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • Damkar Kota Cimahi bersama Damkar Kab. Bandung, Damkar

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						sementara oleh pihak yang berwenang; • 2 orang korban : 1 orang meninggal dunia WNA (identitas belum diketahui) dan 1 orang petugas Damkar Kab. Bandung luka ringan; • 1 unit Alat berat Diesel Hammer terbakar; • 1 unit mobil Daihatsu espas nopol D 1323 NF milik Bpk. Suparman terbakar • 3 buah Torn (@5100 L) milik warga Rw 01 terbakar; • Sawah dengan luas area ± 192 m terbakar;	Kota Bandung, Damkar Kab. Bandung Barat dan pihak Pertamina melakukan pemadaman dan pendinginan; • Melakukan evakuasi terhadap korban; • Polres Kota Cimahi melakukan penutupan area sekitar kejadian untuk mengatasi hal-hal yang dapat memicu kembali kebakaran; • Polres Kota Cimahi, BPBD, Unsur TNI dan masyarakat akan membuka posko siaga sekitar lokasi kejadian.
Kamis, 24 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Jl. Raya Kerkop Blok Ciseupan	Cimahi Selatan	Belum diketahui	• Terbakarnya alang-alang dengan luas area terbakar ± 1000 m2; • Terdampak 2 rumah warga yang dikelilingi oleh alang alang; - Bpk. Pendi (66)th 1 kk 2	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi, Damkar Kota

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						jiwa - Bpk. Deni (31)th 1 kk 4 jiwa • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	Cimahi dan TAGANA berkoordinasi dengan RW dan masyarakat setempat; • BPBD Kota Cimahi, Damkar Kota Cimahi dan TAGANA melakukan pendinginan di lokasi kejadian.
Kamis, 24 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cireundeu	Cimahi Selatan	Belum diketahui	• Terbakarnya lahan kebun singkong dan lahan bekas pembuangan sampah dengan luas area terbakar 5000 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Kelurahan dan masyarakat setempat • BPBD Kota Cimahi melakukan pemantauan titik api di lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							sampah atau lahan.
Rabu, 30 Oktober 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Kp. Sukamaju	Cimahi Tengah	Asal api dari arus pendek listrik	• 3 unit kontrakan milik Ibu Karnasih terbakar dengan luas area ± 36 m2; • Korban terdampak penghuni kontrakan Bpk. Heru, Bpk. Risan, dan Bpk. Sutikno; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• Damkar Kota Cimahi melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi kejadian dengan menurunkan 4 unit pancar dan 1 unit rescue; • BPBD Kota Cimahi melakukan koordinasi dengan Damkar Kota Cimahi dan Kelurahan Cigugur Tengah. • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik untuk korban penghuni kontrakan berupa : 1. Tikar 3 buah 2. Air Mineral Cup 3 dus 3. Mie Instan 3 dus

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							4. Minyak Goreng 3 liter 5. Pakaian (Daster) 5 buah 6. Pakaian (Kaos Oblong) 5 buah 7. Selimut 6 lembar 8. Perlengkapan Sekolah 2 paket 9. Lauk Pauk 6 paket 10. Tambahan Gizi 6 paket 11. Makanan Siap Saji 6 paket
Sabtu, 16 November 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Jl. Ibu Ganirah	Cimahi Selatan	Diduga dari puntung rokok	• Terbakar nya 1 rumah milik Bpk. Hudayasumarya (Alm) yang dihuni oleh 3 kk 5 jiwa dengan luas area terbakar ± 350 m2; • Korban luka bakar a.n Bpk. hendra (62).	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, PMI, Babinkamtibmas, Babinsa, Pihak Kelurahan, RT dan RW setempat; • Damkar Kota Cimahi melakukan tindakan pemadaman, pendinginan dan pendataan; • Korban luka bakar di

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							evakuasi ke Rumah Sakit Dustira.
Senin, 18 November 2019	**KEBAKARAN**	LAHAN	Kp. Cileuweung	Cimahi Utara	Pembakaran oleh oknum warga yang tidak bertanggung jawab	• Terbakarnya lahan bambu milik Bapak Duyeh dengan luas area terbakar ± 150 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi bekerja sama dengan Tagana, KSB Cipageran, Zarambah, untuk melakukan pemadaman secara manual; • Api sudah mulai padam pukul 21:09 WIB.
Rabu, 11 Desember 2019	**KEBAKARAN**	BANGUNAN	Komplek PJKA	Cimahi Tengah	Diduga dari konsleting listrik pada saat pengisian daya baterai handphone	• Terbakarnya 1 unit rumah milik Bpk. Olih (45) 1 KK 5 jiwa dengan luas area terbakar ± 4x7 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, pihak Kepolisian, TNI dan pihak Kelurahan;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							• Damkar Kota Cimahi melakukan tindakan pemadaman dan pendinginan dengan menurunkan 3 unit pancar dan 1 unit rescue beranggotakan 12 personil.

Keterangan: -
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-47a. Tabel Tambahan Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

No	Kecamatan	Tanggal/Lokasi	Dampak			Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Fisik	Jiwa	Penyebab	Mengungsi	Meninggal	
1	Cimahi Utara	2 Desember 2019/Jalan Pasantren Cibabat	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	4.000.000
2		26 April 2019/ Cikendal Cipageran	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	275.000.000
3		26 April 2019/ Kp Cileuwung Cipageran	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	8.500.000
4		10 Mei 2019/ Kp Pakuhaji Cipageran	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	3.800.000
5	Cimahi Tengah	13 Januari 2019 / Jl KH Usman Dhomiri Padasuka	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	17.250.000
6		26 April 2019 / Margamulya Kel Cimahi	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	5.000.000

No	Kecamatan	Tanggal/Lokasi	Dampak			Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp.)
			Fisik	Jiwa	Penyebab	Mengungsi	Meninggal	
7	Cimahi Selatan	15 Januari 2019 / Gg Sukasari Kel Cibeureum	TPT	-	Hujan Intensitas Tinggi	-	-	16.000.000

Keterangan: -
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

Tabel-47b. Tabel Tambahan Bencana Alam Tanah Longsor dan Gempa Bumi, Korban, dan Kerugian
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2020

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
13 Januari 2019	TANAH LONGSOR		Jl. KH. Usman Domiri	Cimahi Tengah	Luapan air selokan yang merembes ke dalam rumah dipicu hujan deras	• Longsor dengan luas area terdampak ± 30 m2 • Sebanyak 4 rumah terdampak roboh bagian belakang milik Bapak Sukirno (42) 1 KK 4 jiwa, Bapak Endang (56) 1 KK 3	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Lurah

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						jiwa, Bapak Partu (35) 1 KK 4 jiwa, Bapak Warso (64) 1 KK 3 jiwa • Tidak ada korban jiwa maupun luka	Padasuka dan RT RW setempat;
15 Januari 2019	TANAH LONGSOR		Gg. Sukasari IV Dalam	Cimahi Selatan	Kontur tanah yang tidak stabil serta dipicu oleh hujan	• Tembok penahan tanah ambruk dengan luas area terdampak ± 3 x 10 m2 • 3 rumah berpotensi roboh terbawa longsor • Material longsor menutupi aliran sungai citopeng • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi mendirikan tenda gulung untuk menutupi tanah yang berpotensi longsor; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Cibeureum, Babinsa dan RT RW setempat;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
17 Februari 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Lembur Sawah	Cimahi Selatan	Pendangkalan Drainase	• Robohnya kirmir di RT. 05 RW. 12 sepanjang ±50 m2 mengakibatkan l limpasan air; • 2 rumah milik Ibu Sopiah (58)th dan Bpk. Gugun Haryana (38)th yang berada di Rt. 06 terdampak longsor susulan; • 1 mesjid al-amanah terdampak longsoran; • Tidak ada korban jiwa maupun luka;	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD kota cimahi berkoordinasi dengan kelurahan, Babinsa, Rt dan Rw setempat; • BPBD kota cimahi memberikan bantuan logistik;
26 April 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Gombong Ciawitali I	Cimahi Utara	Kontur tanah yang tidak stabil serta dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi selama ± 1,5 jam	3 unit rumah terdampak material longsoran dengan rincian sebagai berikut : • 1 unit rumah milik Bapak Suyono (54) Rusak Berat tertimbun	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar Kota

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						longsoran dengan luas kerusakan sebesar 80 m2, data korban terdampak sebagai berikut: 1. Suyono 54 Luka Ringan 2. Kimayanti (Wawa) 50 Luka Ringan 3. Suci 17 Luka Ringan 4. Irma 15 Meninggal Dunia 5. Husen 35 Luka Ringan 6. Kania 8 Luka Ringan 7. Andri 30 Selamat 8. Kekey 8 Bln Meninggal Dunia • 1 unit kontrakan rusak ringan milik bapak Kardono terdiri 2 kamar dihuni oleh :	Cimahi, Tagana, PMI, RT, RW setempat, Bhabinkantibmas dan Bhabinsa, Pj Sekda, Plt. Satpol PP Damkar, Camat Cimahi Utara, Polsek Cimahi; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik; • Korban dievakuasi ke Rumah Sakit, tercatat 6 orang luka ringan dan 2 orang meninggal dunia;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
26 April 2019	TANAH LONGSOR		Margamulya	Cimahi Tengah	Kontur tanah yang tidak stabil serta dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi selama ± 1,5 jam	• Benteng makam ± 12 m roboh dan menimpa 1 unit rumah milik Bapak Deni Sukrisman (55)	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, RT dan RW setempat
26 April 2019	TANAH LONGSOR		Cikendal	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah dipicu pengikisan air sungai dan peningkatan curah hujan dengan intensitas tinggi	• 1 ruas kirmir roboh sepanjang ± 8 m2 diikuti 1 unit rumah ambruk yang berada diatas kirmir. Rumah tersebut milik Bapak Wawan rusak pada bagian kamar mandi, kamar tidur, dan dapur dengan luas area terdampak ± 8 x 5 m; • Korban terdampak : Bapak Wawan 4 KK 10	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan KSB Cipageran dan RT RW setempat; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						Jiwa Diungsikan ke rumah saudara	
26 April 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Cileuweung	Cimahi Utara	Kontur tanah yang tidak stabil serta dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi	• 1 unit rumah milik Ibu Arah (100) tertimpa longsoran tanah kebun milik Bpk. Rudi, menimpa bagian samping tembok rumah dengan panjang longsoran ±7 m tinggi ± 3 m; • Korban terdampak 1 KK 2 Jiwa	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Damkar Kota Cimahi, Tagana, RT dan RW setempat;
10 Mei 2019 00:05 WIB	TANAH LONGSOR		Kp. Paku Haji	Cimahi Utara	Kontur tanah yang labil disertai hujan dengan intensitas tinggi	• Kirmir bagian belakang rumah milik Bpk. Asep (49) roboh dengan luas area terdampak ± 11 x 2 m2 • Berpotensi roboh susulan dikarenakan	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkordinasi

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						adanya retakan di bagian benteng rumah • Tidak ada korban jiwa maupun luka	dengan Tagana, KSB Cipageran, dan RW setempat • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik berupa 30 karung
10 Mei 2019 13:00 WIB	TANAH LONGSOR		Kp. Paku Haji	Cimahi Utara	Kontur tanah yang labil	• Kirmir bagian belakang rumah milik Bpk. Caca (48) roboh dengan luas area terdampak ± 5 x 2 m2 • Berpotensi longsor susulan jika hujan kembali turun • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Tagana, KSB Cipageran, dan RW setempat • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik berupa 60 karung dan 1 tenda gulung

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Rabu, 06 November 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Cibaligo	Cimahi Utara	Kontur tanah yang tidak stabil dipicu luapan air dari selokan	• 1 bidang tanah longsor dengan luas area terdampak ± 2 x 6 m2; • Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkordinasi dengan Tagana, KSB Cipageran, dan Ketua RW setempat; • Tanah yang terdampak milik Perumahan Rosali dan akan dibangun pondasi
Senin, 02 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Jl. H. Haris	Cimahi Tengah	Erosi tanah oleh air hujan dan air sungai	• 1 buah pohon alpukat tumbang dengan diameter ± 45 cm • 1 unit rumah milik Ibu Euis (61) tertimpa pohon tumbang dan mengalami kerusakan bagian atap kamar mandi	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pemilik rumah, warga

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						dengan luas area terdampak ± 4x5 m2; • Kandang unggas (Ayam) rusak tertimpa pohon tumbang dengan luas area terdampak ± 1x2 m2; • Benteng bagian belakang rumah dengan panjang 3 meter roboh terimpa pohon tumbang; • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	setempat, RT, RW, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, dan Pihak Kelurahan Baros; • BPBD kota cimahi bersama DAMKAR kota cimahi, dan TAGANA kota cimahi melakukan pemotongan dan pembersihan pohon tumbang.
Senin, 02 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Pesantren	Cimahi Utara	Erosi tanah oleh air hujan dan air sungai	a) Halaman belakang rumah Ibu Ai (44) mengalami longsor yang mengakibatkan : • Longsoran menutupi badan selokan • Menyebabkan retakan pada dinding rumah milik Ibu Nining (51)	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pemilik rumah dan warga setempat;

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Air meluap masuk ke rumah Ibu Nining b) Terdapat potensi longsor susulan dan rumah roboh c) Tidak ada korban jiwa maupun luka	• BPBD kota cimahi memberikan bantuan logistik berupa : 1. Tenda Gulung 1 Lembar 2. Karung 50 kg 50 Lembar
Selasa, 17 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Cileutik	Cimahi Utara	Erosi tanah oleh air hujan	• 1 ruas pondasi jalan longsor dengan luas terdampak ± 1.5x1 m2; • 1 unit rumah milik Bapak Rudi (1kk 4 jiwa) berpotensi tertimpa longsoran	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Tagana, KSB Cipageran, dan RT setempat; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik berupa 1 buah tenda gulung. • Diperlukan assessment

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
							penaksiran kerusakan dan kerugian terdampak bencana; • Diperlukan assessment mitigasi bencana dalam upaya pencegahan longsor lanjutan
Sabtu, 21 Desember 2019	TANAH LONGSOR	KIRMIR ROBOH	Kp. Cileutik	Cimahi Utara	Hujan dengan Intensitas tinggi dan kondisi tanah yang gembur	Terjadi longsoran kirmir di akses jalan menuju MCK warga, dengan lebar Longsor ± 2 m², panjang ± 3 m², dan tinggi ± 2 m².	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan KSB Cipageran dan Tagana; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik 40 karung
Minggu, 29 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Cileutik	Cimahi Utara	Erosi tanah dipicu hujan	• Longsoran kirmir dengan luas area terdampak ± 5x2 m2; • Berpotensi longsor kirmir susulan hampir mengenai rumah milik	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi mendistribusikan 30

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						Bpk. Rudi • Tidak ada Korban jiwa maupun luka	lembar karung; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Sawah Barat III	Cimahi Utara	Erosi tanah oleh air hujan	• Pondasi halaman Mushola Al-Ul Ulum ambruk dengan lebar longsoran ± 2,5 M2 dan panjang longsoran ± P 6 M2; • Bepotensi longsor susulan	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan warga setempat; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Puri Cipageran Indah I	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah oleh air hujan.	• Tanah milik DIPENDORAYA (wil. RW.06) Longsor dengan panjang ± 10 m^2 dan Tinggi 15 m^2; • Material longsoran dan Batang Bambu menutupi badan sungai; • Tidak ada korban luka maupun jiwa	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Tagana Dan Rw.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Cileutik	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah oleh air hujan.	• Halaman belakang milik Bpk. Dede 3 KK 14 jiwa longsor dengan panjang ± 25 m dan lebar ± 15 m; • Berpotensi terjadinya longsor susulan; • 1 unit kandang kambing 1x5 m roboh terbawa longsor ; • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Tagana Dan RT.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Lebak Saat	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah oleh air hujan.	• Tanah kebun milik Bpk Asep (40) longsor dengan panjang 15 m^2; • Material longsoran menimpa rumah milik : 1. Bpk. Yadi (43) 1 KK 4 Jiwa bagian dapur dengan luas ± 6x3 m^2 2. Bpk. Asep Wahyudin (40) 1 KK 3 jiwa bagian dapur dengan luas ± 9x3 m^2	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD KOTA CIMAHI berkoordinasi dengan pihak Tagana, KSB, RT dan RW setempat; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban luka maupun jiwa	
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Komplek Bukit Cipageran	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah oleh air hujan.	• Akses jalan ke rumah warga terhambat milik : 1. Bpk. Nandang (60) 2 KK 12 jiwa 2. Bpk. Cece Mulyani (56) 2 KK 10 jiwa • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; ♣ BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Kelurahan, warga dan RT setempat.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Pondok Cibaligo	Cimahi Utara	Erosi tanah oleh air hujan dari saluran pembuangan yang bocor	• Bagian belakang rumah milik Bpk. Karman (48) 1 KK 4 jiwa longsor dengan panjang 12 m^2, tinggi 15 m^2, dan lebar 3 m^2 • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Tagana, KSB, RT dan RW setempat; • BPBD Kota Cimahi memberikan bantuan logistik.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Komplek Cipageran Asri	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah dipicu oleh air hujan.	• TPT kebun Ny. Neneng (37) Ambrug dengan Panjang ± 11 m² dan tinggi ± 2 m² • Tertutupnya badan jalan komplek Cipageran asri Blok B5 No. 4/6 oleh material longsoran • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Tagana, KSB, RT dan RW setempat.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Kp. Bobojong	Cimahi Utara	Erosi tanah oleh air hujan.	• Material longsoran menutupi aliran selokan dengan luas area terdampak ± 15x6 m² • 3 unit rumah berpotensi terbawa longsor susulan : 1. Rumah milik Bpk. Yanyan 1 KK 5 jiwa 2. Rumah milik Ibu. Misri 1 KK 3 jiwa 3. Rumah milik Bpk. Asep 1 KK 3 jiwa	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan komunitas Zarambah.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						• Tidak ada korban luka maupun jiwa.	
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Karya Bakti Kp. Pasir Kiara	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah oleh air hujan.	• Tanah milik Bpk. Ewon yang dijadikan kandang domba oleh Bpk Rahmat terjadi longsor dengan tinggi ± 15m² dan lebar ± 10 m² dan akan berdampak longsor susulan ke rumah bagian belakang milik Bpk. H. Setia Kusbaran • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan pihak Tagana, KSB, RT dan RW setempat.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Kenanga Kp. Sukamaju	Cimahi Tengah	Erosi tanah oleh air hujan.	• 1 ruas jalan setapak longsor dengan panjang 2 m dan tinggi 1,5 m menimpa sebuah rumah; • Rumah terdampak longsoran dihuni oleh	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi melakukan pendistribusian logistik

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						Irman Muhamad (25) 1 KK 2 jiwa dan Irpan Sunarya (28) 1 KK 3 jiwa; • Penghuni rumah diungsikan ke rumah orang tuanya; • Terdapat potensi longsor susulan; • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	bersama Wali Kota Cimahi; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, Kelurahan, RT, RW dan warga setempat.
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Jl. Mukodar Selatan	Cimahi Selatan	Erosi kirmir oleh air sungai.	• 1 ruas kirmir roboh menutupi badan sungai; • Tidak ada korban luka maupun jiwa.	Pihak PLN dan warga setempat melakukan pembersihan material
Selasa, 31 Desember 2019	TANAH LONGSOR		Komplek PCI Blok A	Cimahi Utara	Pelemahan kontur tanah dipicu oleh air hujan	• longsoran tanah di RT. 01 RW. 26 dengan panjang ±12m² tinggi ±10 m² yang berdampak ke kebun milik Bpk. Opik (35) yang berada di wilayah RT. 05 RW. 04, dan tanah longsoran	• BPBD Kota Cimahi melakukan assessment kaji cepat ke lokasi kejadian; • BPBD Kota Cimahi berkoordinasi dengan KSB Cipageran dan RW setempat.

Tanggal Kejadian	Jenis Bencana	Keterangan	Jalan	Kecamatan	Penyebab	Dampak	Penanggulangan Kedaruratan
						tersebut menimpa sebagian kali (selokan) yang berada dibawah. • Berpotensi longsor susulan yang akan berdampak ke rumah milik Bpk. Wawan (45) yang berada di wilayah RT 01 RW. 26. • Tidak ada korban jiwa maupun luka.	

Keterangan: -
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2019

LAMPIRAN IV

PETA SPASIAL

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020

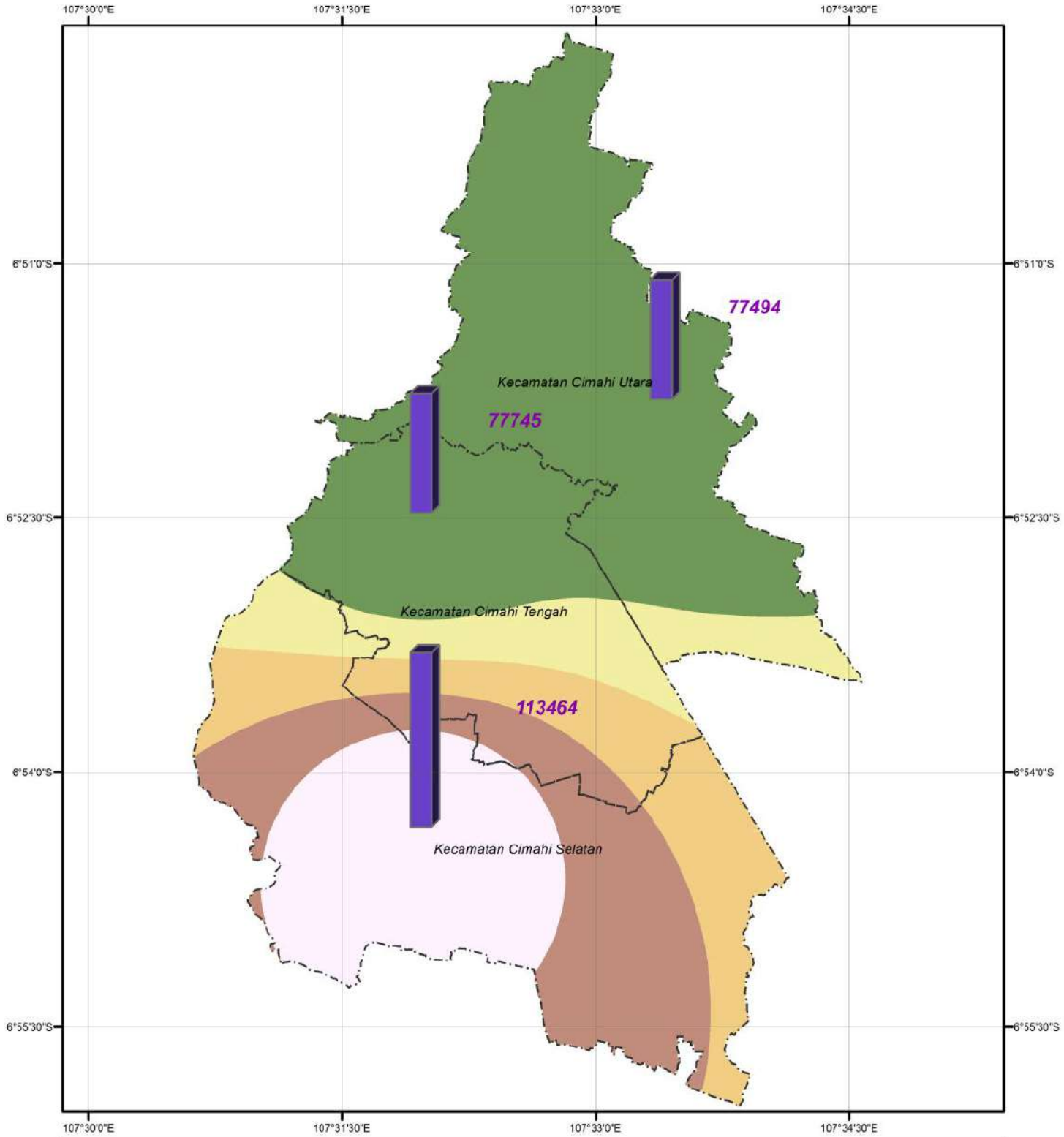

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA RANGE TIMBULAN SAMPAH KOTA CIMAHI

Legenda :

Batas Kecamatan

Range Timbulan Sampah (kg/hari) :

- 77.494,12 - 84.688,03
- 84.688,03 - 91.881,94
- 91.881,94 - 99.075,84
- 99.075,84 - 106.269,75
- 106.269,75 - 113.463,66

N W E S

1:54.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 KM

Indeks Lokasi :

CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

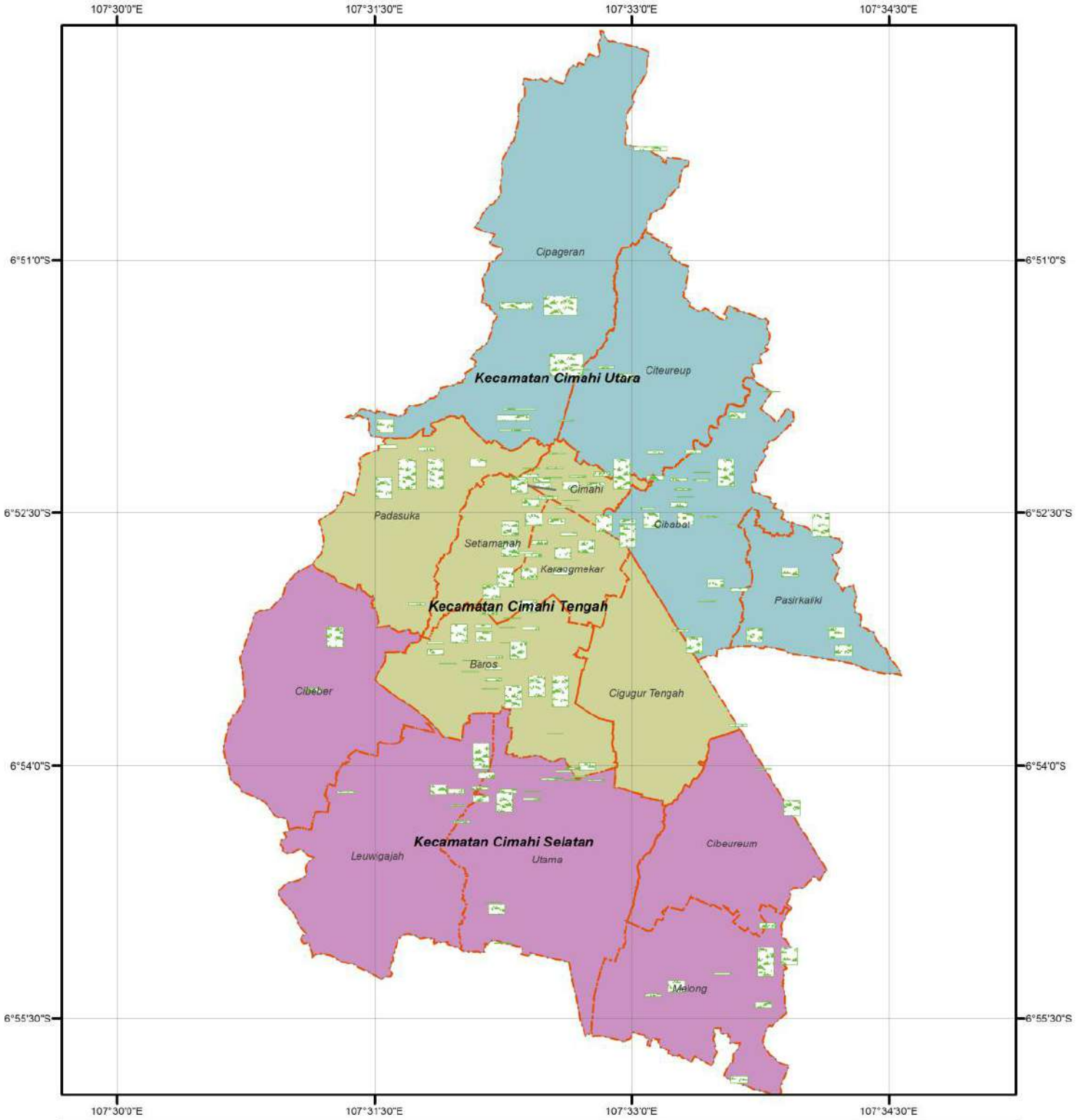

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA SEBARAN TAMAN LINGKUNGAN KOTA CIMAHI

Legenda :

- Kecamatan Cimahi Selatan
- Kecamatan Cimahi Tengah
- Kecamatan Cimahi Utara
- Batas Kelurahan
- *Taman Lingkungan Kota Cimahi*

N W E S

1:54.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 KM

Indeks Lokasi :

CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

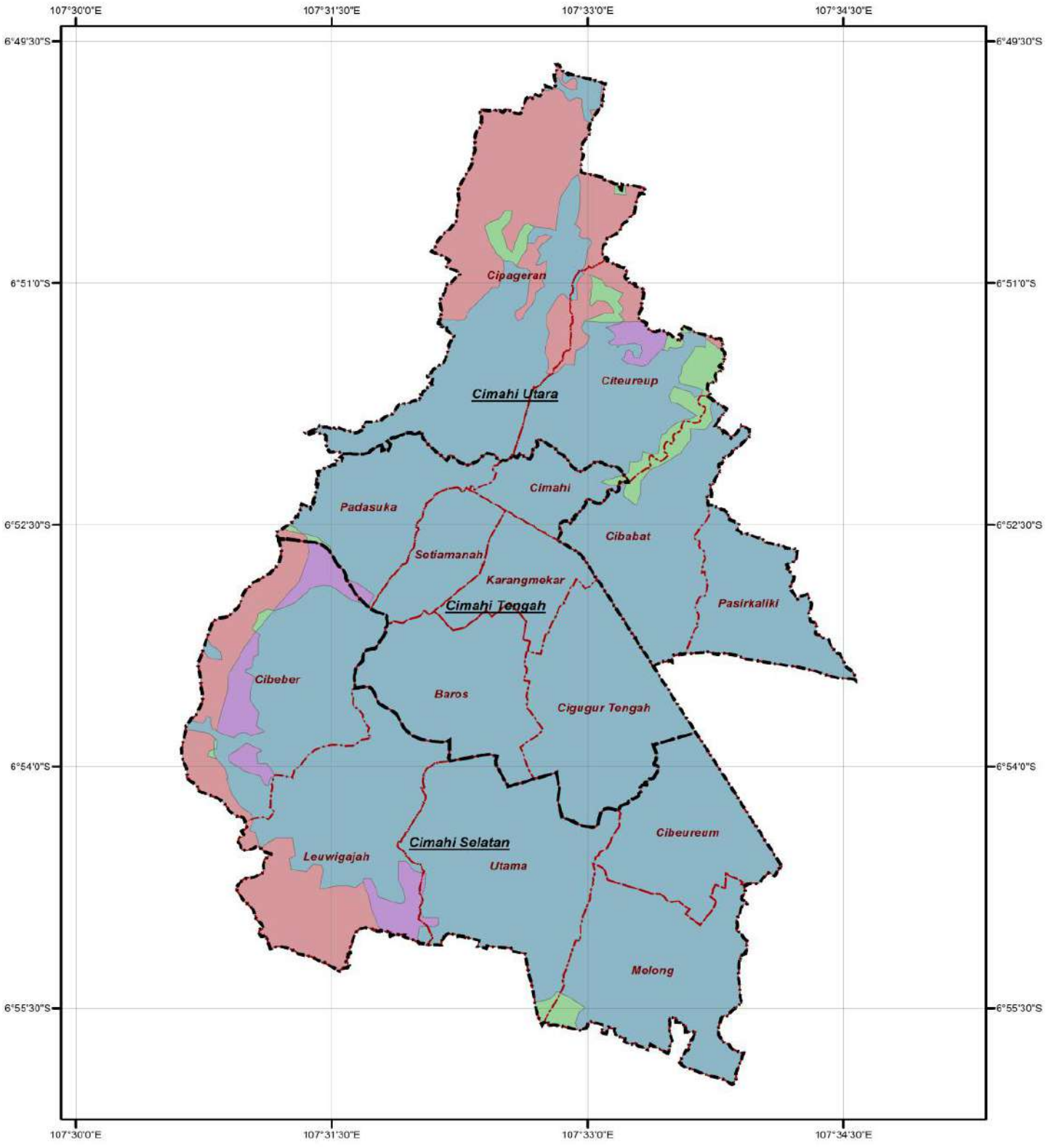

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA LAHAN KRITIS KOTA CIMAHI

Legenda :

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Lahan Kritis Kota Cimahi

- Agak Kritis
- Kritis
- Potensial Kritis
- Sangat Kritis

N
W E
S

1:54.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 KM

Indeks Lokasi :

CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

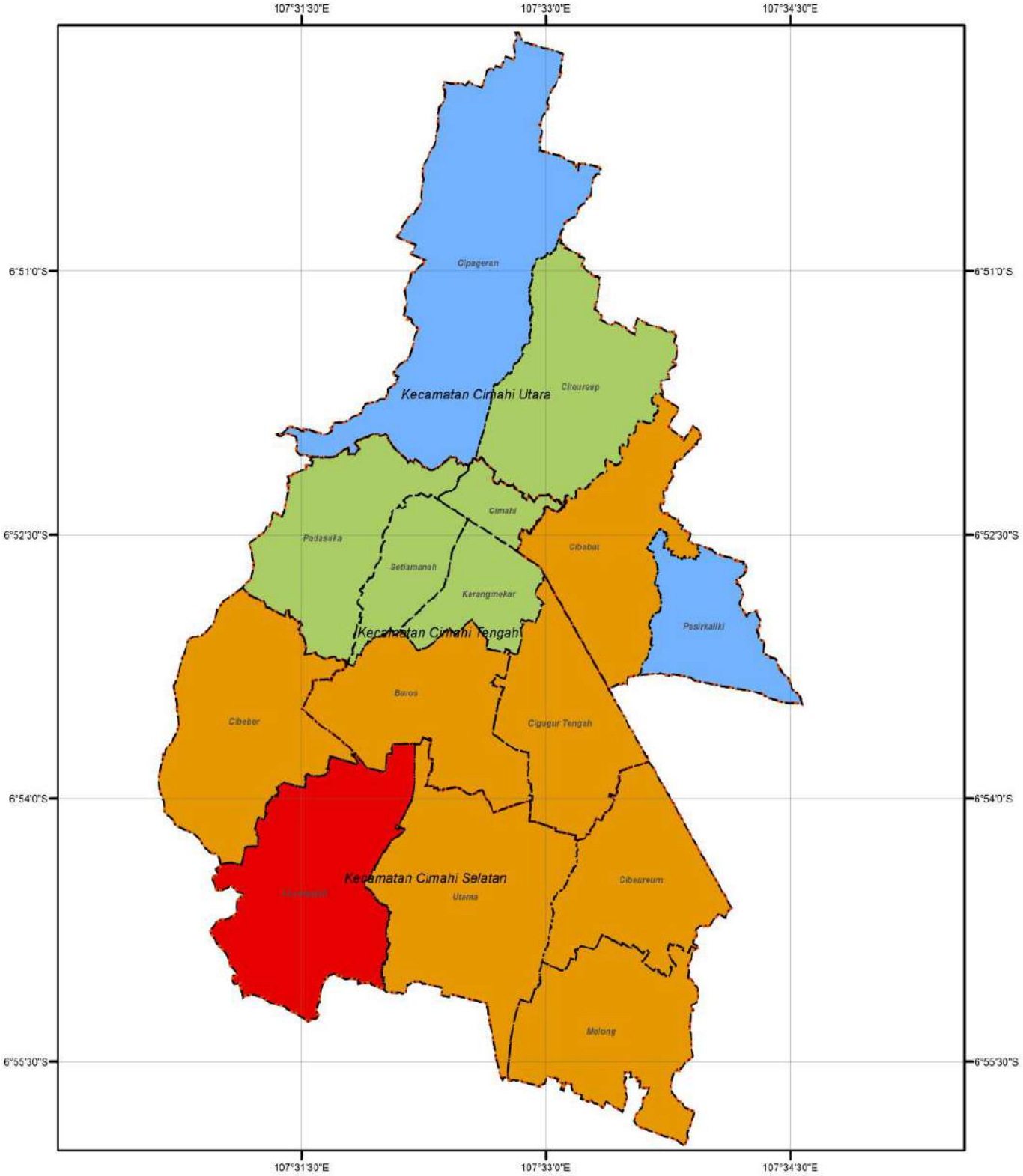

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA PENURUNAN MUKA AIR TANAH KOTA CIMAHI

Legenda :

- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

Penurunan Muka Air Tanah : (Hasluti, 2017)

- Aman
- Rawan
- Kritis
- Rusak

N
W E
S

1:54.000

0 0,2 0,4 0,8 1,2 1,6 KM

Indeks Lokasi :

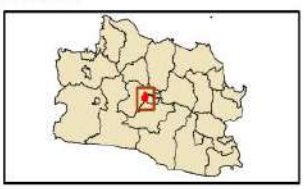

CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

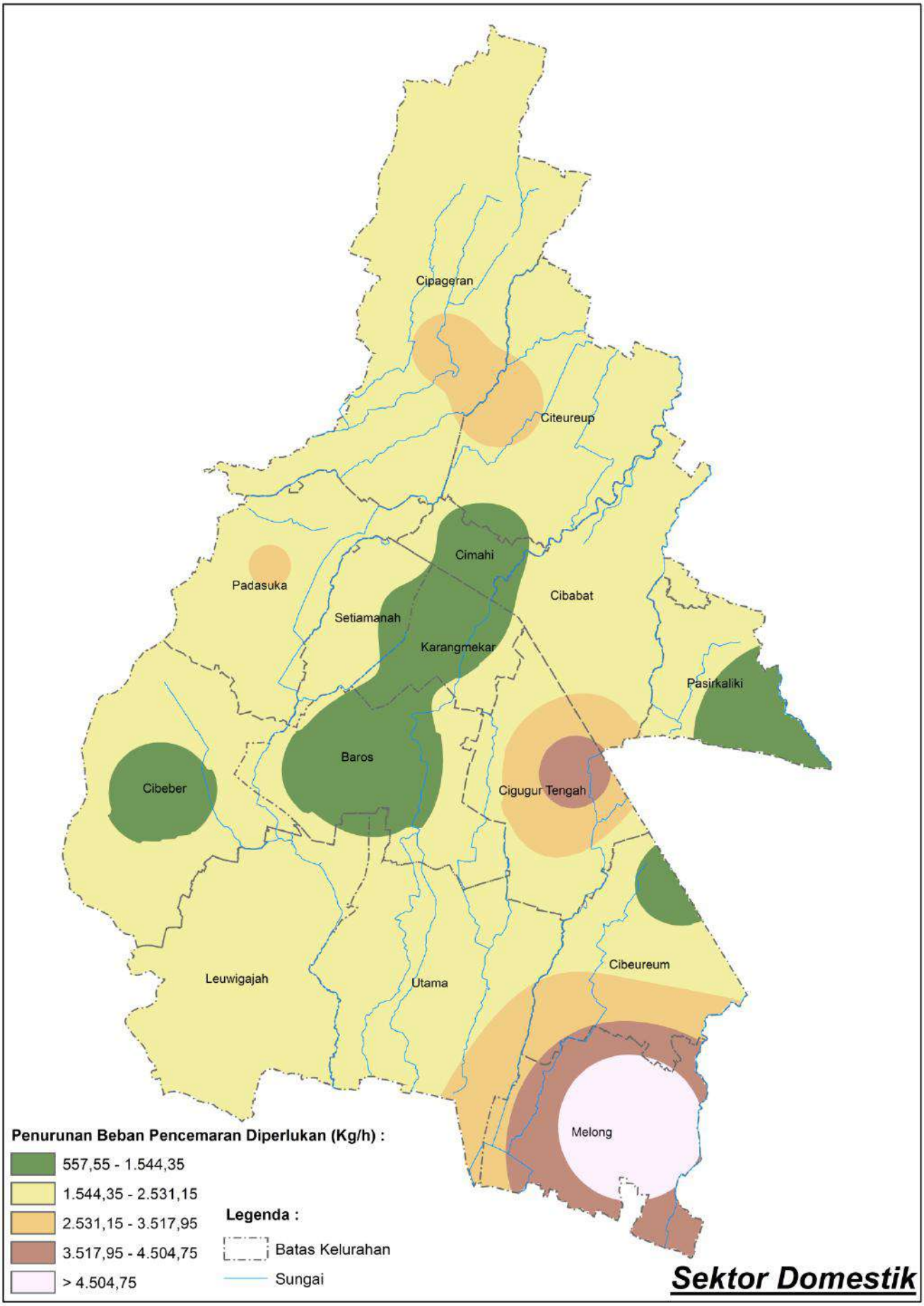
Cipageran
Citeureup
Cimahi
Padasuka
Cibabat
Setiamanah
Karangmekar
Pasirkaliki
Baros
Cibeber
Cigugur Tengah
Cibeureum
Leuwigajah
Utama
Melong
Penurunan Beban Pencemaran Diperlukan (Kg/h) :
557,55 - 1.544,35
1.544,35 - 2.531,15
2.531,15 - 3.517,95
3.517,95 - 4.504,75
> 4.504,75
Legenda :
Batas Kelurahan
Sungai
Sektor Domestik

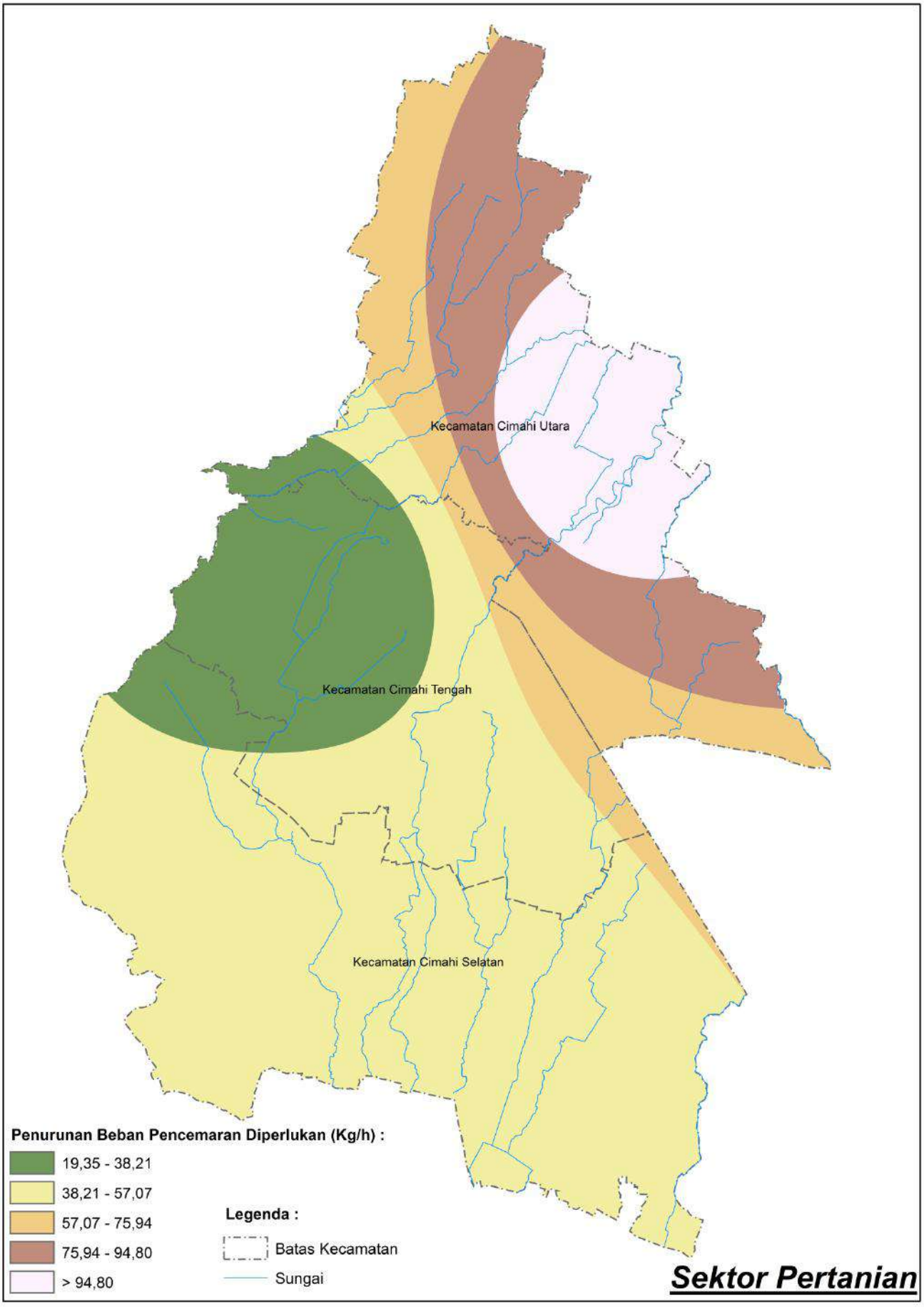
Kecamatan Cimahi Utara
Kecamatan Cimahi Tengah
Kecamatan Cimahi Selatan
Penurunan Beban Pencemaran Diperlukan (Kg/h) :
19,35 - 38,21
38,21 - 57,07
57,07 - 75,94
75,94 - 94,80
> 94,80
Legenda :
Batas Kecamatan
Sungai
Sektor Pertanian

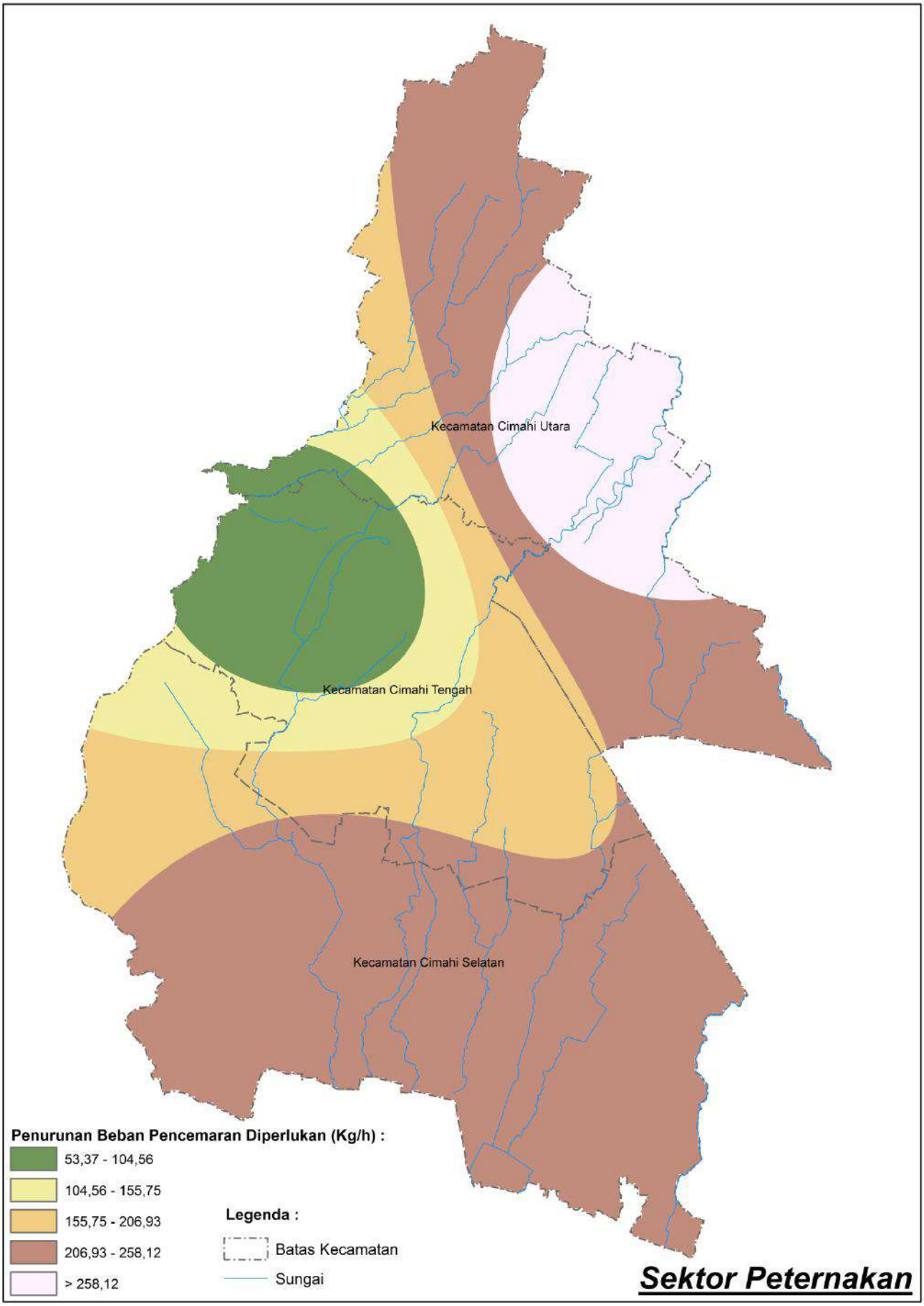
Kecamatan Cimahi Utara
Kecamatan Cimahi Tengah
Kecamatan Cimahi Selatan
Penurunan Beban Pencemaran Diperlukan (Kg/h) :
53,37 - 104,56
104,56 - 155,75
155,75 - 206,93
206,93 - 258,12
> 258,12
Legenda :
Batas Kecamatan
Sungai
Sektor Peternakan

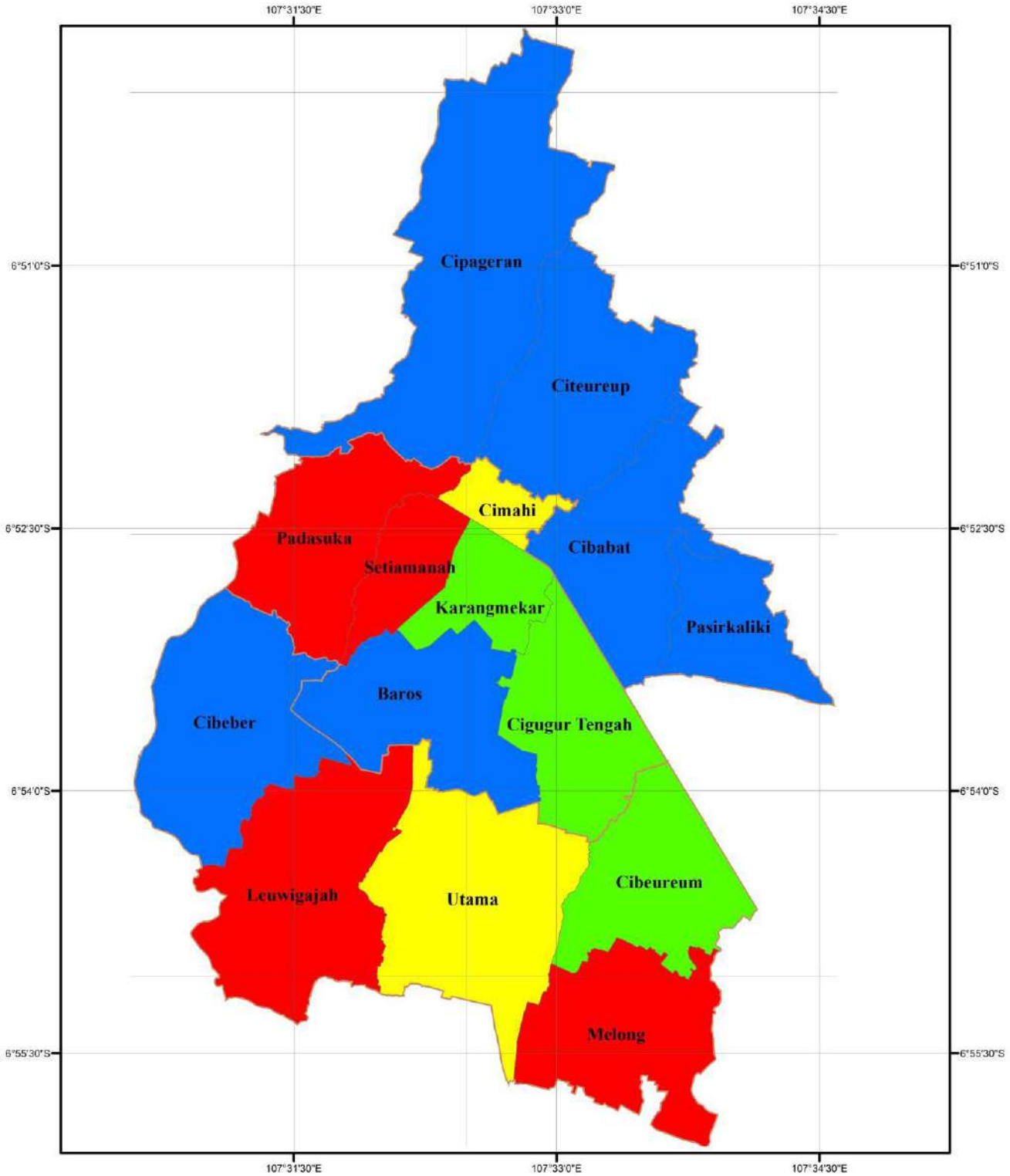

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA AREA BERISIKO LIMBAH DOMESTIK

Keterangan

1 Risiko Sangat Rendah
2 Risiko Rendah
3 Risiko Tinggi
4 Risiko Sangat Tinggi

N W E S

1:51.000

0 0,1750,35 0,7 1,05 1,4 KM

Indeks Lokasi :

CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA CIMAHI

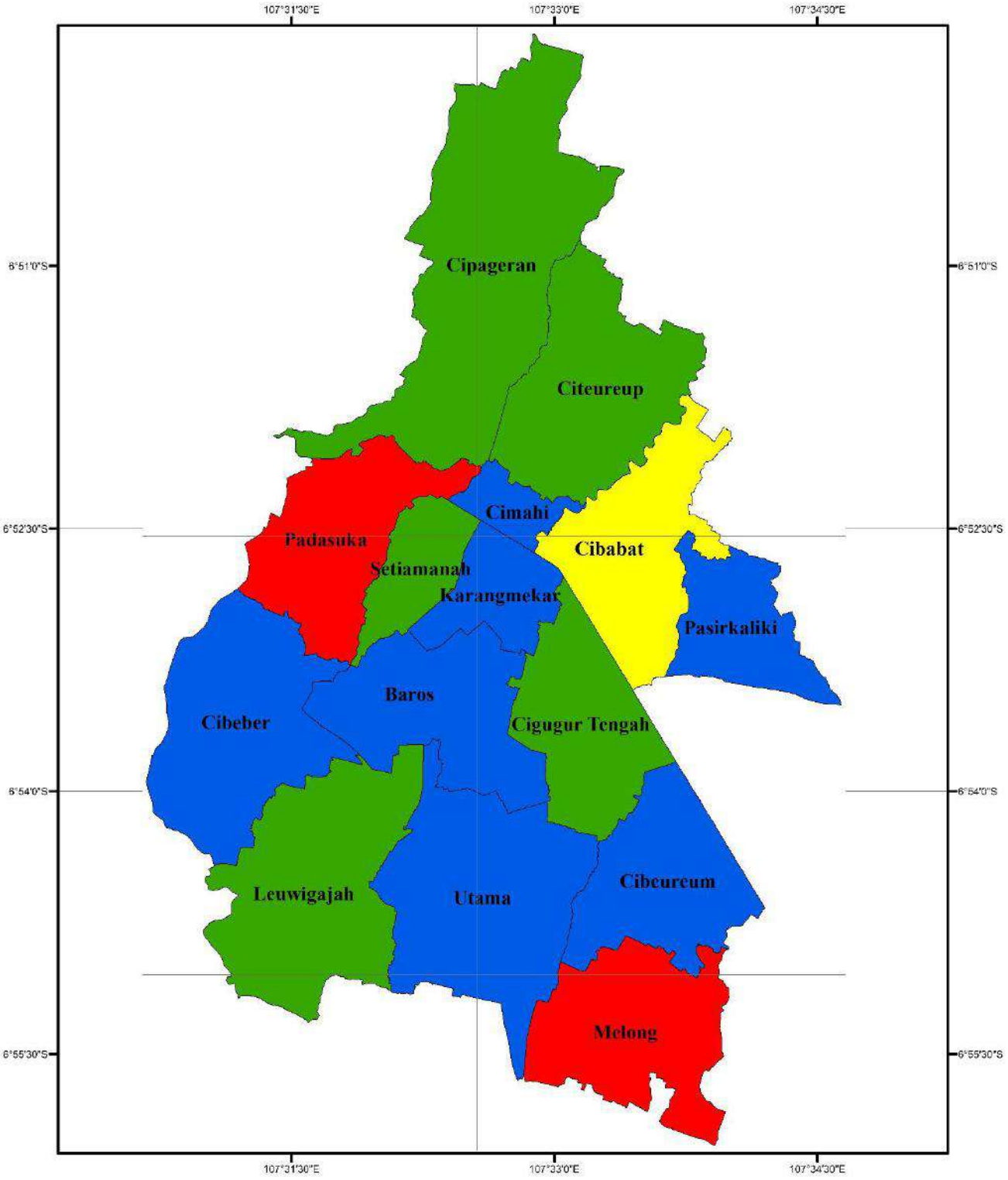

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA AREA BERISIKO DRAINASE

Keterangan

1 Risiko Sangat Rendah
2 Risiko Rendah
3 Risiko Tinggi
4 Risiko Sangat Tinggi

N
W E
S

1:51.000

0 0,175 0,35 0,7 1,05 1,4 (KM)

Indeks Lokasi :

CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA CIMAHI

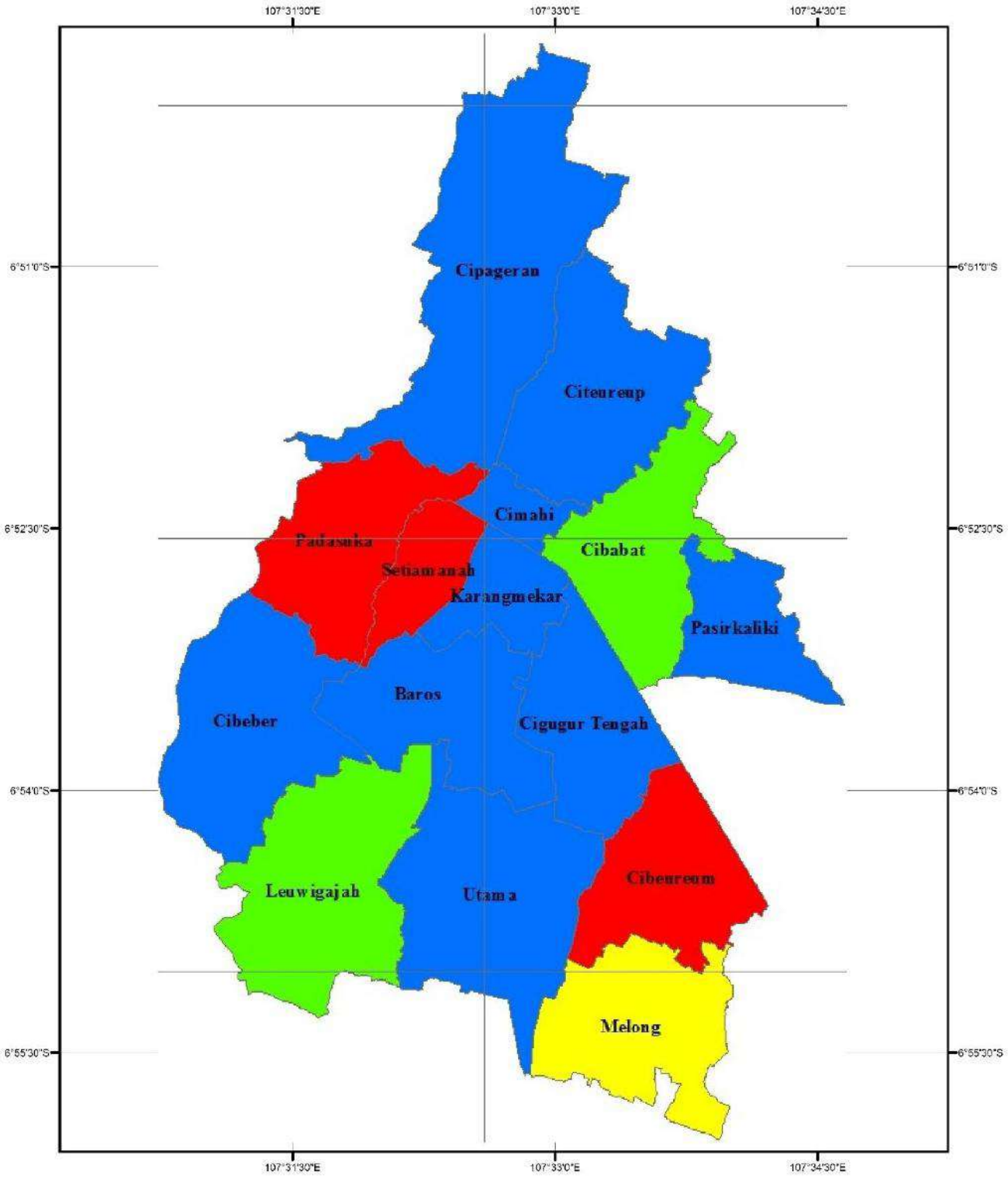

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI
PETA AREA BERISIKO PERSAMPAHAN

Keterangan

1 Risiko Sangat Rendah
2 Risiko Rendah
3 Risiko Tinggi
4 Risiko Sangat Tinggi

N W E S

1:51.000

Indeks Lokasi :

CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA CIMAHI

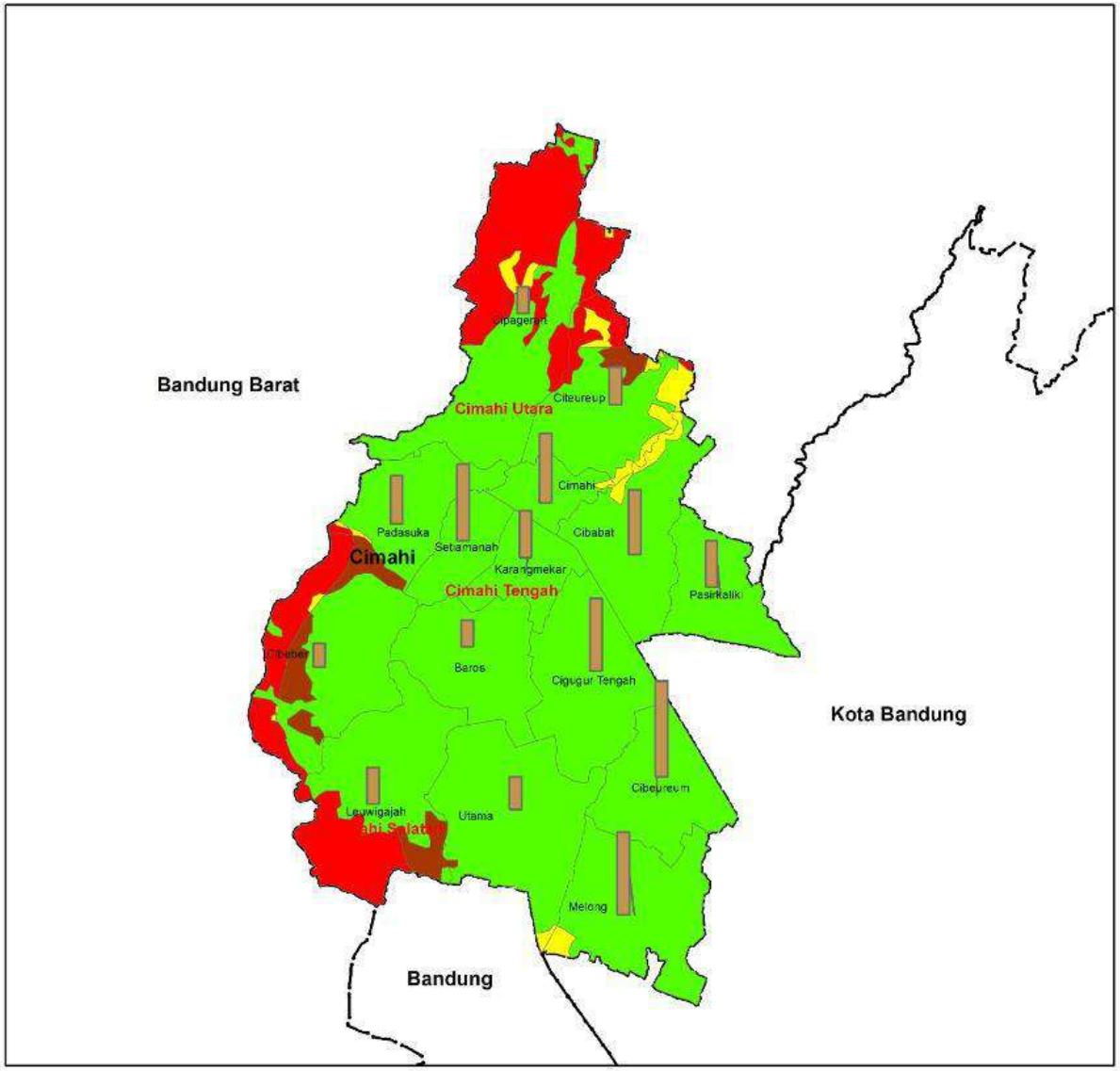

PETA LAHAN KRITIS KOTA CIMAHI

N
W E
S

Skala 1:75.000

0 1.125 2.250 4.500 m

Legenda

- Batas Administrasi Kelurahan Kota Cimahi
- Batas Administrasi Kecamatan Kota Cimahi
- Batas Administrasi Kabupaten/Kota Prov. Jawa Barat
- Potensial Kritis
- Agak Kritis
- Kritis
- Sangat Kritis

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia
2. Peta Lahan Kritis Kota Cimahi Skala 1 : 250.000
3. Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota Prov. Jawa Barat
4. Peta Batas Administrasi Kecamatan Kota Cimahi
5. Peta Batas Administrasi Kelurahan Kota Cimahi

Peta Situasi
Skala 1 : 1.000.000

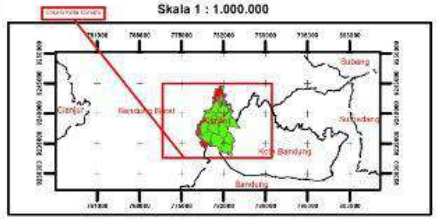

CIMAHI

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP